

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. DASAR HUKUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.

Informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari arah kebijakan umum pemerintah daerah yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, prioritas daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah yang memuat pengelolaan pendapatan daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi yang memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan; penyelenggaraan tugas pembantuan yang memuat tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah dan provinsi beserta permasalahan dan solusi, tugas pembantuan yang diberikan kepada desa serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dibahas dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan rekomendasi sebagai umpan balik untuk perbaikan, penyempurnaan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33).

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Sistematika penulisan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

BAB I      Pendahuluan

BAB II     Perubahan Penjabaran APBD

BAB III    Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

BAB IV     Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

BAB V      Penutup

## **1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH**

### **1.2.1. VISI**

#### **1. Jangka Panjang**

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 adalah **“Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia Yang Agamis Pada Tahun 2025”**.

Terkemuka diartikan sebagai kondisi masyarakat Sumatera Barat yang sudah maju yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang tinggi dan merata. Sedangkan pengertian agamis diartikan dimana kondisi masyarakat yang agamis sebagai sumber motivasi, inspirasi untuk diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, IPTEK, pertahanan, keamanan, lingkungan sehingga terwujud keseimbangan dinamis antara dunia dan akhirat.

Berbasis sumberdaya manusia sebagai landasan umum pembangunan daerah karena pola pembangunan ini diyakini sebagai cara yang tepat sesuai dengan kondisi daerah karena tidak mempunyai sumber daya alam bernilai tinggi seperti minyak dan gas, batubara yang berskala ekonomis. Sasaran utama yang ingin dicapai melalui pembangunan manusia adalah meningkatnya produktivitas kerja yang menuju pada terwujudnya kemakmuran ekonomi dan sosial.

## 2. Jangka Menengah

Visi jangka menengah Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026 merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan tersebut diharapkan dapat diwujudkan pada akhir tahun 2026 secara bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat. Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah : **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**

### **Masyarakat Madani**

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat Madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

### **Sumatera Barat yang Unggul**

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

### **Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. Pertumbuhan ekonomi, yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi



sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi. Keberlanjutan sosial, yaitu menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat. Keberlanjutan lingkungan, yaitu dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

### **1.2.2. MISI**

Misi merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Jangka Panjang**

Misi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”,
- b. Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik,
- c. Mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,
- d. Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,
- e. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

#### **2. Jangka Menengah**

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
- b. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.
- c. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- d. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
- e. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
- f. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- g. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

### 1.2.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Dalam memberikan arah kebijakan dan sararan pokok RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 pada periode keempat ini, visi dan misi Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Penyusunan dan perumusan tujuan dan sasaran ini merupakan operasionalisasi dari visi dan misi pembangunan jangka menengah sehingga implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan lebih terarah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sumatera Barat 2021-2026 yang mengemban 7 (tujuh) misi dijabarkan menjadi 7 (tujuh) tujuan dan 27 sasaran, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1.  
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
Provinsi Sumatera Barat**

<b>VISI</b>		
<b>Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		2. Menurunnya prevalensi stunting
		3. Meningkatnya kualitas Pendidikan
		4. Meningkatnya daya saing masyarakat
Misi 2: Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”	2. Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat.	1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK
		2. Meningkatnya Budaya Literasi
		3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	3. Meningkatkan kesejahteraan petani	1. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		3. Meningkatnya pendapatan Petani Hutan

MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	4. Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1. Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		3. Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		4. Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		5. Meningkatnya pertumbuhan investasi
		6. Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		2. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	6. Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		2. Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana
		3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	7. Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan public

Sejalan dengan dasar-dasar dan landasan pikir penetapan tema RKP 2022 dan juga dengan mempertimbangkan Visi Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yaitu : “Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Strategis Daerah”.

Pemulihan ekonomi melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor transportasi dan pergudangan dengan pertimbangan yang mendasari antara lain :

1. Kontribusi lapangan usaha sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 21,20% dan merupakan sektor terbesar, namun menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 21,69% (Sumbar Dalam Angka, Tahun 2023).
2. Gabungan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat Tahun 2022 16,50% meningkat apabila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,84% (Sumbar Dalam Angka, Tahun 2023).
3. Sektor transportasi dan pergudangan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 10,88% meningkat apabila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 10,29% (Sumbar Dalam Angka, Tahun 2023).

Berdasarkan hal tersebut, prioritas pembangunan yang dilakukan pada tahun 2022 lebih difokuskan pada ketiga sektor diatas dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemic covid yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Disamping itu, prioritas pembangunan juga dilakukan dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**Tabel. 1.2.**  
**Prioritas Pembangunan Daerah**

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD 2021-2026	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2022
1.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
2.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
3.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan
4.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
5.	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing
6.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah

7.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
8.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
9.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas

### 1.3. Data Umum Daerah

#### 1.3.1 Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0<sup>o</sup>54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 3<sup>o</sup> 30' Lintang Selatan (LS), dan 98<sup>o</sup> 36' sampai 101<sup>o</sup> 53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Barat	: Samudera Hindia
Sebelah Timur	: Provinsi Riau dan Jambi
Sebelah Selatan	: Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.1.1-6117 Tahun 2022, luas wilayah Sumatera Barat adalah 42.119,542 km<sup>2</sup> dengan jumlah pulau sebanyak 219 pulau. Luas perairan (laut) ± 52.882,42 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai ± 1.378 km yang terdiri dari ± 375 km garis pantai daratan dan ± 1.003 km panjang garis pantai Kepulauan Mentawai.

Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat dibagi menjadi 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota yang terdiri dari 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah terluas, yaitu 5.983,222 km<sup>2</sup> atau sekitar 14,21% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang merupakan daerah terkecil dengan luas 23,560 km<sup>2</sup> atau 0,056% dari luas Provinsi Sumatera Barat). Wilayah Sumatera Barat juga memiliki 179 kecamatan, 230 kelurahan, dan 1.035 Nagari/Desa. Peta administrasi dan rincian pembagian daerah disajikan pada gambar dan tabel berikut :

**Gambar 1.1.**  
**Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat**



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032

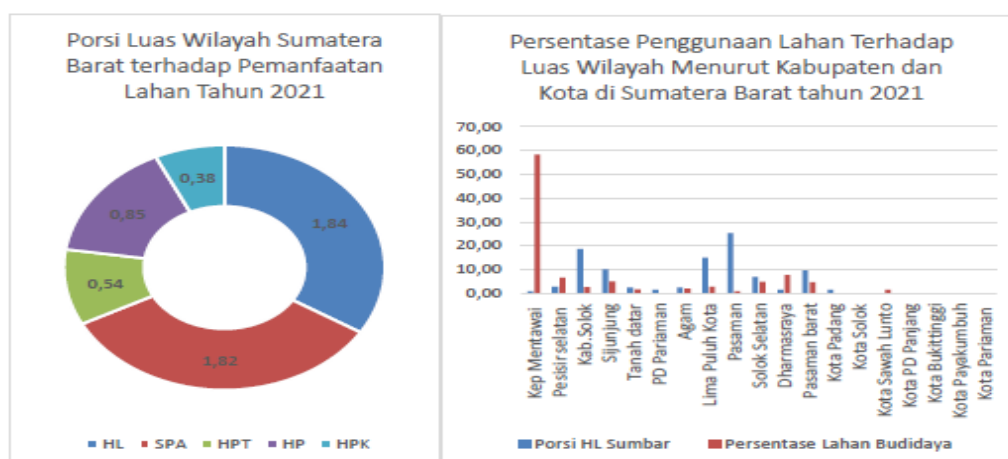
**Tabel 1.3.**  
**Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari/Desa
1	Kab. Kep. Mentawai	5.983,222	10	0	43
2	Kab. Pesisir Selatan	6.045,649	15	0	182
3	Kab. Solok	3.590,404	14	0	74
4	Kab. Sijunjung	3.150,580	8	0	62
5	Kab. Tanah Datar	1.377,186	14	0	75
6	Kab. Padang Pariaman	1.342,266	17	0	103
7	Kab. Agam	2.226,270	19	0	92
8	Kab. Lima Puluh Kota	3.273,405	13	0	79
9	Kab. Pasaman	3.902,444	12	0	62
10	Kab. Solok Selatan	3.282,144	7	0	59
11	Kab. Dharmasraya	2.920,925	11	0	52
12	Kab. Pasaman Barat	3.852,993	11	0	90
13	Kota Padang	694,337	11	104	0
14	Kota Solok	58,720	2	13	0
15	Kota Sawahlunto	231,945	4	10	27
16	Kota Padang Panjang	23,560	2	16	0
17	Kota Bukittinggi	24,173	3	24	0
18	Kota Payakumbuh	74,552	5	47	0
19	Kota Pariaman	64,767	4	16	55
	<b>Jumlah</b>	<b>42.119,542</b>	<b>179</b>	<b>230</b>	<b>1.035</b>

Sumber : Permendagri No. 100.1.1-617 Tahun 2022

Jika dikaitkan dengan pemanfaatan lahan, persentase kawasan lindung di Sumatera Barat mencapai  $\pm$  45,17%, sedangkan luas lahan budidaya mencapai 54,83% atau 23.190,11 Km<sup>2</sup>. Grafik 1.1. memperlihatkan bahwa pemanfaatan lahan Sumatera Barat didominasi oleh hutan lindung dan lahan suaka perlindungan alam. Sedangkan lahan untuk hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi relatif lebih kecil dibandingkan dengan luas wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan terhadap penggunaan lahan ini akan semakin tinggi. Oleh karena itu, pertimbangan kelestarian lingkungan menjadi sangat penting.

### Grafik 1.1 Persentase Penggunaan Lahan Terhadap Luasan Wilayah Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka

Hutan lindung paling luas terdapat di Kabupaten Pasaman yaitu mencapai 25,32% dari total luas Sumatera Barat, kemudian di Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota masing masing mencapai 18,76% dan 15,05%. persentase luas penggunaan terhadap luasan wilayah Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut.

Sebagian besar wilayah dataran Sumatera Barat terdiri dari dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan, sedangkan daerah yang sebagian besar wilayahnya berada di dataran rendah adalah : Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang.

Terdapat beberapa gunung yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dengan gunung tertinggi adalah Gunung Kerinci (3.085 mdpl) yang berada di Kab. Solok Selatan dan Prov. Jambi. Sumatera Barat juga memiliki empat danau besar, yaitu Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Diatas, dan Danau Dibawah.

Sumatera Barat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Kondisi ini mempengaruhi kondisi klimatologi daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan suhu udara rata-rata 25,35°C, kelembaban udara rata-rata yang tinggi yaitu 83,79% serta tekanan udara rata-rata 975,19 mb.

#### 1.3.2. Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan Sensus Penduduk, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebanyak 5.640.629 jiwa, mengalami peningkatan sebanyak 319.140 jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2017 yaitu 5.321.489 jiwa.

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, yang secara universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan

sekaligus yang menikmati hasil pembangunan, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan.

**Tabel 1.4.**  
**Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2017 – 2022**

KABUPATEN /KOTA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>KABUPATEN</b>						
Kep.Mentawai	88.692	90.373	92.021	87.623	88.389	89.401
Pesisir Selatan	457.285	460.716	463.923	504.418	509.618	516.518
Solok	368.691	371.105	373.414	391.497	394.237	397.829
Sijunjung	230.104	233.810	237.376	235.045	237.313	240.317
Tanah Datar	346.578	347.407	348.219	371.704	373.693	376.276
Padang Pariaman	411.003	413.272	415.613	430.626	433.018	436.129
Agam	484.288	487.914	491.282	529.138	534.202	540.905
Lima Puluh Kota	376.072	379.514	382.817	383.525	385.634	388.375
Pasaman	275.728	278.480	281.211	299.851	303.103	307.425
Solok Selatan	165.603	168.411	171.075	182.027	184.854	188.649
Dharmasraya	235.476	241.571	247.579	288.591	231.217	234.713
Pasaman Barat	427.295	435.612	443.722	431.672	436.313	442.479
<b>KOTA</b>						
Padang	927.011	939.112	950.871	909.040	913.448	919.145
Solok	68.602	69.776	71.010	73.438	74.469	75.850
Sawahlunto	61.398	61.898	62.524	65.138	65.687	66.413
Padang Panjang	52.422	52.994	53.693	56.311	56.971	57.850
Bukittinggi	126.804	128.783	130.773	121.028	121.588	122.311
Payakumbuh	131.819	133.703	135.573	139.576	141.184	143.325
Pariaman	86.618	87.626	88.501	94.224	95.294	96.719
<b>SUMBAR</b>	<b>5.321.489</b>	<b>5.382.077</b>	<b>5.441.197</b>	<b>5.534.472</b>	<b>5.580.232</b>	<b>5.640.629</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2015-2025 Hasil SUPAS2015, BPS

Pada umumnya jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Sumatera Barat berjumlah 5.321.489 jiwa, tahun 2018 bertambah menjadi 5.382.077 jiwa, tahun 2019 berjumlah 5.441.197 jiwa, tahun 2020 berjumlah 5.534.472 jiwa, tahun 2021 berjumlah 5.580.232 jiwa dan pada tahun 2022 mencapai 5.640.629 jiwa.

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat, Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Padang Pariaman merupakan 5 (lima) daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022. Sedangkan Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Solok merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang relatif paling kecil. Bonus demografi Sumatera Barat ini perlu dicermati sebagai suatu peluang yang cukup menjanjikan, namun bisa berefek negatif bila tidak disikapi secara bijak.



Berbeda dengan data di atas, data kependudukan yang disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa jumlah penduduk Sumatera Barat adalah sebesar 5.664.988 jiwa. Data tersebut merupakan rekapitulasi data kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap saat dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Data Kependudukan tersebut berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dikonsolidasi dan divalidasi oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sehingga menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB). Sebaran jumlah penduduk per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.5.**  
**Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2022**

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH
<b>KABUPATEN</b>		
1	Pesisir Selatan	520.293
2	Solok	402.295
3	Sijunjung	240.798
4	Tanah Datar	376.018
5	Padang Pariaman	447.170
6	Agam	525.348
7	Lima Puluh Kota	392.094
8	Pasaman	303.993
9	Kep. Mentawai	92.554
10	Dharmasraya	232.597
11	Solok Selatan	182.315
12	Pasaman Barat	440.060
<b>KOTA</b>		
13	Padang	924.840
14	Solok	79.057
15	Sawahlunto	67.769
16	Padang Panjang	61.075
17	Bukittinggi	134.412
18	Payakumbuh	143.610
19	Pariaman	98.690
<b>Sumatera Barat</b>		<b>5.664.988</b>

Sumber : Buku Data Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Semester II Tahun 2022

### 1.3.3 Kondisi Kemiskinan

Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep

ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Ukuran garis kemiskinan antar daerah dan antar Kabupaten/Kota serta dari tahun ke tahun juga saling berbeda. Berdasarkan data tahun 2017 – 2022, mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.6.**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Menurut Daerah di Provinsi Sumatera Barat**  
**Kondisi Maret 2018 – September 2022**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	%tase Penduduk Miskin
<b>Perkotaan</b>			
Maret 2018	496.142	114.840	4,86
Sept 2018	507.557	125.580	4,99
Maret 2019	526.008	121.350	4,76
Sept 2019	551.366	120.580	4,71
Maret 2020	562.567	128.120	4,97
Sept 2020	565.531	141.310	5,22
Maret 2021	580.937	145.580	5,30
Sept 2021	592.302	134.530	4,83
Maret 2022	622.579	137.610	4,95
Sept 2022	668.643	140.330	4,90
<b>Perdesaan</b>			
Maret 2018	460.249	242.290	8,07
Sept 2018	466.430	227.660	7,9
Maret 2019	483.939	226.870	7,88
Sept 2019	510.457	222.510	7,69
Maret 2020	527.830	216.110	7,43
Sept 2020	529.673	223.470	7,83
Maret 2021	556.181	225.090	7,91
Sept 2021	566.224	205.390	7,23
Maret 2022	598.431	197.600	6,86
Sept 2022	638.946	203.490	7,20
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>			
Maret 2018	476.554	357.130	6,65
Sept 2018	485.633	353.240	6,55
Maret 2019	503.652	348.220	6,42
Sept 2019	529.700	343.090	6,29
Maret 2020	544.315	344.230	6,28

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	%tase Penduduk Miskin
Sept 2020	547.240	364.790	6,56
Maret 2021	568.703	370.670	6,63
Sept 2021	579.545	339.930	6,04
Maret 2022	610.941	335.210	5,92
Sept 2022	654.194	343.820	6,04

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Secara umum, pada periode Maret 2018 – September 2022, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah dapat ditekan cukup signifikan dari 357.130 jiwa (Maret 2018), menjadi 343.820 jiwa (September 2022). Secara persentase juga mengalami penurunan dari 6,65% (Maret 2018) menjadi 6,04% (September 2022).

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang juga perlu mendapatkan perhatian disamping jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan tentang penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.7.**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan**  
**Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)**

TAHUN	KOTA	DESA	KOTA+DESA
<b>P1</b>			
Maret 2015	0,785	1,104	0,977
September 2015	1,056	1,392	1,259
Maret 2016	0,752	1,334	1,096
September 2016	1,038	1,180	1,122
Maret 2017	0,752	1,175	1,000
September 2017	0,599	1,275	0,990

TAHUN	KOTA	DESA	KOTA+DESA
Maret 2018	0,663	1,329	1,035
Sept 2018	0,884	1,025	0,959
Maret 2019	0,771	1,093	0,942
Sept 2019	0,538	0,993	0,779
Maret 2020	0,742	1,068	0,915
Sept 2020	0,803	1,171	0,992
Maret 2021	0,866	1,214	1,043
September 2021	0,742	1,177	0,962
Maret 2022	0,647	0,956	0,804
<b>P2</b>			
Maret 2015	0,161	0,224	0,211
September 2015	0,245	0,320	0,290
Maret 2016	0,153	0,304	0,242
September 2016	0,249	0,299	0,278
Maret 2017	0,157	0,278	0,228
September 2017	0,107	0,324	0,233
Maret 2018	0,142	0,320	0,242
Sept 2018	0,212	0,214	0,213
Maret 2019	0,196	0,225	0,211
Sept 2019	0,096	0,191	0,147
Maret 2020	0,164	0,223	0,201
Sept 2020	0,242	0,278	0,261
Maret 2021	0,199	0,282	0,241
September 2021	0,141	0,308	0,225
Maret 2022	0,131	0,196	0,16

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada periode September 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah 0,962 turun 0,157 % poin menjadi 0,804 pada Maret 2022. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan sebesar 0,061 dari 0,225 pada September 2021 menjadi 0,164 pada Maret 2022.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2022. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 0,647 sementara di daerah perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,956, nilai ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di perdesaan memiliki rata-rata (gap) pengeluaran dengan garis kemiskinan yang lebih besar dibandingkan penduduk miskin perkotaan. Kondisi penduduk miskin di perkotaan sedikit lebih baik, dilihat dari nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang lebih kecil dibanding penduduk perdesaan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan pada Maret 2022 sebesar 0,196 sedangkan di perkotaan sebesar 0,131 di periode yang sama. Terjadi penurunan indeks keparahan kemiskinan di perdesaan sebesar 0,112 poin yakni

dari 0,308 pada September 2021 menjadi 0,196 pada Maret 2022. Begitu juga di perkotaan juga terjadi penurunan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,010 % poin yakni dari 0,141 pada September 2021 menjadi 0,131 pada Maret 2022. Artinya, diperlukan usaha yang lebih besar untuk mengentaskan penduduk perdesaan dari kemiskinan daripada di perkotaan.

#### 1.3.4. Kondisi Ketenagakerjaan

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 2.688.160 orang penduduk yang bekerja dan 180.110 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021 terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 106.880 orang (3.87%). Penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 106.720 ribu orang (4.13%) dan pengangguran juga naik sebanyak 160 orang (0.09%).

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah %tase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Pada Agustus 2022, TPAK tercatat sebesar 68,41%, turun 0,24% poin dibanding Agustus 2021. Jumlah Penduduk Usia Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.8.**  
**Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut**  
**Jenis Kegiatan Utama Agustus 2020 – Agustus 2022**

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Agus 2020– Agus 2021		Perubahan Agus 2021–Agus 2022	
	Ribu Orang			Orang	%	Orang	%
Penduduk Usia Kerja	4 016,78	4 077,63	4.138,95`	60,85	1,51	61,32	1,50
Angkatan Kerja	2 772,13	2 761,39	2.868,27	-10,74	-0,39	106,88	3,87
- Bekerja	2 581,52	2 581,44	2.688,16	-0,08	0,06	106,72	4,13
- Pengangguran	190,61	179,95	180,11	-10,66	-5,59	0,16	0,09
Bukan Angkatan Kerja	1 244,64	1 316,24	1.270,68	71,59	5,75	-45,56	-3,46
	%			% Poin			
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,88	6,52	6,28	-0,36		-0,24	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,01	67,72	68,41	-1,29		1,58	

Sumber : Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Pro.Sumbar Edisi Bulan Desember 2022 Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak

terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2022 sebesar 6,28% turun 0,24% poin dibandingkan bulan Agustus 2021 sebesar 6,52%.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan data BPS Sumatera Barat Tahun 2022, terdapat 3 lapangan pekerjaan utama di Sumatera Barat yang paling banyak menyerap tenaga kerja yakni Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Sektor Industri Pengolahan. Sedangkan sektor Pengadaan Listrik, Gas, dan Air Minum, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Keuangan, Asuransi dan Real Estat merupakan lapangan pekerjaan yang menyerap paling sedikit tenaga kerja. Komposisi penduduk bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.9.**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja**  
**Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kondisi Agustus 2020– Agustus 2022**  
**Di Provinsi Sumatera Barat**

No	Status Pekerjaan Utama	Agustus 2020		Agustus 2021		Agustus 2022	
		(Ribu Org)	%	(Ribu Org)	%	(Ribu Org)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	935,13	36,22	895,67	34,70	939,75	34,96
2	Pertambangan dan Penggalian	32,56	1,26	27,80	1,08	38,35	1,43
3	Industri Pengolahan	244,09	9,46	231,07	8,95	230,78	8,58
4	Pengadaan Listrik, Gas, dan Air Minum	9,11	0,35	9,27	0,36	12,58	0,47
5	Konstruksi	131,27	5,08	132,23	5,12	117,99	4,39
6	Perdagangan Besar dan Eceran	493,16	19,1	514,51	19,93	543,34	20,21
7	Transportasi dan Pergudangan	76,52	2,96	78,28	3,03	89,10	3,31
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	189,21	7,33	192,10	7,44	212,59	7,91
9	Informasi dan Komunikasi	14,52	0,56	15,71	0,61	18,41	0,68
10	Jasa Keuangan, Asuransi dan Real Estat	23,78	0,92	27,07	0,73	24,72	0,92
11	Jasa Perusahaan	19,03	0,74	28,97	1,12	32,74	1,22
12	Administrasi Pemerintahan	125,21	4,85	129,05	5,00	122,60	4,56
13	Jasa Pendidikan	157,92	6,12	169,27	6,56	169,70	6,31
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47,93	1,86	58,39	2,26	55,04	2,05
15	Jasa Lainnya	82,11	3,18	72,05	2,79	80,49	2,99

No	Status Pekerjaan Utama	Agustus 2020		Agustus 2021		Agustus 2022	
		(Ribu Org)	%	(Ribu Org)	%	(Ribu Org)	%
<b>TOTAL</b>		<b>2 581,52</b>	<b>100</b>	<b>2 581,44</b>	<b>100</b>	<b>2688,16</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal terdiri dari buruh/karyawan/pegawai dan mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar. Sedangkan penduduk pada kegiatan informal terdiri dari berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 933,87 ribu orang (34,74%), sedangkan yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 1754,29 ribu orang (65,25%). Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal pada Agustus 2022 turun sebesar 0,49% poin jika dibandingkan Agustus 2021, tetapi apabila dibandingkan Agustus 2020 pekerja formal naik sebesar 1,02% poin. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.10.

**Tabel 1.10.**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja**  
**Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Sumatera Barat**  
**Kondisi Agustus 2020 – Agustus 2022**

No	Status Pekerjaan Utama	Agustus 2020		Agustus 2021		Agustus 2022	
		(Ribu Orang)	%	(Ribu Orang)	%	(Ribu Orang)	%
<b>A.</b>	<b>Kegiatan Formal</b>	<b>870,5</b>	<b>33,72</b>	<b>909,32</b>	<b>35,23</b>	<b>933,87</b>	<b>34,74</b>
1	Buruh/Karyawan/ Pegawai	777,87	30,13	820,78	31,80	840,70	31,27
2	Berusaha Dibantu Buruh Tetap	92,63	3,59	88,54	3,43	93,17	3,47
<b>B.</b>	<b>Kegiatan Informal</b>	<b>1711,02</b>	<b>66,28</b>	<b>1672,13</b>	<b>64,77</b>	<b>1754,29</b>	<b>65,25</b>
3	Berusaha Sendiri	537,97	20,84	543,68	21,06	653,86	24,32
4	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	465,9	18,05	429,02	16,62	433,37	16,12
5	Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	414,38	16,05	395,40	15,32	387,30	14,41
6	Pekerja Bebas di Pertanian	169,22	6,55	174,58	6,76	159,22	5,92
7	Pekerja Bebas di Non Pertanian	123,55	4,79	129,45	5,01	120,54	4,48
<b>TOTAL</b>		<b>2 581,52</b>	<b>100,00</b>	<b>2 581,44</b>	<b>100,00</b>	<b>2.688,16</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari sisi tingkat Pendidikan tertinggi maka pada Februari 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka dari Diploma I/II/III merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 12,41%. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 2,66%. Dibandingkan Februari 2021, hampir

semua kategori Pendidikan mengalami penurunan kecuali SLTA, SMK dan Diploma I/II/III naik masing-masing 0,64 % poin, 3.35 % poin dan 0,76% poin.

**Tabel 1.11.**  
**Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut**  
**Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat**  
**Kondisi Februari 2020– Februari 2022 (%)**

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2020		2021		2022
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
1	SD ke bawah	3.39	3.58	3.48	4.03	2.66
2	SLTP	5.46	4.92	5.97	6.31	4.90
3	SLTA	5.12	8.38	6.88	7.71	7.52
4	SMK	7.74	10.58	7.81	8.80	11.16
5	Diploma I/II/III	4.02	9.12	11.65	8.35	12.41
6	Universitas	8.11	11.50	11.42	8.09	8.43
	JUMLAH	33,84	48,08	47,21	43,29	47,08

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

### 1.3.5. Kondisi Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan metode baru yang dirilis Tahun 2015. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) serta standar hidup layak (*decent standard of living*).

Umur harapan hidup saat lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, yang dihitung dari sensus dan survey kependudukan.

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada penduduk berusia 7 tahun ke atas untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan pengeluaran perkapita ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli.



Hasil perhitungan IPM di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan penghitungan metode baru pada Tahun 2022 adalah 73,26 dengan rincian komponen Umur Harapan Hidup saat lahir adalah 69,31 tahun, Harapan Lama Sekolah 14,10 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah 9,18 tahun dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Rp.11.130,-(Ribu/Orang/Tahun), seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.12.**  
**Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022**

No	KOMPONEN IPM	SATUAN	TAHUN		
			2020	2021	2022
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69.47	69.59	69.90
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.02	14.09	14.10
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.99	9.07	9.18
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/Orang /Th)	10.733	10.790	11.130
<b>Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat</b>			<b>72.38</b>	<b>72.65</b>	<b>73.26</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dibandingkan dengan tahun 2020, IPM Sumatera Barat naik dari 72,38 menjadi 73,26 pada tahun 2022. Peningkatan IPM Sumatera Barat juga di tolong oleh kenaikan IPM pada tingkat Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022, IPM tertinggi di Sumatera Barat yaitu Kota Bukittinggi sebesar 81.42 dan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 62.19, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.13.**  
**Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017-2022**

KABUPATEN/KOTA	Indeks Pembangunan Manusia					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	59,25	60,28	61,26	61,09	61,35	62,19
Kab. Pesisir Selatan	68,74	69,40	70,08	69,90	70,03	70,84
Kab. Solok	67,86	68,60	69,08	69,08	69,24	70,02
Kab. Sijunjung	66,60	66,97	67,66	67,74	67,86	68,69
Kab. Tanah Datar	70,37	71,25	72,14	72,33	72,46	73,29
Kab. Padang Pariaman	68,90	69,71	70,59	70,61	70,76	71,63
Kab. Agam	71,10	71,70	72,37	72,46	72,57	73,29
Kab. Limapuluh Kota	68,69	69,17	69,67	69,47	69,68	70,28
Kab. Pasaman	64,94	65,60	66,46	66,64	66,77	67,41
Kab. Solok Selatan	67,81	68,45	68,94	69,04	69,23	69,71
Kab. Dharmas Raya	70,40	70,86	71,52	71,51	71,76	72,30

Kab. Pasaman Barat	66,83	67,43	68,21	68,49	68,76	69,57
Kota Padang	81,58	82,25	82,68	82,82	82,90	83,29
Kota Solok	77,44	77,89	78,38	78,29	78,41	79,23
Kota Sawah Lunto	71,13	71,72	72,39	72,64	72,88	73,73
Kota Padang Panjang	77,01	77,30	78,00	77,93	77,97	78,78
Kota Bukit Tinggi	79,80	80,11	80,71	80,58	80,70	81,42
Kota Payakumbuh	77,91	78,23	78,95	78,90	79,08	79,53
Kota Pariaman	75,71	76,26	76,70	76,90	77,07	77,65
Sumatera Barat	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65	73,26

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada Tahun 2022, IPM Sumatera Barat (73,26) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata IPM Nasional yaitu sebesar 72,91 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 1.14.**  
**IPM Menurut Provinsi se Indonesia dan IPM Rata-Rata Nasional**

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	70,00	70,60	71,19	71,90	71,99	72,18	72,80
Sumatera Utara	70,00	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00	72,71
Sumatera Barat	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65	73,26
Riau	71,20	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94	73,52
Jambi	69,62	69,99	70,65	71,26	71,29	71,63	72,14
Sumatera Selatan	68,24	68,86	69,39	70,02	70,01	70,24	70,90
Bengkulu	69,33	69,95	70,64	71,21	71,40	71,64	72,16
Lampung	67,65	68,25	69,02	69,57	69,69	69,90	70,45
Kep. Bangka Belitung	69,55	69,99	70,67	71,30	71,47	71,69	72,24
Kep. Riau	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46
Dki Jakarta	79,60	80,06	80,47	80,76	80,77	81,11	81,65
Jawa Barat	70,05	70,69	71,30	72,03	72,09	72,45	73,12
Jawa Tengah	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79
Di Yogyakarta	78,38	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22	80,64
Jawa Timur	69,74	70,27	70,77	71,50	71,71	72,14	72,75
Banten	70,96	71,42	71,95	72,44	72,45	72,72	73,32
Bali	73,65	74,30	74,77	75,38	75,50	75,69	76,44
Nusa Tenggara Barat	65,81	66,58	67,30	68,14	68,25	68,65	69,46
Nusa Tenggara Timur	63,13	63,73	64,39	65,23	65,19	65,28	65,90
Kalimantan Barat	65,88	66,26	66,98	67,65	67,66	67,90	68,63
Kalimantan Tengah	69,13	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25	71,63
Kalimantan Selatan	69,05	69,65	70,17	70,72	70,91	71,28	71,84
Kalimantan Timur	74,59	75,12	75,83	76,61	76,24	76,88	79,68

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Utara	69,20	69,84	70,56	71,15	70,63	71,19	71,83
Sulawesi Utara	71,05	71,66	72,20	72,99	72,93	73,30	73,81
Sulawesi Tengah	67,47	68,11	68,88	69,50	69,55	69,79	70,28
Sulawesi Selatan	69,76	70,34	70,90	71,66	71,93	72,24	72,82
Sulawesi Tenggara	69,31	69,86	70,61	71,20	71,45	71,66	72,23
Gorontalo	66,29	67,01	67,71	68,49	68,68	69,00	69,81
Sulawesi Barat	63,60	64,30	65,10	65,73	66,11	66,36	66,92
Maluku	67,60	68,19	68,87	69,45	69,49	69,71	70,22
Maluku Utara	66,63	67,20	67,76	68,70	68,49	68,76	69,47
Papua Barat	62,21	62,99	63,74	64,70	65,09	65,26	65,89
Papua	58,05	59,09	60,06	60,84	60,44	60,62	61,39
Indonesia	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah salah satu komponen IPM yang melihat jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalankan pendidikan formal. RLS tertinggi di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 berada di Kota Padang Panjang sebesar 11,63 tahun, diikuti oleh Kota Padang 11,59 tahun, Kota Bukittinggi 11,34 tahun, dan Kota Solok 11,04 tahun. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata lama sekolahnya adalah 7,2 tahun. Kondisi rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.15.**  
**Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2017-2022**

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	6,69	6,95	7,08	7,09	7,20	7,20
Kab. Pesisir Selatan	8,13	8,14	8,25	8,26	8,27	8,27
Kab. Solok	7,60	7,84	7,85	7,86	7,87	7,87
Kab. Sijunjung	7,72	7,77	8,10	8,11	8,12	8,12
Kab. Tanah Datar	8,14	8,44	8,45	8,61	8,62	8,62
Kab. Padang Pariaman	7,21	7,50	7,86	7,87	7,88	7,88
Kab. Agam	8,39	8,69	8,85	8,96	8,57	8,57
Kab. Limapuluh Kota	7,96	7,97	7,98	7,99	8,07	8,07
Kab. Pasaman	7,65	7,66	7,86	8,09	8,10	8,10
Kab. Solok Selatan	8,00	8,15	8,16	8,28	8,32	8,32
Kab. Dharmas Raya	8,24	8,25	8,46	8,47	8,55	8,55
Kab. Pasaman Barat	7,85	7,86	8,06	8,19	8,27	8,27

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Padang	11,32	11,33	11,34	11,58	11,59	11,59
Kota Solok	10,95	11,01	11,02	11,03	11,04	11,04
Kota Sawah Lunto	9,93	9,94	9,97	10,17	10,32	10,32
Kota Padang Panjang	11,43	11,44	11,45	11,62	11,63	11,63
Kota Bukit Tinggi	11,30	11,31	11,32	11,33	11,34	11,34
Kota Payakumbuh	10,45	10,46	10,72	10,73	10,81	10,81
Kota Pariaman	10,10	10,36	10,37	10,59	10,67	10,67
<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>8,72</b>	<b>8,76</b>	<b>8,92</b>	<b>8,99</b>	<b>9,07</b>	<b>9,07</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Komponen pembentukan IPM yang lain adalah Umur Harapan Hidup (UHH), yang memperlihatkan derajat kesehatan suatu masyarakat, dihitung dari sensus dan survey kependudukan. Di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022, UHH yang tertinggi berada di Kota Kota Bukittinggi sebesar 74,82 tahun, diikuti oleh Kota Payakumbuh 74,14 tahun dan Kota Solok 74,06 tahun. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Umur Harapan Hidup 64,93 tahun. Kondisi rata-rata Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.16.**  
**Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota**  
**Se Sumatera Barat Tahun 2017-2022**

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	64,37	64,49	64,68	64,73	64,73	64,93
Kab. Pesisir Selatan	70,23	70,45	70,73	70,86	70,96	71,25
Kab. Solok	67,65	67,95	68,34	68,58	68,79	69,19
Kab. Sijunjung	65,44	65,69	66,02	66,21	66,36	66,70
Kab. Tanah Datar	69,11	69,38	69,73	69,94	70,12	70,49
Kab. Padang Pariaman	67,96	68,23	68,58	68,79	68,97	69,34
Kab. Agam	71,57	71,83	72,17	72,37	72,53	72,89
Kab. Limapuluh Kota	69,31	69,47	69,70	69,79	69,84	70,08
Kab. Pasaman	66,54	66,82	67,18	67,40	67,59	67,96
Kab. Solok Selatan	66,92	67,21	67,58	67,81	68,01	68,38
Kab. Dharmas Raya	70,44	70,73	71,10	71,33	71,53	71,90
Kab. Pasaman Barat	67,15	67,37	67,67	67,82	67,94	68,25
Kota Padang	73,20	73,35	73,57	73,65	73,69	73,93
Kota Solok	72,92	73,14	73,45	73,61	73,73	74,06
Kota Sawahlunto	69,39	69,59	69,87	70,00	70,10	70,40
Kota Padang Panjang	72,46	72,58	72,77	72,82	72,82	73,02
Kota Bukit Tinggi	73,69	73,91	74,22	74,38	74,50	74,82
Kota Payakumbuh	73,13	73,33	73,61	73,74	73,84	74,14
Kota Pariaman	69,67	69,87	70,15	70,28	70,38	70,67

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>68,78</b>	<b>69,01</b>	<b>69,31</b>	<b>69,47</b>	<b>69,59</b>	<b>69,90</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Komponen pembentukan IPM lainnya adalah pengeluaran perkapita yang ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli di Sumatera Barat. Pada tahun 2022 pengeluaran perkapita Sumatera Barat adalah Rp.11.130.000,00 Rupiah/Orang/Tahun. Pengeluaran perkapita yang tertinggi terdapat di Kota Padang yaitu sebesar Rp.14.889.000,00/Orang/Tahun, diikuti oleh Kota Payakumbuh sebesar Rp.13.687.000,00/Orang/Tahun dan Kota Bukittinggi sebesar Rp.13.586.000,00/Orang/ Tahun. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp.6.567.000,00/Orang/Tahun. Perkembangan pengeluaran perkapita di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.17.**

**Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2017-2022 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)**

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	6.010	6.211	6.429	6.281	6.321	6.567
Kab. Pesisir Selatan	8.819	9.089	9.444	9.212	9.270	9.686
Kab. Solok	9.743	10.035	10.309	10.171	10.215	10.539
Kab. Sijunjung	10.093	10.277	10.395	10.361	10.389	10.582
Kab. Tanah Datar	10.331	10.417	10.709	10.588	10.616	10.695
Kab. Padang Pariaman	10.579	10.919	11.158	10.998	11.050	11.159
Kab. Agam	9.388	9.489	9.780	9.651	9.662	10.171
Kab. Limapuluh Kota	9.151	9.500	9.842	9.596	9.668	10.035
Kab. Pasaman	7.882	8.238	8.599	8.425	8.440	8.619
Kab. Solok Selatan	9.891	10.199	10.505	10.325	10.367	10.560
Kab. Dharmas Raya	10.951	11.189	11.431	11.273	11.324	11.650
Kab. Pasaman Barat	8.704	8.979	9.180	9.047	9.089	9.381
Kota Padang	13.957	14.312	14.728	14.481	14.540	14.889
Kota Solok	11.673	11.968	12.337	12.117	12.168	12.515
Kota Sawah Lunto	93.43	9.765	10.238	10.182	10.195	10.537
Kota Padang Panjang	10.240	10.440	11.013	10.734	10.754	11.153
Kota Bukit Tinggi	12.816	13.035	13.586	13.282	13.331	13.633
Kota Payakumbuh	12.858	13.114	13.464	13.281	13.317	13.687
Kota Pariaman	13.425	12.611	12.958	12.796	12.818	13.150
<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>10.306</b>	<b>10.638</b>	<b>10.925</b>	<b>10.733</b>	<b>10.790</b>	<b>11.130</b>

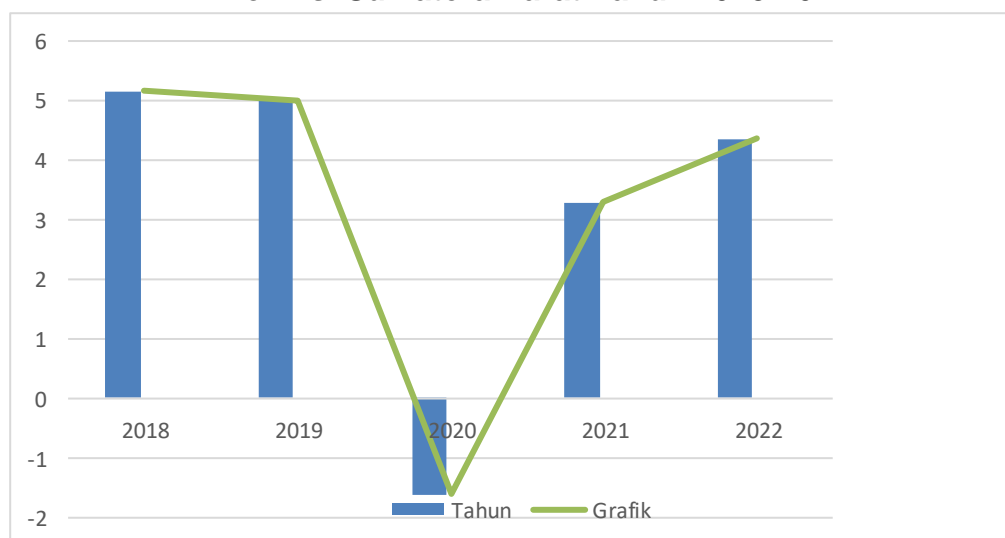
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

### 1.3.6. Kondisi Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diukur berdasarkan pertambahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) antara 2 (dua) tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menggambarkan bagaimana capaian pembangunan suatu daerah. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari penghitungan PDRB atas dasar harga konstan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2017- 2022 cenderung melambat, kecuali di tahun 2020 mengalami kontraksi. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama lima tahun ini trennya melambat tetapi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tidak terlalu jauh nilainya dari pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian Sumatera Barat yang sempat tumbuh 5,30% pada tahun 2017 justru terus menurun hingga mencapai angka 5,05% pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 bahkan lebih memperparah kondisi perekonomian daerah yang berkontraksi sekitar -1,6%. Kondisi perekonomian baik global maupun nasional pada tahun 2021 ternyata mengalami rebound dengan kondisi yang lebih membaik. Capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,29%, namun masih dibawah rata-rata nasional yaitu sebesar 3,69%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 4,36%.

**Grafik 1.2**  
**PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2022

Struktur ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat sebesar 48,58%. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 21,20%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 21,69%. Berikutnya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yang memberikan kontribusi sebesar 16,50%, meningkat apabila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,84%. Laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2018-2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

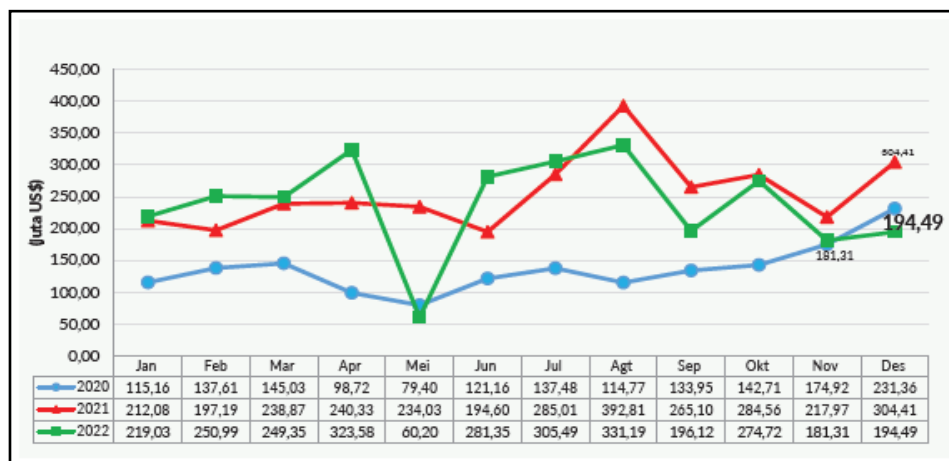
**Tabel 1.18.**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK) Tahun 2018-2022 (%)**

	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,52	2,48	1.16	2.19	3,52
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,79	6,22	-1.31	-1.77	1,94
3.	Industri Pengolahan	-0,57	-1,98	-0.54	3.68	1,74
4.	Pengadaan Listrik & Gas	4,09	4,20	-6.81	3.15	3,21
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	2,24	6,10	-1.04	5.53	4,37
6.	Konstruksi	7,04	8,47	-2.95	2.18	2,51
7.	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,03	7,29	-1.14	5.12	5,60
8.	Transportasi dan Pergudangan	6,47	4,75	-16.10	2.56	5,73
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,23	8,11	-15.95	5.63	15,80
10.	Informasi dan Komunikasi	8,57	8,73	9.55	6.42	7,02
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,99	2,29	1.34	8.46	4,54
12.	Real Estate	4,67	6,78	0.22	2.41	5,78
13.	Jasa Perusahaan	5,45	6,20	-3.98	1.13	7,33
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	5,97	6.96	-0.59	0.86	0,89
15.	Jasa Pendidikan	7,19	7,94	5.03	1.84	5,13
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,28	7,54	8.83	5.88	4,54
17.	Jasa Lainnya	7,86	7,50	-10.10	7.10	11,88
<b>PDRB SUMATERA BARAT</b>		<b>5,16</b>	<b>5,01</b>	<b>-1.62</b>	<b>3.29</b>	<b>4,36</b>

Sumber : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2022

Perkembangan ekspor Sumatera Barat pada Tahun 2022 cenderung mengalami fluktuasi. Pada bulan Desember 2022, nilai ekspor Sumatera Barat tercatat sebesar US\$194,49 juta atau naik sebesar 7,27% dibandingkan dengan ekspor November 2022 yaitu sebesar US\$181,31 juta. Ekspor asal Sumatera Barat Desember 2022 ini turun sebesar 36,11 % bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Grafik 1.3**  
**Perkembangan Ekspor Asal Sumatera Barat Tahun 2020 – 2022**



Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Ekspor asal Sumatera Barat pada Desember 2022 dikirim ke beberapa negara tujuan dengan nilai ekspor terbesar adalah ke Pakistan sebesar US\$80,38 juta, selanjutnya ke India sebesar US\$70,42 juta dan ke Spanyol sebesar US\$12,20 juta.

Ekspor asal Sumatera Barat ke negara Pakistan memiliki peran yang terbesar terhadap total ekspor Sumatera Barat pada Januari-Desember 2022, yaitu sebesar 30,58%. Selanjutnya ekspor ke India memberikan peran sebesar 30,07% dan ekspor ke Bangladesh memberikan peran sebesar 7,21%.

Komoditas utama yang di ekspor ke Pakistan pada Desember 2022 adalah Refined Palm Oil. Sementara itu komoditas utama yang diekspor ke India pada Desember 2022 adalah *Crude Palm Oil*.

**Tabel 1.19.**  
**Nilai Ekspor Asal Sumatera Barat menurut Negara Tujuan**  
**Desember 2021–Desember 2022**

No	Negara Tujuan	Nilai FOB (juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Jan-Des 2022 (%)
		Des 2021	Nov 2022	Des 2022	Jan-Des 2021	Jan-Des 2022	Des 2022 thd Nov 2022	Des 2022 thd Des 2021	Jan-Des 2022 thd Jan-Des 2021	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pakistan	155,24	56,04	80,38	864,67	87,90	43,44	-48,23	1,41	30,58
2	India	31,91	59,74	70,42	463,88	862,37	17,88	120,68	85,91	30,07
3	Spain	0,33	0,07	12,20	84,93	59,67	17708,83	3554,28	-29,74	2,08

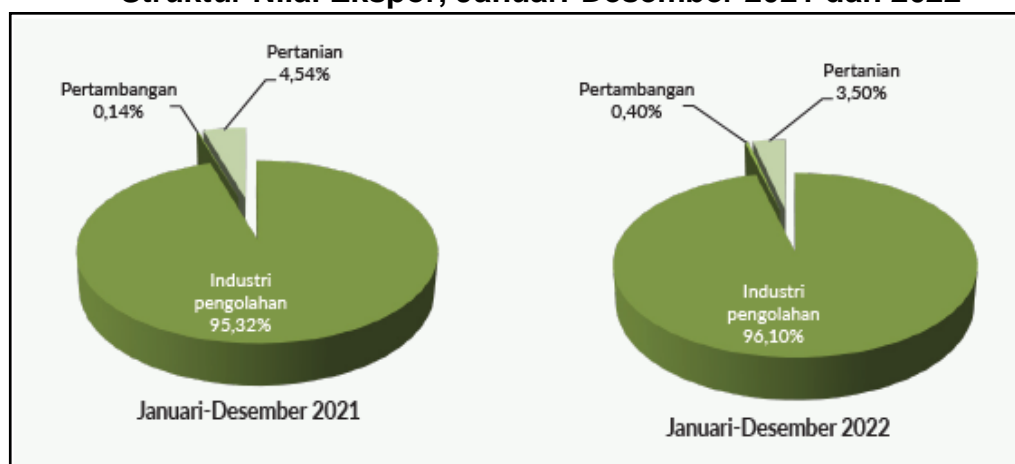


4	United States	43,88	5,00	7,39	216,65	158,09	47,78	-83,16	-27,03	5,51
5	Bangladesh	20,23	30,70	5,95	297,31	206,88	-80,63	-70,60	-30,42	7,21
6	China	0,79	4,92	4,92	313,09	179,26	-0,08	526,10	-42,74	6,25
7	Japan	10,33	5,91	4,04	94,61	85,37	-31,63	-60,88	-9,77	2,98
8	Myanmar	19,35	7,55	3,34	200,47	124,39	-55,75	-82,73	-37,95	4,34
9	Korea, Republic Of	0,00	0,00	1,93	7,69	7,28	-	409.346,82	-5,33	0,25
10	Netherlands	6,95	0,80	1,00	64,41	46,26	24,82	-85,56	-28,18	1,61
<b>Total 10 Negara Tujuan</b>		<b>289,00</b>	<b>170,73</b>	<b>191,56</b>	<b>2.607,71</b>	<b>2.606,48</b>	<b>12,20</b>	<b>-33,72</b>	<b>-0,05</b>	<b>90,89</b>
<b>Lainnya</b>		<b>15,41</b>	<b>10,57</b>	<b>2,93</b>	<b>459,24</b>	<b>261,35</b>	<b>-72,30</b>	<b>-81,00</b>	<b>-43,09</b>	<b>9,11</b>
<b>Total Ekspor</b>		<b>304,41</b>	<b>181,31</b>	<b>194,49</b>	<b>3.066,95</b>	<b>2.867,83</b>	<b>7,27</b>	<b>-36,11</b>	<b>-6,49</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Struktur Nilai Ekspor Sumatera Barat pada periode Januari-Desember 2021 dan 2022 dapat dilihat pada diagram berikut

**Grafik 1.4**  
**Struktur Nilai Ekspor, Januari-Desember 2021 dan 2022**



Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Ekspor produk industri pengolahan pada bulan Desember 2022, mengalami peningkatan sebesar 11,51% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total ekspor Sumatera Barat periode Januari-Desember 2022 berada pada besaran 96,10%. Peranan dan perkembangan ekspor asal Sumatera Barat menurut sektor pada Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.20.**  
**Nilai Ekspor Asal Sumatera Barat menurut Sektor**  
**Desember 2021–Desember 2022**

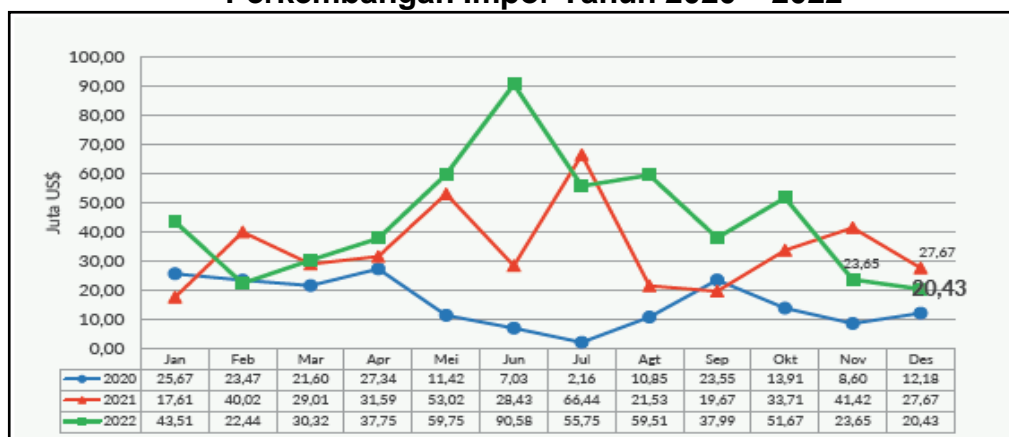
No	Sektor	Nilai FOB (juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Jan-Des 2022 (%)
		Des 2021	Nov 2021	Des 2022	Jan-Des 2021	Jan-Des 2022	Des 2022 thd Nov 2022	Des 2022 thd Des 2021	Jan-Des 2022 thd Jan-Des 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Industri Pengolahan	289,73	169,61	189,13	2.923,40	2.755,93	11,51	-34,72	-5,73	96,10
2	Pertambangan	2,10	4,66	-	4,30	11,42	-	-	165,40	0,40
3	Pertanian	12,59	7,03	5,63	139,25	100,48	-23,78	-57,45	-27,84	3,50
<b>Total Ekspor</b>		<b>304,41</b>	<b>181,31</b>	<b>194,49</b>	<b>3.066,95</b>	<b>2.867,83</b>	<b>7,27</b>	<b>-36,11</b>	<b>-6,49</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Nilai impor Sumatera Barat yang tercatat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sumatera Barat selama Desember 2022

sebesar US\$20,43 juta, mengalami penurunan sebesar 26,15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

**Grafik 1.5**  
**Perkembangan Impor Tahun 2020 – 2022**



Dari total impor pada Desember 2022 berdasarkan negara asal, impor terbesar berasal dari Singapore senilai US\$11,48 juta. Impor dari Singapore didominasi oleh golongan bahan bakar mineral (HS 27), yaitu Motor Spirit, *unleaded, of RON 90 and above but below RON 97, unblended*. Secara kumulatif, impor dari Singapore mendominasi impor Sumatera Barat pada Januari-Desember 2022, yaitu 61,04 % dari total impor.

**Tabel 1.21.**  
**Nilai Impor Sumatera Barat menurut Negara Asal**  
**Desember 2021–Desember 2022**

No	Negara	Nilai CIF (juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Jan-Des 2022 (%)
		Des 2021	Nov 2021	Des 2022	Jan-Des 2021	Jan-Des 2022	Des 2022 thd Nov 2022	Des 2022 thd Des 2021	Jan-Des 2022 thd Jan-Des 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Singapore	27,46	14,77	11,48	218,88	325,55	-22,25	-58,18	48,74	61,04
2	Malaysia	-	0,25	7,76	98,21	108,29	3.000,86	-	10,27	20,30
3	China	0,01	0,93	0,61	7,62	11,61	-34,86	4.811,44	52,29	2,18
4	Spain	-	-	0,52	0,18	0,59	-	-	219,74	0,11
5	Turkey	-	-	0,06	-	0,06	-	-	-	0,01-
6	Canada	-	-	-	11,88	27,21	-	-	129,03	5,10
<b>Total 6 Negara asal</b>		<b>27,47</b>	<b>15,95</b>	<b>20,43</b>	<b>336,77</b>	<b>473,32</b>	<b>28,11</b>	<b>-25,62</b>	<b>40,54</b>	<b>88,74</b>
<b>Lainnya</b>		<b>0,20</b>	<b>7,70</b>	<b>0,00</b>	<b>73,35</b>	<b>60,03</b>	<b>-99,97</b>	<b>-98,69</b>	<b>-18,15</b>	<b>11,26</b>
<b>Total Impor</b>		<b>27,67</b>	<b>23,65</b>	<b>20,43</b>	<b>410,12</b>	<b>533,35</b>	<b>-13,58</b>	<b>-26,15</b>	<b>30,05</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari total impor Desember 2022 senilai US\$20,43 juta, sebagian besar merupakan golongan bahan baku/penolong. Namun nilai ini mengalami penurunan sebesar 12,89% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nilai impor Sumatera Barat menurut Golongan Barang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.22.**  
**Nilai Impor Sumatera Barat menurut Golongan Barang**  
**Desember 2021–Desember 2022**

No	Golongan Barang	Nilai CIF (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Jan-Des 2022
		Des 2021	Nov 2022	Des 2022	Jan-Des 2021	Jan-Des 2022	Des 2022 thd Nov 2022	Des 2022 thd Des 2021	Jan-Des 2022 thd Jan-Des 2021	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bahan Baku/Penolong	27,67	23,15	20,17	401,53	515,98	-12,89	-27,12	28,50	96,74
2	Barang Konsumsi	-	-	-	0,25	0,00	-	-	-99,52	0,00
3	Barang Modal	-	0,50	0,27	8,34	17,36	-46,08	-	108,28	3,26
	<b>Total Impor</b>	<b>27,67</b>	<b>23,65</b>	<b>20,43</b>	<b>410,12</b>	<b>533,35</b>	<b>-13,58</b>	<b>-26,15</b>	<b>30,05</b>	<b>100,00</b>

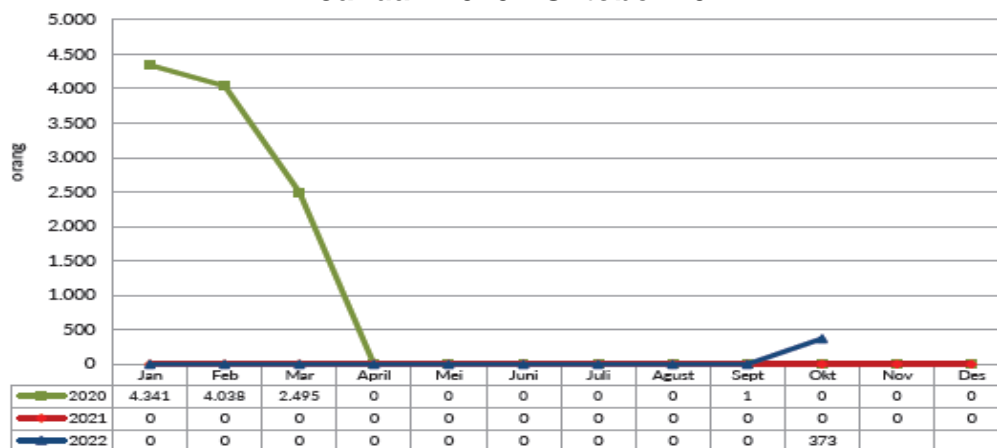
Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada sektor pariwisata, Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan wisata yang menarik di Indonesia. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat dengan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha sekaligus memperkenalkan identitas dan kebudayaan bangsa.

Perkembangan pariwisata di Sumatera Barat dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan, Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) dan rata-rata lama menginap untuk tamu asing dan tamu dalam negeri di Sumatera Barat. Grafik 1.8. menunjukkan perkembangan wisatawan mancanegara (wisman) dari bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2022.

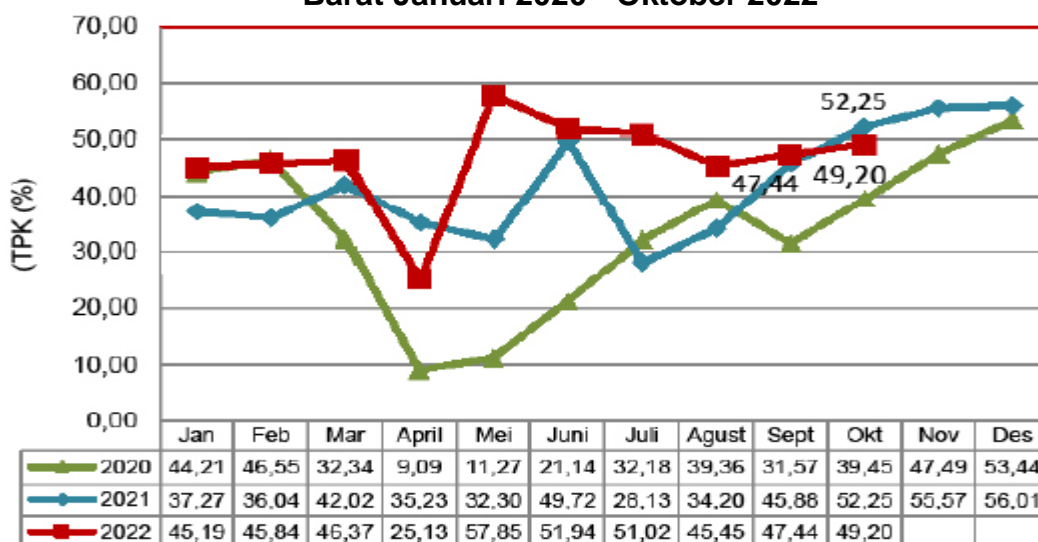
Pada Bulan April 2020 sampai dengan September 2022 tidak ada kunjungan wisman karena bandara masih menutup penerbangan dari dan ke luar negeri karena pandemic covid-19, tetapi pada Oktober 2022 sudah ada wisman yang datang ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Hal ini seiring dengan dibukanya penerbangan BIM - Malaysia dengan jumlah wisman sebanyak 373 orang, sejak catatan kunjungan terakhir yaitu 2.495 orang pada keadaan Maret 2020.

**Grafik 1.6**  
**Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman ke Sumatera Barat**  
**Januari 2020 - Oktober 2022**



Tingkat Penghunian Kamar (TPK) adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia (dalam %), yang menunjukkan apakah suatu akomodasi diminati oleh pengunjung atau tidak. TPK hotel berbintang pada Oktober 2022 tercatat sebesar 49,20%, meningkat sebesar 1,76% poin dibandingkan September 2022 yang tercatat sebesar 47,44%. Namun, jika dibandingkan dengan TPK Oktober 2021 yang tercatat sebesar 52,25%, TPK Oktober 2022 mengalami penurunan sebesar 3,05% poin. Gambaran perkembangan TPK Sumatera Barat pada Bulan Januari – Oktober 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 1.7**  
**Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di Sumatera Barat Januari 2020 - Oktober 2022**



Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

TPK hotel berbintang menurut klasifikasi hotel selama periode Oktober 2021, September 2022, dan Oktober 2022 disajikan pada berikut ini :

**Tabel 1.23**  
**TPK Hotel Bintang menurut Klasifikasi Bintang di Sumatera Barat**

No	Klasifikasi Bintang	TPK (%)			Perubahan Okt 2022 thd Sept 2022 (poin)	Perubahan Okt 2022 thd Okt 2021 (poin)
		Okt 2021	Sept 2022	Okt 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bintang 1	23,55	24,69	25,86	1,17	2,31
2.	Bintang 2	50,52	36,62	39,44	2,82	-11,08
3.	Bintang 3	58,73	50,69	54,70	4,01	-4,03
4.	Bintang 4	60,16	61,06	61,40	0,34	1,24
	<b>Seluruh Bintang</b>	<b>52,25</b>	<b>47,44</b>	<b>49,20</b>	<b>1,76</b>	<b>-3,05</b>

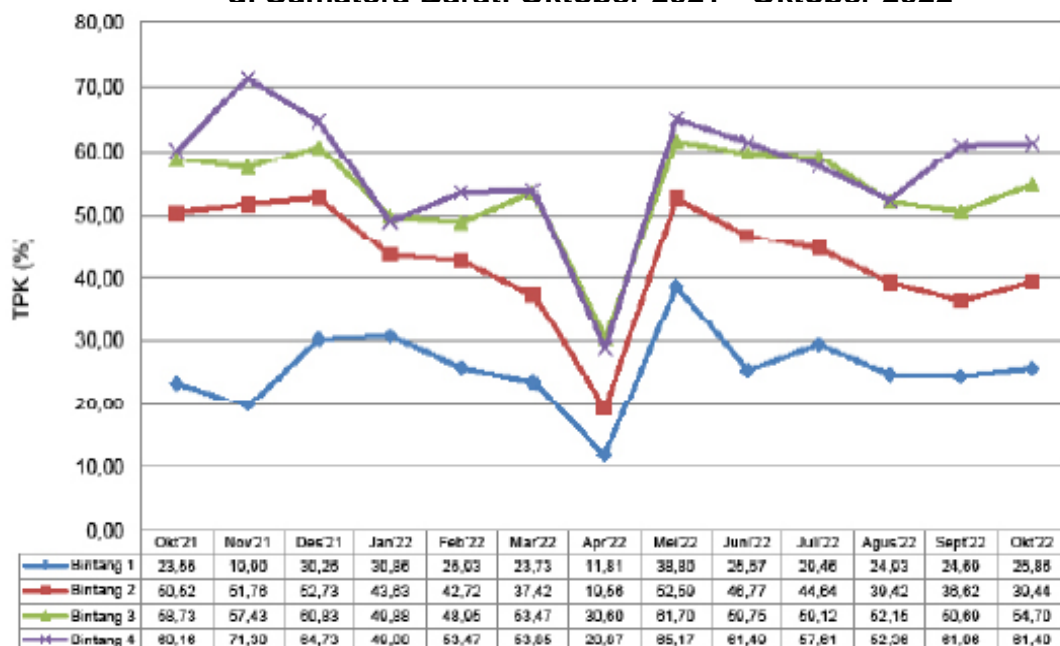
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

TPK tertinggi periode Oktober 2022 tercatat pada hotel bintang 4 yang mencapai 61,40%, diikuti bintang 3 sebesar 54,70%, dan bintang 2 sebesar 39,44%. TPK terendah tercatat pada hotel bintang 1 yaitu sebesar 25,86%.

Berdasarkan klasifikasi hotel, peningkatan TPK terjadi pada kategori hotel bintang. Peningkatan TPK tertinggi terjadi pada hotel bintang 3, yaitu naik sebesar 4,01% poin. Selanjutnya, hotel bintang 2, hotel bintang 1, dan hotel bintang 4 masing-masing mengalami peningkatan TPK sebesar 2,82% poin, 1,17 % poin,

dan 0,34% poin. Gambaran perkembangan TPK Hotel Berbintang pada Oktober 2021 – Oktober 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 1.8**  
**Perkembangan TPK Hotel Berbintang menurut Klasifikasi Bintang di Sumatera Barat. Oktober 2021 - Oktober 2022**



Sebaliknya, TPK hotel nonbintang pada Oktober 2022 mengalami penurunan dari 17,56%, turun 1,01% poin dibandingkan TPK September 2022 yang tercatat sebesar 18,57%. Jika dilihat lebih rinci, penurunan TPK terjadi pada seluruh kelompok kamar. Penurunan TPK tertinggi terjadi pada hotel nonbintang dengan kelompok kamar >40, yaitu turun sebesar 3,01% poin. Selanjutnya, hotel nonbintang dengan kelompok kamar 24-40 dan kelompok kamar <10 masing-masing mengalami penurunan TPK sebesar 2,65% poin dan 1,15% poin. Hotel nonbintang dengan kelompok kamar 10-24 mengalami penurunan TPK sebesar 0,02% poin.

TPK tertinggi untuk hotel nonbintang tercatat pada hotel dengan kelompok kamar >40 yaitu sebesar 25,28%. Sebaliknya, TPK terendah tercatat pada hotel nonbintang dengan kelompok kamar <10 yakni 11,03%. Rincian TPK hotel nonbintang menurut kelompok kamar disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 1.24**  
**TPK Hotel Nonbintang menurut Kelompok Kamar di Sumatera Barat**

No	Kelompok Kamar	TPK (%)			Perubahan Okt 2022 thd Sept 2022 (poin)	Perubahan Okt 2022 thd Okt 2021 (poin)
		Okt 2021	Sept 2022	Okt 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kamar < 10	13,77	12,18	11,03	-1,15	-2,74
2.	Kamar 10-24	20,02	19,09	19,07	-0,02	-0,95
3.	Kamar 24-40	21,95	20,98	18,33	-2,65	-3,62
4.	Kamar >40	29,78	28,29	25,28	-3,01	-4,50
<b>Seluruh Bintang</b>		<b>19,50</b>	<b>18,57</b>	<b>17,56</b>	<b>-1,01</b>	<b>-1,94</b>

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) Asing dan Indonesia digunakan untuk mengetahui berapa lama seorang tamu menginap di suatu akomodasi pada suatu waktu tertentu. RLMT Asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Sumatera Barat pada Oktober 2022 adalah selama 1,32 hari, naik 0,04 hari bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 1,28 hari. RLMT asing pada Oktober 2022 tercatat 1,52 hari, turun sebesar 0,67 hari dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 2,19 hari. RLMT Indonesia pada September 2022 tercatat 1,32 hari, mengalami peningkatan sebesar 0,05 hari jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 1,27 hari.

Bila dirinci menurut kelas hotel, terlihat RLMT asing tertinggi terdapat pada hotel bintang 3 yaitu 2,06 hari. Selanjutnya, RLMT asing pada hotel bintang 4 tercatat 1,37 hari, diikuti oleh hotel bintang 2 dan hotel bintang 1 yang masing-masing tercatat 1,23 hari dan 1,00 hari. Sementara itu, RLMT Indonesia pada hotel bintang 4 tercatat 1,40 hari, paling tinggi dibanding kelas hotel lainnya. Berikutnya, RLMT Indonesia pada hotel bintang 3 tercatat 1,29 hari, diikuti oleh hotel bintang 1 yang tercatat 1,24 hari, dan hotel bintang 2 tercatat 1,21 hari. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.25**  
**Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia**  
**pada Hotel Bintang di Sumatera Barat**

No	Klasifikasi Bintang	Rata-Rata Lama Menginap Tamu (Hari)								
		Asing			Indonesia			Total		
		Okt 2021	Sept 2022	Okt 2022	Okt 2021	Sept 2022	Okt 2022	Okt 2021	Sept 2022	Okt 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Bintang 1	1,00	0,00	1,00	1,17	1,22	1,24	1,17	1,22	1,24
2.	Bintang 2	3,06	1,46	1,23	1,99	1,15	1,21	1,99	1,16	1,21
3.	Bintang 3	2,55	1,87	2,06	1,28	1,24	1,29	1,28	1,24	1,29
4.	Bintang 4	1,50	2,41	1,37	1,22	1,34	1,40	1,22	1,37	1,40
<b>Sumatera Barat</b>		<b>1,82</b>	<b>2,19</b>	<b>1,52</b>	<b>1,43</b>	<b>1,27</b>	<b>1,32</b>	<b>1,43</b>	<b>1,28</b>	<b>1,32</b>

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

## 1.4. Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### 1.4.1 Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.26.**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian Menurut Tujuan dan Sasaran**

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
<b>MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing</b>					
1	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	72,74	73,26	<p>BPS</p> <p>1. Seluruh dimensi pembentuk IPM meningkat</p> <p><b>DIMENSI KESEHATAN</b> Meningkatnya taraf hidup pasca covid-19; covid-19 mereda sehingga menurunkan tingkat kesakitan dan kematian; Tingkat perhatian intervensi program lebih dintensifkan kepada sektor kesehatan baik daerah dan nasional</p> <p><b>DINAS KESEHATAN</b></p> <p>1. 16 komponen Umur Harapan Hidup; Melakukan upaya capaian UHH sektor kesehatan menjadi prioritas pada tahun 2022; Peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan</p> <p>2. Pemenuhan saranan dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>3. Adanya komitmen pemangku kebijakan di daerah yang berhubungan dengan kesehatan sangat berpengaruh</p> <p>4. Pembinaan fasilitasi provinsi ke daerah yaitu secara terpadu yang berkaitan dengan indikator kinerja di dinas kesehatan</p> <p>5. Peningkatan koordinasi dengan mitra terkait untuk mendorong pencapaian kinerja di dinas kesehatan</p> <p>6. Meningkatkan kesehatan melalui screening kesehatan melalui program GERMAS (gerakan masyarakat hidup sehat)</p> <p>7. Melakukan strategi advokasi kepada kepala daerah</p> <p><b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b></p>	<p>BPS</p> <p><b>DIMENSI KESEHATAN</b></p> <p>1. Adanya pandemi menjadi penghambat beberapa orang tidak melaporkan status kesehatannya; Pemerataan layanan kesehatan dari segi kesempatan untuk diperiksa dan akses kemudahan menjadi faktor yang perlu disempurnakan</p> <p><b>DINAS KESEHATAN</b></p> <p>1. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan belum merata</p> <p>2. Terbatasnya akses ke pelayanan kesehatan pada daerah yang sulit</p> <p>3. Prioritas kebijakan dan anggaran belum maksimal</p> <p>4. Kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan belum maksimal</p> <p>5. Ada beberapa kegiatan yang tidak maksimal dilaksanakan</p> <p>6. Koordinasi lintas sektor dan kegiatan belum optimal sehingga tidak terarah dan tidak tercapai secara maksimal</p> <p><b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b></p> <p>1. Pendapatan masyarakat masih rendah untuk melakukan aktivitas kebugaran</p> <p>2. Tingkat kesadaran masyarakat rendah terhadap aktivitas kebugarannya</p> <p>3. Terbatasnya fasilitas transportasi menuju pusat kebugaran</p>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian tingkat kebugaran meningkat dari target 0,3% tercapai 11%, data diambil dari pusat kebugaran dan car free day di kab/kota</li> <li>2. Kesadaran dan motivasi masyarakat akan hidup sehat dengan melaukan aktivitas kebugaran</li> <li>3. Wawasan seta akan pentingnya hidup sehat</li> <li>4. Pendidikan tinggi mempengaruhi masyarakat dalam memahami pola makan dan hidup sehat</li> <li>5. Pasca pandemi menyebabkan masyakat malas berolahraga dan meningkat berat badan</li> <li>6. Keterbatasan sarana olahraga sehingga masyarakat mencari alternatif lainnya, sarana olahraga terbuka di sumatera barat baru 5%</li> <li>7. Car free day sudah berjalan kembali pasca pandemi</li> <li>8. Kolaborasi antar pihak</li> <li>9. Perlu adanya kebijakan peningkatan sarana dan prasarana kebugaran serta kebijakan yang mendukung aktivitas kebugaran</li> </ol> <p><b>DIMENSI PENDIDIKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah meningkat</li> <li>2. Program pendidikan berlanjut terus, rls diukur pada umur usia 25 tahun keatas</li> <li>3. Penduduk yang berpendidikan baik meningkat pada usia diatas 25 tahun, dibutuhkan program untuk intervensi pindidikan umur 25 tahun keatas</li> <li>4. Harapan lama sekolah meningkat karena peluang untuk mendapatkan pendidikan lebih baik dan mudah melalui pembelajaran daring pada saat</li> <li>5. Covid-19, sekolah jarak jauh diterapkan oleh universitas dan membuka cabang diberbagai daerah dan tidak terpusat di ibukota provinsi</li> </ol> <p><b>DIMENSI EKONOMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengeluaran perkapita yang disesuaikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan aktivas kebugaran</li> <li>5. Adanya pemahaman terhadap aktivitas kebugaran hanya masyarakat kalangan menengah keatas</li> <li>6. Terbatasnya sarana olah raga di tengah-tengah masyarakat</li> </ol> <p><b>DIMENSI PENDIDIKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penduduk yang mencapai pendidikan yang tinggi tidak tinggal di daerah asalnya atau merantau sehingga menyebabkan yang tinggal mayoritas penduduk yang mempunyai pendidikan rendah, sehingga harus menciptakan perguruan tinggi yang menarik di daerah dan meningkatkan serta</li> <li>2. Menciptakan peluang ekonomi di daerah dan menjadikan sebuah tantangan di daerah</li> <li>3. Banyak masyarakat setelah lulus kuliah langsung berkerja di kota dan tidak kembali ke daerah asal</li> <li>4. Diusulkan metode perhitungan agar disempurnakan untuk menghitung rls dan hls</li> <li>5. Untuk menentukan metode perhitungan rls dan hls berdasarkan kawasan</li> </ol> <p><b>DIMENSI EKONOMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dimensi ekonomi merupakan dimensi yang luas</li> <li>2. Perluasan alternatif kek ekonomi yang bergantung pada sektor perkebunan,</li> <li>3. Diharapkan dapat meningkatkan nilai jual dan hasil yang tinggi</li> </ol> <p><b>DINAS SOSIAL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghuni UPTD harus terdaftar di DTKS (Data terpadu Kesejahteraan Sosial)</li> <li>2. Masih ada kab/kota yang belum mengirimkan calon penghuni panti</li> <li>3. Masih ada sarana dan prasarana panti milik</li> </ol>



No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>2. Perbaikan ekonomi pada tahun 2022 sudah meningkat karena dihapuskan pembatasan covid-19, ekspor cpo sudah dapat dilakukan</p> <p><b>DINAS SOSIAL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan dinas sosial kab/kota baik</li> <li>2. Sarpas pelayanan sosial uptd membaik</li> <li>3. Partisipasi masyarakat terhadap pembinaan di dalam panti membaik</li> </ol>	<p>masyarakat yang belum memadai, dan pada tahun 2023 ditargetkan sudah tidak ada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ada beberapa penghuni panti yang menjadi anak tidak pulang-pulang karena tidak memiliki keluarga</li> </ol>
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,8	69,90	<p><b>DINAS KESEHATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 16 komponen Umur Harapan Hidup</li> <li>2. Melakukan upaya capaian UHH sektor kesehatan menjadi prioritas pada tahun 2022</li> <li>3. Peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan</li> <li>4. Pemenuhan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>5. Adanya komitmen pemangku kebijakan di daerah yang berhubungan dengan kesehatan sangat berpengaruh</li> <li>6. Pembinaan fasilitasi provinsi ke daerah yaitu secara terpadu yang berkaitan dengan indikator kinerja di dinas kesehatan</li> <li>7. Peningkatan koordinasi dengan mitra terkait untuk mendorong pencapaian kinerja di dinas kesehatan</li> <li>8. Meningkatkan kesehatan melalui screening kesehatan melalui program GERMAS (gerakan masyarakat hidup sehat)</li> <li>9. Melakukan strategi advokasi kepada kepala daerah</li> </ol>	<p><b>DINAS KESEHATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan belum merata</li> <li>2. Terbatasnya akses ke pelayanan kesehatan pada daerah yang sulit</li> <li>3. Prioritas kebijakan dan anggaran belum maksimal</li> <li>4. Kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan belum maksimal</li> <li>5. Ada beberapa kegiatan yang tidak maksimal dilaksanakan</li> <li>6. Koordinasi lintas sektor dan kegiatan belum optimal sehingga tidak terarah dan tidak tercapai secara maksimal</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	18,44	25,2	<p><b>DINAS KESEHATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan)</li> <li>Melakukan intervensi gizi spesifik, melakukan intervensi penurunan stunting terintegrasi</li> <li>Pemberian PMT ibu hamil KEK, balita kurang gizi, tablet tambah darah ibu hamil dan remaja putri</li> <li>Pelaksanaan STBM dan imunisasi dasar lengkap pada anak balita</li> <li>Peningkatan optimalisasi BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) pada puskesmas</li> <li>Peningkatan pengelolaan kesehatan lingkungan terutama untuk jamban dan air bersih</li> </ol> <p><b>DINAS PANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ada 12 kab/kota yang telah dilakukan intervensi dalam rangka antisipasi atau penanganan stunting seperti pemberian bantuan bahan pangan seperti</li> <li>Telur, beras, susu yang diberikan kepada ibu hamil kek, balita stunting dan keluarga miskin</li> <li>Koordinasi dengan puskesmas di kab/kota cukup baik</li> </ol> <p><b>DINAS PETERNAKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama dengan asosiasi peternak unggas</li> <li>Ada kelompok binaan petani unggas sehingga masyarakat mendapatkan dampak dengan</li> <li>Diberikannya telur, kelompok susu di kab agam dan didaerah lain akan dikembangkan</li> </ol> <p><b>DPMD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan.</li> <li>Dari 35.000 kader posyandu dan 7.000 posyandu dari tahun 2019 sampai sekarang sudah dilatih sebanyak 3.000 orang seluruh kab/kota kecuali</li> </ol>	<p><b>DINAS KESEHATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pola asuh masyarakat masih rendah dan praktek PHBS juga masih rendah, contoh belum maksimal pemberian ASI eksklusif, ada</li> <li>Beberapa kasus didaerah, bapak yang menjadi pengasuh sehingga berbeda pola asuh yang dilakukan oleh ibu, rendahnya pengetahuan tentang pola asuh, sehingga perlu dilakukan edukasi pentingnya peningkatan gizi</li> <li>Pengalokasian pemanfaatan sumber daya dan sumber dana belum efektif</li> <li>Pelaksanaan program pencegahan stunting belum maksimal</li> </ol> <p><b>DINAS PANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bantuan hanya dapat diberikan satu kali sehingga untuk mendapatkan hasilnya perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut ke puskesmas di kab/kota</li> <li>Jumlah data yang diintervensi dengan data yang dikirimkan puskesmas kab/kota</li> <li>Koordinasi lintas sektor perlu dioptimalkan dalam pemberian intervensi sehingga tidak terjadi duplikasi intervensi</li> </ol> <p><b>DINAS PETERNAKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimal pelaksanaan kegiatan penurunan stunting karena program tidak menjadi fokus</li> <li>Masih banyak informasi negatif tentang produk peternakan yang cenderung menyebabkan keresahan di masyarakat terkait dengan</li> <li>Keamanan pangan</li> </ol> <p><b>DPMD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dari 7.000 posyandu yang ada di sumbar hanya 2.400 posyandu dengan kategori mandiri, posyandu mandiri berada di daerah</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>3. Kab. Pasaman, kabupaten solok dan kab. Solok selatan, bentuk pelatihan yaitu penurunan stunting</p> <p>4. Berinovasi dalam penyediaan menu PMT</p> <p>5. Melakukan kunjungan kerumah atau ajakan datang</p> <p>6. Ke posyandu</p> <p>7. Melalui dana APBN dan dana desa dibentuk kader pembangunan manusia yang fungsinya sama dengan kader posyandu</p> <p><b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK</b></p> <p>1. Melakukan peningkatan kapasitas kader bina keluarga balita</p> <p>2. Adanya tim pendamping keluarga di kabupaten/kota</p> <p>3. Adanya sk gubernur tentang tim percepatan penurunan stunting</p> <p>4. Sudah ada ran pasti (rencana aksi nasional penurunan stunting)</p> <p>5. Adanya perwakilan bkkbn sebagai leading sektor stunting di Pusat dan Provinsi</p> <p>6.</p>	<p>2. Penopang urbanisasi atau kota</p> <p>3. Banyak posyandu di desa yang tidak aktif atau aktif ketika ada kegiatan/event</p> <p>4. Banyaknya yang rangkap kader, kader posyandu bisa jadi kader lainnya</p> <p><b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK</b></p> <p>1. Koordinasi lintas sektor dilapangan masih lemah</p> <p>2. Belum terintegrasi dan terkoordinirnya upaya penurunan stunting di daerah</p> <p>3. Masih rendahnya kapasitas kader bkb dan tim pendamping keluarga di daerah</p> <p>4. Rendahnya insentif bagi kader bkb dan pendamping Keluarga di kabupaten /kota</p>
4	Rata-rata Lama Sekolah	9,18	9,18	<p><b>BPS</b></p> <p>1. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah meningkat</p> <p>2. Program pendidikan berlanjut terus, rls diukur pada umur usia 25 tahun keatas</p> <p>3. Penduduk yang berpendidikan baik meningkat pada usia diatas 25 tahun, dibutuhkan program untuk intervensi pindidikan umur 25 tahun keatas</p> <p><b>DINAS PENDIDIKAN</b></p> <p>1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehab Ruang Kelas Baru</p> <p>2. Upaya pemerintah daerah untuk menjadikan sebagai prioritas</p> <p>3. Memberikan beasiswa rajawali untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi</p>	<p><b>BPS</b></p> <p>1. Penduduk yang mencapai pendidikan yang tinggi tidak tinggal di daerah asalnya atau merantau sehingga menyebabkan yang tinggal mayoritas penduduk yang mempunyai pendidikan rendah, sehingga harus menciptakan perguruan tinggi yang menarik di daerah dan meningkatkan danmenciptakan peluang ekonomi di daerah dan menjadikan sebuah tantangan di daerah</p> <p>2. Banyak masyarakat setelah lulus kuliah langsung berkerja di kota dan tidak kembali ke daerah asal</p> <p><b>DINAS PENDIDIKAN</b></p> <p>1. Karena pembagian kewenangan sehingga tidak bisa</p>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				4. Kesetaraan pendidikan atau paket sudah menjadi SPM di kab/kota	dilakukan intervensi 2. Faktor geografis dan sosial budaya menjadi hambatan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi
5	Harapan Lama Sekolah	14,05	14,10	BPS 1. Peningkatan jumlah ruang kelas baru, unit sekolah baru dan pemberian beasiswa termasuk dengan pemerataan guru  DINAS PENDIDIKAN 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehab Ruang Kelas Baru 2. Upaya pemerintah daerah untuk menjadikan sebagai prioritas 3. Memberikan beasiswa rajawali untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 4. Kesetaraan pendidikan atau paket sudah menjadi SPM di kab/kota 5. Sudah menjadi prioritas nasional dan menjadi dukungan pemerintah 6. Sudah ada sub kegiatan yang khusus mengenai pemerataan guru dan distribusi guru	DINAS PENDIDIKAN 1. Karena pembagian kewenangan sehingga tidak bisa dilakukan intervensi 2. Faktor geografis dan sosial budaya menjadi hambatan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi
6	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	49,7	50,23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Adanya peningkatan jejaring kerjasama pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi sesuai dengan aturan permendagri baik dengan LPK swasta, lembaga pemerintahan, mou dengan dinas pendidikan pada tahun 2021. 2. Adanya permendagri nomor 54 tahun 2022 yang menyarankan pelatihan berbasis vokasi dengan sasaran pendidikan menengah keatas yang mendapatkan pelatihan BPS 1. Jika pendidikan bagus / baik maka kesempatan untuk bekerja dan berkarir lebih baik	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Belum melakukan uji kompetensi pelatihan sesuai SK KNI (Kompetensi Nasional Indonesia) yang dilakukan sehingga tidak 2. Dapat dilakukan akreditasi, hanya mendapatkan sertifikat dari pelatih  BPS 1. Jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi DINAS PENDIDIKAN 1. Provinsi Sumatera Barat tidak daerah industri, 2. Anggaran pada SMK yang belum memadai untuk

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>DINAS PENDIDIKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sudah melakukan program link and match dengan DUDI contoh kerjasama sekolah pariwisata dengan perhotelan</li> <li>Sudah ada program revitalisasi SMK sesuai topografi wilayahnya</li> <li>Sudah ada program BLUD di SMK sehingga menghasilkan produk sendiri yang bisa dijual</li> </ol>	melengkapi sarpras untuk praktek.
<b>MISI 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</b>					
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,1	52.71 (2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dimensi pendidikan peringkat 9 dari 34 provinsi dengan capaian 72,70 diatas rata-rata nasional sebesar 68,71</li> <li>Salah satu pendorong meningkatnya dimensi pendidikan adalah persentase penduduk disabilitas 7-18 tahun usia sekolah dengan capaian 72,25% dibandingkan nasional 64,81%</li> </ol> <p>DINAS SOSIAL</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Salah satu pendorong adanya dukungan anggaran untuk akses layanan pendidikan bagi kelayan dalam panti</li> <li>Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mendukung layanan sosial dalam panti</li> <li>Adanya kegiatan peningkatan kapasitas manajerial yang dilakukan oleh dinas sosial provinsi untuk pengurus panti milik masyarakat</li> <li>Partisipasi penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori penduduk 40% termiskin dengan capaian 94,41% diatas rata-rata nasional 90,54</li> </ol> <p>DINAS PENDIDIKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya program unggulan alokasi minimal 20% dari kuota peserta didik untuk siswa dari masyarakat kurang mampu pada jenjang pendidikan menengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dimensi Ekonomi Budaya Peringkat ke-15 dari 34 Provinsi dengan capaian 18,97 dibawah rata-rata nasional sebesar 20,69</li> <li>Dimensi sosial budaya Peringkat ke-32 dari 34 Provinsi dengan capaian 58,13 dibawah rata-rata nasional sebesar 66,83</li> </ol> <p>DINAS SOSIAL</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dilingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir sebesar 77,04% diatas rata-rata nasional sebesar 75%</li> <li>Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong masih rendahnya penduduk sebesar 33,16% dibawah nasional sebesar 35,03%</li> <li>Meningkatnya jumlah perumahan mewah ditengah masyarakat</li> <li>Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat</li> <li>Meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan dan gotong royong</li> <li>Perubahan pola kehidupan sosial yang mulai mengarah kepada matrealistis</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>2. Dimensi warisan budaya peringkat 5 dari 34 provinsi dengan capaian 52,31 melebihi target 2024 50,56 dan diatas rata-rata nasional sebesar 46,63</p> <p>3. Dimensi budaya literasi peringkat 5 dari 34 provinsi dengan capaian 61,76 diatas rata-rata nasional sebesar 54,29</p> <p>4. Dimensi gender peringkat 11 dari 34 provinsi dengan capaian 60,10 diatas rata-rata nasional sebesar 56,55</p> <p><b>DINAS KEBUDAYAAN</b></p> <p>1. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi sebesar 20,17 lebih tinggi dari nasional sebesar 3,90</p> <p>2. Animo masyarakat dan stakeholder serta pemerintah daerah kabupaten/kota semakin tinggi akan kelestarian kebudayaan yang ditandai dengan banyaknya usulan warisan budaya untuk ditetapkan</p> <p>3. Pencatatan dan pendataan serta pendokumentasian warisan budaya benda dan takbenda telah mendekati optimal</p> <p>4. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni sebesar 73,79 lebih tinggi dari nasional sebesar 70,57</p> <p>5. Animo masyarakat yang tinggi terhadap hiburan terutama terhadap kesenian</p> <p>6. Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional sebesar 48,83 lebih rendah dari nasional sebesar 73,01</p> <p>7. Adanya himbauan dari pemerintah daerah untuk menggunakan produk tradisional antara lain baju tradisional pada ASN, produk tradisional dunia</p>	<p>7. Dimensi Ekspresi budaya peringkat ke-17 dari 34 Provinsi dengan capaian 24,50 dibawah rata-rata nasional sebesar 27,13</p> <p><b>DINAS KEBUDAYAAN</b></p> <p>1. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) sebesar 0,19 lebih rendah dari nasional sebesar 0,21</p> <p>2. Banyak event budaya yang minim dilaksanakan yang masih berdampak</p> <p>3. Pandemi covid-19 sehingga menghambat pelaku ekonomi kreatif untuk membuat event baik yang diikuti maupun yang dibuat pribadi</p> <p>4. Penghargaan dan apresiasi terhadap pelaku seni yang masih rendah</p> <p>5. Banyaknya pelaku seni yang berprofesi ganda dan hanya menjadikan kesenian sekedar hobi bukan sebagai penghasilan utama</p> <p>6. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi sebesar 20,17 lebih tinggi dari nasional sebesar 3,90</p> <p>7. Penetapan warisan budaya tergantung dari keenangan dari kabupaten, provinsi dan pusat</p> <p>8. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/wardun sebesar 7,48 lebih tinggi dari nasional sebesar 6,93</p> <p>9. Publikasi yang kurang</p> <p>10. Tingkat literasi masyarakat yang masih rendah</p> <p>11. Minat mempelajari sejarah yang rendah</p> <p>12. Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan cagar budaya</p>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				pariwisata seperti hotel	<p>13.Pewarisan nilai budaya, nilai sejarah kepada generasi muda semakin minim</p> <p>14.Belum adanya pusat data terkait dengan perkembangan kebudayaan sejarah untuk menjadi referensi bagi masyarakat</p> <p>15.Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional sebesar 48,83 lebih rendah dari nasional sebesar 73,01</p> <p>16.Peralihan gaya hidup dimasyarakat dari tradisonal ke modern (lebih praktis dan efisien)</p> <p>17.Pengaruh media sosial</p> <p>Keterangan :</p> <p>survei IPK dilakukan 3 tahun sekali oleh susenas, data terakhir tahun 2021</p>
2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	62,8	58,13 (2021)	<p>BADAN KESBANGPOL</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya konflik antar suku di Sumatera Barat</li> <li>2. Adanya Forum kerukunan umat beragama (FKUB) di provinsi dan kabupaten/kota sebagai wadah untuk menjaring informasi dan serta menyelesaikan permasalahan keagamaan</li> <li>3. Adanya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di provinsi dan kabupaten/kota sebagai wadah untuk menjaring informasi dan serta menyelesaikan permasalahan etnis</li> <li>4. Adanya peran FORKOPIMDA dalam peran mengambil kebijakan</li> <li>5. Adanya Forum Keaspadan dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspaadan dini pemerintah daerah (TKDPD)</li> <li>6. Adanya tim pemantauan orang asing</li> <li>7. Adanya Tim Terpadu penanganan konflik sosial</li> </ol>	<p>BIRO KESRA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur masyarakat yang masih mayoritas homogen</li> <li>2. Kultur budaya yang terlalu kuat didukung dengan falsafah ABS-SBK</li> <li>3. Adanya peraturan bersama mentri agama dengan mentri dalam negri No.9 dan No.8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah dapat dilakukan jika terdapat jemaah dan disetujui oleh masyarakat sekitar minimal 60 orang</li> <li>4. Adanya pengaruh wawasan, pola pikir dan juga pergaulan dalam menentukan siapa yang berhubungan dengan dirinya</li> </ol> <p>SATPOL PP</p>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>SATPOL PP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Patroli dan pengawasan dalam pemeliharaan trantibum di daerah</li> <li>2. Koordinasi dan konsolidasi dengan penegak hukum dan Kab/Kota</li> <li>3. Adanya partoli dan pengawasan disekolah bekerjasama dengan kepolisian untuk mencegah potensi terjadinya kenakalan remaja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya intelijen dan petugas lapangan dalam pangaasan kenakalan remaja yang terjadi seperti tawuran, begal, balapan liar</li> </ol>
3	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	13	14,14	<p>DINAS PENDIDIKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpustakaan pada masing-masing sekolah sudah ada, dana BOS wajib menyediakan buku untuk perpustakaan, sehingga siswa tidak perlu beli buku</li> <li>2. Dukungan pemerintah melalui capaian SPM</li> <li>3. Adanya program dinas terkait dengan penumbuhan minat bakat peserta didik</li> </ol> <p>BIRO PEMERINTAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur yang perlu ditambahkan tenaga pustakawan</li> <li>2. Pembangunan pustaka baru</li> </ol> <p>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemerataan layanan perpustakaan misalnya dengan puskel (Perpustakaan keliling)</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pustaka</li> <li>3. Menyediakan bahan perpuskaan berdasarkan kebutuhan</li> <li>4. Meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat keperpustakaan dengan melakukan kegiatan sosialisasi terkait pembudayaan kegemaran</li> <li>5. Membaca dan tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial</li> <li>6. Melakukan pembinaan perpustakaan untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan sesuai</li> </ol>	<p>DINAS PENDIDIKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada perekrutan petugas perpustakaan, sehingga kekurangan SDM pustakawan yang memiliki background pendidikan pustakawan.</li> <li>2. Kapasitas atau pengetahuan guru dalam membimbing siswa masih kurang maksimal</li> </ol> <p>7 unsur salah satu nya rasio pemerataan layanan perpustakaan, seperti penyediaan perpustakaan atau pembangunan baru perpustakaan.</p> <p>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum meratanya layanan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota karena setiap jenis perpustakaan yang ada baik di</li> <li>2. Sekolah/nagari/kecamatan di kab/kota sebagian besar masih terbatas infrastruktur, sarana prasarana dan SDM untuk memberikan layanan terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pemberian layanan</li> <li>3. Masih terbatasnya ketercukupan koleksi perpustakaan terutama pada perpustakaan desa, nagari dan perpustakaan sekolah karena</li> <li>4. Keterbatasan aggaran untuk pengadaan baru dan juga terbatasnya pengadaan melalui swakelola antara lain dari swadaya masyarakat serta</li> </ol>



No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				standar nasional perpustakaan 7. Melaksanakan lomba-lomba terkait untuk meningkatkan minat baca masyarakat misalnya lomba pidato, lomba menulis, story telling	dukungan komitmen daerah dalam pengembangan perpustakaan yang masih minim 5. Masih terbatasnya ketercukupan tenaga SDM perpustakaan (minimal 1 orang petugas perpustakaan melayani 2.500 orang pengunjung berdasarkan standar nasional) fokusnya perpustakaan sekolah/desa/nagari/kelurahan karena komitmen kepala sekolah yang belum optimal, terbatasnya SDM pustakawan dengan latar belakang pendidikan perpustakaan 6. Masih rendahnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan karena keterbatasan sapsras, infrastruktur teknologi informasi, ketercukupan koleksi, minat baca masyarakat yang masih rendah 7. Masih terbatasnya perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan karena keterbatasan SDM, Sarana prasarana, keterbatasan koleksi
4	Indeks Pembangunan keluarga	59,3	menunggu data dari BKKBN	OPD DINAS P3A2KB: 1. Adanya kegiatan SKPD untuk mendorong pencapaian target (advokasi, sosialisasi dan pembinaan)  Bidang PPM : 1. Adanya PERDA No 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga 2. Dari dimensi ketentraman : lebih meningkat ketentraman sudah memiliki kartu jaminan kesehatan, dokumen kependudukan sudah lebih baik, kenyamanan dalam melakukan ibadah 3. Dari dimensi kemandirian : pemulihan ekonomi sudah mulai baik dan pendidikan sudah berjalan semakin baik dengan berkurangnya angka putus sekolah	Bidang PPM : 1. Rata-rata nasional target 54,01, lebih rendah dari target yang ditetapkan provinsi sebesar 59,3 2. Rendahnya kemandirian ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhannya 3. Rendahnya koordinasi lintas sektor dalam pencapaian 4. Penghitungan hanya bersumber dari BKKBN

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>4. Dari dimensi kebahagiaan keluarga : semakin meningkatnya frekuensi aktifitas keluarga serta dalam kegiatan sosial, kegiatan parenting pada keluarga</p> <p>BPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga angka kematian ibu dan kematian bayi</li> <li>2. Pemulihan ekonomi pasca COVID sudah mulai normal</li> <li>3. Aktifitas pendidikan sudah mulai offline (Tatap Muka)</li> </ol>	
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,11	rilis maret BPS 2023	<p>OPD Dinas P3A2KB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya PERMENDAGRI Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PUG di Daerah</li> <li>2. Adanya PERDA Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga</li> <li>3. Adanya PERDA Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>4. Adanya kegiatan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan</li> <li>5. Adanya Konsep Matriaki di Sumatera Barat yang kondusif untuk percepatan implementasi strategi Pengarusutamaan Gender melalui PPRG</li> </ol> <p>Bidang PPM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola pengasuhan tidak hanya pada ibu saja, tetapi ada keterlibatan ayah</li> </ol> <p>BPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari segi Usia Harapan Hidup Perempuan lebih tinggi daripada Laki-Laki</li> <li>2. Dari segi Pendidikan semakin banyak perempuan</li> </ol>	<p>OPD Dinas P3A2KB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan SDM yang mampu melakukan analisis gender terhadap perencanaan dan penganggaran dan program kegiatan dalam pembangunan</li> <li>2. Keterbatasan fasilitator dalam Pengarusutamaan Gender</li> </ol> <p>Bidang PPM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sinergitas antar lembaga yang terkait dengan pengarusutamaan gender</li> <li>2. Pemahaman tentang Konsep PUG belum maksimal dan menyeluruh</li> </ol> <p>Biro Pemerintahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman konsep PUG pada keluarga</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				yang ingin lebih meningkatkan pendidikannya 3. Dari segi Penghasilan kontribusi perempuan meningkatkan ekonomi keluarga	
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,12	rilis April BPS 2023	<p>BPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlibatan perempuan pada Parlemen</li> <li>2. Perempuan sebagai tenaga manager dan administrasi</li> <li>3. Sumbangan perempuan dalam pendapatan</li> <li>4. Poin 2 dan 3 membaik di Sumatera Barat</li> </ol> <p>OPD Dinas P3A2KB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Ada Keterwakilan 30% Perempuan dan Kepengurusan Partai Politik</li> <li>2. Adanya PERDA Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga</li> <li>3. Adanya PERDA Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ol>	<p>BPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterpilihan perempuan di parlemen masih rendah</li> </ol> <p>Bidang PPM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor budaya dan agama mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam ruang publik</li> </ol>
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,85	menunggu data dari Kementerian PPPA	<p>OPD Dinas P3A2KB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</li> <li>2. Adanya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA</li> <li>3. Adanya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS</li> <li>4. Adanya PERDA Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga</li> <li>5. Adanya PERDA Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>6. SK Tim Koordinasi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Nomor 463-78-2022</li> <li>7. SK Tim Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan</li> </ol>	<p>OPD Dinas P3A2KB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum semua kabupaten/kota (yang sudah ada 8 kabupaten/kota : Kab. Sijunjung, Kep. Mentawai, Kab. Dharmasraya, Kab 50 Kota, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto) membentuk UPTD PPA</li> <li>2. Data kasus kekerasan tidak valid dan realtime</li> <li>3. Minimnya dukungan anggaran di kabupaten menghambat sinergitas dan keberlanjutan program antara provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan</li> <li>5. Tidak semua kabupaten/kota yang mendapatkan dana alokasi khusus untuk penanganan kasus</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>dan Anak Nomor 260-1-2018</p> <p>8. SK Tim Koordinasi PPKBG Nomor 2064 2022</p> <p>9. SK Tim Gugus Tugas Penanaman dan Pendampingan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) Nomor 1758-2022</p> <p>10. Adanya MOU dan perjanjian kerjasama dengan Instansi Verikal, lembaga layanan, perguruan tinggi</p> <p>11. Adanya layanan telepon sahabat anak</p> <p>12. Adanya Hotline UPTD PPA Nomor 081116612343 tentang pengaduan layanan kekerasan perempuan dan anak</p> <p>13. SK Gubernur tentang pembentukan forum anak daerah</p> <p>Bidang PPM :</p> <p>1. Sudah ada forum anak sebagai pelapor dan pelopor kasus kekerasan pada perempuan dan anak</p>	<p>kekerasan di kabupaten/kota</p> <p>6. Belum semua anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang bisa di jangkau dengan kebijakan dan program</p> <p>7. Belum optimalnya pemanfaatan hotline UPTD PPA oleh masyarakat dalam pengaduan kasus kekerasan pada anak dan perempuan</p> <p>8. Rendahnya komitmen atau kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang belum menjadikan program prioritas</p> <p>9. Belum optimalnya pelibatan anak dalam pembangunan daerah dan pelaksanaan program perlindungan anak</p>
<b>MISI 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>					
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	5	6,5		
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,99	110,37	<p>BPS</p> <p>1. Indeks harga yang diterima petani meningkat, sehingga harga jual hasil pertanian meningkat, indeks harga yang diterima lebih besar dari yang dibayar</p> <p>2. Meningkatnya harga beras dan harga sawit pada tahun 2022</p> <p>DINAS PERTANIAN</p> <p>1. Peningkatan produksi pada komoditi hortikultura (bawang merah, cabe, jeruk dan manggis)</p> <p>2. Cabe = peningkatan 21,54% tahun 2021 115.766</p>	<p>BPS</p> <p>1. Kenaikan harga barang modal seperti bibit, pupuk</p> <p>2. Adanya kelangkaan pupuk bersubsidi</p> <p>3. Faktor cuaca mempengaruhi hasil pertanian baik kualitas dan harga jual barang</p> <p>4. Sistem pertanian yang digunakan masih tradisional</p> <p>5. Kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga mempengaruhi biaya operasional terutama nelayan</p> <p>DINAS PERTANIAN</p> <p>1. Faktor cuaca</p> <p>2. Pola tanam yang dilakukan tidak sesuai dengan</p>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>ton, tahun 2022 140.698 ton</p> <p>3. Bawang merah = peningkatan 12,13% tahun 2021 sebesar 200.366 ton dan tahun 2022 sebesar 224.666 ton</p> <p>4. Manggis = peningkatan 18,01 tahun 2021 69.656 ton dan tahun 2022 sebesar 82.204</p> <p>5. Jeruk = peningkatan 61,41% tahun 2021 118.578 dan tahun 2022 sebesar 191.395</p> <p>6. Komoditi pangan khususnya padi ada peningkatan produksi 5,77% dibandingkan dengan tahun 2021, faktornya karena telah diperbaiki sarana dan prasarana yaitu irigasi.</p> <p>7. Komoditi perkebunan harga tandan buah segar (tbs) sawit relatif meningkat</p> <p><b>DINAS PETERNAKAN</b></p> <p>1. Tahun 2021 populasi dan produksi meningkat pada komoditi seperti susu sapi tahun 2021 sebanyak 827 kg dan ditahun 2022 835 kg, telur ayam tahun 2021 145.867.932 kg ditahun 2022 147.505.457, daging sapi 2021 21.375 ton menjadi 21.515 ton pada tahun 2022</p> <p>2. Hasil produksi meningkat karena adanya penerapan teknologi baru seperti pengelolaan pakan dan fermentasi sehingga meningkatkan nilai gizi pakan ternak</p> <p>3. Menggunakan bibit unggul melalui teknologi inseminasi buatan</p> <p>4. Tingginya permintaan telur, unggas dan ternak sapi dari provinsi tetangga</p> <p><b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b></p> <p>1. Peningkatan jumlah pembudidaya seperti air tawar, laut, payau sehingga mendorong peningkatan produksi, jumlah pembudidaya tahun 2021 83.956</p>	<p>kalender tanam sehingga hasil panen tidak maksimal (palawija dan hortikultura)</p> <p>3. Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)</p> <p><b>DINAS PETERNAKAN</b></p> <p>1. Adanya keterbatasan modal</p> <p>2. Adanya wabah penyakit seperti pmk untuk sapi dan flu burung untuk unggas</p> <p><b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b></p> <p>1. Budidaya air tawar, air payau</p> <p>2. Harga pakan yang tinggi</p> <p>3. Ketersediaan bibit unggul di upr (unit pembenihan rakyat) masih kurang</p> <p>4. Faktor cuaca</p> <p>5. Kematian masal ikan di danau maninjau</p> <p>6. Perikanan tangkap</p> <p>7. Faktor cuaca ekstrem, menyebabkan nelayan tidak melaut</p> <p>8. Kenaikan harga bbm, tidak semua nelayan mendapatkan bbm bersubsidi dan harus mendapat rekomendasi dari dinas kabupaten</p> <p>9. Budaya kerja yang masih rendah</p>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>orang meningkat pada tahun 2022 menjadi 84.863 orang</p> <p><b>Budidaya Air Tawar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan sarana produksi melalui dinas kab/kota seperti bibit, induk, pakan ikan</li> <li>2. Permintaan ikan budidaya dari provinsi tetangga sumatera utara, riau seperti ikan mas, ikan nila</li> <li>3. Jumlah produksi tahun 2021 sebanyak 260.042,05 ton</li> <li>4. Jumlah produksi tahun 2022 sebanyak 278.480,59 ton (angka sementara), tingkat capaian 7,09%</li> </ol> <p><b>Perikanan Tangkap</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi Perikanan Tangkap tahun 2021 sebanyak 212.520,50 Ton</li> <li>2. Produksi Perikanan Tangkap tahun 2022 sebanyak 218.688,66 ton (angka sementara) peningkatan produksi 2,90%</li> <li>3. Adanya bantuan sarana penangkapan bagi nelayan seperti gillnet, trammelnet, fishbox, mesin tempel, longtail, dan perahu fiber</li> </ol>	
3	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	103,47	108,85	<p><b>BPS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kenaikan harga yang diterima petani lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga biaya produksi dan barang modal</li> </ol> <p><b>DINAS TANAMAN PANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produksi pada komoditi hortikultura (bawang merah, cabe, jeruk dan manggis)</li> <li>2. Cabe = peningkatan 21,54% tahun 2021 115.766 ton, tahun 2022 140.698 ton</li> <li>3. Bawang merah = peningkatan 12,13% tahun 2021 sebesar 200.366 ton dan tahun 2022 sebesar 224.666 ton</li> </ol>	<p><b>BPS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kenaikan harga barang modal seperti bibit, pupuk</li> <li>2. Adanya kelangkaan pupuk bersubsidi</li> <li>3. Faktor cuaca mempengaruhi hasil pertanian baik kualitas dan harga jual barang</li> <li>4. Sistem pertanian yang digunakan masih tradisional</li> <li>5. Kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga mempengaruhi biaya operasional terutama nelayan</li> </ol> <p><b>DINAS TANAMAN PANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor cuaca</li> <li>2. Pola tanam yang dilakukan tidak sesuai dengan kalender tanam sehingga hasil panen tidak</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>4. Manggis = peningkatan 18,01 tahun 2021 69.656 ton dan tahun 2022 sebesar 82.204</p> <p>5. Jeruk = peningkatan 61,41% tahun 2021 118.578 dan tahun 2022 sebesar 191.395</p> <p>6. Komoditi pangan khususnya padi ada peningkatan produksi 5,77% dibandingkan dengan tahun 2021, faktornya karena telah diperbaiki sarana dan prasarana yaitu irigasi.</p> <p>7. Komoditi perkebunan harga tandan buah segar (tbs) sawit relatif meningkat</p> <p>8. Tahun 2021 populasi dan produksi meningkat pada komoditi seperti susu sapi tahun 2021 sebanyak 827 kg dan di tahun 2022, 835 kg, telur ayam tahun 2021, 145.867.932 kg ditahun 2022 147.505.457, daging sapi 2021 21.375 ton menjadi 21.515 ton pada tahun 2022</p> <p><b>DINAS PETERNAKAN</b></p> <p>1. Hasil produksi meningkat kerana adanya penerapan teknologi baru seperti pengelolaan pakan dan fermentasi sehingga meningkatkan nilai gizi pakan ternak</p> <p>2. Menggunakan bibit unggul melalui teknologi inseminasi buatan</p> <p>3. Tingginya permintaan telur, unggas dan ternak sapi oleh provinsi tetangga</p> <p><b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b></p> <p>1. Peningkatan jumlah pembudidaya seperti air tawar, laut, payau sehingga mendorong peningkatan produksi, jumlah pembudidaya tahun 2021 83.956 orang meningkat pada tahun 2022 menjadi 84.863 orang</p> <p><b>Budidaya Air Tawar</b></p> <p>1. Bantuan sarana produksi melalui dinas kab/kota</p>	<p>maksimal (palawija dan hortikultura)</p> <p>3. Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)</p> <p><b>DINAS PETERNAKAN</b></p> <p>1. Adanya keterbatasan modal</p> <p>2. Adanya wabah penyakit seperti pmk untuk sapi dan flu burung untuk unggas</p> <p><b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b></p> <p>1. Budidaya air tawar, air payau</p> <p>2. Harga pakan yang tinggi</p> <p>3. Ketersediaan bibit unggul di upr (unit pembenihan rakyat) masih kurang</p> <p>4. Faktor cuaca</p> <p>5. Kematian masal ikan di danau maninjau</p> <p>6. Perikanan tangkap</p> <p>7. Faktor cuaca ekstrem, menyebabkan nelayan tidak melaut</p> <p>8. Kenaikan harga bbm, tidak semua nelayan mendapatkan bbm bersubsidi dan harus mendapat rekomendasi dari dinas kabupaten</p> <p>9. Budaya kerja yang masih rendah</p>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>seperti bibit, induk, pakan ikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permintaan ikan budidaya dari provinsi tetangga sumatera utara, riau seperti ikan mas, ikan nila</li> <li>Jumlah produksi tahun 2021 sebanyak 260042,05 ton</li> <li>Jumlah produksi tahun 2022 sebanyak 278.480,59 ton (angka sementara), tingkat capaian 7,09%</li> </ol> <p>Perikanan Tangkap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Produksi Perikanan Tangkap tahun 2021 sebanyak 212.520,50 Ton</li> <li>Produksi Perikanan Tangkap tahun 2022 sebanyak 218.688,66 ton (angka sementara) peningkatan produksi 2,90%</li> <li>Adanya bantuan saran penangkapan bagi nelayan seperti gillnet, trammelnet, fishbox, mesin tempel, longtail, dan perahu fiber</li> </ol>	
4	Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Jt)	47175	50.465.580	<p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan jumlah pembudidaya seperti air tawar, laut, payau sehingga mendorong peningkatan produksi, jumlah pembudidaya tahun 2021 83.956 orang meningkat pada tahun 2022 menjadi 84.863 orang</li> </ol> <p>Budidaya Air Tawar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bantuan sarana produksi melalui dinas kab/kota seperti bibit, induk, pakan ikan</li> <li>Permintaan ikan budidaya dari provinsi tetangga sumatera utara, riau seperti ikan mas, ikan nila</li> <li>Jumlah produksi tahun 2021 sebanyak 260042,05 ton</li> <li>Jumlah produksi tahun 2022 sebanyak 278.480,59 ton (angka sementara), tingkat capaian 7,09%</li> </ol> <p>Perikanan Tangkap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Produksi Perikanan Tangkap tahun 2021 sebanyak</li> </ol>	<p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Budidaya air tawar, air payau</li> <li>Harga pakan yang tinggi</li> <li>Ketersediaan bibit unggul di upr (unit pembenihan rakyat) masih kurang</li> <li>Faktor cuaca</li> <li>Kematian masal ikan di danau maninjau perikanan tangkap</li> <li>Faktor cuaca ekstrem, menyebabkan nelayan tidak melaut</li> <li>Kenaikan harga BBM, tidak semua nelayan mendapatkan BBM bersubsidi dan harus mendapat rekomendasi dari dinas kabupaten</li> <li>Budaya kerja yang masih rendah</li> </ol>



No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>212.520,50 Ton</p> <p>2. Produksi Perikanan Tangkap tahun 2022 sebanyak 218.688,66 ton (angka sementara) peningkatan produksi 2,90%</p> <p>3. Adanya bantuan saran penangkapan bagi nelayan seperti gillnet, tramelnet, fishbox, mesin tempel, longtail, dan perahu fiber</p>	
5	Pendapatan nelayan (Rp. Jt)	40795	41661646	<p>BPS</p> <p>1. Kenaikan harga yang diterima petani lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga biaya produksi dan barang modal</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>1. Peningkatan jumlah pembudidaya seperti air tawar, laut, payau sehingga mendorong peningkatan produksi, jumlah pembudidaya tahun 2021 83.956 orang meningkat pada tahun 2022 menjadi 84.863 orang</p> <p>2. Budidaya air tawar</p> <p>3. Bantuan sarana produksi melalui dinas kab/kota seperti bibit, induk, pakan ikan</p> <p>4. Permintaan ikan budidaya dari provinsi tetangga sumatera utara, riau seperti ikan mas, ikan nila</p> <p>5. Jumlah produksi tahun 2021 sebanyak 260042,05 ton</p> <p>6. Jumlah produksi tahun 2022 sebanyak 278.480,59 ton (angka sementara), tingkat capaian 7,09%</p> <p>Perikanan Tangkap</p> <p>1. Produksi Perikanan Tangkap tahun 2021 sebanyak 212.520,50 Ton</p> <p>2. Produksi Perikanan Tangkap tahun 2022 sebanyak 218.688,66 ton (angka sementara) peningkatan produksi 2,90%</p> <p>3. adanya bantuan saran penangkapan bagi nelayan seperti gillnet, tramelnet, fishbox, mesin tempel,</p>	<p>BPS</p> <p>1. Kenaikan harga barang modal seperti bibit, pupuk</p> <p>2. Adanya kelangkaan subsidi pupuk</p> <p>3. Faktor cuaca mempengaruhi hasil pertanian baik kualitas dan harga jual barang</p> <p>4. Sistem pertanian yang digunakan masih tradisional</p> <p>5. Kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga mempengaruhi biaya operasional terutama nelayan</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>1. Budidaya air tawar, air payau</p> <p>2. Harga pakan yang tinggi</p> <p>3. Ketersediaan bibit unggul di upr (unit pembenihan rakyat) masih kurang</p> <p>4. Faktor cuaca</p> <p>5. Kematian masal ikan di danau maninjau perikanan tangkap</p> <p>6. Faktor cuaca ekstrem, menyebabkan nelayan tidak melaut</p> <p>7. Kenaikan harga bbm, tidak semua nelayan mendapatkan bbm bersubsidi dan harus mendapat rekomendasi dari dinas kabupaten</p> <p>8. Budaya kerja yang masih rendah</p>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				longtail, dan perahu fiber	
6	Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	47872	49678	<p>DINAS PETERNAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian bantuan ternak ke masyarakat seperti itik, ayam, puyuh, kambing, dan sapi melalui kelompok ternak</li> <li>2. Penyediaan bibit dan pakan berkualitas</li> <li>3. Pembinaan dan pendampingan kepada kelompok ternak terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan ternak</li> <li>4. Penerapan teknologi peternakan</li> </ol>	<p>DINAS PETERNAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian besar usaha peternakan ini merupakan usaha sampingan</li> <li>2. Kurangnya dukungan modal dan sarana produksi</li> <li>3. Masih kurangnya pelatihan-pelatihan pada peternak</li> </ol>
7	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	5	6,5	<p>DINAS TANAMAN PANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya intervensi pemerintah dalam pelaksanaan tercapaian program unggulan</li> <li>2. Harga komoditi pertanian cenderung naik/ disebabkan pengaruh inflasi</li> </ol>	<p>DINAS TANAMAN PANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SDM yang bergerak di bidang pertanian (petani)</li> <li>2. Keterbatasan dalam investasi pertanian</li> <li>3. Keterbatasan akses sarana produksi</li> </ol>
8	Indeks Ketahanan Pangan	79,13	9,45	<p>DINAS PETERNAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha mendapatkan sertifikat NKV (nomor kontrol veteriner) yang sesuai dengan manajemen usaha yang dilakukan sebagai jaminan produk peternakan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal)</li> <li>2. Tahun 2021 populasi dan produksi meningkat pada komoditi seperti susu sapi tahun 2021 sebanyak 827 kg dan di tahun 2022 835 kg, telur ayam tahun 2021 145.867.932 kg ditahun 2022 147.505.457, daging sapi 2021 21.375 ton menjadi 21.515 ton pada tahun 2022</li> <li>3. Hasil produksi meningkat kerana adanya penerapan teknologi baru seperti pengelolaan pakan dan fermentasi sehingga meningkatkan nilai gizi pakan ternak</li> <li>4. Menggunakan bibit unggul melalui teknologi inseminasi buatan</li> </ol>	<p>DINAS PETERNAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya keterbatasan modal</li> <li>2. Adanya wabah penyakit seperti pmk untuk sapi dan flu burung untuk unggas</li> </ol> <p>DINAS TANAMAN PANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor cuaca</li> <li>2. Pola tanam yang dilakukan tidak sesuai dengan kalender tanam sehingga hasil panen tidak maksimal (palawija dan hortikultura)</li> <li>3. Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)</li> </ol> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budidaya air tawar, air payau</li> <li>2. Harga pakan yang tinggi</li> <li>3. Ketersediaan bibit unggul di upr (unit pembenihan rakyat) masih kurang</li> <li>4. Faktor cuaca</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>5. Tingginya permintaan telur, unggas dan ternak sapi oleh provinsi tetangga</p> <p><b>DINAS TANAMAN PANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produksi pada komoditi hortikultura (bawang merah, cabe, jeruk dan manggis)</li> <li>2. Cabe = peningkatan 21,54% tahun 2021 115.766 ton, tahun 2022 140.698 ton</li> <li>3. Bawang merah = peningkatan 12,13% tahun 2021 sebesar 200.366 ton dan tahun 2022 sebesar 224.666 ton</li> <li>4. Manggis = peningkatan 18,01 tahun 2021 69.656 ton dan tahun 2022 sebesar 82.204</li> <li>5. Jeruk = peningkatan 61,41% tahun 2021 118.578 dan tahun 2022 sebesar 191.395</li> <li>6. Komoditi pangan khususnya padi ada peningkatan produksi 5,77% dibandingkan dengan tahun 2021, faktornya karena telah diperbaiki sarana dan prasarana yaitu irigasi.</li> <li>7. Komoditi perkebunan harga tandan buah segar (tbs) sawit relatif meningkat</li> </ol> <p><b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi pelaku usaha budidaya memiliki sertifikat cara budi ikan yang baik (CBIB)</li> <li>2. Bagi pelaku usaha pengolahan ikan memiliki sertifikat SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) yang memiliki standar higienis sesuai SNI</li> <li>3. Peningkatan jumlah pembudidaya seperti air tawar, laut, payau sehingga mendorong peningkatan produksi, jumlah pembudidaya tahun 2021 83.956 orang meningkat pada tahun 2022 menjadi 84.863 orang</li> </ol> <p>Budidaya Air Tawar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kematian masal ikan di danau maninjau</li> <li>6. Perikanan tangkap</li> <li>7. Faktor cuaca ekstrem, menyebabkan nelayan tidak melaut</li> <li>8. Kenaikan harga bbm, tidak semua nelayan mendapatkan bbm bersubsidi dan harus mendapat rekomendasi dari dinas kabupaten</li> <li>9. Budaya kerja yang masih rendah</li> </ol> <p><b>DINAS PANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dimanfaatkannya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan sebagai acuan oleh instansi terkait</li> <li>2. Sumatera barat daerah rawan bencana</li> <li>3. Belum optimalnya penanganan pada saat panen dan pasca panen sehingga food loses masih dalam jumlah yang cukup besar</li> <li>4. Masih rendahnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi pangan non beras dan non terigu</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan sarana produksi melalui dinas kab/kota</li> <li>2. Permintaan ikan budidaya dari provinsi tetangga sumatera utara, riau seperti ikan mas, ikan nila</li> <li>3. Jumlah produksi tahun 2021 sebanyak 260042,05 ton</li> <li>4. Jumlah produksi tahun 2022 sebanyak 278.480,59 ton (angka sementara), tingkat capaian 7,09%</li> </ol> <p>Perikanan Tangkap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi Perikanan Tangkap tahun 2021 sebanyak 212.520,50 Ton</li> <li>2. Produksi Perikanan Tangkap tahun 2022 sebanyak 218.688,66 ton (angka sementara) peningkatan produksi 2,90%</li> <li>3. Adanya bantuan saran penangkapan bagi nelayan seperti gillnet, trammelnet, fishbox, mesin tempel, longtail, dan perahu fiber</li> </ol> <p>DINAS PANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersedian pangan akhir tahun surplus</li> <li>2. Keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan pangan melalui toko tani indonesia center (ttic)</li> <li>3. Adanya sk nagari mandiri pangan, nagari rawan pangan sebanyak 113 nagari</li> <li>4. Memberikan bantuan pangan pada daerah rawan pangan, balita stunting, ibu hamil dan ibu menyusui sebanyak 6.672 kk</li> <li>5. Dalam rangka memenuhi konsumsi tingkat keluarga diberikan bantuan kawasan rumah pangan lestari dimana dilaksanakan pengoptimalan lahan perkarangan untuk 100 kelompok wanita tani contohnya budikdamber, bantuan ternak unggas (ayam dan itik).</li> <li>6. Adanya kerjasama distribusi pangan dengan provinsi tetangga seperti jambi, kepulauan riau, riau dan antar provinsi seperti jawa barat</li> </ol>	

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				7. Pemerintah provinsi Sumatera Barat memiliki cadangan pangan pemerintah berupa beras yang dititipkan di bulog sebanyak 459,085 ton dimana dapat dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial, gejala harga pangan dan keadaan darurat	
9	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	5	11,16	<p>DINAS KEHUTANAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan dari hasil hutan bukan kayu seperti :</li> <li>2. Lebah madu</li> <li>3. Rotan</li> <li>4. Ekowisata (Harau, Solok Rajo, Nyarai)</li> <li>5. Pupuk Kompos</li> <li>6. Getah Pinus</li> <li>7. Gula Aren</li> <li>8. Minyak kayu putih</li> <li>9. Serai wangi</li> <li>10. Kopi</li> <li>11. Gaharu</li> <li>12. Adanya fasilitas/ penyuluhan/ pendampingan bagi petani hutan</li> <li>13. Adanya pelatihan/sekolah lapangan bagi petani hutan</li> <li>14. Pengadaan Alat ekonomi produktif</li> <li>15. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk</li> </ol>	<p>DINAS KEHUTANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan SDM dalam pengoperasian alat yang diberikan oleh pemerintah</li> <li>2. Bantuan alat yang diberikan tidak optimal dimanfaatkan</li> <li>3. Akses pasar yang belum optimal</li> <li>4. Kualitas produk masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas</li> <li>5. Faktor cuaca yang mempengaruhi hasil produksi</li> </ol>
<b>MISI 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital</b>					

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	ndistribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	16,25	16,50	<p>BPS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya event-event besar yang di adakan yang mendorong perekonomian</li> <li>2. Kenaikan harga sawit yang meningkatkan daya beli masyarakat</li> <li>3. Sawit merukapan komoditas utama ekspor Sumatera Barat</li> <li>4. Kenaikan harga BBM yang memicu laju kenaikan barang dan jasa lain</li> <li>5. Tingkat hunian hotel meningkat, sektor pariwisata juga meningkat</li> </ol> <p>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya perjanjian kerja sama dengan negara lain yang membuka peluang bagi pelaku usaha</li> <li>2. Membuka pasar baru untuk komoditas utama Sumatera Barat</li> <li>3. Stabilitas harga dan ketersediaan harga bahan pokok perlu dijaga</li> <li>4. Adanya “Minyak Kita” yang diproduksi oleh pemerintah juga mendorong perekonomian</li> </ol>	<p>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya perusahaan karet yang tutup atau pindah ke daerah lain</li> <li>2. Sulitnya bahan baku karet yang menyebabkan peralihan pelaku usaha ke komoditas lain</li> <li>3. Kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga, upah tenaga kerja yang meningkat</li> <li>4. Penghentian ekspor CPO sementara yang diberlakukan pemerintah</li> <li>5. Kecendungan pelaku usaha/ petani yang mudah beralih ke sektor usaha lain/komoditas lain yang lebih menguntungkan dalam jangka pendek/menengah</li> <li>6. pendek/menengah</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	8,75	8,54	<p>BPS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kenaikan harga sawit mempengaruhi Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB karena sawit merupakan komoditas unggulan di Sumatera Barat</li> <li>2. Peningkatan industri makanan disaat hari besar keagamaan</li> </ol> <p>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penumbuhan sentra buru di sektor kuliner</li> <li>2. Pembinaan IKM yang berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait selain pemerintah</li> <li>3. Sudah banyaknya legalisasi, bantuan peralatan bagi pelaku IKM yang layak</li> <li>4. Pelibatan pihak-pihak diluar pemerintah dan kerjasama seperti kerjasama dengan Telkomsel</li> <li>5. Peningkatan akses pemasaran bagi pelaku IKM</li> <li>6. Pemanfaatan kearifan lokal pada bidang kuliner, fashion, dan produk lainnya</li> </ol>	<p>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih perlunya pelatihan dan pembinaan bagi pelaku IKM dalam digital marketing</li> <li>2. Masih banyaknya pelaku IKM yang belum terbiasa menggunakan/ memanfaatkan teknologi informasi</li> <li>3. Perlunya diversifikasi produk yang lebih masif seperti gambir menjadi produk turunan seperti sabun muka, odol dll</li> <li>4. Perlunya daerah menonjolkan kearifan lokal daerahnya sendiri yang diterapkan pada bidang kuliner, fashion, dan produk lainnya</li> <li>5. Belum adanya pabrik/industri pengolahan yang mempunyai akses keluar (ekspor) seperti pemanfaatan produk turunan kelapa dan komoditas potensial lainnya</li> <li>6. Belum optimalnya akses pasar bagi pelaku industri</li> </ol> <p>BPS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan industri sawit karena kebijakan pemerintah untuk menghentikan ekspor sawit</li> </ol>
3	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	-1,1	5,60	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permbuhan ekonomi tahun 2022 sudah membaik</li> <li>2. Karena pembatasan-pembatasan pasca covid-19 sudah tidak ada</li> <li>3. Eksport sawit/CPO meningkat</li> <li>4. Penjualan mobil meningkat karena adanya kebijakan pemerintah memberikan subsidi pajak (ppnbn) pembelian kendaraan baru</li> <li>5. Sektor pariwisata meningkat, tingkat hunian kamar hotel juga meningkat, diadakannya event-event besar sehingga meningkatkan aktivitas perdagangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan stop ekpor CPO sementara sehingga menyebabkan harga TBS di petani turun</li> <li>2. Belum siapnya faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar</li> <li>3. Meningkatnya biaya produksi dikarenakan harga BBM Naik</li> </ol>
4	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	368	289		-

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	(sentra)				
5	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	2,14	4,8* (data sementara)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koperasi menaikkan simpanan wajib dan modal dari anggota</li> <li>2. Bantuan hibah dari pemerintah seperti gedung dan sarana pengolahan ikan serta kapal nelayan dari Kementerian Perikanan</li> <li>3. Penambahan modal dari lembaga pembiayaan yang berdampak kepada penambahan modal koperasi</li> <li>4. Penambahan usaha koperasi terutama koperasi karyawan seperti pengadaan pakaian, ATK, DLL</li> <li>5. Penambahan asset dari koperasi seperti membangun gedung baru, membeli kebun sawit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya jumlah anggota koperasi yang keluar tidak sebanding dengan yang masuk menjadi anggota koperasi</li> <li>2. Anggota koperasi tidak membayar angsuran pinjaman dan simpanan wajib</li> <li>3. Rendahnya suku bunga bank daripada koperasi sehingga banyak anggota koperasi yang meminjam ke bank</li> <li>4. Usaha pertanian seperti sawit perlu dilakukan peremajaan sedangkan anggaran untuk peremajaan sawit cukup besar dan tidak ada bantuan dari pemerintah</li> <li>5. Persaingan usaha koperasi dengan perusahaan besar</li> </ol>
6	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	2,4	1,6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya program permodalan dari perbankan dan lembaga non perbankan</li> <li>2. Meningkatnya pemahaman UMKM terkait inovasi produk</li> <li>3. Memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses permodalan ke lembaga bank dan non perbankan</li> <li>4. Memfasilitasi UMKM untuk penguasaan teknologi pemasaran produk</li> <li>5. Mempertemukan UMKM dengan buyer melalui kegiatan pameran, bazar dan lain lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya modal UMKM yang berdampak kepada pengembangan usaha</li> <li>2. Inovasi dari produk UMKM yang rendah sehingga kurang diminati</li> <li>3. Terbatasnya akses pembiayaan UMKM ke perbankan dan lembaga perbankan</li> <li>4. Terbatasnya kapasitas SDM UMKM dalam penguasaan teknologi untuk pemasaran produk</li> <li>5. Terbatasnya promosi produk UMKM baik dalam dan luar daerah</li> </ol>
7	Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	14.961	14.418 (Parsial tahun 2022)	<p>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya jumlah pelatihan baik provinsi ataupun kab/kota, melakukan pembinaan dan sosialisasi LPK sehingga dapat melakukan</li> <li>2. Pelatihan</li> </ol> <p>DINAS KOPERASI DAN UKM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya generasi muda yang berminat menjadi entrepreneur</li> </ol>	<p>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum melakukan kesesuaian pasar kerja dengan pelatihan yang telah dilakukan, maka hal tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai dengan program</li> <li>2. Kurangnya instruktur untuk melakukan pelatihan</li> </ol> <p>DINAS KOPERASI DAN UKM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan SDM dalam penginputan profil UMKM</li> </ol>



No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>2. Bantuan permodalan untuk enterpreneur melalui dana KUR</p> <p>3. Adanya pendampingan dan tersedianya konsultan pasca pelatihan bagi enterpreneur</p> <p><b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN</b></p> <p>1. Adanya digitalisasi memudahkan dalam pemasaran</p> <p>2. Pelatihan/bimtek digital, bantuan alat bagi enterpreneur</p> <p>3. Kerjasama dengan dinas yang membidangi bidang perindustrian di kabupaten/kota</p> <p>4. Narasumber yang ahli dan berkompeten serta materi yang diberikan</p> <p>5. Fasilitasi perizinan berusaha</p> <p>6. Informasi permodalan perbankan</p> <p>7. Pengetahuan tentang marketplace dan ekonomi digital</p> <p>8. Pelatihan teknik terkait diversifikasi produk bagi calon ikm baru</p> <p><b>DINAS PARIWISATA</b></p> <p>1. Adanya pelatihan dan bimtek bagi pelaku wisata</p> <p>2. Adanya bantuan pikir yang besar untuk pelatihan bimtek bagi pelaku wisata</p> <p>3. Adanya pembinaan terhadap pelaku wisata seperti studi tiru untuk bisa membuka wawasan bagi pelaku wisata</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pengawasan dan pembinaan</p> <p><b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b></p> <p>1. Dukungan anggaran pikir yang besar</p> <p>2. Kreatifitas pemuda Sumatera Barat khususnya sektor Kria (kerajinan tangan) dan Kuliner</p> <p>3. Pelatihan motivasi, branding dan strategi marketing, sertifikat halal, pengurusan izin berusaha, akses</p>	<p>pada aplikasi Sumbar Digitalent</p> <p>2. Adanya syarat dalam pengimputan data enterpreneur melalui NIK hanya bisa di daftarkan satu kali</p> <p><b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN</b></p> <p>1. Belum tersedianya lapangan pekerjaan bagi wirausaha baru pasca pelatihan</p> <p>2. Belum adanya akses pemodaln untuk membuka usaha</p> <p>3. Akses literasi digital yang masih rendah</p> <p>4. Transportasi yang kurang lancar pada saat pelatihan karena peserta yang berasal dari berbagai kabupaten/kota pekerjaan bagi wirausaha baru pasca pelatihan</p> <p>5. Belum adanya akses pemodaln untuk membuka usaha</p> <p>6. Akses literasi digital yang masih rendah</p> <p>7. Transportasi yang kurang lancar pada saat pelatihan karena peserta yang berasal dari berbagai kabupaten/kota</p> <p><b>DINAS PARIWISATA</b></p> <p>1. Masih rendahnya tingkat kesadaran pengelola untuk pengelolaan tempat wisata seperti keramahan, kebersihan, kemacetan,</p> <p>2. Kenyamanan</p> <p>Perlu koordinasi dengan kabupaten/kota terkait sarana dan prasarana</p> <p><b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b></p> <p>Keterbatasan anggaran</p> <p>Peserta yang dikirim tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan</p> <p>masih rendahnya pelaku wirausahaan sesuai rentang usia 16-30 tahun</p>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>permodalan yang melibatkan narasumber yang kompeten dibidangnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan studi tiru</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi</li> <li>6. Memfasilitasi bantuan akses permodalan</li> <li>7. Pelatihan berupa digital marketing, kewirausahaan dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 30 tahun sesuai UU no.40 tahun 2009 tentang kepemudaan</li> <li>8. Adanya keseriusan pemerintah provinsi dalam</li> <li>9. Pengembangan wirausaha pemuda melalui program penciptaan 100 ribu entrepreneur</li> </ol> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan yang besar seperti Pokir untuk pelatihan, sarana dan prasarana</li> <li>2. Pelatihan pengolahan ikan dengan materi kewirausahaan, manajemen bisnis, pengolahan ikan yang kekinian</li> <li>3. Adanya tambahan alokasi dana karena termasuk dalam Progul</li> <li>4. Melibatkan Narasumber sebagai motivator, peserta pelatihan terdiri dari anak-anak panti asuhan, lulusan sekolah dan sarjana</li> </ol> <p>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan pengelolaan hasil usaha menuju ekspor ditargetkan bagi pelaku usaha dibidang peternakan (seperti pengolahan rendang, rendang telur, kerupuk kulit)</li> <li>2. Pelatihan juru sembelih halal (Juleha), diberikan sertifikat parca pelatihan diharapkan produk yang dikeluarkan halal</li> <li>3. Bimbingan teknik pengolahan pakan pada kelompok petani yang menerima bantuan</li> </ol>	<p>kecendrungan pemuda memilih pekerjaan lain seperti pegawai negeri, pekerjaan kantor dll</p> <p>kriteria pemuda tidak sesuai dengan tema pelatihan SDM wirausaha pemuda yang masih terbatas</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>Peserta pelatihan belum berbasis NIK dikhawatirkan terjadinya data ganda</p> <p>perlunya dukungan kabupaten/kota pasca pelatihan</p> <p>Proses pengadaan yang sering terlambat dan gagal tender</p> <p>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</p> <p>Adanya syarat peserta yang mengikuti pelatihan yang berbasis NIK</p> <p>Keterbatasan anggaran dengan target yang cukup besar</p> <p>adanya pelatihan yang merupakan kewenangan provinsi sehingga dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis</p> <p>DINAS SOSIAL</p> <p>Adanya syarat peserta yang mengikuti pelatihan yang berbasis NIK</p> <p>adanya peserta yang memiliki NIK ganda</p> <p>masih kurangnya monitoring dan evaluasi pasca pelatihan</p> <p>DINAS PANGAN</p> <p>Adanya syarat peserta yang mengikuti pelatihan yang berbasis NIK</p> <p>kebijakan anggaran yang lebih berfokus kepada fisik (bantuan berupa bibit, pupuk, pakan ikan/ayam/itik)</p> <p>DPMPTSP</p> <p>Keterbatasan waktu dan Narasumber pelatihan karena</p>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>DINAS SOSIAL</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah ada sub kegiatan yang ditampung sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019</li> <li>2. Kewenangan anak dalam panti sesuai PP no.2 tahun 2018 tentang SPM</li> <li>3. Permensos no. 9 tahun 2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal (SPM)</li> <li>4. Adanya kebijakan dari pemerintah provinsi sumatera barat terkait SPM</li> </ol> <p>DINAS PANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya bantuan fisik (budidaya ikan dalam ember, ternak ayam, itik, lele, peralatan pengolahan) maupun sosialisasi bagi peserta pelatihan</li> <li>2. Adanya pendampingan dari petugas kabupaten/kota</li> <li>3. Adanya bantuan sarana dan prasarana pada kelompok pangan lokal dpmptsp</li> <li>4. Sudah adanya forum komunikasi pelaku usaha daerah yang bertujuan mempertemukan pelaku usaha umkm dengan mitra</li> <li>5. Sudah adanya aplikasi simittra yang menembatani kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan usaha menengah</li> </ol> <p>DINAS KEHUTANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pembekalan Diklat, Pendampingan, bantuan alat (pengembangan rotan, dll), workshop kewirausahaan</li> <li>2. Monitoring dan evaluasi</li> <li>3. Komitmen dari semua unsur yang terkait</li> <li>4. Koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota</li> </ol> <p>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan Intansi terkait di lokasi kegiatan baik lokasi dan jadwal pelaksanaan serta personil</li> </ol>	<p>keterbatasan anggaran</p> <p>Banyaknya peserta yang tidak memahami teknologi informasi</p> <p>keengganan pelaku usaha untuk memakai aplikasi karena tidak sesuai dengan kriteria</p> <p>DINAS KEHUTANAN</p> <p>Adanya syarat peserta yang mengikuti pelatihan yang berbasis NIK</p> <p>Peserta yang dikirim tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan misalnya dari segi usia, kesiapan berusaha dll</p> <p>Minimnya Penguasaan teknologi dari calon peserta</p> <p>Jumlah SDM pendamping yang terbatas</p> <p>Materi dan peserta pelatihan yang masih belum berkelanjutan</p> <p>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</p> <p>Kehadiran peserta akibat kondisi Lapangan (terlambat dan diganti)</p> <p>Peserta mengharapkan bantuan alat atau peralatan pelatihan</p>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
8	Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%)	6	-* (angka sementara realisasi sama dengan target)	<p>DPMPTSP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pengawasan/inspeksi langsung ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi real dari laporan yang diberikan</li> <li>2. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi pada perusahaan PMA dan PMDN</li> <li>3. Tersediaanya data-data perusahaan dalam penentuan target dan pengawasan serta pembinaan</li> <li>4. Membentuk PIC yang bertanggung jawab dalam percepatan dari kelancaran laporan kegiatan usaha penanaman modal perusahaan dikab/kota</li> </ol>	<p>DPMPTSP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan sistem pelaporan ke OSS RBA sehingga banyak perusahaan yang belum</li> <li>2. Memahami tentang pelaporan kegiatan penanaman modal perusahaan</li> <li>3. SDM perusahaan yang banyak berhenti akibat Covid-19 sehingga tidak bisa melaporkan dengan sistem yang ada</li> <li>4. Perusahaan yang sudah berjalan namun belum mengantongi izin karena terkendala dalam pengurusan izin teknis dengan</li> <li>5. Berlakunya sistem OSS RBA</li> <li>6. Belum adanya data calon investor baru yang serius berinvestasi di Sumatera Barat</li> <li>7. Adanya pembatasan pelaporan investasi terkait dengan kriteria UMKM dimana nilai</li> <li>8. Investasi sampai dengan 1 Milyar tidak melaporkan</li> <li>9. Tidak adanya investasi baru yang tumbuh</li> <li>10. Selama tahun 2022 dan kegiatan proyek sebelumnya sudah selesai pada tahun 2021</li> <li>11. Tidak jalannya progress proyek jalan Tol Padang - Pekanbaru yang tidak sesuai dengan perencanaan investasi di Sumatera Barat yang merupakan salah satu pertimbangan peningkatan target investasi</li> <li>12. Masalah RTRW dan RDTR di kab/kota yang masih belum mengakomodir potensi investasi</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
9	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	6,54		<p>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta di ambil dari perguruan tinggi yang mempunyai minat dan punya produk</li> </ol> <p>DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK</p> <p>DINAS KOPERASI DAN UKM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya pelaku UMKM yang menggunakan teknologi Informasi dalam jejaring pemasaran sehingga peminat untuk pelatihan ini cukup tinggi</li> </ol>	<p>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulitnya mencari peserta karena persyaratan calon entrepreneur yang hanya boleh untuk satu sektor berdasarkan NIK</li> <li>2. Keterbatasan anggaran</li> </ol> <p>DINAS KOPERASI DAN UKM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya SDM Pelaku UMKM dalam penguasaan teknologi</li> </ol>
<b>MISI 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan</b>					
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12,62	-	-	-
2	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,24	1,35:	<p>BPS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya event-event besar</li> <li>2. Pasca COVID, pencabutan PPKM sehingga kegiatan masyarakat sudah normal kembali</li> </ol> <p>DINAS PARIWISATA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya festival yang dilakukan seperti, minang fashion festival, cap go meh dan melibatkan pelaku ekonomi kreatif</li> <li>2. Promosi wisata secara masif dilakukan lewat beberapa media-media, seperti media sosial</li> <li>3. Melakukan pengembangan tempat-tempat wisata</li> <li>4. Peningkatan kapasitas pemahaman 7 sapta pesona</li> </ol>	<p>DINAS PARIWISATA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya infrastruktur di tempat wisata</li> <li>2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan wisata atau sadar wisata</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>oleh pelaku wisata</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Membuka kembali rute penerbangan Padang - Malaysia</li> <li>6. Melakukan upaya rute langsung Bali – Padang</li> <li>7. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait</li> </ol>	
3	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	1,5	-	<p>DINAS PARIWISATA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya perhatian pada pelaku usaha ekraf</li> <li>2. Pembinaan terhadap pelaku usaha</li> <li>3. Adanya event-event ekonomi kreatif (lomba fotografer, fashion, dll)</li> <li>4. Adanya bimtek terhadap pelaku usaha ekraf</li> <li>5. Adanya sosialisasi HAKI</li> <li>6. Adanya regulasi terhadap ekraf (masih Draft PERDA)</li> </ol>	<p>DINAS PARIWISATA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya kualitas produk ekraf</li> <li>2. Harga-harga masih bervariasi (relatif tinggi)</li> <li>3. Masih kurangnya inovasi terhadap produk ekraf</li> </ol>
<b>MISI 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan</b>					

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,668	0,662	<p>DINAS PERHUBUNGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi trayek angkutan umum dengan melakukan pengawasan dan survey terhadap trayek angkutan umum</li> <li>2. Melakukan peningkatan kualitas SDM di 5 terminal Tipe B baik yang bersifat internal maupun eksternal</li> <li>3. Melakukan peningkatan fasilitas utama dan pendukung terminal tipe B di Provinsi Sumatera Barat</li> </ol>	<p>DINAS PERHUBUNGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya angkutan umum yang tidak memperpanjang KP (Kartu Pengawasan) maupun izin trayek sehingga dari data tidak</li> <li>2. Dapat diketahui apakah suatu lintasan trayek masih dilayani oleh angkutan umum/ tidak</li> <li>3. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi kepada pengusaha angkutan umum</li> <li>4. Masih minimnya pelaksanaan razia yang dilakukan bersama instansi terkait</li> </ol> <p>BIRO PEMERINTAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyaknya angkutan tidak resmi yang beroperasi pada trayek provinsi</li> </ol> <p>BPS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Populasi kendaraan pribadi yang meningkat sehingga menjadi salah satu pemicu tidak tercapainya target</li> </ol> <p>BIDANG INFRASWIL</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi antar moda yang kurang</li> </ol>
3	Kemantapan Jalan (%)	75	71,39	<p>DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya program hibah jalan daerah tahun 2022 sebagai pendorong kemantapan jalan provinsi terutama di ruas-ruas jalan pendukung KSPN Mandeh</li> <li>2. Sinergisitas yang baik antara unit kerja unit kerja penyelenggara jalan provinsi maupun internal unit kerja</li> </ol>	<p>DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi cuaca ekstrem yang menyebabkan turunnya kondisi layanan jalan dengan lebih cepat dan adanya beberapa spot yang</li> <li>2. Mengalami terban dan longsor</li> <li>3. Di beberapa ruas jalan provinsi masih dilewati truk-truk berat dengan tonase melebihi batasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan karena kelebihan beban</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
4	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,49	0,50* target BNP(menunggu data dari pusat)B (target rpjmd 0,62 tidak tercapai, penilaian mandiri 0,64 dari inaris)	<p><b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi yang baik antara BPBD Provinsi dengan Kabupaten/Kota</li> <li>Pada pra bencana diadakan pelatihan, sosialisasi, sarana prasarana seperti e-warning system</li> <li>Pada pasca bencana adanya kerjasama dengan Dinas PU dan OPD terkait untuk rekonstruksi pasca bencana</li> </ol> <p><b>BIDANG INFRASWIL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Di alokasikannya anggaran untuk pemenuhan indikator IKD terutama untuk Pelatihan dan bimtek, sarana dan prasarana mitigasi bencana</li> </ol>	<p><b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan data yang diberikan oleh OPD terkait kepada BPBD</li> <li>Rehabilitasi rekonstruksi yang diadakan di Pasaman dan Pasaman Barat yang masih dalam tahap pembangunan (BPBD hanya melakukan koordinasi dan monev. Anggaran dari BKK transfer ke daerah)</li> <li>Pada sistem inaris di upload sebelum verifikasi dan nilai capaian yang didapat 0,64, setelah di verifikasi kemudian di dapatkan nilai capaian 0,50</li> </ol> <p><b>BIDANG INFRASWIL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Data dan dokumen pendukung dari OPD terkait untuk memenuhi 71 indikator penilaian IKD terlambat dan belum terpenuhi</li> <li>Kekurangan peralatan dan logistik</li> <li>Disarankan untuk melakukan sosialisasi lebih awal dan FGD</li> </ol> <p><b>BPS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Upaya apa yang dilakukan untuk mencapai target sehingga didapatkan capaian 1</li> </ol>
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	77,43	74,98	<p><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan dan pemberian sanksi administrative terhadap pelaku usaha dan / atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan dan peraturan perundang undangan di bidang Lingkungan Hidup</li> <li>Pogram penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup (proper nasional) yang dilakukan oleh KLHK setiap tahun</li> <li>Program penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (properda) yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar setiap tahun</li> </ol> <p><b>DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b></p>	<p><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dasar perhitungan IKLH dulu berbeda dengan dasar perhitungan IKLH yang saat ini</li> <li>Perbedaan sumber data untuk perhitungan IKLH khususnya indeks kualitas Air (IKA)</li> <li>Perhitungan IKA yang saat ini didasarkan pada data yang di input oleh pusat provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan data IKA yang di RPJMD didasarkan dari data yang dilakukan pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat</li> <li>Ada perbedaan data terkait dengan pembobotan di dalam perhitungan konversi dari indeks pencemaran</li> </ol>



No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai 3 IKD yang mendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (tambang, pemanfaatan energi terbarukan, konservasi air</li> <li>2. Tahan)</li> <li>3. Bauran energi</li> <li>4. Faktor pendukung : bisa mencapai target karena</li> <li>5. Merupakan target nasional yang tertuang di dalam dokumen rencana umum energi nasional (RUEN)</li> <li>6. Bidang air tanah</li> <li>7. Faktor pendukung : ketersediaan sumber daya</li> <li>8. Manusia yang memadai</li> <li>9. DINAS KEHUTANAN</li> <li>10. Indeks Tutupan Hutan (luas hutan/ luas Sumatera Bbarat x indeks)</li> <li>11. Untuk perhitungan dan penanganan hutan sudah melibatkan masyarakat dalam bentuk masyarakat peduli api dan lembaga masyarakat perlindungan hutan berbasis nagari mengatasi kekurangan tenaga polisi kehutanan</li> <li>12. Di dorong dengan adanya dana bagi hasil dan reboisasi yang penggunaannya spesifik untuk pembangunan kehutanan</li> <li>13. Sudah menyusun dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan hutan selama 1 tahun berjalan</li> <li>14. Untuk mendukung sosialisasi, masyarakat juga memiliki penyuluh kehutanan masyarakat non ASN/ swadaya masyarakat dalam pembangunan kehutanan</li> </ol>	<p>air IPA ke indeks kualitas Air IKA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pembobotan pada RPJMD menggunakan bobot 100 sedangkan di realisasi IKLH menggunakan bobot 70</li> <li>6. Perhitungan formulasi IKLH mengacu kepada Ppermen LHK No. 27 Tahun 2021 sedangkan penetapan di RPJMD menggunakan formasi yang lama</li> <li>7. Capaian 96,82</li> <li>8. Belum adan program pemulihan sungai yang dilakukan secara terpadu baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota</li> <li>9. Program/ kegiatan pemulihan/ rehabilitasi lahan tidak sebanding dengan laju penurunan tutupan lahan</li> <li>10. Belum ada regulasi terkait pembatasan kendaraan bermotor</li> </ol> <p>BPS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait capaian dan target tidak bisa dibandingkan karena adanya perbedaan konsep perhitungan</li> </ol> <p>BAPPEDA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target IKLH yang ditetapkan oleh kementerian KLHK untuk Provinsi Sumatera Barat 73,01</li> </ol> <p>DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai IKD sebanyak 5 poin yang mendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Tambang, pemanfaatan energi terbarukan, konservasi air tanah</li> <li>3. Persentasi usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda</li> <li>4. Faktor pernghambat : perubahan regulasi pada saat kegiatan sedang dilaksanakan, sehingga pada tahun 2022 tidak memiliki target untuk kegiatan tersebut karena kewenangannya diambil alih oleh pusat, dan</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					<p>pada tahun 2023 sebagian kewenangan didelegasikan ke pemerintah provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Porsi energi terbarukan dalam bauran energi faktor penghambat : alokasi anggaran yang sangat terbatas untuk peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dan keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan</li> <li>6. Persentasi luasan daerah konservasi air tanah</li> <li>7. Faktor penghambat : adanya perubahan</li> <li>8. Regulasi pada saat kegiatan sedang dilaksanakan</li> </ol> <p><b>DINAS KEHUTANAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terjadinya deforestasi hutan dan lahan karena ketergantungan masyarakat terhadap hutan masih tinggi</li> <li>2. Rehabilitasi hutan dan lahan belum signifikan mereforestasi hutan dan lahan</li> <li>3. Kurangnya tenaga polisi kehutanan dan penyuluh kehutanan</li> </ol> <p><b>KETERANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan evaluasi RPJPD akan dilakukan menggunakan format perhitungan IKLH yang baru</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
6	Akses Air Minum (%)	82	85,23	<p>DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Kabupaten/ Kota terhadap pemenuhan capaian SPM</li> <li>2. Mendorong Kabupaten/ Kota untuk menyusun program dan perencanaan (readiness</li> <li>3. Criteria) melalui pembinaan dan monev</li> <li>4. Merekomendasikan kepada Kabupaten/ Kota untuk meningkatkan penganggaran terhadap akses air minum skala kecil (pamsimas)</li> <li>5. Berkoordinasi dengan balai BPPW untuk meningkatkan akses air minum ke Kabupaten/ Kota</li> </ol>	<p>DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mencapai outcome butuh konsistensi dan waktu pelaksanaan yang lama dari 5-10 tahun</li> <li>2. Kewenangan provinsi hanya ada pada kegiatan SPAM regional sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>3. Biaya pelaksanaan dan waktu yang dibutuhkan sangat besar dan lama (long time construction)</li> <li>4. Konflik sosial yang sangat tinggi antara Kabupaten/ Kota</li> <li>5. Kemampuan fiskal provinsi dan Kabupaten/ Kota di sumbar sangat lemah</li> <li>6. Rendahnya kepedulian eksekutif dan legislatif terhadap kepedulian akses air minum layak</li> </ol> <p>BPS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampel yang berubah setiap tahunnya dari angka susenas</li> <li>2. Air minum layak sudah tidak di hitung BPS terakhir dilakukan pada tahun 2020</li> </ol>
7	Akses Sanitasi Layak (%)	82	69,2	<p>DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah masuk dalam program dan kegiatan melalui</li> <li>2. Pembinaan kegiatan ssk di pokja pkp provinsi</li> <li>3. Memperkuat pembinaan melalui kegiatan monev dan advokasi kepada stakeholder di kab/kota</li> <li>4. Melaksanakan bimtek secara konsisten kepada kab/kota</li> <li>5. Memperbanyak kab kota yang mendapatkan pendampingan melalui kegiatan percepatan</li> <li>6. Pendampingan sanitasi permukiman (ppsp kepada kab/kota)</li> <li>7. Melakukan advokasi kepada kepala daerah kab/kota</li> </ol>	<p>DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kegiatan banyak dilaksanakan di kab/ kota, provinsi lebih kepada pembinaan</li> <li>2. Sumber pembiayaan dari apbn lebih kepada operasional, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehab ipt existing</li> <li>3. Keterbatasan anggaran kab/ kota</li> <li>4. Kecilnya rasio anggaran kab/kota untuk program sanitasi</li> <li>5. Pola kebiasaan masyarakat, belum menjadikan sanitasi layak sebagai prioritas</li> <li>6. Perkotaan : yang menggunakan leher angsa 97,12%, tangki septic 82,9%, ipal 0,21%</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					7. Perdesaan : yang menggunakan leher angsa 93,43%, tangksi septic 63,18% sisanya menggunakan lubang tanah, kolam sungai dll, pal 0,69%, tidak memiliki iplt dan biaya sedot tinja mahal
8	Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%)	40,22	6	<p>DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah menyiapkan dokumen perencanaan gedung (DED, dokling, FS)</li> <li>2. Telah menyediakan lokasi lahan</li> </ol> <p>SARAN BAPPEDA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar diidentifikasi prioritas pembangunan gedung strategis</li> </ol>	<p>DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentasi bangunan strategis dibangun dihitung berdasarkan jumlah bangunan strategis terbangun, bangunan strategis di</li> <li>2. Sumatera barat berjumlah 18 untuk menyelesaikan pembangunan tersebut, diperlukan dana yang cukup besar</li> <li>3. Persentasi bangunan strategis terbangun dihitung berdasarkan kondisi bangunan 100% terbangun, sedangkan penganggaran yang disetujui tidak dalam kondisi 100% dibangun strategis (dibangun bertahap)</li> </ol>
9	Peresentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	70,36	71,06	<p>DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi kelembagaan P3A / GP3A</li> <li>2. Adanya sumber Dana DAK 2022 selain APBD untuk rehabilitasi daerah irigasi</li> </ol> <p>BPS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah irigasi yang dihitung adalah areal yang tampak</li> </ol>	-
10	Persentase Volume tampungan sumber-sumber air (%)	53,78	58,73	<p>DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terkait penyediaan lahan</li> </ol>	<p>DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada awal pekerjaan masih ada penolakan</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
11	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	66,51	66,90	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI 1. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terkait penyediaan lahan	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI 1. Faktor cuaca ekstrem yang tidak bisa ditebak 2. Kinerja penyedia jasa (pihak ke-3)
12	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%)	86	86	DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 1. Dokumen perencanaan sudah disusun dengan baik sesuai arahan Bappenas sehingga terdapat sinkronisasi program dan untuk menyusun dokumen perencanaan baik perencanaan pembangunan maupun tata ruang telah melibatkan seluruh stakeholder	-
<b>MISI 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas</b>					
1	Indeks reformasi birokrasi	68,5	69,88 (Data sementara melalui asisten deputi menpan RB)	BIRO ORGANISASI 1. Tersedianya roadmap reformasi birokrasi periode 2022-2026 yang sudah ditetapkan dengan pergub No. 27 Tahun 2022 2. Meningkatnya pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya reformasi birokrasi ditandai dengan bertambahnya nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) yang dikeluarkan oleh inspektorat 3. Rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi sudah dilakukan secara berjenjang mulai dari rencana aksi Pemerintah Daerah sampai dengan rencana aksi perangkat daerah 4. Faktor pengungkit 8 area perubahan reformasi birokrasi rata-rata mengalami peningkatan BIDANG PPM 1. Tranformasi sistem kerja melalui penyetaraan jabatan fungsional yang mendorong ASN bekerja lebih maksimal sesuai dengan kompetensinya dan juga dapat bekerja lintas minat unit organisasi	BIRO ORGANISASI 1. Masih rendahnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi 2. Masih sulitnya memperoleh data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi 3. Tim RB perangkat daerah belum melaksanakan tugas secara optimal 4. Terlalu dinamisnya perubahan kebijakan dari kementerian pusat 5. Masih adanya pengaruh intervensi politik terhadap reformasi birokrasi  BIDANG PPM 1. Masih adanya kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian dan lembaga INSPEKTORAT 1. Masih sulitnya memperoleh data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>SARAN BPS</p> <p>2. Diadakannya program Change Champion</p> <p>INSPEKTORAT</p> <p>1. Melakukan pendampingan dalam pengisian LKE (Lembar Kerja Evaluasi) PMPRB kepada Pusat (Pemda) dan unit kerja (OPD Provinsi)</p>	
2	Nilai SAKIP (predikat)	BB	BB (78,02 sumber data Masih data sementara)	<p>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</p> <p>1. Permenpan RB Nomor 26 tahun 2020 pada area tata laksana tentang indeks pengawasan arsip</p> <p>2. Permendagri nomor 18 Tahun 2020 tentang LPPD terdapat salah satu indikator tingkat ketersediaan dan keberadaan arsip.</p> <p>3. Hasil pengawasan kategori baik, kategori yang ada pada peraturan kepala arsip nasional tahun 2020</p> <p>4. Sebagai penyelenggara negara, bisa menjadikan arsip sebagai sumber informasi dibuktikan dengan ketersediaan data arsip di setiap OPD</p> <p>5. Sudah menggunakan e-surek atau srikandi yaitu aplikasi yang mendukung kearsipan.</p> <p>BIRO ORGANISASI</p> <p>1. Mengembangkan kembali aplikasi E-SAKIP yang terintegrasi dengan aplikasi Simpeg untuk memudahkan perjanjian kinerja individu</p> <p>2. Pendampingan perangkat daerah dalam pembuatan perjanjian kinerja secara berjenjang dari eselon II sampai ke individu</p> <p>3. Meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>BAPPEDA</p> <p>1. Menjaga keselarasan antara sasaran strategis dan program kegiatan sehingga seluruh anggaran digunakan secara efektif dan efisien seperti</p>	<p>BIRO ORGANISASI</p> <p>1. Belum sempurnanya penilaian E-Sakip</p> <p>2. Masih kurangnya komitmen dalam mengedepankan kinerja</p> <p>3. Belum optimalnya pemahaman peran masing-masing fungsi secara berjenjang dalam menjalankan organisasi</p> <p>4. Pemahaman evaluator internal yang masih berbeda-beda</p> <p>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</p> <p>1. Data arsip pada OPD tidak tersedia, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sumber informasi</p> <p>2. rendahnya pemahaman OPD terhadap pengelolaan arsip dengan baik, kepedulian terhadap arsip juga masih rendah.</p> <p>3. Fungsi sekretariat pada OPD belum optimal dalam pengelolaan kearsipan dinamis.</p> <p>4. Tidak semua OPD yang memiliki SDM dengan latar belakang arsiparis/pengelola arsip dan fungsional arsiparis.</p> <p>BIDANG PPM</p> <p>1. Belum optimalnya integrasi sistem kearsipan elektronik dan penerapan srikandi (sitem informasi kearsipan dinamis terintegrasi).</p> <p>2. Masih belum adanya Reward dan punishment yang tegas dalam menerapkan akuntabilitas kinerja</p>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>pelaksanaan musrenbang, mengawal program unggulan, clearing house terhadap OPD, Verifikasi dokumen perencanaan, verifikasi dokumen anggaran.</p> <p>2. Internalisasi pentingnya kepemilikan kinerja pada lini pimpinan seperti dialog kinerja antara pimpinan daerah, rapor kinerja OPD</p> <p><b>BPKAD</b></p> <p>1. Melakukan reconfusing program kegiatan dengan menghapus program kegiatan yang tidak berkontribusi signifikan terhadap capaian kinerja Pemerintah daerah</p> <p><b>INSPEKTORAT</b></p> <p>1. Mendorong peningkatan kapasitas evaluator dalam melakukan evaluasi internal melalui pelaksanaan bimtek</p> <p>2. Melakukan pendampingan evaluasi SAKIP terhadap OPD</p> <p><b>BIDANG PPM</b></p> <p>1. Sudah menerapkan tata kelola kearsipan berbasis elektronik SIKD (Sitem Informasi Kearsipn Dinamis) dan aplikasi internal Dinas Kominfo Sumbar seperti e surek.</p>	

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
3	Nilai EPPD (skor)	3,001	3,0155 (data terakhir tahun 2019 untuk penilaian tahun 2018)	<p>BIRO PEMERINTAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mempercepat pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Sumatera Barat</li> <li>Langsung melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang disampaikan oleh setiap OPD; Melakukan self assesment terhadap dokumen LPPD Sumatera Barat</li> <li>Seluruh OPD telah mengakomodasi IKK LPPD ke dalam dokumen perencanaan; Komitmen kepala OPD dalam peningkatan nilai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di masing-masing OPD</li> </ol>	<p>BIRO PEMERINTAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya keterlambatan penyampaian data atau dokumen dari OPD; Masih adanya dokumen/ bukti pendukung IKK LPPD dari sebagian OPD dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang belum tersedia; Ada beberapa IKK yang telah dianggarkan namun terkena dampak di rasionalisasi anggaran; Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap IKK LPPD yang disebabkan belum optimalnya regenerasi pegawai (SDM)</li> </ol>
4	Opini laporan keuangan (opini)	WTP	WTP	<p>INSPEKTORAT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan reviu laporan keuangan dan audit penyelenggaraan keuangan OPD dan Pemerintah daerah</li> <li>Peningkatan kapasitas evaluator dalam melakukan reviu laporan keuangan OPD dan Pemerintah daerah dengan melaksanakan bimtek, diklat, PKS (Pelatihan Kantor Sendiri)</li> </ol> <p>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga validnya data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Angka Realisasi Pendapatan, Angka Realisasi Belanja, Angka Realisasi Pembiayaan, melalui :</li> <li>Rekonsiliasi pendapatan dan belanja (LRA) Pemda setiap bulannya antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (selaku Bendahara Umum Daerah) dengan Badan Pendapatan Daerah</li> <li>Rekonsiliasi atas pemungutan perhitungan Pihak Ketiga pada belanja pegawai dengan BPJS Kesehatan dan PT. Taspen;</li> </ol>	<p>INSPEKTORAT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum maksimalnya peran masing-masing fungsi secara berjenjang dalam mencapai tujuan organisasi</li> </ol> <p>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan perundang-undangan, sistem, dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan</li> <li>Pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD.</li> <li>Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan serta penyelesaian permasalahan</li> <li>Dalam pengelolaan aset daerah.</li> <li>Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun berjalan belum disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi.</li> </ol>



No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Rekonsiliasi Daftar Transaksi Harian Pajak dan rekonsiliasi Harian Pajak atas belanja pada APBD Provinsi Sumatera Barat dengan OPD dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI melalui KPKN;</li> <li>5. Rekonsiliasi posisi kas daerah dengan Bank Pemegang Kasda yaitu PT. BPD Sumatera Barat (Bank Nagari);</li> <li>6. Rekonsiliasi dana perimbangan DAK Non Fisik dengan Kementerian Keuangan RI;</li> <li>7. Rekonsiliasi pendapatan pajak daerah setiap bulannya antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dengan Bidang Pajak Daerah dan Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah;</li> <li>8. Rekonsiliasi Data antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dengan 51 SKPD (yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran).</li> <li>9. Melakukan asistensi dan fasilitasi kepada SKPD, terkait penyusunan laporan keuangan.</li> <li>10. Menjaga Validasi data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyangkut Angka Aset Tetap, Aset Lainnya, Investasi Jangka Panjang dan Hutang, yang dilakukan melalui upaya sebagai berikut:</li> <li>11. Rekonsiliasi data antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan Bidang Pengelolaan BMD pada BPKAD dengan SKPD (untuk Aset Tetap)</li> <li>12. Rekonsiliasi Data antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dengan SKPD dan Biro Perekonomian serta Bank Nagari.</li> <li>13. Membantu SKPD dalam melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> </ol>	

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Bendahara, PPK, dan Sekretaris seluruh SKPD.</p> <p>14. Melaksanakan Update Aplikasi SIPD sebagai aplikasi utama dan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD) sebagai aplikasi</p> <p>15. pendukung untuk memudahkan SKPD dalam menyusun RKA, DPA, membuat SPP, SPM, dan SP2D menyusun SPJ serta menyusun Laporan Keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, serta melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh operator aplikasi pada masing-masing OPD.</p> <p>16. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan secara berkala dengan bekerjasama dengan inspektorat untuk mengawasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD yaitu oleh PA, KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Untuk meyakinkan bahwa Laporan Keuangan yang telah disusun oleh SKPD dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah melalui Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat baik Semesteran, Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>17. Menyusun Rencana Aksi Penyelesaian Masalah Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan dibawah koordinasi BPKAD Provinsi</p> <p>18. Sumatera Barat Untuk menyelesaikan permasalahan aset dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan para stakeholder serta pihak-pihak terkait.</p> <p>19. Melakukan pendampingan secara terus menerus melalui group Whatsapp Untuk masalah-maslah terkait penggunaan aplikasi baik SIPD maupun SIPKD dimana setiap permasalahan yang dialami</p>	

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				oleh SKPD akan segera diupayakan penyelesaian dan ditindaklanjuti langsung oleh admin di BPKAD.	
5	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	37,84	46,50	<p><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan pajak seperti adanya Pergub Pemutihan Pajak, Pergub 5 Untung, dan Sosialisasi pajak</li> <li>Adanya inovasi pelayanan pajak yang lebih efektif dan efisien menggunakan aplikasi</li> <li>Adanya komitmen dari pemerintah daerah</li> </ol> <p><b>MASUKAN BIDANG PEMERINTAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dukungan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik sudah di alokasi kan melalui progul</li> </ol>	<p><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inflasi sangat mempengaruhi PAD</li> <li>Tidak disiplinnya wajib pajak dalam membayar pajak</li> <li>Kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana, seperti komputer dan peralatan lainnya</li> <li>Kurangnya SDM IT</li> </ol>
6	Indeks SPBE (indeks)	3,2	3,18	-	-
7	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	74	belum dipublish BKN	<p><b>BKD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada setiap 5 komponen indikator didukung oleh adanya evidence</li> </ol>	<p><b>BKD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya perubahan kebijakan terkait pemberian tugas belajar ASN yaitu SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi PNS merupakan pedoman pemberian tugas belajar bagi daerah.</li> <li>Belum tercapainya hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN terutama pada indikator kualifikasi dan kompetensi (sudah mengikuti Diklat PIM)</li> <li>Hasil pengukuran yang belum dipublish oleh BKN.</li> </ol> <p><b>BPS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bidang PPM</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
8	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	84,5	90,48	<p><b>BIRO ORGANISASI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara continue meningkatkan kualitas SDM penyelenggara publik</li> <li>2. Meningkatnya evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan standar pelayanan publik/ melakukan review ulang terhadap standar pelayanan publik</li> <li>3. Mendorong agar unit penyelenggara pelayanan publik melaksanakan inovasi pelayanan publik</li> <li>4. Mengoptimalkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui lapor SPAN (Kanal 1708)</li> <li>5. Adanya regulasi tentang survei kepuasan masyarakat diantaranya yaitu pasal 27 ayat 1,2,3 dan Perda Nomor 6 Tahun 2016. Dengan kategori cukup, baik, sangat baik,</li> <li>6. Survei kepuasan masyarakat dengan pihak ke 3 atau swakelola</li> </ol> <p><b>BADAN PENGHUBUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kerjasama promosi untuk pagelaran festival seni budaya sumatera barat diantaranya dengan pihak angkasa pura terminal 3 soetta, dengan dinas kebudayaan dan pendidikan kab/kota di sumatera barat</li> </ol> <p><b>BPS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kualitas persepsi pelayanan pada BPS dilaksanakan melalui aplikasi Romantik</li> </ol> <p><b>BIRO PBJ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah pada K/L/PD minimal baik dengan kriteria kematangan, personil, nilai RUP berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</li> </ol>	<p><b>BIRO ORGANISASI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sumber daya baik keuangan, aparatur, maupun sarana dan prasarana sehingga tidak dapat dilakukan survey kualitas</li> <li>2. Pelayanan publik</li> <li>3. Rendahnya pemahaman penyelenggara pelayanan publik dalam memahami regulasi pelayanan publik</li> <li>4. Belum terbangunnya kolaborasi antara penyelenggara pelayanan publik sehingga</li> <li>5. Pelayanan publik satu pintu belum dapat diwujudkan</li> <li>6. Tingginya biaya SKM apabila dilakukan melalui pihak ke 3 atau swakelola</li> <li>7. Sebagian OPD menganggap tidak perlu melakukan SKM karena tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.</li> <li>8. Jika SKM dilakukan dengan swakelola hasil menjadi seperti yang tidak diharapkan</li> <li>9. Personil yang melaksanakan SKM banyak yang belum memahami Permenpan Nomor 14 Tahun 2017.</li> </ol> <p><b>BIDANG PPM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum semua UKKP (Unit Kerja Pelayanan Publik) di evaluasi</li> </ol> <p><b>BADAN PENGHUBUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi anjungan oleh pihak TMII sehingga banyaknya kegiatan-kegiatan yang ada di anjungan tertunda atau tidak telaksana sesuai dengan target</li> <li>2. Adanya keterbatasan akses masuk ke seluruh anjungan daerah di TMII</li> </ol> <p><b>BIRO PBJ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Level kematangan UKPBJ masih level 3 8/9, menunggu verifikasi usulan peraturan gubernur atau keputusan gubernur mengenai kode etik UKPBJ dari Biro Hukum</li> </ol>

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target pada Renstra Tahun 2022 yaitu 82, dengan capaian 90,47 predikat sangat baik (kerjasama dengan LP2M UNP), kuisisioner disebar berupa google form dengan Dinas dukcapil kabupaten/kota dan OPD Provinsi Sumbar.</li> <li>2. Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik sebagai dasar menghitung survei kepuasan masyarakat.</li> <li>3. Sinergisitas yang baik antara Dinas Dukcapil Sumbar dan Dinas dukcapil kabupaten/kota, sehingga permasalahan terkait layanan dalam mencapai target nasional dapat teratasi.</li> <li>4. Adanya dukungan pemerintah pusat dalam rangka pencapaian target nasional.</li> </ol> <p>BPS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya survei kepuasan masyarakat</li> <li>2. Perlu membuat penyeragaman indeks kepuasan masyarakat karena dianggap setiap OPD memiliki bobot yang sama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rendahnya disiplin PPK OPD dalam melaksanakan tahap proses pengadaan secara elektronik melalui SPSE dan katalog LKPP s.d selesai</li> <li>3. Pada saat penetapan target indeks tata kelola barang dan jasa minimal baik pada dokumen RPJMD, dan Renstra menggunakan indikator dan bobot berdasarkan SE kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2021 bulan April dan ada Perubahan SE Nomor 4 Tahun 2021 pada bulan Desember sehingga kondisi kekinian tidak sesuai lagi dengan dokumen RPJMD.</li> </ol> <p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sarana prasarana dalam pengolahan penyajian data kependudukan</li> <li>2. Keterbatasan SDM pengolahan dan penyajian data kependudukan</li> <li>3. Keterbatasan anggaran untuk memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan kabupaten/kota BIDANG PPM</li> <li>4. Belum semua OPD melakukan survei kepuasan masyarakat dengan memakai pihak ke 3 yang independen dan masih ada beberapa OPD yang melakukan penilaian secara swakelola, penilaian secara swakelola berpotensi bias.</li> </ol>

## 1.4.2 Indikator Kinerja Daerah

Tabel 1.27.

### Indikator Kinerja Daerah

No	INDIKATOR	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,4	4,36	128,23 %	
2	PDRB ADHK2 Per Kapita (Rp. Juta)	32	32,37	101,15 %	
3	PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	48,29	50,593	104,76 %	
4	Indeks Gini (Ratio)	0,298	0,292 (sept 2022)	102,05 %	
5	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,31			
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,28	6,04	103,97 %	
7	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	356,45	343,82	103,67 %	
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,6	6,16	107,14 %	
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,74	73,26	100,71 %	
	a. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,05	14,1	100,36 %	
	b. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,18	9,18	100,00 %	
	c. Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,8	69,9	100,14 %	
	d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	10,91	11,13	102,02 %	
<b>I.</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
1.	Urusan Pendidikan				Disdik
	a. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (%)	73,42	77,19	105,13	Disdik
	b. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus(%)	53,80	85,78	159,44	Disdik
	c. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	58,2	0	0,00	Disdik
	d. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	27,4	0	0,00 %	Disdik
	e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat(%)	93,22	103,47	111,00	Disdik
	f. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (%)	52,38	50,94	97,25	Disdik
	g. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (%)	32,77	31,32	95,58	Disdik
	h. Persentase SMA Negeri terakreditasi	87,46	98,19	112,27	Disdik
	i. Persentase SMK Negeri terakreditasi	85,02	95,77	112,64	Disdik
	j. Persentase SLB Negeri terakreditasi	53,38	89,17	167,05	Disdik
2.	Urusan Kesehatan				
	a. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (RSAM, RS M.Natsir, RSUD Pariaman)	1:875	1:875	100,00	Dinas Kesehatan

No	INDIKATOR	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	b. Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi (%)	100	100	100,00	Dinas Kesehatan RSAM, RS, M. Natsir, RSJ HB Sa'anin Padang, RSUD Solok
	c. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	100	100	100,00	Dinas Kesehatan
	d. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	100	100	100,00	Dinas Kesehatan
	e. Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	97,8	97,8	100,00	Dinas Kesehatan
	f. Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	78,5	78,5	100,00	Dinas Kesehatan
	g. Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	86	86	100,00	Dinas Kesehatan
	h. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	75	65	86,67	Dinas Kesehatan
	i. Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	86,1	86,04	99,93	Dinas Kesehatan
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	0,69	0,85	123,19	Dinas SDA dan Bina Konstruksi
	b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan provinsi (%)	1,83	2,92	159,56	Dinas SDA dan Bina Konstruksi
	c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	4,03	4,91	121,84	Dinas SDA dan Bina Konstruksi
	d. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)	11,11	0,46	4,14	Dinas SDA dan Bina Konstruksi
	e. Persentase volume tampungan sumber-sumber air	53,78	58,6	108,96	Dinas SDA dan Bina Konstruksi
	f. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	0	0		Dinas BMCKTR

No	INDIKATOR	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	g. Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	0	0		Dinas BMCKTR
	h. Rasio kemandapan jalan provinsi	75	75	100,00	Dinas BMCKTR
	i. Akses Air Minum Layak (%)	82	82,26	100,32	Dinas BMCKTR
	j. Akses Sanitasi Layak (%)	82	82,05	100,06	Dinas BMCKTR
	k. Persentase penataan bangunan pada Kawasan strategis (%)	20	2,5	12,50	Dinas BMCKTR
	l. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	86	86	100,00	Dinas BMCKTR
4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	a. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100,00	Dinas Perkimtan
	b. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100	100,00	Dinas Perkimtan
	c. Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani (%)	7,09	8	112,83	Dinas Perkimtan
	d. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	4	1	25,00	Dinas Perkimtan
	e. Persentase Peningkatan PSU Permukiman (%)	17,26	69,04	400,00	Dinas Perkimtan
5.	Urusan Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
	a. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	77,00	81,81	106,25	Satpol PP
	b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	77,00	75	97,40	Satpol PP
	c. Indeks Penegakan Peraturan Daerah	76	75	98,68	Satpol PP
	d. Persentase Kabupaten/Kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	84,21	84,21	100,00	Satpol PP
	e. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	53	75	141,51	Satpol PP
	f. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	25	18,75	75,00	BPBD
	g. Persentase penanganan pra bencana	100	100	100,00	BPBD
	h. Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100	100,00	BPBD
6.	Urusan Sosial				
	a. Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100,00	Dinas Sosial



No	INDIKATOR	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	b. Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100,00	Dinas Sosial
	c. Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100,00	Dinas Sosial
	d. Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	100	100	100,00	Dinas Sosial
	e. Indeks Partisipasi Sosial (indeks)	0,687	75,3	109,61	Dinas Sosial
<b>II.</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
7.	Urusan Ketenagakerjaan				
	a. Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja. (%)	100	84,21	84,21	Dinas Nakertrans
	b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	31,04	37,01	119,23	Dinas Nakertrans
	c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,91			Dinas Nakertrans
	d. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	41,95	50,46	120,29	Dinas Nakertrans
	e. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	35,52	17,3	48,70	Dinas Nakertrans
	f. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	12,36	19,2	155,34	Dinas Nakertrans
	g. Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan (%)	54,31	50,46	92,91	Dinas Nakertrans
	h. Persentase Serapan tenaga Kerja	35,52	20,84	58,67	Dinas Nakertrans
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	a. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	4,15	4,15	100,00	Dinas P3AP2KB
	b. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100.000 penduduk perempuan)	16	7,5	153,13	Dinas P3AP2KB
	c. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (rasio)	1	2,56	-56,00	Dinas P3AP2KB
	d. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	17	17	100,00	Dinas P3AP2KB
	e. Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	Utama	Utama	100,00	Dinas P3AP2KB
	f. Persentase perempuan di legislative (%)	10,76	10,76	100,00	Dinas P3AP2KB
	g. Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	11,54	20	173,31	Dinas P3AP2KB
	h. Persentase Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	37,65	37,65	100,00	Dinas P3AP2KB
	i. Indeks pemenuhan hak anak	65,23	66,15	101,41	Dinas

No	INDIKATOR	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	OPD Penanggung Jawab
					P3AP2KB
	j. Jumlah kasus perceraian baru	6.225	4380	184,25	Dinas P3AP2KB
9.	Urusan Pangan				
	a. Persentase cadangan pangan (%)	92	83,6	90,87	Dinas Pangan
	b. Ketersediaan pangan utama (ton)	833.110	833.110	100,00	Dinas Pangan
	c. Skor Pola Pangan Harapan (skor)	82,5	89,8	108,85	Dinas Pangan
	d. Persentase Keamanan pangan yang beredar di masyarakat (%)	83	96,6	116,39	Dinas Pangan
	e. Coefisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV)				
	- Beras	CV ≤10	CV < 10	100,00	Dinas Pangan
	- Cabe Merah	CV ≤25	CV < 25	100,00	Dinas Pangan
	- Bawang Merah	CV ≤25	CV < 25	100,00	Dinas Pangan
10.	Urusan Pertanahan				
	a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	0	0		Dinas Perkimtan
	b. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)	100	100	100,00	Dinas Perkimtan
	c. Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	1	1	100,00	Dinas Perkimtan
	d. Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)	100	100	100,00	Dinas Perkimtan
11.	Urusan Lingkungan Hidup				
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	77,43	80	103,32	Dinas LH
	b. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)	76	70	92,11	Dinas LH
	c. Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	60	61,11	101,85	Dinas LH
	- Persentase pengurangan sampah (%)	17	17	100,00	Dinas LH
	- Persentase penanganan sampah (%)	56	50	89,29	Dinas LH
	- Jumlah LB3 yang dikelola (ton/tahun)	261.290	298983	114,43	Dinas LH
	d. Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kengkapan lingkungan (%)	77	81,78	106,21	Dinas LH
	e. Persentase penurunan beban pencemaran (%)	2,5	2,80	112,00	Dinas LH
	f. Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (%)	0,05	0,06	120,00	Dinas LH
13.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	a. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100	100	100,00	Dinas Dukcapil
	b. Pemanfaatan data kependudukan (%)	100	100	100,00	Dinas Dukcapil
	c. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan berdasarkan target nasional (%)	86,62	101,73	117,44	Dinas Dukcapil
14.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan				

No	INDIKATOR	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	Desa				
	a. Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	66,7	100	149,93	Dinas PMD
	b. Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	76	132	173,68	Dinas PMD
	c. Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	51	51	100,00	Dinas PMD
	d. Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	410	412	100,49	Dinas PMD
	e. Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif				Dinas PMD
	- Kerapatan Adat Nagari (KAN)	350	350	100,00	Dinas PMD
	- Posyandu Mandiri	2.400	2400	100,00	Dinas PMD
	- LPM mandiri	7	7	100,00	Dinas PMD
	- Dasa Wisma Mandiri	11.300	11300	100,00	Dinas PMD
12.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	a. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (indeks)	2,70	2,70	100,00	Dinas P3AP2KB
	b. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	62,58	62,58	100,00	Dinas P3AP2KB
	c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,44	12,44	100,00	Dinas P3AP2KB
	d. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	19,10	19,10	100,00	Dinas P3AP2KB
	e. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21,80	21,80	100,00	Dinas P3AP2KB
15.	Urusan Perhubungan				
	a. Rasio konektivitas Provinsi	0,668	0,659	98,65	Dinas Perhubungan
	b. Kinerja lalu lintas provinsi	0,52	0,53	101,92	Dinas Perhubungan
16.	Urusan Komunikasi dan Informatika				
	a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	92	92,00	Diskominfotik
	b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) (75 UKPP)	55	56	101,82	Diskominfotik
	c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	10	8,86	88,60	Diskominfotik
	d. Indeks domain kebijakan internal SPBE	3,1	2,8	90,32	Diskominfotik
	e. Indeks domain Tata Kelola SPBE	3,1	2,2	70,97	Diskominfotik
	f. Indeks domain Manajemen SPBE	3,1	1	32,26	Diskominfotik
	g. Indeks domain Layanan SPBE	3,1	3,55	114,52	Diskominfotik
17.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	a. Persentase Koperasi yang berkualitas	17,94	17,98	100,22	DinasKoperasi dan UKM
	b. Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	2	1,72	86,00	DinasKoperasi dan UKM
18.	Urusan Penanaman Modal				

No	INDIKATOR	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	Persentase peningkatan investasi di provinsi (%)	PMA : \$ 143.000 PMDN : Rp. 3,12 T	PMA : \$ 73.698,40 PMDN : Rp. 2,03 T	51,50% 65,06%	DPMPTSP
19.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				
	a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,078	0,048	61,54	Dinas Pemuda dan Olah raga
	b. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	4,93	4,2	85,19	Dinas Pemuda dan Olah raga
	c. Peningkatan prestasi olahraga (medali)	26	67	257,69	Dinas Pemuda dan Olah raga
20.	Urusan Statistik				
	a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	60	70,59	117,65	Diskominfotik
	b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	60	68,63	114,38	Diskominfotik
21.	Urusan Persandian				
	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	45	66,82	148,49	Diskominfotik
22.	Urusan Kebudayaan				
	a. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100,00	Dinas Kebudayaan
	b. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)	81	108,93	134,48	Dinas Kebudayaan
23.	Urusan Perpustakaan				
	a. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (nillai)	63.30	64	101,11	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
	b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	13	14,17	109,00	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
24.	Urusan Kearsipan				
	a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	71.50	100	139,86	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
	b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	76.66	76,66	100,00	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
<b>III. URUSAN PILIHAN</b>					
25.	Urusan Kelautan dan Perikanan				
	a. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov. (sumber data: one data KKP)	477.362	503.950,37	105,57	DKP
	b. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	82	85	103,66	DKP
26.	Urusan Pariwisata				

No	INDIKATOR	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	1,5	5	333,33	Dinas Pariwisata
	b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	1,5	1,5	100,00	Dinas Pariwisata
	c. Tingkat hunian akomodasi (%)	30,80	45,45	147,56	Dinas Pariwisata
27.	Urusan Pertanian				
	a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	8,39	9,85	117,40	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	b. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%)	2,6	1,36	52,31	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	c. Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura (%)	1,75	1,79	102,29	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	d. Persentase peningkatan produksi tanaman Perkebunan (%)	1	0,28	28,00	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	e. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	3,41	3,41	100,00	Dinas Peternakan dan Keswan
	f. Persentase peningkatan produksi peternakan (%)	1,45	1,45	100,00	Dinas Peternakan
28.	Urusan Kehutanan				
	a. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	20	20	100,00	Dishut
	b. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	1,29	1,29	100,00	Dishut
	c. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	2,85	2,95	103,51	Dishut
	d. Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	40	40	100,00	Dishut
	e. Indeks tutupan hutan (Indeks)	60,98	63,98	104,92	Dishut
29.	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral				
	a. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda (%) (catatan : Jika telah ada pendelegasian wewenang dari Pemerintah ke Pemerintah Provinsi)	NA			Dinas ESDM
	b. Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	100	100	100,00	Dinas ESDM
	c. Rasio Elektrifikasi	99,50	99,98	100,48	Dinas ESDM
	d. Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	29	29	100,00	Dinas ESDM
	e. Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	37,3	37,3	100,00	Dinas ESDM
30.	Urusan Perdagangan				

No	INDIKATOR	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	a. Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp.Juta)	2.544,57	2.492,04	97,94	Dinas Perindag
	b. Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	88	90,63	102,99	Dinas Perindag
	c. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	23	48,84	212,35	Dinas Perindag
	d. Tertib Usaha	63	33,33	52,90	Dinas Perindag
	e. Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	28	25,82	92,21	Dinas Perindag
	f. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	72	95,21	132,24	Dinas Perindag
	g. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	6	6	100,00	Dinas Perindag
	h. Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp. Triliun)	41,27	39,86	96,58	BPS
31.	Urusan Perindustrian				
	a. Persentase pertambahan jumlah industri besar di provinsi (%)	2,41	2,63	109,13	Dinas Perindag
	b. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	0,13	0,18	138,46	Dinas Perindag
	c. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	82	82,89	101,09	Dinas Perindag
	d. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	90	100	111,11	Dinas Perindag
	e. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	90	100	111,11	Dinas Perindag
	f. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	90	115	127,78	Dinas Perindag
	g. Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp.Triliun)	15,7	20,93	133,31	Dinas Perindag
	h. Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	41.373	40.653	98,26	Dinas Perindag
32.	Urusan Transmigrasi				
	a. Indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi	38,08	62,44	163,97	Dinas Nakertrans
	b. Indeks perkembangan kawasan transmigrasi	68,07	69	101,37	Dinas Nakertrans
<b>IV</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
33.	Unsur Sekretariat Daerah				
	a. IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga Pimpinan (nilai)	88,50	89,93	101,62	Biro Umum
	b. IKM Pelayanan Pimpinan (nilai)	88,50	89,18	100,77	Biro Umum
	c. IKM Pelayanan Administrasi Keuangan	88,50	89,02	100,59	Biro Umum

No	INDIKATOR	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	Sekretariat Daerah (nilai)				
d.	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	78,85	80,57	102,18	Biro Administrasi Pimpinan
e.	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Adm Kepegawaian	78,85	80,97	102,69	Biro Administrasi Pimpinan
f.	Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (%)	80	96,05	120,06	Biro Administrasi Pimpinan
g.	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel (%)	80	94,91	118,64	Biro Pemerintahan dan Otda
h.	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama (%)	100	100	100,00	Biro Pemerintahan dan Otda
i.	Persentase Kabupaten/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya (%)	80	80	100,00	Biro Pemerintahan dan Otda
j.	Persentase usulan Nagari/Desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya (%)	100	100	100,00	Biro Pemerintahan dan Otda
k.	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi (%)	100	96,08	96,08	Biro Pemerintahan dan Otda
l.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (tender dini dan tahun jamak) (%)	1,02	1,78	174,51	Biro PBJ
m.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	14	14	100,00	Biro PBJ
n.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (belanja pengadaan dibagi dengan paket melalui penyedia pada RUP) (%)	15	14	93,33	Biro PBJ
o.	Indeks pengadaan barang dan jasa minimal baik (skor)	93	73,7	79,25	Biro PBJ
p.	Persentase tingkat keselarasan rumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditetapkan (%)	7	10	142,86	Biro Perekonomian
q.	Persentase koordinasi penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah (%)	91	91	100,00	Biro Perekonomian
r.	Persentase rekomendasi pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang dirumuskan (%)	91	91	100,00	Biro Perekonomian
s.	Persentase BUMD yg memiliki perencanaan baik (%)	80			Biro Perekonomian
t.	Persentase BUMD yg memiliki pelaporan yg baik (%)	80			Biro Perekonomian
u.	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi (Lembaga)	2	9	450,00	Biro Kesra
v.	Jumlah Kebijakan daerah pada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang dirumuskan (dokumen)	6	6	100,00 %	Biro Kesra
w.	Persentase penyelesaian produk hukum daerah (%)	100	100	100,00	Biro Hukum

No	INDIKATOR	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	x. Persentase penyelesaian bantuan hukum (%)	100	100	100,00	Biro Hukum
	y. Persentase OPD yg tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	100	100	100,00	Biro Organisasi
	z. Persentase Kab/kota yg OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	100	100	100,00	Biro Organisasi
	aa. Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	8	8	100,00	Biro Organisasi
	bb. Nilai Komponen pelaporan kinerja Pemda (Nilai)	12,5	12,09	96,72	Biro Organisasi
	cc. Hasil penilaian mandiri area manajemen perubahan (nilai)	1,78	1,97	110,67	Biro Organisasi
	dd. Jumlah Inovasi pelayanan Publik yang lolos seleksi saringan kompetisi secara nasional (inovasi)	7	12	171,43	Biro Organisasi
	ee. Jumlah Perangkat daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan (Perangkat Daerah)	12	42	350,00	Biro Organisasi
	ff. Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan	91	98	107,69	Biro Administrasi Pembangunan
34.	Unsur Sekretariat DPRD				
	Indek Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	91,35	101,50	Set DPRD
<b>V</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
35	Unsur Perencanaan				
	Indeks kualitas perencanaan	73	85,85	117,60	Bappeda
36	Unsur Keuangan				
	a. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	8,51	10,96	128,79	BPKAD
	b. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	4,6	4,6	100,00	BPKAD
	c. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	36,70			BPKAD
	d. Assets management	100	100	100,00	BPKAD
	e. Rasio anggaran SiLPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,64			BPKAD
	f. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	100	100,00	BPKAD
	g. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	87,01	63,63	73,13	BPKAD
	h. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100,00	BPKAD
	i. Persentase akurasi Barang Milik Daerah (%)	86			BPKAD
	j. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Persentase Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda) (%)	100	141,13	141,13	BPKAD
	k. Rasio PAD terhadap PDRB (%)	3,6	1,92	53,33	Bapenda
	l. Persentase Peningkatan PAD (%)	7	11,3	161,43	Bapenda
37.	Unsur Kepegawaian				
	a. Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan	202	370	183,17	BKD



No	INDIKATOR	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	OPD Penanggung Jawab
	Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
	b. Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	40	30	75,00	BKD
	c. Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	64	43	67,19	BKD
	d. Nilai penerapan sistem merit	300	332	110,67	BKD
38.	Unsur Pendidikan dan Pelatihan				
	a. Persentase ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran per tahun	4,6	6,2	134,78	BPSDM
	b. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal memuaskan	85	97,76	115,01	BPSDM
	c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	86	106,17	BPSDM
39.	Unsur Penelitian dan Pengembangan				
	a. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan pengkajian (%)	50	50	100,00	Balitbang
	b. Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah produk)	10	11	110,00	Balitbang
	c. Persentase SKPD yang terinovatif (%)	60	76,47	127,45	Balitbang
40	Unsur Penghubung				
	a. Persentase koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga	100			Badan Penghubung
	b. Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain (%)				
	c. Promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik (bidang urusan)	5			Badan Penghubung
<b>VI</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
41.	Inspektorat Daerah				
	a. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	3	3	100,00	Inspektorat
	b. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	3	3	100,00	Inspektorat
<b>VII</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				
42	Kesatuan Bangsa dan Politik				
	1.3.1.1.1. Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	3	1	166,67	Badan Kesbangpol
	1.4. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	68,01	78,51	115,44	Badan Kesbangpol

## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, yang penyusunannya telah mempedomani ketentuan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Selain dari pada itu, dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, serta menyingkronkan kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah.

Dalam implementasi pelaksanaannya, seiring perkembangan dan kondisi secara global baik di tingkat pusat maupun daerah pada tahun 2022, terdapat beberapa keadaan yang mengharuskan dilakukan perubahan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat, dan sesuai Pasal 161 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

4. Keadaan darurat.
5. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan ketentuan dan syarat dapat dilakukannya perubahan pada APBD sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai kondisi dan perkembangan yang terjadi, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pergeseran yang ditindaklanjuti dengan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021, yakni sebagai berikut:

1. Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi KUA

Terdapatnya perubahan-perubahan target indikator makro ekonomi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditargetkan semula 72,74 realisasi pada Tw II Tahun 2022 mencapai 76,65 Dengan capaian tersebut, Sumatera Barat menduduki peringkat ke-3 IPM tertinggi di kawasan Sumatera dan peringkat ke-9 IPM tertinggi secara nasional. Bahkan, nilai IPM Sumatera Barat tersebut berada diatas IPM Indonesia sebesar 72,29. Hal ini terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi yang didorong oleh komponen pengeluaran riil per kapita masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- b. Laju Pertumbuhan Ekonomi semula ditargetkan 3,4 persen pada Tw I Tahun 2022 realisasi mencapai 3,64 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan permintaan domestik secara umum seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2022 menunjukkan pertumbuhan positif. Perbaikan kinerja LU terutama didorong oleh LU Transportasi dan Pergudangan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Pertanian, seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang terjadi di seluruh wilayah;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Barat hasil Sakernas Februari 2022 adalah sebesar 6,17 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,67 persen. Penurunan pengangguran seiring dengan ketersediaan lapangan kerja yang meningkat dampak dari perekonomian yang terus bertumbuh serta terkendalinya kasus COVID-19. Kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat tercatat semakin membaik;
- d. Pada bulan September 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sumatera Barat mencapai 339,93 ribu orang (6,04 persen),

berkurang sebesar 30,7 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 370,67;

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan serta antar kelompok maupun jenis belanja.
  - a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900/7120/SJ dan memperhatikan Diktum kesebelas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2022 pada huruf k dalam upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan masyarakat yang rentan untuk meninggal, menyebabkan dilakukan perubahan antar kegiatan dan anat jenis belanja.
  - b. Terdapatnya dana transfer dari Pemerintah Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan surat Bupati Sijunjung, Bupati Pasaman, Walikota Pariaman, serta Walikota Bukittinggi, Pemerintah Kabupaten dan Kota memberikan Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022 untuk keberlangsungan dan penguatan program pendidikan pada tingkat SMA, SMK dan SLB yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi.
  - c. Pemenuhan kewajiban pembayaran utang bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2021.
  - d. Terdapatnya paket pekerjaan tahun anggaran 2021 yang proses pekerjaan telah selesai dilaksanakan, namun belum dilakukan pembayaran, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 bahwa dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada Pihak Ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai tahun sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah diterbitkan SPM namun belum dilakukan pembayaran, selanjutnya dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
  - e. Akibat terjadinya pasca gempa bumi di Nagari Kajai Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat dan Nagari Malampah Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman tanggal 25 Februari 2022, menyebabkan daerah aliran sungai di selingkar Gunung Talamau berpotensi terjadinya aliran debris/galodo yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan yang lebih besar, maka sesuai diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk keperluan penyediaan anggaran mendesak dan penanganan Darurat dilakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga.
  - f. Terdapatnya penyesuaian penempatan belanja subsidi dan alokasi anggaran, sebelumnya dianggarkan pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi sedang menurut kodefikasi dan nomenklatur keuangan daerah serta kewenangannya agar dipindahkan penganggarannya pada Dinas Koperasi dan UKM, dalam rangka upaya menertibkan administrasi pengelolaan keuangan daerah, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

- g. Penyesuaian penempatan alokasi Dana Transfer sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
3. Terdapatnya pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama dan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama yang diusulkan SKPD, serta refocusing dan realokasi anggaran. Pergeseran belanja ini dituangkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagai berikut :
    - a. Penyesuaian anggaran belanja melalui pergeseran anggaran belanja, untuk menyesuaikan kembali Standar Satuan Harga (SHS) berdasarkan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
    - b. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2002 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi, perlu melakukan penyesuaian dengan melakukan pergeseran anggaran belanja untuk mendukung penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah Masehi terkait dengan biaya perjalanan ibadah haji.

Pergeseran-pergeseran anggaran ini selanjutnya diakomodir dan ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

4. Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, hal ini disebabkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang telah lebih dahulu di tetapkan pada tanggal 30 Juni 2021 sehingga masih mengacu pada rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sedangkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 di tetapkan pada tanggal 9 September 2021.

- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp.300.000.000.000,00, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ditemukan dan ditetapkan SILPA sebesar Rp.483.680.529.593,00 SiLPA ini sesuai ketentuan tentunya harus digunakan dalam pembiayaan tahun anggaran 2022.

## 2.1. PERUBAHAN PENDAPATAN

Pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021, ditargetkan pendapatan daerah sebesar Rp.5.924.281.123.951,00. Mengingat masih terdapatnya beberapa potensi penerimaan yang mungkin dapat dicapai dan diterima hingga akhir tahun 2022, target Pendapatan Daerah mengalami penambahan target menjadi sebesar Rp.6.175.628.018.183,00. Perubahan target Pendapatan tersebut berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
- APBD awal	=	Rp	2.613.763.216.691,00
- APBD perubahan	=	Rp	2.821.838.323.784,00
- Bertambah	=	Rp	208.075.107.093,00
2. Pendapatan Transfer			
- APBD awal	=	Rp	3.227.209.603.600,00
- APBD perubahan	=	Rp	3.275.683.343.259,00
- Bertambah	=	Rp	48.473.739.659,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
- APBD awal	=	Rp	83.308.303.660,00
- APBD perubahan	=	Rp	78.106.351.140,00
- Berkurang	=	Rp	(5.201.952.520),00

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa :

- Pada rekening PAD, penambahan target PAD berasal dari sektor Pajak Daerah. Hal ini dilakukan setelah memperhatikan dan melakukan kajian terhadap potensi penerimaan yang berasal dari BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok. Ketiga objek pajak Daerah tersebut sangat memungkinkan untuk bias ditingkatkan target penerimaannya Pada sektor Lain-lain PAD yang sah kemungkinan ditingkatkan target capaiannya dari target awal APBD, berasal pendapatan bunga dan Pendapatan Pengembalian;
- Untuk Pendapatan Transfer, perubahan target penerimaan merupakan transfer Pemerintah Pusat kepada Provinsi Sumatera Barat yang dialokasikan melalui APBN dan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2022.

3. Adapun untuk Lain-lain Pendapatan Daerah, penerimaan yang ditargetkan berasal dari Pendapatan Hibah yakni Hibah Pemerintah Pusat dan Sumbangan dari Pihak Ketiga. Untuk Sumbangan Pihak Ketiga, merupakan salah satu objek penerimaan daerah yang potensial sehingga pada Perubahan APBD, penerimaannya ditambah target penerimaannya.

Untuk lebih jelasnya Target Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 2.1**  
**PENDAPATAN DAERAH**  
( berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022  
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022)

NO	URAIAN	PERDA 11 / 2021	PERDA 6 / 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.924.281.123.951</b>	<b>6.175.628.018.183</b>	<b>251.346.894.232</b>	<b>4</b>
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.613.763.216.691	2.821.838.323.784	208.075.107.093	8
B	Pendapatan Transfer	3.227.209.603.600	3.275.683.343.259	48.473.739.659	2
C	Lain-lain Pendapatan yang sah	83.308.303.660	78.106.351.140	(5.201.952.520)	6

## 2.2. PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat pada APBD awal dianggarkan sebesar Rp6.204.281.123.951,00, dan pada perubahan APBD, anggaran belanja tersebut bertambah menjadi Rp.6.639.308.547.776,00 Perubahan anggaran belanja dimaksud adalah sebagai berikut :

### 1. Belanja Operasional

-	APBD awal	=	Rp	4.170.813.833.664,00
-	APBD perubahan	=	Rp	4.363.098.223.478,00
-	(Bertambah)	=	Rp	192.284.389.814,00

### 2. Belanja Modal

-	APBD awal	=	Rp	953.280.754.934,00
-	APBD perubahan	=	Rp	1.052.569.573.536,00
-	(Bertambah)	=	Rp	99.288.818.602,00

### 3. Belanja Tidak Terduga

-	APBD awal	=	Rp	55.118.000.000,00
-	APBD perubahan	=	Rp	16.144.188.106,00
-	Berkurang	=	Rp	(38.973.811.894),00

### 4. Belanja Transfer

-	APBD awal	=	Rp	1.025.068.535.353,00
-	APBD perubahan	=	Rp	1.207.496.562.656,00
-	Bertambah	=	Rp	182.428.027.303,00

Adapun perubahan-perubahan belanja sebagaimana tersebut di atas, antara

lain adalah :

1. Pada belanja operasional terdapat penambahan dan pergeseran belanja sebesar Rp.192.284.389.814,00 yang disebabkan peningkatan pada belanja pegawai, barang dan jasa belanja hibah dan rasionalisasi belanja subsidi karena belum ada dasar hukum yang ditetapkan tentang subsidi dimaksud serta dialokasikannya bantuan social untuk penanggulangan dampak inflasi;
2. Untuk belanja modal juga mengalami penambahan anggaran dikarenakan oleh adanya kewajiban tahun 2021 yang harus dibayarkan;
3. Adapun pada Belanja Tidak Terduga mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.38.973.811.894.000,00, diperuntukkan bagi kegiatan terkait pandemi Covid-19 seperti: biaya kegiatan Sumdarsin, pembayaran hutang pada pihak ke III dari kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundangan;dan
4. Sedangkan untuk Belanja Transfer, mengalami kenaikan anggaran pada Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, yang merupakan penambahan belanja sebagai dampak pemenuhan kewajiban atas tunggakan bagi hasil ke daerah pada tahun sebelumnya dan kurang salur bagi hasil di tahun 2022.

Untuk lebih jelasnya perubahan belanja sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 2.2**  
**BELANJA DAERAH**  
(Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022  
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022)

No	Uraian	PERDA 11 / 2021	PERDA 6/ 2022	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.204.281.123.951</b>	<b>6.639.308.547.776</b>	<b>435.027.423.825</b>	<b>7</b>
A	Belanja Operasional	4.170.813.833.664	4.363.098.223.478	192.284.389.814	5
B	Belanja Modal	953.280.754.934	1.052.569.573.536	99.288.818.602	10
C	Belanja Tidak Terduga	55.118.000.000	16.144.188.106	(38.973.811.894)	71
D	Belanja Transfer	1.025.068.535.353	1.207.496.562.656	182.428.027.303	18

Sebagai Informasi, berikut disampaikan perubahan anggaran belanja daerah berdasarkan urusan kewenangannya:

#### 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Untuk urusan wajib pelayanan dasar semula dialokasikan sebesar Rp3.609.038.640.516,00 bertambah menjadi sebesar Rp.3.851.233.809.041,00 yang terdiri dari :

- a. Urusan Pendidikan yang semula dialokasikan sebesar Rp.2.162.656.620.165,00 bertambah menjadi sebesar Rp. 2.218.513.404.681,00
- b. Urusan kesehatan yang semula dianggarkan sebesar



- Rp.716.067.219.028,00 bertambah menjadi sebesar Rp. 842.199.562.104,00
- c. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang semula dialokasikan sebesar Rp.476.916.074.399,00 berkurang menjadi sebesar Rp.518.905.193.997,00
  - d. Urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman semula dialokasikan sebesar Rp.161.531.349.344,00 berkurang menjadi sebesar Rp.161.341.567.401,00
  - e. Urusan ketentraman umum dan Linmas semula dialokasikan sebesar Rp.28.499.458.384,00 bertambah menjadi sebesar Rp.30.980.797.285,00
  - f. Urusan sosial semula dialokasikan sebesar Rp.63.367.919.196,00 bertambah menjadi sebesar Rp.79.293.283.573,00

## 2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Untuk urusan wajib non pelayanan dasar semula dianggarkan sebesar Rp.319.559.820.421,00 bertambah menjadi sebesar Rp.347.668.652.860,00 yang terdiri dari :

- a. Urusan tenaga kerja dengan alokasi semula dialokasikan sebesar Rp.31.593.221.824,00 bertambah menjadi sebesar Rp. 34.548.068.286,00
- b. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semula dialokasikan sebesar Rp.16.005.958.707,00 bertambah menjadi sebesar Rp.17.166.867.354,00
- c. Urusan pangan dengan alokasi semula dialokasikan sebesar Rp.40.279.491.651,00 berkurang menjadi sebesar Rp.38.249.124.050,00
- d. Urusan pertanahan dengan alokasi semula dialokasikan sebesar Rp.570.000.000,00 tetap menjadi sebesar Rp. 570.000.000,00
- e. Urusan lingkungan hidup dengan alokasi semula dialokasikan sebesar Rp.21.134.882.773,00 bertambah menjadi sebesar Rp. 23.944.982.773,00
- f. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan alokasi semula sebesar Rp.8.949.846.977,00 berkurang menjadi sebesar Rp.8.764.620.180,00
- g. Urusan pemberdayaan masyarakat desa semula dianggarkan sebesar Rp.22.127.921.014,00 bertambah menjadi sebesar Rp. 24.497.509.043,00
- h. Urusan perhubungan dengan alokasi anggaran semula sebesar

- Rp.16.703.277.437,00           berkurang           menjadi           sebesar  
Rp. 17.260.017.358,00
- i. Urusan komunikasi dan informatika dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.33.741.825.587,00 bertambah menjadi sebesar Rp.37.601.714.544,00
- j. Urusan koperasi UMKM dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.25.143.676.184,00 bertambah menjadi sebesar Rp.28.578.913.180,00
- k. Urusan penanaman modal dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.12.628.886.119,00 bertambah menjadi sebesar Rp.13.362.219.389,00
- l. Urusan pemuda dan olahraga dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.51.581.728.778,00 bertambah menjadi sebesar Rp.57.616.007.148,00
- m. Urusan statistik dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.730.000.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.686.800.027,00
- n. Urusan persandian dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.730.000.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp.691.880.000,00
- o. Urusan Kebudayaan dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.23.504.413.210,00 bertambah menjadi sebesar Rp.28.990.825.690,00
- p. Urusan Perpustakaan dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.716.423.350,00 bertambah menjadi sebesar Rp.1.019.023.350,00
- q. Urusan kearsipan dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.13.418.266.810,00 bertambah menjadi sebesar Rp.14.120.080.488,00

### **3. Urusan Pilihan**

Untuk urusan pilihan dialokasikan anggaran semula sebesar Rp.612.413.505.047,00 berkurang menjadi sebesar Rp.585.415.798.956,00 yang terdiri dari :

- a. Urusan kelautan dan perikanan dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.90.498.872.370,00 berkurang menjadi sebesar Rp.89.648.198.536,00
- b. Urusan pariwisata dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.36.284.208.970,00 bertambah menjadi sebesar Rp.46.036.270.377,00
- c. Urusan pertanian dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.347.032.469.117,00 berkurang menjadi sebesar Rp.309.667.189.150,00

- d. Urusan kehutanan dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.87.951.405.134,00 berkurang menjadi sebesar Rp.87.451.095.660,00
- e. Urusan energi dan sumber daya mineral dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.17.703.547.751,00 berkurang menjadi sebesar Rp.17.327.678.479,00
- f. Urusan perdagangan dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.21.804.099.084,00 bertambah menjadi sebesar Rp.23.236.171.854,00
- g. Urusan perindustrian dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.10.777.057.546,00 bertambah menjadi sebesar Rp.11.587.349.825,00

#### **4. Penunjang Urusan**

Untuk penunjang urusan dialokasikan anggaran semula sebesar Rp.1.294.502.265.238,00 bertambah menjadi sebesar Rp.1.437.584.349.154,00 yang terdiri dari :

- a. Penunjang urusan perencanaan dengan alokasi sebelum perubahan sebesar Rp.20.388.412.338,00 berkurang menjadi sebesar Rp.19.067.129.634,00
- b. Penunjang urusan keuangan dengan alokasi sebelum perubahan sebesar Rp.1.193.778.045.452,00 bertambah menjadi sebesar Rp.1.339.571.033.090,00
- c. Penunjang urusan kepegawaian daerah dengan alokasi sebelum perubahan sebesar Rp.21.159.312.892,00 bertambah menjadi sebesar Rp.27.756.540.736,00
- d. Penunjang urusan pendidikan dan pelatihan dengan alokasi sebelum perubahan sebesar Rp.20.322.173.590,00 bertambah menjadi sebesar Rp.20.484.173.590,00
- e. Penunjang urusan penelitian dan pengembangan dengan alokasi sebelum perubahan sebesar Rp.25.816.750.450,00 berkurang menjadi sebesar Rp.13.323.943.322,00
- f. Penunjang urusan pengelolaan penghubung dengan alokasi sebelum perubahan sebesar Rp.13.037.570.516,00 bertambah menjadi sebesar Rp.17.381.528.782,00

#### **5. Unsur Pendukung**

Untuk Urusan Pendukung dialokasikan anggaran semula sebesar Rp.336.313.283.529,00 bertambah menjadi sebesar Rp.379.127.530.134,00 yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah dengan alokasi semula sebesar

Rp.145.587.079.866,00 bertambah menjadi sebesar  
Rp.176.654.560.886,00

b. Sekretariat DPRD dengan alokasi semula sebesar  
Rp.190.726.203.663,00 bertambah menjadi sebesar  
Rp.202.472.969.248,00

## 6. Unsur Pengawas

Untuk Urusan Pengawas dialokasikan anggaran semula sebesar Rp.20.003.124.912,00 bertambah menjadi sebesar Rp.21.563.708.237,00 yang terdiri dari : Inspektorat Daerah dengan alokasi semula sebesar Rp.20.003.124.912,00 bertambah menjadi sebesar Rp.21.563.708.237,00

## 7. Unsur Pemerintahan Umum

Untuk Urusan Pemerintahan Umum dialokasikan anggaran semula sebesar Rp.12.450.484.288,00 bertambah menjadi sebesar Rp.16.714.699.394,00 yang terdiri dari : Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi semula sebesar Rp.12.450.484.288,00 bertambah menjadi sebesar Rp.16.714.699.394,00.

Untuk lebih jelasnya dan lengkapnya perubahan belanja sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 2.3**  
**BELANJA DAERAH PER URUSAN PELAKSANAAN**  
( berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022  
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022)

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERDA 11 / 2021	PERDA 6 / 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.609.038.640.516	3.851.233.809.041	242.195.168.525	6
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.162.656.620.165	2.218.513.404.681	55.856.784.516	3
1.01.0.00.0.00.01.	DINAS PENDIDIKAN	2.162.656.620.165	2.218.513.404.681	55.856.784.516	3
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	716.067.219.028	842.199.562.104	126.132.343.076	15
1.02.0.00.0.00.01.	DINAS KESEHATAN	172.080.769.454	204.370.002.119	32.289.232.665	16
1.02.0.00.0.00.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	191.275.884.118	241.698.623.937	50.422.739.819	21
1.02.0.00.0.00.03.	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	50.630.302.717	56.358.553.659	5.728.250.942	10
1.02.0.00.0.00.04.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	149.281.766.928	180.157.618.653	30.875.851.725	17
1.02.0.00.0.00.05.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	110.157.049.284	114.778.402.426	4.621.353.142	4

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERDA 11 / 2021	PERDA 6 / 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	476.916.074.399	518.905.193.997	41.989.119.598	8
1.03.0.00.0.00.01.	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	292.887.430.476	323.644.244.416	30.756.813.940	10
1.03.0.00.0.00.02.	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	108.822.450.157	118.003.095.919	9.180.645.762	8
1.04.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	161.531.349.344	161.341.567.401	(189.781.943)	0
1.04.2.10.0.00.01.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	161.531.349.344	161.341.567.401	(189.781.943)	0
1.05.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	28.499.458.384	30.980.797.285	2.481.338.901	8
1.05.0.00.0.00.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	13.860.877.754	14.842.877.754	982.000.000	7
1.05.0.00.0.00.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.638.580.630	16.137.919.531	1.499.338.901	9
1.06.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	63.367.919.196	79.293.283.573	15.925.364.377	20
1.06.0.00.0.00.01.	DINAS SOSIAL	41.933.445.048	56.969.589.781	15.036.144.733	26
2.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	319.559.820.421	347.668.652.860	28.108.832.439	8
2.07.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	31.593.221.824	34.548.068.286	2.954.846.462	9
2.07.3.32.0.00.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	25.390.871.746	26.815.757.508	1.424.885.762	5
2.08.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	15.528.230.057	16.589.140.704	1.060.910.647	6
2.08.2.14.0.00.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.996.550.907	15.057.461.554	1.060.910.647	7
2.08.2.14.0.00.01.0001	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1.531.679.150	1.531.679.150	0	0

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERDA 11 / 2021	PERDA 6 / 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2.09.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>40.279.491.651</b>	<b>38.249.124.050</b>	<b>(2.030.367.601)</b>	<b>5</b>
2.09.0.00.0.00.01.	DINAS PANGAN	27.287.261.933	26.333.854.834	<b>(953.407.099)</b>	<b>4</b>
2.09.0.00.0.00.01.0001	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN	7.979.679.673	8.059.181.933	<b>79.502.260</b>	<b>1</b>
2.09.0.00.0.00.01.0002	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN	5.012.550.045	3.856.087.283	<b>(1.156.462.762)</b>	<b>30</b>
<b>2.11.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>21.134.882.773</b>	<b>23.944.982.773</b>	<b>2.810.100.000</b>	<b>12</b>
2.11.0.00.0.00.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.186.292.288	16.841.392.288	<b>655.100.000</b>	<b>4</b>
2.11.0.00.0.00.01.0001	UPTD Persampahan	3.760.271.085	5.865.271.085	<b>2.105.000.000</b>	<b>36</b>
<b>2.12.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>8.949.846.977</b>	<b>8.764.620.180</b>	<b>(185.226.797)</b>	<b>2</b>
2.12.0.00.0.00.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.949.846.977	8.764.620.180	<b>(185.226.797)</b>	<b>2</b>
<b>2.13.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>22.127.921.014</b>	<b>24.497.509.043</b>	<b>2.369.588.029</b>	<b>10</b>
2.13.0.00.0.00.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22.127.921.014	24.497.509.043	<b>2.369.588.029</b>	<b>10</b>
<b>2.14.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>477.728.650</b>	<b>577.726.650</b>	<b>99.998.000</b>	<b>17</b>
2.08.2.14.0.00.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	477.728.650	577.726.650	<b>99.998.000</b>	<b>17</b>
<b>2.15.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>16.703.277.437</b>	<b>17.260.017.358</b>	<b>556.739.921</b>	<b>3</b>
2.15.0.00.0.00.01.	DINAS PERHUBUNGAN	16.703.277.437	17.260.017.358	<b>556.739.921</b>	<b>3</b>
<b>2.16.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>33.741.825.587</b>	<b>37.601.714.544</b>	<b>3.859.888.957</b>	<b>10</b>
2.16.2.20.2.21.01.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	33.741.825.587	37.601.714.544	<b>3.859.888.957</b>	<b>10</b>

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERDA 11 / 2021	PERDA 6 / 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	25.143.676.184	28.578.913.180	3.435.236.996	12
2.17.0.00.0.00.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	20.826.712.184	22.686.949.180	1.860.236.996	8
2.17.0.00.0.00.01.0001	UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	4.316.964.000	5.891.964.000	1.575.000.000	27
2.18.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	14.864.696.868	13.784.638.020,00	(1.080.058.848,00)	8
2.18.0.00.0.00.01.	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.864.696.868	13.784.638.020,00	(1.080.058.848,00)	8
2.19.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	51.581.728.778	57.616.007.148	6.034.278.370	10
2.19.0.00.0.00.01.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	46.003.490.289	52.344.874.818	6.341.384.529	12
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPTD KBOR	5.578.238.489	5.271.132.330	(307.106.159)	6
2.20.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	730.000.000	686.800.027	(43.199.973)	6
2.16.2.20.2.21.01.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	730.000.000	686.800.027	(43.199.973)	6
2.21.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	730.000.000	691.880.000	(38.120.000)	6
2.16.2.20.2.21.01.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	730.000.000	691.880.000	(38.120.000)	6
2.22.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	23.504.413.210	28.990.825.690	5.486.412.480	19
2.22.0.00.0.00.01.	DINAS KEBUDAYAAN	16.824.413.210	21.674.408.050	4.849.994.840	22
2.22.0.00.0.00.01.0001	UPTD Museum Adityawarman	1.901.600.000	2.135.093.390	233.493.390	11
2.22.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Budaya	4.778.400.000	5.181.324.250	402.924.250	8
2.23.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	716.423.350	1.019.023.350	302.600.000	30
2.23.2.24.0.00.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	716.423.350	1.019.023.350	302.600.000	30
2.24.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	13.418.266.810	14.120.080.488	701.813.678	5
2.23.2.24.0.00.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	13.418.266.810	14.120.080.488	701.813.678	5
3.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	612.413.505.047	585.415.798.956	(26.997.706.091)	5
3.25.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	90.498.872.370	89.648.198.536	(850.673.834)	1
3.25.0.00.0.00.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	63.735.540.470	62.382.201.428	(1.353.339.042)	2

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERDA 11 / 2021	PERDA 6 / 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.25.0.00.0.00.01.0001	UPTD PPMHP	1.060.517.410	1.060.517.410		0
3.25.0.00.0.00.01.0002	UPTD BPBALP	3.542.800.400	3.614.704.400	71.904.000	2
3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD KPSDKP	3.458.931.200	3.598.033.200	139.102.000	4
3.25.0.00.0.00.01.0004	UPTD PPW I	11.663.956.240	11.666.338.640	2.382.400	0
3.25.0.00.0.00.01.0005	UPTD PPW II	5.531.826.650	5.830.361.183	298.534.533	5
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD PPW III	1.505.300.000	1.496.042.275	(9.257.725)	1
<b>3.26.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>36.284.208.970</b>	<b>46.036.270.377</b>	<b>9.752.061.407</b>	<b>21</b>
3.26.0.00.0.00.01.	DINAS PARIWISATA	36.284.208.970	46.036.270.377	9.752.061.407	21
<b>3.27.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>347.032.469.117</b>	<b>309.667.189.150</b>	<b>(37.365.279.967)</b>	<b>12</b>
3.27.0.00.0.00.01.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	101.155.602.083	127.507.802.459	26.352.200.376	21
3.27.0.00.0.00.01.0001	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	28.662.054.650	4.453.942.131	(24.208.112.519)	54 4
3.27.0.00.0.00.01.0002	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.899.500.000	1.930.558.740	31.058.740	2
3.27.0.00.0.00.01.0003	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	2.072.000.000	2.139.000.000	67.000.000	3
3.27.0.00.0.00.01.0004	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	4.773.250.000	5.665.261.072	892.011.072	16
3.27.0.00.0.00.01.0005	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN	45.115.130.000	56.201.543.226	11.086.413.226	20
3.27.0.00.0.00.01.0006	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	28.238.039.000	28.530.112.668	292.073.668	1
3.27.0.00.0.00.02.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	119.862.178.404	67.245.901.447	(52.616.276.957)	78
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPTD Ternak Unggas	4.386.628.900	4.588.716.900	202.088.000	4
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Ternak Ruminansia	3.475.876.800	2.714.784.745	(761.092.055)	28
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTS DTS)	4.625.584.000	4.814.552.900	188.968.900	4
3.27.0.00.0.00.02.0004	UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat	1.675.425.280	2.672.746.182	997.320.902	37
3.27.0.00.0.00.02.0005	UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)	1.091.200.000	1.202.266.680	111.066.680	9
<b>3.28.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>87.951.405.134</b>	<b>87.451.095.660</b>	<b>(500.309.474)</b>	<b>1</b>
3.28.0.00.0.00.01.	DINAS KEHUTANAN	54.766.020.084	54.526.280.607	(239.739.477)	0



KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERDA 11 / 2021	PERDA 6 / 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.28.0.00.0.00.01.0001	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	2.387.460.200	2.454.029.954	66.569.754	3
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)	5.108.055.125	5.089.671.125	(18.384.000)	0
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)	5.245.134.725	5.216.319.196	(28.815.529)	1
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)	3.233.983.125	3.210.589.799	(23.393.326)	1
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)	6.192.527.525	5.972.277.525	(220.250.000)	4
3.28.0.00.0.00.01.0006	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)	2.412.094.725	2.388.995.125	(23.099.600)	1
3.28.0.00.0.00.01.0007	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)	2.650.735.125	2.600.083.539	(50.651.586)	2
3.28.0.00.0.00.01.0008	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)	507.500.000	478.700.000	(28.800.000)	6
3.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)	1.187.979.125	1.324.586.783	136.607.658	10
3.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)	2.649.273.125	2.644.923.125	(4.350.000)	0
3.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)	925.347.125	854.537.625	(70.809.500)	8
<b>3.29.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>17.703.547.751</b>	<b>17.327.678.479</b>	<b>(375.869.272)</b>	<b>2</b>
3.29.0.00.0.00.01.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	17.703.547.751	17.327.678.479	(375.869.272)	2
<b>3.30.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>21.804.099.084</b>	<b>23.236.171.854</b>	<b>1.432.072.770</b>	<b>6</b>
3.30.3.31.0.00.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21.093.099.284	22.419.844.254	1.326.744.970	6
3.30.3.31.0.00.01.0002	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI	153.565.900	161.560.900	7.995.000	5
3.30.3.31.0.00.01.0003	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)	557.433.900	654.766.700	97.332.800	15
<b>3.31.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>10.777.057.546</b>	<b>11.587.349.825</b>	<b>810.292.279</b>	<b>7</b>
3.30.3.31.0.00.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.101.223.546	9.575.699.325	474.475.779	5
3.30.3.31.0.00.01.0001	UPTD LOGAM	692.484.200	1.034.550.200	342.066.000	33
3.30.3.31.0.00.01.0002	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI	983.349.800	977.100.300	(6.249.500)	1
<b>3.32.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	<b>361.845.075</b>	<b>461.845.075</b>	<b>100.000.000</b>	<b>22</b>

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERDA 11 / 2021	PERDA 6 / 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.07.3.32.0.00.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	361.845.075	461.845.075	100.000.000	22
4.	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>336.313.283.529</b>	<b>379.127.530.134</b>	<b>42.814.246.605</b>	<b>11</b>
4.01.	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>145.587.079.866</b>	<b>176.654.560.886</b>	<b>31.067.481.020</b>	<b>18</b>
4.01.0.00.0.00.01.0001	BIRO UMUM	86.801.558.683	108.021.880.615	21.220.321.932	20
4.01.0.00.0.00.01.0002	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	10.247.165.432	13.529.320.875	3.282.155.443	24
4.01.0.00.0.00.01.0004	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.349.554.600	4.717.478.704	367.924.104	8
4.01.0.00.0.00.01.0006	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.165.420.180	3.378.627.019	213.206.839	6
4.01.0.00.0.00.01.0007	BIRO PEREKONOMIAN	2.467.107.665	2.814.128.475	347.020.810	12
4.01.0.00.0.00.01.0008	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	29.336.072.223	34.020.072.223	4.684.000.000	14
4.01.0.00.0.00.01.0009	BIRO HUKUM	2.923.639.142	3.023.639.142	100.000.000	3
4.01.0.00.0.00.01.0010	BIRO ORGANISASI	3.098.518.254	3.810.969.830	712.451.576	19
4.01.0.00.0.00.01.0011	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3.198.043.687	3.338.444.003	140.400.316	4
4.02.	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>190.726.203.663</b>	<b>202.472.969.248</b>	<b>11.746.765.585</b>	<b>6</b>
4.02.0.00.0.00.01.	SEKRETARIAT DPRD	190.726.203.663	202.472.969.248	11.746.765.585	6
5.	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>1.294.502.265.238</b>	<b>1.437.584.349.154</b>	<b>143.082.083.916</b>	<b>10</b>
5.01.	<b>PERENCANAAN</b>	<b>20.388.412.338</b>	<b>19.067.129.634</b>	<b>(1.321.282.704)</b>	<b>7</b>
5.01.0.00.0.00.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.388.412.338	19.067.129.634	(1.321.282.704)	7
5.02.	<b>KEUANGAN</b>	<b>1.193.778.045.452</b>	<b>1.339.571.033.090</b>	<b>145.792.987.638</b>	<b>11</b>
5.02.0.00.0.00.01.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.112.554.814.286	1.249.589.477.240	137.034.662.954	11
5.02.0.00.0.00.02.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	63.139.026.838	68.291.946.293	5.152.919.455	8
5.02.0.00.0.00.02.0001	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG	2.387.136.304	3.649.654.254	1.262.517.950	35
5.02.0.00.0.00.02.0002	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN	790.665.978	925.260.658	134.594.680	15
5.02.0.00.0.00.02.0003	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG	831.068.726	914.780.226	83.711.500	9
5.02.0.00.0.00.02.0004	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI	1.012.843.676	1.244.948.376	232.104.700	19
5.02.0.00.0.00.02.0005	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH	1.074.893.096	1.130.276.564	55.383.468	5
5.02.0.00.0.00.02.0006	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK	848.010.166	890.164.916	42.154.750	5

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERDA 11 / 2021	PERDA 6 / 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.02.0.00.0.00.02.0007	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG	760.691.878	776.205.878	15.514.000	2
5.02.0.00.0.00.02.0008	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING	814.393.816	812.974.316	(1.419.500)	0
5.02.0.00.0.00.02.0009	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK	1.042.030.826	1.059.374.826	17.344.000	2
5.02.0.00.0.00.02.0010	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR	800.008.388	857.501.138	57.492.750	7
5.02.0.00.0.00.02.0011	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN	975.851.426	1.026.901.426	51.050.000	5
5.02.0.00.0.00.02.0012	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA	824.457.916	902.051.016	77.593.100	9
5.02.0.00.0.00.02.0013	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK	783.656.516	969.998.668	186.342.152	19
5.02.0.00.0.00.02.0014	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO	626.210.768	679.058.252	52.847.484	8
5.02.0.00.0.00.02.0015	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG	740.688.578	769.080.888	28.392.310	4
5.02.0.00.0.00.02.0016	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG	960.606.386	1.028.496.871	67.890.485	7
5.02.0.00.0.00.02.0017	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO	831.926.966	909.392.966	77.466.000	9
5.02.0.00.0.00.02.0018	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN	814.647.918	904.483.318	89.835.400	10
5.02.0.00.0.00.02.0019	UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	1.164.415.000	2.239.005.000	1.074.590.000	48
<b>5.03.</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>21.159.312.892</b>	<b>27.756.540.736</b>	<b>6.597.227.844</b>	<b>24</b>
5.03.0.00.0.00.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	21.159.312.892	27.756.540.736	6.597.227.844	24
<b>5.04.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>20.322.173.590</b>	<b>20.484.173.590</b>	<b>162.000.000</b>	<b>1</b>
5.04.0.00.0.00.01.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.322.173.590	20.484.173.590	162.000.000	1
<b>5.05.</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>25.816.750.450</b>	<b>13.323.943.322</b>	<b>(12.492.807.128)</b>	<b>94</b>
5.05.0.00.0.00.01.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	25.816.750.450	13.323.943.322	(12.492.807.128)	94
<b>5.07.</b>	<b>PENGELOLAAN PENGHUBUNG</b>	<b>13.037.570.516</b>	<b>17.381.528.782</b>	<b>4.343.958.266</b>	<b>25</b>
5.07.0.00.0.00.01.	BADAN PENGHUBUNG	13.037.570.516	17.381.528.782	4.343.958.266	25

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERDA 11 / 2021	PERDA 6 / 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	20.003.124.912	21.563.708.237	1.560.583.325	7
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	20.003.124.912	21.563.708.237	1.560.583.325	7
6.01.0.00.0.00.01.	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	20.003.124.912	21.563.708.237	1.560.583.325	7
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	12.450.484.288	16.714.699.394	4.264.215.106	26
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.450.484.288	16.714.699.394	4.264.215.106	26
8.01.0.00.0.00.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.450.484.288	16.714.699.394	4.264.215.106	26
	JUMLAH	6.204.281.123.951	6.639.308.547.776	435.027.423.825	7

## 2.3. PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

### 2.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021, dianggarkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) Lalu yakni sebesar Rp.300.000.000.000,00, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ditemukan dan ditetapkan SiLPA sebesar Rp.483.680.529.593,00 SiLPA sebagaimana dimaksud berasal dari:

1. Kas Daerah : Rp. 434.394.308.416,29
  2. Kas BLUD : Rp. 40.766.986.628,63
  3. Kas di Bendahara Pengeluaran : Rp. 3.276.687.463,00
  4. Sisa Dana BOS 2021 : Rp. 5.242.522.085,67
  5. Kas lainnya (sumbangan Pihak Ketiga) : Rp. 25.000,00
- SiLPA tahun 2021 : Rp. 483.680.529.593,00

Selanjutnya SiLPA dimaksud akan digunakan untuk membiayai sisa kegiatan yang bersifat earmark seperti kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik, sisa dana BLUD, disamping untuk pembiayaan lainnya yang bersifat prioritas.

### 2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal pengeluaran Pembiayaan, pada APBD awal dialokasikan anggaran untuk penyertaan modal kepada BUMD di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.20.000.000.000,00 yaitu kepada Bank Nagari dan Jamkrida, dengan alokasi penyertaan kepada Bank Nagari sebesar Rp.20.000.000.000,00. Untuk lebih jelasnya anggaran Pembiayaan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 2.4**  
**PEMBIAYAAN DAERAH**  
 (Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022  
 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
 Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022)

NO	URAIAN	PERDA 11/2021	PERDA 6/2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	300.000.000.000	483.680.529.593	183.680.529.593	61
	SILPA	300.000.000.000	483.680.529.593	183.680.529.593	61
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0
1	Penyertaan Modal	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0
<b>C</b>	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>280.000.000.000</b>	<b>463.680.529.593</b>	<b>183.680.529.593</b>	<b>66</b>

**BAB III**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

**3.1.1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

**3.1.1.1 Pendidikan**

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.218.513.404.681,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.129.329.316.113,00 (95,98%) dengan realisasi fisik 99,79%, dilaksanakan melalui 4 Program yang didukung oleh 13 kegiatan dan 745 sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

**1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	<b>Pengelolaan Pendidikan</b>	APK Pendidikan Menengah	93,22	77,17	82,78
			APM Pendidikan Menengah	73,42	62,22	84,75
			APK SLB	53,8	3,44	6,39
II	Meningkatnya Relevansi Pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus	<b>Pengembangan Kurikulum</b>	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	33	38	115,15
III	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik	<b>Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</b>	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan	71,07	100	140,71
IV	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	<b>Pengendalian Perizinan Pendidikan</b>	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	21	100	476,19
V	Meningkatnya kualitas pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	<b>Pengembangan Bahasa Dan Sastra</b>	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun	3	0	0
			Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah	6	0	0

**2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**

a. Sasaran I : Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) APK Pendidikan Menengah (Target kinerja : 93,22) (Realisasi Kinerja : 77,17).

2) APM Pendidikan Menengah (Target kinerja : 73,42) (Realisasi Kinerja : 62,22).

3) APK SLB (Target kinerja : 53,8) (Realisasi Kinerja : 3,44).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengelolaan Pendidikan dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

(1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, dengan Sub kegiatan :

- Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) dengan output kegiatan ini Jumlah DED Sekolah baru yang dibuat.
- Penambahan ruang kelas baru dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas baru yang dibangun sebanyak 17 unit.
- pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangun sebanyak 4 unit.
- Pembangunan ruang laboratorium biologi dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium biologi yang dibangun sebanyak 3 unit.
- Pembangunan ruang laboratorium fisika dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium fisika yang dibangun sebanyak 6 unit.
- Pembangunan ruang laboratorium kimia dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium kimia yang dibangun sebanyak 4 unit.
- Pembangunan ruang laboratorium komputer dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium komputer yang dibangun sebanyak 6 unit.
- Pembangunan ruang laboratorium IPA dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium labor IPA yang dibangun sebanyak 1 unit.
- Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun sebanyak 6 unit.
- Pembangunan perpustakaan sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang pustaka sekolah yang dibangun sebanyak 2 unit.
- Pembangunan ruang serba guna/aula dengan output

kegiatan ini adalah jumlah ruang serba guna/aula yang dibangun sebanyak 1 unit.

- Pembangunan asrama sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah asrama sekolah yang dibangun sebanyak 4 unit.
- Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah sarana yang dibangun, jumlah prasarana yang dibangun, Jumlah utilitas sekolah yang dibangun sebanyak 22 unit.
- Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah rumah dinas sekolah, guru dan penjaga sekolah yang dibangun sebanyak 3 unit.
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas sekolah yang direhab sebanyak 6 unit.
- Rehabilitasi pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang guru/kepala sekolah/tu yang direhab sebanyak 11 unit.
- Rehabilitasi sedang/berat ruang laboratorium biologi dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium biologi yang direhab sebanyak 4 unit.
- Rehabilitasi sedang/berat ruang laboratorium fisika dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium fisika yang direhab sebanyak 1 unit.
- Rehabilitasi sedang/berat ruang laboratorium kimia dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium kimia yang direhab sebanyak 2 unit.
- Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium komputer yang direhab sebanyak 1 unit.
- Rehabilitasi ruang unit kesehatan sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang unit Kesehatan Sekolah yang di Rehabilitasi sebanyak 1 unit.
- Rehabilitasi perpustakaan sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang pustaka sekolah yang di rehabilitasi sebanyak 4 unit.
- Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang serba



guna/aula yang direhab sebanyak 1 unit.

- Rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah sarana yang direhab, Jumlah prasarana yang direhab, Jumlah utilitas sekolah yang direhab sebanyak 9 unit.
- Rehabilitasi rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah rumah dinas kepala sekolah yang di rehabilitasi sebanyak 2 unit.
- Pengadaan mebel dengan output kegiatan ini adalah jumlah mebel yang diadakan sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah mebel sekolah yang diadakan sebanyak 59 sekolah.
- Pengadaan perlengkapan peserta didik dengan output kegiatan ini adalah jumlah perlengkapan peserta didik yang diadakan sehingga otomatis akan meningkatkan capaian program sebanyak 1 kegiatan.
- Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik dengan output kegiatan ini adalah jumlah alat praktik dan peraga peserta didik yang diadakan sebanyak 9 sekolah.
- Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah atas dengan output kegiatan ini adalah jumlah peserta didik yang dibiayai sebanyak 1 dokumen.
- Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik dengan output kegiatan ini adalah waktu pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik yang diselenggarakan dengan baik sebanyak 2 jenis.
- Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan menengah atas dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi satuan pendidikan menengah atas yang ditindaklanjuti sebanyak 1 dokumen.
- Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa dengan output kegiatan ini adalah jumlah siswa yang dibina minat, bakat dan kreativitasnya sebanyak 8 kegiatan.
- Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Atas dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dana BOS yang dikelola sebanyak 236 sekolah.

(2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah

Kejuruan, dengan Sub kegiatan :

- Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) dengan output kegiatan ini Jumlah DED Sekolah baru yang dibuat sebanyak 4 paket.
- Penambahan ruang kelas baru dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas baru yang dibangun sebanyak 13 paket.
- Pembangunan ruang praktik siswa dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang praktik siswa yang dibangun sebanyak 19 paket.
- Pembangunan ruang laboratorium dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium yang dibangun sebanyak 4 paket.
- Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun sebanyak 8 paket.
- Pembangunan perpustakaan sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang pustaka sekolah yang dibangun sebanyak 3 paket.
- Pembangunan ruang serba guna/aula dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang serba guna/aula yang dibangun sebanyak 1 unit.
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas sekolah yang direhab sebanyak 9 paket.
- Rehabilitasi pembangunan ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab sebanyak 12 paket.
- Rehabilitasi ruang praktik siswa dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang praktik siswa sekolah yang di rehabilitasi sebanyak 50 paket.
- Rehabilitasi ruang laboratorium dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium sekolah yang di rehabilitasi sebanyak 2 paket.
- Rehabilitasi ruang unit kesehatan sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang unit Kesehatan sekolah yang di rehabilitasi sebanyak 1 paket.
- Rehabilitasi perpustakaan sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang pustaka sekolah yang

di rehabilitasi sebanyak 12 paket.

- Rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah sarana yang direhab, Jumlah prasarana yang direhab, Jumlah utilitas sekolah yang direhab sebanyak 11 paket.
  - Pengadaan mebel dengan output kegiatan ini adalah jumlah mebel yang diadakan Sekolah dengan output kegiatan ini adalah Jumlah mebel sekolah yang diadakan sebanyak 39 paket.
  - Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik dengan output kegiatan ini adalah jumlah alat praktik dan peraga peserta didik yang diadakan sebanyak 50 paket.
  - Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik dengan output kegiatan ini adalah Waktu pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik yang diselenggarakan dengan baik sebanyak 2 jenis.
  - Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan menengah atas dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen evaluasi satuan pendidikan menengah atas yang ditindaklanjuti sebanyak 7 kegiatan.
  - Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa dengan output kegiatan ini adalah Jumlah siswa yang dibina minat, bakat dan kreativitasnya sebanyak 8 kegiatan.
  - Pembinaan kelembagaan dan manajemen Sekolah Menengah Kejuruan dengan output kegiatan ini adalah jumlah sekolah/lembaga yang dibina sebanyak 1 kegiatan.
  - Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Atas dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dana BOS yang dikelola sebanyak 111 sekolah.
- (3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus, dengan Sub kegiatan :
- Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) dengan output kegiatan ini Jumlah DED Sekolah baru yang dibuat sebanyak 1 sekolah.
  - Penambahan ruang kelas baru dengan output kegiatan ini adalah Jumlah ruang kelas baru yang dibangun sebanyak 15 ruang.

- Rehabilitasi perpustakaan sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang pustaka sekolah yang di rehabilitasi sebanyak 1 ruang.
- Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Sarana yang dibangun, jumlah prasarana yang dibangun, Jumlah utilitas sekolah yang dibangun sebanyak 7 ruang.
- Pembangunan kantin sekolah dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kantin sekolah yang dibangun sebanyak 4 ruang.
- Pembangunan ruang bina persepsi bunyi dan Irama untuk tunarungu (B) dengan output kegiatan ini adalah Jumlah ruang bina persepsi bunyi dan irama untuk tunarungu (B) yang dibangun sebanyak 4 ruang.
- Pembangunan ruang bina diri untuk tunagrahita (C) dengan output kegiatan ini adalah jumlah ruang bina diri untuk tunagrahita (C) yang dibangun sebanyak 2 ruang.
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dengan output kegiatan ini adalah Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab sebanyak 9 ruang.
- Rehabilitasi pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU dengan output kegiatan ini adalah Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang direhab sebanyak 2 ruang.
- Rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah sarana yang direhab, jumlah prasarana yang direhab, jumlah utilitas sekolah yang direhab sebanyak 9 ruang.
- Pengadaan mebel dengan output kegiatan ini adalah jumlah mebel yang diadakan sekolah dengan output kegiatan ini adalah jumlah mebel sekolah yang diadakan sebanyak 34 paket.
- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa dengan output kegiatan ini adalah jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan sebanyak 57 paket.
- Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik dengan output kegiatan ini adalah Waktu pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik yang diselenggarakan dengan baik sebanyak 2 jenis.

- Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan khusus dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi satuan pendidikan khusus yang ditindaklanjuti sebanyak 1 dokumen.
- Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa dengan output kegiatan ini adalah jumlah siswa yang dibina minat, bakat dan kreativitasnya sebanyak 58 orang.
- Pengelolaan dana BOS sekolah pendidikan Khusus dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dana BOS yang dikelola sebanyak 29 sekolah.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (Target kinerja : 33) (Realisasi Kinerja : 38).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengembangan Kurikulum, dicapai dengan pelaksanaan :

(1) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah, dengan Sub kegiatan :

- Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah dengan output kegiatan ini adalah Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan menengah yang disediakan sebanyak 1 dokumen.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

c. Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (Target kinerja : 71,07) (Realisasi Kinerja : 100).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

(1) Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, dengan Sub kegiatan :

- Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan output kegiatan ini adalah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dihitung dan dipetakan sebanyak 4 triwulan.
- Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan output kegiatan ini adalah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didistribusikan . sebanyak 3 kegiatan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

- d. Sasaran IV : Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi (Target kinerja : 21) (Realisasi Kinerja : 100).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

- e. Sasaran V : Meningkatnya kualitas pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun (Target kinerja : 3) (Realisasi Kinerja : 0).
- 2) Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah (Target kinerja : 6) (Realisasi Kinerja : 0).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>				<b>2.077.605.776.668</b>	<b>1.997.150.621.886</b>	<b>96,13</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>1.443.512.432.662</b>	<b>1.365.130.590.052</b>	<b>94,57</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>3.083.320.900</b>	<b>2.802.808.003</b>	<b>90,90</b>
	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100	778.231.100	696.165.100	89,45
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9 Dok	9 Dok	100	436.366.350	368.675.350	84,49
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok	100	281.479.800	192.197.900	68,28
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Kali	5 Kali	100	1.587.243.650	1.545.769.653	97,39
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>1.425.796.253.796</b>	<b>1.348.903.369.743</b>	<b>94,61</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100	1.422.813.539.610	1.346.060.973.039	94,61
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Orang	12 Orang	100	1.636.662.636	1.580.718.891	96,58
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Dok	5 Dok	100	1.346.051.550	1.261.677.813	93,73
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>1.087.317.500</b>	<b>785.376.190</b>	<b>72,23</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	100	412.155.000	171.179.690	41,53
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dok	12 Dok	100	398.685.500	376.804.500	94,51
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	1 Dok	100	276.477.000	237.392.000	85,86
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>455.114.800</b>	<b>300.808.800</b>	<b>66,10</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	259 stel	255 stel	98,455	195.930.000	191.300.000	97,64
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali	1 kali	100	259.184.800	109.508.800	42,25
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>4.635.667.450</b>	<b>4.536.636.289</b>	<b>97,86</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	41.010.400	40.645.000	99,11
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 unit,set, buah,dll	12 unit,set, buah,dll	100	3.301.540.000	3.213.375.000	97,33
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	119.548.500	115.959.644	97,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100	74.895.000	74.879.000	99,98
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dok	12 Dok	100	1.098.673.550	1.091.777.645	99,37
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>5.563.182.955</b>	<b>5.020.677.227</b>	<b>90,25</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 unit	14 unit	100	5.080.564.250	4.920.887.227	96,86
	Pengadaan Mebel	22 unit	0 unit	0	184.742.700	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	1 Set	Set	100	181.688.590	99.790.000	54,92
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99 unit	0 unit	0	116.187.415	-	-
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.812.937.661</b>	<b>1.722.214.860</b>	<b>95,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	55.221.000	55.200.300	99,96
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	740.974.500	664.849.860	89,73
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	1.016.742.161	1.002.164.700	98,57
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.078.637.600</b>	<b>1.058.698.940</b>	<b>98,15</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 unit	13 unit	100	339.500.000	322.044.300	94,86
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115 unit	115 unit	100	117.481.600	115.799.000	98,57
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit	100	621.656.000	620.855.640	99,87
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>632.845.970.896</b>	<b>630.858.396.934</b>	<b>99,69</b>



No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>				<b>336.513.017.064</b>	<b>310.626.624.911</b>	<b>92,31</b>
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	5 unit	5 unit	100	700.000.000	399.075.400	57,01
	Penambahan Ruang Kelas Baru	17 unit	17 unit	100	9.260.000.000	8.950.435.926	96,66
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4 unit	4 unit	100	1.205.923.000	1.205.180.000	99,94
	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	3 unit	3 unit	100	1.277.319.937	1.276.913.902	99,97
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	6 unit	6 unit	100	1.994.096.000	1.993.401.419	99,97
	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	4 unit	4 unit	100	1.366.253.000	1.365.803.000	99,97
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	6 unit	6 unit	100	1.329.864.000	1.314.100.000	98,81
	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	1 unit	1 unit	100	913.450.347	913.450.347	100
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	6 unit	6 unit	100	1.721.463.035	1.720.804.310	99,96
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 unit	2 unit	100	559.322.000	559.170.000	99,97
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1 unit	1 unit	100	200.000.000	195.169.850	97,58
	Pembangunan Asrama Sekolah	4 unit	4 unit	100	1.826.165.000	1.825.227.140	99,95
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	24 unit	22 unit	91,66	10.495.241.831	10.158.126.623	96,79
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	3 unit	3 unit	100	922.699.000	922.295.000	99,96
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6 unit	6 unit	100	3.072.774.183	3.071.973.183	99,97
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	11 unit	11 unit	100	1.384.239.000	1.383.125.000	99,92
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	4 unit	4 unit	100	437.459.000	437.028.800	99,90
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	1 unit	1 unit	100	164.049.000	163.899.000	99,91
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	2 unit	2 unit	100	220.983.000	220.898.990	99,96
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	1 unit	1 unit	100	129.796.000	129.700.000	99,93
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 unit	1 unit	100	94.786.000	94.685.000	99,89

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	4 unit	4 unit	100	488.642.000	488.214.000	99,91
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	1 unit	1 unit	100	436.252.095	435.290.955	99,78
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9 unit	9 unit	100	1.831.190.000	1.830.602.036	99,97
	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	2 unit	2 unit	100	436.261.000	435.922.000	99,92
	Pengadaan Mebel Sekolah	59 sekolah	59 sekolah	100	16.325.221.036	15.535.569.300	95,16
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	200.000.000	198.376.000	99,19
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	9 sekolah	9 sekolah	100	4.351.207.950	4.203.839.010	96,61
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	1 Dok	1 Dok	100	4.983.320.650	4.937.155.661	99,07
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	2 jenis	2 jenis	100	5.283.595.230	5.168.339.726	97,82
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	1 Dok	1 Dok	100	3.093.558.850	2.892.325.682	93,50
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100	4.974.554.750	4.769.496.570	95,88
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	236 sekolah	236 sekolah	100	254.833.330.170	231.431.031.081	90,82
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>				<b>275.712.977.821</b>	<b>268.860.518.250</b>	<b>97,51</b>
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4 paket	4 paket	100	733.500.000	359.732.000	49,04
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	13 paket	13 paket	100	10.315.392.000	10.309.504.681	99,94
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	21 paket	19 paket	90,5	25.146.046.513	23.420.560.387	93,14
	Pembangunan Ruang Laboratorium	4 paket	4 paket	100	1.433.049.757	1.432.299.341	99,95
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	8 paket	8 paket	100	934.160.000	933.013.771	99,88
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3 paket	3 paket	100	1.147.080.000	1.144.966.184	99,82
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1 unit	1 unit	100	105.699.300	105.699.300	100
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	22 paket	22 paket	100	6.827.597.282	6.810.186.248	99,74
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	9 paket	9 paket	100	4.290.771.310	4.287.584.596	99,93
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	12 paket	12 paket	100	1.255.413.600	1.253.174.190	99,82

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	5 paket	5 paket	100	2.202.480.000	2.201.373.062	99,95
	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	2 paket	2 paket	100	293.664.000	293.281.901	99,87
	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 paket	1 paket	100	48.944.000	48.850.000	99,81
	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	1 paket	1 paket	100	146.832.000	146.750.000	99,94
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11 paket	11 paket	100	3.465.744.759	3.462.713.749	99,91
	Pengadaan Mebel Sekolah	39 paket	39 paket	100	7.185.000.000	7.114.167.415	99,01
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	50 paket	50 paket	100	45.576.980.300	43.304.550.996	95,01
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Unit	1 Unit	100	2.362.321.445	2.362.321.445	100
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	2 jenis	2 jenis	100	6.733.261.857	6.546.481.665	97,23
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100	3.079.464.320	2.867.228.571	93,11
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100	2.031.073.800	1.694.691.470	83,44
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	120.926.775	119.297.600	98,65
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	111 sekolah	111 sekolah	100	150.277.574.803	148.642.089.679	98,91
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>				<b>20.619.976.011</b>	<b>51.371.253.773</b>	<b>249,13</b>
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 sekolah	1 sekolah	100	724.934.200	363.579.820	50,15
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	15 ruang	15 ruang	100	2.787.524.628	2.725.219.698	97,76
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 ruang	1 ruang	100	197.192.966	196.472.800	99,63
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 ruang	7 ruang	100	1.307.440.429	1.304.847.863	99,80
	Pembangunan Kantin Sekolah	4 ruang	Ruang	100	1.030.676.308	1.028.566.413	99,80
	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	4 ruang	4 ruang	100	775.246.078	762.145.685	98,31
	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	2 ruang	2 ruang	100	368.159.986	367.163.750	99,73
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	9 ruang	2 ruang	100	1.133.769.862	1.113.263.038	98,19
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 ruang	2 ruang	100	253.550.401	250.101.295	98,64
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9 ruang	2 ruang	100	274.832.992	274.216.103	99,78

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Mebel Sekolah	34 paket	34 paket	100	342.801.700	328.292.900	95,77
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	57 paket	57 paket	100	3.727.089.250	3.571.847.858	95,83
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	2 jenis	2 jenis	100	329.285.100	324.368.100	98,51
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	1 Dok	1 Dok	100	876.373.200	863.618.000	98,54
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	58 orang	58 orang	100	152.439.725	149.304.850	97,94
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	29 sekolah	29 sekolah	100	6.338.659.186	37.748.245.600	595,52
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>				<b>331.702.960</b>	<b>313.736.750</b>	<b>94,58</b>
<b>1</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</b>				<b>331.702.960</b>	<b>313.736.750</b>	<b>94,58</b>
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1 Dok	1 Dok	100	331.702.960	313.736.750	94,58
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>				<b>915.670.150</b>	<b>847.898.150</b>	<b>92,60</b>
<b>1</b>	<b>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi</b>				<b>915.670.150</b>	<b>847.898.150</b>	<b>92,60</b>
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4 triwulan	4 triwulan	100	220.371.150	212.676.150	96,51
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	695.299.000	635.222.000	91,36
	<b>UPTD BALTEKOMDIK</b>				<b>799.463.760</b>	<b>791.168.568</b>	<b>98,96</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>799.463.760</b>	<b>791.168.568</b>	<b>98,96</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>10.350.000</b>	<b>10.350.000</b>	<b>100</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15 Stel	15 stel	100	10.350.000	10.350.000	100
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>404.547.760</b>	<b>396.252.568</b>	<b>97,95</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Dok	5 Dok	100	56.943.700	56.931.700	99,98
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Dok	2 Dok	100	14.181.060	14.136.000	99,68
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Dok	8 Dok	100	333.423.000	325.184.868	97,53
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>384.566.000</b>	<b>384.566.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 Dok	7 Dok	100	303.000.000	303.000.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Dok	12 Dok	100	81.566.000	81.566.000	100
	<b>CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)</b>				<b>17.725.394.305</b>	<b>15.060.850.912</b>	<b>84,97</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>10.195.394.305</b>	<b>10.131.372.634</b>	<b>99,37</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>5.399.700.000</b>	<b>5.396.800.000</b>	<b>99,95</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 jenis	2 jenis	100	5.399.700.000	5.396.800.000	99,95
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>32.250.000</b>	<b>32.250.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43 stel	43 stel	100	32.250.000	32.250.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>2.761.176.773</b>	<b>2.718.615.775</b>	<b>98,46</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	3.052.500	3.052.500	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	2.495.442.775	2.452.936.700	98,30
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	12.616.250	12.616.250	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	250.065.248	250.010.325	99,98
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.978.217.532</b>	<b>1.960.567.728</b>	<b>99,11</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	3.000.000	3.000.000	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	23.115.000	23.031.000	99,64
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	1.952.102.532	1.934.536.728	99,10
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>24.050.000</b>	<b>23.139.131</b>	<b>96,21</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	100	16.950.000	16.039.131	94,63
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	7.100.000	7.100.000	100
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>7.530.000.000</b>	<b>4.929.478.278</b>	<b>65,46</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>				<b>4.970.000.000</b>	<b>3.090.582.873</b>	<b>62,18</b>
	Penambahan Ruang Kelas Baru	2 unit	1 unit	50	620.000.000	235.849.847	38,04
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1 unit	0 unit	0	700.000.000	42.583.450	6,08
	Pembangunan Asrama Sekolah	1 unit	0 unit	0	300.000.000	18.566.252	6,19
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10 unit	10 unit	100	1.785.000.000	1.716.368.843	96,16
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1 unit	1 unit	100	220.000.000	213.261.550,00	96,94
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 unit	1 unit	50	720.000.000	241.116.206	33,49
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1 unit	1 unit	100	25.000.000	24.998.225	99,99
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	635 siswa	635 siswa	100	500.000.000	498.268.500	99,65
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2 set	2 set	100	100.000.000	99.570.000	99,57
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>				<b>2.120.000.000</b>	<b>1.418.411.735</b>	<b>66,91</b>
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1 unit	1 unit	100	220.000.000	215.880.900	98,13
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 unit	0 unit	0	700.000.000	41.021.642	5,86
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 unit	4 unit	100	900.000.000	869.634.464	96,63
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1 unit	1 unit	100	150.000.000	142.643.734	95,10
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1 paket	1 paket	100	150.000.000	149.230.995	99,49
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>				<b>440.000.000</b>	<b>420.483.670</b>	<b>95,56</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 unit	2 unit	100	440.000.000	420.483.670	95,56
	<b>CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)</b>				<b>10.152.006.210</b>	<b>9.900.135.079</b>	<b>97,52</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>6.065.657.210</b>	<b>6.012.598.523</b>	<b>99,13</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>5.449.050.000</b>	<b>5.446.050.000</b>	<b>99,94</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 jenis	2 jenis	100	5.449.050.000	5.446.050.000	99,94
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>22.500.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>93,33</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 stel	28 stel	93,33	22.500.000	21.000.000	93,33
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>387.598.280</b>	<b>349.178.541</b>	<b>90,09</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	4.552.500	4.546.000	99,86
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	131.346.620	130.541.480	99,39
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	21.690.000	20.380.000	93,96
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	230.009.160	193.711.061	84,22
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>183.878.930</b>	<b>176.529.158</b>	<b>96,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	1.050.000	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	35.600.000	32.944.250	92,54
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	35.000.000	35.000.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	112.228.930	108.584.908	96,75
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>22.630.000</b>	<b>19.840.824</b>	<b>87,67</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	100	16.950.000	14.925.824	88,06

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	5.680.000	4.915.000	86,53
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>4.086.349.000</b>	<b>3.887.536.556</b>	<b>95,13</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>				<b>2.690.000.000</b>	<b>2.614.397.856</b>	<b>97,19</b>
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	1 unit	1 unit	100	210.000.000	197.772.100	94,18
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	1 unit	1 unit	100	210.000.000	205.623.700,00	97,92
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 unit	1 unit	100	150.000.000	145.179.000,00	96,79
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1 unit	1 unit	100	200.000.000	192.188.004,00	96,09
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6 unit	6 unit	100	1.150.000.000	1.117.691.920,00	97,19
	Pembangunan Kantin Sekolah	2 unit	2 unit	100	420.000.000	405.990.232,00	96,66
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 paket	1 paket	100	350.000.000	349.952.900,00	99,99
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>				<b>1.396.349.000</b>	<b>1.273.138.700</b>	<b>91,18</b>
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 unit	4 unit	100	1.176.349.000	1.061.464.500	90,23
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 unit	1 unit	100	220.000.000	211.674.200	96,22
	<b>CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK, KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)</b>				<b>13.222.298.334</b>	<b>12.007.233.341</b>	<b>90,81</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>6.746.298.334</b>	<b>6.438.694.109</b>	<b>95,44</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>3.374.800.000</b>	<b>3.300.830.000</b>	<b>97,81</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 jenis	2 jenis	100	3.374.800.000	3.300.830.000	97,81
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28 stel	28 stel	100	21.000.000	21.000.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.778.851.790</b>	<b>1.655.791.599</b>	<b>93,08</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	3.134.100	3.003.000	95,82



No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	1.583.484.400	1.482.319.200	93,61
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	18.862.500	10.419.800	55,24
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	173.370.790	160.049.599	92,32
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>23.468.000</b>	<b>23.468.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Mebel	12 bulan	12 bulan	100	23.468.000	23.468.000	100
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.524.128.544</b>	<b>1.417.165.340</b>	<b>92,98</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	2.600.000	2.600.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	33.200.000	23.073.202	69,50
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	35.000.000	35.000.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	1.453.328.544	1.356.492.138	93,34
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>24.050.000</b>	<b>20.439.170</b>	<b>84,99</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	100	16.950.000	15.903.070	93,82
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	7.100.000	4.536.100	63,89
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>6.476.000.000</b>	<b>5.568.539.232</b>	<b>85,99</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>				<b>3.950.000.000</b>	<b>3.162.315.194</b>	<b>80,06</b>
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1 unit	0 unit	0	700.000.000	33.452.536	4,78
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 paket	7 paket	100	1.250.000.000	1.218.585.434	97,49
	Pembangunan Fasilitas Parkir	1 paket	1 paket	100	150.000.000	142.659.620	95,11
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	1 paket	1 paket	100	150.000.000	143.350.180	95,57
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	1 paket	1 paket	100	200.000.000	191.453.550	95,73
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6 paket	6 paket	100	1.200.000.000	1.132.869.674	94,41
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2 paket	2 paket	100	300.000.000	299.944.200,00	99,98

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>				<b>2.126.000.000</b>	<b>2.024.310.288</b>	<b>95,22</b>
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 paket	7 paket	100	996.000.000	954.524.665	95,84
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	2 paket	2 paket	100	330.000.000	312.298.239	94,64
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 paket	4 paket	100	800.000.000	757.487.384	94,69
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>				<b>400.000.000</b>	<b>381.913.750</b>	<b>95,48</b>
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 paket	2 paket	100	400.000.000	381.913.750	95,48
	<b>CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)</b>				<b>15.809.578.456</b>	<b>15.091.371.463</b>	<b>95,46</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>7.834.578.456</b>	<b>7.708.521.547</b>	<b>98,39</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>2.266.900.000</b>	<b>2.232.150.000</b>	<b>98,47</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 jenis	2 jenis	100	2.266.900.000	2.232.150.000	98,47
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>26.250.000</b>	<b>26.250.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35 stel	35 stel	100	26.250.000	26.250.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>4.068.051.740</b>	<b>3.991.166.065</b>	<b>98,11</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	3.112.500	3.112.500	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	3.894.127.800	3.819.666.400	98,09
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	11.320.000	8.975.500	79,29
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	159.491.440	159.411.665	99,95
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.450.056.716</b>	<b>1.436.593.732</b>	<b>99,07</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	2.000.000	2.000.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	35.100.000	21.643.016	61,66
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	1.412.956.716	1.412.950.716	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				23.320.000	22.361.750	95,89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	100	16.950.000	15.991.750	94,35
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	6.370.000	6.370.000	100
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				7.975.000.000	7.382.849.916	92,57
1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>				3.740.000.000	3.391.295.373	90,68
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	2 unit	2 unit	100	400.000.000	375.409.764	93,85
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11 unit	11 unit	100	2.550.000.000	2.255.984.678	88,47
	Pembangunan Kantin Sekolah	1 unit	1 unit	100	200.000.000	181.784.850	90,89
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1 unit	1 unit	100	200.000.000	199.962.981	99,98
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 unit	1 unit	100	240.000.000	228.403.100	95,17
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2 paket	2 paket	100	150.000.000	149.750.000,00	99,83
2	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>				4.035.000.000	3.795.788.362	94,07
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11 unit	11 unit	100	2.460.000.000	2.318.444.395	94,25
	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	2 unit	2 unit	100	750.000.000	654.176.141	87,22
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 paket	1 paket	100	75.000.000	74.900.000	99,87
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2 paket	2 paket	100	750.000.000	748.267.826	99,77
3	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>				200.000.000	195.766.181	97,88
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 unit	1 unit	100	200.000.000	195.766.181	97,88
	<b>CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)</b>				15.137.974.822	14.725.591.331	97,28
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				6.447.974.822	6.311.128.765	97,88

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>4.433.800.000</b>	<b>4.386.800.000</b>	<b>98,94</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 jenis	Jenis	100	4.433.800.000	4.386.800.000	98,94
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>22.500.000</b>	<b>18.750.000</b>	<b>83,33</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 stel	26 stel	86,666 667	22.500.000	18.750.000	83,33
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.566.197.900</b>	<b>1.510.262.000</b>	<b>96,43</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	3.232.500	3.229.250	99,90
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	1.223.614.900	1.168.414.600	95,49
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	12.979.250	12.684.250	97,73
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	326.371.250	325.933.900	99,87
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>46.991.200</b>	<b>46.991.200</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	46.991.200	46.991.200	100
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>343.265.722</b>	<b>317.656.678</b>	<b>92,54</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	2.000.000	2.000.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	29.970.000	13.532.934	45,15
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	35.000.000	35.000.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	276.295.722	267.123.744	96,68
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>35.220.000</b>	<b>30.668.887</b>	<b>87,08</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	100	26.700.000	24.238.887	90,78
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	8.520.000	6.430.000	75,47
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>8.690.000.000</b>	<b>8.414.462.566</b>	<b>96,83</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>				<b>5.090.000.000</b>	<b>4.971.789.507</b>	<b>97,68</b>
	Penambahan Ruang Kelas Baru	1 unit	1 unit	100	200.000.000	196.208.655	98,10
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	1 unit	1 unit	100	200.000.000	199.252.850	99,63
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 unit	1 unit	100	195.000.000	190.051.150	97,46
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17 unit	17 unit	100	3.420.000.000	3.334.140.390	97,49
	Pembangunan Fasilitas Parkir	1 unit	1 unit	100	200.000.000	195.592.625	97,80
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	1 unit	1 unit	100	200.000.000	195.778.745	97,89
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 unit	3 unit	100	675.000.000	660.765.092	97,89
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>				<b>3.600.000.000</b>	<b>3.442.673.059</b>	<b>95,63</b>
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	3 unit	3 unit	100	1.000.000.000	910.763.775	91,08
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10 unit	10 unit	100	2.120.000.000	2.057.107.100	97,03
	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	2 unit	2 unit	100	480.000.000	474.802.184	98,92
	<b>CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)</b>				<b>15.316.442.066</b>	<b>14.571.123.541</b>	<b>95,13</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>9.696.442.066</b>	<b>9.421.453.075</b>	<b>97,16</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>6.821.250.000</b>	<b>6.646.900.000</b>	<b>97,44</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 jenis	2 jenis	100	6.821.250.000	6.646.900.000	97,44
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 stel	30 stel	100	22.500.000	22.500.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>2.139.589.160</b>	<b>2.044.093.257</b>	<b>95,54</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	3.112.500	3.112.500	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	1.915.556.360	1.828.781.700	95,47
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	7.359.500	7.359.500	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	213.560.800	204.839.557	95,92
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>692.582.906</b>	<b>688.883.834</b>	<b>99,47</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	2.100.000	2.100.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	10.725.000	10.644.000	99,24
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	35.000.000	35.000.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	644.757.906	641.139.834	99,44
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>20.520.000</b>	<b>19.075.984</b>	<b>92,96</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	100	16.950.000	15.931.984	93,99
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	3.570.000	3.144.000	88,07
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>5.620.000.000</b>	<b>5.149.670.466</b>	<b>91,63</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>				<b>2.450.000.000</b>	<b>2.115.809.583</b>	<b>86,36</b>
	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	1 unit	1 unit	100	150.000.000	147.071.826	98,05
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8 unit	7 unit	87,5	1.550.000.000	1.334.667.857	86,11
	Pembangunan Kantin Sekolah	2 unit	2 unit	100	300.000.000	289.051.305	96,35
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2 unit	2 unit	100	350.000.000	339.466.595	96,99
	Rehabilitasi Asrama Sekolah	1 unit	0 unit	0	100.000.000	5.552.000,00	5,55
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>				<b>2.950.000.000</b>	<b>2.819.194.116</b>	<b>95,57</b>
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	2 unit	2 unit	100	550.000.000	474.084.790	86,20
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9 unit	9 unit	100	1.700.000.000	1.655.843.414	97,40
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	2 unit	2 unit	100	300.000.000	294.162.912	98,05
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2 paket	2 paket	100	400.000.000	395.103.000	98,78
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>				<b>220.000.000</b>	<b>214.666.767</b>	<b>97,58</b>
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 unit	1 unit	100	220.000.000	214.666.767	97,58

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)</b>				<b>18.825.625.706</b>	<b>18.460.985.365</b>	<b>98,06</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>13.785.745.706</b>	<b>13.712.048.420</b>	<b>99,47</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>12.093.100.000</b>	<b>12.068.000.000</b>	<b>99,79</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 jenis	2 jenis	100	12.093.100.000	12.068.000.000	99,79
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>12.750.000</b>	<b>12.750.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 stel	17 stel	100	12.750.000	12.750.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.352.131.250</b>	<b>1.307.382.250</b>	<b>96,69</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	3.548.500	3.548.000	99,99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	1.116.547.000	1.090.371.900	97,66
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	7.655.000	7.655.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	224.380.750	205.807.350	91,72
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>303.714.456</b>	<b>300.824.420</b>	<b>99,05</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	1.030.000	1.030.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	15.803.000	12.912.964	81,71
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	286.881.456	286.881.456	100
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>24.050.000</b>	<b>23.091.750</b>	<b>96,02</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	100	16.950.000	15.991.750	94,35
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	7.100.000	7.100.000	100
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>5.039.880.000</b>	<b>4.748.936.945</b>	<b>94,23</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>				<b>3.504.920.000</b>	<b>3.260.912.642</b>	<b>93,04</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penambahan Ruang Kelas Baru	2 paket	2 paket	100	800.000.000	633.072.747	79,13
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	1 paket	1 paket	100	200.000.000	192.080.351	96,04
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11 paket	11 paket	100	2.110.000.000	2.050.742.531	97,19
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 paket	1 paket	100	200.000.000	191.849.513	95,92
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 paket	Paket	100	194.920.000	193.167.500	99,10
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>				<b>1.534.960.000</b>	<b>1.488.024.303</b>	<b>96,94</b>
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 paket	7 paket	100	1.380.000.000	1.335.109.153	96,75
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 paket	1 paket	100	54.960.000	54.529.000	99,22
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1 paket	1 paket	100	100.000.000	98.386.150	98,39
	<b>CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)</b>				<b>6.197.044.354</b>	<b>6.139.728.234</b>	<b>99,08</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>4.997.044.354</b>	<b>4.978.210.738</b>	<b>99,62</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>4.427.150.000</b>	<b>4.427.030.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 jenis	2 jenis	100	4.427.150.000	4.427.030.000	100
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>8.250.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11 stel	11 stel	100	8.250.000	8.250.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>385.656.600</b>	<b>367.057.194</b>	<b>95,18</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	3.097.500	3.086.500	99,64
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	65.702.100	60.146.100	91,54
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	13.374.500	13.009.764	97,27
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	303.482.500	290.814.830	95,83
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>168.687.754</b>	<b>168.573.544</b>	<b>99,93</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	2.400.000	2.400.000	100



No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	26.350.000	26.235.790	99,57
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	35.000.000	35.000.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	104.937.754	104.937.754	100
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>7.300.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	7.300.000	7.300.000	100
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>1.200.000.000</b>	<b>1.161.517.496</b>	<b>96,79</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>				<b>1.200.000.000</b>	<b>1.161.517.496</b>	<b>96,79</b>
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	1 paket	1 paket	100	200.000.000	190.537.588	95,27
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 paket	4 paket	100	800.000.000	771.173.908	96,40
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1 paket	1 paket	100	200.000.000	199.806.000	99,90
<b>2</b>	<b>BKK (Bantuan Keuangan Khusus) KOTA BUKITTINGGI</b>				<b>8.520.000.000</b>	<b>7.632.869.293</b>	<b>89,59</b>
	<b>SMAN 1 BUKITTINGGI</b>				<b>1.574.800.000</b>	<b>1.520.737.281</b>	<b>96,57</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>1.574.800.000</b>	<b>1.520.737.281</b>	<b>96,57</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>342.780.000</b>	<b>334.302.500</b>	<b>97,53</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	342.780.000	334.302.500	97,53
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>63.150.000</b>	<b>63.150.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90 stel	90 stel	100	63.150.000	63.150.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>414.811.422</b>	<b>412.250.422</b>	<b>99,38</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	23.252.400	23.252.400	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	52.500.000	49.950.000	95,14
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	100	98.343.980	98.343.980	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	179.607.232	179.606.232	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	12.915.000	12.915.000	100
	Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan	100	22.692.810	22.692.810	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	25.500.000	25.490.000	99,96
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>661.654.578</b>	<b>622.511.800</b>	<b>94,08</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100	32.219.000	22.095.000	68,58
	Pengadaan Mebel	1 unit	1 unit	100	238.474.100	224.974.100	94,34
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	125.976.900	120.186.500	95,40
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	54.847.578	48.762.000	88,90
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	38.634.000	38.634.000	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	141.303.000	137.660.200	97,42
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit, set, buah, dll	1 unit, set, buah, dll	100	30.200.000	30.200.000	100
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>55.004.000</b>	<b>51.122.559</b>	<b>92,94</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	55.004.000	51.122.559	92,94
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>37.400.000</b>	<b>37.400.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	5.000.000	5.000.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	32.400.000	32.400.000	100
	<b>SMAN 2 BUKITTINGGI</b>				<b>1.315.700.000</b>	<b>1.218.149.899</b>	<b>92,59</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>1.315.700.000</b>	<b>1.218.149.899</b>	<b>92,59</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>133.674.000</b>	<b>130.822.500</b>	<b>97,87</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	133.674.000	130.822.500	97,87
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>58.500.000</b>	<b>58.500.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	78 stel	12 stel	100	58.500.000	58.500.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>333.797.500</b>	<b>325.929.315</b>	<b>97,64</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	270.697.500	264.629.500	97,76
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	63.100.000	61.299.815	97,15
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>655.186.900</b>	<b>601.731.800</b>	<b>91,84</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100	32.219.000	24.758.900	76,85
	Pengadaan Mebel	2 unit	2 unit	100	269.058.900	244.130.400	90,73
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	6 unit	100	185.810.000	178.142.500	95,87
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	168.099.000	154.700.000	92,03
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>134.541.600</b>	<b>101.166.284</b>	<b>75,19</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 unit	6 unit	100	134.541.600	101.166.284	75,19
	<b>SMAN 3 BUKITINGGI</b>				<b>1.444.100.000</b>	<b>1.244.261.033</b>	<b>86,16</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>1.444.100.000</b>	<b>1.244.261.033</b>	<b>86,16</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>337.495.000</b>	<b>257.618.100</b>	<b>76,33</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	337.495.000	257.618.100	76,33
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>110.100.000</b>	<b>98.540.250</b>	<b>89,50</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	148 stel	148 stel	100	110.100.000	98.540.250	89,50
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>423.265.800</b>	<b>360.663.012</b>	<b>85,21</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 unit,set,buah, dll	3 unit,set,buah, dll	100	32.600.000	32.467.500	99,59

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15 unit,set,buah,h,dll	15 unit,set,buah,dll	100	161.172.550	149.758.562	92,92
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	131.101.000	102.584.700	78,25
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	12 bulan	12 bulan	100	38.792.250	38.792.250	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	59.600.000	37.060.000	62,18
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>410.447.900</b>	<b>385.996.961</b>	<b>94,04</b>
	Pengadaan Mebel	3 unit	3 unit	100	29.262.400	29.181.900	99,72
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 unit	30 unit	100	381.185.500	356.815.061	93,61
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>113.391.300</b>	<b>94.452.400</b>	<b>83,30</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	113.391.300	94.452.400	83,30
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>49.400.000</b>	<b>46.990.310</b>	<b>95,12</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit, dll	9 unit, dll	100	4.400.000	3.704.750	84,20
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	45.000.000	43.285.560	96,19
	<b>SMAN 4 BUKITTINGGI</b>				<b>1.095.680.000</b>	<b>979.318.100</b>	<b>89,38</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>1.095.680.000</b>	<b>979.318.100</b>	<b>89,38</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>192.987.000</b>	<b>186.327.500</b>	<b>96,55</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	192.987.000	186.327.500	96,55
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>124.350.000</b>	<b>122.027.000</b>	<b>98,13</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	152 stel	152 stel	100	124.350.000	122.027.000	98,13
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>309.413.500</b>	<b>306.346.500</b>	<b>99,01</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 unit,set,buah,h,dll	12 unit,set,buah,dll	100	58.562.100	56.012.100	95,65

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 unit,set,buah,h,dll	6 unit,set,buah,dll	100	137.345.250	136.865.250	99,65
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	76.733.000	76.706.000	99,96
	Penyediaan Bahan/Material	1 unit,set,buah,h,dll	1 unit,set,buah,dll	100	3.423.150	3.423.150	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Dok	26 Dok	100	33.350.000	33.340.000	99,97
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>257.862.700</b>	<b>252.217.100</b>	<b>97,81</b>
	Pengadaan Mebel	8 unit	8 unit	100	74.920.600	74.920.600	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit,set,buah,h,dll	6 unit,set,buah,dll	100	172.642.100	166.996.500	96,73
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit	100	10.300.000	10.300.000	100
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>74.850.000</b>	<b>58.750.000</b>	<b>78,49</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	74.850.000	58.750.000	78,49
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>136.216.800</b>	<b>53.650.000</b>	<b>39,39</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	2 unit	100	200.000	200.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	136.016.800	53.450.000	39,30
	<b>SMAN 5 BUKITTINGGI</b>				<b>1.253.520.000</b>	<b>1.000.750.580</b>	<b>79,84</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>1.253.520.000</b>	<b>1.000.750.580</b>	<b>79,84</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>248.051.500</b>	<b>170.168.000</b>	<b>68,60</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	248.051.500	170.168.000	68,60
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>165.600.000</b>	<b>165.462.000</b>	<b>99,92</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	92 stel	92 stel	100	165.600.000	165.462.000	99,92
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>360.314.700</b>	<b>230.791.800</b>	<b>64,05</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 unit,set, buah,dll	5 unit,set ,buah,dll	100	83.137.700	82.762.700	99,55
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	242.677.000	120.090.000	49,49
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 unit,lembar ,buah,dll	1 unit,lembar,b uah,dll	100	9.000.000	2.569.100	28,55
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	25.500.000	25.370.000	99,49
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>435.503.800</b>	<b>391.108.780</b>	<b>89,81</b>
	Pengadaan Mebel	2 unit,set, buah,dll	2 unit,set, buah,dll	100	64.427.788	59.529.000	92,40
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	6 unit	100	306.214.112	288.292.480	94,15
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit,dll	2 unit,dll	100	64.861.900	43.287.300	66,74
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>600.000</b>	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	0 bulan	0	600.000	-	-
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>43.450.000</b>	<b>43.220.000</b>	<b>99,47</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	3.450.000	3.220.000	93,33
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	40.000.000	40.000.000	100
	<b>SMKN 1 BUKITTINGGI</b>				<b>972.000.000</b>	<b>935.670.900</b>	<b>96,26</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>922.240.400</b>	<b>885.911.300</b>	<b>96,06</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>414.680.000</b>	<b>413.005.000</b>	<b>99,60</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	414.680.000	413.005.000	99,60
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>306.316.380</b>	<b>272.227.800</b>	<b>88,87</b>
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 unit,set, buah,dll	3 unit,set, buah,dll	100	185.445.380	184.411.800	99,44
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	110.671.000	77.876.000	70,37
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	10.200.000	9.940.000	97,45

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>195.144.020</b>	<b>194.578.500</b>	<b>99,71</b>
	Pengadaan Mebel	2 unit,dll	2 unit,dll	100	38.983.500	38.983.500	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit,set,buah,dll	5 unit,set,buah,dll	100	133.970.520	133.405.000	99,58
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit, dll	2 unit, dll	100	22.190.000	22.190.000	100
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit,set,buah,dll	2 unit,set,buah,dll	100	6.100.000	6.100.000	100
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>49.759.600</b>	<b>49.759.600</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>				<b>49.759.600</b>	<b>49.759.600</b>	<b>100</b>
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 unit	1 unit	100	49.759.600	49.759.600	100
	<b>SMKN 2 BUKITTINGGI</b>				<b>746.000.000</b>	<b>625.622.500</b>	<b>83,86</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>746.000.000</b>	<b>625.622.500</b>	<b>83,86</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>163.930.000</b>	<b>162.255.000</b>	<b>98,98</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	163.930.000	162.255.000	98,98
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>157.314.740</b>	<b>122.042.040</b>	<b>77,58</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 buah	15 buah	100	1.039.000	1.039.000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit,set,buah,dll	1 unit,set,buah,dll	100	52.583.018	49.910.318	94,92
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21 unit,set,buah,dll	21 unit,set,buah,dll	100	50.958.682	18.958.682	37,20
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	27.234.040	26.634.040	97,80
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 null	1 null	100	25.500.000	25.500.000	100
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		-		<b>394.632.200</b>	<b>311.202.400</b>	<b>78,86</b>
	Pengadaan Mebel	2 unit,set,buah,dll	1 unit,set,buah,dll	50	114.884.500	34.347.200	29,90

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit,set,buah,dll	5 unit,set,buah,dll	100	85.293.700	82.401.200	96,61
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	194.454.000	194.454.000	100
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>30.123.060</b>	<b>30.123.060</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	30.123.060	30.123.060	100
	<b>SLBN 1 BUKITTINGGI</b>				<b>118.200.000</b>	<b>108.359.000</b>	<b>91,67</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>118.200.000</b>	<b>108.359.000</b>	<b>91,67</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>81.736.000</b>	<b>71.895.000</b>	<b>87,96</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	81.736.000	71.895.000	87,96
<b>2</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>36.464.000</b>	<b>36.464.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit,dll	1 unit,dll	100	36.464.000	36.464.000	100
	<b>BKK (Bantuan Keuangan Khusus) KOTA PARIAMAN</b>				<b>6.006.000.000</b>	<b>5.798.487.386</b>	<b>96,54</b>
	<b>SMAN 1 PARIAMAN</b>				<b>904.800.000</b>	<b>891.668.033</b>	<b>98,55</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>904.800.000</b>	<b>891.668.033</b>	<b>98,55</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>18.480.000</b>	<b>18.480.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	18.480.000	18.480.000	100
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>57.000.000</b>	<b>56.924.000</b>	<b>99,87</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	76 stel	76 stel	100	57.000.000	56.924.000	99,87
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>257.023.142</b>	<b>246.192.000</b>	<b>95,79</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	222.462.000	211.631.000	95,13



No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	3.681.142	3.681.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	30.880.000	30.880.000	100
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>133.464.980</b>	<b>133.464.980</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Mebel	1 unit	1 unit	100	50.091.600	50.091.600	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	83.373.380	83.373.380	100
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>345.336.928</b>	<b>343.236.928</b>	<b>99,39</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	345.336.928	343.236.928	99,39
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>93.494.950</b>	<b>93.370.125</b>	<b>99,87</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	93.494.950	93.370.125	99,87
	<b>SMAN 2 PARIAMAN</b>				<b>866.400.000</b>	<b>853.052.184</b>	<b>98,46</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>866.400.000</b>	<b>853.052.184</b>	<b>98,46</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>298.530.000</b>	<b>295.655.000</b>	<b>99,04</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	298.530.000	295.655.000	99,04
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>71.875.000</b>	<b>69.075.000</b>	<b>96,10</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75 stel	75 stel	100	71.875.000	69.075.000	96,10
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>25.076.000</b>	<b>25.076.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	576.000	576.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	24.500.000	24.500.000	100
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>426.864.400</b>	<b>419.199.000</b>	<b>98,20</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit	100	160.218.400	152.633.000	95,27

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	266.646.000	266.566.000	99,97
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>44.054.600</b>	<b>44.047.184</b>	<b>99,98</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	2.462.416	2.455.000	99,70
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	41.592.184	41.592.184	100
	<b>SMAN 3 PARIAMAN</b>				<b>715.200.000</b>	<b>710.242.045</b>	<b>99,31</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>715.200.000</b>	<b>710.242.045</b>	<b>99,31</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>18.480.000</b>	<b>18.480.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	18.480.000	18.480.000	100
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>79.500.000</b>	<b>79.425.000</b>	<b>99,91</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75 stel	75 stel	100	79.500.000	79.425.000	99,91
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>96.609.300</b>	<b>93.993.300</b>	<b>97,29</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	68.189.300	65.573.300	96,16
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	28.420.000	28.420.000	100
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>64.122.000</b>	<b>64.122.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Mebel	12 bulan	12 bulan	100	4.542.000	4.542.000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 unit	11 unit	100	53.970.000	53.970.000	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	5.610.000	5.610.000	100
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>273.017.858</b>	<b>271.492.183</b>	<b>99,44</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	273.017.858	271.492.183	99,44
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>183.470.842</b>	<b>182.729.562</b>	<b>99,60</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	183.470.842	182.729.562	99,60

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>SMAN 4 PARIAMAN</b>				<b>594.000.000</b>	<b>581.384.250</b>	<b>97,88</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>594.000.000</b>	<b>581.384.250</b>	<b>97,88</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>16.575.000</b>	<b>16.575.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	16.575.000	16.575.000	100
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>46.500.000</b>	<b>46.500.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62 stel	62 stel	100	46.500.000	46.500.000	100
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>219.152.490</b>	<b>208.469.300</b>	<b>95,13</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	12.216.000	12.216.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	186.100.300	175.462.300	94,28
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	796.190	796.000	99,98
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	20.040.000	19.995.000	99,78
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>149.489.950</b>	<b>149.489.950</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Mebel	1 unit	1 unit	100	35.243.600	35.243.600	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	114.246.350	114.246.350	100
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>102.650.000</b>	<b>100.850.000</b>	<b>98,25</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	102.650.000	100.850.000	98,25
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>59.632.560</b>	<b>59.500.000</b>	<b>99,78</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	59.632.560	59.500.000	99,78
	<b>SMAN 5 PARIAMAN</b>				<b>364.800.000</b>	<b>364.507.000</b>	<b>99,92</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>364.800.000</b>	<b>364.507.000</b>	<b>99,92</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>76.725.000</b>	<b>76.725.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	76.725.000	76.725.000	100
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>33.750.000</b>	<b>33.750.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45 stel	45 stel	100	33.750.000	33.750.000	100
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>33.631.800</b>	<b>33.611.800</b>	<b>99,94</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 unit,set,buah, dll	1 unit,set, buah, dll	100	16.481.800	16.481.800	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	17.150.000	17.130.000	99,88
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>77.620.200</b>	<b>77.620.200</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit	100	38.575.200	38.575.200	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	39.045.000	39.045.000	100
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>143.073.000</b>	<b>142.800.000</b>	<b>99,81</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	143.073.000	142.800.000	99,81
	<b>SMAN 6 PARIAMAN</b>				<b>259.200.000</b>	<b>253.998.020</b>	<b>97,99</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>259.200.000</b>	<b>253.998.020</b>	<b>97,99</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>111.325.000</b>	<b>109.867.500</b>	<b>98,69</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 orang	10 orang	100	111.325.000	109.867.500	98,69
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>46.710.780</b>	<b>42.966.500</b>	<b>91,98</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	3.306.500	3.306.500	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 unit,set,buah, dll	5 unit,set, buah, dll	100	28.704.280	24.960.000	86,96
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	14.700.000	14.700.000	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>82.114.820</b>	<b>82.114.820</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	82.114.820	82.114.820	100
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>723.720</b>	<b>723.720</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	723.720	723.720	100
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>18.325.680</b>	<b>18.325.480</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	18.325.680	18.325.480	100
	<b>SMKN 1 PARIAMAN</b>				<b>380.400.000</b>	<b>377.079.800</b>	<b>99,13</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>308.800.000</b>	<b>305.539.800</b>	<b>98,94</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>16.575.000</b>	<b>15.117.500</b>	<b>91,21</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	16.575.000	15.117.500	91,21
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>19.600.000</b>	<b>19.600.000</b>	<b>100</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	19.600.000	19.600.000	100
3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>77.625.000</b>	<b>76.722.300</b>	<b>98,84</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	77.625.000	76.722.300	98,84
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>195.000.000</b>	<b>194.100.000</b>	<b>99,54</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	195.000.000	194.100.000	99,54
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>71.600.000</b>	<b>71.540.000</b>	<b>99,92</b>
1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>				<b>71.600.000</b>	<b>71.540.000</b>	<b>99,92</b>
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 unit	1 unit	100	71.600.000	71.540.000	99,92

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>SMKN 2 PARIAMAN</b>				<b>494.400.000</b>	<b>486.378.600</b>	<b>98,38</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>408.790.400</b>	<b>400.769.000</b>	<b>98,04</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>16.575.000</b>	<b>15.117.500</b>	<b>91,21</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	16.575.000	15.117.500	91,21
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>47.250.000</b>	<b>47.250.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 stel	1 stel	100	47.250.000	47.250.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>103.856.600</b>	<b>97.738.100</b>	<b>94,11</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	64.157.600	58.249.600	90,79
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	20.099.000	20.098.500	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	19.600.000	19.390.000	98,93
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>49.590.400</b>	<b>49.590.400</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	49.590.400	49.590.400	100
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>124.150.000</b>	<b>124.150.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	2.000.000	2.000.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	122.150.000	122.150.000	100
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>67.368.400</b>	<b>66.923.000</b>	<b>99,34</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	19.310.000	19.310.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	48.058.400	47.613.000	99,07
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>85.609.600</b>	<b>85.609.600</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>				<b>85.609.600</b>	<b>85.609.600</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1 unit	1 unit	100	85.609.600	85.609.600	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>SMKN 3 PARIAMAN</b>				<b>1.125.600.000</b>	<b>981.005.128</b>	<b>87,15</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>199.790.800</b>	<b>197.338.128</b>	<b>98,77</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>18.480.000</b>	<b>16.805.000</b>	<b>90,94</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	18.480.000	16.805.000	90,94
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>108.442.000</b>	<b>107.673.128</b>	<b>99,29</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	56.856.000	56.840.000	99,97
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	51.586.000	50.833.128	98,54
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>72.868.800</b>	<b>72.860.000</b>	<b>99,99</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	1.818.800	1.810.000	99,52
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	71.050.000	71.050.000	100
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>925.809.200</b>	<b>783.667.000</b>	<b>84,65</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>				<b>925.809.200</b>	<b>783.667.000</b>	<b>84,65</b>
	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	1 unit	1 unit	100	925.809.200	783.667.000	84,65
	<b>SMKN 4 PARIAMAN</b>				<b>190.800.000</b>	<b>188.773.826</b>	<b>98,94</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>190.800.000</b>	<b>188.773.826</b>	<b>98,94</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>13.815.000</b>	<b>13.815.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	13.815.000	13.815.000	100
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>51.135.000</b>	<b>49.708.826</b>	<b>97,21</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	33.985.000	33.118.826	97,45
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	17.150.000	16.590.000	96,73
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>17.250.000</b>	<b>17.250.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	17.250.000	17.250.000	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>108.600.000</b>	<b>108.000.000</b>	<b>99,45</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	108.600.000	108.000.000	99,45
	<b>SLBN 1 PARIAMAN</b>				<b>78.000.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>100</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>78.000.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>100</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>9.728.300</b>	<b>9.728.300</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	9.728.300	9.728.300	100
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	1 stel	1 stel	100	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100</b>
3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>45.271.700</b>	<b>45.271.700</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Mebel	1 unit	1 unit	100	14.300.000	14.300.000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	100	4.080.700	4.080.700	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit,set,buah, dll	2 unit,set, buah, dll	100	26.891.000	26.891.000	100
4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	8.000.000	8.000.000	100
	<b>SLBN 2 PARIAMAN</b>				<b>32.400.000</b>	<b>32.398.500</b>	<b>100</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>32.400.000</b>	<b>32.398.500</b>	<b>100</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>5.160.000</b>	<b>5.160.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	5.160.000	5.160.000	100
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>10.240.977</b>	<b>10.240.500</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	3.816.477	3.816.000	99,99
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	54.500	54.500	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	6.370.000	6.370.000	100



No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>16.999.023</b>	<b>16.998.000</b>	<b>99,99</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	16.999.023	16.998.000	99,99
	<b>BKK (Bantuan Keuangan Khusus) KAB. PASAMAN</b>				<b>7.755.000.000</b>	<b>6.971.751.852</b>	<b>89,90</b>
	<b>SMAN 1 TIGO NAGARI</b>				<b>500.000.000</b>	<b>475.947.500</b>	<b>95,19</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>500.000.000</b>	<b>475.947.500</b>	<b>95,19</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>151.375.000</b>	<b>149.922.500</b>	<b>99,04</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	151.375.000	149.922.500	99,04
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>46.500.000</b>	<b>46.500.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62 stel	62 stel	100	46.500.000	46.500.000	100
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>67.585.000</b>	<b>58.191.000</b>	<b>86,10</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	22.128.000	17.804.000	80,46
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	107.000	107.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	45.350.000	40.280.000	88,82
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>112.135.000</b>	<b>111.585.000</b>	<b>99,51</b>
	Pengadaan Mebel	12 bulan	12 bulan	100	57.243.000	57.243.000	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	54.892.000	54.342.000	99
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>122.405.000</b>	<b>109.749.000</b>	<b>89,66</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	3.060.000	3.060.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	119.345.000	106.689.000	89,40
	<b>SMAN 1 BONJOL</b>				<b>450.000.000</b>	<b>377.887.393</b>	<b>83,97</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>450.000.000</b>	<b>377.887.393</b>	<b>83,97</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>50.975.000</b>	<b>44.717.500</b>	<b>87,72</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	50.975.000	44.717.500	87,72
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>60.600.000</b>	<b>60.596.343</b>	<b>99,99</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 stel	1 stel	100	60.600.000	60.596.343	99,99
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>144.750.000</b>	<b>121.120.550</b>	<b>83,68</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	119.690.000	103.040.550	86,09
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	25.060.000	18.080.000	72,15
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>183.755.000</b>	<b>141.613.000</b>	<b>77,07</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	183.755.000	141.613.000	77,07
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>9.920.000</b>	<b>9.840.000</b>	<b>99,19</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	9.920.000	9.840.000	99,19
	<b>SMAN 1 LUBUK SIKAPING</b>				<b>1.000.000.000</b>	<b>723.566.400</b>	<b>72,36</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>1.000.000.000</b>	<b>723.566.400</b>	<b>72,36</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>119.880.000</b>	<b>118.205.000</b>	<b>98,60</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	119.880.000	118.205.000	98,60
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 stel	4 stel	100	4.800.000	4.800.000	100
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>116.566.000</b>	<b>99.806.400</b>	<b>85,62</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	13.210.000	12.750.000	96,52
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	29.706.000	22.957.400	77,28
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	73.650.000	64.099.000	87,03

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>17.400.000</b>	<b>17.400.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit	12 unit	100	17.400.000	17.400.000	100
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>560.380.000</b>	<b>353.121.000</b>	<b>63,01</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	bulan	0	300.000	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	14.080.000	13.840.000	98,30
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	546.000.000	339.281.000	62,14
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>180.974.000</b>	<b>130.234.000</b>	<b>71,96</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56 unit	56 unit	100	49.590.000	41.010.000	82,70
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	131.384.000	89.224.000	67,91
	<b>SMAN 2 LUBUK SIKAPING</b>				<b>500.000.000</b>	<b>379.561.500</b>	<b>75,91</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>500.000.000</b>	<b>379.561.500</b>	<b>75,91</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>114.075.000</b>	<b>112.617.500</b>	<b>98,72</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	114.075.000	112.617.500	98,72
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>20.575.000</b>	<b>20.497.500</b>	<b>99,62</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	76 stel	76 stel	100	20.575.000	20.497.500	99,62
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>96.273.180</b>	<b>82.659.750</b>	<b>85,86</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	52.127.430	50.386.000	96,66
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.054 lembar	5.054 lembar	100	1.263.750	1.263.750	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	42.882.000	31.010.000	72,31
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>14.468.140</b>	<b>14.111.750</b>	<b>97,54</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60 unit	60 unit	100	14.468.140	14.111.750	97,54
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>226.620.000</b>	<b>122.465.000</b>	<b>54,04</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	4.080.000	1.734.000	42,50
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	222.540.000	120.731.000	54,25
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>27.988.680</b>	<b>27.210.000</b>	<b>97,22</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	27.988.680	27.210.000	97,22
	<b>SMAN 1 PANTI</b>				<b>450.000.000</b>	<b>402.369.000</b>	<b>89,42</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>450.000.000</b>	<b>402.369.000</b>	<b>89,42</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>204.303.000</b>	<b>200.135.000</b>	<b>97,96</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	204.303.000	200.135.000	97,96
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>32.250.000</b>	<b>32.250.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43 stel	43 stel	100	32.250.000	32.250.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>72.690.000</b>	<b>56.743.000</b>	<b>78,06</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	38.640.000	35.324.000	91,42
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	34.050.000	21.419.000	62,90
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>140.757.000</b>	<b>113.241.000</b>	<b>80,45</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	140.757.000	113.241.000	80,45
	<b>SMAN 1 DUA KOTO</b>				<b>400.000.000</b>	<b>336.174.300</b>	<b>84,04</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>400.000.000</b>	<b>336.174.300</b>	<b>84,04</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>32.825.000</b>	<b>31.367.500</b>	<b>95,56</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	32.825.000	31.367.500	95,56
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>44.250.000</b>	<b>44.250.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59 stel	59 stel	100	44.250.000	44.250.000	100
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>157.680.400</b>	<b>138.108.200</b>	<b>87,59</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	114.187.000	94.992.000	83,19
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	20.293.400	20.046.200	98,78
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	23.200.000	23.070.000	99,44
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>94.665.000</b>	<b>51.869.000</b>	<b>54,79</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	94.665.000	51.869.000	54,79
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>70.579.600</b>	<b>70.579.600</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	70.579.600	70.579.600	100
	<b>SMAN 1 PADANG GELUGUR</b>				<b>500.000.000</b>	<b>496.783.000</b>	<b>99,36</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>500.000.000</b>	<b>496.783.000</b>	<b>99,36</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>249.225.000</b>	<b>247.765.000</b>	<b>99,41</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	249.225.000	247.765.000	99,41
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>66.750.000</b>	<b>66.750.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	89 stel	89 stel	100	66.750.000	66.750.000	100
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>135.774.000</b>	<b>134.124.000</b>	<b>98,78</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	125.214.000	123.564.000	98,68
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	10.560.000	10.560.000	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>48.144.000</b>	<b>48.144.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	48.144.000	48.144.000	100
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>107.000</b>	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315 m	M	0	107.000	-	-
	<b>SMAN 1 RAO</b>				<b>500.000.000</b>	<b>497.295.500</b>	<b>99,46</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>500.000.000</b>	<b>497.295.500</b>	<b>99,46</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>55.825.000</b>	<b>54.368.500</b>	<b>97,39</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	55.825.000	54.368.500	97,39
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75 stel	75 stel	100	39.000.000	39.000.000	100
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>21.915.000</b>	<b>20.668.000</b>	<b>94,31</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	21.915.000	20.668.000	94,31
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>383.260.000</b>	<b>383.259.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	383.260.000	383.259.000	100
	<b>SMAN 1 RAO UTARA</b>				<b>90.000.000</b>	<b>87.956.000</b>	<b>97,73</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>90.000.000</b>	<b>87.956.000</b>	<b>97,73</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>12.870.000</b>	<b>11.830.000</b>	<b>91,92</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	12.870.000	11.830.000	91,92
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>16.826.000</b>	<b>16.486.000</b>	<b>97,98</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	6.900.000	6.800.000	98,55
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	96.000	96.000	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	9.830.000	9.590.000	97,56
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>60.304.000</b>	<b>59.640.000</b>	<b>98,90</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	360.000	360.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	59.944.000	59.280.000	98,89
	<b>SMAN 1 MAPAT TUNGGUL</b>				<b>60.000.000</b>	<b>58.960.000</b>	<b>98,27</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>60.000.000</b>	<b>58.960.000</b>	<b>98,27</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>26.070.000</b>	<b>25.030.000</b>	<b>96,01</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	26.070.000	25.030.000	96,01
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>25.530.000</b>	<b>25.530.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	16.981.000	16.981.000	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	2.309.000	2.309.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100	1.440.000	1.440.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	4.800.000	4.800.000	100
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	8.400.000	8.400.000	100
	<b>SMAN 1 MAPAT TUNGGUL SELATAN</b>				<b>50.000.000</b>	<b>48.960.000</b>	<b>97,92</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>50.000.000</b>	<b>48.960.000</b>	<b>97,92</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>11.070.000</b>	<b>10.030.000</b>	<b>90,61</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	11.070.000	10.030.000	90,61
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>7.694.400</b>	<b>7.694.400</b>	<b>100</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	4.344.400	4.344.400	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	3.350.000	3.350.000	100
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>12.935.600</b>	<b>12.935.600</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Mebel	1 unit	1 unit	100	4.935.600	4.935.600	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	8.000.000	8.000.000	100
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>18.300.000</b>	<b>18.300.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	18.300.000	18.300.000	100
	<b>SMAN 3 SUMATERA BARAT</b>				<b>400.000.000</b>	<b>389.681.195</b>	<b>97,42</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>400.000.000</b>	<b>389.681.195</b>	<b>97,42</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>128.364.021</b>	<b>126.906.521</b>	<b>98,86</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	128.364.021	126.906.521	98,86
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>62.867.361</b>	<b>59.709.006</b>	<b>94,98</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	19.067.361	19.059.006	99,96
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	6.900.000	6.600.000	95,65
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	36.900.000	34.050.000	92,28
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>40.603.000</b>	<b>40.603.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13 unit	13 unit	100	40.603.000	40.603.000	100
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>153.052.000</b>	<b>147.349.050</b>	<b>96,27</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	74.820.000	69.869.050	93,38
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	78.232.000	77.480.000	99,04



No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				15.113.618	15.113.618	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	8.708.018	8.708.018	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	6.405.600	6.405.600	100
	<b>SMKN 1 SIMPANG ALAHAN MATI</b>				145.000.000	139.729.000	96,36
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				145.000.000	139.729.000	96,36
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				32.370.000	31.280.000	96,63
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	32.370.000	31.280.000	96,63
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				80.240.000	78.044.000	97,26
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	58.650.000	56.464.000	96,27
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	21.590.000	21.580.000	99,95
3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				17.165.000	15.180.000	88,44
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	17.165.000	15.180.000	88,44
4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				15.225.000	15.225.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	15.225.000	15.225.000	100
	<b>SMKN 1 BONJOL</b>				450.000.000	371.229.284	82,50
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				450.000.000	371.229.284	82,50
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				50.325.000	48.867.500	97,10
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	50.325.000	48.867.500	97,10
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				57.000.000	56.999.934	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	76 stel	76 stel	100	57.000.000	56.999.934	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>33.359.400</b>	<b>33.169.250</b>	<b>99,43</b>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	22.159.400	22.159.250	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	11.200.000	11.010.000	98,30
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>296.352.000</b>	<b>219.229.000</b>	<b>73,98</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	296.352.000	219.229.000	73,98
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>12.963.600</b>	<b>12.963.600</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	12.963.600	12.963.600	100
	<b>SMKN 1 LUBUK SIKAPING</b>				<b>1.000.000.000</b>	<b>945.910.500</b>	<b>94,59</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>1.000.000.000</b>	<b>945.910.500</b>	<b>94,59</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>149.380.000</b>	<b>147.705.000</b>	<b>98,88</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	149.380.000	147.705.000	98,88
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>283.232.000</b>	<b>241.457.000</b>	<b>85,25</b>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	82.854.000	78.114.000	94,28
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	200.378.000	163.343.000	81,52
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>488.612.000</b>	<b>488.612.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	2.000.000	2.000.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	1.932.000	1.932.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	484.680.000	484.680.000	100
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>78.776.000</b>	<b>68.136.500</b>	<b>86,49</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	78.776.000	68.136.500	86,49
	<b>SMKN 1 DUA KOTO</b>				<b>120.000.000</b>	<b>112.892.000</b>	<b>94,08</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>120.000.000</b>	<b>112.892.000</b>	<b>94,08</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>44.020.000</b>	<b>43.435.000</b>	<b>98,67</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	44.020.000	43.435.000	98,67
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>34.200.000</b>	<b>34.200.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8 stel	8 stel	100	34.200.000	34.200.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>30.755.000</b>	<b>27.795.000</b>	<b>90,38</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	7.440.000	7.440.000	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	3.695.000	3.695.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	19.620.000	16.660.000	84,91
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>11.025.000</b>	<b>7.462.000</b>	<b>67,68</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	11.025.000	7.462.000	67,68
	<b>SMKN 1 RAO SELATAN</b>				<b>700.000.000</b>	<b>691.326.780</b>	<b>98,76</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>700.000.000</b>	<b>691.326.780</b>	<b>98,76</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>157.230.000</b>	<b>154.255.000</b>	<b>98,11</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	157.230.000	154.255.000	98,11
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>49.500.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10 stel	10 stel	100	49.500.000	49.500.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>84.483.500</b>	<b>83.903.500</b>	<b>99,31</b>
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	59.383.500	59.383.500	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	25.100.000	24.520.000	97,69
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>336.840.000</b>	<b>331.722.000</b>	<b>98,48</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	336.840.000	331.722.000	98,48
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>71.946.500</b>	<b>71.946.280</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit	100	22.000.000	22.000.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	49.946.500	49.946.280	100
	<b>SMKN 1 PADANG GELUGUR</b>				<b>350.000.000</b>	<b>347.602.500</b>	<b>99,32</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>350.000.000</b>	<b>347.602.500</b>	<b>99,32</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>153.875.000</b>	<b>152.417.500</b>	<b>99,05</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	153.875.000	152.417.500	99,05
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>48.450.000</b>	<b>48.450.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	63 stel	63 stel	100	48.450.000	48.450.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>30.769.000</b>	<b>29.849.000</b>	<b>97,01</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	439.000	439.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	30.330.000	29.410.000	96,97
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>116.906.000</b>	<b>116.886.000</b>	<b>99,98</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	116.906.000	116.886.000	99,98
	<b>SLBN 1 LUBUK SIKAPING</b>				<b>45.000.000</b>	<b>43.960.000</b>	<b>97,69</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>45.000.000</b>	<b>43.960.000</b>	<b>97,69</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>28.770.000</b>	<b>27.730.000</b>	<b>96,39</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	28.770.000	27.730.000	96,39
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10 stel	10 stel	100	12.000.000	12.000.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>4.060.000</b>	<b>4.060.000</b>	<b>100</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	4.060.000	4.060.000	100
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	170.000	170.000	100
	<b>SLBN 1 PANTI</b>				<b>45.000.000</b>	<b>43.960.000</b>	<b>97,69</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>45.000.000</b>	<b>43.960.000</b>	<b>97,69</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>28.770.000</b>	<b>27.730.000</b>	<b>96,39</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	28.770.000	27.730.000	96,39
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10 stel	10 stel	100	12.000.000	12.000.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>4.060.000</b>	<b>4.060.000</b>	<b>100</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	4.060.000	4.060.000	100
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	170.000	170.000	100
	<b>BKK (Bantuan Keuangan Khusus) KAB. SIJUNJUNG</b>				<b>5.440.800.000</b>	<b>5.027.397.862</b>	<b>92,40</b>
	<b>SMAN 1 SIJUNJUNG</b>				<b>431.400.000</b>	<b>332.118.650</b>	<b>76,99</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>431.400.000</b>	<b>332.118.650</b>	<b>76,99</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>113.475.000</b>	<b>104.867.500</b>	<b>92,41</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	113.475.000	104.867.500	92,41
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>36.750.000</b>	<b>36.750.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37 stel	37 stel	100	36.750.000	36.750.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>78.207.350</b>	<b>24.580.000</b>	<b>31,43</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	61.257.350	9.000.000	14,69
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	16.950.000	15.580.000	91,92
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>165.542.150</b>	<b>165.381.150</b>	<b>99,90</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 unit	11 unit	100	155.892.950	155.731.950	99,90
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 unit	7 unit	100	9.649.200	9.649.200	100
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>690.000</b>	<b>540.000</b>	<b>78,26</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	690.000	540.000	78,26
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>36.735.500</b>	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	0	36.735.500	-	-
	<b>SMAN 2 SIJUNJUNG</b>				<b>435.000.000</b>	<b>424.032.260</b>	<b>97,48</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>435.000.000</b>	<b>424.032.260</b>	<b>97,48</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>156.375.000</b>	<b>154.917.500</b>	<b>99,07</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	156.375.000	154.917.500	99,07
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>41.250.000</b>	<b>41.250.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56 stel	56 stel	100	41.250.000	41.250.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>75.773.900</b>	<b>69.023.750</b>	<b>91,09</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	49.500.000	46.405.000	93,75

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	2.873.900	2.873.750	99,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	23.400.000	19.745.000	84,38
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>108.087.000</b>	<b>105.327.000</b>	<b>97,45</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 unit	14 unit	100	52.500.000	49.740.000	94,74
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39 unit	39 unit	100	55.587.000	55.587.000	100
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>5.283.500</b>	<b>5.283.500</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	5.283.500	5.283.500	100
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>48.230.600</b>	<b>48.230.510</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	10.060.000	10.060.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	38.170.600	38.170.510	100
	<b>SMAN 3 SIJUNJUNG</b>				<b>175.200.000</b>	<b>167.515.620</b>	<b>95,61</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>175.200.000</b>	<b>167.515.620</b>	<b>95,61</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>54.270.000</b>	<b>53.180.000</b>	<b>97,99</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	54.270.000	53.180.000	97,99
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 stel	30 stel	100	22.500.000	22.500.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>50.894.880</b>	<b>44.300.500</b>	<b>87,04</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	546.000	546.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	21.244.500	20.270.250	95,41
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	4.354.380	4.354.250	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	24.750.000	19.130.000	77,29
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>40.470.120</b>	<b>40.470.120</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Mebel	9 unit	9 unit	100	16.241.500	16.241.500	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit	100	24.228.620	24.228.620	100
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>7.065.000</b>	<b>7.065.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	7.065.000	7.065.000	100
	<b>SMAN 4 SIJUNJUNG</b>				<b>139.200.000</b>	<b>137.810.000</b>	<b>99,00</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>139.200.000</b>	<b>137.810.000</b>	<b>99,00</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>77.270.000</b>	<b>76.180.000</b>	<b>98,59</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	77.270.000	76.180.000	98,59
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>61.930.000</b>	<b>61.630.000</b>	<b>99,52</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	44.130.000	44.130.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	17.800.000	17.500.000	98,31
	<b>SMAN 5 SIJUNJUNG</b>				<b>259.200.000</b>	<b>215.078.500</b>	<b>82,98</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>259.200.000</b>	<b>215.078.500</b>	<b>82,98</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>79.575.000</b>	<b>59.217.500</b>	<b>74,42</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	79.575.000	59.217.500	74,42
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>92.398.300</b>	<b>90.984.300</b>	<b>98,47</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	59.694.300	58.980.300	98,80
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	6.504.000	6.504.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	26.200.000	25.500.000	97,33
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>26.070.700</b>	<b>26.070.700</b>	<b>100</b>



No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Mebel	24 unit	24 unit	100	7.724.100	7.724.100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	12 unit	100	18.346.600	18.346.600	100
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>41.556.000</b>	<b>19.206.000</b>	<b>46,22</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	22.600.000	3.500.000	15,49
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	18.956.000	15.706.000	82,86
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>19.600.000</b>	<b>19.600.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	1.000.000	1.000.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	18.600.000	18.600.000	100
	<b>SMAN 6 SIJUNJUNG</b>				<b>184.800.000</b>	<b>163.795.890</b>	<b>88,63</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>184.800.000</b>	<b>163.795.890</b>	<b>88,63</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>93.570.000</b>	<b>79.580.000</b>	<b>85,05</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	93.570.000	79.580.000	85,05
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>14.664.440</b>	<b>12.714.250</b>	<b>86,70</b>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	354.440	354.250	99,95
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	14.310.000	12.360.000	86,37
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>42.140.000</b>	<b>42.140.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Mebel	1 unit	1 unit	100	4.050.000	4.050.000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16 unit	16 unit	100	38.090.000	38.090.000	100
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>34.425.560</b>	<b>29.361.640</b>	<b>85,29</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	34.425.560	29.361.640	85,29

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>SMAN 7 SIJUNJUNG</b>				<b>314.400.000</b>	<b>299.441.500</b>	<b>95,24</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>314.400.000</b>	<b>299.441.500</b>	<b>95,24</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>135.875.000</b>	<b>134.017.500</b>	<b>98,63</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	135.875.000	134.017.500	98,63
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>77.722.250</b>	<b>72.729.050</b>	<b>93,58</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	7.376.000	6.962.800	94,40
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	41.383.000	37.143.000	89,75
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	5.523.250	5.523.250	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	23.440.000	23.100.000	98,55
3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>53.506.180</b>	<b>53.419.150</b>	<b>99,84</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	10 unit	100	53.506.180	53.419.150	99,84
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>17.336.250</b>	<b>9.335.000</b>	<b>53,85</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	500.000	500.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	16.836.250	8.835.000	52,48
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>29.960.320</b>	<b>29.940.800</b>	<b>99,93</b>
	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	29.960.320	29.940.800	99,93
	<b>SMAN 8 SIJUNJUNG</b>				<b>72.000.000</b>	<b>70.657.000</b>	<b>98,13</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>72.000.000</b>	<b>70.657.000</b>	<b>98,13</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>27.552.000</b>	<b>26.212.000</b>	<b>95,14</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	27.552.000	26.212.000	95,14
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>11.375.780</b>	<b>11.375.750</b>	<b>100</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	5.146.030	5.146.000	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	939.750	939.750	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	5.290.000	5.290.000	100
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>19.895.250</b>	<b>19.895.250</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	100	19.895.250	19.895.250	100
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>3.008.970</b>	<b>3.006.000</b>	<b>99,90</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	3.008.970	3.006.000	99,90
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>10.168.000</b>	<b>10.168.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	10.168.000	10.168.000	100
	<b>SMAN 9 SIJUNJUNG</b>				<b>326.400.000</b>	<b>316.293.260</b>	<b>96,90</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>326.400.000</b>	<b>316.293.260</b>	<b>96,90</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>38.775.000</b>	<b>37.317.500</b>	<b>96,24</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	38.775.000	37.317.500	96,24
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>32.250.000</b>	<b>32.250.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43 stel	43 stel	100	32.250.000	32.250.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>40.930.240</b>	<b>34.281.000</b>	<b>83,75</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	936.000	936.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	18.620.000	17.461.000	93,78
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	2.124.240	2.124.000	99,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	19.250.000	13.760.000	71,48

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>198.424.760</b>	<b>198.424.760</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Mebel	3 unit	3 unit	100	11.858.800	11.858.800	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 unit	13 unit	100	186.565.960	186.565.960	100
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>8.330.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>75,99</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	2.130.000	2.130.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	6.200.000	4.200.000	67,74
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>7.690.000</b>	<b>7.690.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	690.000	690.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	7.000.000	7.000.000	100
	<b>SMAN 10 SIJUNJUNG</b>				<b>317.400.000</b>	<b>305.729.000</b>	<b>96,32</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>317.400.000</b>	<b>305.729.000</b>	<b>96,32</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>12.975.000</b>	<b>11.517.500</b>	<b>88,77</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 bulan	13 bulan	100	12.975.000	11.517.500	88,77
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 stel	30 stel	100	22.500.000	22.500.000	100
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>127.064.750</b>	<b>118.751.250</b>	<b>93,46</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	11.271.800	10.984.300	97,45
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	75.553.500	69.187.500	91,57
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	24.339.450	24.339.450	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	15.900.000	14.240.000	89,56
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>62.146.720</b>	<b>62.146.720</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Mebel	12 unit	12 unit	100	15.938.000	15.938.000	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit	100	46.208.720	46.208.720	100
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>86.993.530</b>	<b>85.093.530</b>	<b>97,82</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	500.000	500.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	86.493.530	84.593.530	97,80
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>5.720.000</b>	<b>5.720.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	5.720.000	5.720.000	100
	<b>SMAN 11 SIJUNJUNG</b>				<b>93.000.000</b>	<b>91.127.000</b>	<b>97,99</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>93.000.000</b>	<b>91.127.000</b>	<b>97,99</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>73.668.000</b>	<b>71.795.000</b>	<b>97,46</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	73.668.000	71.795.000	97,46
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>7.832.000</b>	<b>7.832.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	632.000	632.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	7.200.000	7.200.000	100
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	100	11.500.000	11.500.000	100
	<b>SMAN 12 SIJUNJUNG</b>				<b>244.200.000</b>	<b>237.404.500</b>	<b>97,22</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>244.200.000</b>	<b>237.404.500</b>	<b>97,22</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>139.815.000</b>	<b>134.117.500</b>	<b>95,92</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	139.815.000	134.117.500	95,92
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36 stel	36 stel	100	27.000.000	27.000.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>27.278.000</b>	<b>26.180.000</b>	<b>95,97</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	3.705.000	3.705.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	11.143.000	10.495.000	94,18
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	1.830.000	1.830.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	10.600.000	10.150.000	95,75
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>46.867.000</b>	<b>46.867.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit	100	46.867.000	46.867.000	100
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>3.240.000</b>	<b>3.240.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	3.240.000	3.240.000	100
	<b>SMAN 13 SIJUNJUNG</b>				<b>80.400.000</b>	<b>79.360.000</b>	<b>98,71</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>80.400.000</b>	<b>79.360.000</b>	<b>98,71</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>39.920.000</b>	<b>38.880.000</b>	<b>97,39</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	39.920.000	38.880.000	97,39
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8 stel	8 stel	100	6.750.000	6.750.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>19.565.000</b>	<b>19.565.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 lembar	12 lembar	100	6.395.000	6.395.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	13.170.000	13.170.000	100
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>13.695.000</b>	<b>13.695.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58 unit	58 unit	100	13.695.000	13.695.000	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	470.000	470.000	100
	<b>SMKN 1 SIJUNJUNG</b>				<b>673.800.000</b>	<b>595.406.000</b>	<b>88,37</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>673.800.000</b>	<b>595.406.000</b>	<b>88,37</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>277.894.000</b>	<b>247.905.000</b>	<b>89,21</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	277.894.000	247.905.000	89,21
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>38.250.000</b>	<b>38.250.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49 stel	49 stel	100	38.250.000	38.250.000	100
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>126.118.000</b>	<b>78.143.000</b>	<b>61,96</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	47.659.000	19.524.000	40,97
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	10.320.000	10.320.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100	21.939.000	21.939.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	46.200.000	26.360.000	57,06
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>211.538.000</b>	<b>211.108.000</b>	<b>99,80</b>
	Pengadaan Mebel	64 unit	64 unit	100	98.820.000	98.700.000	99,88
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 unit	9 unit	100	112.718.000	112.408.000	99,72
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	20.000.000	20.000.000	100
	<b>SMKN 2 SIJUNJUNG</b>				<b>456.000.000</b>	<b>415.028.868</b>	<b>91,02</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>456.000.000</b>	<b>415.028.868</b>	<b>91,02</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>33.555.000</b>	<b>31.367.500</b>	<b>93,48</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	33.555.000	31.367.500	93,48
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>140.607.328</b>	<b>139.576.100</b>	<b>99,27</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	119.589.828	118.598.600	99,17
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	12.007.500	12.007.500	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	9.010.000	8.970.000	99,56
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>113.817.672</b>	<b>112.338.840</b>	<b>98,70</b>
	Pengadaan Mebel	15 unit	15 unit	100	24.600.600	24.600.600	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	7 unit	100	89.217.072	87.738.240	98,34
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>109.420.000</b>	<b>73.146.428</b>	<b>66,85</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	46.467.000	36.032.428	77,54
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	62.953.000	37.114.000	58,96
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>58.600.000</b>	<b>58.600.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	58.600.000	58.600.000	100
	<b>SMKN 3 SIJUNJUNG</b>				<b>313.800.000</b>	<b>284.879.342</b>	<b>90,78</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>313.800.000</b>	<b>284.879.342</b>	<b>90,78</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>171.675.000</b>	<b>151.917.500</b>	<b>88,49</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	171.675.000	151.917.500	88,49
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>60.166.240</b>	<b>52.073.450</b>	<b>86,55</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	44.309.490	37.270.400	84,11
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	6.316.750	6.213.050	98,36
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	9.540.000	8.590.000	90,04



No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>81.958.760</b>	<b>80.888.392</b>	<b>98,69</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	81.958.760	80.888.392	98,69
	<b>SMKN 4 SIJUNJUNG</b>				<b>268.800.000</b>	<b>265.881.000</b>	<b>98,91</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>268.800.000</b>	<b>265.881.000</b>	<b>98,91</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>70.875.000</b>	<b>69.417.500</b>	<b>97,94</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	70.875.000	69.417.500	97,94
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>103.208.700</b>	<b>103.208.700</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	62.291.700	62.291.700	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	10.967.000	10.967.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	29.950.000	29.950.000	100
3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>61.196.300</b>	<b>59.734.800</b>	<b>97,61</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit	100	61.196.300	59.734.800	97,61
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	6.900.000	6.900.000	100
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>26.620.000</b>	<b>26.620.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	26.620.000	26.620.000	100
	<b>SMKN 5 SIJUNJUNG</b>				<b>254.400.000</b>	<b>248.408.500</b>	<b>97,64</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>254.400.000</b>	<b>248.408.500</b>	<b>97,64</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>236.175.000</b>	<b>234.717.500</b>	<b>99,38</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	236.175.000	234.717.500	99,38
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>8.595.000</b>	<b>4.061.000</b>	<b>47,25</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	5.978.000	1.444.000	24,16
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	817.000	817.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	1.800.000	1.800.000	100
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100	2.800.000	2.800.000	100
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>6.830.000</b>	<b>6.830.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	6.830.000	6.830.000	100
	<b>SMKN 6 SIJUNJUNG</b>				<b>52.200.000</b>	<b>52.078.272</b>	<b>99,77</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>52.200.000</b>	<b>52.078.272</b>	<b>99,77</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>14.952.000</b>	<b>14.952.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	14.952.000	14.952.000	100
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>31.198.000</b>	<b>31.076.272</b>	<b>99,61</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	7.108.728	7.107.000	99,98
	Penyediaan Bahan/Material	400 btg,kg,L,eko r	400 btg,kg,L, Ekor	100	3.879.272	3.879.272	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	20.210.000	20.090.000	99,41
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	360.000	360.000	100
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>5.690.000</b>	<b>5.690.000</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	730.000	730.000	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	4.960.000	4.960.000	100
	<b>SMKN 7 SIJUNJUNG</b>				<b>164.400.000</b>	<b>162.210.000</b>	<b>98,67</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>164.400.000</b>	<b>162.210.000</b>	<b>98,67</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>137.570.000</b>	<b>135.380.000</b>	<b>98,41</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	137.570.000	135.380.000	98,41
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 stel	1 stel	100	1.200.000	1.200.000	100
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>18.311.800</b>	<b>18.311.800</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	1.891.800	1.891.800	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	100	16.420.000	16.420.000	100
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>7.318.200</b>	<b>7.318.200</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Mebel	3 unit	3 unit	100	7.318.200	7.318.200	100
	<b>SMKN 8 SIJUNJUNG</b>				<b>96.600.000</b>	<b>95.480.000</b>	<b>98,84</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>96.600.000</b>	<b>95.480.000</b>	<b>98,84</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>95.550.000</b>	<b>94.430.000</b>	<b>98,83</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	95.550.000	94.430.000	98,83
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	300.000	300.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	750.000	750.000	100
	<b>SLBN 1 MUARO SIJUNJUNG</b>				<b>58.200.000</b>	<b>37.662.700</b>	<b>64,71</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>58.200.000</b>	<b>37.662.700</b>	<b>64,71</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>9.270.000</b>	<b>8.230.000</b>	<b>88,78</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 bulan	12 bulan	100	9.270.000	8.230.000	88,78
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>14.250.000</b>	<b>14.250.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 stel	12 stel	100	14.250.000	14.250.000	100
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>18.180.000</b>	<b>13.932.700</b>	<b>76,64</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	18.162.400	13.915.200	76,62
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	17.600	17.500	99,43
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>15.250.000</b>	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	0	15.250.000	-	-
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100	1.250.000	1.250.000	100
	<b>SLBN 1 KAMANG BARU</b>				<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>21.600.000</b>	<b>21.600.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	21.600.000	21.600.000	100
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300 lembar	300 lembar	100	75.000	75.000	100
3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>8.325.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit	100	8.325.000	8.325.000	100

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing

## Program/Kegiatan

No	Program	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tidak ada permasalahan	-
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tidak ada permasalahan	-
III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tidak ada permasalahan	-
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Tidak ada permasalahan	-
V	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASRA	Tidak ada permasalahan	-

### 3.1.1.2. Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi, RS. Jiwa PROF.HB. Saanin, RSUD Pariaman, RSUD Mohammad Natsir, dengan anggaran Rp.842.199.562.104,00 realisasi Rp.758.950.615.590,46,00 atau 90,11% rincian sebagai berikut :

#### 3.1.1.2.1. Dinas Kesehatan

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.249.206.363.429,00,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.226.502.540.270,46,00 atau 90,89%, dengan uraian sebagai berikut :

### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan kesehatan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	100	100	100
			Persentase Puskesmas yang terakreditasi	97,8	97,8	100
			Rasio Daya Tampung RS Rujukan (standar 1: 1000)	1:875	1:727	120
		2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ berpotensi bencana	100	100	100
		3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman				
2	Meningkatnya Kesehatan ibu, anak dan kesehatan masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Persentase persalinan sesuai standar di fasyankes	78,5	75,33	95,96
			Persentase Ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	13	9,02	131

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Upaya Kesehatan masyarakat</p> <p>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</p> <p>4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p>	Akses keluarga dengan sanitasi dasar (Jamban sehat)	86	85,19	99,06
3	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	<p>1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat</p> <p>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</p> <p>4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p>	<p>Persentase Imunisasi dasar lengkap pada usia 12 - 23 bulan</p> <p>Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi</p>	75	87,71	116,3
4	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	86,1	86,18	100

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi (Target Kinerja 100 dengan realisasi 100) dengan capaian kinerja 100%.
- 2) Persentase Puskesmas yang terakreditasi (Target Kinerja 97,8 dengan realisasi 97,8) dengan capaian kinerja 100%.
- 3) Rasio Daya Tampung RS Rujukan (standar 1: 1000). (Target Kinerja 1:875 dengan realisasi 1: 727) dengan capaian kinerja 120%.

- 4) Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ berpotensi bencana. (Target Kinerja 100 dengan realisasi 100) dengan capaian kinerja 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

- a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

- Pembinaan Pelayanan Upaya Kesehatan dengan output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan evaluasi serta FGD dalam rangka meningkatnya pelayanan Mutu Rumah Sakit di Rumah Sakit kab/kota.
- Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan output dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya Pertemuan BLUD puskesmas dan Rumah Sakit, Monitoring dan evaluasi pendampingan fasilitas kesehatan di puskesmas. Sub kegiatan ini dilaksanakan pembinaan pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan baik dari segi sarana, prasarana, alat dan SDM di Puskesmas serta berjalannya sistem di puskesmas serta adanya peningkatan capaian cakupan program, penanggulangan/ pemecahan masalah program yang tidak tercapai dan puskesmas berkomitmen untuk menyiapkan segala sesuatunya menyangkut regulasi, dokumen, observasi, wawancara penilaian yang akan dilakukan oleh Tim Penilai di 19 Kab/Kota.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ Berpotensi Bencana pada tahap pra bencana dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Kab.Kota, terlaksananya monitoring dan evaluasi di Kab/Kota, Rumah Sakit Kab/Kota serta terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana akibat terdampak bencana dan krisis kesehatan di lokasi bencana.

- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kesehatan, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 2 tahap dengan jumlah peserta 232 orang, Pelatihan Tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang diikuti 30 orang, Orientasi Manajemen Puskesmas yang diikuti oleh 279 orang, Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan, Pertemuan Evaluasi Program Internship dokter Indonesia (PIDI yang diikuti 45 orang, Bimtek Validasi Data SDM yang diikuti 65 orang dan Pertemuan Evaluasi Program SDM yang diikuti oleh 45 orang serta Monitoring dan Evaluasi ke 19 Kab/kota Dengan dilaksanakannya kegiatan Uji kompetensi dan Pelatihan Tim Pelatihan Tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan serta Orientasi Manajemen Puskesmas merupakan upaya untuk meningkatkan Kompetensi dan kualifikasi SDM.

c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dengan sub kegiatan :

- Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK output Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Inspeksi dan pengawasan PBF Cabang dan Cabang PAK. Dalam pelaksanaan kegiatan dihasilkan rekomendasi izin untuk PBF Cabang dan Cabang PAK yang mengurus izin dan dilakukan juga monitoring bahwa PBF Cabang dan Cabang PAK sudah melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja yaitu :

1) Persentase persalinan sesuai standar di fasyankes (Target Kinerja 78,5 dengan realisasi 75,33) dengan capaian kinerja 95,96%.



- 2) Persentase Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) (Target Kinerja 13 dengan realisasi 9,02) dengan capaian kinerja 131%.
- 3) Akses keluarga dengan sanitasi dasar (Jamban sehat) (Target Kinerja 86 dengan realisasi 85,19) dengan capaian kinerja 99,06%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program :

- a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi :

- Pengelolaan kesehatan Ibu dan anak dengan output dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pertemuan dalam rangka pemantuan pelaksanaan AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans respon), MPDN, dan E-Kohort untuk 6 Kab/Kota, terlaksananya pertemuan koordinasi dalam penguatan implementai pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja disatukan pendidikan penguatan UKS/M, dan terlaksananya FGD percepatan penurunan AKI/AKB serta terlaksananya kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi pencatatan/pelaporan di Kab/Kota di Sumatera Barat.
- Pengelolaaan kesehatan usia produktif output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pertemuan program Kesehatan Keluarga pada Masa Pandemi Covid 19 dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor yang terkait pada OPD dan Kab Kota serta terlaksananya Monitoring Evaluasi Program Kesga ke 19 Kab/Kota untuk melihat pencapaian dan pelaksanaan indikator program di 19 kab/kota.
- Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dengan output Sub kegiatan ini Terlaksananya Pertemuan Edukasi dan Pemberian Makanan Tambahan berbasis Pangan Lokal, terlaksananya pertemuan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Terlaksananya Pertemuan Focus Group (FGD) Penurunan Stunting, Terlaksananya Pertemuan Surveilans Gizi dan KIA, Terlaksananya Pertemuan Raapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Sinkronisasi Data Stunting dan terlaksananya Pengadaan PMT Balita Kurus dan Pengadaan PMT Bumil KEK. Sub kegiatan

ini untuk dapat menurunkan kasus Balita Gizi kurang, menurunnya kasus balita gizi buruk dan menurunnya kasus balita stunting di Kabupaten/Kota.

- Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dengan output sub kegiatan ini Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat; Pertemuan Tim Pembina KKS Provinsi, Tim Pembina KKS Kab/Kota dan Forum KKS untuk melakukan evaluasi dan persiapan penilaian KKS tahun 2023, terutama evaluasi terhadap capaian akses sanitasi (jamban sehat) menuju ODF kab/kota yang menjadi prasyarat penilaian KKS tahun 2023, Workshop Sanitasi Layak bagi Tokoh Masyarakat; Sebagai bentuk kegiatan dalam rangka sosialisasi sanitasi yang layak bagi tokoh masyarakat terutama terhadap kondisi sanitasi tempat ibadah (masjid dan mushala) dalam rangka peningkatan kualitas sarana sanitasi ibadah yang menjadi akses bagi masyarakat yang berada di sekitar tempat ibadah, Orientasi Da'i Sanitasi; Pertemuan orientasi ini bagi para da'i atau penceramah dalam rangka menjadikan seorang da'i atau penceramah sebagai penyambung informasi Kesehatan kepada masyarakat yang membantu atau mendukung Dinas Kesehatan untuk penyebaran informasi bidang kesehatan seperti; sanitasi, stunting, penyakit berbasis lingkungan dll melalui wadah – wadah pengajian dan wirid di masyarakat.

Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat ke Kab/Kota dengan melakukan advokasi Kepala Daerah, koordinasi LP/LS dan pelaksanaan Verifikasi ODF kab/kota oleh Tim Verifikasi Provinsi dalam rangka percepatan capaian ODF yang merupakan bentuk komitmen Kepala Daerah dalam peningkatan akses sanitasi menuju sanitasi aman dan layak. ODF merupakan prasyarat yang harus di penuhi oleh Kab/Kota untuk mengikuti penilaian KKS tahun 2023, dengan berbagai upaya yang dilakukan sehingga tahun 2022 ini terjadi peningkatan kab/kota dengan capaian ODF yaitu Kota Padang, Kab. Darmasraya, Kab. Pesisir Selatan dan Kota Pariaman yang memberi peluang untuk provinsi Sumatera Barat yang akan mengikuti penilaian KKS pada tahun 2023 menjadi 9 (sembilan) kab/kota yang telah memenuhi prasyarat ODF.

Orientasi Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT); Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas puskesmas di beberapa kab/kota dalam rangka pelaksanaan surveilans kualitas air minum dengan memberikan materi dan praktek penggunaan sanitarian kit yang digunakan dalam pengambilan sampel air minum. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab Dinas Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum masyarakat dalam rangka upaya penurunan stunting di Provinsi Sumatera Barat dengan menjamin kualitas air minum yang di konsumsi oleh masyarakat memenuhi syarat Kesehatan.

b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya.

➤ Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 2 tahap dengan jumlah peserta 232 orang, Pelatihan Tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang diikuti 30 orang, Orientasi Manajemen Puskesmas yang diikuti oleh 279 orang, Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan, PertemuanEvaluasi Program Internship dokter Indonesia (PIDI yang diikuti 45 orang, Bimtek Validasi Data SDMK yang diikuti 65 orang dan Pertemuan Evaluasi Program SDMK yang diikuti oleh 45 orang serta Monitoring dan Evaluasi ke 19 Kab/kota Dengan dilaksanakannya kegiatan Uji kompetensi dan Pelatihan Tim Pelatihan Tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan serta Orientasi Manajemen Puskesmas merupakan upaya untuk meningkatkan Kompetensi dan kualifikasi SDMK.

c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).

➤ Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK dengan output Sub Kegiatan ini adalah

Terlaksananya Inspeksi dan pengawasan PBF Cabang dan Cabang PAK. Dalam pelaksanaan kegiatan dihasilkan rekomendasi izin untuk PBF Cabang dan Cabang PAK yang mengurus izin dan dilakukan juga monitoring bahwa PBF Cabang dan Cabang PAK sudah melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

- Sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi  
Out Put Sub kegiatan ini adalah Terlaksananya advokasi (rapat-rapat koordinasi, edukasi, sosialisasi) dan penggerakan masyarakat (kampanye program prioritas kesehatan) yang menerapkan kebijakan Germas hidup sehat melalui kebijakan germas dan kebijakan yang berwawasan kesehatan di berbagai tatanan (Tatanan tempat kerja, tatanan sekolah, tatanan pelayanan kesehatan, tempat umum, Rumah tangga dan lain-lain) di seluruh Kab kota.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

c. Sasaran III : Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase Imunisasi dasar lengkap pada usia 12 - 23 bulan (Target Kinerja 75 dengan realisasi 87,71) dengan capaian kinerja 116,3%.
- 2) Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi (Target Kinerja 100 dengan realisasi 100) dengan capaian kinerja 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program :

a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi :

- Sub Kegiatan Investigasi lanjutan ikutan pasca imunisasi dan

- pemberian obat massal oleh kab/kota dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor dan pembinaan pelaksanaan Imunisasi rutin di Kabuapaten/Kota.
- Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB) dengan output sub kegiatan ini adalah tertanggulangnya Kejadian Luar Biala (KLB) penyakit pada lokai KLB di Provinsi Sumatera Barat.
- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya.
    - Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 2 tahap dengan jumlah peserta 232 orang, Pelatihan Tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang diikuti 30 orang, Orientasi Manajemen Puskesmas yang diikuti oleh 279 orang, Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan, PertemuanEvaluasi Program Internship dokter Indonesia (PIDI yang diikuti 45 orang, Bimtek Validasi Data SDM yang diikuti 65 orang dan Pertemuan Evaluasi Program SDM yang diikuti oleh 45 orang serta Monitoring dan Evaluasi ke 19 Kab/kota Dengan dilaksanakannya kegiatan Uji kompetensi dan Pelatihan Tim Pelatihan Tim penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan serta Orientasi Manajemen Puskesmas merupakan upaya untuk meningkatkan Kompetensi dan kualifikasi SDM.
- c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
    - Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Output Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Inspeksi dan pengawasan PBF Cabang dan Cabang PAK. Dalam pelaksanaan kegiatan dihasilkan rekomendasi izin untuk PBF Cabang dan Cabang PAK yang mengurus izin dan dilakukan juga

monitoring bahwa PBF Cabang dan Cabang PAK sudah melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

- Sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi. Out Put Sub kegiatan ini adalah Terlaksananya advokasi (rapat-rapat koordinasi, edukasi, sosialisasi) dan penggerakan masyarakat (kampanye program prioritas kesehatan) yang menerapkan kebijakan Germas hidup sehat melalui kebijakan germas dan kebijakan yang berwawasan kesehatan di berbagai tatanan (Tatanan tempat kerja, tatanan sekolah, tatanan pelayanan kesehatan, tempat umum, Rumah tangga dan lain-lain) di seluruh Kab kota.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d. Sasaran IV : Meningkatkan Kepesertaan Jaminan Kesehatan dengan indikator kinerja yaitu :

1) Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan. (Target Kinerja 86,1 dengan realisasi 86,18) dengan capaian kinerja 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program :

a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

- Sub Kegiatan Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dengan output dari Sub Kegiatan ini adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang di daftarkankan oleh Pemda melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Jumlah kepesertaan PBI-JK adalah 1.906.750 peserta, jumlah kepesertaan JKSS 581.391 peserta dengan rincian BBL Pemda 20% (3.283 peserta), BBL Pemda 30% (151 peserta), Induk Pemda 20% (567.257

peserta), Induk Pemda 30% (10.249), Panti Sosial (451 peserta) dan jumlah kepesertaan Bantuan luran Panti sebesar 451 peserta.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>63.533.097.888</b>	<b>59.885.670.839</b>	<b>94,26</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				845.231.089	717.965.040	84,94
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen, 19 kab kota	1 Dokumen, 19 kab kota	100	743.462.089	639.759.840	86,05
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	64.750.000	61.523.300	95,02
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100	37.019.000	16.681.900	45,06
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				41.546.396.501	39.993.976.847	96,26
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	403 Orang	396 orang	100	40.793.278.601	39.270.267.497	96,27
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31 Orang	33 orang	100	753.117.900	723.709.350	96,1
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				397.763.826	364.182.660	91,56
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Unit	14 Unit	100	196.500.000	186.657.000	94,99
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	201.263.826	177.525.660	88,21
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				480.047.000	406.758.448	84,73

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	434 Stel (dinkes), 62 Stel (Labkes), 45 stel (BKOM) 118 Stel (RS Paru)	409 Stel (dinkes), 62 Stel (Labkes), 46 stel (BKOM) 118 Stel (RS Paru)	100 (dinkes, Bkom). 74,19 (labkes)	459.450.000	397.481.748	86,51
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 kali	1 kali	50	20.597.000	9.276.700	45,04
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				3.096.228.354	2.539.348.149	82,01
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 set, 100 rol box, 152 lusin, 1352 buah (dinkes), 10 Roll, 1174 buah (BKOM) 3 Unit 124 buah 20 set (RS Paru)	50 set, 100 rol box, 152 lusin, 1352 buah (dinkes), 10 Roll, 1174 buah (BKOM) 3 Unit 124 buah 20 set (RS Paru)	100	133.777.000	129.649.064	96,91
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Unit, 5 pkt buah btl bks psg pak (Dinkes), 40 Tabung (BKOM), 5 unit (BKIM) 1 lmbar, 20 buah 24 meter 8 set 16 unit (RS Paru)	13 Unit, 5 pkt buah btl bks psg pak (Dinkes), 47 Tabung (BKOM), 5 unit (BKIM) 1 lmbar, 20 buah 24 meter 8 set 16 unit (RS Paru)	95	1.231.444.054	1.081.361.950	87,81
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 titik set lengkap (Dinkes) 12 bulan (RS Paru)	10 titik set lengkap (Dinkes) 12 bulan (RS Paru)	100	50.000.000	48.521.650	97,04
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205 Rim, 260 buah, 1616 kali lusin kotak (dinkes), 300 kali 2943 buah 330 RIM 501 kotak 264 pcs (BKOM) 1 pkt 6 set (RS Paru)	205 Rim, 260 buah, 1616 kali lusin kotak (dinkes), 300 kali 2943 buah 330 RIM 501 kotak 264 pcs (BKOM) 1 pkt 6 set (RS Paru)	100	403.225.100	361.075.280	89,55
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200 rim, 80.000 lbr ktk (Dinkes) 10 buku, 43020 lembar, 70 Rim 30 Pak 24 Unit (BKOM) 100 RIM 100 Kotak 40 rb lembar 250 buah (RS Paru)	200 rim, 80.000 lbr ktk (Dinkes) 10 buku, 43020 lembar, 70 Rim 30 Pak 24 Unit (BKOM) 100 RIM 100 Kotak 40 rb lembar 250 buah (RS Paru)	95	180.000.000	158.942.383	88,3



No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50 bahan bacaan (Dinkes) 4 media (BKOM) 4 Eksemplar (RS Paru)	50 bahan bacaan (Dinkes) 4 media (BKOM) 4 Eksemplar (RS Paru)	90	48.000.000	22.390.000	46,65
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285 laporan (dinkes) 28 Laporan (BKOM) 250 Dokumen (RS Paru)	285 laporan (dinkes) 28 Laporan (BKOM) 250 Dokumen (RS Paru)	80	1.049.782.200	737.407.822	70,24
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				1.070.271.480	753.456.080	70,4
	Pengadaan Mebel	85 nilai (dinkes), 1 buah, 1 set, 10 unit (RS Paru)	85 nilai (dinkes), 1 buah, 1 set, 10 unit (RS Paru)	100	717.403.800	410.148.000	57,17
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %, 32 Unit	100 %, 32 Unit	100	352.867.680	343.308.080	97,29
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				5.493.030.467	4.720.829.354	85,94
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 kg, 550 Materai, 7000 surat (Dinkes) 500 Surat (BKOM) 2000 surat (RS Paru)	250 kg, 550 Materai, 7000 surat (Dinkes) 500 Surat (BKOM) 2000 surat (RS Paru)	100	98.850.000	88.214.250	89,24
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5730 menit unit per tahun, 9520 M3, 400.000 Kwh (Dinkes) 2 Rekening 2 Rekening 2 rekening 20 KVA (BKOM) 12 bulan (RS Paru)	5730 menit unit per tahun, 9520 M3, 400.000 Kwh (Dinkes) 2 Rekening 2 Rekening 2 rekening 20 KVA (BKOM) 12 bulan (RS Paru)	100	1.911.282.619	1.485.390.453	77,72
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan, 48 kali (Dinkes) 16 orang (BKOM) 24 kali 3 Bulan 12 bulan (RS paru)	12 Bulan, 48 kali (Dinkes) 16 orang (BKOM) 24 kali 3 Bulan 12 bulan (RS paru)	100	3.482.897.848	3.147.224.651	90,36
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				2.764.456.595	2.620.508.965	94,79

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	16 Asuransi service, 16 unit bbm pajak (dinkes) 4 Unit (BKOM) 4 Unit (RS Paru)	16 Asuransi service, 16 unit bbm pajak (dinkes) 4 Unit (BKOM) 4 Unit (RS Paru)	100	393.621.050	361.991.683	91,96
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit (Dinkes) 1 Unit (BKOM) 1 unit (BKIM) 4 Gedung (RS Paru)	2 Unit (Dinkes) 1 Unit (BKOM) 1 unit (BKIM) 4 Gedung (RS Paru)	100	1.870.027.509	1.854.017.867	99,14
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 kegiatan (Dinkes), 1 Unit 80 buah (BKOM) 1 unit AC central, 7 unit AC Split, 1 Set Hydran, 1 unit Soud system 1 unit ginset, 1 set IPAL, 7 Unit PC, 1 Unit CCTV, 1 unit gas medis, 3 unit lift, 5 unit printer (RS Paru)	1 kegiatan (Dinkes), 1 Unit 80 buah (BKOM) 1 unit AC central, 7 unit AC Split, 1 Set Hydran, 1 unit Soud system 1 unit ginset, 1 set IPAL, 7 Unit PC, 1 Unit CCTV, 1 unit gas medis, 3 unit lift, 5 unit printer (RS Paru)	100	500.808.036	404.499.415	80,77
<b>9</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>				7.839.672.576	7.768.645.296	99,09
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 Bulan (Labkes) 1 unit kerja (BKIM)	12 Bulan (Labkes) 1 unit kerja (BKIM)	100	7.839.672.576	7.768.645.296	99,09
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				<b>180.079.643.208</b>	<b>162.158.429.739</b>	<b>90,05</b>
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				33.994.460.959	27.724.072.423	81,55
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1 Dokumen (BKIM) 2 paket (RS Paru)	0 Dokumen (BKIM) 2 paket (RS Paru)	65	147.356.300	21.035.780	14,28
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit (BKOM) 2 Paket (RS Paru)	1 unit (BKOM) 2 Paket (RS Paru)	100	1.611.769.600	1.349.230.983	83,71

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	2 kab kota	2 kab kota	100	216.576.000	205.052.100	94,68
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100	50.000.000	49.012.000	98,02
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	16 unit, 100 persen (labkes) 4 Unit (BKIM) 93 Unit (RS Paru)	16 unit, 100 persen (labkes) 0 Unit (BKIM) 93 Unit (RS Paru)	85	16.021.499.902	13.015.264.512	81,24
	Pengadaan Sarana Di Fasilitas Layanan Kesehatan	1 unit, 2 unit, 1 unit, 3 unit (dinkes).	1 unit, 2 unit, 1 unit, 3 unit (dinkes).	100	490.546.700	393.977.568	80,31
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk Dan Habis Pakai Lainnya)	400 meter 500 buah (BKOM) 4 jenis (RS Paru)	400 meter 500 buah (BKOM) 4 jenis (RS Paru)	100	219.521.066	213.938.477	97,46
	Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	1 keg (bahan kimia), 17 alat	1 keg (bahan kimia), 17 alat	100	2.784.574.500	2.700.335.231	96,97
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	72 unit (RS Paru)	72 unit (RS Paru)	100	800.000.000	732.200.850	91,53
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3 alat (Dinkes), 211 alat (RS Paru)	3 alat (Dinkes), 211 alat (RS Paru)	100	375.000.000	323.608.222	86,3
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan Dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	19 kab kota	19 kab kota	100	161.730.000	146.548.426	90,61
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan Dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 paket, 2 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket (dinkes) 5 Paket (RS Paru)	2 paket, 2 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket (dinkes) 5 Paket (RS Paru)	100	11.115.886.891	8.573.868.274	77,13
<b>2</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>				144.641.231.349	133.335.789.897	92,18

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana	19 kab kota, 19 kab kota, 19 kab kota 33 RS, 80 orang	19 kab kota, 19 kab kota, 19 kab kota 33 RS, 80 orang	100	3.659.734.882	2.759.660.470	75,41
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb)	100 orang, 57 orang	80 orang, 50 orang	100	147.018.080	118.702.440	80,74
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak	75 orang, 19 KK, 210 Orang, 208 Orang, 255 Orang	19 KK, 210 Orang, 180 orang, 255 orang	90	427.674.965	345.631.734	80,82
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	3 Jenis, 19 Kab kota, 3 kali	3 Jenis, 19 Kab kota, 3 kali	90	150.000.000	108.765.275	72,51
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19 kab kota, 10 kab kota, 25 orang, 10 kab kota	19 Kab/Kota, 7 Kab/Kota, 20 orang, 9 Kab/Kota	90	11.553.554.202	9.593.000.176	83,03
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	100 orang (dinkes) 100 orang (BKOM)	97 orang (dinkes) 100 orang (BKOM)	98,5	194.640.000	157.614.106	80,98
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 angkatan, 6 kab kota, 19 kab kota, 5 kab kota, 7 kab kota (Dinkes) 1 Paket (RS Paru)	1 Angkatan, 4 kab kota, 19 kab kota, 5 kab kota, 5 kab kota (Dinkes) 1 Paket (RS Paru)	78 (dinkes)	1.881.578.400	983.592.094	52,27
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri Dan Tradisional Lainnya	19 kab kota, 38 orang	19 kab kota, 38 orang	100	176.326.100	154.725.120	87,75
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	19 kab kota, 2 keg, 1 keg, 1 keg, 140 orang (Dinkes) 1 kegiatan (RS Paru)	19 kab kota, 2 keg, 1 keg, 1 keg, 140 orang (Dinkes) 1 kegiatan (RS Paru)	100	597.731.400	525.403.361	87,9
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	17 kab kota, 21 orang	17 kab kota, 21 orang	100	178.334.500	156.208.190	87,59
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	19 kab kota, 55 orang	19 kab kota, 55 orang	100	104.700.600	86.042.150	82,18
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA	19 kab kota, 2 keg, 3 keg, 60 orang, 1 keg	19 kab kota	100	738.823.068	490.063.755	66,33

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3 kali kunjungan	3 kali kunjungan	100	605.438.840	121.980.433	20,15
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19 kab kota, 4 kali, 2488592 orang	19 Kab Kota, 4 Kali, 27860177 jiwa	100	112.771.613.206	107.737.201.925	95,54
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19 kab kota, 298 orang	19 kab kota, 247 orang	100	640.989.981	483.485.833	75,43
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	19 kab kota, 96 orang	19 kab kota, 96 orang	100	94.879.750	78.071.600	82,28
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1920472 orang, 19 kab kota, 75 Dinkes dan RS, 19 kab kota (Dinkes) 65 dokumen 39 puskesmas 39 SD (BKIM)	33 RS pemerintah (Dinkes) 65 dokumen 39 puskesmas 39 SD (BKIM)	100	5.118.288.975	4.702.868.601	91,88
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal Oleh Kabupaten/Kota	139 orang, 83 orang, 1035 orang, 135 orang, 57 orang, 100%	92 orang, 80 orang, 712 orang, 93 orang, 50 orang, 100%	100	1.757.517.400	1.616.625.126	91,98
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	120 juta rp, 2 Org, 100 %, 100 % (BKIM) 12 Bulan (RS Paru)	120 juta rp, 2 Org, 100 %, 100 % (BKIM) 12 Bulan (RS Paru)	100	3.049.896.000	2.534.356.725	83,1
	Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Lab Rujukan/Nasional	300 spesimen	300 spesimen	100	6.310.000	6.308.400	99,97
	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	306 peserta, 10 puskesmas, 75 dinkes dan RS, 19 kab kota	236 peserta, 38 dinkes, 19 Kab Kota, 10 Puskesmas	77,12	786.181.000	575.482.383	73,2
<b>3</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>				479.720.500	453.662.800	94,57
	Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan	17 kab kota, 1 kali	17 kab kota	100	7.709.100	4.589.100	59,53
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Dan Jaringan Internet	10 unit	10 unit	100	472.011.400	449.073.700	95,14
<b>4</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>				964.230.400	644.904.619	66,88

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	12 Bulan (RS Paru)	12 Bulan (RS Paru)	100	223.256.000	201.513.331	90,26
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	2 dokumen (Dinkes) 2 dokumen (BKOM) 1 Kegiatan (RS Paru)	Workshop 1 bimtek 1 (labkes) 2 dokumen (BKOM) 1 Kegiatan (RS Paru)	50 (labkes) 100 (Paru)	740.974.400	443.391.288	59,84
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>				<b>2.161.202.550</b>	<b>1.481.631.942</b>	<b>68,56</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Provinsi</b>				27.295.500	16.628.800	60,92
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	420 orang	262 orang	62,3	27.295.500	16.628.800	60,92
<b>2</b>	<b>Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>				2.133.907.050	1.465.003.142	68,65
	Peningkatan Kompetensi Dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 kali, 1 kali, 19 kab kota, 2 kli, 1 angkatan, 1 kali, 1 kali (dinkes) 720 orang (BKOM)	1 kali, 1 kali, 19 kab kota, 2 kli, 1 angkatan, 1 kali, 1 kali (dinkes) 720 orang (BKOM)	100	1.368.241.650	957.263.439	69,96
	Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	19 kab kota	19 kab kota	100	765.665.400	507.739.703	66,31
<b>IV</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>				<b>89.283.850</b>	<b>69.612.215</b>	<b>77,97</b>
<b>1</b>	<b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>				89.283.850	69.612.215	77,97
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang Dan Cabang PAK	55 izin	47 izin	85,45	89.283.850	69.612.215	77,97

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
V	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>				3.343.135.933	2.907.195.535	86,96
1	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>				2.482.649.149	2.198.683.443	88,56
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2 jenis, 19 kab kota, 19 kab kota, 7 kali	2 jenis, 19 kab/kota, 7 kali	100	2.482.649.149	2.198.683.443	88,56
2	<b>Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b>				667.198.834	561.108.342	84,1
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	4 jenis, 19 kab kota, 19 kab kota	4 jenis, 19 Kab/Kota	100	667.198.834	561.108.342	84,1
3	<b>Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Ukbn) Tingkat Daerah Provinsi</b>				193.287.950	147.403.750	76,26
	Bimbingan Teknis Dan Supervisi UKBM	3 jenis, 19 kab kota, 19 kab kota	2 jenis, 19 kab/kota	66	193.287.950	147.403.750	76,26

#### 4. Permasalahan Dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Transportasi narasumber pusat pertemuan Rakerkesda tidak direalisasikan karena narasumber pusat menyampaikan materi secara online (via zoom), Konsultasi dan koordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negari dilaksanakan secara on line, sehingga anggaran perjalanan dinas tidak terealisasikan	Diharapkan NS pusat dapat menghadiri Kegiatan yang dilaksanakan. Jika koordinasi diharapkan langsung ke pusat agar hasil maksimal
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sisa anggaran disebabkan karena kebanyakan penyampaian dokumen kepada pihak lain berupa soft copy, sedangkan penyampaian dokumen berupa hardcopy hanya untuk dokumen yang sudah finalisasi sehingga efisiensi belanja cetak dan penggandaan.	Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Selisih perhitungan gaji dan tunjangan untuk perkiraan peg pindah, pensiun dan CPNS	Berkoordinasi dengan BPKAD.
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kegiatan lembur tidak dilaksanakan pada bulan yang telah direncanakan	Membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan lembur
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Belum terlaksananya pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap aset tanah Ex-KLKM di Lubuk Alung	Berkoordinasi dengan SKPD lain (Inspektorat, Biro Hukum, Satpol PP) dan BPKAD terkait rencana pengamanan fisik dan pengamanan hukum aset tanah Ex-KLKM di Lubuk Alung
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Perjalanan dinas ke beberapa Kab./Kota dalam rangka penelusuran aset belum dapat terlaksana dikarenakan tidak dapat kesesuaian jadwal dengan Bid.Asset, Dinas Kes kab/ Kota dan Dinas Kes Prov untuk pelaksanaannya termasuk BBM serta perjalanan dinas untuk penyelesaian tanah Ex- KLKM Lb.Alung juga belum terlaksana.	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan penelusuran aset.
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan dialokasikan pada anggaran Perubahan untuk 2 kali pertemuan , Sementara yang dilaksanakan pelaksanaan hanya bisa 1 kali kegiatan sehingga terdapat kelebihan dana untuk 1 kali kegiatan lagi	Perencanaan kegiatan di awal anggaran
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Standar harga di di SIPD lebih rendah dari harga pasar /took	Kesesuaian standar harga dengan SIPD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sisa anggaran disebabkan karena perkembangan media cetak online menyebabkan efisiensi anggaran belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah.	Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan ini menyesuaikan dengan agenda Rapat-Rapat.	-



No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Pengadaan Mebel	Ketersediaan Barang yang Tidak ada Dipasaran Karena Dianggarkan Diperubahan	Perencanaan kegiatan di awal anggaran
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pencairan anggaran tergantung kerusakan alat	-
9	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sisa anggaran disebabkan karena pencapaian pendapatan di UPTD BKIM hanya Rp.402.394.039,00 (8,56%) dari pagu anggaran Rp.4.700.000.000,00 Karena pola pengelolaan keuangan BLUD maka UPTD BKIM hanya dapat merealisasikan belanja sebanyak realisasi pendapatan dan sisa kas tahun 2020. Rendahnya realisasi pendapatan UPTD BKIM disebabkan karena pada semester I Tahun 2021 UPTD BKIM belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dan pada Semester II Tahun 2021 UPTD BKIM telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan akan tetapi kunjungan pasien masih rendah. (BKIM).	
II	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		
1	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>		
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dari 3 rekanan yang diundang, tdk ada yang menyanggupi pelaksanaan pekerjaan secara tender karena keterbatasan waktu (BKIM).	Mengajukan pada Anggaran Thn 2023 (BKIM).
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sisa anggaran disebabkan karena harga penawaran dari rekanan untuk pekerjaan penataan halaman atau lingkungan kantor UPTD BKOM dan Pelkes Provinsi Sumatera Barat lebih rendah daripada standar harga yang telah ditetapkan.	Kesesuaian standar harga dengan SIPD.
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Sisa anggaran disebabkan karena : penerbitan SPM tidak dilakukan oleh PPK Unit karena sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 sampai pukul 23.00 kelengkapan administrasi/syarat diterbitkan SPM belum lengkap (penyedia menggunakan Bank selain Bank Nagari)	-

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
		Uji fungsi alat dilakukan oleh dokter spesialis mata yang bekerja di RS lain (RS Arosuka) bukan oleh dokter spesialis mata dari BKIM, karena dokter spesialis mata BKIM menyatakan (dalam bentuk tertulis) bahwa alat kesehatan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan mata di BKIM sehingga beresiko alat tidak bermanfaat.	
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Pada UPTD Labor Kesehatan realisasi harga satuan lebih rendah daripada harga satuan yang tertera pada Standar Satuan Harga (sisa Tender dan E Katalog) Pada Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat spesifikasi refrigerator sesuai dengan perencanaan yang tertuang pada SIPD tidak tersedia, sehingga dibeli refrigerator dengan spesifikasi yang lebih rendah dan harga yang lebih murah namun tetap dapat memenuhi kebutuhan Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat.	Kesesuaian standar harga dengan SIPD, Pastikan stok tersedia ketika mengusulkan pembelian barang di DPA dan buat spesifikasi lebih general.
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan lainnya	Distribusi tidak bisa dilaksanakan seluruhnya karena ada beberapa obat program yang baru diterima diakhir Desember 2022	Meningkatkan koordinasi dengan pusat untuk percepatan pengiriman barang dan koordinasi dengan program untuk alokasi barang ke kab kota
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sebagian obat e katalog tidak dilayani penyedia karena tidak ada stok, sehingga diadakan melalui tender, namun tidak terealisasi karena harga yang rendah (menyesuaikan dengan harga di DPA yang mengacu pada harga e katalog). Adanya keharusan dalam merinci kebutuhan obat di DPA membuat kesulitan pengadaan obat apabila harga obat berubah atau tidak tersedia lagi di ekatalog, tidak bisa dibeli dengan harga reguler.	Pengadaan dilakukan diawal tahun untuk menghindari kekosongan stok. Tidak merinci item obat di DPA sehingga bisa lebih fleksibel dalam pengadaan obat, hal ini dikarenakan harga obat yang bisa berubah sewaktu-waktu.
<b>2.</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Sisa anggaran disebabkan karena (1) peserta pertemuan dari Kab/ Kota tidak hadir di sebabkan karena Kab /Kota ,Puskesmas tidak memiliki alokasi anggaran untuk perjadin ke Provinsi pelaksanaan kegiatan bersifat insidental sesuai dengan Kondisi Bencana / Krisis Kesehatan.	Mengusulkan pemberian dana transport untuk peserta Kab/ Kota
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Narasumber pusat mengajarkan materi secara online (via zoom meeting) sehingga anggaran transportasi Narasumber Pusat pada pertemuan Monev TGC tidak direalisasikan pada tahun 2022 terdapat beberapa kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa kabupaten/kota yang tidak membutuhkan penginapan sehingga anggaran penginapan perjalanan dinas tidak direalisasikan.	Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kegiatan Rakor TPPS dan Edukasi PMT Lokal Berbasis Pangan Lokal di 10 Kab/Kota tidak dapat dilaksanakan seluruhnya Karena Kab/Kota mempunyai kegiatan di jadwal yang sama	Kegiatan Rakor TPPS dan Edukasi PMT Lokal Berbasis Pangan Lokal di 10 Kab/Kota tidak dapat dilaksanakan seluruhnya Karena Kab/Kota mempunyai kegiatan di jadwal yang sama
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Peserta tidak hadir 100 %	Meningkatkan koordinasi dengan kab kota
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	kendala dengan penyesuaian jadwal kegiatan dengan anggota dewan DPRD yang bersangkutan	melakukan koordinasi dengan anggota dewan DPRD yang bersangkutan semaksimal mungkin
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Adanya perjalan dinas dari Tim Penilai Provinsi untuk 3 Kab/Kota yang tidak ikut dalam penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Tingkat Provinsi karena belum siap untuk dinilai	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang telah disusun dan disetujui
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sisa Pembelian BMHP sesuai harga e catalog, Sisa Pertemuan Honor NS Prov dibayarkan 50 % dan sisa BBM perjadi,	Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Adanya kelebihan dana perjalanan dinas yang tidak bisa direalisasikan karena ketidaksesuaian jadwal turun tim provinsi dengan kabupaten kota dan puskesmas	Koordinasikan jadwal kegiatan monitoring tim provinsi bersama dengan kabupaten kota dan puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Narasumber pertemuan berasal dari SKPD penyelenggara sehingga realisasi honor narasumber dibayarkan 50 % dari standar harga yang ditetapkan pada Pergub No 6 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan. realisasi belanja makan minum kegiatan untuk sarapan pagi lebih rendah daripada standar harga yang ditetapkan pada Pergub No 6 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan.	Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	sisa rehab medis NAPZA di RSJ HB Saanin peserta Pertemuan Rakontek tidak hadir 100 %	Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kegiatan bersifat isidentil sesuai dengan adanya event yang melibatkan dinas kesehatan provinsi, Kunjungan RI 1 / RI 2 hanya 1 kali di tahun 2022	Jika adanya event atau kegiatan yang melibatkan Dinas kesehatan provinsi akan ikut melakukan kegiatan tersebut
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Adanya pengurangan jumlah kepesertaan yang disebabkan karena peserta pindah segmen kepesertaan, NIK tidak padan capil, dan meninggal	Melakukan rekonsiliasi data kepesertaan untuk memenuhi kuota yang telah ditetapkan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Sisa mati pembelian APBD Kehadiran peserta Kab/Kota tidak 100%	Mengusulkan pemberian dana transport untuk peserta Kab/ Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Narasumber pertemuan berasal dari SKPD penyelenggara sehingga realisasi honor narasumber dibayarkan 50 % dari standar harga yang ditetapkan pada Pergub No 6 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan. Realisasi harga paket meeting fullboard penyelenggaraan acara lebih rendah daripada standar paket meeting fullboard yang ditetapkan pada Pergub No 6 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan.	Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Tidak terealisasinya Monev Perjalanan Dinas (dinkes)	Anggaran Sesuaikan dengan Perencanaan (dinkes)

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
		Dokter Spesialis internal tidak bersedia melaksanakan kegiatan (BKIM)	Pelaksanaan Kegiatan bekerjasama dengan dokter spesialis kab/kota (BKIM)
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Kehadiran peserta tidak 100 %	Mengusulkan pemberian dana transport untuk peserta Kab/ Kota
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Sisa dari nominal Jaspel yang dihitung dari target pendapatan, namun pendapatan berada dibawah target sehingga jaspel juga kurang realisasi	Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peserta KAKO yang tidak memenuhi target yang disebabkan karena anggaran KAKO yang tidak tersedia	Melakukan koordinasi dengan KAKO dalam penyediaan anggaran
<b>3</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>		
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Makmin rapat tidak cair karena validasi data yang dilakukan per bidang tidak terjadwal	Sebaiknya rapat terjadwal
<b>4</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas b dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>		
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Karena PMK diundangkan tanggal 2 Desember 2022 dan Juknis ditetapkan tanggal 19 Desember 2022 sehingga kegiatan tidak bisa terlaksana	Meningkatkan koordinasi dengan kementerian kesehatan terkait pelaksanaan kegiatan
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi</b>		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Honor nara sumber yang berasal dari dalam instansi dibayarkan 50% sesuai dengan Pergub nomor 6 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan (SHS)	Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
<b>2</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>		
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Honor Nara sumber untuk kegiatan Pelatihan Tim penguji UKOM tidak direalisasikan karena sesuai Pergub no 6 Tahun 2022 tentang SHS honor narasumber tidak dapat dibayarkan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan  Narasumber pada kegiatan Orientasi Manajemen Puskesmas untuk 3 angkatan berasal dari dalam instansi sehingga yang dibayarkan sebesar 50 % Pergub no 6 Tahun 2022 tentang SHS.	Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
		Kegiatan Orientasi Manajemen Puskesmas untuk 7 angkatan dilaksanakan di Aula dinas kesehatan Kabupaten/Kota sehingga Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan dan belanja sewa mess/wisma/Bungalow/tempat peristirahatan tidak terealisasi sebesar 100%	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sisa anggaran disebabkan karena pertimbangan waktu pelaksanaan dan tempat/hotel yang tersedia maka kegiatan bimtek sinkronisasi data SISDMK yang dianggarkan untuk 10 angkatan terlaksana 8 angkatan dan kegiatan bimtek Sinkronisasi Data SISDMK Rumah sakit yang semula dianggarkan 5 angkatan menjadi 2 angkatan.	Perencanaan kegiatan di awal anggaran
<b>IV</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>		
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Diperkirakan ada penambahan PAK dan PBF sebanyak 8 sarana dalam tahun 2022, dalam tahun berjalan tidak ada PBF cabang maupun Cabang PAK yang mengurus izin baru sehingga target hanya 47 sarana	Target tahun selanjutnya dibuat berdasarkan jumlah cabang PAK dan PBF Cabang yang ada.
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		
<b>1</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>		
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kurangnya kehadiran undangan tidak sesuai dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan, Terdapat beberapa kegiatan pertemuan dengan jumlah peserta kurang	Diupayakan perencanaan telah maksimal sehingga tidak terjadi perubahan kegiatan di anggaran, Pelaksanaan kegiatan memperhatikan jadwal dan undangan yang akan datang sehingga kehadiran yang berkepentingan dapat disesuaikan.
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b>		
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kegiatan yang terlaksana belum maksimal sesuai yang diharapkan terkait jadwal dan undangan yang hadir.	Diupayakan perencanaan telah maksimal sehingga tidak terjadi perubahan kegiatan di anggaran, Pelaksanaan kegiatan memperhatikan jadwal dan undangan yang akan datang sehingga kehadiran yang berkepentingan dapat disesuaikan.
<b>3</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</b>		

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Terdapat kegiatan pertemuan yang tidak dilaksanakan terkait kehadiran untuk datang	Diupayakan perencanaan telah maksimal sehingga tidak terjadi perubahan kegiatan di anggaran, Pelaksanaan kegiatan memperhatikan lokasi dan undangan yang akan datang sehingga kehadiran yang berkepentingan dapat disesuaikan.

## 5. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Persentase persalinan sesuai standar di fasyankes	Indikator persentase persalinan sesuai standar di fasyankes yang ditargetkan 78,5 sedangkan realisasi 75,33 dengan capaian kinerja 95,96%. Meskipun pencapaian tinggi yaitu 95,96%, namun apabila mencermati realisasi kinerjanya, maka dapat diartikan dari 100 persalinan yang dilakukan, terdapat persalinan yang dilakukan sesuai standar fasyankes adalah sebanyak 75 kali, sedangkan persalinan yang dilakukan tidak sesuai standar fasyankes adalah sebanyak 25 kali. Apakah ini perlu mendapatkan perhatian lebih? Hal ini perlu didiskusikan dengan Dinas Kesehatan	<p>Masih ada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan tetapi tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti poskesri atau praktek bidan mandiri yang belum terstandar, Upaya yang dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempersiapkan pustu sebagai tempat pertolongan persalinan sesuai standar dengan melengkapi sarana prasarana.</li> <li>- Mempersiapkan praktek bidan mandiri melalui organisasi profesi dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan</li> <li>- Mempersiapkan tenaga kesehatan yang kompeten untuk pertolongan persalinan.</li> </ul> <p>Masih ada persalinan yang ditolong oleh non tenaga Kesehatan, Upaya yang dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan, peran, dan dukungan keluarga dan masyarakat melalui kegiatan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang berfokus pada kegiatan monitoring terhadap ibu hamil dan bersalin yang bertujuan membangun potensi masyarakat khususnya kepedulian keluarga dan masyarakat untuk persiapan dan tindakan dalam menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.</li> <li>- Pendampingan ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan</li> </ul>

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
2	Persentase Ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	Indikator Persentase Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang ditargetkan 13 sedangkan realisasi 9,02 dengan capaian kinerja 131%. Angka capaian kinerja perlu klarifikasi ulang. Selanjutnya, apabila mencermati realisasi kinerjanya, maka dapat diartikan dari 100 orang ibu hamil, sebanyak 10 orang yang mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein), angka ini tentu berpengaruh terhadap penurunan angka kematian ibu hamil. Apakah ini perlu mendapatkan perhatian lebih? Hal ini perlu didiskusikan dengan Dinas Kesehatan.	<p>Indikator Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) ditandai dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Presentase Ibu hamil KEK tahun 2022 sebesar 9,3% dari target 13% (capaian 128,5%). Angka ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan.</li> <li>- Semakin rendah capaian persentase ibu hamil KEK dari target yang telah ditetapkan akan semakin baik</li> <li>- Berdasarkan data tahun 2021, diketahui persentase ibu hamil KEK sebesar 9,70 %, sementara realisasi tahun 2022 sebesar 9,3% mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 0,4%</li> <li>- Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) merupakan indikator outcome. Kekurangan energi kronik (KEK) adalah masalah gizi pada ibu hamil yang disebabkan karena kekurangan asupan makanan dalam waktu yang cukup lama, yaitu hitungan tahun. Kondisi ibu hamil KEK berisiko menurunkan kekuatan otot yang membantu proses persalinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kematian janin (keguguran), prematur, lahir cacat, bayi berat lahir rendah (BBLR) bahkan kematian bayi. Ibu hamil dengan risiko KEK dapat mengganggu tumbuh kembang janin yaitu pertumbuhan fisik (stunting), otak dan metabolisme yang menyebabkan penyakit menular di usia dewasa.</li> </ul> <p>Upaya yang dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Antenatal Care (ANC) yang berkualitas (10 T) harus dilakukan ditingkat pelayanan kesehatan primer (puskesmas) oleh tenaga kesehatan.</li> <li>- Kelas Ibu Hamil untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan perubahan sikap dan perilaku sehat ibu saat kehamilan.</li> <li>- Penjaringan kesehatan pada calon pengantin. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil.</li> <li>- Pemberian makanan tambahan (MT) bagi ibu hamil KEK dan edukasi PMT berbasis pangan local</li> </ul>

No	Indikator Kinerja Perangat Daerah	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
3	Akses keluarga dengan sanitasi dasar (Jamban sehat)	Indikator akses keluarga dengan sanitasi dasar (Jamban sehat) yang ditargetkan 86 sedangkan realisasi 85,19 dengan capaian kinerja 99,06%. Meskipun pencapaian tinggi yaitu 99,06%, namun apabila mencermati realisasi kinerjanya, maka dapat diartikan dari 100 keluarga, terdapat 85 keluarga yang memiliki sanitasi dasar (jamban sehat), sedangkan sebanyak 15 keluarga tidak memiliki sanitasi dasar atau jamban tidak sehat . Apakah ini perlu mendapatkan perhatian lebih? Hal ini perlu didiskusikan dengan Dinas Kesehatan	<p>Buang air besar sembarangan merupakan salah satu permasalahan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimana yang menjadi tantangannya adalah akses keluarga dengan akses sanitasi dasar (jamban sehat) di Provinsi Sumatera Barat saat ini adalah 85,19%. Penyediaan jamban sebagai sarana pembuangan tinja terutama dalam pelaksanaan tidaklah mudah, karena menyangkut peran serta masyarakat yang biasanya sangat erat kaitannya dengan perilaku, tingkat ekonomi, kebudayaan dan pendidikan. Pembuangan tinja perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan salah satu bahan buangan yang banyak mendatangkan masalah dalam bidang kesehatan dan sebagai media bibit penyakit, seperti diare, typhus, disentri, cacangan, gatal-gatal dan stunting. Selain itu dapat menimbulkan pencemaran lingkungan pada sumber air dan bau busuk serta estetika.</p> <p>STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) merupakan pendekatan yang digunakan dalam program nasional pembangunan sanitasi di Indonesia yang dipilih untuk memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat serta mengimplementasikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi dasar yang layak dan berkesinambungan</p> <p>STBM memiliki beberapa strategi, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penciptaan lingkungan yang kondusif (enabling environment), prinsipnya adalah meningkatkan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter. Strategi ini berkaitan dengan dukungan regulasi dan kebijakan daerah dalam bidang sanitasi dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta</li> <li>- Peningkatan kebutuhan sanitasi (demand creation), prinsipnya adalah menciptakan perilaku komunitas yang higienis dan saniter untuk mendukung terciptanya sanitasi total. Berkaitan dengan strategi ini, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan jajarannya melaksanakan program dan kegiatan dibidang Kesehatan lingkungan diantaranya adalah menyelenggarakan program STBM di masyarakat, salah satunya melalui kegiatan pemucuan</li> </ul>



No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
			<p>dalam rangka merubah perilaku masyarakat. Permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemucuan ini adalah tindak lanjut dan movev pasca pemucuan belum berjalan dengan baik dan berkelanjutan.\</p> <p>- Peningkatan penyediaan suplai (supply improvement), prinsipnya adalah meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Strategi ini berkaitan dengan penyediaan sarana dari lintas sector atau OPD terkait dengan beberapa program dan kegiatan di bidang air minum dan sanitasi sesuai dengan sasaran program tersebut, mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna. STBM dilakukan di semua tingkatan dengan memperhatikan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, termasuk lintas program pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga keterpaduan dalam persiapan dan pelaksanaan STBM dapat tercapai. Permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan sarana yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan lintas sektor terkait adalah adanya di beberapa program yang telah di laksanakan sarana yang dibangun melalui program tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima program baik aspek teknis dan perawatan sarana oleh pengguna pasca program sehingga sebagian masyarakat kembali ke perilaku yang tidak sehat.</p>

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
4	Persentase Imunisasi dasar lengkap pada usia 12 - 23 bulan	Indikator persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12 - 23 bulan yang ditargetkan 75% sedangkan realisasi 87,19% dengan capaian kinerja 116,3%. Meskipun pencapaian tinggi yaitu 116,3%, namun apabila mencermati realisasi kinerjanya, maka dapat diartikan dari 100 anak pada usia 12 - 23 bulan, sebanyak 87 orang anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, sedangkan sebanyak 13 orang anak tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Apakah ini perlu mendapatkan perhatian lebih? Hal ini perlu didiskusikan dengan Dinas Kesehatan.	13 anak yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap perlu mendapat perhatian lebih, dikarenakan anak tersebut tidak dapat imunisasi sehingga tidak terbentuk kekebalan tubuhnya yang mengakibatkan sangat beresiko tertular penyakit. Selain itu mobilisasi masyarakat yang tinggi mengakibatkan mudahnya terjadi transmisi virus atau agen penyakit dengan penularan dari orang ke orang lain. Jika ini terjadi bisa kemungkinan anak tersebut tertular virus penyakit yang mengakibatkan sakit, cacat dan bahkan kematian.

### 3.1.1.2.2. RSUD DR Achmad Mochtar Bukittinggi

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.241.698.623.937,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.238.464.186.846,00 atau 98,66%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah Sakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 (A)	93,49 (A)	101,62
			Tingkat Akreditasi RS	Paripurna (82)	Paripurna (84,51)	103,06
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi.	100 %	100 %	100
			Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80 (BB)	79,44 (BB)	99,30
III	Meningkatnya Kemandirian keuangan rumah sakit		Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)	44	62,02	140,95

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

- a. Sasaran I : Meningkatkan Kualitas Layanan Rumah Sakit dengan indikator kinerja :
  - 1) Indeks kepuasan masyarakat (Target kinerja 92 (A) dengan realisasi 93,49 (A).
  - 2) Tingkat Akreditasi rumah sakit. (Target paripurna (82) dengan realisasi paripurna (84,51).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi dengan output pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medis fasilitas layanan kesehatan dan pengadaan bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk dan habis pakai lainnya).

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja :

- 1) Persentasi ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi daerah provinsi (Target kinerja 100% dengan realisasi 100%).
- 2) Nilai Akuntabilitas kinerja OPD (target kinerja 80 (BB) dengan realisasi 79,44 (BB).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN terlaksana 100%.
- (2) Peningkatan Pelayanan BLUD dengan ouput pelaksanaan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD terlaksana 100%.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya Kemandirian keuangan rumah sakit dengan indikator kinerja :

- 1) Tingkat Kemandirian Keuangn (TKK) target 44 dengan realisasi 62,02.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			98.81	214.048.805.126	211.510.194.992	98.81

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	96.92	64.050.944.490	62.076.285.810	96.92
	Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	99.62	149.997.860.636	149.433.909.182	99.62
<b>II</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			<b>97.48</b>	<b>27.649.818.811</b>	<b>26.953.991.854</b>	<b>97.48</b>
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan , sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	100 %	97.85	25.197.318.811	24.655.491.628	97.85
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	100 %	93.72	2.452.500.000	2.298.500.226	93.72

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tidak ada permasalahan	-
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tidak ada permasalahan	-

##### 3.1.1.2.3. RS. Jiwa PROF. HB. Saanin Padang

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.358.553.659,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.358.553.659,00 atau 96,46%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Akreditasi RS	Paripurna	Paripurna	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86%	91,98%	119
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa Yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa		Persentase Pasien Non Jiwa yang ditangani spesialis	90%	100%	111
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Nilai BB (79,5%)	A (80,75)	101,5
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan RS		Tingkat Kemandirian Keuangan	44%	54,78	124,5

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

- a. Sasaran I : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa, dengan indikator kinerja :
- 1) Tingkat Akreditasi RS (Target Kinerja : Paripurna) (Realisasi Kinerja : Paripurna) Capaian Kinerja 100%.
  - 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Target Kinerja : 86%) (Realisasi Kinerja : 91,98%) Capaian Kinerja : 119%.

- b. Sasaran II : Meningkatnya pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa, dengan indikator kinerja :
- 1) Persentase Pasien Non Jiwa yang ditangani spesialis (Target Kinerja : 90%) (Realisasi Kinerja : 100%) Capaian Kinerja 111%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dicapai dengan kegiatan :
- (1) Penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit.
    - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan.
  - (2) Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Operasional Pelayanan Rumah Sakit.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja :
- 1) Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (Target Kinerja : BB(79,5%)) (Realisasi Kinerja : A (80,75)) Capaian Kinerja : 101,5%.
- d. Sasaran IV : Meningkatnya kemandirian keuangan RS, dengan indikator kinerja :
- 1) Tingkat Kemandirian Keuangan (Target Kinerja : 44%) (Realisasi Kinerja : 54,75) Capaian Kinerja : 124,5%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program :

a) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

(1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah, dengan sub kegiatan ini adalah :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN .

(2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan sub kegiatan adalah :

- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>44.582.698.384</b>	<b>41.537.132.538</b>	<b>93,17</b>
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	280 Orang	275 Orang	98,21	23.760.000.000	22.667.744.332	95,40
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang	275 Orang	98,21	23.760.000.000	22.667.744.332	95,40
2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	12 Bulan	12 Bulan	100	29.559.059.508	28.976.988.707	98,03
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 Bulan	12 Bulan	100	29.559.059.508	28.976.988.707	98,03
<b>II</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>3.039.494.151</b>	<b>2.719.539.988</b>	<b>89,47</b>
1	Penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100%	100%	100	2.594.494.151	2.276.743.772	87,75
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	100	1.144.300.000	886.366.927	77,46
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	45 Unit	45 Unit	100	1.450.194.151	1.390.376.845	95,88
2	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100%	100%	100	445.000.000	442.796.216	99,50

	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100%	100%	100	445.000.000	442.796.216	99,50
--	-----------------------------------	------	------	-----	-------------	-------------	-------

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tidak ada permasalahan	-
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tidak ada permasalahan	-

#### 3.1.1.2.4. RSUD Pariaman

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh RSUD Pariaman, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.114.778.402.426,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.113.107.523.020,00 atau 98,54%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi SAKIP	BB 80 %	BB 78,49%	98,11
			Tingkat Kemandirian Keuangan	46 %	66,90 %	145
II	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna 82 %	Paripurna 84,13 %	102,59
III	Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 %	88,58 %	96,28

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Nilai Evaluasi SAKIP (Target Kinerja : 80%) (Realisasi Kinerja : 78,49%).
- 2) Tingkat Kemandirian Keuangan (Target Kinerja : 46%) (Realisasi Kinerja : 66,90%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

(2) Peningkatan Pelayanan BLUD.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Tingkat Akreditasi Rumah Sakit (Target Kinerja : 82%) (Realisasi Kinerja : 84,13%).

c. Sasaran III : Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (Target Kinerja : 92%) (Realisasi Kinerja : 88,58%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

(2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

**3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran**

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				<b>109.109.687.355</b>	<b>107.615.559.491</b>	<b>98,63</b>
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	29.576.768.786	29.534.595.937	99,86
2	Peningkatan Pelayanan BLUD	46%	66,9 %	145	79.532.918.569	78.080.963.554	98,17
<b>II</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>				<b>5.668.715.071</b>	<b>5.491.963.529</b>	<b>96,88</b>
1	Penyediaan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	92%	88,58 %	96,28	4.920.672.103	4.799.713.458	97,54
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	92%	100 %	108,7	748.042.968	692.250.071	92,54



#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tidak ada permasalahan	
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Dengan Menurunnya Angka Kasus Covid-19, Terhitung Mei 2022 RSUD Pariaman Tidak Lagi Menerima dan Melayani Pasien Covid 19	Penutupan Pelayanan Poliklinik dan Rawat Inap pada Pelayanan Covid-19

##### 3.1.1.2.5. RSUD Mohammad Natsir

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh RSUD Mohammad Natsir Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.180.157.618.653,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.126.517.811.795,00 atau 70,23%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	92%	92,57%	100,62
			Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100
II	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Nilai Evaluasi SAKIP	A (80,03)	A(80,03)	100
III	Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit		TKK	52%	59,48%	114,38

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, dengan Indikator Kinerja :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (Target Kinerja : 92%) (Realisasi Kinerja : 92,57%) Capaian Kinerja 100,62%.
- 2) Akreditasi Rumah Sakit (Target Kinerja : Paripurna) (Realisasi Kinerja : Paripurna) Capaian Kinerja : 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan output kegiatan ini adalah

bertambahnya alat kesehatan kedokteran, penunjang medis lainnya dan gedung.

- (2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan Output kegiatan ini adalah pemberian insentif Covid tahun 2022.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran Startegis II : Meningkatnya tata kelola rumah sakit, dengan Indikator Kinerja :
- i. Nilai Evaluasi Sakip (Target Kinerja : A (80,03)) (Realisasi Kinerja A (80,03)) Capaian Kinerja 100%.
- c. Sasaran III : Meningkatnya kemandirian rumah sakit, dengan Indikator Kinerja :
- 1) TKK (Target Kinerja : 52%) (Realisasi Kinerja : 59,48%) Capaian Kinerja : 114,38%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tahun 2022.
- (2) Peningkatan Pelayanan BLUD dengan output kegiatan ini adalah memenuhi semua kebutuhan belanja operasional BLUD Rumah Sakit.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	458 orang	458 orang	100	41.046.274.810	39.523.097.538	96,29
2	Peningkatan Pelayanan BLUD	12 Bulan	12 Bulan	100	126.642.269.394	74.930.657.662	59,17

No	Program/Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
II	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>						
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 gedung, 98 unit, 12 set, 3 buah, 11 titik	1 gedung, 98 unit, 12 set, 3 buah, 11 titik	100	11.394.074.449	10.989.057.205	96,45
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9 Bulan	9 Bulan	100	1.075.000.000	1.075.000.000	100

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		
2	Peningkatan Pelayanan BLUD	<p>Tidak tercapainya pendapatan sebesar Rp.23.847.611.297,- sehingga belanja BLUD tidak dapat direalisasikan sebesar pendapatan yang tidak diterima diatas, Hal ini disebabkan tingginya target pendapatan yang ditetapkan TAPD BLUD RS yang tidak sesuai dengan potensi yang ada.</p> <p>2.RSUD M.Natsir pada bulan November mendapatkan dana hibah dari BANPER sebesar Rp.26.930.000.000,- untuk belanja alkes CATHLAB (yang dimasukan dalam struktur pendapatan dan belanja BLUD) sampai dengan akhir tahun 2022 pelaksanaan kegiatan belum selesai masih ada komponen yang belum tersedia dari pabrik dan tidak dapat dilakukakn uji fungsi. Sehubungan hal diatas untuk pembayaran pengadaan Cathlab belum dapat direalisasikan</p>	<p>Mengajukan usulan pada APBD Perubahan RS dengan melakukan rasionalisasi pendapatan dari Rp.99.100.000.000,- menjadi Rp.75.000.000.000,- sesuai dengan potensi.</p> <p>Melakukan efesiensi dan efektif belanja sesuai dengan kebutuhan yang ada.</p> <p>Memberikan kesempatan kepada penyedia pengadaan alkes untuk memperpanjang waktu penyelesaian kegiatan sampai dengan 29 Januari 2022.</p>
II	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	Tidak ada masalah	

##### 3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, dengan anggaran Rp.518.905.193.997,00 realisasi Rp.489.774.057.173,26 atau 94,38% rincian sebagai berikut :

### 3.1.1.3.1. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.370.187.484.295,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.350.526.954.049,26 atau 94,69%, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi		Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	73,60%	-	0
III	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	75 %	71,39%	95,19
IV	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Cakupan Air Minum	82 %	83,78%	102,17
V	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Cakupan Sanitasi	82 %	83,08%	101,32
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Cakupan Sanitasi	82 %	83,08%	101,32
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Sanitasi	82 %	83,08%	101,32
VI	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan strategis terbangun	40,20%	6 %	14,93
		Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan strategis terbangun	20%	2,5%	12,5
VII	Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	86%	86%	100

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja :

- 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Target Kinerja : BB) (Realisasi Kinerja : BB).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output: Tersedianya dokumen Renja 2 dokumen.
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD, dengan output: Tersedianya dokumen RKA SKPD 1 dokumen.
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA–SKPD, dengan output: Tersedianya dokumen Pergeseran dan Perubahan RKA SKPD 2 dokumen.
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD, dengan output: Tersedianya dokumen DPA SKPD 1 dokumen.
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD, dengan output: Tersedianya dokumen Pergeseran dan Perubahan DPA SKPD 1 dokumen.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output: Tersedianya dokumen Evaluasi (LAKIP, LKPJ dan LPPD) 3 dokumen.
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output: Tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan 3 dokumen.
- (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output: Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN dan calon ASN 350 orang.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan output: Tersedianya Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran 13 dokumen.
- (3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output: Tersedianya dokumen Laporan Barang Milik Daerah 1 dokumen.
- (4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

- Kelengkapannya, dengan output: Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 352 stel.
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output : Terlaksananya Bimtek 20 kali.
- (5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1 dinas.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor 1 dinas.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 1 set.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 set.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output: Terselenggaranya laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi 12 dokumen.
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan output: Terkelolanya data Arsip Dinamis SKPD 1 Arsip.
- (6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Pengadaan Mebel, dengan output: Tersedianya Kursi dan Meja 44 unit, Kursi Rapat 26, Lemari Arsip 1 unit, Meja Rapat 5.
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output: Tersedianya CCTV 1 set, Komputer PC 2 unit, Komputer Tablet 2, PDF Scanner 44 unit, Printer 44 unit, Sound System rapat 1 set, Video camera/Video teleconverence 1 unit, Video Wall Display 1 unit.
- (7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output: Tersedianya surat-surat masuk dan keluar dalam 1

tahun 12 surat.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output: Tersedianya Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan 19 kali, Terbayarkannya Tagihan Internet 12 bulan, Tagihan Telfon/Fax 9700 menit, Tagihan Air (PDAM) 9000 meter kubik, Tagihan Listrik (PLN) 770000 KVA.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output: Tersedianya Tenaga Pelayanan Umum Kantor 78 orang.
- (8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output: Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas 15 unit, Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 1 laporan, Pajak Kendaraaan Operasional 30 unit, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 415 unit.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output: Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya 1 dinas.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output: Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 unit.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi, dengan indikator kinerja :

- 1) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (Target Kinerja : 73,60%) (Realisasi Kinerja : \*Menunggu penilaian dari Tim Evaluator Inspektorat) dengan capaian kinerja : - %).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :
- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

- Daerah, dengan output: Tersedianya dokumen Renja 2 dokumen.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD, dengan output : Tersedianya dokumen RKA SKPD 1 dokumen.
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA–SKPD, dengan output: Tersedianya dokumen Pergeseran dan Perubahan RKA SKPD 2 dokumen.
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD, dengan output: Tersedianya dokumen DPA SKPD 1 dokumen.
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD, dengan output: Tersedianya dokumen Pergeseran dan Perubahan DPA SKPD 1 dokumen.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output: Tersedianya dokumen Evaluasi (LAKIP, LKPJ dan LPPD) 3 dokumen.
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output: Tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan 3 dokumen.
- (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output: Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN dan calon ASN 350 orang.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan output: Tersedianya Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran 13 dokumen.
- (3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output: Tersedianya dokumen Laporan Barang Milik Daerah 1 dokumen.
- (4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan output : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut



- Kelengkapannya 352 stel.
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output: Terlaksananya Bimtek 20 kali.
- (5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1 dinas.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor 1 dinas.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 1 set.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 set.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output: Terselenggaranya laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi 12 dokumen.
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan output: Terkelolanya data Arsip Dinamis SKPD 1 Arsip.
- (6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Pengadaan Mebel, dengan output: Tersedianya Kursi dan Meja 44 unit, Kursi Rapat 26, Lemari Arsip 1 unit, Meja Rapat 5.
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output: Tersedianya CCTV 1 set, Komputer PC 2 unit, Komputer Tablet 2, PDF Scanner 44 unit, Printer 44 unit, Sound System rapat 1 set, Video camera/Video teleconference 1 unit, Video Wall Disply 1 unit.
- (7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output : Tersedianya surat-surat masuk dan keluar dalam 1 tahun 12 surat.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output: Tersedianya Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan 19 kali, Terbayarkannya Tagihan Internet 12 bulan, Tagihan Telfon/Fax 9700 menit, Tagihan Air (PDAM) 9000 meter kubik, Tagihan Listrik (PLN) 770000 KVA.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output: Tersedianya Tenaga Pelayanan Umum Kantor 78 orang.
- (8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output: Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas 15 unit, Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 1 laporan, Pajak Kendaraan Operasional 30 unit, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 415 unit.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output: Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya 1 dinas.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output: Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 unit.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya Kemantapan Jalan, dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase Jalan Mantap (Target Kinerja : 75%) (Realisasi Kinerja: 71,39%) dengan capaian kinerja : 95,19%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penyelenggaraan Jalan, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

- (1) Penyelenggaraan Jalan Provinsi, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dengan

output: Tersusunnya Dokumen lingkungan hidup kegiatan jalan dan jembatan Provinsi 7 dokumen, DED Jalan Provinsi 4 dokumen.

- Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, dengan output: Tersusunnya dokumen Pendampingan Penyiapan Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol 1 dokumen, Tersediannya penyiapan Lahan Infrastruktur bidang ke PU an Provinsi (Koneksi ke Kawasan Strategis) 75%, luasan penyiapan Lahan untuk Infrastruktur bidang ke PU an Provinsi 2 Ha.
- Pembangunan Jalan, dengan output: Tersediannya Pengawasan Pembangunan Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073) (DAK) 1 dokumen, Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi 1 dokumen, Terbangunnya Jalan Provinsi Bukittinggi - Gaduik-Pincuran 1,35 Km, Jalan Provinsi di Ruas Duku-Sicincin (P.087) 0,15 Km, Jalan Provinsi Kantor Camat – Berkat 0,2 Km, di Ruas Lubuk Sikaping - Talu (P.096) 1 Km, Jalan Provinsi di Ruas Palupuah - Puagaduh - Koto Tinggi (P.090) 0,295 Km, Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073) DAK 1,787 Km, Jalan yang di ebarkan pada Ruas Simpang Padang Karambia - Tanjung Bungo ( TPA Regional) 0,06 Km, dan Pelunasan Pembayaran Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran Paket Pembangunan Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK 1 dokumen.
- Pelebaran Jalan Menuju Standar, dengan output: Tersediannya Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan 1 dokumen, Terlaksananya pelebaran Jalan yang dilebarkan pada Ruas Padang Koto Gadang - Pelembayan (P.088) 1,1 Km, Jalan yang dilebarkan pada Ruas Padang Sawah - Kumpulan (P.068) 1,125 Km, Jalan yang dilebarkan pada Ruas Sp. Ganting Payo (Batas Tanah Datar) 0,4 Km.
- Pelebaran Jalan Menambah Lajur, dengan output: Tersediannya Dokumen Pengawasan Pelebaran Dengan Menambah Lajur 1 dokumen, Terlaksananya pelebaran Jalan Provinsi di Ruas Kubu Kerambil - Batu Sangkar (P.035) 0,15 Km.
- Rekonstruksi Jalan, dengan output: Tersediannya Dokumen Pengawasan 1 dokumen, Dokumen Pengawasan Rekonstruksi Jalan Pangkalan - Sialang - Gelugur (P.076) DAK 2 dokumen, Pengawasan

Rekonstruksi Jalan Tapus - Muaro Sei Lolo - Gelugur (P.101) DAK 1 dokumen, Terekonstruksinya Panjang Jalan Provinsi di Ruas Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) 0,5 Km, Jalan Provinsi di Ruas Batas Payakumbuh- Sitangkai (P.044) 0,5 Km, Jalan Provinsi di Ruas Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga) (P.083) 0,045 Km, Jalan Provinsi di Ruas Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084) 0,382 Km, Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Basung - Sei Limau (P.072) Paket 2 0,51 Km, Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Basung - Sei Limau (P.072) Paket 1 0,51 Km, Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Malako- Abai Sangir (P.056.2) 0,9 Km, Jalan Provinsi di Ruas Palembang - Palupuh - Simp. Patai (P.081) 0,16 Km, Jalan Provinsi di Ruas Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076) 2,05 Km, di Ruas Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076) Paket 2 0,08 Km, Jalan Provinsi di Ruas Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi (P.069.2) 0,603 Km, Jalan Provinsi di Ruas Rawang - Talawi (P.102) 0,09 Km, Jalan Provinsi di Ruas Simp. Koto Mambang-Balingka (P.078) 0,12 Km, Jalan Provinsi di Ruas Simp. Koto Mambang-Balingka (P.078) Paket III 0,04 Km, Jalan Provinsi di Ruas Simp. Koto Mambang-Balingka (P.078) Paket II 0,041 Km, Jalan Provinsi di Ruas Simp. Koto Mambang-Balingka (P.078) Paket I 0,0375 Km, Jalan Provinsi di Ruas Simp. Sikabau- Simp. Koto Baru (P.010) 0,625 Km, Jalan Provinsi di Ruas Singkarak - Aripin - Tanjung - Balit (P.093) 0,325 Km, Jalan Provinsi di Ruas Sp. Pua Data - Sp. Sei Dadok - Museum PDRI 0,86 Km, Jalan Provinsi di Ruas Surantiah - Kayu Aro - Langgai (P.086) 0,1 Km, Panjang Jalan Provinsi di Ruas Tanjung Ampalu-Sijunjung (P.008) 3 Km, Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) DAK 1,515 Km, Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) 0,55 Km, dan Pelunasan Pembayaran Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran Paket Rekonstruksi Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1) 1 dokumen.

- Rehabilitasi Jalan, dengan output: Tersedianya Dokumen Pelaksanaan pada Paket Supervisi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III) 1 dokumen, Dokumen Pelaksanaan pada Survey BMS Jalan Provinsi

Sumatera Barat 2 dokumen, Dokumen Pelaksanaan pada Survey PKRMS Jalan Provinsi Sumatera Barat 3 dokumen, Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Drainase UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I 1 dokumen, Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Saluran Drainase UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I 1 dokumen, Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II 1 dokumen, Pelaksanaan Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III 1 dokumen, Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV 1 dokumen, Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V 1 dokumen, Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI 1 dokumen, Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan (Roda 2) 6 unit, Pengadaan Kendaraan Roda 4 untuk Penunjang Kegiatan 3 unit, Terehabilitasinya Jalan yang terehabilitasi pada Paket 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III) 103,42 Km, Jalan yang terehabilitasi pada Paket 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III) 46,78 Km, Jalan yang terehabilitasi pada Paket 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III) 21, 5 Km, Terpeliharanya Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi/Terpelihara Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I 246,6 Km, Saluran Drainase Jalan Terbangun di Ruas Jalan Lubuk Sikaping - Talu (P.096) 67,79 Km, Saluran Drainase Jalan Terbangun di Ruas Jalan Padang Sawah - Kumpulan (P.068) 61,01 Km, Saluran Drainase Jalan Terbangun di Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031) 61,01 Km, Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi/Terpelihara Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II 249, 88 Km, Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi/Terpelihara Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III 191,58 Km, Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi/Terpelihara Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV 172,2 Km, Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi/Terpelihara Pada UPTD Jalan dan

Jembatan Wilayah V 173,18 Km, Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi/Terpelihara Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI 118,59 Km.

- Pemeliharaan Berkala Jalan, dengan output: Tersedianya Dokumen Pengawasan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Padang Sawah - Kumpulan (P.068) 1 dokumen, Dokumen Pengawasan Berkala Jalan Provinsi (Paket PL) 1 dokumen, Dokumen Pengawasan Berkala Jalan 1 dokumen, Dokumen Pengawasan Berkala Jalan Batusangkar - Ombilin (P.070) DAK 1 dokumen, Dokumen Pengawasan Berkala Jalan Panti - Simpang Empat (P.031) DAK 1 dokumen, Dokumen Pengawasan Berkala Jalan Simpang Baso - Piladang (P.079) DAK 1 dokumen, Terpeliharanya Jalan Provinsi di Ruas Baso - Batu Sangkar (P.036) 0,8 Km, Jalan Provinsi di Ruas Batu Sangkar - Ombilin (P.070) yang dipelihara secara berkala (DAK) 2,55 Km, Jalan Provinsi di Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025) yang dipelihara secara berkala Paket II 0,2 Km, Jalan Provinsi di Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025) yang dipelihara secara berkala Paket I 0,1 Km, Jalan Provinsi di Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025) 1,125 Km, Jalan Provinsi di Ruas Padang Sawah - Kumpulan (P.068) 4 Km, Jalan Provinsi di Ruas Panti - Simp. Empat (P.031) 3,6 Km, Jalan Provinsi di Ruas Panti - Simp. Empat (P.031) 1,6 Km, Jalan Provinsi di Ruas Sicinsin - Kurai Taji (P.028) 0,2 Km, Jalan Provinsi di Ruas Simp. Baso - Piladang (P.079) DAK 3,125 Km, Jalan Provinsi di Ruas Simp. Empat - Sasak (P.033) 0,2 Km, Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei. Lolo – Gelugur (P.101) 0,2 Km.
- Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan output: Tersedianya Pengadaan Bahan Jalan Armco 30 unit, Pengadaan Bahan Jalan Bronjong 350 buah, Pengadaan Peralatan Electric Jack Hammer 2 unit, Pengadaan Peralatan Generator Set 5 KVA 2 unit, Peralatan Jalan dan Jembatan 34 unit, Laporan Pelaksanaan Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I 13 laporan, Laporan Pelaksanaan Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II 13 laporan, Laporan Pelaksanaan Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III 13 Laporan, Laporan Pelaksanaan Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV 13 laporan, Laporan Pelaksanaan Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan

Wilayah V 13 laporan, Laporan Pelaksanaan Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI 13 laporan.

- Terpeliharanya Jalan Provinsi yang Terpelihara di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I 260 Km, Jalan Provinsi yang Terpelihara di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II 259 Km, Jalan Provinsi yang Terpelihara di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III 198,83 Km, Jalan Provinsi yang Terpelihara di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV 220,7 Km, Jalan Provinsi yang Terpelihara di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V 177,88 Km, Jalan Provinsi yang Terpelihara di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI 211,24 Km.
- Pembangunan Jembatan, dengan output: Terbayarkannya Pelunasan Pembayaran Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran Pembangunan Jembatan Batu Bala (P.086) 1 unit, Pelunasan Pembayaran Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran Pembangunan Jembatan Sikali (P.084) 1 unit, Pengadaan Rangka Baja Jembatan RS Unand 1 unit.
- Penggantian Jembatan, dengan output: Tersedianya Dokumen Pengawasan Penggantian Jembatan 1 dokumen, Tergantunya Jembatan Bt. Namang (P.069.2) 15 meter, Jembatan Kayu Aro (P.071) 20 meter.
- Rehabilitasi Jembatan, dengan output: Tersedianya Dokumen Pengawasan Rehabilitasi Jembatan 1 dokumen, Terehabilitasinya jembatan di Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086) 165 meter, Jembatan Sunur yang dilaksanakan pengecatan 80 meter.
- Pemeliharaan Rutin Jembatan, dengan output: Tersedianya Penanganan Unit Layanan Gangguan Jalan dan Jembatan dalam kondisi kritis/bencana alam 1 laporan.
- Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat, dengan output: Tersedianya Laporan Dokumen Perencanaan Teknis Pekerjaan Mendesak dan Akibat Bencana Alam 1 dokumen.
- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, dengan output: Tersedianya laporan Pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan provinsi 13 laporan, Laporan RKT PKS Jalan

Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) 12 laporan.

- Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, dengan output: Tersedianya dokumen Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum Provinsi 1 dokumen, Alat-alat Ukur pada Laboratorium Pengujian 7 unit, Laporan Moitoring Pengendalian Mutu UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi 13 laporan, Terkelolanya Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Ke-PU-an 10 unit.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d. Sasaran IV : Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak, dengan indikator :

- 1) Persentase Cakupan Air Minum (Target Kinerja : 82%) (Realisasi Kinerja : 83,78%) dengan capaian kinerja : 102,17%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, dengan output: Tersusunnya Dokumen DED dan Dokling SPAM Regional Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman 1 laporan, Dokumen DED dan Dokling SPAM Regional Kab. Solok dan Kota Solok 1 laporan, Dokumen FS, DED dan Dokumen Lingkungan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh 3 dokumen, Dokumen Penyiapan Pembebasan Lahan SPAM Regional Agam – Bukittinggi 1 dokumen.
- Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan, dengan output: Terbangunnya SPAM Kawasan Singgalang yang Terbangun PDRI Koto Tinggi 1 lokasi, SPAM Kawasan Singgalang 1 lokasi.
- Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota, dengan output: Tersusunnya Laporan Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat 1 laporan, Laporan Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Provinsi



Sumatera Barat 1 laporan, Laporan Pendampingan Untuk Pemenuhan Penyusunan Capaian SPM Air Minum dan Sanitasi 1 laporan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

e. Sasaran V : Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Cakupan Sanitasi (Target Kinerja : 82%) (Realisasi Kinerja : 83,08%) dengan capaian kinerja : 101,32%.
- 2) Persentase Cakupan Sanitasi (Target Kinerja : 82%) (Realisasi Kinerja : 83,08%) dengan capaian kinerja : 101,32%.
- 3) Persentase Cakupan Sanitasi (Target Kinerja : 82%) (Realisasi Kinerja : 83,08%) dengan capaian kinerja : 101,32%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

(1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi, dengan output : Tersusunnya Dokumen Studi Identifikasi Timbulan Sampah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat 1 dokumen, Studi Kelayakan, Dokumen Lingkungan dan DED TPA Regional Padang Pariaman 4 TPA, Studi Kelayakan TPA Regional Agam – Bukittinggi 4 TPA, Profil TPA Regional Padang Pariaman 1 dokumen.
- Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi, dengan output: Terbangunnya Pengembangan Bangunan TPA Sampah Regional Payakumbuh 1 lokasi, Pengembangan Bangunan TPA Sampah Regional Solok 4 TPA, Sel Sampah Sementara TPA Sampah Regional Payakumbuh 1 lokasi, dan Terlaksananya Penanganan Bangunan TPA Sampah Regional Payakumbuh 1 lokasi.

b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

(1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut:

- Supervis Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, dengan output: Terasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP) untuk 5 kabupaten/Kota.
- c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dicapai dengan pelaksanaan :
- (1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya, dengan output: Tersusunya dokumen DED pembangunan drainase primer lintas kab/kota Agam – Bukittinggi 1 dokumen, terbangunnya Panjang lanjutan pembangunan Drainase jalan Agus Salim 65 meter, Jalan Gajah Mada 65 meter, Jalan Khatib Sulaiman 65 meter, Jalan Panglima Polim 65 meter, drainase primer Lundang - Daya Bangun 400 meter, dan Panjang Drainase pembangunan drainase primer Lundang - Daya Bangun 250 meter.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V.

- f. Sasaran VI : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis
- 1) Presentase bangunan strategis terbangun (Target Kinerja : 40,20%) (Realisasi Kinerja : 6%) dengan capaian kinerja : 14,93%.
- 2) Presentase bangunan strategis terbangun (Target Kinerja : 20%) (Realisasi Kinerja : 2,5%) dengan capaian kinerja : 12,5%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penataan Bangunan Gedung, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :
- (1) Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, dengan output: Terlaksananya Assessment Bangunan Pondasi (Base Isolator) Gedung Escape Building dan Gedung Kantor

Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat 1 dokumen, Pematangan Lahan Gerbang Batas Provinsi di Kab. 50 Kota 1 unit dan Kab. Dharmasraya 1 unit, Pembangunan Fasilitas Penunjang Pengolahan Limbah B3 Kota Padang 1 unit, Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Lanjutan) 1 unit, Pembangunan Guest House Gubernur (Lanjutan) 1 unit, Pembangunan Parkir dan Halaman RS Achmad Mochtar 1 unit, Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami SDN 2 Maligi Kec. Ranah Pasisia 1 unit, Pembangunan TPS dan Ruang Pencucian di Lokasi Pengolahan Limbah B3 Kota Padang 1 unit, Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat 1 unit, Pengaspalan Jalan Kawasan Kantor Gubernur Sumatera Barat 1 unit, Rehab Fasilitas Lapangan Teknis Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat 1 unit, Pembangunan Area Parkir dan Akses Jalan Kawasan Istana Gubernur Sumatera Barat 1 unit, dan Tersusunnya Dokumen Batas Gerbang Batas type 2 1 dokumen, Dokumen DED Review Gedung Kebudayaan Sumatera Barat 1 dokumen, Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Tahap VII) Tahun 2021 1 laporan, Pembayaran Sisa Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat Tahun 2022 1 laporan, Pemeliharaan Gerbang Batas Sumatera Barat dengan Riau (Kab. 50 Kota) 1 laporan, Pengujian dan Analisis Kelayakan Pembesian Kolom dan Balok Struktur Eksisting, Zone B dan Zone C Gedung Kebudayaan Sumatera Barat 1 dokumen, Penyusunan DED Bangunan Gedung Pendukung PENASTANI 2023 1 dokumen, Penyusunan DED Infrastruktur Pendukung PENASTANI 2023 1 dokumen, Dokumen DED Amphitheatre Pagaruyung Kab. Tanah Datar 1 dokumen, Dokumen DED Amphitheatre Puncak Paku Kab. Pesisir Selatan 1 dokumen, Dokumen DED Gerbang Batas Provinsi Sumatera Barat 1 dokumen, Dokumen FS dan Dokling Gedung Kantor PPIPTEK 1 dokumen, Dokumen FS, DED dan Dokling Shelter SLB 2 Sumatera Barat 1 dokumen, Dokumen FS, DED dan Dokumen Lingkungan Gedung MUI Provinsi Sumatera Barat 1 dokumen, Dokumen FS Shelter Tanjung Mutiara Kab. Agam 1 dokumen.

➤ Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan

- Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, dengan output: Terlaksananya Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat 1 unit.
- Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi, dengan output: Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat 1 laporan, Terlaksananya Assesmen Bangunan Gedung Negara di Provinsi Sumatera Barat 78 bangunan.
  - Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara, dengan output: Tersusunnya Laporan Hasil Pendampingan, Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara 1 laporan.
- b) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :
- (1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan output: Tersusunnya DED Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tenggara 1 dokumen, Dokumen Kajian Teknis, DED, Dokling, Rest Area Perbatasan Kota Padang - Kota Solok 1 dokumen.
  - Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan, dengan output: Tersusunnya Laporan Supervisi Penataan RTH diperbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tenggara 1 laporan.
  - Penataan Bangunan dan Lingkungan, dengan output: Terbangunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tenggara 1 RTH.
  - Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota, dengan output: Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi/ Bimbingan Teknis/ Lokakarya/ FGD 3 kegiatan.
  - Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan, dengan output: Tersusunnya Laporan Pengendalian Kegiatan Keciaptakaryaan di Provinsi

Sumatera Barat 13 laporan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VI.

g. Sasaran VII : Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan, dengan indikator kinerja :

1) Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi (Target Kinerja : 86%) (Realisasi Kinerja : 86%) dengan capaian kinerja : 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

(1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :

➤ Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi, dengan output: Tersedianya persetujuan substansi RTRW Provinsi Sumatera Barat 1 Perda.

➤ Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang, dengan output: Terlaksananya kegiatan sosialisasi dengan jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang 100 orang, jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan terhadap Penataan Ruang 100 orang.

(2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :

➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi, dengan output: Tersusunnya Dokumen RRTR Kawasan Museum dan Monumen PDRI 1 dokumen, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Teknis RDTR Kawasan Arosuka 1 dokumen.

➤ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota, dengan output: Tersedianya Evaluasi Rancangan Perda tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 2 dokumen, Pendampingan Rancangan Perda tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 2 dokumen.

➤ Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, dengan output: Tersedianya advertori

penyebarluasan bahan informasi dan komunikasi pentaan ruang 4 advertorial media, peserta kampanye publik penataan ruang 100 orang, Publikasi Media Online dan Media Sosial 2 kali, talkshow penyebarluasan bahan informasi dan komunikasi pentaan ruang 2 talkshow radio.

(3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah, dengan output: Tersedianya Dokumen koordinasi progres fisik dan keuangan bidang penataan ruang 13 dokumen, dokumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota 1 dokumen, Dokumen Rencana Infrastruktur Kawasan Bukapalipatar 1 dokumen, Dokumen RRTR Kawasan Museum dan Monumen PDRI 1 dokumen, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah 5 kali.
- Sistem Informasi Penataan Ruang, dengan output: Terlaksananya Update Data Aplikasi SIMTARU 1 sistem aplikasi, Update Data Kebijakan Satu Peta (One Map One Policy) 1 sistem aplikasi.

(4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang, dengan output: Tersedianya Laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 1 laporan.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang, dengan output : Tersedianya Laporan Hasil Audit Tata Ruang 1 laporan.
- Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang, dengan output: Terlaksananya Pengumpulan Bahan dan keterangan (Pulbaket) 1 laporan.
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, dengan output: Terlaksananya Rapat Khusus Forum Penataan Ruang (TKPRD) 3 kali, Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang (TKPRD) 2 kali, Rapat Rutin Forum

Penataan Ruang (TKPRD) 10 kali.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VII.

**3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran**

No	Program/Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA</b>				<b>370.187.484.295</b>	<b>350.526.954.049,26</b>	<b>94,69</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>41.073.846.990</b>	<b>40.267.645.602</b>	<b>98,04</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				385.190.280	361.140.776	93,76
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	111.513.360	106.330.490	95,35
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7.228.500	6.444.450	89,15
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	8.063.500	5.751.400	71,33
	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	10.000.000	9.972.325	99,72
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	20.000.000	18.647.400	93,24
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	49.739.500	45.405.735	91,29
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100	178.645.420	168.588.976	94,37
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>30.873.868.765</b>	<b>30.338.865.249</b>	<b>98,27</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang	350 Orang	100	29.626.284.099	29.105.465.470	98,24
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	100	1.247.584.666	1.233.399.779	98,86
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>245.788.500</b>	<b>232.416.583</b>	<b>94,56</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	245.788.500	232.416.583	94,56
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>360.908.250</b>	<b>325.092.228</b>	<b>90,08</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	352 Stel	352 Stel	100	264.000.000	237.749.000	90,06

No	Program/Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Kali	20 Kali	100	96.908.250	87.343.228	90,13
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				1.176.907.963	1.166.226.525	99,09
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Dinas	1 Dinas	100	40.000.000	38.885.580	97,21
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Dinas	1 Dinas	100	130.000.000	129.921.402	99,94
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Set	1 Set	100	149.971.000	149.533.229	99,71
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Set	1 Set	100	26.560.000	26.400.000	99,40
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100	742.706.401	736.104.992	99,11
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Arsip	1 Arsip	100	87.670.562	85.381.322	97,39
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				534.628.531	472.067.084	88,30
	Pengadaan Mebel	44 Unit	44 Unit	100	216.832.650	180.523.344	83,25
		26	26				
		1 Unit	1 Unit				
		5	5				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Set	1 Set	100	317.795.881	291.543.740	91,74
		2 Unit	2 Unit				
		2	2				
		44 Unit	44 Unit				
		44 Unit	44 Unit				
		1 Set	1 Set				
		1 Unit	1 Unit				
		1 Unit	1 Unit				
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				4.716.787.300	4.653.221.618	98,65
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Surat	12 Surat	100	11.485.000	10.922.000	95,10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19 Kali	19 Kali	100	1.669.178.100	1.627.800.663	97,52
		12 Bulan	12 Bulan				
		9700 Menit	9700 Menit				
		9000 Meter Kubik	9000 Meter Kubik				
		770000 KVA	770000 KVA				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78 Orang	78 Orang	100	3.036.124.200	3.014.498.955	99,29
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				2.779.767.401	2.718.615.539	97,80
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit	15 Unit	100	681.200.000	680.457.966	99,89
		1 Laporan	1 Laporan				
		30 Unit	30 Unit				
		15 Unit	15 Unit				



No	Program/Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dinas	1 Dinas	100	128.337.500	103.538.650	80,68
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	100	1.970.229.901	1.934.618.923	98,19
		7 Unit	7 Unit				
		1 Unit	1 Unit				
		1 Unit	1 Unit				
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>				<b>1.660.337.809</b>	<b>1.563.785.466,80</b>	<b>94,18</b>
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten /Kota</b>				1.660.337.809	1.563.785.466,80	94,18
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Laporan	1 Laporan	100	1.097.337.400	1.059.694.336,80	96,57
		1 Laporan	1 Laporan				
		3 Dokumen	3 Dokumen				
		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Perbaikan SPAM Jaringan Peipaian	1 Lokasi	1 Lokasi	100	174.625.843	152.411.915	87,28
		1 Lokasi	1 Lokasi				
	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100	388.374.566	351.679.215	90,55
		1 Laporan	1 Laporan				
		1 Laporan	1 Laporan				
III	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>				<b>718.855.760</b>	<b>705.275.800</b>	<b>98,11</b>
1	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>				718.855.760	705.275.800	98,11
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	103.855.760	100.472.800	96,74
		4 TPA	4 TPA				
		4 TPA	4 TPA				
		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	1 Lokasi	1 Lokasi	100	615.000.000	604.803.000	98,34
		4 TPA	4 TPA				
		1 Lokasi	1 Lokasi				
		1 Lokasi	1 Lokasi				
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>				<b>357.743.700</b>	<b>352.714.189</b>	<b>98,59</b>
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>				357.743.700	352.714.189	98,59



No	Program/Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Unit	1 Unit	100	520.000.000	513.773.500	98,80
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100	125.375.758	124.056.027	98,95
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	78 Bangunan	78 Bangunan	100	233.159.818	227.380.522	97,52
	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	1 Laporan	1 Laporan	100	75.808.383	75.536.570	99,64
VII	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>				<b>1.604.917.554</b>	<b>1.490.937.966</b>	<b>92,90</b>
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.604.917.554	1.490.937.966	92,90
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	148.478.499	104.037.871	70,07
	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Laporan	1 Laporan	100	97.331.352	86.188.000	88,55
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 RTH	1 RTH	100	546.089.189	536.733.952	98,29
	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota (UPTD Pengawasan dan Pengendalian bangunan dan Gedung)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	581.880.814	538.365.147	92,52
	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	13 Laporan	13 Laporan	100	231.137.700	225.612.996	97,61
VIII	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>				<b>272.058.925.993</b>	<b>257.012.759.145,58</b>	<b>94,47</b>
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi				272.058.925.993	257.012.759.145,58	94,47

No	Program/Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																														
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis perencanaan jalan dan jembatan	7 Dokumen	7 Dokumen	100	3.230.127.291	3.208.262.529,92	99,32																																																																																																																																																																																																														
		4 Dokumen	4 Dokumen						Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	8.200.000.000	7.667.047.397	93,50		75%	1		2 Ha	2 Ha		Pembangunan Jalan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	29.652.035.055	24.652.375.659	83,14		1 Dokumen	1 Dokumen		1.35 Km	1.35 Km		0.15 Km	0.15 Km		0.2 Km	0.2 Km		1 Km	1 Km		0.295 Km	0.295 Km		1.787 Km	1.787 Km		0.06 Km	0.06 Km		1 Dokumen	1 Dokumen						Pelebaran Jalan Menuju Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100	10.752.507.835	10.743.437.219,88	99,92		1.1 Km	1.1 Km		1.125 Km	1.125 Km		0,4 Km	0,4 Km		Pelebaran Jalan Menambah Lajur	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2.493.598.273	982.121.611,92	39,39		0.15 Km	0.15 Km		Rekonstruksi Jalan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	58.496.194.746	52.740.980.416,40	90,16		2 Dokumen	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		0,5 Km	0,5 Km		0,5 Km	0,5 Km		0,045 Km	0,045 Km		0.382 Km	0.382 Km		0.51 Km	0.51 Km		0.51 Km	0.51 Km		0.9 Km	0.9 Km		0.16 Km	0.16 Km		2.05 Km	2.05 Km		0,08 Km	0,08 Km		0.603 Km	0.603 Km		0.09 Km	0.09 Km		0.12 Km	0.12 Km		0.04 Km	0.04 Km		0.041 Km	0.041 Km		0.0375 Km	0.0375 Km		0.625 Km	0.625 Km		0.325 Km	0.325 Km		0.86 Km	0.86 Km		0.1 Km	0.1 Km		3 Km	3 Km		1.515 Km	1.515 Km		0.55 Km	0.55 Km		1 Dokumen	1 Dokumen						Rehabilitasi Jalan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	64.096.772.405	62.613.586.557,90	97,69		2 Dokumen	2 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen		6 Unit	6 Unit		3 Unit	3 Unit		103.42 Km	103.42 Km		46.78 Km	46.78 Km		21.5 Km	21.5 Km		Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I - Pasaman)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7.886.214.894
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	8.200.000.000	7.667.047.397	93,50																																																																																																																																																																																																														
		75%	1																																																																																																																																																																																																																		
		2 Ha	2 Ha																																																																																																																																																																																																																		
	Pembangunan Jalan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	29.652.035.055	24.652.375.659	83,14																																																																																																																																																																																																														
		1 Dokumen	1 Dokumen																																																																																																																																																																																																																		
		1.35 Km	1.35 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.15 Km	0.15 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.2 Km	0.2 Km																																																																																																																																																																																																																		
		1 Km	1 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.295 Km	0.295 Km																																																																																																																																																																																																																		
		1.787 Km	1.787 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.06 Km	0.06 Km																																																																																																																																																																																																																		
	1 Dokumen	1 Dokumen																																																																																																																																																																																																																			
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100	10.752.507.835	10.743.437.219,88	99,92																																																																																																																																																																																																														
		1.1 Km	1.1 Km																																																																																																																																																																																																																		
		1.125 Km	1.125 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0,4 Km	0,4 Km																																																																																																																																																																																																																		
	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2.493.598.273	982.121.611,92	39,39																																																																																																																																																																																																														
		0.15 Km	0.15 Km																																																																																																																																																																																																																		
	Rekonstruksi Jalan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	58.496.194.746	52.740.980.416,40	90,16																																																																																																																																																																																																														
		2 Dokumen	2 Dokumen																																																																																																																																																																																																																		
		1 Dokumen	1 Dokumen																																																																																																																																																																																																																		
		0,5 Km	0,5 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0,5 Km	0,5 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0,045 Km	0,045 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.382 Km	0.382 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.51 Km	0.51 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.51 Km	0.51 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.9 Km	0.9 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.16 Km	0.16 Km																																																																																																																																																																																																																		
		2.05 Km	2.05 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0,08 Km	0,08 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.603 Km	0.603 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.09 Km	0.09 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.12 Km	0.12 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.04 Km	0.04 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.041 Km	0.041 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.0375 Km	0.0375 Km																																																																																																																																																																																																																		
		0.625 Km	0.625 Km																																																																																																																																																																																																																		
	0.325 Km	0.325 Km																																																																																																																																																																																																																			
	0.86 Km	0.86 Km																																																																																																																																																																																																																			
	0.1 Km	0.1 Km																																																																																																																																																																																																																			
	3 Km	3 Km																																																																																																																																																																																																																			
	1.515 Km	1.515 Km																																																																																																																																																																																																																			
	0.55 Km	0.55 Km																																																																																																																																																																																																																			
	1 Dokumen	1 Dokumen																																																																																																																																																																																																																			
	Rehabilitasi Jalan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	64.096.772.405	62.613.586.557,90	97,69																																																																																																																																																																																																														
		2 Dokumen	2 Dokumen																																																																																																																																																																																																																		
		3 Dokumen	3 Dokumen																																																																																																																																																																																																																		
		6 Unit	6 Unit																																																																																																																																																																																																																		
		3 Unit	3 Unit																																																																																																																																																																																																																		
		103.42 Km	103.42 Km																																																																																																																																																																																																																		
		46.78 Km	46.78 Km																																																																																																																																																																																																																		
	21.5 Km	21.5 Km																																																																																																																																																																																																																			
	Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I - Pasaman)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7.886.214.894	7.877.263.148,56	99,89																																																																																																																																																																																																														
		1 Dokumen	1 Dokumen																																																																																																																																																																																																																		

No	Program/Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		246.6 Km	246.6 Km				
		67.79 Km	67.79 Km				
		61.01 Km	61.01 Km				
		61.01 Km	61.01 Km				
	Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II - Payakumbuh)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7.796.556.380	7.794.849.052	99,98
		249.88 Km	249.88 Km				
	Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III - Bukittinggi)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	6.007.429.000	6.007.405.000	100
		191.56 Km	191.56 Km				
	Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV - Solok)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	5.138.523.605	5.137.022.946	99,97
		172.2 Km	172.2 Km				
	Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V - Sijunjung)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	5.439.158.032	5.439.093.070	100
		173.18 Km	173.18 Km				
	Rehabilitasi Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI - Pariaman)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3.357.227.025	3.356.896.374	99,99
		118.59Km	118.59Km				
	Pemeliharaan Berkala Jalan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	35.754.451.800	35.305.401.682	98,74
		1 Dokumen	1 Dokumen				
		1 Dokumen	1 Dokumen				
		1 Dokumen	1 Dokumen				
		1 Dokumen	1 Dokumen				
		1 Dokumen	1 Dokumen				
		0.8 Km	0.8 Km				
		2.55 Km	2.55 Km				
		0.2 Km	0.2 Km				
		0.1 Km	0.1 Km				
		1.125 Km	1.125 Km				
		4 Km	4 Km				
		3.6 Km	3.6 Km				
		1.6 Km	1.6 Km				
		0.2 Km	0.2 Km				
		3.125 Km	3.125 Km				
	0.2 Km	0.2 Km					
	0.2 Km	0.2 Km					
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Workshop dan Peralatan)	30 Unit	30 Unit	100	2.053.254.806	2.004.348.174	97,62
		350 Buah	350 Buah				
		2 Unit	2 Unit				
		2 Unit	2 Unit				
		34 Unit	34 Unit				
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I - Pasaman)	13 Laporan	13 Laporan	100	923.331.490	923.239.529	99,99
		260 Km	260 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II - Payakumbuh)	13 Laporan	13 Laporan	100	955.716.860	954.278.769	99,85
		259 Km	259 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III - Bukittinggi)	13 Laporan	13 Laporan	100	775.384.415	775.355.675	100
		198.83 Km	198.83 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV - Solok)	13 Laporan	13 Laporan	100	840.544.592	838.127.942	99,71
		220.7 Km	220.7 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V - Sijunjung)	13 Laporan	13 Laporan	100	712.062.338	712.024.504	99,99
		177.88 Km	177.88 Km				

No	Program/Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI - Pariaman)	13 Laporan	13 Laporan	100	812.923.808	811.182.804	99,79
		211.24 Km	211.24 Km				
	Pembangunan Jembatan	1 Unit	1 Unit	100	4.537.164.329	4.509.972.740	99,40
		1 Unit	1 Unit				
		1 Unit	1 Unit				
	Penggantian Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7.031.002.100	7.025.487.537	99,92
		15 Meter	15 Meter				
		20 Meter	20 Meter				
	Rehabilitasi Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	473.077.713	455.131.072	96,21
		165 Meter	165 Meter				
		80 Meter	80 Meter				
	Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Workshop dan Peralatan)	1 Laporan	1 Laporan	100	1.755.878.775	1.755.525.018	99,98
	Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	1 Dokumen	1 Dokumen	100	99.114.850	92.586.400	93,41
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	13 Laporan	13 Laporan	100	1.437.671.745	1.330.327.200	92,53
		12 Laporan	12 Laporan				
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	77.008.604	41.002.956	53,24
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (UPTD laboratorium Bahan Konstruksi)	7 Unit	7 Unit	100	1.273.993.227	1.258.426.161	98,78
		13 Laporan	13 Laporan				
		10 Unit	10 Unit				
IX	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>				<b>3.268.907.276</b>	<b>2.645.179.253</b>	<b>80,92</b>
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi				993.313.098	796.192.135	80,16
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1 Perda	1 Perda	100	815.348.869	630.190.791	77,29
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	100 Orang	100 Orang	100	177.964.229	166.001.344	93,28
		100 Orang	100 Orang				
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang				1.065.423.581	874.332.862	82,06
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	634.399.699	525.169.554	82,78
		1 Laporan	1 Laporan				
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100	128.298.182	73.654.168	57,41
		2 Dokumen	2 Dokumen				
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	4 Advertorial Media	4 Advertorial Media	100	302.725.700	275.509.140	91,01
		100 orang	100 orang				
		2 Kali	2 Kali				

No	Program/Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 Talkshow Radio	2 Talkshow Radio				
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				584.994.279	489.719.156	83,71
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	100	332.949.653	321.251.443	96,49
		1 Dokumen	1 Dokumen				
		1 Dokumen	1 Dokumen				
		1 Dokumen	1 Dokumen				
		5 kali	5 kali				
	Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Sistem Aplikasi	1 Sistem Aplikasi	100	252.044.626	168.467.713	66,84
		1 Sistem Aplikasi	1 Sistem Aplikasi				
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				625.176.318	484.935.100	77,57
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan	100	38.075.137	32.034.813	84,14
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan	100	271.274.368	227.576.793	83,89
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	10 Kali	10 Kali	100	86.888.187	49.862.641	57,39
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 Kali	3 Kali	100	228.938.626	175.460.853	76,64
		2 Kali	2 Kali				
		10 Kali	10 Kali				

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi</b>		
	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya		
	- DED Drainase Primer Kota Bukittinggi - Kab. Agam	Beberapa masyarakat tidak menyetujui pekerjaan drainase primer tersebut	Melakukan koordinasi dengan kepala adat dan tokoh masyarakat yang berpengaruh
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		
1	<b>Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>		
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tidak terdapat permasalahan	-
	- Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat	Adanya kelalaian dari pihak penyedia jasa	Dilakukan percepatan pekerjaan
	- Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami SDN 2 Maligi Kec. Ranah Pasisia	Jalan akses sulit, sehingga menghambat distribusi material dan berjalannya proyek	Mencari batching plan lain yg bersedia memberikan dukungan ke lokasi pekerjaan melewati jalan lain, memperbaiki jalan akses
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>		
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		
1	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>		
	Pembangunan Jalan	Tidak terdapat permasalahan	
	- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Sikaping - Talu (P.096)	Kondisi medan lokasi pekerjaan yang cukup berat	Menambah peralatan dan personil di lapangan
		Akses menuju lokasi cukup sulit karena melewati jalan tanah sehingga sulit dilewati untuk pengangkutan material	Melakukan pembenahan terhadap akses yang sulit dilewati
		Curah hujan yang cukup ekstrim pada lokasi pekerjaan	Memberikan kesempatan bekerja kepada penyedia melewati tahun anggaran 2022 dengan denda maksimal 50 hari
	- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK	Kondisi medan lokasi pekerjaan yang cukup berat	Menambah peralatan dan personil di lapangan
		Akses menuju lokasi terhambat kurang lebih 1 bulan karena terjadi badan jalan terban dan longsor menuju lokasi pekerjaan	Melakukan pembenahan terhadap akses dan menuju lokasi pekerjaan
		Curah hujan yang cukup ekstrim pada lokasi pekerjaan	Memberikan kesempatan bekerja kepada penyedia melewati tahun anggaran 2022 dengan denda pekerjaan maksimal 50 hari
	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur		
	- Pelebaran Jalan Menambah Lajur di Ruas Kubu Kerambil - Batu Sangkar (P.035)	Cash Flow	PPTK/PPKom sudah memberikan Peringatan 1 s/d 3
		Koordinasi yang kurang di lapangan	PPKom sudah memberikan Test Case / Uji Coba Pelaksanaan sebanyak 3 kali namun gagal



No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Abai Sangir</li> <li>- Sei. Dareh (P.056.3)</li> </ul>	Personil kontraktor kurang memahami pekerjaan di lapangan	Memberikan kesempatan kepada Kontraktor utk menyelesaikan pekerjaan dengan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan oleh Kontraktor diatas Materai
		Kontraktor Tidak menempatkan personil lapangan yang sesuai dan paham dg pekerjaan	Membuat Adendum Pemberian Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kalender
			PPK sudah membantu kontraktor untuk mendatangkan material Agg Klass B dan Agg Klass A ke lokasi pekerjaan
			Sudah dibantu dalam pembuatan schedule terhadap pekerjaan yang tersisa dan melewati tahun anggaran
			Jika cash flow kontraktor baik, maka Inshaa Allah pekerjaan selesai
		Ada banyak hal yang menjadi penyebab kealahn penyedia jasa diantaranya pembelian baha, keterlambatan mobilisasi alat dan tenaga atau keterlambatan dalam melakukan pekerjaan sehingga target kemajuan pekerjaan yang sudah disepakati	Kepada penyedia jasa sudah diberikan teguran tiga kali dan juga sudah dilakukan SCM tiga kali, dan juga diberikan uji coba namun sampai yang ketiga kali juga gagal. Memberi kesempatan kepada penyedia jasa untuk melanjutkan pekerjaan dengan denda selama 50 hari kedepan
	- Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Malako - Abai Sangir (P.056.2)	Ada banyak hal yang menjadi penyebab kealahn penyedia jasa diantaranya pembelian baha, keterlambatan mobilisasi alat dan tenaga atau keterlambatan dalam melakukan pekerjaan sehingga target kemajuan pekerjaan yang sudah disepakati	Kepada penyedia jasa sudah diberikan teguran tiga kali dan juga sudah dilakukan SCM tiga kali, dan juga diberikan uji coba namun sampai yang ketiga kali juga gagal. Memberi kesempatan kepada penyedia jasa untuk melanjutkan pekerjaan dengan denda selama 50 hari kedepan
	- Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Simp. Koto Mambang-Balingka (P.078)	Kontraktor CV. Zaid Dharmawangsa Wiranata tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak	PPK sudah mencoba membantu mengatasi permasalahan cash flow yang terjadi pada penyedia dengan memberikan uang muka sebesar 25% dari nilai kontrak
		Tidak tersedianya personil yang memadai sehingga proses administrasi tidak bisa diselesaikan	PPK bersama dengan konsultan pengawas memanggil staf teknik penyedia untuk segera menyelesaikan laporan dan BOQ hasil rekayasa lapangan dengan tujuan agar dapat diberikan pengarahannya untuk menjadi MC 0
		Tidak tersedianya <i>cash flow</i> yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan	Setelah diberikan uang muka, penyedia belum juga memulai pekerjaan sementara progres makin minus, sehingga PPK memberikan surat percepatan pelaksanaan sekaligus sebagai peringatan
			PPK sudah memberikan teguran sampai 3 kali dan ditindak lanjut dengan SCM I, II, dan III tidak dihadiri dan pelaksanaan pekerjaan tetap tidak berjalan
			Selain teguran dari PPK dan SCM I s/d III pihak penyedia juga diperingatkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
			Surat peringatan proses pemutusan kontrak oleh KPA juga tidak ada respon dari penyedia
IX	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		-
1	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>		

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Penetapan RTRW menunggu persetujuan teknis pada RZWP3K	Meningkatkan koordinasi dengan Tim RZWP3K
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Permintaan materi terkait tema sosialisasi dari OPD kabupaten/kota belum dapat terakomodir semuanya	Membuat skala prioritas tema sosialisasi sesuai dengan keterbutuhan kabupaten/kota
<b>2</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Rendahnya tingkat koordinasi dalam penyusunan RRTR kabupaten/kota	Memberikan bantuan teknis untuk penyusunan RRTR kabupaten/kota
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Kurangnya/belum tersedianya anggaran pada kabupaten/kota untuk menyusun RTRW dan RRTR	Memberikan bantuan teknis untuk penyusunan RRTR kabupaten/kota
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Antusias masyarakat dalam menerima pemahaman mengenai tata ruang tidak diimbangi dengan dukungan anggaran	Mengurangi acara talkshow guna memenuhi kebutuhan anggaran untuk pengenalan tata ruang kepada masyarakat secara langsung melalui petarung (pelajar tata ruang)
<b>3</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>		
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Pengadaan server yang sesuai dengan standar geoportal	Mengurangi kapasitas server sesuai dengan anggaran yang ada
<b>4</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Belum terdapat peraturan mengenai mekanisme detail pemberian insentif dan disinsentif	Melakukan identifikasi kebutuhan insentif dan disinsentif versi kabupaten/kota
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Provinsi tidak memiliki PPNS Tata Ruang	Melakukan usulan PPNS dan usulan diklat PPNS, dan FGD peningkatan peran PPNS

### 3.1.1.3.2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.148.717.709.702,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.139.247.103.124,00 atau 93,63%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya kinerja sistem irigasi	<b>Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	72,18%	71,06%	98,45
II	Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air	<b>Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	58,50%	58,73%	100,39
III	Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air	<b>Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	66,51%	66,90%	100,59

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
IV	Meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi	<b>Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	Persentase tenaga ahli konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	20,32%	20,33%	100,03
V	Meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi	<b>Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik	90,00%	92,54%	102,82
VI	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Nilai akuntabilitas kinerja	A	-	-
VII	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80,40	85,43	106,26

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya kinerja sistem irigasi, dengan Indikator Kinerja :

1) Indeks Kinerja Sistem Irigasi (Target Kinerja: 72,18%) (Realisasi Kinerja : 71,06%) dengan capaian kinerja : 98,45%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dicapai dengan pelaksanaan :

(1) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dengan output tersusunnya dokumen DED bendung, DED jaringan irigasi dan perencanaan petak tersier sebanyak 23 dokumen.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan output terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 10.939,75 meter.
- Rehabilitasi Bendung Irigasi dengan output terlaksananya trehabilitasi bendung sebanyak 7 unit.
- Operasional Unit Pengelola Irigasi dengan output tersedianya dan terlaksananya operasional unit pengelola irigasi kewenangan provinsi.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air, dengan Indikator Kinerja :

- 1) Persentase volume tampungan sumber-sumber air (Target Kinerja : 58,50%) (Realisasi Kinerja : 58,73%) dengan capaian kinerja : 100,39%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dicapai dengan pelaksanaan :

- (1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya dengan output terbangunnya embung sebagai penampungan air dengan penambahan daya tampung sebesar 619,46 M<sup>3</sup>.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air, dengan Indikator kinerja :

- 1) Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (Target Kinerja : 66,51%) (Realisasi Kinerja : 66,59%) dengan capaian kinerja : 100,59%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dicapai dengan pelaksanaan :

- (1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku dengan output terlaksananya penyusunan dokumen rencana teknis untuk konstruksi air tanah dan air baku, dokumen penelitian konservasi air tanah sebanyak 7 dokumen :
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai dengan output terlaksananya penyusunan dokumen Dokumen Lingkungan Hidup (SPPL, UKL/UPL, AMDAL), Dokumen Rencana Teknis (SID/DED) sungai

dan embung sebanyak 14 dokumen.

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dengan output terlaksananya pembangunan bangunan perkuatan tebing sungai sepanjang 3.646,2 meter.
- Pembangunan Check Dam dengan output terlaksananya pembangunan check dam sungai sepanjang 12 meter.
- Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya dengan output terlaksananya pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai sepanjang 354 meter.
- Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing dengan output terlaksananya rehabilitasi bangunan perkuatan tebing sepanjang 75 meter.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d. Sasaran IV : Meningkatnya kompetensi SDM bidang jasa konstruksi dengan Indikator Kinerja :

- 1) Persentase tenaga ahli konstruksi yang terlatih dan bersertifikat (Target Kinerja : 20,32%) (Realisasi Kinerja : 20,33%) dengan capaian kinerja : 100,03%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dicapai dengan pelaksanaan :
  - (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan dengan output terlaksananya TOT tenaga ahli sebanyak 1 kegiatan.
    - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dengan output terlaksananya pelatihan terhadap tenaga ahli konstruksi sebanyak 250 orang.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

e. Sasaran V : Meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi, dengan Indikator Kinerja :

- 1) Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik (Target Kinerja : 90,00%) (Realisasi Kinerja : 92,54%) dengan capaian kinerja : 106,26%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

1) Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dicapai dengan pelaksanaan :

i. Kegiatan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi dengan output terlaksananya pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja penyedia jasa konstruksi sebanyak 67 penyedia.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V.

f. Sasaran VI : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan Indikator Kinerja :

1) Nilai akuntabilitas kinerja (Target Kinerja : A) (Realisasi Kinerja : -) dengan capaian kinerja :

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan :

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan :

- Penyusunan dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VI.

g. Sasaran VII : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan

Indikator Kinerja :

- 1) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (Target Kinerja : 80,40) (Realisasi Kinerja : 85,43) dengan capaian kinerja : 106,26%

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan :
  - (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - (2) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah Tertib administrasi barang milik daerah.
  - (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tertib administrasi kepegawaian.
  - (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tertib administrasi umum.
  - (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tertib penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.
  - (6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tertib pemeliharaan barang milik daerah.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VI.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI</b>				118.003.095.919	108.979.709.283	92,35
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				20.466.529.872	19.061.766.284	93,14
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	1.169.302.027	1.146.268.590	98,03
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100	13.922.369.345	12.958.130.262	93,07
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100	175.801.650	172.975.705	98,39

No	Program/Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100	352.451.000	325.779.491	92,43
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100	1.231.004.560	1.132.099.323	91,97
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100	2.188.282.540	1.947.086.764	88,98
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100	1.427.318.750	1.379.426.149	96,64
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>				<b>94.185.368.047</b>	<b>86.635.230.915</b>	<b>91,98</b>
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18 kab/kota	18 kab/kota	100	48.036.179.184	46.632.949.616	97,08
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65 DI	65 DI	100	46.149.188.863	40.002.281.299	86,68
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>				<b>3.351.198.000</b>	<b>3.282.712.084</b>	<b>97,96</b>
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1 laporan	1 laporan	100	1.923.646.000	1.876.589.078	97,55
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1 laporan	1 laporan	100	600.941.600	597.322.813	99,40
3	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1 laporan	1 laporan	100	826.610.400	808.800.193	97,85
	<b>UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN</b>				<b>12.175.740.772</b>	<b>11.774.176.316</b>	<b>96,70</b>
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				<b>851.222.656</b>	<b>818.422.781</b>	<b>96,15</b>
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100	260.973.945	244.308.450	93,61
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	80.000.000	78.876.700	98,60
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	367.113.711	356.079.101	96,99



No	Program/Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	143.135.000	139.158.530	97,22
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>				<b>11.324.518.116</b>	<b>10.955.753.535</b>	<b>96,74</b>
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18 kab/kota	18 kab/kota	100	2.187.736.514	2.177.834.754	99,55
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65 DI	65 DI	100	9.136.781.602	8.777.918.781	96,07
	<b>UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA</b>				<b>18.538.873.011</b>	<b>18.493.217.525</b>	<b>99,75</b>
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				<b>1.325.970.328</b>	<b>1.310.725.726</b>	<b>98,85</b>
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100	424.234.047	423.678.101	99,87
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	60.294.100	60.094.100	99,67
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100	512.053.781	499.482.928	97,55
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100	329.388.400	327.470.597	99,42
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>				<b>17.212.902.683</b>	<b>17.182.491.799</b>	<b>99,82</b>
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18 kab/kota	18 kab/kota	100	4.750.014.069	4.732.642.889	99,63

No	Program/Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65 DI	65 DI	100	12.462.888.614	12.449.848.910	99,90

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tidak ada permasalahan	-
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tidak ada permasalahan	-
III	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tidak ada permasalahan	-
	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tidak ada permasalahan	-
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tidak ada permasalahan	-
	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tidak ada permasalahan	-
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tidak ada permasalahan	-

#### 3.1.1.4. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.161.911.567.401,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.155.219.053.750,00 atau 95,87%, dengan uraian sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan meliputi dua urusan yaitu urusan perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pertanahan.

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Menurunnya Kawasan Kumuh	Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	7,09%	9,45%	133,29

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
II	Meningkatnya PSU Pemukiman	<b>Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	Persentase Peningkatan PSU Pemukiman	17,26%	65,24%	378
III	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan/Atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	<b>Pengembangan Perumahan</b>	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana.	100%	100%	100
			Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100
IV	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	<b>Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</b>	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%	100
V	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (69 )	B (69)	100
VI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	85%	85%	100

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Menurunnya Kawasan Kumuh dengan Indikator Kinerja :

- 1) Persentase Penurunan Kawasan Kumuh (Target Kinerja : 7,09%) (Realisasi Kinerja : 9,45%) dengan capaian kinerja : 133,29%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Kawasan Permukiman, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

- (1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dilaksanakan dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan sub kegiatan :

- Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

dengan output kegiatan ini adalah :Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Terlaksananya Pembinaan Pokja Bidang Perumahan Rakyat. Dokumen kebijakan dan legislasi untuk bidang perumahan yang disusun.

Dari 1 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Kawasan Permukiman.

- (2) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha dengan sub kegiatan :
  - Penyusunan Rencana Tapak (siteplan) dan Detail Engineering Design (DED), Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen site plan dan DED yang disusun.
  - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha dengan output kegiatan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) pada kawasan kumuh yang ditangani.
  - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha dengan output kegiatan adalah jumlah kawasan kumuh yang ditangani pada 8 kawasan.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatnya PSU Permukiman dengan sub kegiatan :
  - 1) Persentase Peningkatan PSU Permukiman (Target Kinerja: 17,26%) (Realisasi Kinerja : 65,24%) dengan capaian kinerja: 378%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- 1) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dicapai dengan pelaksanaan :
  - a) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan kawasan permukiman sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program dilaksanakan dengan sub kegiatan :
    - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman dengan output kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan/DED PSU Permukiman.

- Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman dengan output kegiatan adalah jumlah paket kegiatan pembangunan danpeningkatan PSU permukiman.
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, dengan output kegiatan ini adalah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

c. Sasaran III : Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan/Atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana. (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%) dengan capaian kinerja : 100%.
- 2) Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%) dengan capaian kinerja : 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

b) Program Pengembangan Perumahan, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

(1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan :

- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi dengan output kegiatan ini adalah tersedianya data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dengan hasil tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan.

(2) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan :

- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap

bencana dengan output jumlah peserta sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tnggap bencana.

- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP dengan output jumlah peserta sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d. Sasaran IV : Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan dengan Indikator Kinerja :

- 1) Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%) dengan capaian kinerja : 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

b) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

- (1) Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan :

- Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dengan Output Kegiatan Ini Adalah Terlaksananya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Sehingga Secara Otomatis Akan Meningkatkan Capaian Program.

c) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

- (1) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Derah Kabupaten / Kota dalam 1 ( satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan :

- Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dengan Output Kegiatan Ini Adalah Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Derah Kabupaten / Kota dalam 1 ( satu) Daerah Provinsi Sehingga Secara Otomatis Akan

Meningkatkan Capaian Program.

- Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan output sub kegiatan ini adalah lapotan hasil mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi yang terlaksana.
- d) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :
- (1) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Derah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan :
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Output Kegiatan Ini Adalah Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Derah Provinsi Sehingga Secara Otomatis Akan Meningkatkan Capaian Program.
- e) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :
- (1) Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Derah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan :
    - Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Dengan Output Kegiatan Ini Adalah Meningkatnya Kualitas Penataan Akses dalam Pemanfaatan Tanah Sehingga Secara Otomatis Akan Meningkatkan Capaian Program.
- f) Program Penetapan Tanah Ulayat, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :
- (1) Kegiatan Penetapan Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dengan sub kegiatan :
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dengan Output Kegiatan Ini Adalah Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Dearah Provinsi Sehingga Secara Otomatis Akan Meningkatkan Capaian Program.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

e. Sasaran V : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja :

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Target Kinerja : B) (Realisasi Kinerja : B) dengan capaian kinerja : 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan :

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan :

- Penyusunan dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V.

f. Sasaran VI : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Kinerja :

1) Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi (Target Kinerja : 85%) (Realisasi Kinerja : 85%) dengan capaian kinerja : 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan :

(1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah terselenggaranya admisitrase keuangan perangkat daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.



- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
- (2) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi barang milik daerah perangkat daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD.
- (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dilaksanakan dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdaaskan Tugas dan Fungsi.
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi umum perkantoran dilaksanakan dengan sub kegiatan :
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
  - Penyediaan bahan logistik kantor.
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output kegiatan ini adalah terselenggaranya pengadaan barang milik daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan pengadaan mebel.
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output kegiatan ini adalah tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

(7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output kegiatan ini adalah terpeliharanya barang milik daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VI.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>9.353.365.998</b>	<b>8.859.513.499</b>	<b>94,72</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	17 Dokumen		100	<b>150.360.000</b>	<b>120.448.800</b>	<b>80,11</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	25.000.000	19.637.400	78,69
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	13.350.000	7.733.000	57,93
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	8.010.000	3.700.000	46,19
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2.500.000	2.490.400	99,62
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	4.000.000	3.956.000	98,90
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	30.000.000	21.708.100	72,36
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	67.500.000	61.187.900	90,65
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>6.489.227.618</b>	<b>6.133.404.651</b>	<b>94,52</b>

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58 orang	58 orang	100	5.877.802.118	5.600.703.151	95,29
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 orang	35 orang	100	565.027.500	500.982.500	88,67
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18 Laporan	18 Laporan	100	46.398.000	31.719.000	68,36
<b>3</b>	<b>Adiminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>85.000.000</b>	<b>84.680.000</b>	<b>99,62</b>
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100	85.000.000	84.680.000	99,62
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>130.836.000</b>	<b>70.170.300</b>	<b>53,63</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75 Stel	75 Stel	100	56.250.000	55.444.500	98,57
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	4 Orang	100	31.121.000	2.000.000	6,43
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 kali	7 kali	100	43.464.000	12.725.800	29,28
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.336.556.080</b>	<b>1.305.212.255</b>	<b>97,65</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	166 buah	166 buah	100	9.806.000	9.673.020	98,64
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Unit	50 Unit	100	420.243.560	406.472.398	96,72
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43 Jenis	43 Jenis	100	190.547.000	189.513.140	99,46
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14 Jenis	14 Jenis	100	74.920.000	74.716.240	99,73
	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundangan	96 Eksemplar	96 Eksemplar	150	12.420.000	11.420.000	91,95
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	628.619.520	613.417.457	97,58
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>43.086.000</b>	<b>37.013.400</b>	<b>85,91</b>
	Pengadaan Mebel	12 Bulan	12 Bulan	100	43.086.000	37.013.400	85,91
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>574.731.300</b>	<b>570.147.358</b>	<b>99,20</b>

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Surat	200 Surat	100	5.700.000	5.400.000	94,74
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 Orang	16 Orang	100	569.031.300	564.747.358	99,25
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>543.570.000</b>	<b>538.436.735</b>	<b>99,06</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	9 Unit	100	304.420.000	29.9877.435	98,51
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55 Unit	55 Unit	100	39.150.000	39.022.800	99,68
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100	200.000.000	199.536.500	99,77
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				<b>130.066.900</b>	<b>1.266.579.426</b>	<b>95,23</b>
<b>1</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>				<b>1.088.644.500</b>	<b>1.032.673.226</b>	<b>94,86</b>
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	<b>1.088.644.500</b>	<b>1.032.673.226</b>	94,86
<b>2</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>				<b>241.422.400</b>	<b>233.906.200</b>	<b>96,89</b>
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	50 Orang	50 Orang	100	195.531.800	192.182.800	98,,29
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	50 Orang	50 Orang	100	45.890.600	41.723.400	90,92
<b>III</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>10.976.139.790</b>	<b>9.970.375.777</b>	<b>90,84</b>

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>				<b>973.974.750</b>	<b>879.677.532</b>	<b>90,32</b>
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1 Dokumen	1 Dokumen	100	823.678.550	742.430.571	90,14
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	100	150.296.200	137.246.961	91,32
2	<b>Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>				<b>10.002.164.640</b>	<b>9.090.698.245</b>	<b>90,89</b>
	Penyusunan Rencana Tapak (sitePlan) dan Detail Engineering Design (DED), Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	5 Dokumen	5 Dokumen	100	147.510.560	145.083.382	98,35
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	139 Unit	139 Unit	100	4.089.510.200	4.017.140.466	98,23
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	13 Kawasan	13 Kawasan	100	5.765.143.880	4.928.474.397	85,49
IV.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>				<b>139.681.995.113</b>	<b>134.628.984.360</b>	<b>96,38</b>
1	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>				<b>139.681.995.113</b>	<b>134.628.984.360</b>	<b>96,38</b>
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	57 Dokumen	57 Dokumen	100	8.098.359.030	7.841.523.777	96,83

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	19 Paket	19 Paket	100	131.477.749.483	126.684.626.983	96,35
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	100	105.886.600	102.833.600	97,12
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>				<b>150.000.000</b>	<b>135.092.441</b>	<b>90,06</b>
<b>1</b>	<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>				<b>150.000.000</b>	<b>135.092.441</b>	<b>90,06</b>
	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100	150.000.000	135.092.441	90,06
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>				<b>213.000.000</b>	<b>159.103.400</b>	<b>74,70</b>
<b>1</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>213.000.000</b>	<b>159.103.400</b>	<b>74,70</b>
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100	74.000.000	71.219.900	96,24
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100	139.000.000	87.883.500	63,23
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>				<b>92.000.000</b>	<b>88.937.547</b>	<b>96,67</b>
<b>1</b>	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>				<b>92.000.000</b>	<b>88.937.547</b>	<b>96,67</b>

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100	92.000.000	88.937.547	96,67
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>				<b>65.000.000</b>	<b>61.535.300</b>	<b>94,67</b>
<b>1</b>	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>65.000.000</b>	<b>61.535.300</b>	<b>94,67</b>
	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	1 Laporan	1 Laporan	100	65.000.000	61.535.300	94,67
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>				<b>50.000.000</b>	<b>48.932.000</b>	<b>97,86</b>
<b>1</b>	<b>Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>50.000.000</b>	<b>48.932.000</b>	<b>97,86</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100	50.000.000	48.932.000	97,86
<b>TOTAL</b>					<b>161.911.567,401</b>	<b>155.219.053.750</b>	<b>95,87</b>

#### 4. Permasalahan Dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Tidak ada permasalahan	-
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Tidak ada permasalahan	-
<b>III</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Tidak ada permasalahan	-
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Tidak ada permasalahan	-
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Tidak ada permasalahan	-

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
VII	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tidak ada permasalahan	-
VIII	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tidak ada permasalahan	-
IX	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Tidak ada permasalahan	-

### 3.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan anggaran Rp.30.980.797.285,00 realisasi Rp.29.853.433.211,00.

#### 3.1.1.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.14.842.877.754,00 dengan realisasi Rp.14.558.654.570,00 atau 98% dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	<b>Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Indeks penegakan Peraturan Daerah	76,00	96,00	126
			Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	77,00%	81,81%	106
			Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	84,21%	84,21%	100
II	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah	<b>Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	53%	75%	141,51
III	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	BB	BB	100
IV	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	76	80,77	106,27



## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya kualitas penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Indeks penegakan Peraturan Daerah (Target kinerja : 76), (Realisasi Kinerja : 96) dengan capaian kinerja 126,32%.
- 2) Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (Target kinerja: 77%) (Realisasi Kinerja: 81,81%). dengan capaian kinerja 106,25%.
- 3) Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Target kinerja: 84,21%) (Realisasi Kinerja: 84,21%). dengan capaian kinerja 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan output sub kegiatan ini adalah Jasa Tenaga Pengaman 51 orang; Jumlah Kab/Kota yang di Deteksi Dini dan Cegah Dini 10 Kab/Kota; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Patroli Lapangan dalam pemeliharaan ketentraman dan Ketertiban Umum 10 Kab/Kota; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penyuluhan trantibum 18 Kab/Kota; Jumlah Pemeliharaan Trantibum pada wilayah lintas batas antar provinsi tetangga (Sumut,Riau,Jambi dan Bengkulu) yang dilaksanakan 2 Kali; Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Kepala, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat VIP yang dilakukan 12 bulan; Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Event Daerah, Nasional dan Internasional yang dilaksanakan 4 event.
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan

Kerusuhan Massa dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah Kab/Kota yang dilakukan penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada 10 Kab/Kota.

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi dengan output sub kegiatan ini adalah Gelar pasukan Satpol PP, Satlinmas dan Damkar yang dilaksanakan 1 kali; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan koordinasi 19 Kab/Kota; Jumlah Rapat penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 3 kali.
  - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemberdayaan perlindungan masyarakat 19 Kab/Kota.
  - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas 60 orang; Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas 40 orang.
  - Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dengan output sub kegiatan ini adalah Naskah Kerjasama yang disusun 1 dokumen.
- (2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan sub kegiatan :
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah Kab/Kota yang diawasi atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 18 Kab/Kota.
  - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah Kab/Kota yang dilakukan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 19 Kab/Kota.

- (3) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, dengan sub kegiatan :
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kapasitas 60 orang; Jumlah koordinasi dilaksanakan 6 kali.
  - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS penegakan Perda 1 kali; Jumlah rapat sekretariat bersama PPNS dilaksanakan 2 kali.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah, dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap (Target kinerja : 53%) (Realisasi Kinerja : 75%) dengan capaian kinerja 141,51%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang disusun 1 laporan.

- (2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan sub kegiatan :

- Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan. Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah kab/kota yang dibina dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan,

penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 19 kab/kota;

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

c. Sasaran III : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Nilai akuntabilitas kinerja OPD (Target kinerja : BB) (Realisasi Kinerja : BB) dengan capaian kinerja 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun 2 dokumen.
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun 1 dokumen.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen evaluasi yang disusun 4 dokumen.
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan 4 dokumen.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya 77 orang.
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mendapatkan honor 10 orang.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan 14

dokumen.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d. Sasaran Straategis IV : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (Target kinerja : 76) (Realisasi Kinerja : 76) dengan capaian kinerja 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

➤ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah unit yang di lakukan penjagaan 8 unit.

(2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

➤ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 163 stel.

➤ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 8 orang.

(3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

➤ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 257 buah.

➤ Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah logistik kantor yang disediakan 1757 unit.

➤ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan 2170 unit.

➤ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output sub kegiatan ini adalah

- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 4 jenis.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi 12 dokumen.
- (4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya 4 unit.
- (5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun 1000 surat.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah kapasitas tagihan internet yang di bayakan 100%; jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan 3 rekening; jumlah tagihan listrik (PLN) yang di bayarkan 16500 KVA.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia 15 orang.
- (6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan yang dipelihara 1 unit.
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara 14 unit.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 37 unit.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab 1 unit.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				<b>10.587.811.127</b>	<b>10.326.023.172</b>	<b>97,53</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>310.950.609</b>	<b>310.646.846</b>	<b>99,90</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	98.810.000	98.774.195	99,96
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7.000.000	6.986.100	99,80
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	96.400.000	96.371.233	99,97
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	108.740.609	108.515.318	99,79
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>7.935.169.859</b>	<b>7.712.122.479</b>	<b>97,19</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang	77 Orang	100	7.798.989.859	7.575.942.479	97,14
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Orang	10 Orang	100	127.260.000	127.260.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	100	8.920.000	8.920.000	100,00
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>53.760.000</b>	<b>49.980.775</b>	<b>92,97</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 unit	8 unit	100	53.760.000	49.980.775	92,97
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>296.662.500</b>	<b>290.172.400</b>	<b>97,81</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	163 Stel	163 Stel	100	244.908.000	238.707.500	97,47
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8 Orang	8 Orang	100	51.754.500	51.464.900	99,44
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>987.055.900</b>	<b>973.414.885</b>	<b>98,62</b>

No	Program/Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	257 Buah	257 Buah	100	4.500.000	4.499.500	99,99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1757 Unit	1757 Unit	100	52.998.400	52.957.600	99,92
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2170 Unit	2170 Unit	100	30.000.000	29.999.250	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Jenis	4 Jenis	100	9.960.000	9.960.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100	889.597.500	875.998.535	98,47
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>62.757.800</b>	<b>61.490.000</b>	<b>97,98</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	100	62.757.800	61.490.000	97,98
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>704.694.459</b>	<b>693.699.87</b>	<b>98,44</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Surat	1000 Surat	100	4.963.900	4.962.000	99,96
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 % 3 Rekening 16500 KVA	100 % 3 Rekening 16500 KVA	100 100 100	127.700.559	123.916.179	97,04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 Orang	15 Orang	100	572.030.000	564.821.708	98,74
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>236.760.000</b>	<b>234.495.900</b>	<b>99,04</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100	26.190.000	25.953.500	99,10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	14 Unit	100	173.120.000	171.410.400	99,01
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37 Unit	37 Unit	100	25.050.000	24.960.000	99,64
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 Unit	100	12.400.000	12.172.000	98,16
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>				<b>4.130.066.627</b>	<b>4.108.177.098</b>	<b>99,47</b>



No	Program/Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>3.587.066.627</b>	<b>3.568.950.749</b>	<b>99,49</b>
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	51 orang 10 Kab/Kota 10 Kab/Kota 18 Kab/Kota 2 Kali 12 Bulan 4 Event	51 orang 10 Kab/Kota 10 Kab/Kota 18 Kab/Kota 2 Kali 12 Bulan 4 Event	100 100 100 100 100 100 100	2.439.173.641	2.435.405.177	99,85
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100	298.099.000	295.651.031	99,21
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Kali 19 Kab/Kota 3 Kali	1Kali 19 Kab/Kota 3 Kali	100 100 100	414.883.986	406.767.874	98,04
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19 Kab/Kota	17 Kab/Kota	100	135.000.000	134.708.215	99,78
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	60 Orang 40 Orang	60 Orang 40 Orang	100 100	175.000.000	174.692.567	99,82
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	125.000.000	121.725.885	97,38
2	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>				<b>402.798.000</b>	<b>400.631.508</b>	<b>99,46</b>
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	100	70.000.000	69.742.760	99,63

No	Program/Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	19 Kab/Kota	18 Kab/Kota	100	332.798.000	330.888.748	99,43
<b>3</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>				<b>140.202.000</b>	<b>138.594.841</b>	<b>98,85</b>
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	60 Orang 6 Kali	60 Orang 6 Kali	100 100	90.202.000	89.660.479	99,40
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	1 Kali 2 Kali	1 Kali 2 Kali	100 100	50.000.000	48.934.362	97,87
<b>III</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>				<b>125.000.000</b>	<b>124.454.300</b>	<b>99,56</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>				<b>65.000.000</b>	<b>64.803.300</b>	<b>99,70</b>
	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan	100	65.000.000	64.803.300	99,70
<b>2</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>				<b>60.000.000</b>	<b>59.651.000</b>	<b>99,42</b>
	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100	60.000.000	59.651.000	99,42

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Sub kegiatan ini adalah salah satu langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 terkait Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	-	-
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kurangnya sarana dan prasarana dalam tugas Deteksi Masih adanya Kab/Kota yang belum terjangkau terkait Patroli	Perlunya dilengkapi dengan sarana dan prasarana Perlunya penambahan anggota
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kurangnya anggaran ke Kab/Kota untuk melaksanakan kegiatan. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan di Lapangan	Mengajukan penambahan anggaran Melakukan penambahan kelengkapan sarana dan prasarana
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	-	Sub kegiatan ini adalah salah satu langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 terkait Membangun sinergisitas dan Kerjasama dengan Satpol PP kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi penegakan Perda-Perda Provinsi
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masih ada Kab/Kota yang belum hadir dalam Pelaksanaan Rakor Data Satlinmas di Kab/Kota masih belum lengkap	Perlu lebih intens dalam pembinaan Satlinmas
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	-	Sub kegiatan ini adalah salah satu langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 terkait Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM
2	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>		
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan terkait Tibum dan Tranmas belum terlaksana dari Kab/Kota Kekurangan anggaran	Akan meminta kembali Laporan terkait Tibum dan Tranmas di Kab/Kota Perlunya penambahan anggaran
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	-	Sub kegiatan ini adalah salah satu langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 terkait Membangun sinergisitas dan Kerjasama dengan Satpol PP kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi penegakan Perda-Perda Provinsi
III	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		
1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		
	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan	Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan	Mengajukan penambahan anggaran

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Data kejadian kebakaran kurang cepat diperoleh	Perlu nya koordinasi yang baik dengan Kab/Kota

### 3.1.1.5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan Bidang Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.16.137.919.531,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.294.778.641,00 atau 91.83%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja organisasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	77	63.10	81.94
II	Meningkat-nya kualitas pelayanan internal organisasi		Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (%)	86	43	50
III	Meningkat-kan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana	Penanggulangan Bencana	Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana (provinsi/kabupaten/kot)	20	20	100
			Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit).	5		
IV	Meningkat-kan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana		Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani (%)	100	100	100
			Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan (%)	100	100	100

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

- a. Sasaran I : Meningkatkan-nya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja :
  - 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Target Kinerja : 77) (Realisasi Kinerja : 63.10) Capaian Kinerja 81,94%.
- b. Sasaran II : Meningkatkan-nya kualitas pelayanan internal organisasi dengan Indikator Kinerja :
  - 1) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (%) (Target Kinerja 86) (Realisasi Kinerja : 43) Capaian Kinerja 50%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,

dicapai dengan kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja BPBD 2 dokumen.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD dengan output kegiatan ini Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun 1 Dokumen.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan output kegiatan ini Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun 2 dokumen.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD dengan output kegiatan ini Jumlah dokumen DPA yang disusun 1 dokumen.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD dengan output kegiatan ini Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun 2 Dokumen.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output kegiatan ini jumlah dokumen evaluasi yang disusun 4 dokumen.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan yang disusun 13 dokumen.

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output kegiatan ini adalah Gaji dan Tunjangan ASN BPBD untuk satu tahun yang dianggarkan 50 orang.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mendapatkan honor 18 orang sehingga Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPJ yang diterbitkan 100 Dokumen.
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen Akuntansi

SKPD yang disusun 36 Dokumen.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun 1 Dokumen.
  - Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan 2 Dokumen.
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan 13 Dokumen.
  - Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun 1 Dokumen.
- (3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen usulan RKBMD pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan yang di susun 1 dokumen.
  - Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah 1 Dokumen.
  - Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang milik daerah SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penerbitan 1 Dokumen.
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output kegiatan ini adalah Dokumen barang milik daerah semesteran dan akhir tahun yang disusun 3 Dokumen.
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Laporan barang milik daerah 1 Dokumen.
  - Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output kegiatan ini

adalah Jumlah dokumen usulan pinjam pakai 1 Dokumen dan Jumlah dokumen usulan sewa 1 dokumen.

(4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya 90 stel.
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola 45 dokumen.
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan 12 kali.
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan output kegiatan ini adalah Jumlah aparatur yang dinilai kinerjanya 45 orang.

(5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan output kegiatan ini adalah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan 116 unit.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang 349 unit.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output kegiatan ini adalah Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan 1083 unit.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan output kegiatan ini adalah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 51479 lembar.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 7 set.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi 1 Dokumen.

- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Mebel dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Mebel 7 unit/set.
  - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru 3 unit/set jenis.
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 1 unit.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output kegiatan ini adalah Jumlah surat – surat masuk dan surat – surat keluar dalam 1 tahun 500 surat, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan 100 mbps, Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan 2 rekening, Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan 12 bulan, Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan 1375 KVA.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output kegiatan ini adalah Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia 26 orang.
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara 1 unit.
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output kegiatan ini adalah jumlah Kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara 51 unit.
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat



Besar dengan output kegiatan ini adalah Jumlah alat besar yang dipelihara 1 unit.

- Pemeliharaan Mebel dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Mebel yang dipelihara 1 unit.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 99 unit.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab 5 unit.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab 2 unit.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I dan II.

- c. Sasaran Startegis III : Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana, dengan Indikator Kinerja :
  - 1) Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana (provinsi/kabupaten/kota) (Target Kinerja : 20) (Realisasi Kinerja : 20) Capaian Kinerja 100%.
  - 2) Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit) (Target Kinerja : 5) (Realisasi kinerja : -) Capaian Kinerja : -
- d. Sasaran Kinerja IV : Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana, dengan Indikator Kinerja :
  - 1) Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani (Target Kinerja : 100) (Realisasi Kinerja : 100) Capaian Kinerja 100%.
  - 2) Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan (Target Kinerja : 100) (Realisasi Kinerja : 100) Capaian Kinerja 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penanggulangan Bencana, dicapai dengan kegiatan :
  - (1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) dengan output kegiatan ini adalah Kampanye/pbulikasi

media/pameran/pembuatan baliho kebencanaan yang dilaksanakan 1 kali; Sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di masyarakat yang dilaksanakan 2 kali; Sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di sekolah/kampus yang dilaksanakan 58 kali.

(2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan sub kegiatan :

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dengan output kegiatan ini adalah Pelatihan kebencanaan bagi aparaturnya yang dilaksanakan 90 orang; Pelatihan kebencanaan bagi relawan yang dilaksanakan 630 orang.
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan output kegiatan ini adalah Petugas PUSDALOPS PB yang difasilitasi 12 bulan.
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan output kegiatan ini adalah sarana dan prasarana kesiapsiagaan menghadapi bencana (peralatan perlindungan, EWS Tsunami/Letusan gunung api/banjir/longsor).
- Pengelolaan Risiko Bencana dengan output kegiatan ini mengikuti jamboree PRB tingkat nasional 1 kali; Rapat koordinasi PRB tingkat provinsi yang dilaksanakan 1 kali.
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan output kegiatan ini Pembinaan kelompok siaga bencana (KSB) di kabupaten/kota yang dilaksanakan 35 kali; Sosialisasi/penumbuhan/pembinaan nagari tangguh bencana DESTANA yang dilaksanakan 10 nagari/desa/kelurahan.
- Penanganan Pasca bencana Provinsi dengan output kegiatan ini adalah Bimbingan teknis/workshop JITU PASNA yang dilaksanakan 25 orang; Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dikoordinasikan 1 laporan; Rapat koordinasi/pertemuan teknis JITU PASNA yang dilaksanakan 28 orang.
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana dengan output kegiatan ini adalah Pembinaan/pelatihan TRC Provinsi/kabupaten/kota

yang dilaksanakan 35 orang.

- Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan output kegiatan ini adalah Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilaksanakan 1 kali.
  - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dengan output kegiatan ini adalah Dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RKPB) yang disusun 1 Dokumen.
- (3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan sub kegiatan :
- Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana dengan output kegiatan ini adalah Penanganan darurat bencana secara terpadu yang dikoordinasikan 1 laporan.
  - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan output kegiatan ini adalah Logistik/peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang disediakan.
  - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit dengan output kegiatan ini adalah Penanganan epidemic/wabah penyakit secara terpadu yang dikoordinasikan 1 laporan.
- (4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan sub kegiatan :
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dengan output kegiatan ini adalah Laporan hasil pengukuran/penyebarluasan basis data kebencanaan yang dilaksanakan 2 laporan.
  - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi dengan output kegiatan ini adalah Laporan hasil kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III dan IV.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				<b>7.798.037.994</b>	<b>7.481.016.654</b>	<b>95.93</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>123.232.600</b>	<b>117.392.813</b>	<b>95.26</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100	14.434.000	14.373.800	99.58
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 dokumen;	9 dokumen;	100	7.010.800	6.949.400	99.12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 dokumen	9 dokumen	100	10.310.000	10.253.700	99.45
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	8.248.000	8.223.800	99.71
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	7.423.200	7.362.200	99.18
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 dokumen	4 dokumen	100	68.709.800	63.194.113	91.97
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	7.096.800	7.035.800	99.14
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>5.068.270.507</b>	<b>4.902.498.663</b>	<b>96.73</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	42 orang	100	4.694.076.907	4.543.730.385	96.80
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Orang	20 Orang	100	217.566.700	204.367.900	93.93
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	8.231.200	8.231.200	100.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	30.560.450	30.063.050	98.37
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	59.826.450	58.894.675	98.44
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7.892.900	7.892.900	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	100	43.380.400	42.583.053	98.16

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	6.735.500	6.735.500	100.00
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>109.803.150</b>	<b>107.345.142</b>	<b>97.77</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	3.211.300	3.211.300	100.00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	3.211.300	3.211.300	100.00
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	3.211.300	3.211.300	100.00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100	5.878.000	5.878.000	100.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	91.235.250	88.786.242	97.32
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	3.056.000	3.056.000	100.00
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>157.951.442</b>	<b>148.436.452</b>	<b>93.98</b>
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90 stel	90 stel	100	67.500.000	62.100.000	92.00
2)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45 dokumen	45 dokumen	100	2.528.000	2.528.000	100.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 kali	12 kali	100	63.945.142	60.874.452	95.20
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	45 orang	45 orang	100	2.316.800	2.316.800	100.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 orang	3 orang	100	21.661.500	20.617.200	95.18
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>464.321.482</b>	<b>455.455.051</b>	<b>98.09</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	116 unit/buah	116 unit/buah	100	22.002.200	22.002.200	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	349 unit/buah	349 unit/buah	100	67.267.580	62.111.500	92.33
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.083 unit/buah	1.083 unit/buah	100	41.533.200	38.343.500	99.46
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.479 lembar	51.479 lembar	100	13.071.106	13.000.000	99.46

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7 set	7 set	100	14.760.000	14.580.000	98.78
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	305.687.396	305.326.851	99.88
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>35.788.600</b>	<b>35.788.600</b>	<b>100.00</b>
	Pengadaan Mebel	18 unit/set	18 unit/set	100	6.638.600	6.638.600	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit/set	3 unit/set	100	24.150.000	24.150.000	100.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	100	5.000.000	5.000.000	100.00
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.196.839.613</b>	<b>1.075.048.233</b>	<b>89.82</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 surat	500 surat	100	5.234.550	4.930.000	94.18
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.375 KVA; 100 mbps; 2 rekening;	1.375 KVA; 100 mbps; 2 rekening;	100	299.822.259	195.127.293	65.08
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26 orang	26 orang	100	891.782.804	874.990.940	98.12
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>641.830.600</b>	<b>639.042.700</b>	<b>99.57</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	100	39.190.000	39.190.000	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51 unit	51 unit	100	389.452.500	387.315.450	99.45
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1 unit	1 unit	100	24.998.100	24.976.250	99.91
	Pemeliharaan Mebel	1 unit	1 unit	100	5.000.000	5.000.000	100.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99 unit	99 unit	100	10.190.000	10.190.000	100.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	145.500.000	144.941.000	99.62
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit	100	22.500.000	22.480.000	99.91

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	100	5.000.000	4.950.000	99.00
<b>II</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>				<b>8.339.881.537</b>	<b>7.813.761.987</b>	<b>93.69</b>
<b>1</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>				<b>639.782.487</b>	<b>586.411.377</b>	<b>91.66</b>
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	140 kali; 4 kali; 5 kali;	140 kali; 4 kali; 5 kali;	100	639.782.487	586.411.377	91.66
<b>2</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>				<b>6.712.852.566</b>	<b>6.269.113.916</b>	<b>93.39</b>
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	35 Orang; 35 orang	35 Orang; 35 orang	100	1.891.592.653	1.779.099.724	94.05
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	12 bulan	12 bulan	100	1.319.445.171	1.275.155.600	96.64
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	33 unit	33 unit	100	554.255.432	468.742.611	84.57
	Pengelolaan Risiko Bencana	20 Provinsi, kab/ kota; 1 kali; 1 kali; 19 kab/kota	20 Provinsi, kab/ kota; 1 kali; 1 kali; 19 kab/kota	100	319.073.956	299.140.002	93.75
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	30 kali; 35 nagari/desa/ kelurahan	30 kali; 35 nagari/desa/ kelurahan	100	1.708.459.316	1.590.763.138	93.11
	Penanganan Pascabencana Provinsi	25 orang; 28 orang; 1 laporan; 1 paket;	25 orang; 28 orang; 1 laporan; 1 paket;	100	296.434.271	284.869.573	96.10
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	35 orang	35 orang	100	121.811.378	115.276.611	94.64
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 kali	1 kali	100	177.690.778	165.750.840	93.28
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100	324.089.611	290.315.817	89.58
<b>3</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>				<b>825.200.472</b>	<b>808.203.827</b>	<b>97.94</b>
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan	100	307.650.516	3301.367.569	97.96

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	1 Laporan	100	47.608.088	46.663.750	98.02
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2 paket	2 paket	100	420.978.544	411.415.995	97.73
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	1 Laporan	1 Laporan	100	48.963.324	48.756.513	99.58
<b>4</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>				<b>162.046.012</b>	<b>150.032.867</b>	<b>92.59</b>
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	2 laporan	2 laporan	100	28.973.328	24.610.198	84.94
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi	1 laporan	1 laporan	100	133.072.684	125.422.669	94.25

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dalam penerapan SPM ditemukan beberapa masalah diantaranya: Kurang sinkronnya data dari dinas terkait mengakibatkan sulitnya proses pengumpulan data dan informasi; kurangnya sarana dan prasarana; kurangnya anggaran untuk operasional penanggulangan bencana; beberapa kabupaten/kota masih belum memiliki dokumen kajian risiko bencana, peta rawan bencana dan rencana kontijensi bencana	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan dan ada honorarium yang tidak dapat dicairkan karena tidak sesuai aturan yang ada	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam hal pengiriman aparatur untuk mengikuti undangan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis harus dilakukan secara selektif karena banyak lembaga yang mengundang tidak atau diragukan kredibilitasnya sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang resmi dan terakreditasi	Perlu ditingkatkan kerjasama antara BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang resmi dan terakreditasi terutama untuk pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis kebencanaan.
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Pengadaan Mebel	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perizinan Alat Besar	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Pemeliharaan Mebel	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		
<b>1</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Hingga periode Laporan Akhir ini bisa dikatakan tidak ditemui kendala yang begitu berarti yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan Pengiriman Peserta tidak sesuai dengan Target yang diharapkan.	Kedepannya untuk pelatihan teknis SPAB, penyebarluasan informasi dan permintaan peserta di upayakan untuk bekerjasama dengan dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat melalui jaringan komunikasinya, Untuk permintaan peserta diserahkan kepada institusi terkait dengan menetapkan kriteria dan klasifikasi peserta.
<b>2</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	BPBD kab/kota belum menginisiasi data relawan dilingkungan masing-masing sehingga ketika difasilitasi untuk pelatihan tidak jarang ditemukan relawan yang kurang serius selama kegiatan; Kurangnya koordinasi dan komunikasi serta komitmen antara masyarakat dan BPBD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan terkait PB; Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.	Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan hubungan antara BPBD Kabupaten/Kota dengan masyarakat agar kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi hal wajib yang dilakukan secara langsung dan sesuai kewenangan daerah masing-masing; Serta membentuk wadah komunikasi bersama agar inspirasi dan kendala masyarakat dalam bidang kebencanaan dapat terakomodir secara langsung dan sesuai kewenangan daerah masing-masing
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Belum seluruh kabupaten/kota yang membentuk Pusdalops PB sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pendataan, Masih kurangnya Kapasitas personil Pusdalops PB sehingga perlunya pelatihan personil.	Perlunya melakukan pembinaan dan pelatihan personil Pusdalops PB provinsi dan kabupaten/kota serta menghimbau kabupten/kota untuk segera membentuk Pusdalops.
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Hingga periode Laporan Akhir ini bisa dikatakan tidak ditemui kendala yang begitu berarti yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, Kurangnya anggaran sehingga tidak semua EWS	Kedepannya diupayakan mencari vendor/ penyedia barang dan jasa yang lebih berpengalaman
	Pengelolaan Risiko Bencana	Berdasarkan alasan risiko pandemi Covid-19 dan pemotongan anggaran, pelaksanaan Jambore PRB tingkat provinsi batal dilaksanakan dan ada potensi tidak terlaksana ditahun 2023 karena keterbatasan anggaran sedangkan Jambore PRB merupakan bagian dari indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan indikator kinerja kepala daerah; kurangnya Monitoring, evaluasi, pendekatan kelembagaan dan tingkat keaktifan forum PRB Provinsi; Kurangnya komitmen BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam hal membentuk Forum PRB selain itu masih tingginya nutasi pegawai BPBD di tingkat kab/kota sehingga sulit dalam komunikasi dan koordinasi serta tidak semua kab/kota dapat mengikuti kegiatan dikarenakan birokrasi di daerah yang cukup rumit.	Perlu adanya dukungan terkait penambahan penganggaran mengingat IKD harus dipenuhi; perlunya komitmen dalam membentuk dan F-PRB se-Sumatera Barat dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah serta provinsi maupun kabupaten/kota terkait pelaksanaan PRB untuk mendukung kebijakan dan penganggaran kegiatan BPBD Kabupaten/Kota, agar kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi hal wajib yang dilakukan secara langsung dan sesuai kewenangan daerah masing-masing.
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Peran serta BPBD Kabupaten/Kota di beberapa nagari penumbuhan DESTANA belum maksimal sehingga dikhawatirkan DESTANA tidak terbentuk dengan optimal; Kurangnya perhatian dan keseriusan beberapa BPBD Kabupaten/Kota terhadap pengembangan kapasitas kelompok di daerah yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan KSB di Kabupaten/Kota; Ada beberapa Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaan pembinaan KSB tetapi tidak mendatangkan KSB nya bahkan ada yang belum terbentuk; Peraturan berkaitan dengan pemakaian Dana Desa terkait penanganan bencana masih belum jelas sehingga Nagari/Desa ragu untuk menganggarkannya; Keterbatasan armada transportasi dan SDM dalam pelaksanaan kegiatan	Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan perencanaan, kebijakan, penganggaran dan pelaksanaan dalam meningkatkan hubungan antara kelembagaan kebencanaan daerah dan BPBD Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan sinergi yang baik. Perlu ada ruang komunikasi dan keseriusan OPD BPBD Kab/Kota untuk menjalan kan kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi dengan menghasilkan punishment and reward sehingga masyarakat lebih terayomi dalam menghadapi bencana dibawah kewenangan daerah masing-masing; serta Perlu ditingkatkan Monitoring dan Evaluasi dalam memantau perkembangan DESTANA di kabupaten/kota

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Penanganan Pascabencana Provinsi	Terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga pelaksanaan kegiatan belum berjalan dengan maksimal terutama dalam monitoring kegiatan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-Pasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana (R3P) sehingga usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi terlambat.	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasaca bencana dengan anggaran yang tersedia melalui skala prioritas kegiatan; Melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di kabupaten/kota dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia; Memberikan bimbingan kepada BPBD Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) kepada sumber daya manusia yang ada didaerah
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TpRC) Bencana	Kurangnya Dukungan terkait penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, Terbatasnya SDM dalam mengelola/ melaksanakan Kegiatan, adanya pengalihan anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga tidak terlaksananya pelatihan TRC.	Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing-masing
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan masih kurang, sehingga gladi hanya dilaksanakan dengan keterlibatan 125 peserta dengan cakupan daerah terdampak jauh lebih luas; Dukungan dari BPBD Kabupaten Solok masih kurang dikarenakan undangan yang diharapkan untuk mengikuti kegiatan tidak hadir pada saat pelaksanaan dan peralatan yang diharapkan juga tidak tersedia; Perlengkapan kesiapsiagaan kebencanaan tidak dalam keadaan optimal sehingga fungsinya tidak dapat ditunjukkan secara langsung dan memerlukan perbaikan; Organisasi masyarakat masih belum bisa diikut sertakan karena keterbatasan anggaran serta perlunya komitmen dari Forkopinda dalam pelaksanaan Gladi ini.	Perlu adanya rapat koordinasi BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota, BNPB dan Forkopinda di Sumatera Barat untuk meningkatkan komitmen baik dalam hal penganggaran, perencanaan program kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dalam menangani Bencana tipikal di daerah serta provinsi, agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		
<b>3</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Akurasi data sangat kurang di awal masa tanggap darurat. Hal ini disebabkan karena perubahan di lapangan yang sangat dinamis. Koordinasi dan integrasi data sangat sulit atau memerlukan waktu karena pelaku pendataan yang banyak sehingga data tidak terstandar. Disisi lain ego serktoral membuat integrasi data semakin sulit dilaksanakan dan lemahnya koordinasi antar unit/institusi Pemerintahan, dan juga koordinasi dengan/antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi Kemasyarakatan, media massa dan masyarakat.	Perlu diperkuat sistem-sistem pada level masyarakat guna percepatan dalam melakukan penanganan darurat bencana antara lain untuk sinkronisasi tim yang akan membantu dalam tugas penanganan pada saat terjadinya bencana, pendistribusian logistik dan pengoperasian peralatan penanggulangan bencana yang bekerja sesuai dengan Prosedur Tetap

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Masih perlu peningkatan dalam penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana dikarenakan tingginya potensi bencana di Sumatera Barat.	Perlunya komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing-masing
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Masih terbatasnya peralatan kebencanaan yang dimiliki saat ini dan belum terpeliharanya peralatan kebencanaan yang ada karena keterbatasan alokasi anggaran terkait pemeliharaan dan penyediaan peralatan dan logistic kebencanaan.	Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran terkait peningkatan tanggap darurat kebencanaan.
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/ Wabah Penyakit	Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.	Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dalam penanggulangan respon cepat bencana non alam.
<b>4</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>		
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Belum adanya system informasi yang terintegrasi untuk kabupaten/kota; Dan terlambatnya dukungan data dan informasi dari daerah	Kedepannya akan ditingkatkan komunikasi yang lebih intensif dengan kabupaten/kota; Konsinyering penginputan data dan informasi bencana; serta permintaan data langsung ke kabupaten/kota
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi	Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dirasakan langsung oleh masyarakat; Penghimpunan data kebencanaan dari kabupaten/kota yang sering tidak tepat waktu dan tidak lengkap. Hal tersebut dapat mengurangi keakuratan dan penyebarluasan data kebencanaan yang berfungsi sebagai salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.	Perlu ditingkatkan komitmen BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana, serta ketersediaan data kebencanaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai TUPOKSI dan kewenangan dinas/instansi dan daerah masing-masing

### 3.1.1.6. Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pada Tahun Anggaran 2022 (Perubahan) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.79.293.283.573,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.77.284.162.898,33 atau 97,46%, dapat digambarkan dalam uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	<b>Rehabilitasi Sosial</b>	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	5.159 orang	4.049 orang	78,48
II	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	160 orang	126 orang	78,75

III	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	<b>Pemberdayaan Sosial</b>	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	2.593 orang	3,712 orang	143,15
IV	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,01)	70,04	100,04
V	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B (80,00)	B 83,60	104,5

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I: Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial (target kinerja 5.159 orang), (realisasi kinerja 4.049) dengan capaian kinerja 78,48%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Permakanan berupa Biaya makanan dan minuman kelayan yang dilaksanakan selama 1 tahun pada UPTD PSBG Harapan Ibu Padang dan UPTD PSBN Tuah Sakato Padang, dengan jumlah kelayan 150 orang terdiri dari 90 orang laki-laki dan 60 orang perempuan.
- Penyediaan sandang pada UPTD PSBG Harapan Ibu Padang dan UPTD PSBN Tuah Sakato Padang dengan jumlah kelayan 150 orang anak untuk 1 tahun, penyediaan sandang ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pakaian harian kelayan, pakaian praktek dan pakaian olahraga, kesenian, pramuka, pakaian dalam perlengkapan ibadah, perlengkapan mandi dan kebutuhan khusus untuk anak perempuan.
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti.  
Penyediaan Perbekalan Kesehatan (bahan obat-obatan), pada UPTD PSBG Harapan Ibu Padang dan UPTD PSBN Tuah Sakato Padang, disediakan untuk 1 tahun dengan jumlah kelayan 150 orang anak berupa penyediaan obat-obatan ringan serta penyediaan seorang tenaga medis yang ditunjuk oleh Puskesmas setempat.

- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari.  
Isi dari Sub Kegiatan ini berupa Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas baik pada UPTD PSBG Harapan Ibu dengan jumlah kelayan 100 orang (54 orang laki-laki dan 46 orang perempuan) maupun UPTD PSBN Tuah Sakato dengan kelayan berjumlah 50 orang (36 laki-laki dan 14 perempuan). Tujuan dari pelatihan ini adalah agar anak disabilitas mental dapat mampu latih dan mampu mandiri dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sedangkan untuk disabilitas netra bertujuan membina dan memperbaiki sikap mental dari sifat konsumtif kepada sifat produktif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyandang cacat disabilitas sebagai modal dasar dalam menjalani kehidupan ditengah-tengah masyarakat serta untuk terlatihnya penyandang disabilitas netra sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari.
- Pelatihan yang diberikan berupa praktek aktivitas hidup sehari-hari, praktek menyulam, perca kaos, merangkai bunga khusus untuk disabilitas mental kemudian pembinaan KUBE dengan memberikan bimbingan, metode dan teknis pelayanan prima kepada pasien serta pembinaan pengelolaan klinik pijat, pengelolaan Serjam, Telur Asin dan Tas Jali-jali disertai dengan pengadministrasian keuangan yang baik untuk disabilitas Netra.

(2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;

Anak Terlantar merupakan penyebab dominan dari ketidakmampuan orang tua yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain itu, akibat orang tua/ dan/ atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya dengan pelbagai alasan menjadikan anak-anak mereka terlantar.

Dikatagorikan anak terlantar apabila :

- Seseorang berusia 5 – 18 tahun;
- Anak yatim, piatu, yatim piatu maupun masih mempunyai kedua orang tua.
- Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; dan



- Tidak ada yang mengurus dan tidak mendapatkan pendidikan.

Adapun sub kegiatan pada kegiatan ini sebagai berikut :

- **Penyediaan Makanan**  
 Penyediaan Makanan, yang disediakan untuk 3 kali 1 hari selama 1 tahun pada UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, UPTD PSAA Tri Murni dan UPTD PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 455 orang terdiri dari 155 orang laki-laki dan 300 orang perempuan,
- **Penyediaan Sandang**  
 Penyediaan Sandang pada UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, UPTD PSAA Tri Murni, dan UPTD PSBR Harapan Padang Panjang yang diberikan kepada 455 orang klien terdiri dari 155 orang anak laki-laki dan 300 orang anak perempuan. Kegiatan ini untuk membiayai kebutuhan pakaian harian, kebutuhan pakaian sekolah dan penyediaan kebutuhan materi (uang jajan dan uang saku) bagi anak asuh serta anak yang mendapatkan pelayanan keterampilan,
- **Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti**  
 Penyediaan Perbekalan Kesehatan telah dilaksanakan selama 1 tahun pada UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, UPTD PSAA Tri Murni dan UPTD PSBR Harapan Padang Panjang, adapun perpekaln kesehatan yang diberikan berupa obat-obatan ringan
- **Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial**  
 Kegiatan ini dilaksanakan pada UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan UPTD PSBR Harapan Padang Panjang.  
 Maksud dari kegiatan ini pada UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung adalah agar anak terlantar laki-laki kurang mampu yang putus sekolah dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat hidup mandiri dan juga diberikan uang saku kepada mereka. Dilaksanakan selama 1 tahun untuk 2 angkatan (160 orang) dengan masing-masing angkatan berjumlah 80 orang dengan jurusan terdiri dari:
  - Jurusan Otomotif = 40 orang

- Jurusan Elektronika = 40 orang
- Jurusan Las Karbit/Listrik = 40 orang
- Jurusan Instalasi Listrik = 40 orang

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang, dimaksudkan agar anak terlantar perempuan kurang mampu yang putus sekolah terpenuhi kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan/keahlian sehingga dapat hidup mandiri dengan norma dan etika. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 tahun untuk 2 angkatan (200 orang anak perempuan) dengan masing-masing angkatan berjumlah 100 orang terdiri dari :

- Jurusan Kostum
- Jurusan Bordir
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari pada UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang.

Kegiatan ini berupa pemberian biaya pendidikan dan pelatihan kepada anak asuh sebanyak 75 orang di UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan 100 orang di UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang, dimaksudkan agar anak asuh yang dibina dan dilayani mendapatkan haknya untuk bersekolah guna memperoleh pendidikan yang lebih baik dan mendapat pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas diri sebagai bekal setelah keluar dari Panti Sosial. Disamping mendapatkan biaya Pendidikan anak asuh juga memperoleh biaya peralatan/ perlengkapan kebutuhan sekolah, uang pendidikan dan uang saku selama 1 (satu) tahun.

- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSBR Harapan Padang Panjang, dan PSAA Tri Murni Padang Panjang). Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga untuk tujuan reunifikasi.
- Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti.

Kegiatan ini dimaksudkan agar anak terlantar dalam Panti (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSBR Harapan Padang Panjang) mendapatkan pengasuhan

yang layak dari keluarga pengganti sehingga mereka merasakan kenyamanan dan ketenteraman berada dalam Panti.

(3) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti, adapun Sub Kegiatan yang berada di kegiatan ini sebagai berikut :

➤ Penyediaan Permakanan.

Penyediaan Permakanan merupakan penyediaan makan dan minuman 3 kali sehari bagi kelayan Jompo pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dengan jumlah 110 orang di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan 70 orang di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar yang dilaksanakan selama 1 tahun.

➤ Penyediaan Sandang.

Penyediaan Sandang merupakan biaya penyediaan sandang dan kebutuhan harian seperti pakaian harian, pakaian lebaran, peralatan ibadah, pakaian dalam, kebutuhan mandi, sepatu olah raga, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar untuk 180 orang klien terdiri dari 116 orang laki-laki dan 64 orang perempuan.

➤ Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti.

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti, disediakan untuk 1 tahun pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar sebanyak 180 orang. Adapun penyediaan perbekalan kesehatan adalah menyediakan obat-obatan ringan dan penyediaan tenaga medis yang ditunjuk.

➤ Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari.

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari bertujuan untuk mengisi hari tua dengan berbagai pelatihan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan kelayan lanjut usia agar lanjut usia terlantar dapat berdaya guna, kegiatan ini dilaksanakan selama 1 tahun sehingga secara otomatis meningkatkan capaian program.

➤ Pemulasaraan.

Pemulasaraan merupakan Biaya Jasa Penguburan / Pemulangan Klien, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar selama 1 tahun, yang dipergunakan untuk biaya penguburan dan pemulangan kelayan kepada keluarganya setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam panti.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Jaminan Sosial dengan indikator Kinerja :

- 1) Jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial d(target kinerja 160 orang), (realisasi kinerja 126 orang) dengan capaian kinerja 78,75%.

Pencapaian terget kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penanganan Bencana dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, dengan 4 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Permakanan, merupakan pemenuhan kebutuhan permakanan bagi Korban Bencana Alam, Bencana Sosial pada saat bencana maupun pasca bencana skala provinsi, berupa penyediaan logistik untuk 100 orang.
- Penanganan Kelompok Rentan, output dari Sub Kegiatan ini memfasilitasi bagi orang terlantar yang dipulangkan/ dikembalikan ke daeah asal. Secara kinerja Output kegiatan ini adalah dengan pola melayani dan memulangkan orang terlantar ke daerah asalnya. Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 35 orang dan secara otomatis meningkatkan capaian program.
- Penanganan Psikososial dengan output kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan/ pemahaman tentang tugas dan fungsi pelopor perdamaian dalam memelihara perdamaian sosial di daeah sehingga secara otomatis meningkatkan capaian capaian program.

b) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal, dengan satu Sub Kegiatan

yaitu :

- Pengangkatan Anak Antar WNI, output kegiatan ini merupakan kegiatan memfasilitasi Calon Orang Tua/Orang Tua Tunggal yang akan melakukan adopsi anak, dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan yang masuk dan melakukan sidang bersama Instansi terkait, dalam pelaksanaan kegiatan ini tercapai 100% sesuai dengan usulan yang masuk.

Adapun instansi yang dilibatkan dalam sidang pengangkatan anak sebagai berikut :

- Kemenkumham
- Kepolisian
- Dinas Kesehatan
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- DP3PKB
- Pengadilan Agama
- Satuan Bhakti Pekerja Sosial

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan indikator.

- 1) Jumlah PSKS yang berperan aktif (target kinerja 2.593 orang), (realisasi kinerja 3.712) dengan capaian kinerja 143,15%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pemberdayaan Sosial

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi dengan 4 Sub Kegiatan yaitu :

- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi dengan output kegiatan meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi, dengan output kegiatan adalah untuk membangun kohesi sosial masyarakat tanpa kecuali, agar nilai-nilai keluarga dan kesetiakawanan sosial tetap kuat sebagai

modal sosial.

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat, dengan output kegiatan meningkatkan wawasan, keterampilan dan pengetahuan pilar-pilar dalam pembangunan kesejahteraan sosial agar dapat berperan aktif ditengah- tengah masyarakat.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d. Sasaran IV : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Nilai akuntabilitas kinerja OPD (Target kinerja : BB) (Realisasi Kinerja : BB) dengan capaian kinerja 101,47%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun 2 dokumen.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun 1 dokumen.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen evaluasi yang disusun 4 dokumen.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan 4 dokumen.

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya 190 orang.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN

yang mendapatkan honor 14 orang.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun 1 dokumen.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

- e. Sasaran V : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (Target kinerja : 80) (Realisasi Kinerja 83,60 ) dengan capaian kinerja 104,5%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah unit yang di lakukan pemeliharaan 7 unit.
- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara 1 unit.

- (2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 190 stel.
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola 20 dokumen.
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan sub kegiatan jumlah aparatur yang dinilai

mkinerjanya 292 orang.

(3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 2858 buah.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah logistik kantor yang disediakan 3.315 kotak dan 2.013 rim.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan 97.381 lembar.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 20 jenis.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi 371 laporan.

(4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya 4 unit.

(5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun 3.060 surat.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan 100%; jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan 9 rekening; jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan 338.002 KVA dan 24.030 m<sup>3</sup> untuk PDAM.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia 96 orang.



- (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan yang dipelihara 1 unit.
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara 14 unit.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 37 unit.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab 402 unit.
  - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan output kegiatan jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara 43 unit.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				30.613.217.070	29.678.565.434,33	96,94
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				527.714.915	526.097.971	99,69
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	100	219.827.065	219.811.651	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 tahun	1 tahun	100	11.307.050	11.306.250	99,99

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	1 tahun	1 tahun	100	54.084.300	54.003.850	99,85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	100	165.429.000	164.045.700	99,16
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	100	77.067.500	76.930.520	99,82
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>20.362.740.725</b>	<b>19.733.228.010</b>	<b>96,90</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100	19.559.199.153	18.954.821.910	96,91
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 tahun	1 tahun	100	709.727.500	684.592.500	96,45
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 tahun	1 tahun	100	23.818.095	23.818.000	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 tahun	1 tahun	100	69.995.977	69.995.600	99,99
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 tahun	1 tahun	100	117.548.300	114.477.204	97,38
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>232.751.828</b>	<b>231.929.650</b>	<b>99,64</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	223 stel	223 stel	100	139.500.000	138.724.000	99,44
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 tahun	1 tahun	100	82.553.628	82.507.450	99,94
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 tahun	1 tahun	100	10.698.200	10.698.200	100,00
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>2.175.944.448</b>	<b>2.165.717.254</b>	<b>99,52</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	114.794.430	114.782.070	99,98
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175 unit	175 unit	100	354.166.720	351.739.220	99,31
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3857 bh	3857 bh	100	385.898.666	385.688.990	99,94
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	621.091.647	617.378.800	99,40
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	1 tahun	100	44.381.111	44.327.692	99,87

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	100	39.615.000	39.410.000	99,48
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 tahun	100	615.996.874	612.390.482	99,41
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>467.679.086</b>	<b>461.413.440</b>	<b>98,66</b>
	Pengadaan Mebel	50 unit	50 unit	100	156.640.550	156.334.820	99,80
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 tahun	1 tahun	100	240.870.387	240.801.620	99,97
<b>6</b>	<b>Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>4.485.100.116</b>	<b>4.315.353.803</b>	<b>96,21</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.060 buah	3.060 buah	100	29.628.652	29.205.052	98,57
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	965.157.877	799.367.731	82,82
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	21.620.000	10.390.000	48,05
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	3.468.693.587	3.465.361.020	99,90
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>2.243.737.652</b>	<b>2.130.348.102,33</b>	<b>94,94</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	100	50.586.250	46.965.500	92,84
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38 unit	38 unit	100	413.109.373	384.446.461	93,06
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9 kegiatan	9 kegiatan	100	1.554.108.948	1.474.835.197,33	94,89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	26.030.354	25.961.954	99,73
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	186.982.727	185.218.990	99,05
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				<b>7.880.310.059</b>	<b>7.494.919.159</b>	<b>95,10</b>

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>				<b>7.880.310.059</b>	<b>7.494.919.159</b>	<b>95,10</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	461 orang	461 orang	100	1.008.206.408	999.652.500	99,15
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	333 orang	333 orang	100	2.002.687.925	1.896.305.325	94,68
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	21.799 orang	2.918 orang	143,15	4.869.415.726	459.8961.334	94,44
III	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>27.235.683.188</b>	<b>26.879.270.989</b>	<b>98,69</b>
1	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti</b>				<b>4.858.569.342</b>	<b>4.799.009.914</b>	<b>98,77</b>
	Penyediaan Permakanan	359 orang	359 orang	100	2.601.483.359	2.600.508.359	99,96
	Penyediaan Sandang	150 org	150 org	100	469.750.451	469.285.700	99,90
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	12 bulan	12 bulan	100	466.754.450	446.784.000	95,72
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	12 bulan	12 bulan	100	16.470.730	16.440.130	99,81
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	150 orang	150 orang	100	686.376.000	68.634.600	9,99
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	230 org	230 org	100	986.359.802	965.704.075	97,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Keg	1 Keg	100	249.112.950	231.653.050	92,99
2	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti</b>				<b>18.115.608.603</b>	<b>17.828.331.569</b>	<b>98,41</b>
	Penyediaan Makanan	3438 orang	3438 orang	100	13.097.629.987	12.853.277.824	98,13
	Penyediaan Sandang	535 orang	535 orang	100	792.632.316	790.050.150	96,67
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	12 bulan	12 bulan	100	1.067.672.150	1.043.665.240	97,75
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	12 bulan	12 bulan	100	24.641.630	24.637.310	<b>99,98</b>

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	3838 orang	3838 orang	100	1.341.271.454	1.337.995.157	99,75
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	133 orang	133 orang	100	1.287.362.566	1.287.341.550	99,99
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12 bulan	12 bulan	100	198.822.500	192.942.545	97,04
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	12 bulan	12 bulan	100	59.976.000	59.753.793	99,62
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	12 bulan	12 bulan	100	45.600.000	45.600.000	100,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Keg	1 Keg	100	200.000.000	193.068.000	96,53
<b>3</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti</b>				<b>3.250.887.127</b>	<b>3.241.316.160</b>	<b>99,70</b>
	Penyediaan Permakanan	212 orang	212 orang	100	2.088.994.300	2.083.015.363	99,71
	Penyediaan Sandang	180 org	180 org	100	455.327.060	453.977.075	99,70
	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	12 bulan	12 bulan	100	86.860.760	84.767.000	97,58
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	12 bulan	12 bulan	100	31.297.840	31.297.840	100,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	250 org	250 org	100	186.167.785	186.019.500	99,92
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	12 bulan	12 bulan	100	345.739.382	345.739.382	100,00
	Pemulasaraan	12 bulan	12 bulan	100	56.500.000	56.500.000	100,00
<b>4</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti</b>				<b>1.010.618.116</b>	<b>1.010.613.346</b>	<b>99,99</b>
	Penyediaan Permakanan	40 org	40 org	100	502.295.946	502.295.946	100,00
	Penyediaan Sandang	40 org	40 org	100	160.829.820	160.825.050	99,99
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	12 bulan	12 bulan	100	18.761.350	18.761.350	100,00
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	40 org	40 org	100	328731000	328731000	100,00

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
V	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				12.300.886.500	12.001.280.200	77,67
1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal				48.132.950	46.352.200	96,30
	Pengangkatan Anak antar WNI	25 orang	12 orang	48	48.132.950	46.352.200	96,30
2	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>				12.252.753.550	11.954.928.000	97,56
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	18.418 orang	18.383 orang	99,80	11.550.847.000	11.286.411.200	97,71
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.477.966 orang	2.477.966 orang	100	701.906.550	668.516.800	95,24
VI	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				1.144.906.306	1.111.849.116	97,11
1	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>				1.144.906.306	1.111.849.116	97,11
	Penyediaan Permakanan	1 keg	1 keg	100	126.618.000	121.963.662	96,32
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	15 Lansia, 25 Balita	15 Lansia, 25 Balita	100	17.927.400	4.518.150	25,20
	Pelayanan Dukungan Psikososial	30 org	30 org	100	177.349.000	177.349.000	100,00
VII	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				118.280.450	118.278.000	99,96
1	<b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</b>				118.280.450	118.278.000	99,96
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 unit	1 unit	100	118.280.450	118.278.000	99,96
<b>Total</b>						<b>77.284.162.898,33</b>	<b>97,46</b>

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Program/ Kegiatan

No	Program	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Tidak ada permasalahan	-
II	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Tidak ada permasalahan	-
III	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Tidak ada permasalahan	-
IV	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Tidak ada permasalahan	-
V	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Tidak ada permasalahan	-
VI	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Tidak ada permasalahan	-

### 3.1.2. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

#### 3.1.2.1. Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.34.548.068.286,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.965.096.080,00 atau 95,41%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	6
I	Meningkatnya tata kelola organisasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	90	92	102,22
II	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	12,05	44,50	369,21
III	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase serapan tenaga kerja	18,19	24,78	136,22
IV	Meningkatnya hubungan industrial	Hubungan Industrial Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan	54,31	64,43	118,63

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya tata kelola organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (Target Kinerja : 90%) (Realisasi Kinerja : 92%).

Pencapaian dan target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Pelatihan terhadap pencari kerja pada BLK Padang Panjang dan BLK Payakumbuh, dengan output Pelatihan terhadap pencari kerja pada BLK Padang Panjang dan BLK Payakumbuh.
- (2) Pelatihan terhadap pencari kerja magang ke Jepang, dengan output calon tenaga kerja yang dilatih pemagangan ke Jepang.
- (3) Koordinasi stake holder ketenagakerjaan, dengan output instruktur yang mempunyai sertifikat metodologi pelatihan.

- (4) Akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan output Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatnya kualitas tenaga kerja, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase tenaga kerja yang kompeten (Target Kinerja : 12,05%) (Realisasi Kinerja : 44,50%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penempatan Tenaga Kerja., dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja dengan output pencari kerja mengetahui minat, bakat dan kemampuan dini dalam memasuki dunia kerja baik formal maupun informal.
- (2) Perluasan kesempatan kerja dengan output usaha pemula yang dikembangkan.
- (3) Pelayanan informasi pasar kerja dengan output pencari kerja yang diberikan pelayanan informasi pasar kerja.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya serapan tenaga kerja, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase serapan tenaga kerja (Target Kinerja : 18,19%) (Realisasi Kinerja : 24,78%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Hubungan industrial, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari satu kabupaten/kota dengan output peningkatan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan dan program BPJS ketenagakerjaan.
- (2) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan di satu daerah



provinsi, dengan output perusahaan yang mendapatkan pembinaan pengupahan skala provinsi.

- (3) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kta (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK), dengan output Surat Keputusan Penetapan UMP.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

- d. Sasaran IV : Meningkatnya hubungan industrial, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan (Target Kinerja : 54,31%) (Realisasi Kinerja : 64,43%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengawasan Ketenagakerjaan, dicapai dengan pelaksanaan :

- (1) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan output Perusahaan yang wajib lapor ketenagakerjaan (WLK) dilakukan pembinaan pemeriksaan dan pengawasan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>3 Dok</b>	<b>3 Dok</b>	<b>100</b>	<b>24.843.100.835</b>	<b>23.395.532.647</b>	<b>94,17</b>
1	Kegiatan Perencanaan, Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	208.236.517	207.754.667	99,77
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	20.944.269.055	19.562.246.465	93,40
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	98.959.000	98.686.115	99,72
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	131.250.000	125.032.000	95,26
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	779.589.668	777.262.104	99,70

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100	155.377.120	150.300.120	96,73
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100	1.813.766.575	1.777.937.321	98,32
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	100 %	100 %	100	711.652.900	696.313.855	97,84
<b>II</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>44,50%</b>	<b>44,50 %</b>	<b>100</b>	<b>8.333.156.061</b>	<b>8.207.346.230</b>	<b>98,49</b>
1	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	23,93%	23,93%	100	7.830.902.828	7.712.025.050	98,48
2	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	4,91 %	4,91 %	100	77.108.100	76.078.290	98,66
3	Kegiatan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Menengah	2,56 %	2,56 %	100	56.601.400	56.309.250	99,48
4	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	13,87 %	13,87 %	100	368.543.733	362.933.640	98,48
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>24,78 %</b>	<b>24,78 %</b>	<b>100</b>	<b>232.276.490</b>	<b>230.742.870</b>	<b>99,34</b>
1	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab/ Kota	19,58%	19,58%	100	135.246.990	133.873.880	98,98
2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	9,19%	9,19%	100	97.029.500	96.868.990	99,83
<b>IV</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>8,35%</b>	<b>8,35%</b>	<b>100</b>	<b>416.843.300</b>	<b>410.929.233</b>	<b>98,58</b>
1	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih Dari 1 Kab/Kota	0,19%	0,19%	100	248.675.300	246.698.233	99,20
2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	0,02 %	0,02 %	100	150.000.000	146.077.000	97,38
3	Kegiatan Penetapan UMP, UMPS, UMK, UMSK	8,14%	8,14%	100	18.168.000	18.154.000	99,92
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>58,04%</b>	<b>58,04%</b>	<b>100</b>	<b>722.691.600</b>	<b>720.545.100</b>	<b>99,70</b>
1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	58,04%	58,04%	100	722.691.600	720.545.100	99,70

#### 4. Permasalahan Dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	<b>Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan silva disebabkan karena adanya rencana kenaikan TPP pada APBD Perubahan	Untuk penganggaran Tahun 2023 akan dilakukan penghitungan gaji dan tunjangan berdasarkan data jumlah ASN yang valid	Akan menginformasikan kelebihan gaji dan tunjangan kepada BPKAD pada saat rekon, berdasarkan data jumlah ASN yang valid.

#### 3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.17.166.867.354,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.16.453.547.791,00 atau 95,84% dengan dengan uraian sebagai berikut :

##### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kab/Kota	<b>Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	100
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kab/Kota	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE	17 Kab/Kota
II	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	Persentase Perempuan di Legislatif	10,76 %	10,77 %	100,09
			Persentase Perempuan dalam Pengambil kebijakan	11,54 %	21,15 %	183,28
			Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	37,60 %	37,43 %	99,55

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
III	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	<b>Perlindungan Perempuan</b>	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	20	11,73	141,35
IV	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	<b>Pemenuhan Hak Anak</b>	Indeks Pemenuhan Hak Anak	64,73	59,64	92,13
V	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	<b>Perlindungan Khusus Anak</b>	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan - 18 tahun)	405	428	94,32
VI	Meningkatnya usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,60	*2,6 Realisasi tahun 2021 (tahun 2022 belum rilis BKKBN)	100*
		<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	Prevelensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (mCPR)	51,26	*51,26 Realisasi tahun 2021 (tahun 2022 belum rilis BKKBN)	100*
		<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	Kebutuhan ber KB (Unmet Need)	22,20	*22,56 Realisasi tahun 2021 (tahun 2022 belum rilis BKKBN)	98,37*
			Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21,80	*22,2 Realisasi tahun 2021 (tahun 2022 belum rilis BKKBN)	98,16*
			Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Ratio/ASFR)	19,10	*11,8 Realisasi tahun 2021 (tahun 2022 belum rilis BKKBN)	138,21*
VII	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Nilai Akuntabilitas kinerja OPD	BB (70,13)	BB (74,08)	105,63
VIII	Meningkatnya kualitas organisasi Pelayanan	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	92	91,34	99,28

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

a. Sasaran I : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi Kab/Kota dengan indikator kinerja :

- 1) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE, (Target Kinerja : 17 Kab/Kota, realisasi kinerja : 17 Kab/Kota) dengan

capaian kinerja : 100%, Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi, (Target Kinerja : Utama, realisasi kinerja : Utama) dengan capaian kinerja :100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dicapai dengan pelaksanaan :

(1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi, dengan Output kegiatan ini adalah terlaksanannya pembinaan PUG dan PPRG sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi dengan output koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan provinsi (Target kinerja 19 kali,realisasi kinerja 19 kali dengan capaian 100%).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi dengan output jumlah koordinasi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi (Target kinerja 19 kali, realisasi kinerja 19 kali dengan capaian 100%).
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi dengan output jumlah focal poin PUG provinsi yang mendapatkan advokasi kebijakan (Target kinerja 51 orang, realisasi kinerja 55 orang dengan capaian 107,84%).
- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi dengan output jumlah anggota pokja PUG dan anggota forum PUSPA yang mendapatkan sosialisasi (Target Kinerja 55 orang, realisasi kinerja 60 orang dengan capaian 109,1%).

(2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi, yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi dengan output jumlah perempuan yang ditingkatkan pemahamannya di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi (Target

kinerja 200 orang, realisasi kinerja 293 orang dengan capaian 146,5%).

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi dengan output jumlah perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi (Target kinerja 1250 orang, realisasi kinerja 1425 orang dengan capaian 114%).

(3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi dengan output jumlah pengurus lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya (Target kinerja 87 orang, realisasi kinerja 200 orang dengan capaian 229,88%).

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Perempuan di Legislatif, (Target Kinerja : 10,76%), (realisasi kinerja : 10,77%) dengan capaian kinerja : 100,09%,
- 2) Persentase Perempuan dalam Pengambil kebijakan (Target Kinerja : 11,54%), realisasi kinerja : 21,15%) dengan capaian kinerja : 183,28%,
- 3) Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, (Target Kinerja : 37,60%, realisasi kinerja : 37,43%) dengan capaian kinerja : 99,55%

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dicapai dengan pelaksanaan :

- (1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri

dari Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi.
- b) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dicapai dengan pelaksanaan :
- (1) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi, dengan Output kegiatan ini adalah terlaksanannya Pembinaan terhadap Kaukus Perempuan Politik Indonesia Sumatera Barat.
  - (2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksanannya Pembinaan terhadap organisasi perempuan.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dengan indikator kinerja :
- 1) Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk, (usia 18 tahun ke atas (Target Kinerja : 20, realisasi kinerja : 11,73) dengan capaian kinerja : 141,35%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Perlindungan Perempuan, dicapai dengan pelaksanaan :
- (1) Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota, dengan Output Kegiatan ini adalah Terlaksananya upaya Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi dengan output jumlah koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi (Target kinerja 6 kali, realisasi kinerja 6 kali dengan capaian 100%).
  - (2) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi

Tingkat Daerah,

dengan Output kegiatan ini adalah jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PPA) dengan output jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan (Target kinerja 40 orang, realisasi kinerja 45 orang dengan capaian 112,5%).
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (UPTD PPA) dengan output jumlah koordinasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi (Target kinerja 5 kali, realisasi kinerja 8 kali dengan capaian 160%).
- (3) Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi, dengan Output kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan terhadap lembaga penyedia layanan perempuan korban kekerasan dan terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan output jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang dibina (Target Kinerja 10 lembaga, realisasi kinerja 10 lembaga dengan capaian 100%).
  - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (UPTD PPA) dengan output adalah jumlah tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan penanganan yang ditingkatkan kapasitasnya (Target kinerja 60 orang, realisasi kinerja 60 orang dengan capaian 100%).

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

- d. Sasaran IV : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dengan indikator kinerja :



- 1) Indeks Pemenuhan Hak Anak, (Target Kinerja : 64,73, realisasi kinerja : 59,64) dengan capaian kinerja : 92,13%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dicapai dengan pelaksanaan :

- (1) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi, dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data kewenangan provinsi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :

- Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi dengan output jumlah dokumen data gender dan anak yang tersedia (Target Kinerja 2 dokumen, realisasi kinerja 2 dokumen dengan capaian 100%).
- Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi dengan output adalah jumlah buku profil gender anak yang disajikan dan dimanfaatkan (Target kinerja 2 buku, realisasi kinerja 2 buku dengan capaian 100%).

- b) Program Pemenuhan Hak Anak, dicapai dengan pelaksanaan :

- (1) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi, dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya upaya pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan provinsi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi dengan output jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak (Target kinerja 15 lembaga/organisasi, realisasi kinerja 15 lembaga/organisasi dengan capaian 100%).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan

Hak Anak Kewenangan Provinsi dengan output jumlah koordinasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi (Target kinerja 19 kali, realisasi kinerja 19 kali dengan capaian 100%).

(2) Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak kewenangan provinsi, dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya penguatan kesejahteraan dan perlindungan anak se Sumatera Barat sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dengan output jumlah sekolah yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi (Target kinerja 9 sekolah, realisasi kinerja 9 sekolah dengan capaian 100%).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dengan output jumlah koordinasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi (Target kinerja 12 kali, realisasi kinerja 12 kali dengan capaian 100%).
- Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi, dengan output jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi yang mendapatkan edukasi pemenuhan hak anak (Target kinerja 10 lembaga, realisasi kinerja 10 lembaga dengan capaian 100%).

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

e. Sasaran V : Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak dengan indikator kinerja :

- 1) Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun), (Target Kinerja : 405), (realisasi kinerja : 428) dengan capaian kinerja : 94,32%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Perlindungan Khusus Anak, dicapai dengan pelaksanaan :

- (1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang

Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi dengan output adalah jumlah lembaga layanan/organisasi pemerhati anak yang mendapatkan advokasi dan pendampingan (Target kinerja 25 lembaga/organisasi, realisasi kinerja 25 lembaga/organisasi dengan capaian 100%).
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi dengan output jumlah koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi (Target kinerja 6 kali, realisasi kinerja 6 kali dengan capaian 100%).
- (2) Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi, dengan Output kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dalam upaya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan jumlah Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan anak korban kekerasan yang mendapat layanan lintas sektor sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
- Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dengan output jumlah lembaga yang mendapatkan edukasi tentang perlindungan khusus anak (Target kinerja 10 lembaga, realisasi kinerja 10 lembaga dengan capaian 100%).
  - Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (UPTD PPA) dengan output jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan (Target kinerja 50 orang, realisasi kinerja 64 orang dengan capaian 128%).
  - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi (UPTD PPA), dengan

output jumlah koordinasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi (Target kinerja 25 kali, realisasi kinerja 62 kali dengan capaian 248%).

(3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupten/kota, dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus bagi anak dan terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi, dengan output jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang ditingkatkan kapasitasnya (Target kinerja 40 orang, realisasi kinerja 40 orang dengan capaian 100%).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (UPTD PPA) dengan output jumlah tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan anak yang ditingkatkan kapasitasnya (Target kinerja 120 orang, realisasi kinerja 120 orang dengan capaian 100%).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dengan output jumlah lembaga penyedia layanan anak yang terkoordinir (Target kinerja 30 lembaga, realisasi kinerja 30 lembaga dengan capaian 100%).

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V.

f. Sasaran VI : Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja :

- 1) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR), (Target Kinerja : 2,60, realisasi kinerja : \*\*2,6 realisasi tahun 2021, tahun 2022 belum rilis BKKBN).

- 2) Prevelensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR), (Target Kinerja : 51,26, realisasi kinerja : \*\*50,60 realisasi tahun 2021, tahun 2022 belum rilis BKKBN).
- 3) Kebutuhan Ber KB Unmet Need, (Target Kinerja : 22,20, realisasi kinerja : \*\*22,40 realisasi tahun 2021, tahun 2022 belum rilis BKKBN) .
- 4) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP), (Target Kinerja : 21,80, realisasi kinerja : \*\*22,2 realisasi tahun 2021, tahun 2022 belum rilis BKKBN).
- 5) Angka Kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Ratio (ASFR), (Target Kinerja : 19,10, realisasi kinerja : \*\*11,8 realisasi tahun 2021, tahun 2022 belum rilis BKKBN).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengendalian Penduduk, dicapai dengan pelaksanaan:
  - (1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP), Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat provinsi advokasi dan sosialisasi GDPK, advokasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
    - Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) dengan output adalah jumlah kebijakan pemerintah daerah yang diserasikan (Target kinerja 1 kebijakan, realisasi kinerja 1 kebijakan dengan capaian 100%).
    - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi dengan output persentase perangkat daerah yang memanfaatkan grand design pembangunan (Target kinerja 30%, realisasi kinerja 30% dengan capaian

- 100%).
- Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain dengan output jumlah pengurus kelompok kerja (pokja) kampung KB yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pembentukan rumah data kependudukan (Target kinerja 19 Kab/Kota, realisasi kinerja 19 Kab/Kota dengan capaian 100%).
- (2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi, dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi, penyediaan dan pengolahan data kependudukan berbasis keluarga, terlaksananya model solusi pengendalian dampak kependudukan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga dengan output jumlah dokumen data kependudukan yang diolah (Target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen dengan capaian 100%).
- b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dicapai dengan pelaksanaan :
- (1) Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Penguatan Kerjasama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :
- Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan output jumlah materi KIE sesuai kearifan lokal yang dikembangkan (Target kinerja 1 materi, realisasi kinerja 1 materi dengan capaian 100%).
  - Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja dengan output jumlah stakeholder yang mendapatkan advokasi dan KIE program KKBK

(Target kinerja 100 orang, realisasi kinerja 100 orang dengan capaian 100%).

- (2) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian program ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga dan fasilitasi pengembangan program ketahanan keluarga di Kampung KB sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :

- Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPk dengan output jumlah jejaring kemitraan yang dilibatkan (Target kinerja 20 jejaring kemitraan, realisasi kinerja 20 jejaring kemitraan dengan capaian 100%).

- c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga (KS), dicapai dengan pelaksanaan :

- (1) Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan output jumlah aparatur terkait ketahanan dan kesejahteraan (Target kinerja 36 orang, realisasi kinerja 36 orang dengan capaian 100%).
- Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK dengan output jumlah tenaga penyuluh pelayanan keluarga (Target kinerja 30 orang, realisasi kinerja 30 orang dengan capaian 100%).

- (2) Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga, dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya peningkatan kapasitas mitra dan orga sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan output jumlah bimtek (Target kinerja 2 kali, realisasi kinerja 2 kali dengan capaian 100%).
- Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB dengan output jumlah kelompok kerja (Pokja) Kampung KB yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengembangan program ketahanan (Target kinerja 3 pokja kampung KB , realisasi kinerja 3 pokja kampung KB dengan capaian 100%).

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VI.

g. Sasaran VII : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, (Target Kinerja : BB (70,13), realisasi kinerja : BB (74,08) dengan capaian kinerja : 105,63%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan :

- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Output kegiatan ini adalah Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output adalah jumlah dokumen renja dan renstra yang disusun (target kinerja 2 dokumen, realisasi kinerja 2 dokumen dengan capaian 100%).
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan output jumlah dokumen RKA yang disusun (target kinerja 3 dokumen, realisasi kinerja 3 dokumen



dengan capaian 100%).

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan output jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun (target kinerja 2 dokumen, realisasi kinerja 2 dokumen dengan capaian 100%).
- Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD, indikator kinerja adalah jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun (target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen dengan capaian 100%).
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, indikator kinerja adalah jumlah dokumen evaluasi yang disusun (target kinerja 6 dokumen, realisasi kinerja 6 dokumen dengan capaian 100%).
- Evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan output jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (target kinerja 4 dokumen, realisasi kinerja 4 dokumen dengan capaian 100%).

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VII.

h. Sasaran VIII : Meningkatnya Kualitas Organisasi dengan indikator kinerja :

- 1) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, (Target Kinerja : 92, realisasi kinerja : 91,34) dengan capaian kinerja : 99,28%

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan :

- (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (Target kinerja 55 orang, realisasi kinerja 55 orang dengan capaian 100%).
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- dengan output jumlah ASN yang mendapatkan honor (Target kinerja 17 orang, realisasi kinerja 17 orang dengan capaian 100%).
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output adalah jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun (Target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen dengan capaian 100%).
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan output jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD (Target kinerja 18 dokumen, realisasi kinerja 18 dokumen dengan capaian 100%).
- (2) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD, penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD, pengamanan barang milik daerah SKPD sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Target kinerja 3 dokumen, realisasi kinerja 3 dokumen dengan capaian 100%).
- (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan output jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut (Target kinerja 55 stel, realisasi kinerja 55 stel dengan capaian 100%).
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan output jumlah bimtek yang dilaksanakan (Target kinerja 7 kali, realisasi kinerja 7 kali dengan capaian 100%).
- (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Output kegiatan ini adalah Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor, penatausahaan arsip dinamis pada SKPD,

fasilitasi kunjungan tamu, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan barang cetakan, dan penggandaan, penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyedia peralatan dan perlengkapan kantor sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor (Target kinerja 11 jenis, realisasi kinerja 11 jenis dengan capaian 100%).
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan output jumlah ac yang disediakan, jumlah televisi yang disediakan, jumlah vertikal blinds dinas yang disediakan, jumlah vertikal blinds (UPTD PPA) yang disediakan (Target kinerja 3 unit, 1 unit, 50 meter 50 meter, realisasi kinerja 3 unit, 1 unit, 50 meter, 50 meter dengan capaian 100%).
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output jumlah alat tulis kantor yang disediakan, jumlah bahan logistik yang disediakan (Target kinerja 20 jenis, 4 jenis, realisasi kinerja 20 jenis, 4 jenis dengan capaian 100%).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output jumlah cetak amplop OPD yang disediakan, jumlah cetak kop surat yang disediakan, jumlah cetak kwitansi yang disediakan, jumlah cetak map OPD yang disediakan, jumlah penggandaan yang disediakan (Target kinerja 40 kotak, 15 rim, 200 buah, 2000 buah, 30000 lembar, realisasi kinerja 40 kotak, 15 rim, 200 buah, 2000 buah, 30000 lembar dengan capaian 100%).
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output adalah jumlah surat kabar yang disediakan (Target kinerja 120 eksemplar, realisasi kinerja 120 eksemplar dengan capaian 100%).
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output adalah jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi (Target kinerja 12 dokumen, realisasi kinerja 12 dokumen dengan capaian 100%).
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan output jumlah arsip dinamis yang dikelola (Target

kinerja 20 bundel, realisasi kinerja 20 bundel dengan capaian 100%).

- (5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Output kegiatan ini adalah Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Output kegiatan ini adalah terlaksananya jasa penyediaan surat-menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pelayanan umum kantor sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan output jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia (Target kinerja 19 orang, realisasi kinerja 19 orang dengan capaian 100%).
  - Pengadaan Mebel dengan output jumlah filling cabinet yang disediakan, jumlah kursi kerja eselon IV yang disediakan, jumlah kursi kerja staf yang disediakan, jumlah lemari arsip yang disediakan, jumlah meja kerja eselon IV yang disediakan, jumlah meja kerja staf yang disediakan, jumlah meja rapat yang disediakan (Target kinerja 4 unit, 5 unit, 2 unit, 2 unit, 3 unit, 5 unit, 60 unit, realisasi kinerja 4 unit, 5 unit, 2 unit, 3 unit, 5 unit, 60 unit dengan capaian 100%).
  - Penyediaan jasa surat menyurat, dengan output jumlah surat surat masuk dan surat surat keluar dalam 1 tahun (Target kinerja 1500 surat, realisasi kinerja 1489 surat dengan capaian 92,26%).
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output jumlah laptop yang disediakan, jumlah personal komputer yang disediakan, jumlah printer dan scanner yang disediakan (Target kinerja 10 unit, 9 unit, 17 unit, realisasi kinerja 10 unit, 9 unit, 17 unit dengan capaian 100%).
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan output jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan, jumlah tagihan internet yang dibayarkan, jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan, jumlah tagihan telepon/fax yang dibayarkan (Target kinerja 2333,333 M3, 2 unit/bulan, 110666,6667 Kwh, 450

menit, realisasi kinerja 2183,9996 M3, 2 unit/bulan, 106505,60 Kwh, 264,195 menit dengan capaian masing-masing 93,60%,100%,96,24%,58,71%).

(7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan Output kegiatan ini adalah terpeliharanya barang milik daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program, yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (Target kinerja 8 unit, realisasi kinerja 8 unit dengan capaian 100%).
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output jumlah pemeliharaan rutin/berkala genset yang dilaksanakan, jumlah pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi yang dilaksanakan, jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan pendingin yang dilaksanakan (Target kinerja 1 unit, 38 unit, 23 unit, realisasi kinerja 1 unit, 38 unit, 23 unit dengan capaian 100%).
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output jumlah pengecatan gedung kantor yang dilaksanakan, jumlah rehab gedung kantor UPTD PPA (tembok, pagar besi, loteng/plafon, les plang, pintu, jendela, teralis, partisi ruangan, tempat parkir, rehab WC, pengecatan) yang dilaksanakan (Target kinerja 1 unit, 1 unit, realisasi kinerja 1 unit, 1 unit dengan capaian 100%).

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VIII.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				16.589.140.704	15.878.501.465	95,72

No.	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100</b>	<b>10.108.900.368</b>	<b>9.642.303.026</b>	<b>95,38</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>85 Persen</b>	<b>85 Persen</b>	<b>100</b>	<b>408.962.650</b>	<b>404.109.563</b>	<b>98,81</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	184.955.900	180.602.100	<b>97,65</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	14.048.200	13.956.200	<b>99,35</b>
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	9.440.300	9.439.900	<b>100,00</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	5.712.600	5.712.600	<b>100,00</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	100	50.632.650	50.600.250	<b>99,94</b>
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	144.173.000	143.798.513	<b>99,74</b>
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>100</b>	<b>6.567.247.654</b>	<b>6.151.308.527</b>	<b>93,67</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	55 Orang	100	6.230.744.554	5.821.089.477	<b>93,43</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 Orang	17 Orang	100	209.153.000	203.075.500	<b>97,09</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	40.276.700	40.109.700	<b>99,59</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	100	87.073.400	87.033.850	<b>99,95</b>
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4 Sub Kegiatan</b>	<b>4 Sub Kegiatan</b>	<b>100</b>	<b>12.130.000</b>	<b>11.843.100</b>	<b>97,63</b>
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	12.130.000	11.843.100	<b>97,63</b>
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2 Sub Kegiatan</b>	<b>2 Sub Kegiatan</b>	<b>100</b>	<b>102.359.100</b>	<b>102.118.396</b>	<b>99,76</b>

No.	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55 Stel	55 Stel	100	71.250.000	71.250.000	<b>100,00</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Kali	7 Kali	100	31.109.100	30.868.396	<b>99,23</b>
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>8 Sub Kegiatan</b>	<b>8 Sub Kegiatan</b>	<b>100</b>	<b>722.354.256</b>	<b>719.969.116</b>	<b>99,67</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis	11 jenis	100	21.544.200	21.535.800	<b>99,96</b>
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 unit 1 unit 50 meter 50 meter	3 unit 1 unit 50 meter 50 meter	100	52.157.600	50.317.000	<b>96,47</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 Jenis 4 Jenis	20 Jenis 4 Jenis	100	80.063.700	79.665.650	<b>99,50</b>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40 Kotak 15 Rim 200 Buah 2000 Buah 30000 Lembar	40 Kotak 15 Rim 200 Buah 2000 Buah 30000 Lembar	100	30.895.000	30.895.000	<b>100,00</b>
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120 Eksemplar	120 Eksemplar	100	14.520.000	14.520.000	<b>100,00</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100	519.397.756	519.259.666	<b>99,97</b>
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Bundel	20 Bundel	100	3.776.000	3.776.000	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>4 jenis</b>	<b>100</b>	<b>606.784.045</b>	<b>599.444.400</b>	<b>98,79</b>
	Pengadaan Mebel	4 Unit 5 Unit 2 Unit 2 Unit 3 Unit 5 Unit 60 Unit	4 Unit 5 Unit 2 Unit 2 Unit 3 Unit 5 Unit 60 Unit	100	186.131.900	184.837.200	<b>99,30</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit 9 Unit 17 Unit	10 Unit 9 Unit 17 Unit	100	420.652.145	414.607.200	<b>98,56</b>
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100</b>	<b>971.501.511</b>	<b>943.312.074</b>	<b>97,10</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 surat	1489 surat	92,26	981.250	974.250	<b>99,29</b>

No.	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2333,333 M3 2 unit/bulan 110666,666 7 Kwh 450 Menit	2183,9996 M3 2 unit/bulan 106505,60 Kwh 264,195 Menit	93,60 100 96,24 58,71	241.165.000	224.153.588	<b>92,95</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19 orang	19 orang	100	729.355.261	718.184.236	<b>98,47</b>
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100</b>	<b>717.561.152</b>	<b>710.197.850</b>	<b>98,97</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 unit	8 unit	100	157.827.000	152.474.700	<b>96,61</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit 38 Unit 23 Unit	1 Unit 38 Unit 23 Unit	100	63.790.152	63.149.550	<b>99,00</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	100	495.944.000	494.573.600	<b>99,72</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>11,54 Persen</b>	<b>21,15 Persen</b>	<b>183</b>	<b>3.283.412.611</b>	<b>3.266.241.712</b>	<b>99,48</b>
<b>1</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	<b>19 Kab/Kota</b>	<b>19 Kab/Kota</b>	<b>100</b>	<b>160.998.711</b>	<b>159.667.514</b>	<b>99,17</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	19 Kali	19 Kali	100	99.710.000	99.702.264	<b>99,99</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	19 Kali	19 Kali	100	6.101.100	6.026.000	<b>98,77</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	51 orang	55 orang	107,84	30.640.000	30.320.650	<b>98,96</b>
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	55 Orang	60 Orang	109,1	24.547.611	23.618.600	<b>96,22</b>



No.	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100	2.479.830.000	2.471.656.109	99,67
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	200 Orang	293 Orang	146,5	255.360.000	253.909.000	99,43
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1250 Orang	1425 Orang	114	2.224.470.000	2.217.747.109	99,70
3	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100	642.583.900	634.918.089	98,81
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	87 Orang	200 Orang	229,88	642.583.900	634.918.089	98,81
III	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	84 Persen	100 Persen	119	322.573.850	254.115.200	78,78
1	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100	61.714.700	60.664.750	98,30
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	6 Kali	6 Kali	100	61.714.700	60.664.750	98,30

No.	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	100	135.835.000	69.897.300	51,46
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	40 Orang	45 Orang	112,5	40.000.000	28.643.300	71,61
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (UPTD PPA)	5 Kali	8 Kali	160	95.835.000	41.254.000	43,05
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100	125.024.150	123.553.150	98,82
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Lembaga	10 Lembaga	100	96.960.000	26.708.150	99,88
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (UPTD PPA)	60 Orang	60 Orang	100	28.064.150	96.845.000	95,17
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	70 Indeks	74,21 Indeks	106	273.460.000	273.276.783	99,93
1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100	273.460.000	273.276.783	99,93

No.	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	125 Orang	200 Orang	160	273.460.000	273.276.783	99,93
V	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>90 Persen</b>	<b>93,75 Persen</b>	<b>133</b>	<b>128.899.300</b>	<b>128.520.100</b>	<b>99,71</b>
1	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>19 Kabupaten/ Kota</b>	<b>19 Kabupaten/ Kota</b>	<b>100</b>	<b>128.899.300</b>	<b>128.520.100</b>	<b>99,71</b>
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100	69.875.650	69.749.550	99,82
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 Buku	2 Buku	100	59.023.650	58.770.550	99,57
VI	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>3 Kabupaten/ Kota</b>	<b>6 Kabupaten/ Kota</b>	<b>200</b>	<b>281.141.150</b>	<b>277.515.488</b>	<b>98,71</b>
1	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>19 Kabupaten/ Kota</b>	<b>19 Kabupaten/ Kota</b>	<b>100</b>	<b>147.707.400</b>	<b>146.721.300</b>	<b>99,33</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	15 Lembaga/Or ganisasi	15 Lembaga/Or ganisasi	100	42.500.500	42.409.500	99,79
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	19 Kali	19 Kali	100	105.206.900	104.311.800	99,15
2	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>19 Kab/Kota</b>	<b>19 Kab/Kota</b>	<b>100</b>	<b>133.433.750</b>	<b>130.794.188</b>	<b>98,02</b>
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	9 Sekolah	9 Sekolah	100	73.745.950	72.310.500	98,05

No.	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	12 Kali	12 Kali	100	50.009.500	48.805.388	<b>97,59</b>
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	10 Lembaga	10 Lembaga	100	9.678.300	9.678.300	<b>100,00</b>
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>84 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>119</b>	<b>2.190.753.425</b>	<b>2.036.529.156</b>	<b>92,96</b>
<b>1</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>19 Kabupaten/ Kota</b>	<b>19 Kabupaten/ Kota</b>	<b>100</b>	<b>131.867.705</b>	<b>130.890.865</b>	<b>99,26</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	25 Lembaga Organisasi	25 Lembaga/Or ganisasi	100	41.362.405	41.243.065	<b>99,71</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	6 Kali	6 Kali	100	90.505.300	89.647.800	<b>99,05</b>
<b>2</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>19 Kabupaten/ Kota</b>	<b>19 Kabupaten/ Kota</b>	<b>100</b>	<b>1.739.099.720</b>	<b>1.595.603.729</b>	<b>91,75</b>
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	10 Lembaga	10 Lembaga	100	505.785.720	505.472.039	<b>99,94</b>
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi <b>(UPTD PPA)</b>	50 Orang	64 Orang	128	73.952.000	48.569.500	<b>65,68</b>

No.	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (UPTD PPA)	25 Kali	62 Kali	248	1.159.362.000	1.041.562.190	89,84
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/ Kota	19 Kabupaten/ Kota	100	319.786.000	310.034.562	96,95
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang	100	55.120.000	52.839.840	95,86
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (UPTD PPA)	120 Orang	120 Orang	100	134.466.000	127.495.420	94,82
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	30 Lembaga	100	130.200.000	129.699.302	99,62
	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				577.726.650	575.046.326	99,54
I	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	80 Persen	100 Persen	125	143.638.000	142.936.900	99,51

No.	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	4 Laporan	4 Laporan	100	107.618.000	107.051.000	99,47
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100	33.300.000	33.100.000	99,40
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	30 %	30 %	100	23.270.000	23.051.900	99,06
	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	19 Kabupaten/ Kota	19 Kabupaten/ Kota	100	51.048.000	50.899.100	99,71
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100	36.020.000	35.885.900	99,63
	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	100	36.020.000	35.885.900	99,63
II	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>55,12 Persen</b>	<b>55,12 Persen</b>	<b>100</b>	<b>143.318.650</b>	<b>142.526.500</b>	<b>99,45</b>
1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	100	123.318.650	122.526.500	99,36

No.	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Materi	1 Materi	100	73.688.650	73.310.000	<b>99,49</b>
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	100 Orang	100 Orang	100	49.630.000	49.216.500	<b>99,17</b>
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>100</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	20 Jejaring Kemitraan	20 Jejaring Kemitraan	100	20.000.000	20.000.000	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>59,30 Indeks</b>	<b>59,30 Indeks</b>	<b>100</b>	<b>290.770.000</b>	<b>289.582.926</b>	<b>99,59</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>100</b>	<b>75.770.000</b>	<b>75.185.796</b>	<b>99,23</b>
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	36 Orang	36 Orang	100	50.000.000	49.500.000	<b>99,00</b>
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	30 Orang	30 Orang	100	25.770.000	25.685.796	<b>99,67</b>

No.	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 Laporan	3 Laporan	100	215.000.000	214.397.130	99,72
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	12 Ormas	12 Ormas	100	150.000.000	149.767.950	99,85
	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	3 Pokja Kampung KB	3 Pokja Kampung KB	100	65.000.000	64.629.180	99,43
					<b>17.166.867.354</b>	<b>16.453.547.791</b>	<b>95,84</b>

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-masing

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		
1	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi</b>		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Sinergi dan Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO belum optimal.  Kesulitan dalam mengungkap dan mendapatkan data terpilah tentang kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.  Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan dan mengungkap kasus kekerasan pada perempuan.	Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO secara optimal dan terkoordinasi  Perlu peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi serta komitmen semua pihak terhadap pengungkapan dan pelaporan data yang valid dan realtime tentang kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO  Perlu peningkatan upaya sosialisasi, dan advokasi aparat penegak hukum sehingga ada komitmen bersama terhadap aturan yang telah dibuat terkait banyaknya kasus kekerasan perempuan termasuk TPPO karena korban kebanyakan anak remaja yang belum terakomodir oleh aturan yang ada



No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
2	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>		
	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Sinergi dan Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO belum optimal	Meningkatkan upaya promosi dan edukasi serta penguatan jejaring antar lembaga layanan perempuan dan perlindungan anak Melakukan kemitraan dan perjanjian kerjasama (MoU) yang efektif dan efisien.
<b>II</b>	<b>Perlindungan Khusus Anak</b>		
1	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Adanya Sikap Sosial dan praktek budaya memaafkan kekerasan yang menjadi polemik dalam penyelesaian kasus kekerasan.	Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas program terutama dengan Aparat Penegak Hukum dan sektor terkait yang tergabung di dalam Tim Koordinasi Penanganan ABH.
		Masih kurangnya pengetahuan tentang akar penyebab kekerasan terhadap anak serta masih rendahnya pemahaman tentang penegakan hukum	Sosialisasi UU SPPA No. 11 Tahun 2014 bekerja sama dengan UPPA Poda/Polres. Sosialisasi UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersama lembaga terkait.
		Masih lemahnya koordinasi dan sinergisitas program dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak termasuk prinsip perlindungan pada anak belum dipahami secara utuh oleh OPD terkait dan organisasi masyarakat dan lembaga layanan yang ada	Meningkatkan upaya sosialisasi koordinasi, advokasi dan menjalin kerjasama (MoU) dengan pihak terkait Mendorong Kab/Kota membentuk komunitas perlindungan anak terpadu melibatkan keluarga, anak dan masyarakat sebagai wilayah akar rumput
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas program terutama dengan Aparat Penegak Hukum dan lintas sektor terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanganan ABH Provinsi Sumatera Barat ( Kep Gub Sumbar No: 463-78-2022. Sosialisasi UU SPPA No. 11 Tahun 2014 bekerja sama dengan UPPA Poda/Polres. Sosialisasi UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersama lembaga terkait.
2	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>		
	Sub Kegiatan: Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dukungan sarana dan prasarana termasuk anggaran untuk kegiatan KIE Anak masih terbatas	Advokasi ke OPD terkait dan Tim Anggaran untuk memperluas dan pengembangan media KIE Kerjasama dengan media massa dan dunia usaha
3	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>		

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kapasitas sumber daya lembaga dalam penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus belum optimal	Meningkatkan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui bimbingan teknis Memberikan reward dan apresiasi kepada lembaga penyedia layanan anak yang terbaik dalam penyelenggara upaya perlindungan anak Pembinaan berjenjang dari provinsi sampai ke kab kota dalam dunia usaha (APSAI) untuk peningkatan kapasitas sumberdaya Lembaga
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kesamaan persepsi dan komitmen jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus masih belum optimal karena kendala anggaran, kendala SDM dan kendala dukungan	Melakukan penguatan jejaring antar lembaga melalui rapat-rapat koordinasi, advokasi kebijakan sinergisitas program dan fokus-fokus grup diskusi (FGD) Merevisi SK Gubernur tentang pembentukan forum lembaga layanan perlindungan anak provinsi Sumatera Barat periode 2018-2020
<b>I</b>	<b>PERLINDUNGAN PEREMPUAN (UPTD)</b>		
<b>1</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sebagian masyarakat masih ragu untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, karena adanya anggapan hal tersebut merupakan aib yang harus ditutupi. Hal ini menyebabkan belum semua kasus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat dilaporkan ke unit layanan perlindungan perempuan dan anak. Jumlah personil khususnya jabatan pelaksana sangat sedikit, sehingga pelaksanaan layanan pengaduan, penjangkauan dan pengelolaan kasus belum berjalan optimal. Kendaraan operasional sebagai sarana dalam memberikan layanan penjangkauan masih kurang.	Melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus yang dialami. Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA sebagai lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak melalui media cetak dan elektronik. Mengajukan Analisis Beban Kerja untuk mengisi kekosongan jabatan pelaksana Mengajukan permohonan penambahan kendaraan dinas untuk UPTD PPA.
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (2.08.03.1.02.02)	Belum tersedianya Jabatan Fungsional (Psikolog dan Advokat) untuk pelaksanaan layanan pendampingan korban. Belum tersedianya tenaga Mediator pada UPTD PPA, sehingga layanan mediasi belum berjalan optimal. Lembaga/Instansi terkait belum memahami tugas dan fungsi masing-masing dalam penanganan masalah perempuan dan anak.	Memfaatkan jejaring kerja sama dengan lembaga/instansi terkait (Unand, UNP, LBH dan Rumah Sakit) dalam penyediaan Jasa Ahli untuk pendampingan korban. Mengajukan Analisis Beban Kerja untuk mengisi kekosongan jabatan fungsional dan pelaksana. Mengikuti pelatihan mediator bagi petugas layanan UPTD PPA untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan layanan mediasi. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan FGD penanganan kasus yang melibatkan lintas sektor untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang tugas dan fungsi masing-masing dalam penanganan masalah perempuan dan anak.

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
		Kendaraan operasional sebagai sarana dalam memberikan layanan pendampingan masih kurang.	Mengajukan permohonan penambahan kendaraan dinas untuk UPTD PPA.
2	<b>Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>		
A	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Keberadaan aplikasi Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (SIPPAK) belum dikenal masyarakat.  Aplikasi SIPPAK belum <i>user friendly</i> sehingga masih ditemui kesulitan dalam pemakaiannya.	Mengencarkan sosialisasi aplikasi SIPPAK sebagai media pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak melalui media cetak dan elektronik.  Menyempurnakan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi SIPPAK agar mudah digunakan.
II	<b>Program: Perlindungan Khusus Anak (UPTD)</b>		
1	<b>Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Sebagian masyarakat masih ragu untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, karena adanya anggapan hal tersebut merupakan aib yang harus ditutupi. Hal ini menyebabkan belum semua kasus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat dilaporkan ke unit layanan perlindungan perempuan dan anak.  Jumlah personil khususnya jabatan pelaksana sangat sedikit, sehingga pelaksanaan layanan pengaduan, penjangkauan dan pengelolaan kasus belum berjalan optimal.  Kendaraan operasional sebagai sarana dalam memberikan layanan pendampingan masih kurang.	Melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus yang dialami.  Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA sebagai lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak melalui media cetak dan elektronik.  Mengajukan Analisis Beban Kerja untuk mengisi kekosongan jabatan pelaksana  Mengajukan permohonan penambahan kendaraan dinas untuk UPTD PPA
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Belum tersedianya Jabatan Fungsional (Psikolog dan Advokat) untuk pelaksanaan layanan pendampingan korban  Belum tersedianya tenaga Mediator pada UPTD PPA, sehingga layanan mediasi belum berjalan optimal.  Lembaga/Instansi terkait belum memahami tugas dan fungsi masing-masing dalam penanganan masalah perempuan dan anak  Kendaraan operasional sebagai sarana dalam memberikan layanan pendampingan masih kurang.	Memanfaatkan jejaring kerja sama dengan lembaga/instansi terkait (Unand, UNP, LBH dan Rumah Sakit) dalam penyediaan Jasa Ahli untuk pendampingan korban.  Mengajukan Analisis Beban Kerja untuk mengisi kekosongan jabatan fungsional dan pelaksana.  Mengikuti pelatihan mediator bagi petugas layanan UPTD PPA untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan layanan mediasi.  Melaksanakan Rapat Koordinasi dan FGD penanganan kasus yang melibatkan lintas sektor untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang tugas dan fungsi masing-masing dalam penanganan masalah perempuan dan anak.

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
			Mengajukan permohonan penambahan kendaraan dinas untuk UPTD PPA.
2	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terbatasnya narasumber ahli di daerah, khususnya untuk pelatihan manajemen kasus. Sebagian besar peserta pelatihan SIMFONI PPA merupakan operator SIMFONI PPA baru, sehingga pada saat pelatihan dilaksanakan diperlukan waktu yang relatif lama untuk pengulangan materi dasar.	Memakai narasumber daerah yang relevan dengan tujuan kegiatan. Membuat komitmen bersama saat pelatihan, sehingga tidak terjadi penggantian operator yang terlalu cepat. Apabila harus terjadi penggantian operator, operator yang telah mendapat pelatihan wajib memberikan pengetahuan yang didapat kepada operator pengganti.
III	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>		
1	<b>Kegiatan: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>		
	Sub Kegiatan: Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Belum serasinya kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam Program KKBPK	Meningkatkan kuantitas dan kualitas rapat koordinasi tingkat provinsi dalam program KKBPK
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Belum samanya persepsi dalam pemanfaatan GDPK di Provinsi Sumbar Belum adanya pedoman tentang pemanfaatan GDPK di daerah	Melakukan rapat koordinasi Tim pelaksana GDPK tingkat Provinsi Sumbar Membuat SK Gubernur Sumbar tentang Tim Pelaksana GDPK Provinsi Sumbar
	Sub Kegiatan: Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integritas Program KKBPK dan Sektor Lain	Belum optimalnya pemanfaatan Rumah Data yang ada di kab/kota	Melakukan rapat koordinasi peningkatan kualitas dan pemanfaatan Rumah Data untuk memperkuat integrasi program KKBPK dan sector lain
2	<b>Kegiatan: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b>		
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Kegiatan baru dilakukan, bagaimana pemanfaatan data kependudukan berbasis keluarga belum dipetakan untuk program KKBPK	Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan berbasis keluarga sebagai pemetaan program KKBPK
IV	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana</b>		
1.	<b>Kegiatan: Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>		
	Sub Kegiatan: Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi,	Masih kurangnya SDM pengelola kegiatan dalam penyediaan materi, kesulitan dalam mencari ide sesuai	Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan materi promosi KKBPK

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	kearifan lokal	Pengembangan teknik KIE dalam memberikan pemahaman KKBPK bagi masyarakat
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Belum optimalnya advokasi dan KIE yang dilakukan karena masih kurangnya dukungan stakeholder dalam program KKBPK	Meningkatkan strategi advokasi dan KIE Program KKBPK
<b>V</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera</b>		
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		
	Sub Kegiatan: Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga karena pembinaan dilakukan sebatas di lingkungan pemprov Sumbar dengan menjadikan ASN sebagai DUTA ASIK	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ASN melalui program KKBPK dan menjadikan ASN sebagai DUTA ASIK yang dapat menjadi motivator, pusat konseling dan role model ketahanan keluarga di lingkungan kerja dan tempat tinggal
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Belum optimalnya pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) karena sasaran kegiatan ini baru 1 kabupaten Pasaman barat, mengidentifikasi permasalahan dan pembinaan kepada TPK dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga beresiko stunting	Melakukan rapat monev dan pembinaan terhadap TPK untuk mengidentifikasi permasalahan di tingkat lapangan dengan mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka percepatan penurunan stunting
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Belum optimalnya peningkatan kapasitas kader BKB karena hanya diwakili oleh beberapa orang kader dari masing-masing Kab./Kota, sehingga rendahnya kualitas kader dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki Balita	Bimtek peningkatan kapasitas kader BKB, salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas Kader BKB dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki Balita
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Belum optimalnya peran serta dan kualitas Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumberdaya kearifan lokal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing	Bimtek kapasitas pokja kampung KB dan melakukan pemberdayaan untuk berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan di wilayahnya dengan memanfaatkan potensi wilayah yang ada

### 3.1.2.3. Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan, pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.38.249.124.050,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.36.377.148.451,00 atau 95,11%, dengan uraian

sebagai berikut:

## 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Penanganan Kerawanan Pangan	Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis (ton) *	833.110	885.080	106,24
II	Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,50	89,80	108,85
III	Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat (%)	83,00	88,50	106,63
IV	Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV)			
			4.1. Beras (%)	≤ 10	≤ 10	100,00
			4.2. Cabe Merah (%)	≤ 25	≤ 25	100,00
			4.3. Bawang Merah (%)	≤ 25	≤ 25	100,00
V	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (75)	BB (78,27)	104,36
IV	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (%)	75	81,82	109,09

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya Ketersediaan Pangan, dengan indikator kinerja :

- 1) Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis (ton) (Target Kinerja : 833,11 ton) (Realisasi Kinerja : 885.08 ton).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut 106,24% dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub

kegiatan :

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan dengan output sub kegiatan ini Data analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM, Terlaksananya pemantauan harga dan jaringan informasi harga pangan, dan Terlaksananya Pertemuan Apresiasi dan rapat koordinasi menghadapi HBKN.
  - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan output sub kegiatan ini Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal dan Terlaksananya pemberdayaan kelompok wanita di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan, ternak kecil).
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan output sub kegiatan ini Tersedianya data dan informasi distribusi dan akses pangan serta Lancarnya Distribusi, Operasi Pasar dan Akses Pangan ke Masyarakat.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Lainnya dengan output sub kegiatan ini Tersedianya data pemantauan produksi dan ketersediaan pangan wilayah Sumatera Barat, Kesepakatan Pasokan Bahan Pangan, dan Terlaksananya Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan.
  - Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan output sub kegiatan ini Berkembang dan terbinanya gapoktan LDPM, terlaksananya Kajian Penggilingan Padi Kecil dan Terlaksananya Penilaian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara.
- (2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, dengan sub kegiatan :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi dengan output sub kegiatan ini Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Lumbung Pangan Masyarakat.
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan output sub kegiatan ini Tertanggulangnya permasalahan rentan pangan akibat bencana alam/sosial/ gejolak harga/ keadaan darurat.

- (3) Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi, dengan sub kegiatan :
- Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan output sub kegiatan ini Terlaksananya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui TMMD/N dan Terlaksananya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun dengan output sub kegiatan ini Tersedianya data hasil analisa konsumsi pangan masyarakat berupa buku Pola Pangan Harapan (PPH dan Terlaksananya pengumpulan data konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten/Kota.
- b) Program Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan :
- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan ini Terlaksananya koordinasi dan Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia AKP, dan Tersedianya data SKPG Tahun 2022.
- (2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi dengan output sub kegiatan ini Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan monev nagari mandiri pangan dan Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pokja Ahli Ketahanan Pangan.
  - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan dengan output sub kegiatan ini Tersedianya bahan pangan bagi masyarakat yang terindikasi rawan pangan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatnya diversifikasi konsumsi masyarakat, dengan



indikator kinerja :

- 1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Target Kinerja : 82,50%) (Realisasi Kinerja : 89,80%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut 108,85%, dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan :

- a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan dengan output sub kegiatan ini Data analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM, Terlaksananya pemantauan harga dan jaringan informasi harga pangan, dan Terlaksananya Pertemuan Apresiasi dan rapat koordinasi menghadapi HBKN.
- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan output sub kegiatan ini Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal dan Terlaksananya pemberdayaan kelompok wanita di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan, ternak kecil).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan output sub kegiatan ini Tersedianya data dan informasi distribusi dan akses pangan serta Lancarnya Distribusi, Operasi Pasar dan Akses Pangan ke Masyarakat.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Lainnya dengan output sub kegiatan ini Tersedianya data pemantauan produksi dan ketersediaan pangan wilayah Sumatera Barat, Kesepakatan Pasokan Bahan Pangan, dan Terlaksananya Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan.
- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan output sub kegiatan ini Berkembang dan terbinanya gapoktan LDPM, terlaksananya Kajian Penggilingan Padi Kecil dan Terlaksananya Penilaian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara.

- (2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan

Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi dengan output sub kegiatan ini Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Lumbung Pangan Masyarakat.
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan output sub kegiatan ini Tertanggulangnya permasalahan rentan pangan akibat bencana alam/sosial/ gejolak harga/ keadaan darurat.
- (3) Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi, dengan sub kegiatan :
- Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan output sub kegiatan ini Terlaksananya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui TMMD/N dan Terlaksananya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun dengan output sub kegiatan ini Tersedianya data hasil analisa konsumsi pangan masyarakat berupa buku Pola Pangan Harapan (PPH dan Terlaksananya pengumpulan data konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten/Kota.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

c. Sasaran III : Meningkatnya keamanan pangan masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat (%) (Target Kinerja : 83 %) (Realisasi Kinerja : 88,50 %).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut 106,63%, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengawasan Keamanan Pangan, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi dengan output sub kegiatan ini Terlaksananya pengawasan keamanan pangan melalui uji laboratorium

sampel pangan segar, terlaksananya sosialisasi/edukasi dan promosi keamanan pangan dan terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan panangan segar.

- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan ini Terlaksananya Sertifikasi Prima 2 dan prima 3 produk sayur dan buah serta Terlaksananya surveilen kebun pelaku usaha pangan segar hasil pertanian yang telah memiliki Sertifikat Prima.
- Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan ini Terbitnya nomor Registrasi PSAT dan Registrasi Rumah Kemas.
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan ini Terlaksananya sosialisasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan segar.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan output sub kegiatan ini Tersedianya alat dan bahan kimia Laboratorium Keamanan Pangan Provinsi Sumatera Barat.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d. Sasaran IV : Stabilitasnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV) (Beras, Cabe Merah, Bawang Merah %) (Target Kinerja Beras :  $\leq 10$ ) (Realisasi Kinerja :  $\leq 10$ ) (Target Kinerja Cabe Merah dan Bawang Merah :  $\leq 25$ ).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut 100%, dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan :

- a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan.

- Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal.
- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya.
- Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan.
- Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

e. Sasaran V : Meningkatnya tata kelola organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Target Kinerja : 75%)  
(Capaian Realisasi : 78,27%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut 104,36%, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

(3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

(4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- (6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - Pengadaan Mebel.
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- (7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- (8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis V.

- f. Sasaran VI : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :
1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (%) (Target Kinerja : 75%) (Capaian Realisasi : 81,82%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut 109,09%, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,

dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - Pengadaan Mebel.
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- (8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis VI.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Perencanaan	Realisasi Kegiatan	Capaian Realisasi (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TOTAL APBD</b>				<b>38.249.124.050</b>	<b>36.377.148.451</b>	<b>95,11</b>
	<b>DINAS PANGAN PROV SUMBAR</b>				<b>26.333.854.834</b>	<b>25.032.961.484</b>	<b>95,06</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>14.477.442.606</b>	<b>14.087.614.741</b>	<b>97,31</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>335.737.811</b>	<b>315.976.480</b>	<b>94,11</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100	115.124.000	104.565.130	90,83
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	100	43.659.500	39.356.700	90,14
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	176.954.311	172.054.650	97,23
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>9.825.062.049</b>	<b>9.705.495.367</b>	<b>98,78</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang	80 Orang	100	9.369.454.249	9.252.637.817	98,75
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	380.130.000	380.059.000	99,98

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Perencanaan	Realisasi Kegiatan	Capaian Realisasi (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 bulan	12 bulan	100	75.477.800	72.798.550	96,45
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>166.800.000</b>	<b>127.516.211</b>	<b>76,45</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 bulan	12 bulan	100	166.800.000	127.516.211	76,45
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>58.500.000</b>	<b>57.915.000</b>	<b>99,00</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	78 Stel	78 Stel	100	58.500.000	57.915.000	99,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>610.255.750</b>	<b>586.045.272</b>	<b>96,03</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	39.993.800	39.969.300	99,94
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	67.132.800	65.774.000	97,98
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	36.564.200	36.482.500	99,78
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	32.770.000	13.494.000	41,18
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	100	19.400.000	17.710.000	91,29
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	414.394.950	412.615.472	99,57
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>1.976.925.750</b>	<b>1.905.885.676</b>	<b>96,41</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	100	1.918.660.000	1.863.600.000	97,13
	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40 Item	40 Item	100	58.265.750	42.285.676	72,57
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>1.221.986.396</b>	<b>1.140.988.108</b>	<b>93,37</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	26.097.800	25.166.250	96,43
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	268.643.137	255.956.886	95,28
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	927.245.459	859.864.972	92,73
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>282.174.850</b>	<b>247.792.627</b>	<b>87,82</b>



No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Perencanaan	Realisasi Kegiatan	Capaian Realisasi (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	100	169.311.395	143.862.327	84,97
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100	89.753.455	87.055.500	96,99
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100	23.110.000	16.874.800	73,02
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>6.356.850.693</b>	<b>5.839.785.530</b>	<b>91,87</b>
<b>1</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>10 Bahan Pangan Pokok</b>	<b>10 Bahan Pangan Pokok</b>	<b>100</b>	<b>4.257.788.613</b>	<b>3.773.152.430</b>	<b>88,62</b>
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	185.602.900	162.910.700	87,77
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100 KWT, 22 Kel Pangan lokal, 10 paket pengolahan pangan local	100 KWT, 22 Kel Pangan lokal, 10 paket pengolahan pangan lokal	100	3.034.011.958	2.612.443.047	86,11
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100	222.845.050	212.133.829	95,19
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	89.028.850	80.730.600	90,68
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	40 Gapoktan LDPM	40 Gapoktan LDPM	100	726.299.855	704.934.254	97,06
<b>2</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>1.827.986.060</b>	<b>1.802.286.100</b>	<b>98,59</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	33 Kelompok	33 Kelompok	100	52.377.960	48.497.800	92,59
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	140 Ton	140 Ton	100	1.775.608.100	1.753.788.300	98,77

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Perencanaan	Realisasi Kegiatan	Capaian Realisasi (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b>	2 kali	2 kali	100	271.076.020	264.347.000	97,52
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 kali	2 kali	100	246.882.720	240.895.700	97,57
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			-		-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	24.193.300	23.451.300	96,93
III	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	100%	100%	100	4.000.172.715	3.648.542.758	91,21
1	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi</b>	1 Dokumen	1 Dokumen	100	165.534.715	153.943.825	93,00
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	165.534.715	153.943.825	93,00
2	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	110 Nagari	110 Nagari	100	3.834.638.000	3.494.598.933	91,13
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	5 Komoditi lokal, 110 nagari	5 Komoditi lokal, 110 nagari	100	948.638.000	866.854.929	91,38
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.372 KK	6.259 KK	74,76	2.886.000.000	2.627.744.004	91,05
IV	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	100%	100%	100	1.499.388.820	1.457.018.455	97,17
1	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100	1.499.388.820	1.457.018.455	97,17

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Perencanaan	Realisasi Kegiatan	Capaian Realisasi (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	400 Sampel	400 Sampel	100	1.499.388.820	1.457.018.455	97,17
<b>UPTD BPSMP</b>				-	<b>8.059.181.933</b>	<b>7.568.278.097</b>	<b>93,91</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>669.684.058</b>	<b>620.663.048</b>	<b>92,68</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>122.544.720</b>	<b>113.519.500</b>	<b>92,64</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	6.999.700	6.328.500	90,41
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	89.900.620	83.546.000	92,93
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	16.106.900	15.495.000	96,20
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	7.617.500	6.230.000	81,79
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	100	1.920.000	1.920.000	100
<b>2</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>203.792.000</b>	<b>202.082.500</b>	<b>99,16</b>
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100	198.000.000	197.080.000	99,54
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	100	5.792.000	5.002.500	86,37
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>95.747.190</b>	<b>76.851.048</b>	<b>80,26</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	6.736.950	6.010.150	89,21
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	89.010.240	70.840.898	79,59
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>247.600.148</b>	<b>228.210.000</b>	<b>92,17</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	100	244.840.148	225.450.000	92,08
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	100	2.760.000	2.760.000	100
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>7.389.497.875</b>	<b>6.947.615.049</b>	<b>94,02</b>
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>19 Kab/Kota</b>	<b>19 Kab/Kota</b>	100	<b>7.389.497.875</b>	<b>6.947.615.049</b>	<b>94,02</b>

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Perencanaan	Realisasi Kegiatan	Capaian Realisasi (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100	300.411.435	287.818.076	95,81
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40 Registrasi	40 Registrasi	100	131.805.850	130.545.150	99,04
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Kali	4 Kali	100	63.615.750	61.086.450	96,02
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Paket	1 Paket	100	6.893.664.840	6.468.165.373	93,83
<b>UPTD DPAP</b>					<b>3.856.087.283</b>	<b>3.775.908.870</b>	<b>97,92</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>344.765.340</b>	<b>316.243.672</b>	<b>91,73</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>80.477.740</b>	<b>78.975.500</b>	<b>98,13</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	19.983.600	19.737.000	98,77
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	26.528.540	26.525.000	99,99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	21.295.600	20.111.000	94,44
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	10.750.000	10.682.500	99,37
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	100	1.920.000	1.920.000	100
<b>2</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>11.950.000</b>	<b>7.245.000</b>	<b>60,63</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Item	4 Item	100	11.950.000	7.245.000	60,63
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>229.677.600</b>	<b>208.583.172</b>	<b>90,82</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	6.683.000	6.607.500	98,87
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	222.994.600	201.975.672	90,57
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>22.660.000</b>	<b>21.440.000</b>	<b>94,62</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21 Unit	21 Unit	100	22.660.000	21.440.000	94,62

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dokumen Perencanaan	Realisasi Kegiatan	Capaian Realisasi (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	100%	100%	100	3.511.321.943	3.459.665.198	98,53
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10 Bahan Pangan Pokok	10 Bahan Pangan Pokok	100	3.511.321.943	3.459.665.198	98,53
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	10 bahan pangan pokok	10 bahan pangan pokok	100	85.437.800	82.149.400	96,15
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	5 perjanjian kerjasama, 400 kali bazar	5 perjanjian kerjasama, 410 Kali bazar	100	3.425.884.143	3.377.515.798	98,59

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Tidak ada permasalahan	-
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Tidak ada permasalahan	-
III	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Tidak ada permasalahan	-
IV	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Tidak ada permasalahan	-

#### 3.1.2.4. lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pada tahun anggaran 2022 DLH mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.23.944.982.773,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.201.528.737,00 atau 96,89%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB (78)	78,92	101,18

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
II	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	80%	86,62%	108,27
III	Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup	<b>Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77 %	86,45 %	112,27
		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77 %	85,98 %	111,66
IV	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	<b>Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Persentase penurunan beban pencemaran	2,5 %	2,7%	108,00
			Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05 %	0,0679%	135,80
			Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77 %	86,45 %	112,27
		<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	Persentase penurunan beban pencemaran	2,5 %	2,7%	108,00
			Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05 %	0,0679%	135,80
			Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77 %	86,45 %	112,27
	Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3	<b>Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	Persentase penurunan beban pencemaran	2,5 %	2,7%	108,00
			Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05 %	0,0679%	135,80
			Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77 %	86,45 %	112,27
		<b>Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	261.290	298.983	114,43
			Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05 %	0,0679%	135,80
			Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77 %	86,45 %	112,27
<b>Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH</b>	Persentase penanganan sampah	56 %	50,19%	95,18		
	Persentase pengurangan sampah	17 %	16,18%	95,17		
	Persentase penanganan sampah	56 %	50,19%	95,18		

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan

indikator kinerja yaitu :

1) Nilai akuntabilitas kinerja OPD (Target Kinerja : 78%) (Realisasi Kinerja : 78,92%).

b. Sasaran II : Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Target Kinerja : 80%) (Realisasi Kinerja : 86,62%).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

(3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

(4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I dan II.

- c. Sasaran III : Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan (Target Kinerja : 77%) (Realisasi Kinerja : 86,45%).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dicapai melalui



pelaksanaan kegiatan :

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi, dengan output jumlah sektor yang dievaluasi dalam implementasi RPPLH provinsi.
  - (2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, dengan output persentase pelaksanaan KLHS Rencana tata ruang.
- 2) Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan (Target Kinerja : 77%) (Realisasi Kinerja : 85,98%).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KAHATI), dengan kegiatan :
  - (1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya, dengan output jumlah kawasan taman kehati lainnya yang dikelola.
    - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan output jumlah peserta/masyarakat pemeliharaan kawasan yang dibina.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III

- d. Sasaran IV : Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan indikator kinerja yaitu :
  - 1) Persentase penurunan beban pencemaran (Target Kinerja : 2,5%) (Realisasi Kinerja : 2,7%).
  - 2) Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (Target Kinerja : 0,05%) (Realisasi Kinerja : 0,0679%).
  - 3) Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan (Target Kinerja : 77%) (Realisasi Kinerja : 86,45%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilaksanakan melalui

pelaksanaan :

- a) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan sub kegiatan :
    - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dengan output jumlah media lingkungan yang dipantau.
    - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dengan output jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian.
    - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi, dengan output Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan, jumlah parameter yang akan diajukan untuk akreditasi dan registrasi, jumlah pengadaan bahan kimia, jumlah pengadaan peralatan, jumlah supporting dan jumlah laboratorium yang diperasionalkan.
  - 4) Persentase penurunan beban pencemaran (Target Kinerja : 2,5%) (Realisasi Kinerja : 2,7%).
  - 5) Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (Target Kinerja : 0,05%) (Realisasi Kinerja : 0,0679%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan output jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan

Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH, dengan output jumlah sanksi administrasi bidang Lingkungan Hidup yang dievaluasi.

- 6) Persentase penurunan beban pencemaran (Target Kinerja : 2,5%) (Realisasi Kinerja : 2,7%).
- 7) Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (Target Kinerja : 0,05%) (Realisasi Kinerja : 0,0679%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi, dengan output Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

- d. Sasaran V : Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3, dengan indikator kinerja yaitu :
  - 1) Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun) (Target Kinerja : 261.290) (Realisasi Kinerja : 298.983).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan output Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3; Jumlah Kab/Kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik.
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka

Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan, dengan output Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasionalkan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

- 2) Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (Target Kinerja : 0,05%) (Realisasi Kinerja : 0,0679%) dilakukan melalui pelaksanaan :

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH, dengan output Jumlah kelompok yang difasilitasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai MHA.

- 3) Persentase penanganan sampah (Target Kinerja : 56%) (Realisasi Kinerja : 50,19%).
- 4) Persentase pengurangan sampah (Target Kinerja : 17%) (Realisasi Kinerja : 16,18%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, dengan output Jumlah anggota saka kalpataru; Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan sampah; Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah; Jumlah peliputan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup; Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan

lingkungan; Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup dan Jumlah sarana dan prasarana yang dibantu bagi permukiman/kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.

- 5) Persentase penanganan sampah (Target Kinerja : 56%) (Realisasi Kinerja : 50,19%).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengelolaan Sampah, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional, dengan output Jumlah dokumen naskah akademis dan Ranperda yang di susun.
- Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional, dengan output Jumlah dokumen studi kelayakan penerapan pengolahan sampah menggunakan bioteknologi di TPA Regional Payakumbuh.
- Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional, dengan output Terlaksananya operasional TPA Sampah Regional Payakumbuh dan Solok; Terpeliharanya infrastruktur di TPA Sampah Regional dan Jumlah laporan pemantauan kawasan TPA Regional.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Target Dalam Dok anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						

<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja dan renja perubahan yang disusun : 2 dokumen	2 dokumen	100	5.000.000	4.534.000	90,68
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun : 1 dokumen	1 dokumen	100	2.500.000	2.425.000	97
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun : 1 dokumen	1 dokumen	100	2.500.000	2.491.000	99,64
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun : 1 dokumen	1 dokumen	100	2.500.000	2.430.000	97,2
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun : 1 dokumen	1 dokumen	100	2.000.000	2.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun : 3 dokumen	3 dokumen	100	2.000.000	1.985.000	99,25
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan : 4 dokumen	4 dokumen	100	2.500.000	2.428.000	97,12
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan nya : 89 orang	77 orang	86,52	8.339.155.650	7.950.540.722	95,34
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor : 12 bulan	12 bulan	100	357.249.255	347.841.208	97,37
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Administrasi yang disusun : 2 dokumen	2 dokumen	100	104.000.000	92.481.807	88,92

<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya : 68 stel	68 stel	100	68.250.000	58.344.000	85,49
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat : 5 orang	10 orang	200	23.365.000	19.834.069	84,89
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan : 8 jenis	8 jenis	100	5.000.000	4.999.000	99,98
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan : 2 jenis	2 jenis	100	10.732.000	10.650.000	99,24
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan : 40 jenis	40 jenis	100	76.130.444	72.101.000	94,71
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : 6 jenis	6 jenis	100	29.350.000	29.284.000	99,78
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan : 3 jenis	3 jenis	100	10.320.000	10.150.000	98,35
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi : 40 laporan	101 laporan	252.5%	303.936.139	303.578.412	99,88
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun : 5000 surat	5158	103.16%	20.000.000	17.295.850	86,48

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air yang di bayarkan : 145 m <sup>3</sup>	145 m <sup>3</sup>	100	208.400.000	193.112.188	92,66
		Jumlah tagihan internet yang di bayarkan : 7 bulan	7 bulan	100			
		Jumlah tagihan listrik yang di bayarkan : 9333 kwh	93676 kwh	110,21			
		Jumlah tagihan telpon yang di bayarkan : 714 menit	714 menit	100			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor (sopir, pengaman dan PTT) yang tersedia : 25 orang	32 orang	128	1.321.300.000	1.293.297.866	97,88
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara : 11 unit	11 unit	100	117.450.000	115.592.839	98,42
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya : 65 unit	65 unit	100	65.216.000	62.251.229	95,45
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/rehab : 1 paket	1 paket	100	50.000.000	48.754.000	97,51
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab : 1 paket	1 paket	100	58,960,000	54,519,336	92.47
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						
<b>1</b>	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan						



	Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi						
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodo dir RPPLH Provinsi : 1 dokumen	1 dokumen	100	83.725.500	83.090.040	99,24
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang dibina dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi dan dokumen perencanaan lingkungan lainnya : 10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100			
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>						
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	45%	88,75%	197,22	77174800	77045099	99,83
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						
<b>1</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>						
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah media lingkungan yang dipantau : 4 media	4 media	100	369.911.5000	363.346.600	98,23
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim : 1 laporan	1 laporan	100	57.145.900	56.698.480	99,22
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang	2 kali	100	1.238.319.400	1.165.645.690	94,13

		dilaksanakan : 2 kali					
		Jumlah parameter yang akan diajukan untuk akreditasi dan registrasi : 8 parameter	15 parameter	187,5			
		jumlah pengadaan bahan kimia : 1 paket	1 paket	100			
		Jumlah pengadaan peralatan : 14 jenis	6 jenis	42.86			
		Jumlah supporting : 5 jenis	14 jenis	280			
		Jumlah unit laboratorium yang dioperasikan : 1 unit	1 UPTD	100			
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>						
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>						
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah kawasan taman kehati lainnya yang dikelola : 1 kawasan	1 Kawasan	100	206.350.500	206.208.700	99,93
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah peserta/masyarakat pemeliharaan kawasan yang dibina : 150 orang	180 orang	120	215.521.500	214.762.100	99,65
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>						
<b>1</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 :1 kali	1 kali	100	51.114.800	48.138.334	94,18

	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Kab/Kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik : 19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasikan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah : 1 lokasi	1 lokasi	100	2.302.761.800	2.097.390.662	94,79
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>						
<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>						
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi : 7 objek	10 objek	142,86	65.031.500	65.016.300	99,98
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang dievaluasi: 4 sanksi	8 sanksi	200	64.566.400	64.056.000	99,21
		Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi:	5 sanksi	250			

		2 sanksi					
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>						
<b>1</b>	<b>Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>						
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok yang difasilitasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai MHA : 1 org/kelompok	1 org/kelompok	100	40.005.000	39.370.100	98,41
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>						
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>						
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah anggota saka kalpataru : 80 orang	78 orang	97,5	1.921.532.000	1.902.334.906	99
		Jumlah bank sampah yang dibangun : 10 lembaga	0	0			
		Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan sampah : 15 Kab/Kota	19 Kab/Kota	126,67			
		Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah : 40 Kelompok	132 kelompok	330			
		Jumlah peliputan aktivitas pengelolaan	27 kali	108			

		lingkungan hidup : 25 kali					
		Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan : 240 orang	620 orang	258,33			
		Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup : 2 event	6 event	300			
		Jumlah sarana dan prasarana yang dibantu bagi permukiman /kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah : 9 paket	9 paket	100			
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						
<b>1</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>						
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan : 3 kasus	7 kasus	233	88.666.000	87.999.600	99,25
		Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya : 9 kasus	16 kasus	177,77			
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>						
<b>1</b>	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>						
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen naskah akademis Ranperda yang disusun : 1 dokumen	1 dokumen	100	222.450.600	216.058.200	97,13
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan	Jumlah dokumen studi kelayakan	1 dokumen	100	220.936.000	212.390.940	96,13

	Sampah Regional	penerapan pengolahan sampah menggunakan bioteknologi di TPA Regional Payakumbuh : 1 dokumen					
	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Terlaksananya operasional TPA Sampah Regional Payakumbuh dan Solok : 2 TPA	2 TPA	100	5.644.335.085	5.616.607.796	99,51
		Terpeliharanya infrastruktur di TPA Sampah Regional : 1 TPA	1 TPA	100			
		Jumlah laporan pemantauan kawasan TPA Regional : 4 laporan	4 laporan	100			

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		
II	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
1	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>		
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	petunjuk teknis (permenLHK terkait RPPLH) belum ada Tidak tersedianya dana untuk pelatihan Amdalnet, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan persetujuan lingkungan Kurangnya jumlah anggota sekretariat komisi/tim penilai/pemeriksaan dokumen lingkungan	Menggunakan surat edaran dari KLHK sebagai pedoman penyusunan RPPLH Mengadakan sosialisasi dari KLHK melalui zoom meeting Mengajukan surat permintaan tambah personil
2	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>		
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Tidak tersedianya dana untuk penyusunan KLHS di Kabupaten/Kota	Adanya Bantuan Teknis Penyusunan RDTR OSS perkotaan oleh Kementerian ATR/BPN dan dilengkapi dengan KLHS
		Masih kurangnya pemahaman tim pokja/instansi terkait dalam penyusunan KLHS	Meningkatkan pembinaan melalui sosialisasi/asistensi/rapat koordinasi terkait pelaksanaan penyusunan KLHS dokumen perencanaan Kab/Kota

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
III	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
1	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dikarenakan keterbatasan anggaran, pemantauan kualitas air sungai hanya dapat dilakukan terhadap 5 sungai dan 2 danau dengan periode pemantauan 2 kali. Hal ini belum dapat menggambarkan kondisi kualitas sungai secara keseluruhan di Sumatera Barat.	Dibutuhkan anggaran yang memadai agar kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan secara optimal dan didapatkan data yang representatif.
		Periode pemantauan hanya dilakukan satu kali saja dalam setahun	Dibutuhkan anggaran yang memadai agar kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan secara optimal dan didapatkan data yang representatif.
		Alokasi anggaran yang terbatas, sehingga pengawasan dan pembinaan hanya dapat dilakukan terhadap 15 objek usaha/kegiatan sebagai sumber pencemar terhadap media lingkungan (tanah, air, udara, dan laut).	Dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap ketaatan usaha/kegiatan
		Intensitas perusakan sangat tinggi, anggaran yang tersedia untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sangat terbatas	Dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap ketaatan usaha/kegiatan
		Pemantauan biota laut dilakukan terhadap Ekosistem Mangrove dan Ekosistem Gambut. Tahun 2022 pemantauan terhadap pemanfaatan Ekosistem Gambut dilakukan di 2 kabupaten, sementara Pemantauan Ekosistem Mangrove dilakukan di 1 kabupaten	Dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pemanfaatan Ekosistem Gambut dan Mangrove
		Intensitas perusakan lingkungan hidup lebih tinggi dibandingkan dengan upaya pemulihan	Dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan sehingga lahan yang rusak bisa kembali produktif.
		Periode pemantauan hanya dilakukan satu kali saja dalam setahun	Dibutuhkan anggaran yang memadai agar kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan secara optimal dan didapatkan data yang representatif.
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kurangnya dukungan pemerintah daerah kab/kota dalam pengusulan calon lokasi proklamasi karena kurang dukungan anggaran	Melaksanakan beberapa upaya antara lain melalui surat dan memanfaatkan whatsapp dan zoom meeting
		Kekurangan anggaran untuk melakukan bimbingan teknis penggunaan aplikasi signsmart dalam inventarisasi GRK	Melakukan koordinasi melalui media social grup whatsapp
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Kebutuhan SDM pada UPTD Laboratorium belum terpenuhi	Mengusulkan penambahan personil baik dari PNS maupun non PNS (tenaga kontrak)
		Beberapa personil UPTD Laboratorium belum memiliki kompetensi sesuai yang dipersyaratkan SNI	Mengadakan pelatihan ( <i>inhouse training</i> ) atau mengirim personil mengikuti pelatihan/magang pada instansi lainnya
		UPTD Laboratorium belum memiliki izin TPS LB3 dan pembuangan limbah	Melengkapi persyaratan untuk pengajuan izin dan mengajukan permohonan izin TPS LB3 dan pembuangan limbah
		Bahan/barang yang dibutuhkan tidak tersedia/indent sehingga pengadaan jadi tertunda	Mencari rekanan baru yang bisa mengadakan barang/bahan yang dibutuhkan atau menunggu barang/bahan tersedia

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>		
1	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>		
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kurangnya arahan dari KLHK terkait pengembangan kegiatan	Koordinasi dilakukan melalui media social zoom meeting dan grup whatsapp
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kekurangan anggaran dalam pengembangan kegiatan	Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan kegiatan
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		
1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>		
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Keterbatasan Anggaran untuk pelaksanaan pengawasan (tidak sebanding antara jumlah objek yang diawasi dengan ketersediaan anggaran), sementara itu terdapat peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib diawasi seiring dengan dengan beralihnya beberapa kewenangan perizinan ke Pem Prov.	Menentukan prioritas objek usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan pengawasan secara langsung (pasif) dan menentukan objek pengawasan secara tidak langsung (pasif) terhadap Izin-izin yang telah diterbitkan pemprov
		Banyaknya kegiatan yang Persetujuan Lingkungan yang tidak mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan serta tidak menyiapkan / menganggarkan tuk penyusunan laporan semester	Menerbitkan sanksi administratif terhadap kegiatan Instansi Pemerintah untuk mengajukan anggaran guna : (1) Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tertuang pada dokumen lingkungan hidup; (2) Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan lingkungan hidup setiap semester.
		Komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan masih rendah dalam pengelolaan lingkungan dan pemenuhan Sanksi Administratif yang diterbitkan	Menyampaikan pada team saat pembahasan anggaran APBD agar mengingatkan kepada OPD yang memiliki kegiatan fisik agar mengalokasikan anggaran untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup serta penyusunan pelaporan semester.
			Meningkatkan pemahaman dan komitmen usaha/kegiatan untuk memenuhi Sanksi Administratif yang diterbitkan dan menyampaikan konsekuensi hukum dari tidak dilaksanakannya sanksi administratif tersebut.
		Dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara terkoordinasi, instansi Lingkungan Hidup masih enggan untuk memberikan Sanksi Administratif dengan beberapa pertimbangan antara lain : investasi, pemanfaatan tenaga kerja local dan lain-lain.	Memberikan penguatan kepada instansi lingkungan hidup melalui surat rekomendasi hasil pengawasan secara terkoordinasi untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan Sanksi Administratif.



No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
VIII	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		
1	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>		
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Beberapa standar harga di SIPD yang belum sesuai dengan kondisi sekarang Kegiatan perubahan dengan anggaran yang besar pada sub kegiatan Prioritas, sulit mengeksekusi karena waktu yang singkat antara pengesahan dengan pelaksanaan lapangan Terbatasnya SDM untuk pelaksanaan kegiatan swakelola Prioritas	Perlu usulan standar harga yang baru sesuai dengan kondisi Kegiatan perubahan dengan anggaran yang besar pada sub kegiatan Prioritas, sulit mengeksekusi karena waktu yang singkat antara pengesahan dengan pelaksanaan lapangan Beberapa kegiatan di pihak ke 3 kan (perencanaan, Pengawasan, Pelaksanaan dan JA sa Pendampingan)
IX	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
1	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>		
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Pengadu memiliki kepentingan tersembunyi dengan mengatasnamakan kepedulian terhadap lingkungan hidup Ketidakpuasan pengadu terhadap hasil penanganan pengaduan oleh instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Ketidak konsistenan status pengadu (pribadi/wartawan/LSM) pada saat melakukan pegaduan sampai hasil yang diinginkan Kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan pengaduan	Mengantisipasi pengadu dalam penyalahgunaan hasil verifikasi pengaduan untuk kepentingan tersembunyi sehingga pelaksanaan verifikasi sesuai dengan objek yang diadakan guna membuktikan dugaan pencemaraan dan/atau kerusakan lingkungan Melakukan verifikasi lapangan secara terkoordinasi dengan instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan tujuan melengkapi data pendukung sesuai yang diinginkan oleh pengadu tanpa mengesampingkan data hasil verifikasi lapangan yang sudah dilakukan oleh instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota Menegaskan kepada pengadu agar konsisten statusnya pada saat melakukan pengaduan (pribadi/wartawan/LSM) sehingga hasil verifikasi lapangan hanya untuk kepentingan proses fasilitasi pengaduan dan tidak disalahgunakan Melibatkan OPD terkait baik Pemprov maupun Pemkab/kota dalam melakukan verifikasi lapangan, merapatkan hasil verifikasi lapangan dan menindaklanjuti sesuai dengan tupoksi masing-masing.
X	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>		
1	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>		

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Landfill TPA Regional Payakumbuh sudah melebihi kapasitas	<p>Usulan untuk pengembangan <i>landfill</i> TPA Sampah Regional Payakumbuh sudah disampaikan ke Kementerian PUPR beserta <i>readiness criteria</i> namun sampai saat ini belum terakomodir</p> <p>Provinsi dan kab/kota sepakat untuk mengambil langkah sharing pembiayaan pembangunan landfill TPA Regional Payakumbuh. Namun kab/kota yang telah mengalokasikan anggaran sharing sampai saat ini adalah Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, dan Kab. Agam. Kota Bukittinggi dan Pemprov sampai saat ini masih belum mengalokasikan biaya sharing dalam APBD 2023.</p>

### 3.1.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.8.764.620.180,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.620.290.194,00 atau 98,35%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan yang Terintegrasi	<b>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Peningkatan inovasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 Inovasi	9 Inovasi	150
		<b>Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	2 Jenis	2 Jenis	100
II	Meningkatnya Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan yang Lengkap	<b>Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	40%	45,08%	112,70
			Persentase Kepemilikan KTP EL	97,75%	97,07%	99,30
		<b>Pencatatan Sipil</b>	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 - 17 Tahun	94%	97,37%	103,58
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	100%	100
			Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	100%	100

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100%	100%	100
			Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah	1,40%	1,16%	117,14
III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (78)	BB (79,89)	102,42
IV	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (80)	Sangat Baik (90,47)	110,34

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

- a. Sasaran I : Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap (Target Kinerja : 88,62%) (Realisasi Kinerja : 89,92%) dengan capaian kinerja : 101,47%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- 1) Program Pendaftaran Penduduk, dicapai dengan pelaksanaan :
  - a) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan sub kegiatan :
    - (1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk Lintas Kabupaten / Kota dalam Satu Provinsi.
    - (2) Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi.
    - (3) Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan.
  - b) Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dengan sub kegiatan :
    - (1) Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk.
    - (2) Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk.
    - (3) Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk.
    - (4) Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk.
  - c) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran

Penduduk :

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk.
- (2) Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk.

Dari 3 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Pendaftaran Penduduk :

- 2) Program Pencatatan Sipil, dicapai dengan pelaksanaan :
  - a) Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - (1) Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil.
    - (2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil.
    - (3) Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil.
    - (4) Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil.
    - (5) Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
  - b) Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan :
    - (1) Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil.
    - (2) Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil.
  - c) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan.:
    - (1) Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi.
    - (2) Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting.
    - (3) Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil.
    - (4) Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admuduk terkait Pencatatan Sipil.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan yang Terintegrasi (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%) dengan capaian kinerja : 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui

pelaksanaan :

- 1) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dicapai dengan pelaksanaan :
  - a) Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan :
    - (1) Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
    - (2) Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten / Kota.
  - b) Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan :
    - (1) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
    - (2) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
    - (3) Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
    - (4) Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Kewenangan Provinsi.
    - (5) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.
  - c) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan:
    - (1) Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
    - (2) Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Data Kependudukan.

Dari 3 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :

- 2) Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dicapai dengan pelaksanaan :
  - a) Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan, dengan sub kegiatan :
    - (1) Penyediaan Data Kependudukan Provinsi.
    - (2) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi

Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi (Target Kinerja : BB (78)) (Realisasi Kinerja : BB (79,89) dengan capaian kinerja : 102,42%.
- d. Sasaran IV : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi (Target Kinerja : Baik (80)) (Realisasi Kinerja : Sangat Baik (90,47) dengan capaian kinerja : 110,34%.

Pencapaian target kinerja dari indikator sasaran III dan IV, dilakukan melalui pelaksanaan :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan :
  - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    - (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan DPA – SKPD.
    - (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD.
    - (4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
    - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
    - (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
    - (4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
  - c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - (1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
    - (2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
    - (3) Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
    - (4) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - (1) Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya.
  - (2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan.
- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - (3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - (4) Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan.
  - (5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan.
  - (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - (7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - (1) Pengadaan Mebel.
  - (2) Pengadaan Peralatan dan Mesin.
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - (3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan, dengan sub kegiatan :
  - (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - (3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya.

- (4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III dan IV.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>URUSAN DUKCAPIL</b>				<b>8.764.620.180</b>	<b>8.620.290.194</b>	<b>98,35</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>				<b>6.982.103.024</b>	<b>6.851.372.435</b>	<b>98,13</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>339.263.190</b>	<b>336.771.522</b>	<b>99,27</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100	118.644.050	116.412.415	98,12
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan DPA-SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100	13.935.400	13.862.800	99,48
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100	113.332.000	113.277.767	99,95
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	93.351.740	93.218.540	99,86
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>3.927.175.002</b>	<b>3.862.937.967</b>	<b>98,36</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang	36 orang	100	3.738.219.202	3.674.587.455	98,30
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 orang	11 orang	100	115.140.000	115.140.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	33.422.800	33.283.962	99,58
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13 laporan	13 laporan	100	40.393.000	39.926.550	98,85
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>110.960.826</b>	<b>105.745.555</b>	<b>95,30</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	3.970.800	3.885.900	97,86
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 unit	7 unit	100	39.200.000	37.771.873	96,36



No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	14.564.726	11.557.000	79,35
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	53.225.300	52.530.782	98,70
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>75.798.760</b>	<b>75.420.000</b>	<b>99,50</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74 stel	74 stel	100	55.500.000	55.500.000	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	11 orang	11 orang	100	20.298.760	19.920.000	98,13
<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>560.420.672</b>	<b>558.970.491</b>	<b>99,74</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	10 jenis	100	15.000.000	14.906.400	99,38
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 unit	13 unit	100	24.342.336	23.712.500	97,41
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 jenis	6 jenis	100	98.365.500	98.141.693	99,77
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	5 jenis	5 jenis	100	31.256.000	31.256.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	4 jenis	4 jenis	100	15.000.000	15.000.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100	368.957.036	368.780.298	99,95
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 arsip	10 arsip	100	7.499.800	7.173.600	95,65
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>				<b>696.506.000</b>	<b>665.774.030</b>	<b>95,59</b>
	Pengadaan Mebel	1 mebel	1 mebel	100	30.171.000	30.000.000	99,43
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	6 jenis	6 jenis	100	666.335.000	635.774.030	95,41
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>875.461.584</b>	<b>855.257.128</b>	<b>97,69</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1400 surat	1400 surat	100	5.706.500	5.700.000	99,89
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	[25 mbps]; [1 rekening]; [2700 meter kubik]; [9.6 KVA]	[25 mbps]; [1 rekening]; [2700 meter kubik]; [9.6 KVA]	100	210.202.800	207.206.329	98,57
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 orang	15 orang	100	659.552.284	642.350.799	97,39
<b>8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>				<b>396.516.990</b>	<b>390.495.742</b>	<b>98,48</b>

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	100	20.027.400	19.780.193	98,77
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit	7 unit	100	63.699.590	60.359.343	94,76
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	230.000.000	228.156.206	99,20
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 jenis	10 jenis	100	82.790.000	82.200.000	99,29
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>				<b>399.116.928</b>	<b>394.550.925</b>	<b>98,86</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>				<b>205.101.928</b>	<b>200.929.345</b>	<b>97,97</b>
	Sub kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	3 kali	3 kali	91,93	83.717.912	82.594.929	98,66
	Sub kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait pencatatan Sipil	57 orang	57 orang	100	30.241.600	30.217.100	99,92
	Sub kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil	1 kali	1 kali	100	67.643.216	64.803.616	95,80
	Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	38 orang	38 orang	100	17.379.100	17.239.100	99,19
	Sub Kegiatan Pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	2 stakeholder	2 stakeholder	100	6.120.100	6.074.600	99,26
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>				<b>132.922.400</b>	<b>132.656.980</b>	<b>99,80</b>
	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	60 orang	57 orang	95	44.330.600	44.102.480	99,49
	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	19 kab/kota	19 kab/kota	100	88.591.800	88.554.500	99,96
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>				<b>61.092.600</b>	<b>60.964.600</b>	<b>99,79</b>

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	100	13.520.800	13.496.300	99,82
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting	1 PKS	1 PKS	100	16.044.500	16.020.000	99,85
	Sub Kegiatan Penetapan kebijakan teknis di Bidang Pencatatan Sipil	1 dokumen	1 dokumen	100	18.006.500	17.952.000	99,70
	Sub Kegiatan Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pencatatan sipil	1 dokumen	1 dokumen	100	13.520.800	13.496.300	99,82
<b>III</b>	<b>PENDAFTARAN PENDUDUK</b>				<b>708.695.201</b>	<b>704.788.820</b>	<b>99,45</b>
<b>1</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>				<b>91.028.701</b>	<b>90.371.420</b>	<b>99,28</b>
	Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Adminduk Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	100	37.855.920	37.591.420	99,30
	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	100	26.327.981	25.989.700	98,72
	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 PKS	1 PKS	100	26.844.800	26.790.300	99,80
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>				<b>471.086.000</b>	<b>468.176.700</b>	<b>99,38</b>
	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	19 kab/kota	19 kab/kota	100	401.738.000	398.962.900	99,31
	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	38 orang	38 orang	100	25.000.000	24.948.700	99,79
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	30 orang	30 orang	100	19.348.000	19.305.000	99,78
	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	2 kali	2 kali	100	25.000.000	24.960.100	99,84

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>				<b>146.580.500</b>	<b>146.240.700</b>	<b>99,77</b>
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	19 kab/kota	19 Kab/Kota	100	95.000.000	94.723.500	99,71
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	57 orang	57 orang	100	51.580.500	51.517.200	99,88
		38 orang	38 orang	100			
<b>IV</b>	<b>PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				<b>548.070.787</b>	<b>543.997.674</b>	<b>99,26</b>
<b>1</b>	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				<b>47.827.300</b>	<b>47.691.500</b>	<b>99,72</b>
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan administrasi Kependudukan	4 SOP	4 SOP	100	23.721.300	23.702.600	99,92
	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen Pedoman dan 1 SOP	1 Dokumen Pedoman dan 1 SOP	100	24.106.000	23.988.900	99,51
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				<b>399.601.440</b>	<b>395.949.874</b>	<b>99,09</b>
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 kali	3 kali	100	169.545.800	168.296.400	99,26
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50 orang	50 orang	100	19.206.000	19.185.950	99,90
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 kali	2 kali	100	12.901.700	12.701.000	98,44
	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	2 kali	2 kali	100	153.910.000	152.088.624	98,82
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	8 kali	8 kali	100	44.037.940	43.677.900	99,18

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				<b>100.642.047</b>	<b>100.356.300</b>	<b>99,72</b>
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100	56.375.147	56.135.300	99,57
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	60 orang	60 orang	100	44.266.900	44.221.000	99,90
V	<b>PENGLOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>				<b>126.634.240</b>	<b>125.580.340</b>	<b>99,17</b>
1	<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>				<b>126.634.240</b>	<b>125.580.340</b>	<b>99,17</b>
	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	2 buku	2 buku	100	57.490.240	57.144.940	99,40
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 buku profil	1 buku profil	100	69.144.000	68.435.400	98,98

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengastasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		
1	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>		
	Sub kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Tidak ada lagi database kependudukan yang dimiliki oleh Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan penandingan data/verifikasi dan validasi (verval)	Berupaya menyurati Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk meminta database
	Sub kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil	Terdapat sisa anggaran karena ada tiket narsum yang tidak dibayarkan	Diarahkan untuk tiket dan penginapan ditanggung narasumber
I	<b>PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		
1	<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>		
1	Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Admindak Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	ditemukan bahwa ada penduduk rentan yang sudah meninggal dan tidak diketahui keberadaannya masih terdata dalam DTKS Dinas Sosial, sehingga pada saat pemberian bantuan orang yang meninggal masih masuk dalam daftar penerima bantuan	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Nomor 470/905/Dukcapil.2/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, maka diminta kepada Kabupaten/Kota agar melakukan :

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengastasi Permasalahan
1	2	3	4
		Untuk penduduk rentan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih banyak ditemukan tidak memiliki NIK, terutama untuk ODGJ jalanan.	Pada saat dilakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Dukcapil ditemukan bahwa ada orang yang sudah meninggal dan tidak diketahui keberadaannya masih terdata dalam DTKS, sehingga pada saat pemberian bantuan orang yang meninggal masih masuk dalam daftar penerima bantuan. Untuk itu, perlu adanya pemutakhiran data dengan cara kolaborasi antara Dinas Dukcapil dengan Petugas Nagari dan Dinas Sosial.
		Sebagian besar penduduk nonpermanen tidak ada didata dan melapor ke Dinas Dukcapil, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan kerjasama dalam melakukan pendataan penduduk nonpermanen.	Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih banyak ditemukan tidak memiliki NIK, terutama untuk ODGJ jalanan. Untuk itu, perlu adanya integrasi dan koordinasi layanan penerbitan dokumen kependudukan bagi ODGJ antara Dinas Dukcapil, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
			Dalam rangka mengoptimalkan Pendaftaran Penduduk Nonpermanen, maka diminta kepada Dinas Dukcapil agar melakukan koordinasi, kerjasama dan sosialisasi kepada Mitra dan Institusi lain tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen, dan bagi penduduk yang melampaui batasan waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan tujuan menetap, wajib melapor kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Kabupaten/Kota untuk mendapat surat keterangan pindah.
			Pemerintah Provinsi melalui Surat Gubernur Nomor 470/194/Dukcapil.2/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan meminta Kabupaten/Kota agar meningkatkan pelayanan jemput bola kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk, seperti untuk kaum disabilitas, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan dan komunitas terpencil secara rutin atau sesuai permintaan instansi/kelompok sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
2	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Masih belum seragamnya SOP Pelayanan Pendataan Penduduk di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	Dibuat buku Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendaftaran Penduduk baik secara manual maupun secara online yang berpedoman pada aturan yang berlaku sehingga adanya persamaan perlakuan dalam pelayanan pendaftaran penduduk di seluruh Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
3	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan menjadi target perjanjian kinerja antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Kemendagri RI yaitu dalam pemanfaatan kartu identitas anak (KIA).	Telah dilakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan KIA dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Hal ini memenuhi target keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan data peristiwa kependudukan sebanyak 1 (satu) perjanjian kerjasama (PKS).
<b>II</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN</b>		
1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Masih terbatasnya stok blangko KTP-el yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dimana blangko KTP-el yang diminta tiap bulannya tidak sama dengan yang didapatkan dari Pusat.	Melakukan koordinasi dengan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat untuk dapat membantu menjemput blangko KTP-el ke Ditjen Dukcapil serta mengirimkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar melalui jasa ekspedisi.
		Tidak dapatnya pejabat/staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menjemput langsung blangko KTP-el ke Pusat dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan kondisi Covid-19 yang rentan untuk melakukan perjalanan dinas.	Melakukan analisa data kebutuhan blangko KTP-el setiap bulan per Kabupaten/Kota untuk memastikan tidak adanya Kabupaten/Kota kekurangan blangko KTP-el serta dapat segera melakukan permintaan blangko KTP-el ke Ditjen Dukcapil Kemendagri.
		Masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak mengirimkan laporan harian secara rutin sehingga tidak bisa mengontrol ketersediaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap manajemen penggunaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota.
		Blangko KTP yang diterima dari Pusat terakhir adalah tanggal 27 Oktober 2022, sehingga Stok Blangko di Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi sangat sedikit dan ada beberapa Kabupaten/Kota stok blangko KTP nya sudah habis.	Dirjen Dukcapil mengeluarkan Surat Edaran tanggal 18 November 2022 terkait terjadinya kekosongan stok blangko KTP el sampai akhir tahun 2022, untuk :
			Kepala Dinas Dukcapil Provinsi wajib memantau dan memastikan kondisi ketersediaan stok blangko KTP el pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di wilayahnya. Jika terdapat Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang habis stok blangko KTP-elnya agar segera difasilitasi peminjamannya dari Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang masih tersedia sampai seluruh Kab/Kota habis secara merata.
			Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota sebelum menerbitkan KTP-el, memastikan terlebih dahulu apabila pemohon yang memiliki Handphone berbasis Android untuk diterbitkan Identitas Kependudukan Digital.
			Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota agar memastikan apabila stok blangko KTP-el benar-benar sudah tidak tersedia lagi, maka bagi pemohon yang tidak memiliki Handphone berbasis Android dapat diberikan Surat Keterangan yang memiliki batas waktu sampai dengan Tanggal 5 Januari 2023.

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Sosialisasi tentang Perpindahan Penduduk melalui aplikasi e-office Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ada beberapa permasalahan yang ditemui sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada aparatur pendaftaran penduduk di Kabupaten/Kota, antara lain :	
		Pengurusan perpindahan penduduk yang berpindah hanya beberapa anggota saja dalam 1 KK.	Dalam sosialisai yang disampaikan oleh narasumber Ditjen Dukcapil Kemendagri, bahwa untuk contoh kasus, apabila yang pindah hanya istri saja, maka istri membuat F1-03 sendiri dan surat pernyataan
		Adanya penambahan persyaratan diluar aturan teknis terkait perpindahan penduduk dalam 1 Kabupaten/Kota atau pindah antar Kabupaten/Kota/Provinsi	Sesuai arahan pak direktur Pendaftaran Penduduk sebagai narasumber dari Ditjen Dukcapil Kemendagri menyampaikan bahwa, pada dasarnya kita sebagai petugas yang tujuannya untuk membahagiakan masyarakat. Diusahakan persyaratan jangan ditambah, kecuali penambahan persyaratan untuk menguatkan perpindahan seseorang yang telah dewasa.
		Permohonan SKPWNI melalui E-Office masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan.	Data yang dimunculkan oleh Direktur Dafduk terkait Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan permohonan SKPWNI melalui e-office secara real nya telah selesai, SKPWNI pemohon sudah dikirim melalui WA, namun SKPWNI tersebut harus di upload ke E-Office kemudian baru bisa diklik tombol selesai.
3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Belum pahamnya masyarakat tentang manfaat dokumen pendaftaran penduduk, terutama manfaat Kartu Identitas Anak (KIA).	Untuk menyampaikan informasi terkait manfaat Kartu Identitas Anak maka dilakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk tahun 2022 bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi terkait KIA dan pemanfaatannya kepada berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk ini juga bermaksud untuk menjaring mitra bisnis dalam memenuhi target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terkait perjanjian kerjasama pemanfaatan KIA.
4	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi dan analisa capaian target kinerja terkait pendaftaran penduduk yaitu perekaman KTP-el dan kepemilikan KIA yang berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) dan data layanan serta pemanfaatan KIA tahun 2022 sehingga diharapkan	Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk terutama evaluasi kinerja bidang pendaftaran penduduk.  Melakukan kordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
		seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat mencapai target kinerja Dinas yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Saat ini masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan	Dilaksanakannya Rapat Koordinasi antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebanyak 2 kali
<b>III</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN</b>		
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Masih belum semua Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, diantaranya adalah perekaman KTP-el, Kepemilikan KIA, Pemanfaatan Data Kependudukan, jumlah akses data kependudukan dll.	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan Penilaian Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota Terbaik dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan penghargaan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan kinerja Dinas serta memberikan motivasi bagi setiap Kabupaten/Kota untuk lebih baik lagi dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan ke depannya.
		Belum semua Dinas Dukcapil melakukan pelayanan optimal, baik dari segi manajerial dan peningkatan sarana dan prasarana serta inovasi yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.	
2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Masih adanya penambahan atau pengurangan persyaratan pengurusan pelayanan di luar Perpres 96 tahun 2018 dan turunannya.	Dalam Bimtek disampaikan bahwa Front Office harus memahami aturan teknis terkait pelayanan adminduk, yaitu Permendagri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Permendagri Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang PERATURAN PELAKSANAAN Perpres NOMOR 96 TAHUN 2018 ttg Persyaratan dan tata cara daftuk dan capil, Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam adminduk, Surat Edaran Nomor 470/1328/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Daftuk dan Capil dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		
1	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	OPD yang telah bekerjasama dengan Dukcapil Provinsi tidak berperan aktif dalam melengkapi dokumen persyaratan untuk penerbitan hak akses padahal sudah disampaikan pada saat pelaksanaan rapat juknis dengan OPD terkait. OPD tidak menyerahkan data balikan	Selalu berkoordinasi dengan PIC OPD untuk dapat segera melengkapi. Dengan menyurati OPD
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
1	Penyediaan Profil Kependudukan/Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Adanya beberapa permintaan data kepada OPD teknis terkait yang pada akhirnya tidak bisa diberikan karena data yang diminta tidak semuanya ada di OPD teknis yang bersangkutan	Untuk data-data yang belum bisa diberikan pada tanggal waktu yang ditetapkan, maka data tersebut tidak disajikan dalam profil agar tidak menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan profil perkembangan kependudukan Provinsi Sumbar tahun 2021 Selalu berkoordinasi dengan OPD teknis terkait.

### 3.1.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 mendapat alokasi belanja sebesar Rp.24.497.509.043,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.18.752.522.879,00 dan belanja yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.5.744.986.164,00 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp.23.990.295.491,00 (97,93%) yang didukung oleh 5 Program, 11 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan.

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari Maju	51	51	100
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				
II	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	410	412	100,48
III	Meningkatnya Peran lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif			
			KAN Aktif	350	350	100
			Posyandu Mandiri	2400	2400	100
			LPM Mandiri	7	7	100
IV	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	B (69)	Masih dalam Tahap Penyelesaian	Nilai akuntabilitas kinerja OPD
			Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	78 (Baik)	Masih dalam Tahap Penyelesaian	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Organisasi

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan, dengan indikator kinerja :

1) Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari Maju (Target Kinerja : 51 dengan realisasi : 51).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Penatausahaan Penetapan Susunan kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa atau Desa Adat, dengan Sub kegiatan :

➤ Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi, dengan Output berupa Monitoring dan Evaluasi Penataan Desa Adat serta terlaksananya Sosialisasi Identifikasi dan Inventarisasi Dsea Adat.

b) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub kegiatan :

➤ Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat, dengan output Monev dalam rangka Identifikasi dan Evaluasi masyarakat hukum Adat.

➤ Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan Output terlaksananya Pendataan dan pembinaan Kelembagaan nagari/Desa/Kelurahan, LPM, PKK, dan posyandu.

➤ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan output Terlaksananya Jambore Kader PKK Tk. Prov. Sumbar Mukerda DPD LPM Prov. Sumbar, Penilaian

Kader Posyandu Berprestasi Tk. Prov Sumbar, Penilaian KAN Terbaik Tk. Prov. Sumbar, Penilaian LPM Tk. Prov. Sumbar, Peningkatan Kapasitas Karang Taruna, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Adat Nagari/Desa/Kelurahan. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas LPM 256 orang, Peningkatan Kapasitas LPM, PKK dan Posyandu.

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan, dengan output Terlaksananya Bimbingan Teknis Enterpreneur Milenial di Nagari/Desa, Bimbingan Teknis Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Pasar Desa, Bimbingan Teknis Pengembangan Prukades, Identifikasi Prukades, Lomba Budidaya Magot Lalat Hitam, Monitoring dan Evaluasi Prukades, Pasar Desa, dan Lumbung Pangan.
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan output Terfasilitasinya Penilaian Posyantek Tingkat Nasional, Penilaian Inovator dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Penilaian Inovator dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Bimbingan Teknis Inovator Teknologi Tepat Guna, Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi, Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi serta Pelatihan Penilaian Posyantek Tingkat Provinsi.
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan output terlaksananya Pencanaan BBGRM dan Pembina serta Monitoring BBGRM.
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan output Terlaksananya Bimtek Gerakan PKK, Jambore Kader PKK Tk. Prov. Sumbar.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya Administrasi Pemerintahan desa, dengan indikator kinerja :

1) Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang (Target Kinerja : 410 dengan realisasi : 412).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Administrasi Pemerintahan Desa, dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan :

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan Sub kegiatan :
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan output Monev dan koordinasi pengelolaan keuangan Desa/nagari, Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa.
  - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, dengan keluaran Monev dan koordinasi pengelolaan Aset Desa/nagari dan Rapat Koordinasi Pengelolaan Aset Desa.
  - Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan output Terlaksananya sosialisasi perubahan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014.
  - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, dengan output Terlaksananya Penilaian Lomba Nagari dan Kelurahan Berprestasi.
  - Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa, dengan output Terlaksananya Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa, Rakor Wali Nagari/Kepala Desa Se Sumatera Barat, Monev pembinaan aparatur pemerintahan Desa.
  - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, dengan output Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bagi BAMUS Nagari yang baru terpilih dan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Bamus Nagari ke 14 Kab/Kota.
  - Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa, dengan output Monitoring dan Evaluasi Perkembangan BUMDes, Terlaksananya Lomba BUMNag, Penilaian BUMDes, Rapat Koordinasi Pedoman Umum BUMDes/BUMNag, sosialisasi Pembentukan BUMNag/BUMDes, Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2021, dan Workshop Pengelolaan Sampah Melalui BUMNAG.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya Peran lembaga Kemasyarakatan, dengan indikator kinerja :
- 1) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif.
  - 2) KAN Aktif (Target Kinerja : 350 dengan realisasi : 350)
  - 3) Posyandu Mandiri (Target Kinerja : 2400 dengan realisasi : 2400)
  - 4) LPM Mandiri (Target Kinerja : 7 dengan realisasi : 7).
  - 5) Dasawisma Mandiri (Target Kinerja: 10.800 dengan realisasi: 10.800).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :
- (1) Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub kegiatan :
- Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat, dengan output Monev dalam rangka Identifikasi dan Evaluasi masyarakat hukum Adat.
  - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan Output terlaksananya Pendataan dan pembinaan Kelembagaan nagari/Desa/Kelurahan, LPM, PKK, dan posyandu.
  - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan output Terlaksananya Jambore Kader PKK Tk. Prov. Sumbar Mukerda DPD LPM Prov. Sumbar, Penilaian Kader Posyandu Berprestasi Tk. Prov Sumbar, Penilaian KAN Terbaik Tk. Prov. Sumbar, Penilaian LPM Tk. Prov. Sumbar, Peningkatan Kapasitas Karang Taruna, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Adat Nagari/Desa/Kelurahan. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas LPM 256 orang, Peningkatan Kapasitas LPM, PKK dan Posyandu.
  - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan, dengan output Terlaksananya Bimbingan Teknis Enterpreneur Milenial di Nagari/Desa, Bimbingan Teknis Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Pasar Desa, Bimbingan Teknis Pengembangan Prukades, Identifikasi Prukades, Lomba Budidaya Magot Lalat Hitam, Monitoring dan Evaluasi Prukades, Pasar Desa, dan Lumbung Pangan.
  - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan output Terfasilitasinya

Penilaian Posyantek Tingkat Nasional, Penilaian Inovator dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Penilaian Inovator dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Bimbingan Teknis Inovator Teknologi Tepat Guna, Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi, Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi serta Pelatihan Penilaian Posyantek Tingkat Provinsi.

- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan output terlaksananya Pencanaan BBGRM dan Pembina serta Monitoring BBGRM.
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan output Terlaksananya Bimtek Gerakan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d. Sasaran IV : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, dengan indikator kinerja :

- 1) Nilai akuntabilitas kinerja OPD (Target Kinerja : 69 (B) dengan realisasi : \*Masih dalam tahap penyelesaian).
- 2) Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Organisasi (Target Kinerja : 78 (B) dengan realisasi : \*Masih dalam tahap penyelesaian).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan output Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan output Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan Anggaran SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Capaian dan evaluasi SKPD.

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output Tersedianya Honorarium Jasa Admiistrasi Keuangan.
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan output Terwujudnya Penatausahaan Keuangan SKPD Dengan Akurat dan Cermat.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semester, Bulanan dsan Lpaoran Akhir Tahun.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan :
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output Perangkat Daerah Terlaksananya Rekon Aset dan Pembayaran Asuransi bagi Aset.
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah.
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output Terlaksananya Penataan BMD.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan output Tersedianya Pakaian Dinas untuk ASN di Dinas PMD.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor serta Makan dan Minum Rapat.
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,



- dengan output Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan untuk Kelancaran Kerja.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan output Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah.
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output Terlaksananya kelancaran pendistribusian surat menyurat.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik untuk kegiatan Perkantoran.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Sopir Kantor dan Jasa Pengamanan Kantor.
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan output Terpeliharanya Sarana Mobilitas Jabatan.
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Operasional.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output Terpeliharanya Peralatan dan Mesin untuk kegiatan Kantor.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan lainnya, dengan output Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		100%	100	8.190.594.244	7.939.359.028	96,93
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>124.714.970</b>	<b>124.054.000</b>	<b>99,44</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100	67.543.320	67.369.000	99,74
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	100%	100	12.990.700	12.885.000	<b>99,19</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	100%	100	22.449.000	22.330.000	<b>99,47</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100	21.731.950	21.470.000	<b>98,79</b>
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>100</b>	<b>6.065.298.264</b>	<b>5.831.081.103</b>	<b>96,14</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100	5.744.986.164	5.512.812.103	<b>95,96</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100	246.407.500	244.697.500	<b>99,31</b>
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	100	33.608.300	33.543.000	<b>99,81</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	100%	100%	100	40.296.300	40.028.500	<b>99,34</b>
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>82.375.000</b>	<b>82.349.659</b>	<b>99,97</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	100%	100	65.400.000	65.389.909	<b>99,98</b>
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	100	3.215.000	3.199.750	<b>99,53</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	100	13.760.000	13.760.000	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>31.200.000</b>	<b>31.200.000</b>	<b>100</b>

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 bulan	12 bulan	100	31.200.000	31.200.000	100
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>475.663.650</b>	<b>474.419.077</b>	<b>99,74</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	12.910.250	12.903.000	99,94
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	64.536.000	64.166.879	99,43
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	72.675.900	72.287.300	99,47
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	16.856.750	16.754.750	99,39
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	176 eksemplar	176 eksemplar	100	20.700.000	20.460.000	98,84
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	287.984.750	287.847.148	99,95
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>896.286.308</b>	<b>882.675.004</b>	<b>98,48</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	5.500.000	5.500.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	190.193.790	178.407.081	93,80
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	700.592.518	698.767.923	99,74
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>515.056.052</b>	<b>513.580.185</b>	<b>99,71</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	100	36.000.000	35.439.387	98,44
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	100	185.511.072	185.266.900	99,87
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	89.244.980	89.137.500	99,88
	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan lainnya</b>	<b>1 kali</b>	<b>1kali</b>	<b>100</b>	<b>204.300.000</b>	<b>203.736.398</b>	<b>99,72</b>

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
II	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>				<b>24.482.000</b>	<b>24.073.580</b>	<b>98,33</b>
	<b>Penatausahaan Penetapan Susunan kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa atau Desa Adat</b>				<b>24.482.000</b>	<b>24.073.580</b>	<b>98,33</b>
	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi				24.482.000	24.073.580	<b>98,33</b>
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>118 dokumen Kerjasama</b>	<b>115 dokumen Kerjasama</b>	<b>97.46</b>	<b>1.222.528.753</b>	<b>1.213.207.682</b>	<b>99,24</b>
1	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>	<b>118 dokumen Kerjasama</b>	<b>115 dokumen Kerjasama</b>	<b>97.46</b>	<b>1.222.528.753</b>	<b>1.213.207.682</b>	<b>99,24</b>
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	150 buku IDM	150 buku IDM	100	101.666.000	99.511.800	<b>97,88</b>
	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	18 kab/kota	18 kab/ kota	100	842.859.753	838.980.859	<b>99,54</b>
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	14 kab/ kota	14 kab/ kota	100	278.003.000	274.715.023	<b>98,82</b>
III	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>381 desa/ nagari cepat berkembang</b>	<b>400 desa/ nagari cepat berkembang</b>	<b>100</b>	<b>5.541.762.597</b>	<b>5.421.000.943</b>	<b>97,82</b>
1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa/Nagari Kelurahan Berkembang 80%</b>	<b>Persentase Desa/Nagari Kelurahan Berkembang 80%</b>	<b>100</b>	<b>5.541.762.597</b>	<b>5.421.000.943</b>	<b>97,82</b>
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	6 kali monev 2 kali Rakor	6 kali monev 2 kali Rakor	100	293.009.100	275.575.996	<b>94,05</b>
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			100	48.333.561	46.997.300	<b>97,24</b>
	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 kab/kota	12 kab/kota	100	35.000.000	34.340.893	<b>98,12</b>
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	19 kab/ kota	19 kab/ kota	100	499.905.800	496.439.938	<b>99,31</b>
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	13 kab/ kota	13 kab/ kota	100	2.574.156.561	2.510.992.946	<b>97,55</b>
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	9 kab/ kota	9 kab/ kota	100	906.410.515	886.063.074	<b>97,76</b>

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	14 kab / kota	14 kab / kota	100	1.184.947.060	1.170.590.796	<b>98,79</b>
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>299 lembaga adat</b>	<b>326 lembaga adat</b>	109	<b>9.518.141.449</b>	<b>9.392.654.258</b>	<b>98,68</b>
<b>1</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>299 lembaga adat</b>	<b>326 lembaga adat</b>	109	<b>9.518.141.449</b>	<b>9.392.654.258</b>	<b>98,68</b>
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	18 Kab/kota	18 Kab/kota	100	63.077.500	62.191.545	<b>98,60</b>
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19 kab/ Kota	19 kab/ Kota	100	204.377.650	204.020.799	<b>99,83</b>
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	14 kab/ kota	14 kab/ kota	100	6.197.980.100	6.103.960.754	<b>98,48</b>

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	14 kab/ kota	14 kab/ kota	100	1.154.081.800	1.139.225.300	<b>98,71</b>
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	19 kab/kota	19 kab/kota	100	494.095.599	487.584.803	<b>98,68</b>
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	13 kab/kota	13 kab/kota	100	56.968.250	56.548.175	<b>99,26</b>
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	19 kab/kota	19 kab/kota	100	1.347.560.550	1.339.122.882	<b>99,37</b>

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		
1	<b>PROGRAM PENATAAN DESA /Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>		
	Jumlah Desa Adat yang terbentuk	Belum adanya Kabupaten/kota yang mengusulkan untuk pembentukan pergub pembentukan Nagari sebagai Desa adat	Melakukan Sosialisasi Perda 7 Tahun 2018 tentang Nagari secara lebih insentif dengan menemui Kepala Daerah Kab/Kota
		Perda 7 Tahun 2018 Tentang Nagari merupakan Perda Payung, dan tidak bersifat memaksa Pemerintah Desa dan Kab/Kota dalam Membentuk Desa/Nagari	Melakukan Revisi Perda 7 Tahun 2018
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA / Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>		
	Jumlah Kerjasama Desa	Sulit melakukan Fasilitasi Kerjasama Desa yang berbeda potensi	Melakukan Penjajakan Kerjasama dengan Universitas Negeri dan Swasta dalam membangun Desa/Nagari
		Kelembagaan BKAD/BKAN yang belum berjalan secara optimal	Melakukan Pembinaan Kepada BKAD/BKAN Melakukan Kerjasama dengan badan Negara seperti TNI
3	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA / Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	Banyak Desa yang blankspot	Melakukan Pembinaan intensif ke Nagari Desa dan Kelurahan yang berkembang
		Masih Banyak Nagari/Desa yang tidak mempunyai kantor Desa akibatnya Penyelenggaraan Pemerintahan menjadi tidak optimal	Identifikasi Desa/Nagari Blankspot
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT / Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Dasawisma Mandiri	Banyak nya kader lembaga kemasyarakatan yang rangkap, misalnya dalam satu Nagari/Desa dan Kelurahan kader posyandu kader PKK dan LPM itu 1 orang	Penataan Kembali Lembaga Kemasyarakatan, baik PKK, Posyandu, dan LPM dan Lembaga Adat
	Jumlah KAN yang aktif		
	Jumlah LPM Mandiri		
	Jumlah Posyandu Mandiri		

### 3.1.2.7. Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.17.260.017,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.713.545.918,70 atau 96,83%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	<b>Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	Jumlah trayek yang di akses	5 Trayek	5 Trayek	100
		<b>Pengelolaan Pelayaran</b>				
		<b>Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	Jumlah penumpang terangkut angkutan umum	19.000.000 Orang	18.650.012 Orang	98,15
II	Meningkatnya kinerja jalulintas di jalan Provinsi	<b>Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,52	0,53	
III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB (71)	BB (71,83)	101,169
IV	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	79	79,58	100,73

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Jumlah trayek yang di akses (Target Kinerja : 5 Trayek) (Realisasi Kinerja : 5 Trayek).
- 2) Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (Target Kinerja : 19.000.000 Orang) (Realisasi Kinerja : 18.650.012 Orang).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi, dengan output Jumlah Laporan Data Kebutuhan Penyediaan Angkutan Umum.

(2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, dengan output jumlah perlengkapan jalan yang terpasang di ruas jalan provinsi.

(3) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dengan output ruas Jalan Provinsi yang direhab dan dipelihara perlengkapan jalannya.

b) Program Pengelolaan Pelayaran, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya pengawasan



pelaksanaan usaha angkutan laut perintis.

- (2) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya pengawasan trayek lintas penyeberangan.
  - (3) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan sub kegiatan :
    - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan output Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.
  - (4) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan sub kegiatan :
    - Pengoperasian pemeliharaan pelabuhan pengumpan, dengan output kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen P3D Regional pelabuhan laut pengumpan.
- c) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ,dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, dengan sub kegiatan :
    - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B, dengan output Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya.
  - (2) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya pengumpulan data Kebutuhan Penyediaan Angkutan Umum.
  - (3) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam

Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan output kegiatan ini adalah Tersedianya data dan perawatan sistem informasi perijinan angkutan umum.
- (4) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, dengan sub kegiatan :
- Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B, dengan output Tersedianya Dokumen Studi Kelayakan Pemanfaatan dan Pengoperasian Terminal Tipe B yang Tersusun.
- (5) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, dengan sub kegiatan :
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal. Dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B
- (6) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, dengan sub kegiatan :
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung). Dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B.
- (7) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan sub kegiatan :
- Pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal, dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya inspeksi, audit, dan pemantauan terminal.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan Provinsi, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) V/C Rasio di Jalan Provinsi (Target Kinerja : 0,52) (Realisasi Kinerja : 0,53).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, dengan sub kegiatan :
    - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya.
  - (2) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya pengumpulan data Kebutuhan Penyediaan Angkutan Umum.
  - (3) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan output kegiatan ini adalah Tersedianya data dan perawatan sistem informasi perijinan angkutan umum.
  - (4) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B, dengan output kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Studi Kelayakan Pemanfaatan dan Pengoperasian Terminal Tipe B yang Tersusun.
  - (5) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, dengan sub kegiatan :
    - Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal. Dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B
  - (6) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, dengan sub kegiatan :
    - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas

Utama dan Pendukung). Dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B.

(7) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal. Dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya inspeksi, audit, dan pemantauan terminal.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

c. Sasaran III : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indicator kinerja yaitu :

1) Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja (Target Kinerja : BB 71) (Realisasi Kinerja : BB 71,83).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output Jumlah Buku Statistik Perhubungan yang Terdistribusikan Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (LKjIP, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan) Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi kinerja SKPD.

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output Jumlah ASN yang mendapatkan honor.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan output Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan output Jumlah Laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran yang disiapkan.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban.
  - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Gedung dan Kendaraan Dinas Operasional.
- (4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan output Jumlah Laporan hasil pengelolaan retribusi daerah yang dibuat.
- (5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan output Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output Jumlah bimtek yang dilaksanakan.
- (6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor ,dengan output Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan dan makan minum rapat.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output Jumlah Barang Cetak dan

- Penggandaan yang disediakan.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan output jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi.
- (7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Mebel, dengan output Jumlah Pengadaam Mebel sesuai dengan perencanaan.
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru.
- (8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia.
- (9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan output Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehab.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehab.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d. Sasaran IV : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerjayaitu :

- 1) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (Tingkat Kinerja : 79) (Realisasi Kinerja : 79,58).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Jumlah Buku Statistik Perhubungan yang Terdistribusikan Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (LKjIP, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan) Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output Jumlah ASN yang mendapatkan honor.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan output Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan output Jumlah Laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran yang disiapkan.

(2) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,

dengan sub kegiatan :

- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban.
  - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Gedung dan Kendaraan Dinas Operasional.
- (3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan output Jumlah Laporan hasil pengelolaan retribusi daerah yang dibuat.
- (4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan output Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output Jumlah bimtek yang dilaksanakan.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan dan makan minum rapat.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan output Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi



- SKPD, dengan output Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi.
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Pengadaan Mebel, dengan output Jumlah Pengadaam Mebel sesuai dengan perencanaan.
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
    - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru.
  - (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun.
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia.
  - (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan output Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan.
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya, dengan output Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehab.
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lannya yang dilakukan pemeliharaan/rehab.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian

target kinerja sasaran IV.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>				<b>12.827.548.776</b>	<b>12.418.265.542,80</b>	96,65
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>212.697.210</b>	<b>208.754.726</b>	98,18
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100	92.378.170	89.935.176	97,36
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	120.319.040	118.819.550	98,75
		1 Laporan	1 Laporan	100			
		85 Buku	85 Buku	100			
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			100	<b>8.789.728.168</b>	<b>8.502.608.599</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang	95 orang	100	8.500.719.778	8.221.061.578	96,71
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 Orang	17 Orang	100	187.610.000	182.924.500	97,50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	37.829.750	35.954.721	95,04
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	100	63.568.640	62.667.800	98,58
3.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			100	<b>87.543.000</b>	<b>82.911.408</b>	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	42.543.000	42.466.462	99,82
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	7 unit kendaraan dinas 1 unit Rumah Dinas	7 unit kendaraan dinas 1 unit Rumah Dinas	100	45.000.000	40.444.946	89,88
4.	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			100	<b>128.874.750</b>	<b>89.528.331</b>	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	128.874.750	89.528.331	69,47
5.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			100	<b>163.076.949</b>	<b>162.692.636</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	122 Stel	122 Stel	100	95.000.000	94.840.790	99,83

No	Program / Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 kali	16 kali	106	68.076.949	67.851.846	99,67
<b>6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			100	<b>629.442.585</b>	<b>627.998.242</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	35.000.000	34.989.000	99,97
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Bracket Standing TV	1 Bracket Standing TV	100	11.556.760	11.355.500	98,26
		3 Plakat	3 Plakat				
		12 Bulan	12 Bulan				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	156.309.800	155.343.800	99,38
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100	55.000.000	54.988.258	99,98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Jenis	3 Jenis	100	26.000.000	25.935.000	99,75
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	345.576.025	345.386.684	99,95
<b>7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>337.820.646</b>	<b>321.660.450</b>	
	PengadaanMebel	4RakArsip	4RakArsip	100	63.312.800	60.660.000	95,81
		2 Kursi Hadap Meja Ess IV	2 Kursi Hadap Meja Ess IV				
		10 KursiRapat	10 KursiRapat				
		2 MejaKerjaEs s III	2 MejaKerjaEs s III				
		2 KursiKerjaE ss IV	2 KursiKerjaE ss IV				
		2 Kursi Hadapan MejaEss IV	2 Kursi Hadapan MejaEss IV	100	229.686.326	216.605.250	94,30
		3 Kursi Hadapan Meja Ess II dan III	3 Kursi Hadapan Meja Ess II dan III				
		1 KursiKerjaE ss IIII	1 KursiKerjaE ss IIII				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dispenser	1 Dispenser	100	229.686.326	216.605.250	94,30
		1 Kulkas	1 Kulkas				
		1 Tablet	1 Tablet				
		1 Vacum Cleaner	1 Vacum Cleaner				
		2 AC Split 1.5 PK	2 AC Split 1.5 PK				
		2 AC Split 2 PK	2 AC Split 2 PK				
		3 Pc	3 Pc				

No	Program / Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		5 Printer	5 Printer				
		1 Smart Tv	1 Smart Tv				
		8 Laptop	8 Laptop				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 PaketKarp et	1 PaketKarp et	100	44.821.520	44.395.200	99,05
		2 Mouse P.C	2 Mouse P.C	100			
		2 BuahKipas Angin	2 BuahKipas Angin	100			
		16 Buah Flash Disk	-	0			
<b>8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.000.889.748</b>	<b>1.961.285.113</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1400 Surat	1400 Surat	100	14.000.000	13.682.350	97,73
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500 Mbps	500 Mbps	100	287.446.660	277.318.140	96,48
		3 Rekening	3 Rekening	100			
		2999 meterk ubik	2999 meterk ubik	100			
		104270 KW h	104270 KW h	100			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Supir	5 Supir	100	1.699.443.088	1.670.284.623	98,28
		18 Pengaman	18 Pengaman	100			
		20 CS	20 CS	100			
		12 Bulan	12 Bulan	100			
<b>9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			100	<b>477.475.720</b>	<b>460.826.037,80</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	17 Unit	17 Unit	100	257.540.720	247.526.030	96,11
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	1 Rumah Dinas	1 Rumah Dinas	100	178.100.000	177.702.017,80	99,78
		1 Kantor Induk	1 Kantor Induk	100			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Spesifikasi	6 Spesifikasi	100	41.835.000	35.597.990	85,09
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			100	<b>3.718.357.794</b>	<b>3.625.977.943,90</b>	

No	Program / Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>			100	-	-	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen		-	-	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0 Kab Kota dan KL	0 Kab Kota dan KL		-	-	
2	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>			100	<b>877.797.082</b>	<b>853.902.468,90</b>	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	50 Traffic Cone	50 Traffic Cone	100	686.879.582	675.832.633,09	98,39
		75 Road Barrier	75 Road Barrier				
		3 Ruas Jalan					
		1 Ruas Jalan Kab Kota					
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1 Ruas Jalan		100	190.917.500	178.069.835,81	93,27
3	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>			100	<b>546.108.250</b>	<b>531.731.035</b>	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	2 Dokumen		2 Dokumen	221.963.000	219.058.486	98,69
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	5 Terminal 2 UPTD		5 Terminal 2 UPTD	84.145.250	81.410.620	96,75
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	3 Terminal		3 Terminal	125.000.000	124.904.735	99,92
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	5 Orang & 1 Laporan		5 Orang & 1 Laporan	115.000.000	106.357.194	92,48
4	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>				<b>1.663.069.659</b>	<b>1.654.271.963</b>	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	563.069.659	560.057.011	99,46
		5 Kab Kota		5 Kab Kota			
		75 Orang 5 Sekolah		75 Orang 5 Sekolah			
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	3 Sepeda Motor Roda 2		3 Sepeda Motor Roda 2	1.100.000.000	1.094.214.952	99,47
		11 Kali		11 Kali			

No	Program / Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>				<b>9.583.293</b>	<b>8.013.250</b>	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	5 kali		5 kali	9.583.293	8.013.250	83,62
6	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>				<b>189.020.000</b>	<b>188.915.000</b>	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen		1 Dokumen	44.217.600	44.180.600	99,92
		7 UPUBKB Kab Kota		7 UPU BKB Kab Kota			
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	9 Kali		9 Kali	144.802.400	144.734.400	99,95
7	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>352.779.510</b>	<b>319.575.227</b>	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	242.999.510	238.045.378	97,96
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	28 Kali		24 Kali	109.780.000	81.529.849	74,27
8	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>80.000.000</b>	<b>69.569.000</b>	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Perangkat		1 Perangkat	80.000.000	69.569.000	86,96
		3 Printer		3 Printer			
		2 PC		2 PC			
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>				<b>623.939.538</b>	<b>593.566.487</b>	

No	Program / Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi</b>				<b>115.620.000</b>	<b>114.823.520</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	3 Trayek		3 Trayek	115.620.000	114.823.520	99,31
2	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>83.424.538</b>	<b>83.394.330</b>	
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	4 Trayek		4 Trayek	83.424.538	83.394.330	99,96
3	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>				<b>424.895.000</b>	<b>395.348.637</b>	
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Dokumen		0 Dokumen	8.160.000	8.160.000	100
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen		1 Dokumen	309.735.000	286.494.719	92,50
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 laporan		1 laporan	107.000.000	100.693.918	94,11
IV.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>				<b>90.171.250</b>	<b>75.735.945</b>	
1	<b>Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi</b>				<b>34.920.000</b>	<b>28.819.350</b>	
	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	34.920.000	28.819.350	82,53

No	Program / Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi				55.251.250	46.916.595	
	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	55.251.250	46.916.595	84,91

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

NO	Program / Kegiatan/	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		
1	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>		
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Kegiatan ini merupakan Program Unggulan (Progul) Gubernur Sumatera Barat, dan tidak terlaksana dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi. Sehingga di APBD perubahan 2022 kegiatan ini dihilangkan.	Telah menjadwalkan ulang pelaksanaan pada tahun 2023 dan kami usulkan penambahan anggaran berdasarkan Nota Dinas Nomor 050/587/Dishub-SB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 kepada Gubernur Sumatera Barat perihal penambahan anggaran pada APBD tahun 2023 untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023
2	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>		
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Realisasi keuangan 89,69 %, sisa anggaran yang belum terealisasi merupakan sisa belanja lembur petugas terminal	Melakukan penghitungan kembali secara cermat kebutuhan belanja, sehingga tidak ada lagi anggaran yang bersisa
3	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>		
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan lalu lintas saat lebaran	Melakukan evaluasi secara cermat kebutuhan belanja, kemudian melakukan evaluasi untuk pelaksanaan pengawasan lalu lintas Lebaran dan NATARU dan  Mengajukan Usulan penambahan anggaran APBD perubahan 2022 dan APBD tahun 2023 untuk mengantisipasi permasalahan lalu lintas ke BAPPEDA melalui surat No 050/417/Dishub-SB-2022 tgl 17 Mei 2022
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYARAN</b>		
1	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>		



NO	Program / Kegiatan/	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Tidak Terlaksananya Progul karena anggaran tidak mencukupi	Melakukan reschedule pelaksanaan kegiatan ini di tahun 2023 dan mengusulkan penambahan anggaran melalui : Nota Dinas Nomor 050/587/Dishub-SB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 kepada Gubernur Sumatera Barat dan Telaahan staf No 552.4/16/Dishub-SB 2022, tanggal 25 Agustus 2022 kepada Gubernur Sumatera Barat perihal penambahan anggaran pada APBD tahun 2023.

### 3.1.2.8. Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian

Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Kominfotik, pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.38.980.394.571,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.36.367.348.806,00 atau 93,29% dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Program	Indikator kinerja	Target kinerja (perjanjian kinerja)	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	<b>Pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>	Indeks keterbukaan informasi	10%	13,90%	139
II	Meningkatnya tata kelola teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah provinsi	<b>Pengelolaan aplikasi informatika</b>	Indeks domain kebijakan internal SPBE	32	3,2	100
			Indeks domain tata kelola SPBE			
			Indeks domain layanan SPBE			
			Indeks domain manajemen SPBE			
III	Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral	<b>Program penyelenggaraan statistik sektoral</b>	Persentase opd yg menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100
IV	Program penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi pemerintah daerah	<b>Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</b>	Indeks kami	45	60	75

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Indeks keterbukaan informasi (Target Kinerja : 10) (Realisasi Kinerja : 13,90).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

1) Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik, dengan output adanya peraturan sebanyak 1 regulasi dan persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Stakom dan SOP yang ditetapkan sebesar 10%.
- Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik, dengan output tersedianya rekomendasi berdasarkan hasil pantauan aduan Masyarakat sebanyak 4 dokumen dan tersedianya rekomendasi berdasarkan hasil pantauan isu publik di media massa dan media sosial sebanyak 4 dokumen.
- Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah, dengan output pelaksanaan FGD sebanyak 3 kali dan jumlah rekomendasi atas hasil analisis informasi kebijakan pemerintah daerah sebanyak 3 dokumen.
- Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, dengan output jumlah rilis kegiatan pemerintahan sebanyak 850 Rilis, video kegiatan pemerintahan sebanyak 100 vidio Persentase, konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom) sebesar 10%, dan tersedianya honor tenaga IT Support sebanyak 4 org.
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik : Diseminasi informasi melalui tatap muka, dengan output sebanyak 14 kali, Hibah KPID 12 bulan, Publikasi informasi melalui koran local sebanyak 35 halaman, Publikasi informasi melalui koran nasional sebanyak 3 halaman, Publikasi informasi melalui media luar ruang sebanyak 20 Titik, Publikasi informasi melalui media online sebanyak 360 paket, Publikasi melalui media radio sebanyak 8 kali, Publikasi melalui media televisise sebanyak 8 kali, Tersedianya batteray drone sebanyak 2 buah, Tersedianya gimbal stabilizer sebanyak 2 buah, Tersedianya kamera sebanyak 5 unit, Tersedianya Laptop sebanyak 3 unit, Tersedianya lensa kamera

canon sebanyak 4 buah, Tersedianya microphone camera sebanyak 3 buah, Tersedianya tripod kamera sebanyak 3 buah.

- Pelayanan Informasi Publik, dengan output Penyelenggaraan rakor PPID sebanyak 2 kali, Rapat vakasi/verifikasi Data Informasi Publik (DIP) sebanyak 51 kali, Sosialisasi KIP sebanyak 10 baliho, Tersedianya dokumen informasi publik sebanyak 1 dokumen, dan Workshop penyusunan DIP sebanyak 2 kali.
- Layanan Hubungan Media, dengan output Media briefing sebanyak 4 kali, Media gathering sebanyak 1 kali, dan Pertemuan dengan pemimpin redaksi sebanyak 4 kali.
- Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, dengan output Bimtek pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebanyak 1 kali, Bimtek pemilihan Media Tradisional terbaik sebanyak 1 kali, Pemilihan Kelompok Informasi Masyarakat terbaik sebanyak 1 kali, Peningkatan Literasi Digital sebanyak 20 kali, dan mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi persentase komunitas masyarakat.
- Manajemen Komunikasi Krisis, dengan output Jumlah informasi evaluasi penanganan komunikasi krisis sebanyak 4 dokumen, dan Jumlah informasi pengelolaan komunikasi krisis sebanyak 1 dokumen.
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, dengan output Jumlah Pegawai yang mengikuti bimtek sebanyak 4 orang.
- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah : Dukungan Administrasi KI selama 12 bln, dengan output Jumlah sengketa informasi yang diselesaikan sebanyak 90 persentase perkara, Lomba Design Grafik Tingkat Sumatera Barat sebanyak 1 kali, Lomba Jurnalistik Tingkat Sumatera Barat sebanyak 1 kali, sebanyak Lomba Penulisan Blog Tingkat Sumatera Barat sebanyak 1 kali, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 sebanyak 1 kali, Publikasi Media Online Rutin sebanyak 20 Media, dan Seleksi Komisioner KI Periode 2023-2027 sebanyak 1 kali.
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas, dengan output Terselenggaranya

Rakor Bako humas sebanyak 4 kali.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatnya tata kelola teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah provinsi, dengan indikator kinerja yaitu :
- 1) Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Target Kinerja : 3,2) (Realisasi Kinerja : 3,2).
  - 2) Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Target Kinerja : 3,2) (Realisasi Kinerja : 3,2).
  - 3) Indeks Domain Layanan SPBE (Target Kinerja : 3,2) (Realisasi Kinerja : 3,2).
  - 4) Indeks Domain Manajemen SPBE (Target Kinerja : 3,2) (Realisasi Kinerja : 3,2).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program pengelolaan aplikasi informatika, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan output Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sebanyak 1 domain, dan Jumlah perangkat daerah yg memiliki portal dan situs webs yg sesuai standar sebanyak 51 OPD.
    - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dengan output Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebanyak 48 OPD, Terpenuhinya kebutuhan internet VSAT sebanyak 12, dan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan jaringan TIK selama 1 tahun.
  - (2) Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan output Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan

- ketentuan perundang-undangan) sebanyak 512 OPD, Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundangundangan sebanyak 50 aplikasi, Terlaksananya Rapat Koordinasi SPBE dengan OPD dan Kab/Kota sebanyak 3 kali, dan Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait implemntasi e-government sebanyak 1 Regulasi.
- Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan output terlaksananya FGD sebanyak 12 kali.
  - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, dengan output Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah sebanyak 51 OPD, Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah sebanyak 3 OPD, dan Terpenuhinya Kebutuhan DRC selama 12 bulan.
  - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, dengan output Terpenuhinya kebutuhan komputer jaringan sebanyak 2 paket, Terpenuhinya kebutuhan lisensi vidcon selama 12 bulan, Terpenuhinya operasional mobilitas TIK selama 1 tahun, Terpenuhinya peralatan komunikasi sebanyak 2 paket, dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Comand Center sebanyak 1 unit.
  - Koordinasi Dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik, dengan output Jumlah kegiatan fasilitasi penyediaan dan pengembangan ekosistem dalam rangka pemanfaatan infrastruktur pita lebar sebanyak 19 kab/kota, Terpenuhinya dukungan kegiatan Penas Tani 1 kegi, Terpenuhinya kebutuhan honorarium Tenaga TIK (IT Network) selama 1 tahun, Terpenuhinya koordinasi dan monitoring infrastruktur TIK OPD sebanyak 3 kali, dan Terpenuhinya koordinasi infrastruktur TIK dengan pusat atau luar daerah sebanyak 6 kali.
  - Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan output Jumlah data yang dapat berbagi pakai sebanyak 4 data, Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah sebanyak 28 aplikasi, Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik sebanyak 110 aplikasi, Terbayarnya gaji tenaga ahli

Teknologi Informasi Provinsi Sumatera Barat sebanyak 17 org.

- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, dengan output Jumlah kabkota yang terhubung sebanyak 19 kab/kota, dan Jumlah Aplikasi yang terintegrasi sebanyak 4 aplikasi.
- Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas Dan Kota Cerdas, dengan output Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan smart city dan smart province sebanyak 5 kali, dan Meningkatnya perangkat daerah yang mengimplementasikan/replikasi inovasi yang mendukung smart city dan smart province sebanyak 51 OPD.
- Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dengan output Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo sebanyak 3.2 Indeks, Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi atau program pelatihan bidang digital yang diselenggarakan oleh Pemda sebanyak 150 orang, dan jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan digital atau program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemda sebanyak 150 orang.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

c. Sasaran III : Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase OPD yg menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program penyelenggaraan statistik sektoral, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, dengan output Tersedianya Buku DDA/SBDA sebanyak 1 buku, Tersedianya Buku PDRB sebanyak 1 buku, Tersedianya Buku Profil Daerah sebanyak 1 buku, Tersedianya Buku Statistik Diskominfotik sebanyak 1 buku, dan Tersedianya Buku Statistik Sektoral sebanyak 1 buku.

- Peningkatan Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi, dengan output Jumlah petugas statistik sektoral lingkup Pemda yang ikut bimtek yang dilatih sebanyak 100 org.
- Membangun Metadata Statistik Sektoral, dengan output Meningkatnya persentase kelengkapan Metadata kegiatan dan indikator statistik sektoral sebesar 20 persen.
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, dengan output Jumlah kegiatan Sosialisasi/Rakor/ Workshop yang dilaksanakan sebanyak 5 kali.
- Pengembangan Infrastruktur, dengan output Tersedianya Laptop sebanyak 3 unit.
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah, dengan output Rapat Evaluasi sebanyak 1 kali, Rapat Persiapan sebanyak 1 kali, Survey sebanyak 3 kali.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d. Sasaran IV : Program Penyelenggaraan Persandian Dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Indeks KAMI (Target Kinerja : 45) (Realisasi Kinerja : 60)

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan output Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan sebesar 100 persen, terlaksananya konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan persandian ke pusat sebanyak 2 kali, Terlaksananya Monitong dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian ke Kab/Kota sebanyak 10 kab/kota, Terlaksananya Sosialisasi Perda Persandian sebanyak 1 kali, Terlaksananya Sosialisasi Persandian dan Keamanan Informasi sebanyak 1 kali, Tersedianya Dokumen Kebijakan Tatakelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi sebanyak 1 dokumen, Terselenggaranya Rakor Persandian

- sebanyak 1 kali, Terselenggaranya Rapat Forkomsanda sebanyak 2 kali, Terselenggaranya Rapat Monitoring dan Evaluasi sebanyak 1 kali
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan output Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi ke Pusat sebanyak 2 kali, Terlaksananya Monev Pengelolaan SDM Keamanan Informasi Ke Kab/Kota sebanyak 17 kab/kota, Terselenggaranya Bimtek SDM Persandian sebanyak 1 kali, Terselenggaranya FGD Bagi SDM persandian sebanyak 1 kali, Terselenggaranya Workshop SDM Pengelola Persandian sebanyak 1 kali.
  - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik, dengan output Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistim elektronik yang ada pada pemerintah daerah sebesar 100 persen, Terbayarnya Honor Tim IT Persandian sebanyak 2 orang, Terlaksananya Bimtek KAMI sebanyak 1 kali, Terlaksananya Penilaian Indeks KAMI ke Kab/Kota sebanyak 17 kab/kota.
  - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan output Persentase sistim elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah sebesar 100 persen, Terlaksananya Bimtek Layanan Keamanan Informasi bagi OPD sebanyak 1 kali, Terlaksananya Drill Test sebanyak 1 kali, Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Layanan Keamanan Informasi Ke Pusat sebanyak 3 kali, Terlaksananya Layanan Keamanan Informasi Provinsi dan Kabupaten/kota selama 12 bln, dan Terlaksananya Penggunaan Layanan Keamanan Informasi Ke Kab/Kota sebanyak 17 kab/kota.
- (2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan output Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada PHKS yang diterapkan Pemerintah Daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi sebesar 100 persen, Terlaksananya bimtek pola hubungan komunikasi sandi sebanyak 1 kali, terlaksananya



konsultasi tentang pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi ke BSSN sebanyak 2 kali, Terlaksananya pembinaan penerapan pola hubungan komunikasi ke kab/kota sebanyak 7 kab/kota, Terlaksananya pembinaan penerapan pola hubungan komunikasi ke OPD sebanyak 2 kali, dan Terlaksananya penerapan pola hubungan komunikasi Provinsi dan Kabupaten/Kota selama 12 bln.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran.

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				<b>11.440.056.314</b>	<b>10.009.209.678</b>	<b>87,49</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			100	<b>138.647.150</b>	<b>136.859.600</b>	<b>98,71</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Opd : 2 Kali Jumlah Renja Yang Di Susun : 2 Dokumen Pembinaan Kab/Kota : 19 Kab/Kota	Forum Opd : 2 Kali Jumlah Renja Yang Di Susun : 2 Dokumen Pembinaan Kab/Kota : 19 Kab/Kota	100	60.262.000	59.837.150	99,29
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Rka Skpd Yang Disusun Terlaksananya Rapat : 5 Kali.	Jumlah Dokumen Rka Skpd Yang Disusun Terlaksananya Rapat : 5 Kali	100	9.640.000	9.526.500	98,82
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan Rka Skpd Yang Disusun : 1 Dok Terlaksananya Rapat : 8 Kali	Jumlah Dokumen Perubahan Rka Skpd Yang Disusun : 1 Dok Terlaksananya Rapat : 8 Kali	100	11.604.000	11.501.000	99,11
	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Dpa Skpd Yang Disusun : 1 Dok Terlaksananya Rapat : 6 Kali	Jumlah Dokumen Dpa Skpd Yang Disusun : 1 Dok Terlaksananya Rapat : 6 Kali	100	9.489.900	9.274.200	97,73

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi Dan Penyusunanperubah an Dpa-Skpd	Julmalh Dokumen Perubahan Dpa Skpd Yang Disusun : 1 Dok Terlaksanya Rapat : 6 Kali	Julmalh Dokumen Perubahan Dpa Skpd Yang Disusun : 1 Dok Terlaksanya Rapat : 6 Kali	100	8.476.000	8.383.500	98,91
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Terlaksanya Rapat : 2 Kali Tersusunnya Lakip : 1 Dok Tersusun Nya Lkpj : 1 Dok Tersusun Nya Lkpj :1 Dok Tersusun Nya Rencana Aksi : 4 Laporan	Terlaksanya Rapat : 2 Kali Tersusunnya Lakip : 1 Dok Tersusun Nya Lkpj : 1 Dok Tersusun Nya Lkpj :1 Dok Tersusun Nya Rencana Aksi : 4 Laporan	100	12.705.750	12.245.250	96,38
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan : 4 Dok Terlaksanya Rapat : 3 Kali	Julmalh Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan : 4 Dok Terlaksanya Rapat : 3 Kali	100	26.469.500	26.092.000	98,57
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>7.423.932.340</b>	<b>6.302.422.107</b>	84,89
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	100%	100%	100	6.972.059.776	5.921.941.357	84,94
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Asn Yg Mendapat Honor : 12 Orang	Jumlah Asn Yg Mendapat Honor : 12 Orang	100	420.205.764	350.856.250	83,5
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Jumlah Dok Spp, Spm Dan Pengesahan Spj Yg Diterbitkan : 43 Dok	Jumlah Dok Spp, Spm Dan Pengesahan Spj Yg Diterbitkan : 43 Dok	100	8.840.000	7.168.100	81,09
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Skpd Yg Di Susun : 1 Dok	Jumlah Laporan Keuangan Skpd Yg Di Susun : 1 Dok	100	5.018.800	4.912.100	97,87
	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaa n Yg Di Siapkan : 1 Dok	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaa n Yg Di Siapkan : 1 Dok	100	7.808.000	7.684.800	98,42

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/Seme ster Yg Di Siapkan : 18 Dok	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/Seme ster Yg Di Siapkan : 18 Dok	100	10.000.000	9.859.500	98,6
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>				<b>112.959.700</b>	<b>90.355.350</b>	79,99
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	Dok Usulan Rkpm d : 5 Dok	Dok Usulan Rkpm d : 5 Dok	100	8.015.000	67.142.950	<b>76,57</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Gedung Dan Lendaraan Yg Di Ansuransika n : 6 Unit	Jumlah Gedung Dan Lendaraan Yg Di Ansuransika n : 6 Unit	100	87.689.700	8.519.800	97,31
		Jumlah Unit Yg Di Lakukan Penjagaan : 6 Unit	Jumlah Unit Yg Di Lakukan Penjagaan : 6 Unit				
	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah : 2 Dok	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah : 2 Dok	100	8.755.000	7.545.100	88,77
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah : 2 Dok	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah : 2 Dok	100	8.500.000	7.147.500	89,18
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>258.637.000</b>	<b>245.849.713</b>	95,06
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya : 90 Dan 52 Stel	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya : 90 Dan 52 Stel	100	109.000.000	108.370.000	99,42
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bimtek Yang Diikuti : 4 Kali	Jumlah Bimtek Yang Diikuti : 4 Kali	100	149.637.000	137.479.713	91,88
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.067.172.494</b>	<b>1.010.499.850</b>	99,69
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 12 Bln	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 12 Bln	100	9.960.000	9.940.000	99,8

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Ac 10 Unit, Alat Pemadam 3 Unit, Alat Penghancur Kertas 3 Unit, Dispenser 1 Unit, Laptop 9 Unit, Lemari Es 2 Unit, Pabx 1 Unit, Printer 5 Unit, Sound System 1 Unit	Ac 10 Unit, Alat Pemadam 3 Unit, Alat Penghancur Kertas 3 Unit, Dispenser 1 Unit, Laptop 9 Unit, Lemari Es 2 Unit, Pabx 1 Unit, Printer 5 Unit, Sound System 1 Unit	100	406.850.550	359.879.860	88,46
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor Yg Disediakan 12 Bln, Tersedianya Kebutuhan Kantor 12 Bln	Alat Tulis Kantor Yg Disediakan 12 Bln, Tersedianya Kebutuhan Kantor 12 Bln	100	27.197.400	27.056.800	99,48
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Dan Pengadaan Yg Di Sediakan 12 Bln	Jumlah Barang Cetak Dan Pengadaan Yg Di Sediakan 12 Bln	100	25.000.000	25.000.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan 12 Bln	Jumlah Bahan Bacaan 12 Bln	100	16.470.000	16.470.000	100
	Penyelenggraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Laporan Hasil Koordinasi Dan Konsultasi 200 Dok	Laporan Hasil Koordinasi Dan Konsultasi 200 Dok	100	581.694.544	572.153.190	98,36
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.205.328.050</b>	<b>1.067.089.815</b>	88,53
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasionaml Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 2 : 5 Unit, Jumlah Kendaraan Roda 4 : 2 Unit	Jumlah Kendaraan Roda 2 : 4 Unit, Jumlah Kendaraan Roda 4 : 0 Unit	100	142.400.000	133.322.700	93,63
	Pengadaan Mebel	Kursi 100 Unit, Lemari 6 Unit, Meja 45 Unit	Kursi 100 Unit, Lemari 6 Unit, Meja 45 Unit	100	977.736.800	852.891.590	87,23
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor; 12 Bln	Tersedianya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor; 12 Bln	100	85.191.250	80.875.525	94,93
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.016.649.580</b>	<b>966.148.234</b>	95,03

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen/Surat Yg Di Fasilitas : 12 Bln	Jumlah Dokumen/Surat Yg Di Fasilitas : 12 Bln	100	6.995.000	6.995.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pdam 3000m3, Pln 200000kwh, Tagihan Telfon 2 Rekening	Pdam 3000m3, Pln 200000kwh, Tagihan Telfon 2 Rekening	100	405.555.000	390.023.524	96,17
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Kebersihan 5 Org, Tenaga Sopr 4 Org, Jasa Pelayanan Umum Kantor Tenaga Pengamanan Kantor 5 Org	Tenaga Kebersihan 5 Org, Tenaga Sopr 4 Org, Jasa Pelayanan Umum Kantor Tenaga Pengamanan Kantor 5 Org	100	604.099.580	569.129.710	94,21
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>216.730.000</b>	<b>189.985.009</b>	87,66
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Terpeliharaan ya Kendaan Dinas, Perizinan Dan Pajak Kendaraan Roda 2 : 7 Unit	Terpeliharaan ya Kendaan Dinas, Perizinan Dan Pajak Kendaraan Roda 2 : 7 Unit	100	120.490.000	107.475.971	89,2
		Terpeliharaan ya Kendaan Dinas, Perizinan Dan Pajak Kendaraan Roda 4 : 7 Unit	Terpeliharaan ya Kendaan Dinas, Perizinan Dan Pajak Kendaraan Roda 4 : 7 Unit				
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Genset 1 Unit, Terpeliharaan ya Ac 24 Unit	Genset 1 Unit, Terpeliharaan ya Ac 24 Unit	100	43.740.000	35.272.538	80,64
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor : 12 Unit	Pemeliharaan Gedung Kantor : 12 Unit	100	52.500.000	47.236.500	89,97
		Perbaikan Instansi Listrik 1 Paket	Perbaikan Instansi Listrik 1 Paket				
		Perbaikan Instansi Air 1 Paket	Perbaikan Instansi Air 1 Paket				
		Perbaikan/Rehabilitasi : 12 Bln	Perbaikan/Rehabilitasi : 12 Bln				
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>				<b>13.212.081.038</b>	<b>12.346.914.916</b>	93,45

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>				<b>13.212.081.038</b>	<b>12.346.914.916</b>	93,45
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	Adanya Peraturan : 1 Regulasi  Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksana n Sesuai Dengan Stakom Dan Sop Yang Ditetapkan : 10 %	Adanya Peraturan : 1 Regulasi  Persentase Diseminasi & Layanan Informasi Publik Yang Dilaksana n Sesuai Dengan Stakom Dan Sop Yang Ditetapkan : 10 %	100	32.498.000	23.804.000	73,25
	Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Tersedianya Rekomenda si berdasarkan Hasil Pantauan Aduan Masyarakat : 4 Dok  Tersedianya Rekomenda si berdasarkan Hasil Pantauan Isu Publik Di Media Massa Dan Media Social : 4 Dok	Tersedianya Rekomenda si Berdasarkan Hasil Pantauan Aduan Masyarakat : 4 Dok  Tersedianya Rekomenda si Berdasarkan Hasil Pantauan Isu Publik Di Media Massa Dan Media Social : 4 Dok	100	46.000.000	37.834.630	82,25
	Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Fgd : 3 Kali  Jumlah Rekomenda si Atas Hasil Analisis Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah : 3 Dok	Fgd : 3 Kali  Jumlah Rekomenda si Atas Hasil Analisis Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah : 3 Dok	100	47.560.000	30.644.012	64,43
	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Rilis Kegiatan Pemerintah n : 850 Rilis  Jumlah Video Kegiatan Pemerintah n : 100 Vidio	Jumlah Rilis Kegiatan Pemerintah n : 850 Rilis  Jumlah Video Kegiatan Pemerintah n : 100 Vidio	100	1.479.797.924	1.465.097.587	99,01

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Konten Informasi Terkait Program Dan Kebijakan Pemerintah Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (Strakom) : 10 %	Persentase Konten Informasi Terkait Program Dan Kebijakan Pemerintah Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (Strakom) : 10 %				
		Tersedianya Honor Tenaga It Support : 4 Org	Tersedianya Honor Tenaga It Support : 4 Org				
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diseminasi Informasi Melalui Tatap Muka : 14 Kali	Diseminasi Informasi Melalui Tatap Muka : 14 Kali				
		Hibah Kpid ; 12 Bln	Hibah Kpid ; 12 Bln				
		Publikasi Informasi Melalui Koran Local : 35 Halaman	Publikasi Informasi Melalui Koran Local : 35 Halaman				
		Publikasi Informasi Melalui Koran Nasional :3 Halaman	Publikasi Informasi Melalui Koran Nasional :3 Halaman				
		Publikasi Informasi Melalui Media Luar Ruang : 20 Titik	Publikasi Informasi Melalui Media Luar Ruang : 20 Titik	100	8.207.521.290	7.791.310.710	94,93
		Publikasi Informasi Melalui Media Online : 360 Paket	Publikasi Informasi Melalui Media Online : 360 Paket				
		Publikasi Melalui Media Radio : 8 Kali	Publikasi Melalui Media Radio : 8 Kali				
		Publikasi Melalui Media Televise : 8 Kali	Publikasi Melalui Media Televise : 8 Kali				
		Tersedianya Batteray Drone ; 2 Buah	Tersedianya Batteray Drone ; 2 Buah				
		Tersedianya Gimbal Stabilizer : 2 Buah	Tersedianya Gimbal Stabilizer : 2 Buah				

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tersedianya Kamera : 5 Unit	Tersedianya Kamera : 5 Unit				
		Tersedianya Laptop : 3 Unit	Tersedianya Laptop : 3 Unit				
		Tersedianya Lensa Kamera Canon : 4 Buah	Tersedianya Lensa Kamera Canon : 4 Buah				
		Tersedianya Microphone Camera : 3 Buah	Tersedianya Microphone Camera : 3 Buah				
		Tersedianya Tripod Kam : 3 Buah	Tersedianya Tripod Kam : 3 Buah				
	Pelayanan Informasi Publik	Penyelenggaraan Rakor Ppid : 2 Kali	Penyelenggaraan Rakor Ppid : 2 Kali	100%	242.000.000	183.008.824	75,62
		Rapat Vakasi/Verifikasi Data Informasi Publik (Dip) : 51 Kali	Rapat Vakasi/Verifikasi Data Informasi Publik (Dip) : 51 Kali				
		Sosialisasi Kip : 10 Baliho	Sosialisasi Kip : 10 Baliho				
		Tersedianya Dokumen Informasi Public : 1 Dok	Tersedianya Dokumen Informasi Public : 1 Dok				
		Workshop Penyusunan Dip : 2 Kali	Workshop Penyusunan Dip : 2 Kali				
	Layanan Hubungan Media	Media Briefing : 4 Kali	Media Briefing : 4 Kali	100	56.798.000	33.125.800	58,32
		Media Gathering : 1 Kali	Media Gathering : 1 Kali				
		Pertemuan Dengan Pemimpin Redaksi : 4 Kali	Pertemuan Dengan Pemimpin Redaksi : 4 Kali				
	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Bimtek Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) : 1 Kali	Bimtek Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) : 1 Kali	100	122.199.800	98.998.900	81,01
		Bimtek Pemilihan Media Tradisional Terbaik : 1 Kali	Bimtek Pemilihan Media Tradisional Terbaik : 1 Kali				
		Pemilihan Kelompok Informasi Masyarakat Terbaik : 1 Kali	Pemilihan Kelompok Informasi Masyarakat Terbaik : 1 Kali				



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemilihan Media Tradisional Terbaik : 1 Kali	Pemilihan Media Tradisional Terbaik : 0 Kali				
		Peningkatan Literasi Digital : 20 Kali	Peningkatan Literasi Digital : 20 Kali				
		P/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Yang Menyebarkan Informasi Dan Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Provinsi serta Komunitas Masyarakat : 20 %	P/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Yang Menyebarkan Informasi Dan Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Provinsi serta Komunitas Masyarakat : 20 %				
	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Informasi Evaluasi Penanganan Komunikasi Krisis : 4 Dok	Jumlah Informasi Evaluasi Penanganan Komunikasi Krisis : 4 Dok	100%	26.375.000	14.953.640	56,7
		Jumlah Informasi Pengelolaan Komunikasi Krisis : 1 Dok	Jumlah Informasi Pengelolaan Komunikasi Krisis : 1 Dok				
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimtek : 4 Orang	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimtek : 4 Orang	100%	40.000.000	36.719.120	90,95
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	Dukungan Administrasi Ki ; 12 Bln	Dukungan Administrasi Ki ; 12 Bln				
		Jumlah Sengketa Informasi Yang Diselesaikan : 90 Persentase Perkara	Jumlah Sengketa Informasi Yang Diselesaikan : 90 Persentase Perkara	100%	2.743.030.924	2.494.694.938	90,95
		Lomba Design Grafik Tingkat Sumatera Barat : 1 Kali	Lomba Design Grafik Tingkat Sumatera Barat : 1 Kali				
		Lomba Jurnalistik Tingkat Sumatera Barat : 1 Kali	Lomba Jurnalistik Tingkat Sumatera Barat : 1 Kali				

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Lomba Penulisan Blog Tingkat Sumatera Barat : 1 Kali	Lomba Penulisan Blog Tingkat Sumatera Barat : 1 Kali				
		Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 : 1 Kali	Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 : 1 Kali				
		Publikasi Media Online Rutin : 20 Media	Publikasi Media Online Rutin : 20 Media				
		Seleksi Komisioner Ki Periode 2023-2027 : 1 Kali	Seleksi Komisioner Ki Periode 2023-2027 : 1 Kali				
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Terselengga ranya Rakor Bako Humas : 4 Kali	Terselengga ranya Rakor Bako Humas : 4 Kali	100	168.300.100	136.722.755	81,24
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>				<b>12.949.577.192</b>	<b>12.686.245.954</b>	97,97
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>				<b>7.832.465.243</b>	<b>7.764.838.916</b>	99,14
1	Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan (Event), Perangkat Daerah Dan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Yang Dimanfaatka n Secara Daring Dengan Memanfaatk an Domain Dan Sub Domain Instansi Penyelengg ara Negara : 1 Domain	Jumlah Kegiatan (Event), Perangkat Daerah Dan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Yang Dimanfaatka n Secara Daring Dengan Memanfaatk an Domain Dan Sub Domain Instansi Penyelengg ara Negara : 1 Domain	100	42.500.000	42.270.000	99,46

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Perangkat Daerah Yg Memiliki Portal Dan Siyus Webs Yg Sesuai Standar : 51 Opd	Jumlah Perangkat Daerah Yg Memiliki Portal Dan Siyus Webs Yg Sesuai Standar : 51 Opd				
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Di Jaringan Intra Pemerinta Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo : 48 ,Opd	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Di Jaringan Intra Pemerintah Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo : 48 ,Opd	100	7.789.965.243	7.722.568.916	99,13
		Terpenuhinya Kebutuhan Internet Vsat : 12 Bln	Terpenuhinya Kebutuhan Internet Vsat : 12 Bln				
		Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Jaringan Tik :1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Jaringan Tik :1 Tahun				
2	<b>Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>				<b>5.117.111.949</b>	<b>4.921.407.038</b>	96,18
	Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengimplem entasikan Layanan Aplikasi Umum Dan Aplikasi Khusus Yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang Undangan) : 512 Opd	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengimplem entasikan Layanan Aplikasi Umum Dan Aplikasi Khusus Yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang Undangan) : 512 Opd	100	684.155.400	678.338.346	99,15

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Sistem Elektronik Yang Terdaftar Sesuai Ketentuan Perundang-undangan : 50 Aplikasi	Jumlah Sistem Elektronik Yang Terdaftar Sesuai Ketentuan Perundang-undangan : 50 Aplikasi				
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Spbe Dengan Opd Dan Kab/Kota : 3 Kali	Terlaksananya Rapat Koordinasi Spbe Dengan Opd Dan Kab/Kota : 3 Kali				
		Tersedianya Peraturan Daerah Atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E-Government : 1 Regulasi	tersedianya Peraturan Daerah Atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E-Government : 1 Regulasi				
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Fgd : 12 Klai		100	85.512.000	85.337.140	99,8
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah ; 51 Opd	Jumlah Perangkat Daerah Yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah ; 51 Opd				
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Menyimpan Data Di Pusat Data Pemerintah : 3 Opd	Jumlah Perangkat Daerah Yang Menyimpan Data Di Pusat Data Pemerintah : 3 Opd	100	784.866.859	724.392.595	92,29
		Terpenuhinya Kebutuhan Drc : 12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Drc : 12 Bulan				
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Komputer Jaringan : 2 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Komputer Jaringan : 2 Paket				
		Terpenuhinya Kebutuhan Lisensi Vidcon : 12 Bln	Terpenuhinya Kebutuhan Lisensi Vidcon : 12 Bln	100	559.348.840	505.983.400	90,46

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terpenuhinya Operasional Mobilitas Tik : 1 Tahun	Terpenuhinya Operasional Mobilitas Tik : 1 Tahun				
		Terpenuhinya Peralatan Komunikasi : 2 Paket	Terpenuhinya Peralatan Komunikasi : 2 Paket				
		Tersedianya Sarana Dan Prasarana Comand Center : 1 Unit	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Comand Center : 1 Unit				
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyediaan Dan Pengembangan Ekosistem Dalam Rangka Pemanfaatan Infrastruktur Pita Lebar : 19 Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyediaan Dan Pengembangan Ekosistem Dalam Rangka Pemanfaatan Infrastruktur Pita Lebar : 19 Kab/Kota				
		Terpenuhinya Dukungan Kegiatan Penas Tani 1 Kegiatan	Terpenuhinya Dukungan Kegiatan Penas Tani 1 Kegiatan	100	1.113.723.500	1.064.704.164	95,6
		Terpenuhinya Kebutuhan Honorarium Tenaga Tik (It Network) : 1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Honorarium Tenaga Tik (It Network) : 1 Tahun				
		Terpenuhinya Koordinasi Dan Monitoring Infrastruktur Tik Opd : 3 Kali	Terpenuhinya Koordinasi Dan Monitoring Infrastruktur Tik Opd : 3 Kali				
		Terpenuhinya Koordinasi Infrastruktur Tik Dengan Pusat Atau Luar Daerah : 6 Kali	Terpenuhinya Koordinasi Infrastruktur Tik Dengan Pusat Atau Luar Daerah : 6 Kali				
	Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Data Yang Dapat Berbagi Pakai : 4 Data	Jumlah Data Yang Dapat Berbagi Pakai : 4 Data	100	1.273.230.450	1.256.035.950	98,65

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Layanan Publik Dan Layanan Administrasi Yang Terintegrasi Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah : 28 Aplikasi	Jumlah Layanan Publik Dan Layanan Administrasi Yang Terintegrasi Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah : 28 Aplikasi				
		Jumlah Layanan Spbe (Layanan Publik Dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Tercantum Dalam Dokumen Proses Bisnis Yang Telah Diimplementasikan Secara Elektronik : 110 Aplikasi	Jumlah Layanan Spbe (Layanan Publik Dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Tercantum Dalam Dokumen Proses Bisnis Yang Telah Diimplementasikan Secara Elektronik : 110 Aplikasi				
		Terbayarnya Gaji Tenaga Ahli Teknologi Informasi Provinsi Sumatera Barat : 17 Org	Terbayarnya Gaji Tenaga Ahli Teknologi Informasi Provinsi Sumatera Barat : 17 Org				
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jml Kabkota Yang Terhubung : 19 Kab/Kota	Jml Kabkota Yang Terhubung : 19 Kab/Kota	100	117.372.000	115.440.876	98,35
		Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi : 4 Aplikasi	Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi : 4 Aplikasi				
	Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas Dan Kota Cerdas	Koordinasi Dan Evaluasi Pelaksanaan Smart City Dan Smart Province : 5 Kali	Koordinasi Dan Evaluasi Pelaksanaan Smart City Dan Smart Province : 5 Kali	100	243.932.900	237.409.467	97,33

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan/R eplikasi Inovasi Yang Mendukung Smart City Dan Smart Province : 51 Opd	Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan/R eplikasi Inovasi Yang Mendukung Smart City Dan Smart Province : 51 Opd				
	Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ASN Pengelola Tik Yang Tersertifikasi Kompetensi Di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo : 3.2 Indeks	Jumlah ASN Pengelola Tik Yang Tersertifikasi Kompetensi Di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo : 3.2 Indeks	100	254.970.000	253.765.100	99,53
		Jumlah ASN Yang Mengikuti Kegiatan Literasi Atau Program Pelatihan Bidang Digital Yang Diselenggarakan Oleh Pemda : 150 Orang	Jumlah ASN Yang Mengikuti Kegiatan Literasi Atau Program Pelatihan Bidang Digital Yang Diselenggarakan Oleh Pemda : 150 Orang				
		Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Digital Atau Program Pelatihan Yang Diselenggarakan Oleh Pemda : 150 Orang	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Digital Atau Program Pelatihan Yang Diselenggarakan Oleh Pemda : 150 Orang				
<b>IV</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>				<b>686.800.027</b>	<b>648.547.643</b>	94,43
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi</b>				<b>686.800.027</b>	<b>648.547.643</b>	94,43
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Buku Dda/Sbda : 1 Buku	Tersedianya Buku Dda/Sbda : 1 Buku	100	199.665.900	199.055.396	99,69
		Tersedianya Buku Pdrb : 1 Buku	Tersedianya Buku Pdrb : 1 Buku				
		Tersedianya Buku Profil Daerah : 1 Buku	Tersedianya Buku Profil Daerah : 1 Buku				

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tersedianya Buku Statistik Diskominfo k : 1 Buku Tersedianya Buku Statistik Sektoral :1 Buku	Tersedianya Buku Statistik Diskominfo k : 1 Buku Tersedianya Buku Statistik Sektoral :1 Buku				
	Peningkatan Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah Petugas Statistik Sektoral Lingkup Pemda Yang Ikut Bimtek Yang Dilatih : 100 Org	Jumlah Petugas Statistik Sektoral Lingkup Pemda Yang Ikut Bimtek Yang Dilatih : 100 Org	100	91.728.000	89.166.330	97,21
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Meningkatny a Persentase Kelengkapa n Metadate Kegiatan Dan Indikator Statistik Sectoral : 20 Persen	Meningkatny a Persentase Kelengkapa n Metadate Kegiatan Dan Indikator Statistik Sectoral : 20 Persen	100	85.054.100	84.903.818	99,82
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/R akor / Workshop Yang Dilaksanakan : 5 Kali	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/R akor / Workshop Yang Dilaksanakan : 5 Kali	100	152.630.027	131.595.123	86,22
	Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya Laptop : 3 Unit	Tersedianya Laptop : 3 Unit	100	48.450.000	48.450.000	100
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah	Rapat Evaluasi : 1 Kali  Rapat Persiapan : 1 Kali Survey : 3 Kali	Rapat Evaluasi : 1 Kali  Rapat Persiapan : 1 Kali Survey : 3 Kali	100	109.272.000	95.376.976	87,28
<b>V</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>				<b>691.880.000</b>	<b>676.430.615</b>	<b>98</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>				<b>596.612.000</b>	<b>584.555.143</b>	<b>97,98</b>



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan Strategis Yang Telah Diamankan Melalui Kegiatan Pengamanan Sinyal Dibanding Banyaknya Jumlah Kegiatan Strategis Yang Harus Diamankan : 100 Persen	Persentase Kegiatan Strategis Yang Telah Diamankan Melalui Kegiatan Pengamanan Sinyal Dibanding Banyaknya Jumlah Kegiatan Strategis Yang Harus Diamankan : 100 Persen				
		Terlaksananya Konsultasi Dan Koordinasi Penyelenggaraan Persandian Ke Pusat : 2 Kali	Terlaksananya Konsultasi Dan Koordinasi Penyelenggaraan Persandian Ke Pusat : 2 Kali				
		Terlaksananya Monitong Dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Ke Kab/Kota : 10 Kab/Kota	Terlaksananya Monitong Dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Ke Kab/Kota : 10 Kab/Kota	100	95.898.000	90.006.982	93,86
		Terlaksananya Sosialisasi Perda Persandian : 1 Kali	Terlaksananya Sosialisasi Perda Persandian : 1 Kali				
		Terlaksananya Sosialisasi Persandian Dan Keamanan Informasi : 1 Kali	Terlaksananya Sosialisasi Persandian Dan Keamanan Informasi : 1 Kali				
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Tatakelola Keamanan Informasi Dan Jaringan Komunikasi : 1 Dok	Tersedianya Dokumen Kebijakan Tatakelola Keamanan Informasi Dan Jaringan Komunikasi : 1 Dok				
		Terselenggaranya Rakor Persandian : 1 Kali	Terselenggaranya Rakor Persandian : 1 Kali				
		Terselenggaranya Rapat Forkomsanda : 2 Kali	Terselenggaranya Rapat Forkomsanda : 2 Kali				

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terselenggaranya Rapat Monitoring Dan Evaluasi : 1 Kali	Terselenggaranya Rapat Monitoring Dan Evaluasi : 1 Kali				
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Konsultasi Dan Koordinasi Ke Pusat : 2 Kali	Terlaksananya Konsultasi Dan Koordinasi Ke Pusat : 2 Kali	100	162.714.000	161.511.021	99,26
		Terlaksananya Monev Pengelolaan Sdm Keamanan Informasi Ke Kab/Kota : 17 Kab/Kota	Terlaksananya Monev Pengelolaan Sdm Keamanan Informasi Ke Kab/Kota : 17 Kab/Kota				
		Terselenggaranya Bimtek Sdm Persandian : 1 Kali	Terselenggaranya Bimtek Sdm Persandian : 1 Kali				
		Terselenggaranya Fgd Bagi Sdm Persandian : 1 Kali	Terselenggaranya Fgd Bagi Sdm Persandian : 1 Kali				
		Terselenggranya Workshop Sdm Pengelola Persandian : 1 Kali	Terselenggranya Workshop Sdm Pengelola Persandian : 1 Kali				
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Persentase Sistem Elektronik Yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Smki) Dan Atau Aplikasi Persandian Dibanding Jumlah Sistim Elektronik Yang Ada Pada Pemerintah Daerah : 100 Persen	Persentase Sistem Elektronik Yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Smki) Dan Atau Aplikasi Persandian Dibanding Jumlah Sistim Elektronik Yang Ada Pada Pemerintah Daerah : 100 Persen	100	225.000.000	224.116.623	99,61
		Terbayarnya Honor Tim It Persandian : 2 Org	Terbayarnya Honor Tim It Persandian : 2 Org				

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksanan ya Bimtek Kami : 1 Kali Terlaksanan ya Penilaian Indeks Kami Ke Kab/Kota : 17 Kab/Kota	Terlaksanan ya Bimtek Kami : 1 Kali Terlaksanan ya Penilaian Indeks Kami Ke Kab/Kota : 17 Kab/Kota				
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Sistim Elektronik/A set Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah : 100 Persen Terlaksanan ya Bimtek Layanan Keamanan Informasi Bagi Opd : 1 Kali	Persentase Sistim Elektronik/A set Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah : 100 Persen Terlaksanan ya Bimtek Layanan Keamanan Informasi Bagi Opd : 1 Kali	100	113.000.000	108.920.517	96,39
		Terlaksanan ya Drill Test : 1 Kali	Terlaksanan ya Drill Test : 1 Kali				
		Terlaksanan ya Konsultasi Dan Koordinasi Layanan Keamanan Informas Ke Pusat : 3 Kali	Terlaksanan ya Konsultasi Dan Koordinasi Layanan Keamanan Informas Ke Pusat : 3 Kali				
		Terlaksanan ya Layanan Keamanan Informasi Provinsi Dan Kabupaten/ Kota : 12 Bln	Terlaksanan ya Layanan Keamanan Informasi Provinsi Dan Kabupaten/ Kota : 12 Bln				
		Terlaksanan ya Penggunaan Layanan Keamanan Informasi Ke Kab/Kota : 17 Kab/Kota	Terlaksanan ya Penggunaan Layanan Keamanan Informasi Ke Kab/Kota : 17 Kab/Kota				
2	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi</b>				<b>95.268.000</b>	<b>91.875.472</b>	96,44

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Titik Yang Diamankan Dibanding Dengan Jumlah Seluruh Titik Pada Phks Yang Diterapkan Pemerintah Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi : 100 Persen	Persentase Titik Yang Diamankan Dibanding Dengan Jumlah Seluruh Titik Pada Phks Yang Diterapkan Pemerintah Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi : 100 Persen				
		Terlaksanan ya Bimtek Pola Hubungan Komunikasi Sandi : 1 Kali	Terlaksanan ya Bimtek Pola Hubungan Komunikasi Sandi : 1 Kali				
		Terlaksanan ya Konsultasi Tentang Pelaksanaa n Pola Hubungan Komunikasi Sandi Ke Bssn : 2 Kali	Terlaksanan ya Konsultasi Tentang Pelaksanaa n Pola Hubungan Komunikasi Sandi Ke Bssn : 2 Kali	100	95.268.000	91.875.472	96,44
		Terlaksanan ya Pembinaan Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Ke Kab/Kota : 7 Kab/Kota	Terlaksanan ya Pembinaan Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Ke Kab/Kota : 7 Kab/Kota				
		Terlaksanan ya Pembinaan Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Ke Opd : 2 Kali	Terlaksanan ya Pembinaan Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Ke Opd : 2 Kali				
		Terlaksanan ya Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Provinsi Dan Kabupaten/ Kota : 12 Bln	Terlaksanan ya Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Provinsi Dan Kabupaten/ Kota : 12 Bln				

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tidak ada permasalahan	-
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tidak ada permasalahan	-
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tidak ada permasalahan	-
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tidak ada permasalahan	-
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERKA BSSN NO.10/2020	-

#### 3.1.2.9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM pada tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.28.578.913.180,00 dengan realisasi sebesar Rp.26.073.803.981,00 atau 91,23% dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja
I	Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	1,94	1,22	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	60	96,96	
		Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi sehat	40 Koperasi	38 koperasi	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	1.100 KUMKM	1.452 KUKM	
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi modern	50 Koperasi	50 Koperasi	
		Pemberdayaan UMKM	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	45 UKM	45 UKM	
		Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	2	1,72	
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100	100	

III	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi</b>	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100	100	
-----	--	--	---	-----	-----	--

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatkan kualitas Koperasi dan UKM, dengan Indikator Kinerja :

- 1) Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam dengan target kinerja 1,94 dan realiasi 1,22, capaian kinerja 62,89%.
- 2) Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (Target Kinerja : 60) (Realiasi Kinerja : 96,96) Capaian Kinerja : 161,6%.
- 3) Jumlah koperasi sehat (Target Kinerja : 40 Koperasi) (Realiasi Kinerja : 38 Koperasi) Capaian Kinerja : 98%.
- 4) Jumlah SDM KUKM yang dilatih (Target Kinerja : 1.100 KUMKM) (Realiasi Kinerja : 1.452 KUMKM) Capaian Kinerja : 132%.
- 5) Jumlah koperasi modern (Target Kinerja : 50 Koperasi) (Realiasi Kinerja : 50 Koperasi) Capaian Kinerja : 100%.
- 6) Jumlah produk UKM yang terstandarisasi (Target Kinerja : 45 UKM) (Realiasi Kinerja : 45 UKM) Capaian Kinerja : 100%.
- 7) Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (Target Kinerja : 2% Koperasi) (Realiasi Kinerja : 1,72%) Capaian Kinerja : 86%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, sub kegiatan :

- Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan output jumlah Koperasi yang mendapat pembinaan izin usaha simpan pinjam 17 koperasi, jumlah Peserta Rakor Izin Usaha Simpan Pinjam di Provinsi 40 orang.

b) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah

Keanggotaanya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Meningkatkan akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan , Kesiambungan dan Memberikan manfaat yang sebesar besarnya ke pada anggota dan masyarakat.
- Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, mandiri, tangguh serta Akuntabilitas, indikator dari sub kegiatan ini adalah pembinaan, tindaklanjut, pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan target 66 koperasi terealisasi 66 koperasi atau tercapai 100%.

c) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi, dengan indikator persentase koperasi sehat dan cukup sehat dengan target 80% terealisasi 95,58% dengan rincian dari 68 koperasi yang dilakukan penilaian kesehatannya, 65 koperasi masuk kedalam kategori sehat dan cukup sehat.

d) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, dengan indikator jumlah peserta pelatihan pengawasan koperasi bagi Gerakan koperasi dengan target 135 orang terealisasi 135 orang, jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi generasi muda dengan target 60 orang terealisasi 60 orang, jumlah peserta pelatihan pola syariah dengan target 60 orang terealisasi 60 orang, jumlah peserta pelatihan sertifikasi dewan syariah bagi KSPPS/USPPS koperasi dengan target 28 orang terealisasi 28 orang, jumlah peserta pelatihan perkoperasian berbasis IT dengan target 60 orang terealisasi 60 orang, Jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi kelompok masyarakat 120 orang

teralisasi 120 orang, Jumlah peserta pelatihan perkoperasian sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 120 orang teralisasi 120 orang.

(2) Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

➤ Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, indikator jumlah peserta pelatihan digital dan marketing dengan target 60 orang teralisasi 60 orang, jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dengan target 60 orang teralisasi 60 orang, jumlah peserta pelatihan manajemen keuangan dengan target 60 orang teralisasi 60 orang, jumlah peserta pelatihan penyusunan proposal pinjaman dengan target 60 orang teralisasi 60 orang, jumlah peserta pelatihan manajerial bagi UMKM dengan target 70 orang teralisasi 70 orang, jumlah peserta pelatihan peningkatan sumber daya pelaku UMKM dengan target 110 orang teralisasi 110 orang, jumlah peserta pelatihan pemberdayaan usaha mikro kecil dengan target 107 orang teralisasi 107 orang, jumlah peserta pelatihan manajemen keuangan bagi UMKM dengan target 65 orang teralisasi 65 orang, jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha bagi UMKM dengan target 60 orang teralisasi 60 orang, jumlah peserta pelatihan kreatifitas dan inovasi bagi Wirausaha Pemula dengan target 50 orang teralisasi 50 orang, jumlah peserta pelatihan penguatan bagi Wirausaha Pemula dengan target 350 orang teralisasi 350 orang, jumlah peserta pelatihan pembukuan sederhana bagi pelaku usaha mikro kecil dengan target 57 orang teralisasi 57 orang, Sosialisasi Advokasi Hukum dengan target 570 orang teralisasi 570 orang.

e) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

➤ Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restruktulisasi Usaha, dengan indikator jumlah koperasi yang difasilitasi akses



pembiayaan dengan target 10 koperasi terealisasi 10 koperasi, jumlah koperasi yang difasilitasi konversi menjadi koperasi syariah dengan target 50 koperasi terealisasi 50 koperasi.

Beberapa koperasi telah melakukan akses pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan diantaranya :

- 1) KSUKB BPD Sumbar
- 2) KSPPS BTM Sumatera Barat
- 3) Koperasi Keluarga Besar Semen Padang
- 4) KUD Tiku Lima Jorong (menunggu penyerahan)
- 5) KSPPS BMT Ayyasi (verifikasi akhir)
- 6) KSPPS BMT El Itqan (Verifikasi Akhir)
- 7) KSU Gapoktan Albasiko II (Verifikasi Akhir)
- 8) KSPPS BMT Jati (Verifikasi Akhir)
- 9) KSPPS BMT Al Fataya (Verifikasi Akhir)
- 10) KSP Lumbang Pusako (Proses Verifikasi)
- 11) Kopinkra Pusako Minang (Proses Verifikasi)

Koperasi yang mendapat fasilitasi konversi menjadi koperasi syariah diantaranya :

- 1) KSU Pasuk Jaya Lestahli Kab.Solok
- 2) KSU Syariah Iqro
- 3) KPRI SMAN 1 Gunung Talang
- 4) KPRI SMP 4 Solok
- 5) KPRI Bina Karya
- 6) KOP.Wahana Muda Karya Berkah
- 7) KOP.Mekar Jaya Sejahtera
- 8) KPRI SMKN 2 Solok
- 9) KPN SMP 3 Solok
- 10) KPN SMP 5 Solok
- 11) KPRI.S KANKEMENENAG KAB.SOLOK
- 12) KSU Pandan Putih
- 13) KPRI SMK 2 Solok
- 14) KOPEG LAPAS Solok

- 15) KOP LOMB
- 16) KOP. Ar.Razak Paninggahan
- 17) KPRI Bina Karya
- 18) KPRI SMP Gunung
- 19) KSPPS Hidup Berkah Bermakna
- 20) KPRI SMPN 4 Padang Panjang
- 21) KPSP Mersi
- 22) KSPS ISI Padang Panjang
- 23) Koppas AIPT
- 24) KPRI SMP 2 Padang Panjang
- 25) KPRI MTSN Padang Panjang
- 26) Koppontren Tawalib
- 27) Kopwan Melati
- 28) KPN Sehat Dinas Kesehatan Padang Panjang
- 29) KPN MAN Kobar
- 30) Koperasi Karya Tama Padang Panjang
- 31) KPRI RSUD Padang Panjang
- 32) KPN Rutan Padang Panjang
- 33) Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan
- 34) KSPPS EI-Itqan Kab. Solok Selatan
- 35) KSPPS Bhakti Husada Dinas Kesehatan
- 36) KPRI SMAN 2 Kota Solok
- 37) KPRI SMAN 4 Kota Solok
- 38) KPRI Kemenag Kota Solok
- 39) KPRI SMAN 3 Kota Solok
- 40) KPRI Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Solok
- 41) Koperasi Al-Jihad Kab. Agam
- 42) KSU SMKN 2 Padang Panjang
- 43) KPRI Serambi Mekah Padang Panjang
- 44) KPRI KOPRIDA Padang Panjang
- 45) Koppontren Dinniyah Puteri

- 46) KPRI SMAN 2 padang panjang
- 47) Koperasi Pulau Harapan Kab. Agam
- 48) KPRI Kopesda Padang Panjang
- 49) Koperasi Majelis Taklim Baitu Ibrahim
- 50) KSP Pusako Kab. Agam
- 51) KSU Sa'Adah Kab. Agam
- 52) KPRI SMPN 2 Solok
- 53) Koppontren Al-Manaar Kab. Lima Puluh Kota
- 54) Koperasi Simpan Pinjam Talago II Kab. Lima Puluh Kota

- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha, dengan indikator jumlah koperasi baru target 15 koperasi terealisasi 15 koperasi, jumlah koperasi sector riil yang difasilitasi untuk bermitra dengan target 5 koperasi terealisasi 5 koperasi, jumlah koperasi yang difasilitasi penataan manajemen dan penguatan usahanya dengan target 15 koperasi terealisasi 15 koperasi, jumlah koperasi yang difasilitasi perluasan akses pasarnya dengan target 5 koperasi, jumlah koperasi yang difasilitasi restrukturisasi usahanya dengan target 10 koperasi terealisasi 10 koperasi, pembinaan kelembagan koperasi primer dan sekunder provinsi dengan target 30 koperasi terealisasi 30 koperasi, pembubaran koperasi primer dan sekunder provinsi dengan target 25 koperasi terealisasi 25 koperasi, Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi dengan target 14 kab/kota terealisasi 14 kab/kota, terlaksananya rakor dengan PPKL se Sumatera Barat dengan target 70 orang terealisasi 70 orang.

Koperasi-koperasi yang telah difasilitasi adalah sebanyak 15 koperasi, yaitu :

- Koperasi Berkat Pilubang
- Koppontren Diniyah Pasir
- KUN VII Koto Talago
- Kopwan Koto Kaciak
- Koppontren Al Manaar

- KPN Banuhapu Sungai Puar
- KPN Husada Raya RSUD Bukittinggi
- Primkoppol Resort Bukittinggi
- KPN Guru SD Payakumbuh Timur
- KPN Ikhwan Payakumbuh
- KPN Politani Payakumbuh
- KPRI Agroveteriner
- KPN Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi
- Koperasi Ciptaru Tirtamarga Payakumbuh
- KUD Situjuh Batur Limapuluh Kota
- Peningkatan Nilai Tambah Usaha Koperasi Sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan dengan output difasilitasinya 5 ( lima ) koperasi untuk bermitra, yaitu :
  - Kopsyah Gambir Anam Koto Mandiri
  - KUD Durian Tinggi
  - KUD Tangai Raya
  - KSU Warga Sejahtera
  - Koperasi Tani Atsiri Syariah
- Peningkatan Akses Pasar Usaha Koperasi Sektor Riil dengan output dilakukan pembinaan sebanyak 10 (sepuluh) koperasi, yaitu :
  - Koppontren Diniyah Putri
  - Koperasi Pegawai Coca Cola
  - KSPS ISI Padang Panjang
  - KPN Balaikota Padang Panjang
  - KSPS Mersi
  - KPRI RSUD M. Natsir
  - KUD Dwi Sri
  - KPRI Mercuri Suar
  - Koperasi Primkoppol Kota Solok
  - Koperasi Karyawan Yarsi Padang Panjang
- Sosialisasi Perkoperasian di Lokasi TMMD/N, dengan

output partisipasi dan dukungan terhadap program TMMD/N sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor: 413.5/45/DPMD/2022 Tanggal 24 Februari 2022, Perihal: Dukungan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari ke 113,114 dan 115. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah peserta per kabupaten sebanyak 30 orang.

- Sosialisasi dan Peningkatan Peran Koperasi dalam Pengembangan Kelompok Usaha Strategis di 10 Kabupaten/Kota di Prov. Sumatera Barat dengan peserta di masing-masing Kab/Kota adalah sebanyak 20 orang perwakilan/pengurus/ketua kelompok usaha strategis yang diprioritaskan kepada usaha yang bergerak di sektor pertanian, tahu tempe dan madu sehingga total peserta adalah sebanyak 200 orang. Kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan kelembagaan kelompok usaha strategis menjadi berbentuk koperasi.
- Penilaian Koperasi Berprestasi dengan output 3 Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 516-553-2022 Tentang Penetapan Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Tanggal 15 Juli 2022 dan diajukan ke tingkat nasional.
- Pendataan Koperasi dengan output 1) Rapat Koordinasi Data se-Sumatera Barat dengan peserta Koordinator Data Provinsi, Enumerator Data Provinsi, Petugas Enumerator Data Kab./Kota dan Koordinator Data Koperasi Kab./Kota se-Sumatera Barat; 2) Rekonsiliasi Data ke Dinas Yang Membidangi Koperasi Kab./Kota se-Sumatera Barat sebanyak 12 Kab./Kota; 3) Uji Petik Data ke Koperasi Primer Kab./Kota sebanyak 14 Koperasi pada 14 Kab./Kota; 4) Pendataan Koperasi Primer Provinsi Sumatera Barat sebanyak 17 Koperasi.
- Pembinaan Koperasi Tidak Aktif dengan output Pembubaran koperasi sebanyak 10 Koperasi pada 7 Kab./Kota.
- Pembinaan Kelembagaan dengan output terlaksananya

pembinaan pada koperasi

- f) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku dengan sub kegiatan :
- Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri dengan output Meningkatkan Penciptaan Laporan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan dengan indikator terfasilitasinya akses UMKM ke bank dan Lembaga non bank dengan target 540 UM terealisasi 540 UKM, terfasilitasinya pendaftaran merk dengan target 15 UKM terealisasi 15 UKM, terfasilitasinya pendaftaran sertifikat halal dengan target 30 UKM terealisasi 30 UKM, terfasilitasinya perlindungan hukum dan konsultasi usaha bagi UKM dengan target 350 UKM terealisasi 350 UKM, terlaksananya pembekalan keterampilan bagi wirausaha baru dengan target 350 orang terealisasi 350 orang, terlaksananya pembinaan kelembagaan UKM di lokasi strategis dengan target 350 orang terealisasi 350 orang, terlaksananya sosialisasi fasilitasi perkuatan millenial entrepreneur dengan target 800 UMKM terealisasi 800 UMKM, tersedianya mobil klinik KUMKM dengan target 1 unit terealisasi 1 unit.
- g) Program Pengembangan UMKM dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah, dengan sub kegiatan
- produksi dan pengolahan pemasaran, sumber daya manusia, serta desain teknologi, dengan output : fasilitasi perluasan pasar produk UKM Sumatera Barat dengan target 75 UKM terealisasi 75 UKM, terfasilitasinya pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( PLUT KUMKM ) dengan target 2500 orang terealisasi 2500 orang, terfasilitasinya UMKM mengikuti pameran produk unggulan baik dalam maupun luar Sumbar dengan target 110 UMKM terealisasi 110 UMKM, terlaksananya bimtek dan sosialisasi pengembangan

UMKM berbasis digital dengan target 108 UMKM terealisasi 108 UMKM, terlaksananya bimtek pengembangan desain dengan target 108 UMKM, terlaksananya bimtek peningkatan nilai brand, kemasan dan aktifisasi digital dengan target 100 UMKM terealisasi 100 UMKM, terlaksananya fasilitasi kemasan, brand (merk) dan paper bag dengan target 50 UMKM, terlaksananya pembinaan dan pengembangan produk unggulan Sumatera Barat dengan target 2500 orang terealisasi 2500 orang, terlaksananya peningkatan kapasitas kewirausahaan dengan target 1.050 UKM, terlaksananya temu mitra dengan target 29 UMKM terealisasi 29 UMKM.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan Indikator Kinerja :
  - 1) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (Target Kinerja : 100) (Realisasi Kinerja : 100) Capaian Kinerja : 100.
- c. Sasaran III : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan Indikator Kinerja :
  - 1) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (Target Kinerja : 100) (Realisasi Kinerja : 100) Capaian Kinerja : 100.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan output terlaksananya penunjang urusan pada Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat selama satu tahun; dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen perencanaan perangkat daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan sebanyak 9 dokumen, dan dokumen renstra dan renja sebanyak 2 dokumen.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 2 kali.

- Evaluasi Kinerja perangkat Daerah sebanyak 4 dokumen.
- (2) Administrasi Keuangan Daerah Sub Kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS, Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan sebanyak 65 orang.
  - Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN selama 12 bulan.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 2 laporan.
  - Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteran SKPD 13 laporan.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengamanan Barang milik daerah SKPD, Jaminan barang milik daerah : kendaraan dinas/operasional sebanyak 17 unit.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
- Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya, Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi aparatur sebanyak 60 stel.
  - Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan, sebanyak 4 orang.
- (5) Administrasi Umum dan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 1 tahun (12 bulan).
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, selama 1 tahun (24 unit).
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, penyediaan ATK dan makan minum rapat selama 1 tahun (12 bulan).
  - Penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan, selama 1 tahun (8 unit).
  - Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (10 buah).
  - Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 1 tahun (60 dokumen).
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan



- Pengadaan Mebel sebanyak 25 unit.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (surat yang didistribusikan 1200 surat).
  - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (air 5.555 meter kubik, internet 200 mbps, listrik 234.072 kwh).
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan kantor 14 org, Jasa pengaman kantor 17 org, Sopir 7 orang dan Sehatnya mental dan fisik aparatur selama 12 bulan).
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/operasional 7 unit, Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 9 unit.
  - Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya, (jasa perbaikan peralatan kerja 126 unit).
  - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, Gedung kantor yang dipelihara 3 unit Gedung).

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II dan III.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Target (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Total Anggaran</b>				<b>28.578.913.180</b>	<b>26.073.803.981</b>	<b>91,23</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>11.942.994.980</b>	<b>11.600.776.238</b>	<b>97,13</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>201.899.250</b>	<b>185.719.850</b>	<b>91,99</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	100	34.222.250	33.569.250	98,09

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Target (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dok	4 dok	100	82.497.500	75.625.670	91,67
	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	8 dok	8 dok	100	85.179.500	76.524.930	89,84
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>7.268.896.066</b>	<b>7.163.248.803</b>	<b>98,55</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	65 orang	65 orang	100	6.911.076.416	6.813.049.053	98,58
	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	24 orang	24 orang	100	314.699.100	311.228.500	98,90
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	16.235.100	12.521.000	77,12
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteran SKPD	13 dokumen	13 dokumen	100	26.885.450	26.450.250	98,38
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>39.400.000</b>	<b>36.397.007</b>	<b>92,38</b>
	Pengamanan Barang milik daerah SKPD	17 unit	17 unit	100	39.400.000	36.397.007	92,38
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>83.108.000</b>	<b>80.332.045</b>	<b>96,66</b>
	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	75 steell	75 steell	100.00	45.000,000	43.911.045	97,58
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan	6 orang	6 orang	100.00	38.108.000	36.421.000	95,57
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum dan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.333.564.214</b>	<b>1.261.680.810</b>	<b>94,61</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29 unit	29 unit	100	32.404.640	32.135.000	99,17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 unit	24 unit	100	362.656.100	354.282.500	97,69
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78 unit	78 unit	100	301.745.600	265.135.000	87,87
	Penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan	8 unit	8 unit	100	57.562.000	56.513.000	98,18
	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 Buah	10 Buah	100	20.000.000	13.140.000	65,70
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Dok	60 Dok	100	559.195.874	540.475.310	96,65

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Target (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	100	100	66.677.600	47.008.500	70,50
	Pengadaan Mebel	80 unit	80 unit	100.00	66.677.600	47.008.500	70,50
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	100	100	2.003.479.850	1.910.092.778	95,34
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200 surat	1.200 surat	100	11.574.706	9.858.650	85,17
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200 mbps 100% 5.555 meter kubik 234.072 Kwh	200 mbps 100% 5.555 meter kubik 234.072 Kwh	100	465.409.500	410.727.041	88,25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100.00	1.526.495.644	1.489.507.087	97,58
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	100	100	945.970.000	916.296.445	96,86
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit,	9 unit,	100	239.290.000	227.288.945	94,98
	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	126 unit	126 unit	100	96.480.000	95.405.000	98,89
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	3 unit	3 unit	100	525.000.000	524.118.500	99,83
	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	75 unit	75 unit	100	85.200.000	69.484.000	81,55
II	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	1,94%	1,22%	100	41.057.800	37.019.730	90,16
1	<b>Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	15 koperasi	15 koperasi	100.00	41.057.800	37.019.730	90,16
	Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	15 koperasi	15 koperasi	100.00	41.057.800	37.019.730	90,16

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Target (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
III	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	60%	96,96%	100	280.634.950	276.355.794	98,48
1	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	56 kop	68 kop	121,43	280.634.950	276.355.794	98,48
	Meningkatkan akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan manfaat yang sebesar besarnya ke pada anggota dan masyarakat	56 kop	68 kop	121,43	202.000.000	199.145.100	98,59
	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, mandiri, tangguh serta Akuntabilitas	66 kopeasi	66 koperasi	100	78.634.950	77.210.694	98,19
IV	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	40 kop	38 kop	95	46.365.000	41.479.250	89,46
1	<b>Penilaian Kesehatan koperasi Simapn Pinjam/Usaha Simapan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	80	95,58	119,47	46.365.000	41.479.250	89,46
	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	80	95,58	100	46.365.000	41.479.250	89,46
V	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	1.100 KUKM	1.452 KUMKM	132	5.891.964.000	5.751.943.367	97,62
1	<b>Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	450 orang	450 orang	100	1.153.735.300	1.124.867.130	97,50

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Target (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	450 orang	450 orang	100	1.153.735.300	1.124.867.130	97,50
<b>2</b>	<b>Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>650 org</b>	<b>650 org</b>	<b>100</b>	<b>4.738.228.700</b>	<b>4.627.076.237</b>	<b>97,65</b>
	Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	650 org	650 org	100	4.738.228.700	4.627.076.237	97,65
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>50 kop</b>	<b>50 kop</b>	<b>100</b>	<b>4.154.065.450</b>	<b>2.579.379.641</b>	<b>62,09</b>
<b>1</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>50 kop</b>	<b>50 kop</b>	<b>100</b>	<b>4.154.065.450</b>	<b>2.579.379.641</b>	<b>62,09</b>
	Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restruktulisasi Usaha	10 koperasi 50 koperasi	10 koperasi 50 koperasi	100	2.159.040.000	690.940.320	32
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	10 koperasi	10 koperasi	100	1.995.025.450	1.888.439.321	94,66
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>100 UMKM</b>	<b>95 UMKM</b>	<b>100</b>	<b>2.276.838.500</b>	<b>2.079.067.936</b>	<b>91,31</b>
<b>1</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku</b>	<b>100 UMKM</b>	<b>95 UMKM</b>	<b>100</b>	<b>2.276.838.500</b>	<b>2.079.067.936</b>	<b>91,31</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Target (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan	540 UMKM 15 UKM 30 UKM 350 ORG 350 ORG 350 orang 800 UMKM 1 unit	540 UMKM 15 UKM 30 UKM 350 ORG 350 ORG 350 orang 800 UMKM 1 unit	100	2.276.838.500	2.079.067.936	91,31
VIII	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	2%	1,72%	100	3.944.992.500	3.707.782.025	93,99
1	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah</b>	2%	1,72%	100	3.944.992.500	3.707.782.025	93,99
	Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain Teknologi	75 UMKM 2500 org	75 UMKM 2500 org	100	3.944.992.500	3.707.782.025	93,99
		110 UMKM	110 UMKM				
		108 UMKM	108 UMKM				
		108 UMKM 100 UKM 50 UMKM 2500 org 2.500 org 1.050 org 29 UMKM	108 UMKM 100 UKM 50 UMKM 2500 org 2.500 org 1.050 org 29 UMKM				

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>		
1	Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Terjadinya perubahan regulasi dan pembaharuan Sistem OSS dari Versi 1.1 ke OSS-RBA yang menyebabkan Koperasi terkendala akses ke sistem OSS terutama Koperasi yang Badan Hukumnya Non AH.  Adanya Moratorium Izin Usaha Simpan Pinjam sampai dengan akhir Februari 2023	Melakukan koordinasi langsung ke DPM-PTSP Provinsi Sumbar guna mendapatkan informasi kendala yang dihadapi di dalam penginputan Sistem OSS - RBA  Melakukan pendampingan langsung bagi koperasi yang akan memproses izin usaha simpan pinjam koperasi  Melakukan konsultasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI
II	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Aspek Tata Kelola : Masih ada pengawas internal koperasi yang belum melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan AD/ART Koperasi	Memberikan rekomendasi kepada koperasi yang bersangkutan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan, jika tidak ditindaklanjuti dapat diberikan sanksi
		Belum memiliki uraian tugas pengurus dan pengawas yang tegas secara tertulis	Mendorong pengawas internal koperasi untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan AD/ART Koperasi
		Koperasi masih belum melengkapi legalitas dan perijinan yang harus dimiliki	
		Kualitas SDM Koperasi (Pengurus, Pengawas dan Pengelola) masih ada yang lemah, Masih ada koperasi yang belum memenuhi aspek prinsip koperasi (7 prinsip koperasi)	Mengkoordinasikan dengan dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota untuk ikut membantu dalam menindaklanjuti hasil pengawasan
		Masih ada koperasi yang belum memiliki ruangan koperasi	Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan ke koperasi yang telah diperiksa/pengawasan
		Masih ada koperasi yang belum menyampaikan laporan berkala kepada Pembina	Melakukan rapat koordinasi bidang terkait pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat
		Masih ada koperasi yang belum memiliki IUSP, Persus, buku daftar anggota yang belum lengkap diisi, Sertifikat NIK dan juga NPWP	Memberikan pembinaan terhadap pengawas internal koperasi agar melaksanakan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan AD/ART koperasi
		Belum mempunyai rencana jangka panjang, pengukuran evaluasi rencana kerja.	Memberikan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimtek, workshop, serta pendampingan terhadap permasalahan kelembagaan dan organisasi koperasi melalui bidang terkait dan UPTD BLK Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat
		Kualitas SDM Koperasi (Pengurus, Pengawas dan Pengelola) masih ada yang lemah	Memberikan rekomendasi/saran kepada koperasi yang diperiksa dalam bentuk dokumen hasil pengawasan kepatuhan
	Mengkoordinasikan dengan Bidang terkait dan UPTD BPLK Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tentang hasil pengawasan Memberikan pembinaan terkait pengelolaan usaha koperasi dan system pelaporan keuangan secara professional dan modern dengan melibatkan akademisi dan praktisi		
Aspek Kinerja Keuangan Belum adanya cadangan khusus untuk resiko pinjaman bermasalah	Mendorong koperasi agar mempunyai ruangan sendiri		
Pertumbuhan asset, dana diterima, ekuitas dan SHU bersih tidak tercapai pada koperasi KPN/KPRI	Mendorong koperasi untuk meningkatkan pertumbuhan modal,		

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
		<p>Pengelolaan usaha dan keuangan (transaksi dan pelaporan) koperasi masih ditemukan kekuarangan dan kelemahan (belum professional dan modern)</p> <p>Aspek Permodalan Rasio modal pinjaman anggota terhadap total aset tidak baik.</p> <p>Resiko kewajiban jangka panjang terhadap modal sendiri kurang baik</p>	pendapatan, dan SHU
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>		
	Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<p>Dari 19 Kab/Kota yang ditargetkan untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan koperasi (Pemkes), hanya terlaksana 18 Kab/Kota, dan 1 Kabupaten tidak melakukan Pemkes karena tidak adanya dana untuk pelaksanaan kegiatan Pemkes</p> <p>Pelaksanaan Pemkes di Prov/Kab/Kota tahun 2022 ditargetkan sebanyak 649 unit Koperasi dengan realisasi sebanyak 543 unit Koperasi (capaian 83,66%) yang disebabkan antara lain karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua Kab/Kota mempunyai anggaran tersendiri untuk pelaksanaan Pemkes</li> <li>- Terbatasnya jumlah personil/SDM untuk melakukan Pemkes (akibat pensiun dan mutasi)</li> <li>- Masih kurangnya pengetahuan ASN dalam melakukan Pemkes dikarenakan adanya personil yang baru bergabung di Dinas Koperasi yang berasal dari Dinas lain.</li> </ul>	<p>Disarankan pada pembina Kab/Kota untuk mendapatkan dukungan dana dari APBD Kab/Kota</p> <p>Petugas Pemkes agar mempelajari tentang Pemkes dan mempedomani regulasi yang mengatur tentang Pemkes</p> <p>Melakukan koordinasi / pembinaan Pemkes ke Kab/Kota</p> <p>Agar mengikuti bimtek / pelatihan untuk Pemkes di Kab/Kota/Prov</p> <p>Mendorong KSP/USP Koperasi untuk menindaklanjuti aspek penilaian yang lemah</p>
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		
1	Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Masih rendahnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan perkoperasian karena pada umumnya pengurus koperasi mempunyai pekerjaan tetap	Perlunya koordinasi dengan Kab/Kota terkait peserta pelatihan bagi pengurus koperasi
2	Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Kewenangan propinsi adalah usaha kecil sedangkan pada saat ini usaha kecil yang ada di Sumatera Barat hanya sedikit atau bahkan tidak ada sehingga sasaran peserta pelatihan adalah usaha mikro	Perlu dilakukan MOU dengan Kab/Kota terkait sasaran peserta pelatihan bagi UMKM
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI</b>		
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Adanya perubahan nomenklatur pada program dan kegiatan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	<p>Memprioritaskan pembinaan koperasi sesuai dengan kewenangan (keanggotaan lintas Kab/Kota)</p> <p>Melakukan koordinasi ke lembaga keuangan non bank seperti LPDB-KUMKM, LPMUKP, Pusat Investasi Pemerintah serta memberikan bimbingan teknis peningkatan akses pembiayaan bagi koperasi dengan menghadirkan narasumber dari lembaga keuangan non bank seperti LPDB-KUMKM, LPMUKP, Pusat</p>



No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
		Belum optimalnya akses pembiayaan bagi koperasi	Investasi Pemerintah
		Belum banyaknya produk koperasi sektor riil yang mengalami peningkatan nilai tambah dan mendapatkan akses pasar	Melakukan kegiatan bimtek peningkatan nilai tambah produk bagi koperasi dengan menghadirkan narasumber yang bisa memberikan masukan terkait peningkatan nilai tambah produk sekaligus menjadi offtaker produk koperasi.
		Belum optimalnya penerapan digitalisasi pada koperasi	Memberikan bantuan komputer dan pembinaan terkait digitalisasi
		Belum berkembangnya usaha koperasi di sektor riil	Melakukan bimtek dan pembinaan untuk peningkatan usaha sektor riil di koperasi serta memberikan masukan dan peluang-peluang usaha sektor riil sesuai dengan potensi usaha anggota koperasi.
		Pemahaman mengenai prinsip syariah belum sepenuhnya dipahami oleh pengurus dan anggota koperasi	Memberikan hibah/bantuan untuk pengembangan usaha sektor riil di koperasi
		Adanya keterlambatan penyampaian hasil rekapitulasi data koperasi dari Enumerator yang ada di kabupaten/Kota. Penyebabnya antara lain karena adanya Enumerator yang baru, keterbatasan SDM yang ada di Kabupaten/Kota serta banyaknya beban tugas lainnya yang harus diselesaikan oleh Enumerator karena pekerjaan Enumerator adalah merupakan tugas sambilan bagi pegawai yang ditunjuk oleh Dinas pada Kabupaten/Kota.	Melakukan bimtek tentang koperasi syariah dan penguatan kelembagaan DPS dalam melakukan pengawasan koperasi syariah Menyurati Dinas Yang Membidangi Koperasi Kab/Kota serta mengingatkan Enumerator melalui grup WAG Enumerator Sumbar 2022 Koordinasi intensif dengan Dinas Koperasi Kab/Kota untuk informasi koperasi yang keanggotaan lintas Kab/Kota
		Tidak semua lembaga keuangan dapat memfasilitasi pembiayaan bagi koperasi	Mengarahkan akses pembiayaan bagi koperasi ke lembaga keuangan yang berada di Kementerian KUKM yaitu LPDB-KUMKM
		Belum terpuhinya kualitas dan kuantitas produk koperasi untuk bermitra	Mendorong koperasi untuk meningkatkan kualitas produk dengan perbaikan dalam proses produksi
		SDM koperasi terbatas	Mendorong koperasi untuk melakukan pengkaderan dan Memberikan materi perkoperasian pada workshop-workshop peningkatan kapasitas koperasi
		Sebagian besar koperasi belum digitalisasi	Memberikan hibah komputer dan aplikasi bagi koperasi serta Mendorong koperasi memanfaatkan internet untuk pemasaran produk
		Masih rendahnya kesadaran Koperasi untuk melaksanakan RAT	Menyurati Bupati/Walikota agar mengingatkan Koperasi Primer Kab/Kota untuk melaksanakan RAT dan menyurati Pengurus Koperasi Primer Provinsi untuk melaksanakan RAT, melakukan pembinaan langsung ke Koperasi, menyampaikan buku Panduan Pelaksanaan RAT ke Koperasi, memberdayakan PPKL untuk membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas serta persiapan RAT.
		Masih rendahnya kesadaran pengurus koperasi untuk melakukan penataan administrasi kelembagaan koperasi	Melakukan pembinaan ke koperasi primer provinsi tentang penataan administrasi kelembagaan koperasi
		Masih ditemui koperasi melaksanakan usaha namun tidak sesuai dengan AD	Mendorong koperasi untuk segera melakukan PAD

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<p>Terlambatnya pengadaan kendaraan mobil klinik karena tender dilaksanakan sebanyak 2 kali sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahun anggaran.</p> <p>Keterbatasan jaringan yang bagus di beberapa lokasi pelaksanaan sosialisasi millennial entrepreneur</p> <p>Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merk dan sertifikasi halal yang mengakibatkan lamanya proses input data dari pelaku UMKM dalam melengkapi persyaratan</p> <p>Banyaknya pelaku UMKM terkendala dalam mengakses pembiayaan dari lembaga bank dan non bank karena BI Checking dan agunan</p>	<p>Mengoptimalkan pemanfaatan mobil klinik KUMKM pada beberapa event pada akhir tahun 2022.</p> <p>Memanfaatkan mobil klinik KUMKM yang telah memiliki jaringan yang bagus untuk kegiatan sosialisasi selanjutnya</p> <p>Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pentingnya pendaftaran merk dan sertifikasi halal dengan melibatkan instansi terkait di Kab/kota dan lembaga lainnya.</p> <p>Optimalisasi pemanfaatan konsultan PLUT dan pendamping UMKM di Kab/kota untuk mendampingi pelaku UMKM/pengusaha pemula untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga perbankan dan non bank</p>
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		
1	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	<p>Keterbatasan pelaku UMKM dalam mengaplikasikan IT untuk memasarkan produk.</p> <p>Keberlanjutan MOU yang telah dilakukan oleh UMKM dengan buyer tidak dilaporkan secara berkala ke Dinas Koperasi UKM Prov.Sumatera Barat.</p> <p>Terbatasnya waktu pelaksanaan bimbingan teknis</p> <p>Peserta Bimtek yang tidak memenuhi persyaratan</p>	<p>Melakukan bimbingan teknis secara berkala dan berjenjang bagi pelaku UMKM</p> <p>Melakukan monitoring/evaluasi dan koordinasi ke dinas yang membidangi koperasi dan UMKM kab/kota untuk memantau perkembangan keberlanjutan MOU pelaku UMKM</p> <p>Mengadakan bimbingan teknis desain lanjutan</p> <p>Melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi dan UMKM kab/kota untuk dapat lebih selektif dalam mengirim peserta</p>

### 3.1.2.10. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, pada tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.13.362.219.389,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.906.595.628,00 atau sebesar 96,59%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
II	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	<b>Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	2 dokumen	2 dokumen	100
		<b>Promosi Penanaman Modal</b>	Dokumen Pernyataan Minat	4 Pernyataan Minat	7 Pernyataan Minat	175
		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Realisasi Investasi PMA dan PMDN PMA PMDN Total (Rp.)	143.100 3.127.000 5.187.640.000.000	142.174,83 3.167.000,50 5.207.945.310.500	99,35 101,30 100,39
		<b>Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi	20 %	100 %	100
III	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<b>Pelayanan Penanaman Modal</b>	- Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85% 82,60/ 3,40	85% 95,35/ 3,81	100 115,44/ 112,06

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Target Kinerja : 100% Realisasi Kinerja :100%) Capaian Kinerja 100%.
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat (Target Kinerja dengan nilai 80,50 / A ) dan ( Realisasi Kinerja 80,50 / A ). Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan 1 program, 8 kegiatan dan 28 sub kegiatan yang semuanya terletak di Sekretariat OPD.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan :

- penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD.
- koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD.
- koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD.

- koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
  - evaluasi kinerja perangkat daerah.
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan :
- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN.
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
  - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD.
  - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan Dan Semester SKPD.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan :
- Rekonsiliasi Dan Penyusunan Barang Milik Daerah Pada SKPD.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
  - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub Kegiatan :

- Pengadaan Mebel.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub Kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub Kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan.
  - Pemeliharaan Mebel.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat, dengan indikator kinerja :
- 1) Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal (Target Kinerja : 2 Dokumen) (Realisasi Kinerja : 2 Dokumen) Capaian kinerja : 100%.
  - 2) Dokumen Pernyataan Minat (Target Kinerja : 4) (Realisasi Kinerja : 7) Capaian kinerja : 175%.
  - 3) Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Target Kinerja : Total Rp.5.187.640.000.000,00) dengan (realisasi Rp.5.207.945.310.000). Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program:
  - 4) Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi (Target Kinerja : 20%) (Realisasi Kinerja : 100%) Capaian kinerja : 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan :

- Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang akan berdampak dengan meningkatnya realisasi investasi serta pencapaian program ini di tahun anggaran 2022, Output sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen Rancangan Peraturan Gubernur terkait Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

(2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal akan berdampak dengan meningkatnya realisasi investasi serta pencapaian program ini di tahun anggaran 2022. Output sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal.

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha akan berdampak dengan meningkatnya realisasi investasi serta pencapaian program ini di tahun anggaran 2022, Output sub kegiatan ini adalah :

- 1 (satu) dokumen Data Status Tanah Ulayat yg Berpotensi untuk Penanaman Modal sebanyak 3 persil.
- 1 (satu) Dokumen Study Kelayakan Proyek Investasi.
- Jumlah Pelaku Usaha yg Bermitra sebanyak 5 kemitraan.
- 1 (satu) Jumlah Profil Peluang Investasi Sumatera Barat.
- Terlaksananya Pembinaan dan Dukungan terhadap Peta Potensi 1 (satu) sistem.
- Terlaksananya Sosialisasi SIMITRA 1 (satu) kali untuk 100 orang.
- Terlaksananya FKPUD 1 (satu) kali untuk 100 orang.

b) Program Promosi Penanaman Modal, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan :

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan :
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, Output sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen materi promosi penanaman modal.
  - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, Output sub kegiatan ini adalah:
    - Terfasilitasinya Calon Investor ke Lokasi Proyek Investasi di Sumatera Barat berupa 1 (satu) laporan.
    - Terlaksananya keikutsertaan DPMPPTSP dalam Promosi Penanaman Modal 1 kali.
    - Tersebaranya Informasi Penanaman Modal melalui Media Masa sebanyak 4 kali.
    - Tersusunnya 1 (satu) video promosi penanaman modal.
- c) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan :
- Koordinasi Dan Sikronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya 1 (satu) koordinasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal berupa 1 (satu) laporan.
  - Koordinasi Dan Sikronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Output sub kegiatan ini adalah :
    - Terlaksananya Fasilitasi Permasalahan Perusahaan PMA/PMDN sebanyak 11 (sebelas) perusahaan PMA/PMDN.
    - Terlaksananya 5 (lima) kali Bimtek/Sosialisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk 450 (empat ratus lima puluh) orang.
  - Koordinasi Dan Sikronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha sebanyak 70 (tujuh

puluh) pelaku usaha.

d) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Urusan Pengelolaan Data dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada tingkat Provinsi dengan Sub Kegiatan :

- Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Output sub kegiatan ini adalah tersusunya 1 (satu) dokumen buku data perkembangan penanaman modal Provinsi Sumatera Barat.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

c. Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan indikator kinerja yaitu:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Target Kinerja : 82,60/3,40%) dan (Realisasi Kinerja : 95,35/3,81%). Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pelayanan Penanaman Modal dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Output sub kegiatan ini adalah :
  - Adanya 1 (satu) Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi.
  - Jumlah Izin dan Non Izin Yang Diterbitkan sebanyak 2.011 izin dan non izin.
  - Terlaksananya 1 (satu) kali Forum PTSP untuk 85 orang.



- Terlaksananya 1 (satu) kali Koordinasi Teknis PTSP untuk 60 orang.
- Pemantauan Kemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal, Output sub kegiatan ini adalah :
  - Terlaksananya Audit Mutu Pelayanan tahun ke empat berupa 1 (satu) laporan audit mutu.
  - Terasilitasinya NIB yang Berkomitmen agar Merealisasikan Izinnya sebanyak 1 (satu) laporan.
  - Terlaksananya Survei IKM sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai interval konversi IKM 95,35 dan nilai interval IKM 3.81
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan, Output sub kegiatan ini adalah :
  - Terasilitasinya izin SIPSAKATO yg tidak sesuai dengan SOP sebanyak 10 (sepuluh) izin.
  - Terasilitasinya/Termediasinya Pengaduan Izin Yang Bermasalah sebanyak 10 (sepuluh) pengaduan.
  - Terlaksananya 1 (satu) Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan untuk 80 orang.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja III.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	capaian kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	100%	100%	100	9.387.061.458	8.954.493.935	95,39
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100	195.748.908	195.775.050	98,99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	90.888.658	89.392.200	98,35
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	12.500.000	12.500.000	100,00

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	capaian kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	11.280.000	11.246.050	99,70
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	12.500.000	12.484.900	99,88
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	33.716.785	33.623.400	99,72
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	34.863.465	34.528.500	99,04
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>6.479..904.266</b>	<b>6.090.770.363</b>	<b>93,99</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang	52 Orang	100	6.110.354.266	5.725.884.071	93,71
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Orang	14 Orang	100	187.383.000	187.098.300	99,83
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	126.767.000	124.479.892	98,20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semester SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	100	55.400.000	53.308.100	96,22
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.745.000</b>	<b>98,73</b>
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100	20.000.000	19.745.000	98,73
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>210.226.908</b>	<b>206.702.290</b>	<b>98,32</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49 Stel 51 Stel	49 Stel 51 Stel	100	67.350.000	64.350.000	95,55
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 orang	60 orang	100	81.558.908	81.278.899	99,66
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	12 orang	12 orang	100	61.318.000	61.073.391	99,60
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>733.688.309</b>	<b>723.897.724</b>	<b>99,28</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 jenis	20 jenis	100	29.040.000	29.038.500	99,99
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 unit	13 unit	100	93.198.412	88.417.000	94,87

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	capaian kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	34 jenis 22 kali	34 jenis 22 kali	100 100	29.511.633	29.482.700	99,90
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9 jenis 21.358 lbr	9 jenis 21.358 lbr	100 100	15.774.962	15.774.750	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	6 jenis	6 jenis	100	17.080.000	17.080.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59 dokumen 440 kotak	59 dokumen 440 kotak	100 100	549.083.302	544.104.774	99,92
<b>7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>59.970.700</b>	<b>59.306.800</b>	<b>98,89</b>
	Pengadaan Mebel	17 unit	17 unit	100	59.970.700	59.306.800	98,89
<b>8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>1.136.122.501</b>	<b>1.104.993.301</b>	<b>97,29</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 surat	600 surat	150	23.862.934	23.497.300	98,47
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41500KVA 3 rek 1 paket	41500KVA 3 rek 1 paket	100 100 100	200.024.000	173.793.976	<b>86,89</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 org 5 org 4 org 10 kali	5 org 5 org 4 org 10 kali	100 100 100 100	912.235.567	907.702.025	99,54
<b>9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>551.399.866</b>	<b>384.867.407</b>	<b>99,83</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	11 unit	11 unit	100	269.193.250	268.543.383	99,76
	Pemeliharaan Mebel	200 unit	200 unit	100	16.000.000	15.994.200	99,96
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	220.526.616	220.414.824	99,95
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96 unit	96 unit	100	45.680.000	45.515.000	99,64
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>726.317.000</b>	<b>726.622.092</b>	<b>99,78</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	capaian kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Moal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>1 Ranpergub</b>	<b>1 Ranpergub</b>	<b>100</b>	<b>84.392.700</b>	<b>84.208.500</b>	<b>99,78</b>
	Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	80 orang 1 Ranpergub	80 orang 1 ranpergub	100 100	84.392.000	84.208.500	99,78
2	<b>Pembuatan Peta Potensi Peluang Investasi Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>643.924.300</b>	<b>642.413.592</b>	<b>99,77</b>
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	80 orang 1 Dokumen	80 orang 1 dokumen	100 100	90.341.350	90.297.754	99,95
	Penyediaan Peta Potensi Dan Peluang Usaha Provinsi	1 persil 1 dokuken 5 kemitraan 1 dokumen 1 sistem 100 org 100 org	3 persil 1 dokuken 5 kemitraan 1 dokumen 1 sistem 100 org 100 org	300 100 100 100 100 100 100	547.582.950	546.115.638	99,73
III.	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>4 Perny. Minat</b>	<b>7 Perny. Minat</b>	<b>175</b>	<b>729.123.550</b>	<b>723.509.302</b>	<b>99,51</b>
1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>1 event</b>	<b>1 event</b>	<b>100</b>	<b>729.123.550</b>	<b>723.509.302</b>	<b>99,51</b>
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 dokumen	100	150.000.000	149.935.850	99,96
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 laporan 1 even 4 kali	1 laporan 1 even 4 kali	100 100 100	579.123.550	573.573.452	99,39
IV	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>82,60 / 3,40 85%</b>	<b>95,35 / 3,81 85%</b>	<b>115,44 / 112,06 100</b>	<b>1.467.706.650</b>	<b>1.455.240.663</b>	<b>99,21</b>
1	<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>82,60 / 3,40 85%</b>	<b>95,35 / 3,81 85%</b>	<b>115,44 / 112,06 100%</b>	<b>1.467.706.650</b>	<b>1.455.240.663</b>	<b>99,21</b>
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 sistem 2000 izin 85 orang 60 orang	1 sistem 2011 izin 85 orang 60 orang	100 100,55 100 100	996.886.100	988.273.501	99,23

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	capaian kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemantauan Kemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1 kali 1 laporan 2 kali	1 kali 1 laporan 2 kali	100 100 100	177.413.400	177.183.850	99,87
	Penyediaan Layanan Konsultasi Danpengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 izin 10 pengaduan 1 kali	10 izin 10 pengaduan 1 kali	100 100 100	293.407.150	289.783.312	98,76
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>5,2 T</b>	<b>5,2 T</b>	<b>100</b>	<b>996.522.731</b>	<b>960.213.435</b>	<b>99,37</b>
<b>1</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>5,2 T</b>	<b>5,2 T</b>	<b>100</b>	<b>996.522.731</b>	<b>960.213.435</b>	<b>99,37</b>
	Koordinasi dan Sikronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 laporan	1 laporan	100	8.840.000	7.671.800	<b>86,79</b>
	Koordinasi dan Sikronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 PMA/ PMDN 450 orang	11 PMA/ PMDN 450 orang	100	730.295.885	704.188.525	99,61
	Koordinasi dan Sikronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	40 pelaku usaha	70 pelaku usaha	100	257.386.846	248.353.110	99,13
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>53.488.000</b>	<b>53.487.923</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>53.488.000</b>	<b>53.487.923</b>	<b>100</b>
	Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	1 dokumen	100	53.488.000	53.487.923	100

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing – Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
1	<b>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan Dan Semester SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
<b>7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Pengadaan Mebel	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
<b>8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
<b>9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Pemeliharaan Mebel	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Kurang pahamnya masyarakat tentang arti sebuah investasi	Melakukan Koordinasi dengan DPMPSTP Kabupaten/Kota dalam pemberian Kemudahan Berusaha
<b>1</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Moal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>		
	Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal		
<b>2</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Peluang Investasi Provinsi</b>		
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		
	Penyediaan Peta Potensi Dan Peluang Usaha Provinsi		
<b>III</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	Belum Akuratnya Data Optensi Investasi serta Permasalahan Tanah Ulayat	Melengkapi Data Optensi Investasi Yang Betul menjadi Peluang bagi Investor serta Memperbanyak Temu Bisnis berskala Nasional maupun Internasional
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>		

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		
IV	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Khususnya Nelayan tentang Pengisian Format Responden serta Berubahnya Sistem dari Manual ke Online	Meminta dukungan dari Pelaku Usaha dan Masyarakat Pengurus Izin dalam memberikan Respon
1	<b>Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	Masih terdapat gangguan atau kendala jaringan atau pengembangan aplikasi perizinan OSS oleh Pemerintah Pusat	Komitmen pimpinan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Masih terdapat rendahnya kemampuan aparaturnya penyelenggara terhadap penggunaan Teknologi Informasi (Layanan secara elektronik)	Mengimplementasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha Provinsi Sumatera Barat
	Pemantauan Kemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal	Keterbatasan jumlah aparaturnya penyelenggara perizinan	Melakukan Koordinasi yang baik antara DPMPSTP dan OPD Teknis terkait dalam hal penerbitan pertimbangan teknis yang menjadi dasar persetujuan perizinan.
	Penyediaan Layanan Konsultasi Dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan	Melakukan Koordinasi dengan SKPD teknis terkait permohonan perizinan secara online
		Keterbatasan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis web dan mengubah pola pikir masyarakat atas layanan secara tatap muka.	Memberikan Pemahaman kepada aparaturnya ttg penyelenggaraan layanan secara elektronik
		Perubahan sistem pelaporan Ke OSS-RBA sehingga banyak perusahaan yang belum memahami ttg pelaporan kegiatan penanaman Modal perusahaan	Melaksanakan pelayanan langsung lapangan.
		SDM perusahaan yang banyak berhenti karena dampak covid sehingga tidak bisa melaporkan dengan sistem yg ada	Melakukan Pengawasan /Inspeksi langsung ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi real dan laporan yang di berikan
		SDM di OPD yang berada di Kab/Kota banyak yang belum memahami tentang sistem Pelaporan OSS-RBA untuk melakukan verifikasi laporan yang masuk dari perusahaan	Melakukan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan investasi pada perusahaan
		Perusahaan yang sudah berjalan namun belum mengantongi izin karena terkendala dalam pengurusan izin teknis dengan berlakunya sistem OSS-RBA ( RTRW, RDTR, Izin Lingkungan, PKKPR, SIMBG, dll)	Fasilitasi Pembinaan Kepada Pelaku Usaha melalui Kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Telp, Media Sosial dan Whatshapp
		Belum adanya Data calon Investor Baru yang serius akan berinvestasi di Sumatera Barat	Menyediakan data-data perusahaan dalam penentuan target, pengawasan serta Pembinaan.
		Adanya Pembatasan Pelaporan Investasi, dimana Nilai Investasi s.d ! M tidak dilaporkan	Membentuk PIC yang bertanggung jawab dalam percepatan dan kelancaran laporan kegiatan berusaha penanaman modal perusahaan per kab/kota
		Tidak adanya investasi baru yang tumbuh selama tahun 2022 dan kegiatan proyek sebelumnya sudah selesai tahun 2021	
		Tidak jalannya progress Proyek Jalan Tol yang tidak sesuai dengan perencanaan Investasi di Sumatera Barat yang merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan target investasi Masalah RTRW di Kab/Kota yang masih belum mengakomodir potensi investasi	
V	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Perubahan sistem pelaporan Ke OSS-RBA sehingga banyak perusahaan yang belum memahami ttg pelaporan kegiatan penanaman Modal perusahaan	Melakukan Pengawasan /Inspeksi langsung ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi real dan laporan yang di berikan
1	<b>Pengendalian Pelaksanaan</b>		



No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	<b>Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	SDM perusahaan yang banyak berhenti karena dampak covid sehingga tidak bisa melaporkan dengan sistem yg ada	Melakukan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan investasi pada perusahaan
	Koordinasi Dan Sikronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Fasiltasi Pembinaan Kepada Pelaku Usaha melalui Kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Telp, Media Sosial dan Whatshapp
	Koordinasi Dan Sikronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	SDM di OPD yang berada di Kab/Kota banyak yang belum memahami tentang sistem Pelaporan OSS-RBA untuk melakukan verifikasi laporan yang masuk dari perusahaan	Menyediakan data-data perusahaan dalam penentuan target, pengawasan serta Pembinaan.
	Koordinasi Dan Sikronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan yang sudah berjalan namun belum mengantongi izin karena terkendala dalam pengurusan izin teknis dengan berlakunya sistem OSS-RBA ( RTRW,RDTR, Izin Lingkungan, PKKPR,SIMBG,dll)	Membentuk PIC yang bertanggung jawab dalam percepatan dan kelancaran laporan kegiatan berusaha penanaman modal perusahaan per kab/kota
		Belum adanya Data calon Investor Baru yang serius akan berinvestasi di Sumatera Barat	
		Adanya Pembatasan Pelaporan Investasi, dimana Nilai Investasi s.d! M tidak dilaporkan	
		Tidak adanya investasi baru yang tumbuh selama tahun 2022 dan kegiatan proyek sebelumnya sudah selesai tahun 2021	
		Tidak jalannya progress Proyek Jalan Tol yang tidak sesuai dengan perencanaan Investasi di Sumatera Barat yang merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan target investasi	
		Masalah RTRW di Kab/Kota yang masih belum mengakomodir potensi investasi	
VI	<b>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	Masih adanya penanggungjawab data yang tidak memahami data yang dibutuhkan untuk ketersediaan data penanaman modal	Melakukan Sosialisasi penggunaan OSS RBA terkait Pengumpulan Data untuk ASN Kaupaten/Kota dimasing – masing OPD tentang TUPOKSI, Kerja agar tidak tumpang tindih dan lempar tanggungjawab.
1	<b>Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi</b>	Masih ada Kab/kota yang belum mengetahui cara pemanfaatan data melalui OSS RBA	
	Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam hal data internal OPD	

### 3.1.2.11. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.57.616.007.148,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.53.700.791.656,70 atau 93,20%, dengan uraian sebagai berikut :

## 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya wirausaha muda yang mandiri	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	Jumlah wirausaha muda yang mandiri	380 orang	515 orang	135.53
II	Meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	4.93%	4.20%	85.19
III	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Aktivitas Kebugaran	<b>Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</b>	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam melakukan aktifitas kebugaran	0.85%	11.1%	1305.8
IV	Meningkatnya Prestasi Olahraga Sumatera Barat di Tingkat Regional dan Nasional	<b>Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</b>	Jumlah medali emas pada event olahraga regional dan nasional	26	74	284.66
V	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (73)	Masih Evaluasi Belum Memiliki hasil	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	76,61%	77.8	101.55

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatkan wirausaha muda yang mandiri dengan indikator kinerja :

1) Jumlah wirausaha muda yang mandiri (target 380 orang, realisasi 515 orang).

b. Sasaran II : Meningkatkan Peran dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dengan indikator kinerja :

1) Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (target 4.93%, realisasi 4.2% dengan capaian 85,19%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi, dengan kegiatan :

(1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi, dengan output :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi, dengan output 405 orang.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi dengan output 110 orang.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi, dengan output 34 orang.
- Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera, dengan output 100 orang.
- Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi, dengan output 5 orang.
- Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, dengan output 105 orang.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I dan II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Aktivitas Kebugaran dengan indikator kinerja :
- 1) Tingkat partisipasi Masyarakat dalam melakukan aktifitas kebugaran (target : 0.85%, realisasi 11.1% dengan capaian 1305.9%).
- d. Sasaran IV : Meningkatnya Prestasi Olahraga Sumatera Barat di Tingkat Regional dan Nasional dengan indikator :
- 1) kinerja Jumlah medali emas pada event olahraga regional dan nasional (target 26 medali emas, realisasi 74 medali emas dengan capaian 284,66%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dengan Kegiatan :
- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan menengah dan khusus dengan output 15 sekolah.

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi, dengan output 1 kegiatan.
- (2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dengan sub kegiatan :
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi, dengan output 15 kejuaraan.
  - Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi, dengan output 1 kejuaraan.
  - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event, dengan output 8 kegiatan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional dengan sub kegiatan :
- Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science), dengan output 424 orang.
  - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi, dengan output 119 atlet.
  - Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi, dengan output 3 kegiatan.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III dan IV.

- e. Sasaran V : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi dengan indikator kinerja :
- 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD (target kinerja 73 (BB). Pencapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- f. Sasaran VI : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja :
- 1) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (target kinerja 76.61%, realisasi 77.8% dengan capaian 101.55%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan :
  - (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Mebel.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - Pemeliharaan Mebel.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V dan VI.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.973.999.303	14.262.888.021,70	95,25

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>662.979.576</b>	<b>609.225.301</b>	<b>91,89</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	239.163.450	232.249.050	97,11
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	12.825.226	8.811.400	99,05
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	9.737.500	8.753.400	89,89
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	8.658.600	8.476.600	97,90
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	13.602.500	6.033.800	44,36
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	78.646.400	71.329.784	90,70
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	300.345.900	273.571.267	91,09
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100</b>	<b>9.160.995.438</b>	<b>8.839.362.301</b>	<b>96,49</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang	86 Orang	100	8.409.714.938	8.125.520.181	96,62
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Orang	18 Orang	100	413.555.500	385.935.500	93,32
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	172.169.650	165.028.350	95,85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	100	165.555.350	162.878.270	98,38
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>349.736.259</b>	<b>328.793.250</b>	<b>94,01</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Unit	8 Unit	100	136.793.550	125.046.380	91,41
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	88.585.390	79.987.250	90,29
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	124.357.319	123.759.620	99,52

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100	210.927.080	143.839.086	68,19
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90 Stel	78 stel	86.67	58.500.000	58.344.000	99,73
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Kali	5 Kali	100	152.427.080	85.495.086	56,09
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100	1.336.956.750	1.327.510.476	99,29
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Unit	5 Unit	100	107.639.500	106.803.080	99,22
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27 Unit	27 unit	100	295.735.000	295.627.379	99,96
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Unit	5 Unit	100	201.695.950	196.264.810	97,31
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140000 Lembar	140000 Lembar	100	50.000.000	49.176.750	98,35
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	211 Eksemplar	211 Eksemplar	100	25.000.000	25.000.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen	100	656.886.300	654.638.457	99,66
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	100	161.683.500	161.191.000	99,70
	Pengadaan Mebel	124 set	124 set	100	161.683.500	161.191.000	99,70
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				1.877.654.186	1.671.428.598	89,02
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 surat	1350 surat	75	32.500.000	29.029.950	89,32
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1200 mbps, 5 rekening, 1500 meter kubik, 1000 KVA	1200 mbps, 5 rekening, 1500 meter kubik, 1000 KVA	100	440.000.000	330.726.222	75,17
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46 Orang	46 Orang	100	1.405.154.186	1.311.672.426	93,35
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	100	1.213.066.514	1.181.538.009	97,40



No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	100	239.428.000	233.686.372	97,60
	Pemeliharaan Mebel	100 Unit	100 Unit	100	14.000.000	13.812.000	98,66
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket, 5 Unit, 1 Paket	1 Paket, 5 Unit, 1 Paket	100	638.942.514	622.632.471,70	97,45
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Unit, 100 Unit	100 Unit, 100 Unit	100	250.000.000	242.276.666	96,91
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	100	70.696.000	69.130.500	97,79
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>				<b>6.457.499.965</b>	<b>6.284.819.900</b>	<b>97,33</b>
<b>1</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>5.709.747.215</b>	<b>5.553.208.150</b>	<b>97,26</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	30 Orang	34 Orang	113,30	222.036.000	216.676.323	97,56
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	405 Orang	405 Orang	100	1.280.720.000	1.245.918.250	97,28
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	766 Orang	760 Orang	99,22	2.124.932.465	2.041.898.818	96,09
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	100 Orang	100 Orang	100	1.600.000.000	1.582.062.009	98,88
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	5 Orang	5 Orang	100	87.367.500	74.377.500	85,13

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	60 Orang	105 Orang	175	394.691.250	392.275.250	99,39
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100</b>	<b>747.752.750</b>	<b>731.611.750</b>	<b>97,84</b>
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	226 Orang	226 orang	100	747.752.750	731.611.750	97,84
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>				<b>34.634.507.880</b>	<b>31.613.326.735</b>	<b>91,28</b>
<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>3 Keg</b>	<b>3 Keg</b>	<b>100</b>	<b>2.894.932.094</b>	<b>2.617.022.318</b>	<b>90,40</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	1.149.999.950	987.712.655	85,89
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1.744.932.144	1.629.309.663	93,37
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>	<b>3 Keg</b>	<b>3 Keg</b>	<b>100</b>	<b>7.121.375.786</b>	<b>6.231.848.814</b>	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	9 Kejuaraan	15 Kejuaraan	166	3.402.850.000	3.112.727.420	91,47
	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	1 Kejuaraan	1 Kejuaraan	100	200.000.000	187.229.000	93,61
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100	3.518.525.786	2.931.892.394	88,33

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	9.418.200.000	9.257.401.177	98,29
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	30 Orang	424 Orang	1.413	1.490.000.000	1.429.208.477	95,92
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	119 atlet	119 atlet	100	2.865.000.000	2.764.992.700	96,51
	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	5.063.200.000	5.063.200.000	100
4	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	100%	100%	100	15.200.000.000	13.507.054.426	88,86
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	4 Organisasi	4 Organisasi	100	15.200.000.000	13.507.054.426	88,86
IV	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>				1.550.000.000	1.539.757.000	99,34
1	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	20%	20%	100	1.550.000.000	1.539.757.000	99,34
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	90 Orang	120 orang	133,33	400.000.000	389.757.000	97,44
	<b>JUMLAH</b>				<b>57.616.007.148</b>	<b>53.700.791.656,70</b>	<b>93,20</b>

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Tidak ada permasalahan	-
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Tidak ada permasalahan	-
III	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Tidak ada permasalahan	-
4	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>		

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Anggaran hibah KONI tidak bisa dicairkan untuk tahap kedua karena permasalahan kepengurusan yang digugat ke pengadilan, termasuk Dispora Provinsi Sumatera Barat juga digugat untuk tidak mencairkan dana hibah KONI. Sementara dana yang tersisa di anggaran kas KONI sebelumnya masih ada sekitar 900 jutaan.	Menunggu keputusan pengadilan atau dilakukannya perubahan SK pengurus KONI Sumbar yang legitimate sesuai AD ART KONI.
IV	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Tidak ada permasalahan	-

### 3.1.2.12. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.28.990.825.690,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.27.912.237.733,00 atau 96,28%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Persentase Akuntabilitas Kinerja	72	-	-
2	Meningkatnya pelayanan organisasi		Persentase kualitas pelayanan internal organisasi	85	77	90
3	Terwujudnya Pelestarian Nilai- Nilai Budaya	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	Persentase warisan budaya (karya budaya) yang dilestarikan	8 warisan budaya	19 warisan budaya	238
			Persentase warisan budaya benda yang dilestarikan	11 cagar budaya	9 cagar budaya	81,8
			Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola dengan baik	8 Karya Budaya	19 Karya Budaya	100
		<b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang dilestarikan	5 Karya Budaya	5 Karya Budaya	100
			Jumlah sumber daya manusia adat yang mendapatkan pembinaan	175 orang	1.911 orang	1.092
Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	21 Kesenian Tradisional	15 Kesenian Tradisional	71,4			

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan			
		Program Sejarah	Jumlah sejarah lokal yg dilestarikan	3 sejarah	3 sejarah	100
			Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan	3 sejarah	3 sejarah	100
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	11 CB	9 CB	81,8
			Jumlah Warisan budaya benda yang ditetapkan	15 CB	9 CB	60
			Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang ditetapkan	9 CB	9 CB	100
			Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	11 CB	9 CB	81.8
		Program Permuseuman	Jumlah aktifitas masyarakat di museum	15 Kali	29 Kali	193.3
			Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	30.000 pengunjung	55.417 pengunjung	184,7
			Jumlah koleksi museum yang dikelola	700 koleksi	700 koleksi	100

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase akuntabilitas kinerja (Target Kinerja 72 (BB)) (Realiasi Kinerja : 64,33) dengan capaian kinerja 89%.
- 2) Persentase kualitas pelayanan internal organisasi (Target Kinerja 85 (BB)) (Realiasi Kinerja : 77) dengan capaian kinerja 98%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

a) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dicapai dengan melaksanakan kegiatan :

- (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Mebel.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
  - Pemeliharaan-Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Terwujudnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dengan indikator kinerja :

- 1) Jumlah warisan budaya benda peringkat provinsi yang dilestarikan (Target Kinerja 11 warisan budaya (BB)) (Realiasi Kinerja : 9 warisan budaya) dengan capaian kinerja 81.8%.
- 2) Jumlah Warisan budaya takbenda yang dilestarikan (Target Kinerja 8 warisan budaya (BB)) (Realiasi Kinerja : 19 warisan budaya) dengan capaian kinerja 238%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

- a) Program Pengembangan Kebudayaan, dicapai dengan melaksanakan kegiatan :

- (1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
  - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, dengan output Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi sebanyak (19) karya budaya dan Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan sebanyak (2) karya budaya.
  - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan, dengan output Jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang dibina sebanyak (250) orang, Jumlah lembaga kebudayaan yang dibina

sebanyak (3) museum daerah, dan Jumlah pranata kebudayaan yang dibina sebanyak (-) dokumen. Kegiatan ini tidak dapat mengakomodir keseluruhan target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah disebabkan karena keterbatasan anggaran pada Dinas Kebudayaan).

(2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya [UPTD - UPTD Taman Budaya], dengan output Jumlah tradisi budaya yang dilindungi sebanyak (5) Karya Budaya, Jumlah tradisi budaya yang dikembangkan sebanyak (1) karya budaya dan Jumlah tradisi budaya yang dimanfaatkan sebanyak (3) karya budaya.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional [UPTD - UPTD Taman Budaya] , dengan output Jumlah sumber daya manusia tradisional yang mendapatkan pembinaan sebanyak (285) orang, Jumlah lembaga tradisional yang mendapatkan pembinaan sebanyak (19) Lembaga kesenian tradisional, Jumlah pranata tradisional yang dibina sebanyak (3) Dokumen dan Jumlah sarana/prasarana yang direvitalisasi sebanyak (3) Jenis dan (2) Unit.
- Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan [UPTD - UPTD Taman Budaya], dengan output Jumlah maestro kebudayaan yang mendapatkan penghargaan sebanyak (7) orang maestro.

(3) Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat, dengan output Jumlah sumber daya manusia adat yang mendapatkan pembinaan sebanyak (1911) orang.

b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dicapai dengan melaksanakan kegiatan :

(1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas



Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional, dengan output Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebanyak (100) orang.
  - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan, dengan output Jumlah SDM kesenian tradisional yang bersertifikat (5) orang.
  - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, dengan output Jumlah lembaga kesenian tradisional yang dibina sebanyak (4) kesenian tradisional.
- c) Program Pembinaan Sejarah dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
- (1) Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi, dengan output Jumlah SDM sejarah lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak (80) orang, dan Jumlah lembaga sejarah lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak (1) Lembaga.
    - Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah, dengan output Jumlah prasarana sejarah yang disediakan (2) dokumen akses.
- d) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
- (1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan sub kegiatan :
    - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, dengan output Jumlah objek yang diduga cagar budaya sebanyak (21) ODCB.
    - Penetapan Cagar Budaya, dengan output Jumlah cagar budaya yang ditetapkan (9) Cagar Budaya.
  - (2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan sub kegiatan :
    - Pelindungan Cagar Budaya, dengan output Jumlah cagar budaya yang dilindungi sebanyak (14) Cagar

Budaya/ OCMHS.

e) Program Pengelolaan Permuseuman dicapai dengan melaksanakan kegiatan :

(1) Pengelolaan Museum Provinsi.

- Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu [UPTD - UPTD Museum Adityawarman], dengan output Jumlah koleksi museum yang dikembangkan sebanyak (5) Koleksi, Jumlah koleksi museum yang dilindungi sebanyak (700) koleksi dan Jumlah koleksi museum yang dimanfaatkan sebanyak (300) Koleksi.
- Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman [UPTD - UPTD Museum Adityawarman], dengan output Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman Provinsi yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak (2) orang.
- Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum [UPTD - UPTD Museum Adityawarman], dengan output Jumlah aktivitas museum yang melibatkan masyarakat sebanyak (29) kali dengan total pengunjung 55.417 orang dan Jumlah sarana/media yang tersedia untuk mengakses museum sebanyak (8) unit.
- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum [UPTD - UPTD Museum Adityawarman], dengan output Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia sebanyak (8) unit dan Jumlah sarana dan prasarana museum yang dipelihara sebanyak (7) unit.
- Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum [UPTD - UPTD Museum Adityawarman], dengan output Jumlah sarana museum yang direvitalisasi sebanyak (2) unit dan Jumlah prasarana museum yang direvitalisasi sebanyak (1) unit.

f) Program Pengembangan Kebudayaan dicapai dengan melaksanakan kegiatan :

(1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan tercapainya target warisan budaya takbenda yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah dengan target 8 warisan budaya dengan realisasi sebanyak

19 warisan budaya dengan capaian 238%.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	100%	100%	100	14.412.617.399	13.816.305.288	95,86
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100	349.581.383	344.204.030	98,46
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	252.428.333	248.658.830	98,51
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	20.000.000	19.214.000	96,07
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	77.153.050	76.331.200	98,93
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	4 Dokumen	4 Dokumen	100	8.422.221.599	7.953.012.832	94,43
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang	80 orang	100	8.039.565.574	7.577.629.643	94,25
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 orang	12 orang	100	228.697.400	227.537.650	99,49
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	100	153.958.625	147.845.539	96,03
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi</b>	100%	100	200.353.907	199.323.915	99,49
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 unit gedung dan 6 unit kendaraan	6 unit gedung dan 6 unit kendaraan	100	200.353.907	199.323.915	99,49
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi</b>	1	100	60.131.000	55.130.000	91,68
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80 Stel	80 Stel	100	55.131.000	55.130.000	100

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	3 orang	0 orang	100	5.000.000	0	0
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>1.838.240.316</b>	<b>1.803.270.731</b>	<b>98,1</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor	19 Jenis	19 Jenis	100	53.917.960	53.916.530	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	11 Jenis	100	793.255.342	760.166.140	95,83
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48 Jenis	48 Jenis	100	264.219.450	263.373.000	99,68
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Jenis	7 Jenis	100	40.520.000	39.639.600	97,83
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	6 Jenis	6 Jenis	100	13.921.476	13.890.000	99,77
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	672.406.088	672.285.461	99,98
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>321.917.160</b>	<b>321.201.925</b>	<b>99,78</b>
	Pengadaan Mebel	10 Jenis	10 Jenis	100	321.917.160	321.201.925	99,78
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>2.523.288.734</b>	<b>2.471.808.821</b>	<b>97,96</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Surat	1000 Surat	100	33.950.000	33.495.000	98,66
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	585.074.700	553.698.597	94,64
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	1.904.264.034	1.884.615.224	98,97
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>696.883.300</b>	<b>668.353.034</b>	<b>95,91</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit roda 4 dan 4 unit roda 2	8 Unit roda 4 dan 4 unit roda 2	100	150.732.500	140.981.789	93,53
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	100	264.650.800	250.716.040	94,73

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Bangunan	5 Bangunan	100	258.000.000	254.317.000	98,57
	Pemeliharaan-Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Jenis	3 Jenis	100	23.500.000	22.338.205	95,06
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>8 Karya Budaya</b>	<b>19 Karya Budaya</b>	<b>238</b>	<b>9.177.650.475</b>	<b>8.943.989.495</b>	<b>97,45</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>1.707.796.275</b>	<b>1.641.470.177</b>	<b>96,12</b>
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				1.707.296.275	1.641.083.177	96,12
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				500.000	387.000	77,4
<b>2</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>				<b>5.181.324.250</b>	<b>5.017.007.046</b>	<b>96,83</b>
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya [UPTD - UPTD Taman Budaya]				2.381.324.250	2.300.399.288	96,6
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional [UPTD - UPTD Taman Budaya]				2.700.000.000	2.617.537.758	96,95
	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan [UPTD - UPTD Taman Budaya]				100.000.000	99.070.000	99,07
<b>3</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>2.288.529.950</b>	<b>2.285.512.272</b>	<b>99,87</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				2.288.529.950	2.285.512.272	99,87
III	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>21 Kesenian Tradisional</b>	<b>4 kesenian tradisional</b>		<b>2.685.868.656</b>	<b>2.512.566.007</b>	<b>93,55</b>
1	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>2.685.868.656</b>	<b>2.512.566.007</b>	<b>93,55</b>
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				205.000.000	199.121200	97,13
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				500.000	0	0
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				2.480.368.656	2.313.444.807	93,27
IV	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>3 Dokumen Sejarah</b>	<b>1 Dokumen sejarah</b>		<b>444.595.770</b>	<b>440.722.484</b>	<b>99,13</b>
1	<b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>				<b>444.595.770</b>	<b>440.722.484</b>	<b>99,13</b>
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi				374.075.570	370.737.214	99,11
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah				70.520.200	69.985.270	99,24
V	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>15 Cagar Budaya</b>	<b>9 Cagar Budaya</b>		<b>135.000.000</b>	<b>90.272.000</b>	<b>66,87</b>
1	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>				<b>90.000.000</b>	<b>89.200.000</b>	<b>99,11</b>
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				20.000,000	19,702,000	98,51
	Penetapan Cagar Budaya				70.000.000	69.498.000	99,28
2	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>				<b>45.000.000</b>	<b>1.072.000</b>	<b>2,38</b>
	Pelindungan Cagar Budaya				45.000.000	1.072.000	2,38
VI	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>15 Aktifitas kegiatan</b>	<b>23 Aktifiktas</b>		<b>2.135.093.390</b>	<b>2.108.382.459</b>	<b>98,75</b>
1	<b>Pengelolaan Museum Provinsi</b>				<b>2.135.093.390</b>	<b>2.108.382.459</b>	<b>98,75</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]				540.000.000	538.924.328	99,8
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]				86.064.550	86,057,580	99,99
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]				900.000.000	878.054.310	97,56
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]				360.000.000	357,951,491	99,43
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]				249.028.840	247.394.750	99,34
					<b>28.990.825.690</b>	<b>27.912.237.733</b>	

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Menyamakan persepsi/kepemahaman terkait kegiatan yang dilaksanakan dengan masyarakat	Sosialisasi dengan masyarakat adat
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat adat (generasi muda) dalam meningkatkan pengamalan ABS SBK	Bimtek dan Pelatihan Adat istiadat bagi generasi muda
		Gedung pertemuan, dan sarana pendukung lainnya belum representatif digunakan dalam berbagai kegiatan adat	Memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung pertemuan dan sarana pendukung lainnya dalam mewujudkan wadah literasi dan edukasi dikawasan mesjid raya Sumatera Barat
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional</b>	Masih terdapat kesenian tradisional yang belum di kembangkan dan dimanfaatkan	Kajian pengembangan Kesenian tradisional
III	<b>PROGRAM SEJARAH</b>	Masih kurang minat masyarakat dalam meningkatkan kapasitas SDM	Sosialisasi dengan menggunakan media teknologi informasi/digitalisasi sejarah bagi khalayak
		Membutuhkan media baru dalam menyampaikan informasi sejarah	Bimbingan teknis pembinaan sejarah Minangkabau

		Belum terakomodirnya asosiasi sejarah oleh Pemrov Sumatera Barat	Perjanjian kerjasama dengan asosiasi sejarah dalam peningkatan kapasitas SDM
IV	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Minimnya Anggaran Penetapan Cagar Budaya	Penambahan anggaran Survey lapangan dalam penetapan pemeringkatan Provinsi Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan BPCB
		Menimnya /tidak lengkpanya data CB dari Kab/ Kota yang akan ditetapkan pemeringkatan Provinsi	
		Tim pendaftar Cagar Budaya belum ahli dibidangnya	
		Belum dijadikannya Prioritas Utama dalam perencanaan dan penggaran dinas	Pemahaman terhadap UU no 11 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
V	PROGRAM PERMUSEUMAN	Ketersediaan Sarana dan Prasarana museum belum representative digunakan untuk ruang publik	Pemenuhan akses bagi ruang publik

### 3.1.2.13. Perpustakaan; Kearsipan

Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.15.139.103.838,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.122.304.439,00 atau 93.28%, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	63.3	66.87	105.63
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	14.14	108.76
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	71.5	75.29	105.30
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	76.66	86.67	113.05
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (72)	BB (70.79)	98.31
4	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (77)	Sangat Baik (85.13)	110.55



## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat dengan indikator kinerja :

- 1) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Target Kinerja 63,3) (realisasi Kinerja 66,87) dengan capaian Kinerja 105,63%
- 2) Indeks pembangunan Literasi Masyarakat (Target Kinerja : 13) (Realisasi Kinerja : 14,14) Capaian Kinerja 108,76%

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program :

a) Program Pembinaan Perpustakaan dicapai dengan melaksanakan kegiatan :

(1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan output e-book/buku digital yang tersedia, jaringan perpustakaan yang terpelihara, dan pengadaan sarana dan prasarana modern.
- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi dengan output meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan daerah provinsi, dan tersedianya sarana pelayanan.
- Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi dengan output koleksi konten lokal Sumatera Barat yang tersedia.
- Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dengan output jumlah perpustakaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dibina.
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi dengan output DUPAK/PAK Pustakawan Provinsi dan Kab/Kota yang telah dinilai, dan pengelola perpustakaan pendidikan menengah yang ditingkatkan kapasitasnya dan kompetensinya.
- Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan output peningkatan

- layanan rujukan di tingkat provinsi.
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka dengan output bahan pustaka cetak yang tersedia.
  - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi dengan output data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan, dan pustakawan daerah Provinsi yang disusun.
- (2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat dengan output sosialisasi budaya baca yang dilaksanakan pada satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat.
  - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi dengan output tersedianya ruang baca terbuka.
  - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dengan output pelatihan keterampilan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan.
- b) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dicapai dengan Pelaksanaan Kegiatan :
- (1) Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi dengan :
- Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan output karya cetak/rekam yang dihimpun dan dikelola.
- (2) Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah dengan sub kegiatan :
- Penerbitan Katalog Induk Daerah dengan output dengan output buku katalog induk daerah (KID).
  - Penerbitan Bibliografi Daerah dengan output dengan output buku bibliografi induk daerah (BID).
- (3) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :
- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran

Naskah Kuno dengan output inventarisasi dan pendaftaran naskah kuno.

- Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan dengan output alihmedia naskah kuno dan koleksi klasik ke digital/e-book dan termanfaatkannya layanan naskah kuno dan khas daerah oleh pemustaka/masyarakat.

(4) Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

- Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dengan output jumlah koleksi Minangkabausiana.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip dengan indikator kinerja :

- 2) Tingkat Ketersediaan Arsip (Target Kinerja : 71,5) (Realisasi Kinerja 72,59) dengan Capaian Kinerja 102,50%.
- 3) Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip (Target Kinerja : 76,66) (Realisasi Kinerja : 86,87) Capaian Kinerja 113,05%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan 2 program :

a) Program Pengelolaan Arsip, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi dengan sub kegiatan :

- Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis dengan output jumlah pencipta arsip yang melakukan proses penciptaan dan penggunaan arsip dinamis sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.
- Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis dengan output jumlah pencipta arsip yang melakukan proses pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.
- Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi dengan output jumlah pencipta arsip yang di audit dan dilakukan monitoring audit hasil pelaksanaan audit kearsipan internal dan eksternal, dan jumlah pencipta arsip yang di audit dan dilakukan monitoring audit hasil

pelaksanaan audit kearsipan.

(2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

- Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI sehingga dengan output volume arsip terjaga yang dikelola serta dilaporkan dan disampaikan salinan otentiknya ke ANRI.
- Akusisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis sehingga dengan output akses dan layanan arsip, dan jumlah arsip statis yang diakusisi dan diolah dari pencipta arsip.

(3) Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi dengan output kegiatan ini adalah terselenggaranya simpul jaringan yang terintegrasi dalam jaringan informasi kearsipan dan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah memiliki sub kegiatan :

- Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN sehingga dengan output tersedianya data dan informasi arsip statis yang bisa diakses melalui JIKN, dan terselenggaranya simpul jaringan informasi kearsipan antar lembaga kearsipan.
- Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sehingga dengan output pembinaan kinerja arsiparis pada lembaga kearsipan daerah, dan penilaian kinerja arsiparis (PAK dan Arsiparis Terbaik).

b) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun dengan output kegiatan ini adalah jumlah pencipta arsip yang dibina dalam melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, dengan sub kegiatan :

- Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun sehingga dengan output jumlah pencipta arsip yang melakukan penilaian, penetapan, dan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun.

- (2) Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi dengan output kegiatan ini adalah jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang di preservasi dengan sub kegiatan :
- Evakuasi Identifikasi Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana sehingga dengan output jumlah simulasi perlindungan dan penyelamatan arsip bencana yang akan dilakukan dalam rangka evakuasi, identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan arsip akibat bencana.
- (3) Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dengan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi dengan output kegiatan ini adalah tersedianya daftar arsip status yang telah dialihmediakan dan diautentifikasi dengan sub kegiatan :
- Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip sehingga dengan output jumlah arsip hasil alihmedia yang dinilai dan ditetapkan autentisitasnya sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja.
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (target kinerja 72 (BB)) (realisasi Kinerja 70,79 (BB)) dengan capaian Kinerja 98,31%.
- d. Sasaran IV : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan Indikator Kinerja :
- 1) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (Target Kinerja : Baik (77)) (Realisasi Kinerja : Sangat Baik (85,13)) Capaian Kinerja 110,55%.

Pencapaian target kinerja dari indikator Kinerja kedua Sasaran tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III dan IV.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				<b>1.019.023.350</b>	<b>998.911.770</b>	<b>98,02</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>				<b>940.373.650</b>	<b>920.911.770</b>	<b>97.93</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>				<b>787.111.550</b>	<b>772.931.282</b>	<b>98.2</b>
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1300 copy 1 jaringan 16 jenis 3 perpustakaan	1300 copy 1 jaringan 16 jenis 3 perpustakaan	100	391.241.000	384.224.392	98.21
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	30000 orang 2 unit	58767 orang 2 unit	195.89	52.467.400	52.317.500	99.71
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	150 Eksemplar	151 Eksemplar	100.6	22.843.800	22.675.800	99.26

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	19 perpustakaan	19 perpustakaan	100	218.561.000	213.744.586	97.8
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	40 PAK 30 Orang	40 PAK 30 Orang	100	15.936.550	14.666.550	92.03
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 layanan	1 layanan	100	16.999.800	16.474.100	96.91
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	500 Eksemplar	500 Eksemplar	100	56.241.000	56.220.850	99.96
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	12.821.000	12.607.504	98.33
<b>2</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>				<b>153.262.100</b>	<b>147.980.488</b>	<b>96.55</b>
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	50 orang 2 kegiatan	50 orang 2 kegiatan	100	115.380.700	110.148.838	95.47
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1 paket	1 paket	100	20.000.000	20.000.000	100
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	30 orang	30 orang	100	17.881.400	17.831.650	99.72
<b>II</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>				<b>78.649.700</b>	<b>78.000.000</b>	<b>99.17</b>
<b>1</b>	<b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>				<b>16.034.500</b>	<b>16.028.500</b>	<b>99.96</b>
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	200 eksemplar	230 eksemplar	115	16.034.500	16.028.500	99.96
<b>2</b>	<b>Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah</b>				<b>19.169.200</b>	<b>19.146.500</b>	<b>99.88</b>
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	- 1 Terbitan	- 1 Terbitan	100	11.786.000	11.764.000	99.81



No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penerbitan Bibliografi Daerah	- 1 Terbitan	- 1 Terbitan	100	7.383.200	7.382.500	99.99
<b>3</b>	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi</b>				<b>28.446.000</b>	<b>28.092.600</b>	<b>98.76</b>
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	3 Naskah	3 Naskah	100	14.648.000	14.546.400	99.31
	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	15 Alih media 750 Orang	21 Alih media 750 Orang	140	13.798.000	13.546.200	98.18
<b>4</b>	<b>Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi</b>				<b>15.000.000</b>	<b>14.732.400</b>	<b>98.22</b>
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	150	155	103.33	15.000.000	14.732.400	98.22
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>				<b>14.120.080.488</b>	<b>13.123.392.669</b>	<b>92,94</b>
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>13.564.849.710</b>	<b>12.575.245.505</b>	<b>92.7</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>68.936.900</b>	<b>66.611.500</b>	<b>96.63</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100	53.936.900	52.143.400	96.67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	15.000.000	14.468.100	96.45
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>10.159.424.823</b>	<b>9.335.967.259</b>	<b>91.89</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang	86 Orang	100	9.998.790.073	9.183.884.509	91.85
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Orang	11 Orang	100	125.640.000	117.240.000	93.31
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	12.135.750	12.014.750	99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	22.859.000	22.828.000	99.86

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>109.013.800</b>	<b>107.920.220</b>	<b>99</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9 Unit	9 unit	100	106.200.000	105.106.420	98.97
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1.388.800	1.388.800	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	1.425.000	1.425.000	100
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>64.500.000</b>	<b>56.999.943</b>	<b>88.37</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	85 Stel	76 Stel	88.37	64.500.000	56.999.943	88.37
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>437.475.000</b>	<b>436.482.556</b>	<b>99.77</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	235 Buah	236 Buah	100.4	9.682.650	9.580.000	98.94
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	428 Buah	428 Buah	100	35.574.500	35.483.100	99.74
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	623 Unit	623 Unit	100	18.270.000	18.270.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	156 Eksemplar	156 Eksemplar	100	24.870.000	24.360.000	97.95
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Dokumen	45 Dokumen	100	347.827.850	347.539.456	99.92
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Arsip	200 Arsip	100	1.250.000	1.250.000	100
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.327.815.167</b>	<b>2.184.440.166</b>	<b>93.84</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Surat	1659 Surat	138.25	10.000.000	9.700.000	97
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	- 100 Mbps - 3 Rekening - 1344 Meter Kubik - 353678 KVA	- 100 Mbps - 3 Rekening - 1344 Meter Kubik - 353678 KVA	100	564.528.600	558.733.493	98.97
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan 40 Orang	12 Bulan 40 Orang	100	1.753.286.567	1.616.006.673	92.17
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>397.684.020</b>	<b>386.823.861</b>	<b>97.27</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100	41.190.000	40.169.000	97.52
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	11 Unit	100	120.230.000	113.238.850	94.19
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Unit	18 Unit	100	12.940.000	12.935.000	99.96
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47 Unit	47 Unit	100	223.324.020	220.481.011	98.73
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>				<b>497.036.778</b>	<b>491.402.205</b>	<b>98.87</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>				<b>60.160.000</b>	<b>58.996.690</b>	<b>98.07</b>
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	3 Pencipta arsip	3 Pencipta arsip	100	13.650.000	13.125.500	96.16
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	3 Pencipta Arsip	3 Pencipta Arsip	100	14.400.000	14.050.100	97.57
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	5 SKPD 16 LKD	5 SKPD 16 LKD	100	32.110.000	31.821.090	99.1
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>				<b>396.803.428</b>	<b>393.776.050</b>	<b>99.24</b>
	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	1 daftar arsip terjaga	1 daftar arsip terjaga	100	13.536.350	13.503.950	99.76
	Akuisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 orang pengguna arsip 4 SKPD 2 Jenis Media arsip	500 orang pengguna arsip 4 SKPD 2 Jenis Media arsip	100	383.267.078	380.272.100	99.22
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>				<b>40.073.350</b>	<b>38.629.465</b>	<b>96.4</b>
	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	2000 data entry arsip 6 simpul jaringan	2000 data entry arsip 6 simpul jaringan	100	11.452.100	11.427.690	99.79
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	7 LKD 40 Arsiparis	7 LKD 40 Arsiparis	100	28.621.250	27.201.775	95.04

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
V	<b>Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip</b>				<b>58.194.000</b>	<b>56.744.959</b>	<b>97.51</b>
1	<b>Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun</b>				<b>13.898.000</b>	<b>13.576.560</b>	<b>97.69</b>
	Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	3 SKPD	3 SKPD	100	13.898.000	13.576.560	97.69
2	<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi</b>				<b>14.296.000</b>	<b>14.041.054</b>	<b>98.22</b>
	Evakuasi Identifikasi Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	7 Kali	7 Kali	100	14.296.000	14.041.054	98.22
3	<b>Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi</b>				<b>30.000.000</b>	<b>29.127.345</b>	<b>97.09</b>
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5000 Lembar	5000 Lembar	100	30.000.000	29.127.345	97.09

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>		
I	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>		
1	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>		
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Mewujudkan layanan perpustakaan elektronik yang modern belum maksimal akibat dari sarana dan prasarana elektronik yang perlu untuk diperbaharui karena sudah tua/rusak	Sudah adanya SDM bidang TIK sebanyak 1 orang yang dapat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Perlu ditingkatkan kemampuan SDM dalam memberikan excelent service	Adanya SDM Khusus yang memublish semua kegiatan pada media sosial
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Keterbatasan sarana sehingga proses pengolahan buku untuk siap dilayankan, membutuhkan waktu yang lama, kurangnya penulis lokal; sehingga pengadaan buku kekhasan terbatas	SDM yang sesuai dengan latar belakang pendidikan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Komitmen kepala sekolah terhadap pengembangan perpustakaan sangat rendah sehingga perpustakaan SMA/SMK wilayah Sumatera Barat banyak pengelolaannya belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)  Keterbatasan anggaran dalam pembangunan ruangan perpustakaan dan belum terintegrasinya antara kurikulum sekolah dengan program perpustakaan yang menjadi sulitnya perpustakaan sekolah berkembang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).	Dinas Pendidikan dan kepala sekolah terkait telah mulai memprioritaskan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga pengelola perpustakaan sehingga SDM tenaga perpustakaan sudah memenuhi kualifikasi dan profesional dalam mengelola perpustakaan SMA/SMK se Sumatera Barat sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)  Telah adanya program dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan setiap tahun dalam mengapresiasi perpustakaan yang telah sesuai Standar Nasional Perpustakaan dengan mengadakan lomba dan reward bagi pemenang Lomba Perpustakaan Tingkat SMA/SMK se-Sumatera Barat.
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Masih kurangnya pemahaman kepala sekolah terkait pengutusan peserta Bimtek pengelolaan perpustakaan sekolah sehingga peserta bimtek yang mengikuti bukan dari tenaga perpustakaan sehingga SDM yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya tidak tepat sasaran  Terkait tim penilai angka kredit jabatan fungsional pustakawan, masih minimnya anggaran terkait pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan	Sudah adanya kebijakan dan aturan terkait standar pengelolaan perpustakaan sehingga pelaksanaan bimtek dan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan telah terstruktur dan terprogram dengan baik
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terbatasnya sarana dan prasarana serta buku referensi	Jumlah kunjungan ke layanan rujukan yang meningkat setiap tahun
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Karena keterbatasan Sarana, seperti Scanner dan Printer Label sehingga proses pengolahan buku untuk siap dilayankan membutuhkan waktu yang lama.	SDM yang sesuai latar belakang pendidikan.
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	1. Belum maksimalnya serta belum validnya pengumpulan dan pengolahan data informasi perpustakaan terkait penghitungan kajian IPLM dan TGM karena masih kurangnya sosialisasi dari Perpunas terkait kajian tersebut.  Keterbatasan SDM menyebabkan setiap Perpustakaan Kab/Kota dan Provinsi sering kewalahan dalam pengolahan dan pengumpulan data yang update dan mutakhir.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi dan Kab/Kota saling bersinergi dan saling koordinasi agar pengumpulan, pengolahan data perpustakaan untuk kajian IPLM dan TGM dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagai IKU Daerah dan LPPD
2	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>		
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Peserta tidak sesuai dengan sasaran  Kurang dukungan anggaran	Peserta yang datang sesuai dengan permintaan  Perlu dukungan kebijakan anggaran perlu dilakukan sosialisasi
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Ruang Baca yang tersedia saat ini (Roof Top lantai 5) sulit diakses oleh pemustaka karena tidak tersedia lift di perpustakaan	Perlunya sebuah ruangan yang bisa diakses secara bebas oleh pemustaka seperti makan dan minum (ruang baca terbuka) dan tiap tahun perlu adanya upgrade kekinian sesuai zaman
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi sehingga materi yang disampaikan tidak maksimal	Dukungan dan komitmen Kabupaten/ Kota dalam mengirimkan peserta pelatihan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
II	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>		
1	<b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>		
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terbatasnya sarana dan prasarana	Terhimpunnya karya cetak dan karya rekam dari penerbit
2	<b>Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah</b>		
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Terbatasnya SDM yang menghimpun KID	Tersedianya buku katalog induk daerah bagi pemustaka
	Penerbitan Bibliografi Daerah	Terbatasnya SDM yang menghimpun Bibliografi Induk Daerah	Tersedianya buku Bibliografi Induk Daerah bagi pemustaka
3	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi</b>		
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyampaikan naskah kuno	Keterlibatan masyarakat dalam inventarisasi dan naskah kuno
	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Terbatasnya sarana dan prasarana	Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan layanan naskah kuno
4	<b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>		
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Karena keterbatasan Sarana, seperti Scanner dan Printer Label sehingga proses pengolahan buku untuk siap dilayankan membutuhkan waktu yang lama.	SDM yang sesuai latar belakang pendidikan.
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>		
III	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>		
1	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>		
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Belum ada	Terdapatnya pengelolaan arsip dinamis yang belum sesuai standar yang telah ditetapkan
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Belum ada	Terdapatnya penciptaan proses penyusutan arsip dinamis sesuai dengan prosedur
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	SDM yang belum memenuhi formasi yang dibuuthkan oleh SKPD sesuai anjab ABK. Belum maksimalnya sarana dan prasarana audit pengawasan kearsipan	Pengelola arsip menjalankan tupoksi secara baik dan adanya regulasi yang berkaitan dengan pengawasan kearsipan. adanya tim pelaksana audit yang mengkoordinir pelaksana kegiatan. Tersedianya tim audit dengan SK Gubernur Sumatera Barat.
2	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>		
	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Belum ada	Adanya arsip terjaga yang dijaga dan dilaporkan
	Akusisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terbatasnya sarana dan prasarrana	Tersedianya arsip yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat
	Akusisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis		

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
3	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>	Terbatasnya sarana dan prasarrana	Tersedianya arsip yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat
	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Belum ada	Agar tersedia informasi kasus dan layanan kearsipan melalui JIKN
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Masih kurang pemahaman fungsional arsiparis dalam pelaksanaan tugas kearsipan	Melaksanakan pembinaan langsung, mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis
V	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>		
1	<b>Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun</b>		
	Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terbatasnya sarana dan prasarana	Tersedianya pencipta arsip yang melakukan penilaian dan pemusnahan arsip
2	<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi</b>		
	Evakuasi Identifikasi Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Ketersediaan anggaran untuk mensupport pelaksanaan kegiatan	Adanya respon yang baik dari LKD Kab/Kota untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana dalam bentuk Simulasi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Bencana
3	<b>Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi</b>		
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	SDM yang memahami pelaksanaan pekerjaan penilaian dan penetapan hasil alih media arsip masih minim Ketersediaan anggaran untuk mensupport pelaksanaan kegiatan	Sebahagian arsip statis yang disimpan didepo sudah dialih mediakan sehingga mempercepat pelaksanaan penilaian

### 3.1.3. URUSAN PILIHAN

#### 3.1.3.1. Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.89.648.198.536,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.79.012.571.430,00 atau 88,14% dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Progarm / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	<b>Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,99	2,90	292,93
II	Meningkatnya Produksi Perikanan	<b>Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,33	7,09	212,91
III	Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	<b>Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	155,30	272,35	175,37
IV	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	<b>Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan</b>	Presentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	6,49	6,49	100
V	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	<b>Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</b>	Presentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	47,06	48,69	103,46
VI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi		Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,12)	80,06	99,93
VII	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	B (82,00)	82	100

#### 1. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan, dengan indikator kinerja :

1) Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap ( Target Kinerja 0,99 dengan realisasi 2,90).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

(1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil, dengan Sub kegiatan :

➤ Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan,



- dengan output Tersedianya data dan informasi sumberdaya ikan, 1 dokumen.
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan output : Fish box, Mesin diesel kapal perikanan, longtail 60 unit, Mesin tempel 359 unit, Gillnet 117 unit, Tramel Net 92 unit.
- (2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan Sub kegiatan :
- Penjaminan Ketersediaan Sarana usaha perikanan tangkap, dengan output Restocking ikan di perairan umum, pelestarian sumberdaya perairan umum (reservaat) 13 unit, Gillnet Maninjau dan Singkarak 290 unit.
- (3) Penerbitan Izin usaha Perikanan Tangkap untuk kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT, dengan Sub kegiatan :
- Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, dengan output : Terlaksananya sosialisasi peraturan perizinan kapal perikanan 150 org.
  - Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangka untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT, dengan output : Terlaksananya cek fisik kapal perikanan.
- (4) Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi, dengan Sub kegiatan :
- Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan, dengan output Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Wilayah I, Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Wilayah II, Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Wilayah III.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatnya Produksi Perikanan, dengan indikator kinerja
- 1) Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Target Kinerja 33,3 dengan realisasi 7,90).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :
  - (1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan Sub kegiatan :
    - Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan, dengan output Terlaksananya sosialisasi perizinan usaha budidaya air laut dan payau, 3 kali.
  - (2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, dengan Sub kegiatan :
    - Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan di laut, dengan output Terlaksananya pengembangan ikan kerapu bebek pada Kawasan sentra produksi 23.250 ekor.
    - Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan atau/manfaat atau dampak negatifnya, dengan output Terlaksananya pengembangan tambak milenial budidaya udang vaname, Terlaksananya peningkatan SDM dan Forum pengelolaan BBI se-Sumatera Barat 1 kali, Terlaksananya kegiatan TMMN 120.000 ekor.
    - Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut, dengan output Terlaksananya pembinaan dan pengendalian HPI di 14 Kab/Kota, Terlaksananya pengawasan OIKB 7 Kab/Kota, Tersedianya pengadaan obat-obatan, vitamin pada ikan, 1 paket.
    - Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dengan output Terlaksananya Pembinaan CBIB 8 angkatan.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan, dengan indikator kinerja :
  - 1) Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar) (Target Kinerja 155,30

dengan realisasi 272,35).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - (1) Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan Sub kegiatan :
    - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan output Terlaksananya Pameran promosi tingkat Provinsi dan Nasional, Terlaksananya peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan, 1 kali, Terlaksananya peningkatan investasi sektor kelautan dan perikanan.
  - (2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, dengan Sub kegiatan :
    - Pelaksanaan Bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besa, dengan output Terlaksananya diversifikasi produk olahan ikan.
    - Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing, dengan output Terlaksananya pelatihan GMP/SSOP dalam system HACCP 6 angkatan, Terlaksananya peningkatan kapasitas KKMB 5 kali, Terlaksananya peningkatan mutu dan keamanan pangan.
  - (3) Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub kegiatan :
    - Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan output Terlaksananya kegiatan Forikan di Kab/Kota, 6 event, Terlaksananya kegiatan Gemarikan 6 event.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian

target kinerja sasaran III.

d. Sasaran IV : Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan, dengan indikator kinerja :

1) Presentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (Target Kinerja 6,49 dengan realisasi 6,49).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil, dengan Sub kegiatan :

- Pengawasan Pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 Mil, dengan output Terlaksananya penyusunan RPZ Kab. Agam 1 kali, Terlaksananya review rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 1 kali.
- Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil, dengan output Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 330 kali, Terlaksananya penyidikan tindak pidana 3 kali, Terlaksananya forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan 1 kali.
- Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) , dengan output Terlaksananya koordinasi pembinaan Pokmaswas Tingkat Provinsi Sumatera Barat 1 kali, Tersedianya perlengkapan Pokmaswas 1 paket.

(2) Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan Sub kegiatan :

- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan kan di Wiyah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya, dengan output Terlaksananya Pelatihan CPPIB 1 angkatan, Terlaksananya pengawasan peredaran benih 1 angkatan, Terlaksananya pelatihan CPPIB dan pembinaan 1 Angkatan.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian

target kinerja sasaran IV.

e. Sasaran V : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan, dengan indikator kinerja :

1) Presentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Target Kinerja 47,06 dengan realisasi 48,69).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, dengan Sub kegiatan :

- Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat, dengan output Terlaksananya pengawasan wilayah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil 10 kali, Terlaksananya pertemuan Pokmaswas 1 kali.
- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dengan output Terlaksananya rehabilitasi terumbu karang 125 unit, Terlaksananya sosialisasi biofisik perairan pesisir 2 kali, Terlaksananya penanaman mangrove 11.500 batang.
- Mitigasi Bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan output Terlaksananya penanaman cemara laut sebanyak 1.680 batang.

(2) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dengan Sub kegiatan :

- Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dengan output Terlaksananya forum koordinasi dan pembinaan kelompok perempuan pesisir dalam rangka kesetaraan gender 1 kali, Terlaksananya Gerakan bersih pantai 1 kali, Terlaksananya tracking mangrove.
- Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan output Terlaksananya Forum koordinasi mitra konservasi dan peningkatan kelembagaan 1 kali, Terlaksananya pembinaan Kelompok Usaha Bersama 10 KUB.

- Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dengan output Terlaksananya Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan 6 Kab/Kota, Terlaksananya sosialisasi perlindungan nelayan 10 Kab/Kota.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V.

- f. Sasaran VI : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja :
  - 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD ( Target Kinerja A (80,12) dengan realisasi A (80,06)).
- g. Sasaran VII : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, dengan indikator kinerja :
  - 1) Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi ( Target Kinerja A (82,00) dengan realisasi 82).

## 2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>			100	4.018.151.350	3.395.947.066	84,52
1	<b>Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>			100	2.902.320.500	2.778.821.975	95,74
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil 10 kali, Pertemuan kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 1 kali, Pengelolaan kawasan KKPD 7 Kawasan, Sarana prasarana KKPD 1 instalasi	Pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil 10 kali, Pertemuan kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 1 kali, Pengelolaan kawasan KKPD 7 Kawasan, Sarana prasarana KKPD 1 instalasi		1.913.633.200	1.847.322.140	96,53

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Penanaman mangrove 11.500 btg, Transplantasi terumbu karang 125 unit	Penanaman mangrove 11.500 btg, Transplantasi terumbu karang 125 unit		557.314.300	512.402.333	91,94
	Mitigasi Bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Penanaman pohon pelindung pantai 2.450 btg, Sosialisasi 1 kali	Penanaman pohon pelindung pantai 2.450 btg, Sosialisasi 1 kali		431.373.000	419.097.502	97,15
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</b>			<b>50</b>	<b>1.115.830.850</b>	<b>617.125.091</b>	<b>55,31</b>
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Forum kesetaraan gender 1 kali, Gerakan Bersih Pantai 1 kali, Tracking mangrove 1 kali, Pembinaan putra putri maritim 1 kl	Forum kesetaraan gender 1 kali, Gerakan Bersih Pantai 1 kali, Tracking mangrove 1 kali, Pembinaan putra putri maritim 1 kl		382.509.400	308.125.850	80,55
	Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Forum mitra konservasi 1 kali, Sosialisasi Peningkatan KUB nelayan 10 KUB	Forum mitra konservasi 1 kali, Sosialisasi Peningkatan KUB nelayan 10 KUB		228.481.450	179.827.041	78,71
	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Asuransi nelayan, Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan 1 kali	Asuransi nelayan tidak terlaksana karena Pergub terkait asuransi masih berproses di Kemandagri, Pengembangan SDM refocusing, Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan 1 kali		504.840.000	128.172.200	25,59
<b>II</b>	<b>PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>				<b>42.206.525.926</b>	<b>36.151.033.297</b>	<b>85,65</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>				<b>32.208.433.723</b>	<b>27.225.591.181</b>	<b>84,52</b>
	Penyediaan Data dan informasi sumberdaya ikan	Tersedianya data 1 dokumen	Tersedianya data 1 dokumen		107.700.000	92.187.300	85,60

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Mesin longtail 67 unit, Tramel Net 64 unit, Gillnet 104 unit, Fish box 100 ltr 220 unit, Mesin tempel 4 PK 9 unit, Fish box 100 ltr 905 unit, Rumpon laut dangkal 10 unit, Mesin longtail 30 unit, Mesin tempel 15 PK 316 unit, Mesin tempel 20 PK 12 unit, Mesin tempel 40 PK 44 unit	Mesin longtail 67 unit, Tramel Net 64 unit, Gillnet 104 unit, Fish box 100 ltr 220 unit, Mesin tempel 4 PK 9 unit, Fish box 100 ltr 905 unit, Rumpon laut dangkal 10 unit, Mesin longtail 30 unit, Mesin tempel 15 PK 316 unit, Mesin tempel 20 PK 12 unit, Mesin tempel 40 PK 44 unit		16.213.010.000	14.771.758.761	91,11
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Sarana dan prasana PPW I, II, III	Sarana dan prasana PPW II (pabrik es dan instalasi air bersih yang tidak terlaksana)		15.887.722.923	12.361.645.120	77,80
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>6.667.163.038</b>	<b>6.017.358.312</b>	<b>90,25</b>
	Penjaminan Ketersediaan Sarana usaha perikanan tangkap	Reservaat 5 unit, Gillnet 160 unit, Mesin longtail 115 unit, Mesin tempel 2.5 PK 45 unit, Perahu fiber 33 unit, Restocking 2.690.450 ekor	Reservaat 5 unit, Gillnet 160 unit, Mesin longtail 115 unit, Mesin tempel 2.5 PK 45 unit, Perahu fiber 33 unit, Restocking 2.690.450 ekor		6.667.163.038	6.017.358.312	90,25
<b>3</b>	<b>Penerbitan Izin usaha Perikanan Tangkap untuk kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>				<b>225.910.000</b>	<b>195.525.870</b>	<b>86,55</b>
	Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT samapai dengan 30 GT	Sosialisasi peraturan perizinan usaha perikanan tangkap 1 kali	Sosialisasi peraturan perizinan usaha perikanan tangkap 1 kali		114.080.000	92.181.600	80,80



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangka untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	Pelayanan terpadu penerbitan buku kapal perikanan 1 kali, Cek fisik kapal perikanan	Pelayanan terpadu penerbitan buku kapal perikanan 1 kali, Cek fisik kapal perikanan		111.830.000	103.344.270	92,41
<b>4</b>	<b>Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi</b>			<b>100</b>	<b>3.105.019.175</b>	<b>2.714.557.934</b>	<b>87,42</b>
	Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan	Operasional Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III	Operasional Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III		3.105.019.175	2.712.557.934	87,36
<b>III</b>	<b>PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				<b>9.581.201.055</b>	<b>7.482.504.285</b>	<b>78.10</b>
<b>1</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>68.060.000</b>	<b>60.231.850</b>	<b>88,49</b>
	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	Sosialisasi perizinan 6 Kab/Kota	Sosialisasi perizinan 6 Kab/Kota		66.060.000	60.231.850	88,49
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>			<b>100</b>	<b>9.513.141.055</b>	<b>7.512.272.435</b>	<b>78,96</b>
	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan di laut	Pengembang an ikan kerapu 23.250 ekor, Pengembang an budidaya lobster 1 kgtn (BPBALP)	Pengembang an ikan kerapu 23.250 ekor, Pengembang an budidaya lobster 1 kgtn (BPBALP)		3.779.606.849	3.659.618.042	96,82
	Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan atau/manfaat atau dampak negatifnya	Pengembang an udang vaname, Pelatihan kelembagaan BBI Pokdakan dan UPR 1 kali, Peningkatan SDM dan forum pengelolaan BBI se-Sumatera Barat 1 kali, TMMN 1 kgtn	Tidak terlaksana Pelatihan kelembagaan BBI Pokdakan dan UPR 1 kali, Peningkatan SDM dan forum pengelolaan BBI se-Sumatera Barat 1 kali, TMMN 1 kgtn		3.844.099.943	2.006.270.683	52,19

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut	Pembinaan dan pengawasan OIKB 7 Kab/Kota, Pembinaan dan pengendalian HPI 14 Kab/Kota, Pengadaan obat-obatan vitamin 1 paket	Pembinaan dan pengawasan OIKB 7 Kab/Kota, Pembinaan dan pengendalian HPI 14 Kab/Kota, Pengadaan obat-obatan vitamin 1 paket		193.836.223	193.481.800	99,82
	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat	Pelatihan CBIB 8 Angkatan, Sosialisasi kegiatan CBIB 1 kali	Pelatihan CBIB 8 Angkatan, Sosialisasi kegiatan CBIB 1 kali		741.503.000	712.272.952	96,05
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Sarana prasarana BPBALP 1 paket	Sarana prasarana BPBALP 1 paket		954.095.040	940.628.958	98,59
<b>IV</b>	<b>PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>100</b>	<b>3.427.218.450</b>	<b>3.128.512.627</b>	<b>91,28</b>
<b>1</b>	<b>Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>			<b>100</b>	<b>3.049.608.450</b>	<b>2.755.539.510</b>	<b>89,12</b>
	Pengawasan Pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 Mil	Penyusunan RPZ Kab. Agam 1 kali, Review rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 1 kali, Pengawasan KKPD 8 kawasan	Penyusunan RPZ Kab. Agam 1 kali, Review rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 1 kali, Pengawasan KKPD, 8 kawasan		1.006.762.250	877.949.114	79,98
	Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil	Forum koordinasi tindak pidana 3 kali, Penyidikan tindak pidana 1 berkas, Pengawasan sumberdaya KP 330 hari	Forum koordinasi tindak pidana 3 kali, Penyidikan tindak pidana 1 berkas, Pengawasan sumberdaya KP 330 hari		1.776.606.200	1.641.718.050	92,41
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Forum Pokmaswas 1 kali, Perlengkapan Pokmaswas 1 Paket	Forum Pokmaswas 1 kali, Perlengkapan Pokmaswas 1 Paket		266.240.000	235.872.346	88,59

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			100	377.610.000	372.973.117	98,77
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	CPIB 1 angkatan, Pembinaan CPPIB 1 angkatan, Pengawasan peredaran benih 1 angkatan	- CPIB 1 angkatan - Pembinaan CPPIB 1 angkatan - Pengawasan peredaran benih 1 angkatan		377.610.000	372.973.117	98,77
V	<b>PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	- Meningkatkan produksi olahan ikan - Meningkatkan ekspor produk perikanan - Pengendalian dan pengawasan mutu olahan - Meningkatkan sarana dan prasarana UPTD		100	6.214.468.510	5.683.609.540	91,46
1	<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			100	677.717.050	635.551.978	93,78
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Pameran promosi 3 event - Pelayanan informasi pasar 1 kali - Peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan	- Pameran promosi 3 event - Pelayanan informasi pasar 1 kali - Peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan		677.717.050	635.551.978	93,78

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			100	2.737.439.810	2.520.322.580	92,06
	Pelaksanaan Bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diversifikasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan 125 entrepreneur</li> <li>- Pelatihan pengolahan ikan 1 lokasi</li> <li>- Sarana prasarana PPMHP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diversifikasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan 125 entrepreneur</li> <li>- Pelatihan pengolahan ikan 1 lokasi</li> <li>- Sarana prasarana PPMHP</li> </ul>		1.186.930.500	1.074.271.584	90,50
	Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan produk perikanan non konsumsi 5 kali</li> <li>- Peningkatan SDM melalui SJMKP 25 org</li> <li>- Pelatihan penerapan GMP/SSOP dalam system HACCP 1 kali</li> <li>- Pengujian sampel, 1 tahun</li> <li>- Pengadaan bahan kimia 1 paket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan produk perikanan non konsumsi 5 kali</li> <li>- Peningkatan SDM melalui SJMKP 25 org</li> <li>- Pelatihan penerapan GMP/SSOP dalam system HACCP 1 kali</li> <li>- Pengujian sampel, 1 tahun</li> <li>- Pengadaan bahan kimia 1 paket</li> </ul>		1.550.509.310	1.446.050.996	93,26
	Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100	2.799.311.650	2.527.734.982	90,30

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forikan 6 event</li> <li>- Gemarikan 6 event</li> <li>- Rehab UPI 3 unit</li> <li>- Sarana pengolahan dan pemasaran 278 unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forikan 6 event</li> <li>- Gemarikan 6 event</li> <li>- Rehab UPI 3 unit</li> <li>- Sarana pengolahan dan pemasaran 278 unit</li> </ul>		2.799.311.650	2.527.734.982	90,30

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>		
2	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>- Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>- Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan</li> </ul>	Kegiatan asuransi nelayan tidak terlaksana karena Pergub terkait asuransi masih berproses di Kemendagri sehingga dasar hukum untuk membayarkan belum ada	-
II	<b>PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		
1	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan</li> <li>- Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap</li> <li>- Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap</li> </ul>	<p>Fish box, mesin diesel kapal, longtail, mesin tempel, gillnet, trammel net masih dibutuhkan oleh nelayan untuk menangkap ikan</p> <p>Rumpon laut dangkal tidak terlaksana karena adanya ketentuan dalam Permen KP Nomor : 18 Tahun 2021 dan belum keluarnya izin konfirmasi kesesuaian ruang laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	Bantuan sarana penangkapan ikan yang berkelanjutan untuk peningkatan produksi dan pendapatan nelayan
2	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap</li> </ul>	Gillnet, mesin longtail, mesin tempel, restocking masih dibutuhkan	Menambah jenis ikan yang akan direstocking

3	<b>Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT</b> - Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT - Penertiban rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	Nelayan masih kesulitan dengan pengurusan izin secara online	Koordinasi dengan DPM PTSP
III	<b>PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		
2	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b> - Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut - Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi dan atau manfaatn atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut dan dikawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi - Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut	Tidak terlaksananya paket tambak budidaya udang vaname air tawar dan air payau	-
IV	<b>PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Tidak terdapat permasalahan	
V	<b>PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		
2	<b>Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar</b> - Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar - Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemntauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	Diversifikasi, Pameran promosi, Forikan dan Gemarikan tidak terdapat permasalahan	-

### 3.1.3.2. Pariwisata

Urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Pada tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.46.036.270.377,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.43.465.455.963,00 atau 94,42%, dengan uraian sebagai berikut :

## 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Rata-rata Pengeluaran Wisatawan	Pemasaran Pariwisata	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (Rp/Hari)	1.609.057	15.706.185*	9.290,47
			Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Rp/Hari)	720.000	712.208*	98,92
II	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Sumatera Barat	1. Pemasaran Pariwisata 2. Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	1,5	1.082*	72.133,33
			Jumlah peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	1,5	22,17*	1.478
III	Meningkatnya Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	1. Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rata-rata lama tinggal wisman(Hari)	3,21	3,80*	118,38
			Rata-rata lama tinggal wisnus (Hari)	1,70	2,50*	147,06
IV	Meningkatnya Produktivitas Industri Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Nilai Produksi Industri Ekonomi Kreatif (Rp)	17,491	17.870	102,46
V	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	(72) BB	(70,22) BB	97,53
VI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	(79) B	(89,67) A	113,51

## Capaian Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif	Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Orang)	1.850	3.859	208,59
2	Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan	Jumlah destinasi wisata unggulan (Kab/Kota)	19	19	100
		Jumlah destinasi wisata kelas dunia (Lokasi)	0	0	0

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan, dengan indikator Kinerja :

- 1) Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara, dengan target kinerja Rp.1.609.057,00/hari dengan realisasi Rp.15.706.185,00

- 2) Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara, dengan target kinerja Rp.720.000,00/hari dengan realisasi Rp.712.208,00

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

- a) Program Pemasaran Pariwisata, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan sub kegiatan :

- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri dengan output :

- 1) Terlaksananya event pariwisata Sumatera Barat.
- 2) Tersedianya bahan promosi pariwisata (cetak, elektronik, online, digital).
- 3) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri.

- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri dengan output :

- 1) Terlaksananya Famtrip.
- 2) Terlaksananya Fasilitasi Dukungan Event Daerah.
- 3) Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pemasaran Melalui Media Sosial.
- 4) Terlaksananya Promosi Pariwisata oleh Pelaku Ekraf.

- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri dengan output :

- 1) Tersedianya data sektoral kepariwisataan.
- 2) Tersedianya dokumen profil kepariwisataan.

- Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, dengan output :

- a. Terlaksananya kerjasama penyebaran informasi pariwisata antar provinsi.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Sumatera Barat, dengan Indikator Kinerja :



- 1) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dengan target kinerja 1,5% dengan realisasi 1,082%.
- 2) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara, dengan target kinerja 1,5% dengan realisasi 22,17%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pemasaran Pariwisata dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan sub kegiatan :

- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri dengan output :

- 1) Terlaksananya event pariwisata Sumatera Barat.
- 2) Tersedianya bahan promosi pariwisata (cetak, elektronik, online, digital).
- 3) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri.

- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri dengan output :

- 1) Terlaksananya Famtrip.
- 2) Terlaksananya Fasilitasi Dukungan Event Daerah.
- 3) Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pemasaran Melalui Media Sosial.
- 4) Terlaksananya Promosi Pariwisata oleh Pelaku Ekraf.

- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri dengan output :

- 1) Tersedianya data sektoral kepariwisataan.
- 2) Tersedianya dokumen profil kepariwisataan.

- Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, dengan output :

- 1) Terlaksananya kerjasama penyebaran informasi pariwisata antar provinsi.

- b) Program Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

(1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi dengan sub kegiatan :

➤ Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi, dengan output :

- 1) Terlaksananya Pembinaan pada Daya Tarik Wisata Halal.
- 2) Terlaksananya Pembinaan pada Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi.

➤ Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi, dengan output :

- 1) Terbinanya desa wisata berbasis agro.
- 2) Terlaksananya apresiasi desa wisata.
- 3) Terlaksananya implementasi CHSE.
- 4) Terlaksananya jelajah WT BOS.
- 5) Terlaksananya sertifikasi CHSE Mandiri Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi.
- 6) Terlaksananya sertifikasi CHSE Mandiri Desa Wisata.
- 7) Terlaksananya sosialisasi Pergub Wisata Halal bagi Aparatur dan Masyarakat.
- 8) Terlaksananya sosialisasi WT BOS.
- 9) Terlaksananya subsidi sertifikasi halal bagi usaha pariwisata.
- 10) Tersedianya papan informasi pada DTW Unggulan Provinsi.
- 11) Tersedianya video profil destinasi DTWU Sumatera Barat.
- 12) Tersusunnya profil desa wisata Sumatera Barat.

(2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan sub kegiatan :

➤ Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan output :

- 1) Tersusunnya review Master Plan Istano Basa Pagaruyung.

➤ Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan output :

- 1) Terlaksananya penghargaan pariwisata Sumbar

melalui Peduli Wisata Award.

- Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan output :
  - 1) Terlaksananya kegiatan Geopark to School / School to Geopark.
  - 2) Terlaksananya sosialisasi Geopark bagi masyarakat sekitar kawasan Geopark.
  - 3) Tersusunnya Master Plan Geopark Solok Selatan dan Geopark Harau.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan, dengan indikator kinerja :

- 1) Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara(hari), dengan target kinerja 1,24 hari dengan realisasi 3,80 hari.
- 2) Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara(hari), dengan target kinerja 1,24 hari dengan realisasi 2,50 hari.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - (1) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Pembinaan dan Pengawasan UsahaPariwisata, dengan output :
      - 1) Terlaksananya Apresiasi Homestay.
    - Fasilitas Sandarisasi Industri dan Usaha Pariwisata, dengan output :
      - 1) Terlaksananya Sertifikasi CHSE Mandiri untuk Restoran dan Homestay.
      - 2) Terlaksananya Sosialisasi TDUP dan sertifikasi CHSE.
- b) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - (1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan, dengan

sub kegiatan :

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, dengan output :
    - 1) Terlaksananya Pembinaan Pokdarwis.
    - 2) Terlaksananya Workshop Sadar Wisata.
  - Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata Tingkat Lanjutan, dengan output :
    - 1) Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata.
  - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata, dengan output :
    - 1) Terlaksananya Sertifikasi kompetensi tenaga kerja Pariwisata.
  - Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata, dengan output :
    - 1) Terfasilitasinya pembentukan LSP Bidang Pariwisata.
    - 2) Terlaksananya koordinasi dalam fasilitasi pembentukan LSP Bidang Pariwisata.
  - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi dan Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, dengan output :
    - 1) Terlaksananya workshop bagi pelaku ekonomi kreatif.
  - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, dengan output :
    - (1) Terlaksananya pengembangan kompetensi SDM Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dengan sub kegiatan :
- Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan output :
    - 1) Terlaksananya Workshop Pelaku Ekraf Untuk Tingkat Pemula.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d. Sasaran IV : Meningkatkan Produktivitas Industri Ekonomi Kreatif.

Dengan Indikator Kinerja :

- 1) Nilai Produksi Industri Ekonomi Kreatif target kinerja 17,491 realiasi 17,870 capaian 102,46%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

- (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, dengan Sub kegiatan :

➤ Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif dengan output :

- 1) Terlaksananya pemetaan dan inventarisasi usaha ekraf berbasis MDI.
- 2) Terlaksananya pemetaan dan inventarisasi usaha ekraf berbasis seni budaya.
- 3) Tersusunnya Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif Sumbar.

➤ Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik, dengan output :

- 1) Terlaksananya Gelar Karya Produk Ekonomi Kreatif Sumbar.

➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif, dengan output :

- 1) Terfasilitasinya kegiatan asosiasi desa kreatif Indonesia (ADKI).
- 2) Terlaksananya Forum Komunikasi Pelaku Ekraf Sumbar.

➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar, dengan output :

- 1) Terlaksananya sosialisasi akses permodalan/pasar.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

- e. Sasaran V : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan Indikator Kinerja :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target kinerja BB 72 dan realisasi BB 70,22 Capaian Kinerja : 97,53%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan pelaksanaan Kegiatan :
  - (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK , PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan).
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output :
      - a. Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan).
      - b. Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah bulanan, semesteran dan tahunan.
  - (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output Gaji dan tunjangan PNS yang dibayarkan.
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output Jumlah ASN yang mendapatkan honor.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dengan output Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran.
  - (3) Administrasi Barang Milik Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Pengamanan Barang Milik Daerah dengan output Jumlah dokumen pengamanan administrasi yang disusun.
    - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output Tersedianya laporan barang milik daerah.
  - (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan output Tersedianya Pakaian

- Dinas Beserta Perlengkapannya.
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan output Jumlah orang yang mengikuti bimtek.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan output Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output :
    - a. Makanan yang disediakan untuk pertemuan dan tamu.
    - b. Snack yang disediakan untuk pertemuan dan tamu.
    - c. Tersedianya bahan logistik kantor.
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan output Jumlah barang yang disediakan dan Jumlah penggandaan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi.
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output Jumlah surat yang

didistribusikan.

- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, dan Listrik dengan output :
  - a. Rekening tagihan air yang dibayarkan.
  - b. Rekening tagihan internet yang dibayarkan.
  - c. Rekening tagihan listrik yang dibayarkan.
  - d. Rekening tagihan telepon yang dibayarkan.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantordengan output :
  - a. Jasa kebersihan kantor.
  - b. Jasa kesehatan jasmani (senam mingguan) - Jasa Kesehatan Rohani (wirid mingguan, program Ramadhan) - Jasa Rohaniwan - Dukungan penerapan new normal.
  - c. Jasa pengamanan kantor.
  - d. Jasa sopir kantor.

(8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V.

f. Sasaran VI : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, dengan indikator kinerja :

- 1) Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi target kinerja 79(B) realisasi kinerja 89,67 Capaian Kinerja 113,51%.

Tahun 2022 Dinas Pariwisata Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dengan target nilai B dengan realisasi A.

Survey tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dinilai



dari 4 bidang yang di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a) Bidang Pemasaran Pariwisata yaitu kegiatan kerjasama dengan Event Organizer.
- b) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif yaitu kegiatan Fasilitasi HKI.
- c) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata yaitu kegiatan Fasilitasi Sertifikasi CHSE.
- d) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu kegiatan Pelatihan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

g. Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat.

- 1) Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
  - a) Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan target capaian 1.850 orang dan realisasi 3.859 orang.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - a) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan, dengan sub kegiatan :
    - Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata Tingkat Lanjutan, dengan output : Terlaksanya Pelatihan Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata.
    - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata, dengan output : Terlaksanya Sertifikasi kompetensi tenaga kerja Pariwisata.
    - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi dan Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, dengan output : Terlaksananya worksho[p bagi pelaku ekonomi kreatif.
    - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, dengan output : Terlaksananya pengembangan kompetensi SDM Ekraf.
  - b) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dengan

sub kegiatan :

- Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan output : Terlaksananya Workshop Pelaku Ekraf Untuk Tingkat Pemula.
- 3) Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan.
- a) Jumlah destinasi wisata unggulan dengan target capaian 19 kab/kota dan realisasi 19 kab/kota
  - b) Jumlah destinasi wisata kelas dunia dengan target capaian 0 lokasi.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Daya Tarik Wisata Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan.
  - (1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi dengan sub kegiatan :
    - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi, dengan output :
      - a. Terlaksananya Pembinaan pada Daya Tarik Wisata Halal.
      - b. Terlaksananya Pembinaan pada Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi.
    - Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi, dengan output :
      - 1. Terbinanya desa wisata berbasis agro.
      - 2. Terlaksananya apresiasi desa wisata.
      - 3. Terlaksananya implementasi CHSE.
      - 4. Terlaksananya jelajah WT BOS.
      - 5. Terlaksananya sertifikasi CHSE Mandiri Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi.
      - 6. Terlaksananya sertifikasi CHSE Mandiri Desa Wisata.
      - 7. Terlaksananya sosialisasi Pergub Wisata Halal bagi Aparatur dan Masyarakat.
      - 8. Terlaksananya sosialisasi WT BOS.
      - 9. Terlaksananya subsidi sertifikasi halal bagi usaha pariwisata.

10. Tersedianya papan informasi pada DTW Unggulan Provinsi.
11. Tersedianya video profil destinasi DTWU Sumatera Barat.
12. Tersusunnya profil desa wisata Sumbar.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				46,036,270,377	43,465,455,963	94.42
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100%	100%	100	11,617,724,636	11,065,066,695	95.24
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85%	85%	100	283,364,000	280,455,181	98.97
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	100	133,744,000	131,684,281	98.46
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen 1 tahun	4 dokumen 1 tahun	100	149,620,000	148,770,900	99.43
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	7,018,509,238	6,687,901,285	95.29
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100	6,671,185,838	6,360,259,087	95.34
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 orang	12 orang	100	305,143,400	286,108,450	93.76
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	42,180,000	41,533,748	98.47
3	Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100	113,750,000	94,330,782	82.93
	Pengamanan Barang Milik Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	85,800,000	68,482,782	79.82
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	27,950,000	25,848,000	92.48
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100	66,035,000	64,461,500	97.62
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65 stel	65 stel	100	45,750,000	45,750,000	100.00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	11 orang	11 orang	100	20,285,000	18,711,500	92.24
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>1,967,475,354</b>	<b>1,962,644,015</b>	<b>99.75</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 jenis	12 jenis	100	100,337,000	100,334,800	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 jenis	20 jenis	100	60,101,700	59,996,650	99.83
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket	100	20,000,000	19,850,000	99.25
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1200 orang 1200 orang 12 bulan	1200 orang 1200 orang 12 bulan	100	563,046,000	562,577,640	99.92
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 jenis 25000 lembar	10 jenis 25000 lembar	100	125,380,000	125,373,600	99.99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9 jenis	9 jenis	100	25,320,000	22,725,000	89.75
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 dokumen	100 dokumen	100	1,073,290,654	1,071,786,325	99.86
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>395,150,238</b>	<b>393,905,600</b>	<b>99.69</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 paket	2 paket	100	395,150,238	393,905,600	99.69
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>1,229,440,806</b>	<b>1,048,683,740</b>	<b>85.30</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 surat	100 surat	100	3,000,000	2,905,000	96.83
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	5340 meter kubik 12 bulan 12597 KWH 17160 menit	5340 meter kubik 12 bulan 12597 KWH 17160 menit	100	316,114,000	290,928,352	92.03
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 orang 12 bulan 7 orang 6 orang	5 orang 12 bulan 7 orang 6 orang	100	910,326,806	754,850,388.02	82.92
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>544,000,000</b>	<b>532,684,592</b>	<b>97.92</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	10 unit	100	294,400,000	289,336,506	98.28
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80 Unit	80 Unit	100	150,000,000	144,512,500	96.34

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	99,600,000	98,835,586	99.23
<b>II</b>	<b>PROGRAM DAYA TARIK WISATA DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>1 destinasi</b>	<b>1 destinasi</b>	<b>100</b>	<b>6,772,604,600</b>	<b>6,269,787,582</b>	<b>92.58</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>	<b>7 DTW</b>	<b>7 DTW</b>	<b>100</b>	<b>4,075,228,000</b>	<b>3,781,262,000</b>	<b>92.79</b>
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3 DTW 6 DTW	3 DTW 6 DTW	100	234,462,000	233,889,520	99.76
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	50 desa wisata 1 kali 4 kali 14 kali 19 DTW 30 desa wisata 4 kali 8 kali 15 usaha pariwisata 9 DTW 1 paket 1 dokumen	50 desa wisata 1 kali 4 kali 14 kali 19 DTW 30 desa wisata 4 kali 8 kali 15 usaha pariwisata 9 DTW 1 paket 1 dokumen	100	3,840,766,000	3,547,372,480	92.36
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>	<b>1 DTW</b>	<b>1 DTW</b>	<b>100</b>	<b>2,113,170,600</b>	<b>1,958,301,712</b>	<b>92.67</b>
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	100	448,915,100	388,986,570	86.65
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 kegiatan	1 kegiatan	100	568,020,000	496,718,070	87.45
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	4 kali 5 kali 2 dokumen	4 kali 5 kali 2 dokumen	100	1,096,235,500	1,072,597,072	97.84
<b>3</b>	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>584,206,000</b>	<b>530,223,870</b>	<b>90.76</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 kegiatan	1 kegiatan	100	256,530,000	233,239,220	90.92
	Fasilitasi Sandarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	12 sertifikat 2 kali	12 sertifikat 2 kali	100	327,676,000	296,984,650	90.63
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.50%</b>	<b>100</b>	<b>9,243,225,041</b>	<b>8,304,548,795</b>	<b>89.84</b>
		<b>1.50%</b>	<b>1.50%</b>	<b>100</b>			
<b>1</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>8 kegiatan</b>	<b>8 kegiatan</b>	<b>100</b>	<b>9,243,225,041</b>	<b>8,304,548,795</b>	<b>89.84</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Bail Dalam dan Luar Negeri	8 kali 2 jenis	8 kali 2 jenis	100	6,718,648,000	5,789,175,296	86.17
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	30 orang 2 event 60 konten 23 kali	30 orang 2 event 60 konten 23 kali	100	1,297,140,000	1,294,672,882	99.81
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100	1,062,184,000	1,056,685,259	99.48
	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 kerjasama	3 kerjasama	100	165,253,041	164,015,358	99.25
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>2 Produk</b>	<b>2 Produk</b>	<b>100</b>	<b>3,272,229,500</b>	<b>3,094,363,748</b>	<b>94.56</b>
<b>1</b>	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>2,604,935,000</b>	<b>2,484,663,907</b>	<b>95.38</b>
	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100	732,936,500	696,718,562	95.06
	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	5 kali	5 kali	100	1,452,454,900	1,374,078,445.39	94.60
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	2 kali 4 kali	2 kali 4 kali	100	293,056,500	291,172,800	99.36
	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	3 kali	3 kali	100	126,487,100	122,694,100	97.00
<b>2</b>	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>100</b>	<b>667,294,500</b>	<b>609,699,841</b>	<b>91.37</b>
	Pengembangan Sistem Pemasaran	1 kali 1 vidio 1 vidio	1 kali 1 vidio 1 vidio	100	371,055,500	330,297,796	89.02
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	20 sertifikat 50 sertifikat 2 kali 2 kali	20 sertifikat 50 sertifikat 2 kali 2 kali	100	296,239,000	279,402,045	94.32

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
V	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	296 orang	296 orang	100	15,130,486,600	14,731,689,143	97.36
1	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>	1270 orang	1270 orang	100	14,185,726,600	13,823,569,863	97.45
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	14 Pokdarwis 3860 orang	14 Pokdarwis 3860 orang	100	6,791,406,000	6,644,893,743	97.84
	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata Tingkat Lanjutan	400 orang	400 orang	100	690,230,600	627,435,300	90.90
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	250 orang	250 orang	100	785,770,000	732,813,274	93.26
	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	1 kegiatan 1 kali	1 kegiatan 1 kali	100	7,371,000	6,952,800	94.33
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi dan Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	350 orang	350 orang	100	441,497,000	397,872,876	90.12
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1350 orang	1350 orang	100	5,469,452,000	5,413,601,870	98.98
2	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	4 Pelaku	4 Pelaku	100	944,760,000	908,119,280	96.12
	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	700 orang	700 orang	100	944,760,000	908,119,280	96.12

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah</b>		
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Realisasi anggaran kegiatan tidak mencapai target karena tagihan klaim dibawah standar harga.	Lebih selektif dalam merencanakan asuransi untuk bangunan, kendaraan dan baliho
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		

No	Program/ Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Realisasi anggaran kegiatan tidak mencapai target karena sisa harga pembelian bahan bacaan.	Lebih selektif dalam merencanakan pembelian bahan bacaan
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Realisasi anggaran kegiatan tidak mencapai target karena efisiensi anggaran	Lebih selektif dalam penyusunan anggaran jasa pelayanan umum kantor
<b>II</b>	<b>PROGRAM DAYA TARIK WISATA DESTINASI PARIWISATA</b>		
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>		
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Realisasi anggaran tidak mencapai target karena adanya sisa kontrak dan efisiensi perjalanan dinas	Tetap melaksanakan kebijakan
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Realisasi anggaran kegiatan tidak mencapai target karena adanya sisa kontrak dan efisiensi perjalanan dinas	Tetap melaksanakan kebijakan
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>		
<b>1</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>		
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Realisasi anggaran kegiatan tidak mencapai target karena batalnya perjalanan dinas luar negeri dan efisiensi perjalanan dinas	Tetap melaksanakan kebijakan
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>		
<b>2</b>	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>		
	Pengembangan Sistem Pemasaran	Realisasi anggaran kegiatan tidak mencapai target karena efisiensi perjalanan dinas	Tetap melaksanakan kebijakan
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Tidak ada permasalahan	

### 3.1.3.3. Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran Rp.309.667.189.150,00 realisasi Rp.280.391.584.065,38 dengan rincian sebagai berikut :

#### 3.1.3.3.1. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dan Perkebunan

Urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.226,428,220,296,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.211,876,105,560.38 atau 93.57%.

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja



No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (%)	Target Produksi (ton)	Realisasi Produksi (ton)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	Meningkatnya Produksi Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	<b>1. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</b> <b>2. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b> <b>3. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b> <b>4. Perizinan Usaha Pertanian</b> <b>5. Penyuluhan Pertanian</b>	Persentase peningkatan Produksi Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura						
			- Kakao	1	43.269	43.290	100,05		
			- Karet	1	147.041	147.415	100,25		
			- Kopi	1	14.195	14.210	100,11		
			- Kelapa sawit	1	675.291	675.500	100,03		
			- Kelapa	1	80.155	80.250	100,12		
			- Gambir	1	14.110	14.190	100,57		
			- Padi	2	1.330.381	1.393.243	104,73		
			- Jagung	3,2	958.450	979.427	102,19		
			- C a b e	2	116.924	140.698	120,33		
			- Bawang Merah	2	202.370	224.666	111,02		
			- Manggis	2	70.353	82.204	116,85		
			- Jeruk	1	119.764	191.395	159,81		
II	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Nilai Evaluasi Akuntabilitas	74%	81,82	110,57			

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

- a) Sasaran I : Meningkatkan Produksi Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan indikator kinerja yaitu :
- 1) Persentase Peningkatan produksi Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura.
  - 2) Kakao (Target Kinerja : 1% dan 43.269 ton dengan Realisasi Kinerja : 43.290 ton).
  - 3) Karet (Target Kinerja : 1% dan 147.041 ton dengan Realisasi Kinerja : 147.415 ton).
  - 4) Kopi (Target Kinerja : 1% dan 14.195 ton dengan Realisasi Kinerja 14.210 ton).
  - 5) Kelapa Sawit (Target Kinerja : 1% dan 675.291 ton dengan Realisasi Kinerja : 675.500 ton).
  - 6) Kelapa (Target Kinerja : 1% dan 80.155 ton dengan Realisasi Kinerja : 80.250 ton).
  - 7) Gambir (Target Kinerja : 1% dan 14.110 ton dengan Realisasi Kinerja : 14.190 ton).
  - 8) Padi (Target Kinerja : 2% dan 1.330.381 ton dengan Realisasi Kinerja : 1.393.243 ton).
  - 9) Jagung (Target Kinerja : 3,2% dan 958.450 ton dengan Realisasi Kinerja : 979.427 ton).

- 10) Cabe (Target Kinerja : 2% dan 116.924 ton dengan Realisasi Kinerja : 140.698 ton).
- 11) Bawang Merah (Target Kinerja : 2% dan 202.370 ton dengan Realisasi Kinerja : 224.666 ton).
- 12) Manggis (Target Kinerja : 2% dan 70.353 ton dengan Realisasi Kinerja : 82.204 ton).
- 13) Jeruk (Target Kinerja : 1% dan 119.764 ton dengan Realisasi Kinerja : 191.395 ton).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dicapai dengan pelaksanaan peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura melalui kegiatan :
  - (1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, dengan Sub kegiatan :
    - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian, dengan output berupa Terlaksananya Pengadaan Sarana, Alat Mesin Pertanian Pra Panen, panen dan pasca panen komoditas Perkebunan dan Pangan dan terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian di 19 Kabupaten/ Kota.
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, dengan output Terlaksananya pemantauan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di 19 Kab/Kota.
  - (2) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, dengan Sub kegiatan :
    - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih, dengan output Peningkatan peresentase penggunaan benih unggul, Terlaksananya penyediaan benih bersertifikat, Terlaksananya sertifikasi benih 4 komoditi.
    - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, dengan output terlaksananya Penerapan Good Agriculture Practice (GAP), Good Handling Practice (GHP) pada komoditi hortikultura, penyediaan benih hortikultura, terlaksananya pelatihan teknis dan pengembangan kawasan hortikultura.
    - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran

- Benih/Bibit Tanaman Pangan, dengan output terlaksananya Penerapan Good Agriculture Practice (GAP), Good Handling Practice (GHP) pada komoditi Tanaman Pangan, terlaksananya pelatihan teknis dan pengembangan kawasan tanaman pangan, terlaksananya penambahan ruang lingkup akreditasi.
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan, dengan output terlaksananya Penerapan Good Agriculture Practice (GAP), Good Handling Practice (GHP) pada komoditi Tanaman Perkebunan, terlaksananya pelatihan teknis, terlaksananya pengawasan sumber benih perkebunan.
- b) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dicapai dengan pelaksanaan peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura melalui kegiatan :
- (1) Penataan Prasarana Pertanian, dengan Sub kegiatan :
- Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, dengan output terlaksananya pengembangan kampung komoditi TPH dan pengembangan Kawasan komoditi TPH.
  - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, dengan output terlaksananya pengembangan dan fasilitasi Kawasan berbasis komoditi.
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani, dengan output terlaksananya jalan usaha tani.
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani, dengan output terlaksananya pembangunan embung dan pengelolaan serta pendampingan lahan irigasi.
  - Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian, dengan output terpeliharanya UPT dan Laboratorium lingkup UPTD serta surveilan reakreditasi labor penguji mutu alsintan.
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, dengan output terlaksananya fasilitasi kemitraan komoditas TPH, penyusunan dan updating data TPHP serta penumbuhan UP3HP.

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya, dengan output terlaksananya pembangunan Gedung Balai diklat serta sarana pendukungnya serta pembangunan prasarana pendukung di UPTD.
- c) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dilaksanakan untuk pencapaian peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura melalui kegiatan :
- (1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, dengan Sub kegiatan :
- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dengan output terlaksananya pengawasan perlindungan tanaman, pelatihan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), was anwasan mutu standar pesetisida.
  - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dengan output terlaksananya pembinaan dampak perubahan iklim TPH pada Kabupaten/Kota.
  - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dengan output terlaksananya pelatihan lapangan pengendalian OPT dan pelatihan penerapan klinik PHT.
  - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan output terlaksananya sosialisasi dan pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
- d) Program Perizinan Usaha Pertanian dilaksanakan untuk pencapaian peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura melalui kegiatan :
- (1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub kegiatan :
- Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian, dengan output terlaksananya penyusunan pelayanan public pemberian izin usaha.

- Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya penilaian klasifikasi kelas kebun usaha.
  - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, dengan output terlaksananya pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian.
- e) Program Penyuluhan Pertanian dilaksanakan untuk pencapaian peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura melalui kegiatan :
- (1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, dengan Sub kegiatan :
    - Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN, dengan output fasilitasi dan pembinaan THL POPT serta penilaian dan penghargaan serta Bimtek petugas POPT.
    - Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta, dengan output terlaksananya kegiatan SDM Penyuluhan dan temu teknis kelembagaan teknis.
  - (2) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, dengan Sub kegiatan :
    - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian, dengan output terlaksananya Sekolah Lapangan Pertanian Organik (SLAPO), penyebaran informasi dan temu teknis pertanian organik.
    - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani, dengan output terlaksananya training penyuluh pertanian, bimbingan tekniss, IPDMIP, Pelaksanaan Pra Penas dan koordinasi persiapan Penas Tani Nelayan XIV.
  - (3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, dengan Sub kegiatan :
    - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani, dengan output terlaksananya festival, bimbingan teknis dan koorporasi komoditi.
    - Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani, dengan output terlaksananya bimtek bimtek penyuluhan keamanan pangan untuk sertifikasi PIRT.

- Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koperasi Petani, dengan output terlaksananya penilaian kelayakan manajemen koperasi petani.
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani, dengan output terlaksananya Sekolah lapangan pengembangan padi dan jagung.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai dengan Target dalam Dokumen Anggaran

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100	100	<b>56.153.781.591</b>	<b>53.053.411.960,38</b>	<b>94,48</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4	100	<b>1.122.989.150</b>	<b>1.083.506.236</b>	<b>96,48</b>
		Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4	100			
		Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	6	100			
		Terlaksananya Penyusunan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	1	100			
2	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	6	100	<b>460.000.000</b>	<b>450.938.068</b>	<b>98,03</b>
3	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	3	100	<b>279.316.500</b>	<b>274.140.970</b>	<b>98,15</b>
4	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	3	100	<b>383.672.650</b>	<b>358.427.198</b>	<b>93,42</b>
5	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	500	100	<b>43.472.371.453</b>	<b>41.157.823.433</b>	<b>94,68</b>
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor	42	100			
		Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	18	100			

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1	100			
		Terlaksananya Administrasi Keuangan SKPD	12	100			
		Terlaksananya adm keuangan uptd	12	100			
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dibayarkan gaji dan tunjangannya	401	100	42.392.842.453	40.154.032.083	94,72
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	30	100	879.529.000	814.428.350	92,60
		Terlaksananya pembayaran honor pengelolaan keuangan	12	100			
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	18	100	150.000.000	141.114.250	94,08
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semester	18	100	50.000.000	48.248.750	96,50
10	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumah dokumen laporan barang milik daerah	60	100	428.700.000	397.569.692	92,74
		Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	54	100			
		Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	15	100			
		Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	15	100			
		Terlaksananya Administrasi BMD	13	108			
		Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	12	100			
		Terlaksananya administrasi BMD UPTD	12	100			
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	55	145	210.000.000	191.901.046	91,38

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	<b>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	34	100	<b>218.700.000</b>	<b>205.668.646</b>	<b>94,04</b>
		Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD SKPD	12	100			
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasn BMD	12	100			
		Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah	12	100			
		Terlaksananya penatausahaan BMD SKPD	24	100			
		Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD SKPD	12	100			
13	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	5	100	<b>365.750.000</b>	<b>319.685.257</b>	<b>87,41</b>
		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	550	100			
		Terlaksananya Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	100			
		Terlaksananya adm kepegawaian uptd	12	100			
		Terlaksananya administrasi kepegawaian uptd	12	100			
		Terlaksananya adm kepegawaian uptd	12	100			
		Terlaksananya adm kepegawaian daerah	12	100			
14	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	450	93	<b>315.750.000</b>	<b>297.447.875</b>	<b>94,20</b>
15	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</b>	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	2	100	<b>50.000.000</b>	<b>22.237.382</b>	<b>44,47</b>
16	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya administrasi umum skpd	12	100	<b>1.703.402.812</b>	<b>1.586.630.085</b>	<b>93,14</b>
		Terlaksananya adm umum uptd	12	100			
		Terlaksananya penyediaan adm umum	12	100			



No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya adm upt	12	100			
		terlaksananya adm umum perangkat daerah	12	100			
<b>17</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	Tersedianya kabel	45	100	<b>75.000.000</b>	<b>74.720.861</b>	<b>99,63</b>
		Tersedianya Komponen bola lampu	25	100			
		Tersedianya bola lampu	12	100			
		Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	100			
<b>18</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	Pegadaan laptop	1	100	<b>525.141.365</b>	<b>508.795.000</b>	<b>96,89</b>
		Tersedianya pc	3	100			
		Pengadaan printer	2	100			
		tersedianya laptop	1	100			
		Tersedianya printer	9	100			
		Tersedianya laptop	4	100			
		Terlaksananya penyediaan notebook	3	100			
<b>19</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	Terlaksananya makan minum pertemuan	15	100	<b>216.180.000</b>	<b>202.766.800</b>	<b>93,80</b>
		Tersedianya alat tulis kantor	20	100			
		Tersedianya alat tulis kantor	22	440			
		Tersedianya makan minum rapat	5	100			
		Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	12	100			
<b>20</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Terlaksananya penggandaan	75000	100	<b>158.750.000</b>	<b>157.488.500</b>	<b>99,21</b>
		Tersedianya cetak map OPD	2000	100			
		Terlaksananya cetak map OPD	500	100			
		terlaksananya penyediaan barang cetakan	12	100			
		Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	100			
<b>21</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan</b>	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	100	<b>136.585.000</b>	<b>99.080.000</b>	<b>72,54</b>

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya penyediaan bahan bacaan	48	100			
22	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	50	100	<b>591.746.447</b>	<b>543.778.924</b>	<b>91,89</b>
23	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya pengadaan BMD SKPD	10	100	<b>791.613.400</b>	<b>778.831.900</b>	<b>98,39</b>
		Terlaksananya pengadaan BMD	7	100			
		terlaksananya pengadaan BMD	2	100			
		Terlaksananya pengadaan mebel	2	100			
24	<b>Pengadaan Mebel</b>	tersedianya pompa air	4	400	<b>362.064.900</b>	<b>357.946.000</b>	<b>98,86</b>
		tersedianya AC split	6	100			
		Tersedianya meja	40	100			
		tersedianya microphone wireless	12	100			
		Tersedianya kursi	120	100			
		Terlaksananya pengadaan lemari arsip	3.1	#VALUE !			
		terlaksananya pengadaan mebel	2	33			
		terlaksananya pengadaan kursi kerja	20	100			
		terlaksananya pengadaan meja kerja	5	100			
25	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	Terlaksananya pengadaan becak motor	1	100	<b>280.574.500</b>	<b>274.229.900</b>	<b>97,74</b>
		Tersedianya laptop	7	100			
		Terlaksananya pengadaan mesin potong rumput	6	100			
		Tersedianya genset	2	100			
		Tersedianya printer	2	100			
26	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Terlaksananya pengadaan AC	3	100	<b>98.486.000</b>	<b>96.221.000</b>	<b>97,70</b>
		Terlaksananya pengadaan kanopi paker	1	100			
27	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Terlaksananya pembangunan pos jaga pada UPTD BBI	345	100	<b>50.488.000</b>	<b>50.435.000</b>	<b>99,90</b>

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
28	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan skpd	12	100	<b>6.240.893.976</b>	<b>5.765.470.342</b>	<b>92,38</b>
		Terlaksananya penunjang urusan daerah	1	100			
		Terlaksananya urusan penunjang	12	100			
		Terlaksananya penunjang urusan updt	12	100			
		Terlaksananya jasa penunjang urusan updt	12	100			
		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang updt	12	100			
29	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12	100	<b>71.405.000</b>	<b>70.987.248</b>	<b>99,41</b>
30	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	100	<b>1.628.596.603</b>	<b>1.364.805.016</b>	<b>83,80</b>
31	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	100	<b>168.360.000</b>	<b>167.059.000</b>	<b>99,23</b>
		Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	6	100			
		Terlaksananaya penyediaan jasa peralatn dan perlengkapan kantor	12	100			
32	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	100	<b>4.372.532.373</b>	<b>4.162.619.078</b>	<b>95,20</b>
33	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya pemeliharaan BMD skpd	12	100	<b>2.028.060.800</b>	<b>1.963.895.015,38</b>	<b>96,84</b>
		Terlaksananya pemeliharaan BMD	12	100			
		Terlaksananya pemeliharaan BMD	12	100			
		Terlaksananya jasa penunjang updt	12	100			
34	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	Terlaksanya operasional kendaraan dinas	1	100	<b>476.704.600</b>	<b>440.960.900</b>	<b>92,50</b>

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	34	100			
		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12	100			
<b>35</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	48	100	<b>617.225.000</b>	<b>596.799.400</b>	<b>96,69</b>
		Terlaksananya operasional kendaraan dinas	1	100			
		Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	12	100			
		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12	100			
<b>36</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	60	100	<b>194.255.200</b>	<b>187.486.000</b>	<b>96,52</b>
		Terlaksananya pemeliharaan excavator	1	100			
		Terlaksananya pemeliharaan TR 4	5	100			
<b>37</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	1	100	<b>679.876.000</b>	<b>678.707.687,38</b>	<b>99,83</b>
		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1	100			
<b>38</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Terlaksananya pemeliharaan/rehab sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	100	<b>60.000.000</b>	<b>59.941.028</b>	<b>99,90</b>
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Persentase Peningkatan sarana TPHP	5	100	<b>107.219.834.683</b>	<b>98.086.047.323</b>	<b>91,48</b>
<b>1</b>	<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	Terlaksananya Pengadaan Sarana, Alat Mesin Pertanian Pra Panen, panen dan pasca panen komoditas Perkebunan dan Pangan	6485	100	<b>53.890.466.352</b>	<b>51.097.265.688</b>	<b>94,82</b>
		Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian	76	400			

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian</b>	Terlaksananya Pengadaan Sarana, Alat Mesin Pertanian Pra Panen, panen dan pasca panen komoditas Perkebunan dan Pangan	6485	100	<b>53.733.362.152</b>	<b>50.952.161.635</b>	<b>94,82</b>
		Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian	76	400			
		Terlaksananya pengadaan dongkrak	10	100			
		Terlaksananya pengadaan kualii	22	100			
		Terlaksananya bantuan pupuk organik granul untuk kelompok tani	385	100			
		Terlaksananya fasilitasi sarana pasca panen jahe	5	100			
		Terlaksananya pengadaan atabela	10	100			
		Terlaksananya dryer UV	3	100			
		Terlaksananya pengadaan mesin press gambir	4	100			
		Terlaksananya pengadaan rumah kempa gambir	4	100			
		Terlaksananya SL gambir	4	100			
		Terlaksananya bantuan pupuk NPK Non subsidi untuk kelompok tani	8150	100			
		Terlaksananya pengadaan mesin potong rumput	486	100			
		Terlaksananya becak motor	96	100			
		Terlaksananya kegiatan prototype alsintan	5	100			
		Terlaksananya pengadaan atabela padi manual	1	100			
		Kemasan packing beras plastic	4000	10			
		Terlaksananya pengadaan APPO	3	100			
		Terlaksananya pengadaan combine harvester	20	100			
		Terlaksananya pengadaan corn sealer	78	100			
		Terlaksananya pengadaan power thresher	108	100			

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya uv dryer	5	100			
		Terlaksananya kegiatan bengkel keliling	1	100			
		Terlaksananya pendampingan penyusunan RDKK	19	100			
		Terlaksananya pengadaan cultivator	404	100			
		Terlaksananya pengadaan handsprayer	820	100			
		Terlaksananya pengadaan pompa air	28	100			
		Terlaksananya pengadaan rotary	38	100			
		Terlaksananya pengadaan TR 2	536	100			
		Terlaksananya pengadaan TR 4	8	100			
		Terlaksananya pengelolaan brigade alsintan	18	100			
<b>3</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	19	100	<b>157.104.200</b>	<b>145.104.053</b>	<b>92,36</b>
<b>4</b>	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	19	100	<b>53.329.368.331</b>	<b>46.988.781.635</b>	<b>88,11</b>
<b>5</b>	<b>Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih</b>	Peningkatan peresentase penggunaan benih unggul	60	100	<b>1.009.707.460</b>	<b>1.007.768.963</b>	<b>99,81</b>
		Terlaksananya nagari benih	30	100			
		Terlaksananya pembinaan kelompok penangkar	100	100			
		Terlaksananya pendaftaran/pelep asan varietas	5	100			
		Terlaksananya penyediaan benih bersertifikat	2500	100			
		tersedianya pohon induk yang determinasi sebagai sumber benih semusim	300	100			
		Terlaksananya sertifikasi benih perkebunan	1500000	100			
<b>6</b>	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura</b>	Terlaksananya Penerapan GAP/SOP Sayur (Bawang Merah)	10	100	<b>9.106.980.408</b>	<b>8.678.835.195</b>	<b>95,30</b>

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya Penerapan GHP/SOP tanaman hortikultura	5	100			
		Pelatihan Pengolahan Hasil Komoditas Hortikultura	1	100			
		Terlaksananya Pelatihan Teknis Agribisnis Komoditas Hortikultura	1	100			
		Terlaksananya Penerapan GAP/SOP Cabe	75	100			
		Terlaksananya Penerapan GAP/SOP Jeruk	50	100			
		Terlaksananya Penerapan GAP/SOP Kentang	1	100			
		Terlaksananya Penerapan GAP/SOP Manggis	150	100			
		pengembangan benih horti	50000	100			
		Terlaksananya agrowisata BBI	3	100			
		Terlaksananya pengembangan tanaman pada Kawasan	30000	100			
<b>7</b>	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan</b>	Terlaksananya Pengadaan Pupuk Organik Eco Farming	164	100	<b>25.965.553.960</b>	<b>21.846.518.324</b>	<b>84,14</b>
		Terlaksananya pengembangan porang	198000	100			
		Terlaksananya penyediaan benih/bibit jagung	128700	100			
		Terlaksananya Pengadaan Bibit Talas Beneng	25000	100			
		Terlaksananya Pengadaan Pupuk Kandang	21500	100			
		Terlaksananya penyediaan benih/bibit padi	522050	100			
		Terlaksananya SL PTT Padi (Jarwo)	5	100			
		Terlaksananya perbanyak benih kacang tanah	2	100			
		Terlaksananya perbanyak benih padi	10	100			
		Pertemuan petani/kelompok tani organik bersertifikat	3	100			

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya bimtek inspektor LSO	3	100			
		Terlaksananya iuran tahunan LSO	1	100			
		Terlaksananya penambahan ruang lingkup akreditasi LSO	1	100			
		Terlaksananya witness LSO oleh KAN	1	100			
		Terlaksananya workshop penyusunan dokumen sistem mutu penambahan ruang lingkup LSO	1	100			
<b>8</b>	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan</b>	Terlaksananya penyaluran benih bersertifikat untuk tanaman kelapa sawit	67340	100	<b>17.247.126.503</b>	<b>15.455.659.153</b>	<b>89,61</b>
		Terlaksananya penyaluran kecambah kelapa sawit	8000	100			
		Terlaksananya penyaluran benih bersertifikat untuk tanaman kopi arabika	123635	100			
		Terlaksananya penerapan GAP/SOP Gambir	5	100			
		Terlaksananya penyaluran benih bersertifikat untuk tanaman aren	1359	100			
		Terlaksananya sosialisasi dan peningkatan sdm barista muda minang	1	100			
		Terlaksananya penyaluran benih bersertifikat untuk tanaman kopi robusta	47778	100			
		Terlaksananya penyaluran benih bersertifikat untuk tanaman pinang batara	16000	100			
		Terlaksananya penyaluran benih bersertifikat untuk tanaman kelapa	39805	100			
		Terlaksananya penyaluran benih bersertifikat untuk tanaman karet	5300	100			
		Terlaksananya penyaluran benih bersertifikat untuk tanaman pinang	57686	100			
		Terlaksananya GAP Karet	100	100			



No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya GAP/SOP Aren	10	100			
		Terlaksananya GAP/SOP Cengkeh	252	100			
		Terlaksananya GAP/SOP Kakao	200000	100			
		Terlaksananya GAP/SOP Kayu Manis	20	33			
		Terlaksananya GAP/SOP kelapa	350000	100			
		Terlaksananya GAP/SOP Kopi	250000	100			
		Terlaksananya GAP/SOP Pala	19	100			
		Terlaksananya GAP/SOP Pinang	200000	100			
		Terlaksananya GAP/SOP Sawit	75000	100			
		Terlaksananya GAP/SOP Sereh Wangi	10	100			
		Terlaksananya GAP/SOP Tembakau	5	100			
		Terlaksananya GHP Gambir	1	100			
		Terlaksananya GHP Kakao	3	100			
		Terlaksananya GHP Karet	2	100			
		Terlaksananya GHP Kelapa Korporasi	1	100			
		Terlaksananya GHP Kopi	1	100			
		Terlaksananya GHP Nilam	1	100			
		Terlaksananya GHP Sereh Wangi	1	100			
		Terlaksananya GHP Tembakau	1	100			
		Terlaksananya SL gambir	74	100			
		Terlaksananya SL Kakao	60	100			
		Terlaksananya SL Kelapa	24	100			
		Terlaksananya SL Kopi	60	100			
		Terlaksananya SL Tembakau	60	100			
		Terlaksananya pembinaan produsen benih perkebunan	75	100			
		Terlaksananya Penetapan kebun sumber benih tanaman perkebunan	1	100			
		Terlaksananya pengawasan mutu benih dan peredaran benih perkebunan	2000000	100			

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya pengawasan sumber benih perkebunan	45	100			
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	5	100	<b>49.827.956.622</b>	<b>48.526.102.398</b>	<b>97,39</b>
<b>1</b>	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	Terlaksananya Pengembangan dan Rehabilitasi jaringan irigasi tersier	15000	100	<b>49.827.956.622</b>	<b>48.526.102.398</b>	<b>97,39</b>
		Terlaksananya penataan prasarana pertanian	27	100			
		Terlaksananya penataan prasarana	1	100			
		terlaksananya penataan prasarana pertanian	19	100			
		Terlaksananya Pengadaan Sarana, Alat Mesin Pertanian Pra Panen, panen dan pasca panen komoditas Perkebunan dan Pangan	10	100			
<b>2</b>	<b>Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian</b>	Pengembangan kampung buah jeruk	7,5	100	<b>1.466.280.900</b>	<b>1.366.222.364</b>	<b>93,18</b>
		Terlaksananya pawai hari kemerdekaan	1	100			
		Terlaksananya promosi tanaman hortikultura	1	100			
		Terlaksananya bimtek peningkatan SDM kelompok pengolahan hasil pertanian	30	100			
		Terlaksananya pelatihan landscape tanaman hias	1	100			
		Terlaksananya pertemuan apresiasi kelompok UP3HP	30	100			
		Terlaksananya even tanaman hortikultura (pameran tanaman hias dan festival buah)	2	100			
		Terlaksananya bimtek inovasi produk olahan hasil pertanian	30	100			

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya pertemuan pelayanan informasi pasar (PIP)	2	100			
		Pengembangan kampung buah alpukat	5	100			
		Pengembangan kampung buah durian	5	100			
		Pengembangan kampung buah manggis	5	100			
		Pengembangan kampung buah naga	5	100			
		Pengembangan kampung sayur	2	100			
		Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung	47500	100			
		Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi	5	100			
<b>3</b>	<b>Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian</b>	Terlaksananya pengembangan hortikultura organik	5	100	<b>200.000.000</b>	<b>199.970.400</b>	<b>99,99</b>
		Terlaksananya pengembangan kopi organik	5	100			
		Terlaksananya pengembangan padi organik	233	100			
		Terlaksananya fasilitasi komoditas organik	10	100			
<b>4</b>	<b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani</b>	Terlaksananya Jalan usaha tani di kebun kopi	1	100	<b>17.945.336.635</b>	<b>17.409.100.348</b>	<b>97,01</b>
<b>5</b>	<b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani</b>	Terlaksananya pembangunan embung di kebun kopi	10	100	<b>7.126.337.554</b>	<b>7.069.284.426</b>	<b>99,20</b>
		Terlaksananya pengelolaan dan pendampingan kegiatan lahan irigasi dan pembiayaan	12	100			
<b>6</b>	<b>Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian</b>	Terlaksananya pemeliharaan upt dan labor	4	100	<b>525.000.000</b>	<b>521.222.848</b>	<b>99,28</b>
		Terlaksananya rehab uptd	1	100			
		Pemeliharaan Lab. Pestisida dan Lab Alahan Panjang	2	100			

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya pengadaan peralatan uji	3	100			
		Terlaksananya pengujian mutu alsintan	10	100			
		Terlaksananya surveylen reakreditasi labor penguji mutu alsintan	1	100			
<b>7</b>	<b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</b>	Terlaksananya fasilitasi asosiasi petani komoditas hortikultura	2	100	<b>1.627.194.735</b>	<b>1.498.443.870</b>	<b>92,09</b>
		Terlaksananya fasilitasi kemitraan komoditas Hortikultura	2	100			
		Terlaksananya register lahan hortikultura	150	100			
		Pembinaan dan Penumbuhan UP3HP	50	100			
		Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit	24	100			
		Peningkatan kualitas dan akses pemasaran hasil pertanian berupa fasilitasi asosiasi petani komoditas pertanian	2	100			
		penyusunan dan updating data TPHP	19	100			
		Terlaksananya fasilitasi kemitraan komoditas perkebunan	10	100			
<b>8</b>	<b>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya</b>	Terlaksananya pembangunan gedung Balai Diklat serta sarana pendukungnya	1	100	<b>20.937.806.798</b>	<b>20.461.858.142</b>	<b>97,73</b>
		Terlaksananya pembangunan parit batas lahan pada Satgas BBI suka Menanti	3010	100			
		Terlaksananya pemeliharaan asrama Bandar Buat	1	100			
		Terlaksananya rehab uptd	3	100			
		Terlaksananya pemeliharaan upt dan labor	2	100			
		Terlaksananya rehab gedung UPTD	2	100			

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN</b>	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,63	100	<b>3.276.676.300</b>	<b>3.020.536.440</b>	<b>92,18</b>
1	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana	19	100	<b>3.276.676.300</b>	<b>3.020.536.440</b>	<b>92,18</b>
		Terlaksananya Pengendalian Hama Terpadu ( PHT ) dan Organisme Pengganggu Tanaman ( OPT ) serta Pengendalian Dampak Iklim Pertanian	170	96			
2	<b>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</b>	Pengawasan perlindungan tanaman perkebunan dan pembinaan regu pengendali OPT	11	100	<b>2.361.593.900</b>	<b>2.158.332.200</b>	<b>91,39</b>
		Pelatihan PHT pengendalian OPT Kopi	2	100			
		Pelatihan lapangan pengendalian OPT Perkebunan	2	100			
		Gerakan pengendalian hama utama tanaman perkebunan	4	100			
		Pelatihan penerapan PHT pada pengendalian OPT Tembakau	2	100			
		Klinik PHT Kakao	3	100			
		Gerakan pengendalian OPT Cabe	110	100			
		Gerakan pengendalian OPT Jeruk	110	110			
		Gerakan pengendalian OPT Manggis	100	100			
		Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan	45	100			
		Pembinaan petani pengamat Hama (PPH)	100	100			
		Penerapan PHT Padi dan Jagung	50	100			
		Pengawasan Mutu Standar Pestisida	18	100			

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan Sarana Brigade dan pengendalian Serangan OPT	18	100			
3	<b>Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</b>	Terlaksananya pembinaan dampak perubahan iklim TPH Kab/Kota	2	100	<b>190.082.400</b>	<b>185.813.580</b>	<b>97,75</b>
		Terlaksananya monev rad grk	18	100			
4	<b>Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</b>	Klinik PHT Kakao	4	100	<b>450.000.000</b>	<b>449.957.700</b>	<b>99,99</b>
		Pelatihan lapangan pengendalian OPT Perkebunan	4	100			
		Terlaksananya pelatihan penerapan PHT untuk pengendalian opt kopi	3	100			
		Pembinaan petani pengamat hama	30	100			
		Penerapan PHT Bawang	10	100			
		Penerapan PHT Cabe	11	100			
		Penerapan PHT Jeruk	10	100			
		Penerapan PHT Manggis	10	100			
		Sarana klinik PHT komoditas Cabe	10	100			
		Teerlaksananya SL PHT Padi	100	100			
5	<b>Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>	Terlaksananya sosialisasi pendampingan AOTP	200	100	<b>275.000.000</b>	<b>226.432.960</b>	<b>82,34</b>
		Terlaksananya subsidi asuransi usaha tani padi	2100	100			
V.	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	5	100	<b>250.000.000</b>	<b>170.500.935</b>	<b>68,20</b>
1	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya pembinaan Dan Pengawasan penerbitan Izin usaha pertanian	7	100	<b>250.000.000</b>	<b>170.500.935</b>	<b>68,20</b>

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian</b>	Terlaksananya penyusunan pelayanan publik pemberian izin usaha	1	100	<b>50.000.000</b>	<b>33.550.600</b>	<b>67,10</b>
		Terlaksananya standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	1	100			
3	<b>Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya penilaian klasifikasi kelas kebun usaha	18	120	<b>100.000.000</b>	<b>73.177.885</b>	<b>73,18</b>
4	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian</b>	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian	7	100	<b>100.000.000</b>	<b>63.772.450</b>	<b>63,77</b>
VI.	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	1000	100	<b>9.699.971.100</b>	<b>9.019.506.504</b>	<b>92,98</b>
1	<b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>	terlaksananya pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian	12	100	<b>300.000.000</b>	<b>286.927.910</b>	<b>95,64</b>
		Terlaksananya pengembangan ketenagaan penyuluh pertanian	19	100			
2	<b>Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN</b>	Fasilitasi dan Pembinaan THL POPT	27	100	<b>250.000.000</b>	<b>240.339.510</b>	<b>96,14</b>
		Penilaian dan Penghargaan Petugas POPT dan Kelompok Tani Teladan	6	100			
		Terlaksananya Bimtek Petugas POPT untuk TPH	5	100			
3	<b>Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta</b>	Terlaksananya kegiatan SDM Penyuluhan	3	100	<b>50.000.000</b>	<b>46.588.400</b>	<b>93,18</b>
		Terlaksananya temu teknis kelembagaan tani	1	100			
4	<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	Terlaksananya diseminasi informasi teknis	2	100	<b>8.146.553.450</b>	<b>7.645.226.794</b>	<b>93,85</b>
		Terlaksananya penerapan penyuluhan pertanian	19	100			

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	<b>Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian</b>	Terlaksananya Sekolah Lapang Pertanian Organik (SLAPO)	8	100	<b>829.700.000</b>	<b>784.887.900</b>	<b>94,60</b>
		Terlaksananya Pelatihan Lapangan Persiapan Sertifikasi Organik	2	100			
		Terlaksananya penyebaran informasi melalui media massa	1	100			
		Terlaksananya Pusat Studi Organik	2	100			
		Terlaksananya temu teknis pertanian organic	4	100			
6	<b>Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani</b>	Terlaksananya proses sertifikasi benih padi	250	100	<b>7.316.853.450</b>	<b>6.860.338.894</b>	<b>93,76</b>
		Terlaksananya training penyuluh pertanian provinsi	12	100			
		Terlaksananya bimbingan teknis bagi Penyuluh Pertanian dan Staf Lapangan IPDMIP	5	100			
		Terlaksananya prapenas	1	100			
		Terlaksananya temu pengelola BPP Konstratani	26	100			
		Terlaksananya koordinasi persiapan Penas Tani Nelayan XVI	1	100			
		Terlaksananya penyediaan benih sebar	60700	100			
		Terlaksananya pelatihan teknis IPDMIP	8	100			
		Terlaksananya koordinasi programa penyuluhan	2	100			
		Terlaksananya data pendapatan petani padi	1	100			
		Terlaksananya rapat koordinasi persiapan penas tani nelayan XVI	400	100			
		Terlaksananya kerjasama penangkaran benih padi di lokasi IPDMIP	25	100			
		Terlaksananya temu tugas Penyuluh Pertanian	1	100			
		Terlaksananya temu teknologi	1	100			



No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya demonstrasi plot penangkaran benih	43	100			
		Terlaksananya pengumpulan data lapangan	17	100			
		Terlaksananya temu kerja penyelenggaraan penyuluh pertanian	1	100			
		terfasilitasinya hadiah/penghargaan untuk ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan	1	100			
		Terlaksananya workshop penulisan laporan dan karya tulis ilmiah	2	100			
		Terlaksananya penyediaan benih pokok	3425	100			
		Terlaksananya temu teknis penyuluh	1	100			
		Terlaksananya temu teknis penyuluh PPPK dan PPS	3	100			
		Terlaksananya pertemuan koordinasi IPDMIP tingkat Provinsi Sumatera Barat	12	100			
		Terlaksananya seminar penyadaran akses pasar melalui pendekatan rantai nilai	1	100			
		Terlaksananya peningkatan SDM petugas dan produsen benih perkebunan	1	100			
		pelatihan petani	800	100			
		Terlaksananya pelatihan enterpreneur petugas	2	100			
		Terlaksananya pelatihan milenial entrepreneur	500	100			
		Terlaksananya pelatihan teknis agribisnis baeang merah bagi petugas dan petani	2	100			
		Terlaksananya pelatihan teknis agribisnis cabe bagi petugas dan petani	2	100			

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya pelatihan teknis agribisnis padi organik bagi petugas dan petani	2	100			
7	<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>	Terlaksananya Pelatihan Manajemen dan Kemitraan kelembagaan bagi petani dan petugas	4	100	<b>1.253.417.650</b>	<b>1.087.351.800</b>	<b>86,75</b>
		Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi	19	100			
8	<b>Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani</b>	Terlaksananya festival buah durian	1	100	<b>350.000.000</b>	<b>281.865.450</b>	<b>80,53</b>
		Terlaksananya festival kopi	1	100			
		Terlaksananya koorporasi gambir	1	100			
		Terlaksananya koorporasi kakao	1	100			
		Terlaksananya koorporasi kelapa	1	100			
		Terlaksananya koorporasi kopi	1	100			
		Terlaksananya lomba tanaman hias	1	100			
		terlaksananya bimtek mekanik dan operator	4	100			
		Terlaksananya optimalisasi penggunaan alsintan di tingkat lapangan	5	100			
		Terlaksananya pelatihan personil pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk sertifikasi operator alsintan	3	100			
		Terlaksananya pendampingan kelembagaan UPJA	18	100			
9	<b>Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani</b>	Terlaksananya bimtek penyuluhan keamanan pangan untuk sertifikasi P-IRT	90	100	<b>142.745.000</b>	<b>131.876.850</b>	<b>92,39</b>
		TEersedianya buku profil UP3HP	100	100			
		Terlaksananya pengembangan Padi Indikasi Geografis (IG) dan Korporasi Petani Jagung	3	100			

No	Urusan Program/ Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terbayarnya honor petugas pendampingan cluster korporasi petani	7	100			
10	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani	terlaksananya penilaian kelayakan manajemen korporasi petani	38	200	183.392.650	148.693.100	81,08
11	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	terlaksananya SL Pengembangan Padi dan Jagung	2	100	577.280.000	524.916.400	90,93
<b>JUMLAH</b>					<b>226.428.220.296</b>	<b>211.876.105.560</b>	<b>93,57</b>

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efisiensi kegiatan	
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sisa gaji dan tunjangan akibat pensiunnya ASN	
7.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Efisiensi kegiatan	
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Efisiensi kegiatan	
11.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Adanya kegiatan pertemuan yg tdk terealisasi	Tahun 2023 dilakukan penyesuaian anggaran dengan rencana kerja Kegiatan pengamanan barang milik daerah sehingga anggaran yang diseriakan dapat direalisasikan 100%
12.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Efisiensi kegiatan	
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sisa kontrak pengadaan	
15.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tidak adanya undangan terkait Bimtek	Kegiatan ini untuk fasilitasi calon pejabat pengadaan barang jasa, yang saat ini BPPSDM sudah mengalokasikan kegiatan untuk melaksanakan diklat Pengadaan Barang Jasa sehingga tahun 2023 kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang undangan tidak di anggarkan lagi.
18.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Efisiensi kegiatan	
19.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Efisiensi kegiatan	

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
21.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Adanya paket tidak terealisasi (radio 5 paket) dan efisiensi kegiatan	Kegiatan pemberitaan lewat radio tidak dilaksanakan karena harga tidak sesuai dengan Standar Satuan Harga. Tindak lanjut tahun 2023 adalah mengganti paket radio dengan media Televisi atau Multimedia Online.
26.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Efisiensi kegiatan (tergantung pemakaian)	
28.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sisa kontrak (efisiensi kegiatan)	
30.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Efisiensi kegiatan	
II	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		
2.	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Sisa kontrak	
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Sisa OP Kegiatan Naskah akademik yg hanya terealisasi 2 org dari 3 org yg ada di pagu	Tahun 2023 dilakukan pengurangan anggaran perjalanan dinas luar daerah .
6.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Sisa kontrak pengadaan	
7.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Ketersediaan benih padi bersertifikat terbatas, Sisa kontrak pengadaan	Tahun 2023 untuk mempersiapkan jumlah penangkar benih yang cukup sebagai produsen benih untuk dapat mencukupi kuota benih
8.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Gagal tender sebanyak 3x pengadaan kulit manis, Disebabkan karena benih terkena bencana alam (banjir)	
III.	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		
2.	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Pengembangan Kawasan Jagung terkendala keterbatasan benih jagung	Tahun 2023 untuk mempersiapkan jumlah penangkar benih yang cukup sebagai produsen benih untuk dapat mencukupi kuota benih
7.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Adanya pertemuan tidak terlaksana (TP3-Tanaman Pangan) Efisiensi kegiatan	Mengurangi alokasi anggaran pada tahun 2023 untuk kegiatan pertemuan
IV.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>		
2.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kegiatan pengadaan bahan kimia yang yang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya akibat izin impor bahan obat yang dimaksud belum keluar. Sehingga produk tidak dapat dilakukan pengadaan	pada saat penyusunan APBD 2022 belum ada kewajiban TKDN terhadap barang, dan untu tahun 2023 seluruh pengadaan barang jasa diwajibkan TKDN
5.	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Keterlambatan dari pihak asuransi untuk memproses premi (Jasindo) yang telah diusulkan karena keterbatasan	
V.	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>		
2.	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Sisa Perjalanan dalam daerah, Keterbatasan dan kualitas SDM	Mengurangkan volume perjalanan dinas di tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
3.	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	sisa dana adalah perjalanan dalam daerah, Perusahaan yg melakukan pengusulan penilaian perkebunan tahun 2022 hanya 8 perusahaan, dari 54 perusahaan di Sumbar, sehingga perbengaruh ke perjalanan dinas dalam daerah	Mengurugin volume perjalanan dinas di tahun 2023
4.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Sisa Perjalanan dalam daerah, Keterbatasan dan kualitas SDM	Mengurugin volume perjalanan dinas di tahun 2023
VI.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
3.	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Sisa honorarium narasumber yang berasal dari internal dinas PTPH, dan sisa perjadi 3 OH	Mengurugin volume perjalanan dinas di tahun 2023
5.	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	adanya Temu teknis tidak terlaksana	Mengevaluasi pelaksana kegiatan dan mengurangi alokasi anggaran pertemuan pada kegiatan serupa
6.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Honorarium narsum dari Internal, sisa pengadaan bibit, sisa makan minum acara pelatihan Pagu penggantian dana hibah tidak memadai untuk tahun 2023, sehingga berpotensi tidak diganti ke kas daerah jika tetap dilaksanakan.	
8.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Efisiensi kegiatan (honor internal OPD) dan paket tidak terlaksana (pascapanen Tanaman Pangan)	
10.	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Efisiensi kegiatan (honor internal OPD) dan paket tidak terlaksana (pascapanen Tanaman Pangan)	
11.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Gerakan Tanam Jagung terkendala keterbatasan benih jagung	Menyiapkan penangkar yang cukup untuk memenuhi kuota pengadaan benih 2023

### 3.1.3.3.2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.83.238.968.854,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.68.515.478.499,00 atau 82,31%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	1. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Organisasi 2. Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	100
II	Meningkatnya Produksi Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Daging	1,45 %	1,55 %	106,89
III	Meningkatnya Produksi Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %	100

IV	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis	3,41%	3,41%	100
V	Meningkatnya Produksi Peternakan	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	3 %	3 %	100
VI	Meningkatnya Produksi Peternakan	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan	20 %	20 %	100

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Target kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat, dengan output Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun adalah (Renstra, Renja, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, Data Base Peternakan).
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output Jumlah Dokumen Evaluasi yang Disusun.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output Dokumen Evaluasi Kinerja triwulanan OPD.

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya .
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output Jumlah ASN yang mendapatkan honor.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan

- output Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output Jumlah dokumen laporan barang milik daerah.
  - (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan output Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
    - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan output Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola.
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan output Jumlah aparatur yang mengikuti diklat.
  - (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan.
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan output Jumlah Tersedianya Bahan Bacaan (Koran dan buku).
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi.
  - (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru.

- Pengadaan Mebel, dengan output Jumlah Pengadaan Meubeler yang diadakan.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan, Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan, Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan, Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia.
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatnya Produksi Peternakan, dengan indikator kinerja yaitu :
- 1) Persentase Peningkatan Produksi Daging (Target kinerja : 1,45%) (Realisasi Kinerja : 1,55%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui



pelaksanaan :

- a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan, dengan output Kajian SDGH (Sirukam/kukuak balengkek, sapi pesisir, itik pitalah).
  - (2) Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, dengan output Meningkatnya kemampuan teknologi di Bidang Pengolahan pakan.
    - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, dengan output Tersedianya pakan ternak unggas yang berkualitas.
    - Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, dengan output Terciptanya SDM peternakan dan keswan yang Profesional dan berkualitas.
  - (3) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, dengan output Meningkatnya jumlah produksi semen beku, pemanfaatan teknologi reproduksi (IB dan ET) dan pemeliharaan ternak bibit dan Tersedianya bibit dan produktifitas ternak unggas di UPTD.
    - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan, dengan output Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi, Terjaminnya ketersediaan pakan ternak, Tersedianya ternak bibit bersertifikat (SKLB), dan Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian sampel pakan secara aktif

maupun pasif servis.

- (4) Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor, dengan sub kegiatan :
  - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan, dengan output Jumlah Sampel titer post vaksinasi.
- (5) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan sub kegiatan :
  - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan output Bertambahnya populasi ternak.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya Produksi Peternakan, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan (Target kinerja : 20%) (Realisasi Kinerja : 20%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dicapai dengan pelaksanaan :

- (1) Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
  - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, dengan output Tersedianya Road Map Kawasan (Korporasi Petani).
  - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, dengan output Teregisternya kandang usaha peternakan.
  - Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, dengan output Terpeliharanya Rumah Sakit Hewan untuk meningkatkan pelayanan keswan.
  - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya, dengan output Terlaksananya perluasan, perawatan, rehabilitasi laboratorium, gedung kantor/kandang/gudang pakan serta gedung diklat, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan kandang pembesaran, pagar keliling, gapura, bio securiti, pos jaga, pelantaran

parkir, pemasangan paving blok, rehabilitasi gedung kantor dan mess, pembangunan pet hotel, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang lainnya.

- (2) Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
  - Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak, dengan output Meningkatnya pembinaan di kawasan sentra produksi peternakan.
  - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak, dengan output Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak wilayah provinsi.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

- d. Sasaran IV : Meningkatnya Status Kesehatan Hewan, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis (Target kinerja : 3,41%) (Realisasi Kinerja : 3,41%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, dengan output Penurunan kasus rabies, AI, Jembrana, SE.
- Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan output Penurunan jumlah kasus AI dan SE.
- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular, dengan output enanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular.

- (2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan sub kegiatan :

- Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan, dengan output Terpetakannya peyakit hewan menular di 19 Kab/Kota.
  - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan, dengan output Jumlah Pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi.
- (3) Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, dengan sub kegiatan:
- Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan, dengan output Jumlah Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, pet shop, poultry shop, dan distributot obat hewan.
  - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan output Jumlah sampel Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan dan Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian sampel spesimen hewan ternak.
- (4) Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan sub kegiatan :
- Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan, dengan output Jumlah sertifikasi keamanan produk hewan.
- (5) Kesejahteraan Hewan, dengan sub kegiatan :
- Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), dengan output Jumlah Sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat.
  - Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya, dengan output Meningkatnya jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

e. Sasaran V : Meningkatnya Produksi Peternakan, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha

Pertanian (Target kinerja : 3%) (Realisasi Kinerja : 3%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Perizinan Usaha Pertanian, dicapai dengan pelaksanaan :
  - (1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, dengan output Implementasi dan evaluasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan Pemahaman Teknik Audit dan Kajian Resiko Laboratorium ISO 17025:2017.
  - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi, dengan output Terpenuhinya persyaratan untuk penerapan ISO 17025:2017.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V.

- f. Sasaran VI : Meningkatnya Produksi Peternakan, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan (Target kinerja : 20%) (Realisasi Kinerja : 20%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penyuluhan Pertanian, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan :
    - Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN, dengan output Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun adalah terpilihnya petugas dan kelompok berprestasi.
  - (2) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan :
    - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian, dengan output Jumlah laporan

diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian yang disusun.

(3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, dengan sub kegiatan :

- Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani, dengan output Jumlah penguatan kelembagaan Koorporasi Petani yang dilakukan.
- Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani, dengan output Jumlah Kemitraan Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Barat.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VI.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisas (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	100%	100%	100	24.979.261.503	23.806.578.506	95,31
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	85%	85%	100	366.608.540	358.479.072	97,78
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	100	214.101.520	210.512.850	98,32
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100	26.010.900	24.853.900	95,55
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	126.496.120	123.112.322	97,32
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100	16.413.369.591	15.732.107.364	95,85
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	150 orang	150 orang	100	15.413.178.791	14.901.296.614	96,68
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 orang	36 orang	100	853.910.000	696.930.000	81,62
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 dokumen	18 dokumen	100	146.280.800	133.880.750	91,52
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100	101.490.000	93.264.647	91,90

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisas (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100	101.490.000	93.264.647	91,90
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>100</b>	<b>299.465.000</b>	<b>261.951.359</b>	<b>87,47</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150 stel	150 stel	100	108.025.000	108.025.000	100,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 dokumen	10 dokumen	100	97.500.000	94.957.814	97,39
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 orang	10 orang	100	93.940.000	58.968.545	62,77
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>1.672.364.975</b>	<b>1.570.401.351</b>	<b>93,90</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 set	10 set	100	20.000.000	19.872.500	99,36
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 unit	20 unit	100	756.602.840	744.296.500	98,37
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 unit	25 unit	100	76.040.000	76.000.000	99,95
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 unit	10 unit	100	100.000.000	92.150.450	92,15
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9 bulan	9 bulan	100	32.000.000	30.565.000	95,52
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	687.722.135	607.516.901	88,34
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>538.040.000</b>	<b>536.410.000</b>	<b>99,70</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100	328.040.000	328.040.000	100,00
	Pengadaan Mebel	30 unit	30 unit	100	210.000.000	208.370.000	99,22
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>4.117.115.037</b>	<b>3.989.648.971</b>	<b>96,90</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 surat	20 surat	100	15.000.000	10.000.000	66,67
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000 meter kubik 5.276.832 KVA 600 mbps 2 rekening	45.000 meter kubik 5.276.832 KVA 600 mbps 2 rekening	100	1.075.200.000	1.038.401.825	96,58
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61 orang	61 orang	100	3.026.915.037	2.941.247.146	97,17

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisas (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	100	1.470.808.360	1.264.315.742	85,96
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 unit	30 unit	100	578.920.000	565.155.930	97,62
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 unit	10 unit	100	599.489.745	551.603.812	92,01
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	230 unit	230 unit	100	200.055.315	107.781.000	53,88
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65 unit	65 unit	100	92.343.300	39.775.000	43,07
II	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	1,45%	1,55%	100	43.235.779.216	31.700.485.720	73,32
1	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</b>	20%	20%	100	68.844.000	18.130.000	26,33
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 dokumen	1 dokumen	100	68.844.000	18.130.000	26,33
2	<b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	20%	20%	100	3.229.927.600	2.998.044.736	92,82
	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	50 orang	50 orang	100	145.000.000	101.204.500	69,80



No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisas (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	450 ton	450 ton	100	2.983.161.800	2.824.502.596	95,57
	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	40 orang	40 orang	100	101.765.800	72.337.640	71,08
<b>3</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100</b>	<b>6.245.547.490</b>	<b>5.809.466.619</b>	<b>93,02</b>
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.000 dosis 8.200 ekor	2.000 dosis 8.200 ekor	100	5.316.845.845	5.054.334.440	94,50
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	450 sampel 5 kelompok 150 sertifikat	450 sampel 5 kelompok 150 sertifikat	100	928.701.645	755.132.179	84,08
<b>4</b>	<b>Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor</b>	<b>450 sampel</b>	<b>450 sampel</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>	<b>62.963.000</b>	<b>62,96</b>
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	450 sampel	450 sampel	100	100.000.000	62.963.000	62,96
<b>5</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain</b>	<b>1,88%</b>	<b>1,88%</b>	<b>100</b>	<b>33.591.460.126</b>	<b>22.811.881.365</b>	<b>67,91</b>
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3 komoditi	3 komoditi	100	33.591.460.126	22.811.881.365	67,91
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100</b>	<b>6.985.628.941</b>	<b>6.050.779.112</b>	<b>86,62</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>100</b>	<b>6.808.926.441</b>	<b>5.945.574.844</b>	<b>87,32</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisas (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 dokumen	1 dokumen	100	207.580.000	73.329.500	35,33
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	150 unit	150 unit	100	835.218.000	447.351.414	53,56
	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	1 unit	1 unit	100	1.220.044.301	1.196.323.310	98,06
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	5 unit	5 unit	100	4.546.084.140	4.228.570.620	93,95
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>100</b>	<b>176.702.500</b>	<b>105.204.268</b>	<b>59,54</b>
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	24 kawasan	24 kawasan	100	116.062.500	75.260.668	64,84
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 dokumen	1 dokumen	100	60.640.000	29.943.600	49,38
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>1,08%</b>	<b>1,08%</b>	<b>100</b>	<b>4.927.066.241</b>	<b>4.527.500.048</b>	<b>91,89</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>19 Kab/Kota</b>	<b>19 Kab/Kota</b>	<b>100</b>	<b>2.043.054.120</b>	<b>1.873.565.148</b>	<b>91,70</b>
	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100	1.614.326.620	1.506.889.818	93,34

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisas (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20 desa 3 Kab	20 desa 3 Kab	100	190.951.500	155.762.220	81,57
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100	237.776.000	210.913.110	88,70
<b>2</b>	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</b>	<b>18 Kab/Kota</b>	<b>18 Kab/Kota</b>	<b>100</b>	<b>224.961.500</b>	<b>208.206.900</b>	<b>92,55</b>
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	50 buku	50 buku	100	94.961.500	88.254.500	92,94
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	5 entry point	5 entry point	100	130.000.000	119.952.400	92,27
<b>3</b>	<b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>2.222.150.621</b>	<b>2.030.345.730</b>	<b>91,37</b>
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	30 unit usaha	30 unit usaha	100	648.881.300	524.211.897	80,79
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3070 sampel	3070 sampel	100	1.573.269.321	1.506.133.833	94,39
<b>4</b>	<b>Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>9 sertifikat</b>	<b>9 sertifikat</b>	<b>100</b>	<b>165.000.000</b>	<b>162.982.650</b>	<b>98,78</b>
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	10 sertifikat	10 sertifikat	100	165.000.000	162.982.650	98,78
<b>5</b>	<b>Kesejahteraan Hewan</b>	<b>10 unit</b>	<b>10 unit</b>	<b>100</b>	<b>271.900.000</b>	<b>252.399.620</b>	<b>92,83</b>
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	5 sertifikat	5 sertifikat	100	180.000.000	163.878.620	91,04

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisas (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	1 unitt usaha	1 unitt usaha	100	91.900.000	88.521.000	96,32
<b>V</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>100</b>	<b>388.515.100</b>	<b>283.155.350</b>	<b>72,88</b>
<b>1</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>63.737.900</b>	<b>46.252.500</b>	<b>72,57</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	2 unit	2 unit	100	63.737.900	46.252.500	72,57
<b>2</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>324.777.200</b>	<b>236.902.850</b>	<b>72,94</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 dokumen	2 dokumen	100	324.777.200	236.902.850	72,94
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100</b>	<b>2.722.717.853</b>	<b>2.146.979.763</b>	<b>78,85</b>
<b>1</b>	<b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100</b>	<b>170.000.000</b>	<b>128.343.500</b>	<b>75,50</b>
	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	10 orang	10 orang	100	170.000.000	128.343.500	75,50
<b>2</b>	<b>Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>4 lembaga</b>	<b>4 lembaga</b>	<b>100</b>	<b>1.765.098.065</b>	<b>1.341.194.545</b>	<b>75,98</b>
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	4 dokumen	4 dokumen	100	1.765.098.065	1.341.194.545	75,98
<b>3</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>	<b>4 lembaga</b>	<b>4 lembaga</b>	<b>100</b>	<b>787.619.788</b>	<b>677.441.718</b>	<b>86,01</b>
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	4 lembaga	4 lembaga	100	658.159.788	571.753.918	86,67
	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	3 pelaku	3 pelaku	100	129.460.000	105.687.800	81,64

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pagu Anggaran di SIPD tidak sama yang dipergub sehingga mendapati kesenjangan nominal pada biaya honorarium yang selisihnya relatif banyak	Menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih baik sesuai dengan peruntukkan dan kondisi yang dibutuhkan
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terdapat dana Perdin yang tidak semua direalisasikan karena jadwal yang sudah ditentukan terkadang ada undangan mendadak dari dinas lain	Menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih baik sesuai dengan jadwal dan kondisi yang dibutuhkan
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tergantung Undangan Workshop, Seminar, Diklat	Menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih baik sesuai dengan jadwal dan kondisi yang dibutuhkan
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terdapat Anggaran penggandaan dan spanduk yang mana tidak terpakai karena itu termasuk kebutuhan yang sesuai dengan peruntukannya	Menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan peruntukannya
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terdapat Anggaran Perdin dalam daerah yang mana diperuntukkan jika ada undangan	Menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih baik sesuai dengan jadwal dan kondisi yang dibutuhkan
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdapat Anggaran materai yang mana tidak terpakai karena itu termasuk kebutuhan yang sesuai dengan peruntukannya	Menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan peruntukannya
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terdapat Anggaran pemeliharaan AC, Jaringan Telepon, Air, Listrik yang mana tidak terpakai karena itu termasuk kebutuhan rutin yang bila mana alat alat tersebut rusak baru diperbaiki sesuai dengan peruntukannya	Menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan peruntukannya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terdapat Anggaran pemeliharaan komputer, laptop, infocus, printer yang mana tidak terpakai karena itu termasuk kebutuhan rutin yang bila mana alat alat tersebut rusak baru diperbaiki sesuai dengan peruntukannya	Menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan peruntukannya
II	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		
2	<b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>		

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
3	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>		
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terdapat belanja modal yang tidak terealisasi karena tidak terdaftar di RKBMD dan terdapat sisa belanja modal pada UPTD Ternak Ruminansia Terdapat Sisa Tender pembelian bibit ternak pada UPTD Ternak Unggas	Menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih baik dan mengusulkan RKBMD
5	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain</b>		
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Sub kegiatan ini ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD)	Ketidakmampuan rekanan untuk memenuhi kesepakatan kontrak Terdapat beberapa barang yang harga kontraknya diatas pagu Bahan cetakan untuk membuat leaflet tidak memenuhi kuota	Telah melakukan teguran secara tertulis kepada rekanan, ULP telah melakukan blacklist perusahaan Pengusulan standar harga barang disesuaikan dengan harga terbaru
III	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		
1	<b>Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian</b>		
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Penawaran perencanaan pembangunan unit pengolahan pakan dari pihak ke-3 melalui mekanisme swakelola jauh lebih rendah dibandingkan dengan HPS	Menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan peruntukannya
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Biaya pemeliharaan backhoe loader di UPTD Ternak Ruminansia dibawah harga di SIPD Terdapat Sisa Tender Pembangunan fisik cukup besar pada UPTD Ternak Unggas	Mengajukan standar harga sesuai dengan biaya real Perlunya penyesuaian kembali dengan kebutuhan dengan yang ada di SIPD
IV	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>		
1	<b>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		
	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Adanya peningkatan kejadian wabah PMK pada ternak sapi di Sumatera Barat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pengendalian penyakit hewan dilapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas. Disamping itu juga terdapat sisa belanja barang dan BOP dr kegiatan yang tidak terlaksana.	Meningkatkan koordinasi dengan pelaksana teknis di Kabupaten/ Kota
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Adanya peningkatan kejadian wabah PMK pada ternak sapi di Sumatera Barat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pengendalian penyakit hewan dilapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas. Disamping itu juga terdapat sisa belanja barang dan BOP dr kegiatan yang tidak terlaksana.	Meningkatkan koordinasi dengan pelaksana teknis di Kabupaten/ Kota

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
2	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</b>		
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Adanya peningkatan kejadian wabah PMK pada ternak sapi di Sumatera Barat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pengendalian penyakit hewan dilapangan.	Menyusun perencanaan kegiatan pada saat menyusun DPA Perubahan dengan lebih baik sesuai dengan jadwal dan kondisi yang dibutuhkan
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Perjalanan Dinas tidak terserap maksimal	Menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih baik sesuai dengan jadwal dan kondisi yang dibutuhkan
3	<b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>		
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Penawaran dari pihak ke-3 melalui mekanisme swakelola tipe 3 jauh lebih rendah dibandingkan dengan HPS	Menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan peruntukannya
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-
5	<b>Kesejahteraan Hewan</b>		
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Perjalanan Dinas tidak terserap maksimal	Menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih baik sesuai dengan jadwal dan kondisi yang dibutuhkan
V	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Tidak ada permasalahan	-
VI	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		

#### 3.1.3.4. Kehutanan

Urusan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.87.451.095.660,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.80.415.328.501,00 atau 91,95%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat	<b>Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola (Hektar)	50.000	50.597	101,19
II	Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan	<b>Pengelolaan Hutan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan (Unit)	20	22	110,00

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
III	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	<b>Pengelolaan Hutan</b> <b>Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem</b> <b>Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</b>	Indeks Tutupan Hutan (Indeks)	60,98	63,98	104,92
IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Indeks)	A (83,15)	A (84,13)	101,18
V	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (Indeks)	77	81,53	105,88

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan/Sub Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola (Hektar) (Target Kinerja : 50%), (Realisasi Kinerja : 50,97 %).

Pencapaian target Kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dicapai dengan melaksanakan kegiatan :

b. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan sub kegiatan :

- 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah penyuluh kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan meningkat kompetensinya (250 Orang), jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan (10 Unit), dan jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara (10 Unit).
- 2) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara (1 Unit).
- 3) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh



- Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan (1 Unit).
- 4) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan pada wilayah KPH (1 KPH).
  - 5) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan UPTD KPHL Sijunjung , dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan . (pembuatan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan) (2 Unit).
  - 6) Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan yang difasilitasi (100 Kelompok) .
  - 7) Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok tani hutan yang difasilitasi (10 Kelompok).
  - 8) Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok tani hutan yang difasilitasi (3 Kelompok).
  - 9) Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok tani hutan yang difasilitasi (5 Kelompok).
  - 10) Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output Sub Kegiatan ini adalah jumlah anggota perhutanan sosial yang mengikuti forum (100 Orang), jumlah fasilitasi pengembangan usaha (3 Kelompok), jumlah fasilitasi kewirausahaan (5 Kali), jumlah stup lebah madu itama (220 Stup), jumlah unit ekonomi produktif dan sarpras ekowisata yang difasilitasi (3 Unit), jumlah unit ekonomi

- produktif yang difasilitasi (DAK) (600 Stup), dan jumlah usulan perhutanan sosial (3 Kelompok).
- 11) Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi kewirausahaan (5 Kali), jumlah fasilitasi pengembangan usaha (3 kelompok), jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (40 Kelompok), jumlah stup lebah madu itama (220 Stup), jumlah unit ekonomi produktif yang difasilitasi (DAK) (600 Stup), jumlah unit ekonomi produktif yang difasilitasi (DAK) (3 Unit), dan jumlah usulan perhutanan sosial (3 Kelompok) ram.
  - 12) Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah anggota perhutanan sosial yang mengikuti forum (100 Orang), jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (20 Kelompok), jumlah kewirausahaan yang difasilitasi (5 Kali), jumlah stup lebah madu yang disediakan (374 Stup), jumlah unit ekonomi produktif yang difasilitasi (4 Unit), dan jumlah usulan perhutanan sosial yang difasilitasi (5 Kelompok).
  - 13) Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Agam Raya, dengan output Sub Kegiatan ini adalah jumlah stup lebah madu yang disediakan (233 Stup), jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (7 Kelompok), jumlah kewirausahaan yang difasilitasi (5 Kelompok), jumlah unit ekonomi produktif yang difasilitasi (1 Unit), dan jumlah usulan perhutanan sosial yang difasilitasi (3 Kelompok).
  - 14) Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah alat panen trigona (93 Unit), jumlah bibit bunga (5.395 Buah), jumlah alat pengurang kadar air madu (3 Unit), jumlah alat pengurang kadar air madu (3 Unit), dan jumlah stup lebah madu yang disediakan (580 Stup).
  - 15) Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Sijunjung, dengan output Sub Kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi kewirausahaan (5 Kali), jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (5 Kelompok), jumlah stup lebah trigona (300 Stup),

jumlah usulan perhutanan sosial (3 Kelompok), luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan (2.800 Ha).

- 16) Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Solok, dengan output Sub Kegiatan ini adalah jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (5 Kelompok), jumlah usulan perhutanan sosial (3 Kelompok), jumlah fasilitasi kewirausahaan (3 Kelompok), jumlah stup lebah madu itama (150 Unit), dan jumlah stup lebah madu torasika (75 Unit).
- 17) Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Hulu Batang Hari, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah anggota perhutanan sosial yang mengikuti forum (60 Orang), jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (2 Kelompok), jumlah kewirausahaan yang difasilitasi (5 Kali), jumlah stup lebah madu yang disediakan (160 Stup), jumlah usulan perhutanan sosial yang difasilitasi (2 Kelompok), dan luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan (3.650 Ha).
- 18) Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (4 Kelompok), jumlah kewirausahaan yang difasilitasi (4 Kali), jumlah stup lebah madu yang disediakan (165 Stup), dan jumlah unit ekonomi produktif yang difasilitasi (3.000 Ha) am.
- 19) Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output Sub Kegiatan ini adalah fasilitasi kewirausahaan di Kabupaten Pesisir Selatan wilayah kelola KPHP Pesisir Selatan (1 Kelompok), jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (5 Kelompok), jumlah stup lebah madu itama (265 Unit), jumlah usulan perhutanan sosial (3 Kelompok), stup lebah lokasi di Kambang Timur Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 25 Stup meliputi sosialisasi, bimtek, dan monev lebah madu (50 Unit).
- 20) Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Mentawai, dengan output Sub Kegiatan ini adalah jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (5 Kelompok), dan jumlah stup lebah madu yang disediakan (165 Stup).

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit) (Target Kinerja : 20%), (Realisasi Kinerja : 22%).

Pencapaian target Kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan :

a) Program Pengelolaan Hutan dicapai dengan melaksanakan kegiatan :

(1) Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan, dengan output sub kegiatan ini adalah terpeliharanya batas kawasan hutan (10 km).
- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana operasional KPH (10 KPH) .

(2) Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (12 dokumen).
- Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 dokumen).
- Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 dokumen).
- Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen

Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 dokumen).

- Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 dokumen).
  - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 dokumen).
  - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 dokumen).
  - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Hulu Batang Hari, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 dokumen).
  - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 dokumen).
  - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (5 Ijin Usaha/Kerjasama).
  - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (1 dokumen).
- (3) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung Dinas Kehutanan Provinsi,

dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah data dan informasi kehutanan yang dikembangkan (2 Dokmen).

- kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan produksi (27 Unit), dan jumlah wilayah produksi hasil hutan produksi termasuk PNBK (10 KPH).
- kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan produksi (3 Unit).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan produksi (5 Unit).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan produksi (1 Ijin Usaha/Kerjasama).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan produksi (4 Ijin Usaha/Kerjasama).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang

kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan produksi (2 Unit).

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan produksi (1 Ijin Usaha/Kerjasama).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHL Hulu Batang Hari , dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan produksi (4 Ijin Usaha).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHP Dharmasraya , dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan produksi (2 Ijin Usaha/Kerjasama).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan produksi (5 Ijin Usaha/Kerjasama) .
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan produksi (1 Ijin Usaha/Kerjasama).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang

termonitor pada hutan Lindung (20 Unit), dan jumlah wilayah produksi hasil hutan Lindung termasuk PNBP (10 KPH).

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan lindung (6 Unit).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan lindung (22 Unit).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan lindung (1 KPH).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan lindung (4 Ijin Usaha/Kerjasama).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan lindung (2 Unit).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan lindung (1 Ijin Usaha/Kerjasama).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha



atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Hulu Batang Hari , dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan lindung (1 KPH).

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHP Dharmasraya ,dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan lindung (1 KPH).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHP Pesisir Selatan , dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan lindung (1 Ijin Usaha/Kerjasama).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada hutan lindung (1 KPH).
- Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi Dinas Kehutanan Provinsi dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen rencana pengelolaan di kawasan hutan produksi yang dinilai (3 dokumen).
- Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung Dinas Kehutanan Provinsi dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen rencana pengelolaan di kawasan hutan lindung yang dinilai (7 dokumen).
- Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH Dinas Kehutanan Provinsi dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan hutan (10 kelompok).
- Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini

adalah jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPH (10 komoditi/produk) dan jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH (10 unit).

- Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPH (1 komoditi) dan jumlah sarpras ekowisata yang terfasilitasi (1 unit).
- Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPH (1 komoditi) dan jumlah sarpras ekowisata yang terfasilitasi (1 paket).
- Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH (3 Unit).
- Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH (5 Unit).
- Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah unit LPHN (1 unit) dan jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau jasa lingkungan yang dikembangkan (1 komoditi).
- Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH (5 Unit).
- Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHL Hulu Batang Hari, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH (2 Unit).
- Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini

- adalah jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH (1 Unit).
- Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH (4 Unit).
  - Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH (1 Unit).
- (4) Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara, dengan sub kegiatan :
- Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL) yang tersusun (1 Dokumen).
  - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah luas hutan yang terbangun (300 Ha).
  - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah luas hutan yang terbangun (300 Ha).
  - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun/direhab/P0 (DAK) (538 Ha), luas hutan rakyat terbangun/direhab/P1 (DBH-DR) (25 Ha), luas hutan rakyat yang terbangun/direhab/P1 (PAD) (50 Ha).
  - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun/direhab/P0 (125 Ha), luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun/direhab/P1 (50 Ha), luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun/direhab/P2 (105 Ha).

- Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah luas hutan yang terbangun (305 Ha).
  - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun/direhab (50 Ha).
  - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah pemeliharaan hutan rakyat Tahun I (150 Ha) dan penanaman hutan rakyat (P0) (48 Ha).
  - Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah luas penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan Negara yang dibangun/direhab (15 Ha) dan luas penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan Negara yang dibangun/direhab (50 Ha).
  - Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah Arboretum untuk pelestarian pemberdayaan genetik (1 Unit), jumlah Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang terbangun (12 Unit), dan jumlah unit perbenihan yang dikembangkan (1 Unit).
  - Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan UPTD Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah unit perbenihan yang dikembangkan (1 Unit).
  - Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada Tahun N-5 (1 Dokumen), dan jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan RHL (10 Dokumen).
- (5) Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dengan sub kegiatan :
- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah kasus tindak pidana kehutanan yang tertangani (5 Kasus), jumlah patroli

pengamanan hutan (160 Kali), jumlah peta rawan kerusakan hutan (1 peta), dan jumlah satgas LMPHBN (450 Orang).

- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah patroli pengamanan hutan (DBH-DR) (16 kali), dan jumlah Satgas LMPHBN (60 Orang).
- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah kasus tindak pidana kehutanan yang tertangani (2 Kasus), jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (17 Kali), dan jumlah Satgas LMPHBN yang diberdayakan (45 Orang).
- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (18 Kali), dan jumlah Satgas LMPHBN yang diberdayakan (50 Orang).
- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (24 Kali), dan jumlah Satgas LMPHBN yang diberdayakan (80 Orang) .
- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (16 Kali), dan jumlah Satgas LMPHBN yang diberdayakan (45 Orang) .
- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (16 Kali), dan jumlah Satgas LMPHBN yang diberdayakan (45 Orang).
- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Hulu Batang Hari, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (15 Kali), dan jumlah Satgas LMPHBN yang diberdayakan (30 Orang).
- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub

kegiatan ini adalah jumlah kasus tindak pidana kehutanan yang tertangani (2 Kasus), jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (16 Kali), Jumlah peta rawan kerusakan hutan yang tersedia (1 Peta) dan jumlah Satgas LMPHBN yang diberdayakan (45 Orang).

- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (16 Kali), dan jumlah Satgas LMPHBN yang diberdayakan (45 Orang).
- Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (16 Kali).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan (20 Kali).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan (8 Kali).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (8 Kali).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (5 Kali).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (2 Kali).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan

- yang dilaksanakan (2 Kali).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (10 Kali).
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHL Hulu Batang Hari , dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (3 Kali).
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (5 Kali).
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (2 Kali).
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (2 Kali).
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah masyarakat peduli yang terfasilitasi (150 Orang), dan jumlah patroli, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (150 Kali).
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah patroli, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (15 Kali).
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output

sub kegiatan ini adalah Jumlah koordinasi, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (4 Kali), jumlah masyarakat peduli yang terfasilitasi (100 Orang), dan jumlah patroli, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (15 Kali).

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah koordinasi, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (12 Kali).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah patroli, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (20 Kali).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah koordinasi, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (15 Kali).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah koordinasi, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (15 Kali).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Hulu Batang Hari, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah patroli, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari (15 Kali).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah masyarakat peduli yang



terfasilitasi (15 Orang), dan jumlah patroli, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (15 Kali).

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah patroli, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (15 Kali).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah patroli, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (15 Kali).

(6) Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dengan sub kegiatan :

- Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah izin pengolahan hasil hutan bukan kayu yang terkendali (20 Unit).
- Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah luas budidaya tanaman unggulan lokal dan produktif (5 Ha).
- Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pengawasan pengolahan HHBK pada wilayah kelola KPH (1 KPH).
- Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan (5 Ha).
- Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan (5 Ha).
- Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah luas hasil hutan

- bukan kayu yang dibudidayakan (tanaman unggulan kayu putih (1 Unit).
- Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan (5 Ha).
  - Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Hulu Batang Hari, dengan output sub kegiatan ini adalah luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan (5,5 Ha).
  - Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini adalah luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan (5 Ha).
  - Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan (5 Ha).
  - Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan (5 Ha).
- (7) Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m<sup>3</sup>/Tahun, dengan sub kegiatan :
- Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m<sup>3</sup>/Tahun, dengan output Sub Kegiatan ini adalah jumlah izin pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m<sup>3</sup>/Tahun yang terkendali (40 Unit).
- (8) Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan sub kegiatan :
- Penetapan Pengadaan Benih dan Penedar Benih dan Penedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah pengada dan pengedar benih dan/atau bibit (6 Unit).
  - Sertifikasi Sumber Benih UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan output sub

- kegiatan ini adalah jumlah sertifikasi sumber benih (2 Sertifikat).
- Sertifikasi Mutu Benih UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah sertifikasi mutu benih (5 Sertifikat).
  - Sertifikasi Mutu Bibit UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah sertifikasi mutu benih (10 Sertifikat).
  - Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah pengawasan peredaran benih dan/atau bibit (7 Unit).

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c) Sasaran III : Meningkatnya kualitas hutan dan lahan, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Indeks Tutupan Hutan (Indeks) (Target Kinerja : 60,98), (Realisasi Kinerja : 63,98).

Pencapaian target Kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dengan sub kegiatan :

- Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi yang dilaksanakan (10 Kali).
- Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting di Luar Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting di Luar Kawasan Hutan (4 Kali).

b. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DAS yang tersusun (1 Dokumen).
- Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah petak ukur permanen yang terbangun dan terre-enumerasi (7 Petak), dan monev REDD + dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan yang tersusun (10 KPH).
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan (2 Kelompok).
- Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah kajian pengelolaan DAS (1 Dokumen).

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d) Sasaran IV : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Indeks) (Target Kinerja : A (83,15)), (Realisasi Kinerja : A (84,13)).
- 2) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (Indeks) (Target Kinerja : 77), (Realisasi Kinerja : 81,53).

Pencapaian target Kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (RKT, PK, PK perubahan, RKA, RKA

pergeseran, RKA perubahan, DPA, DPA pergeseran, DPA perubahan (9 dokumen) dan dokumen Renstra dan Renja Dishut yang disusun (2 dokumen).

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan output sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah ( RKA SKPD, dan perubahan RKA SKPD) UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan yang disusun (2 dokumen).
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah ((RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, Dokumen DPA SKPD dan Dokumen Perubahan SKPD) UPTD KPHL Pasaman Raya yang disusun (4 dokumen).
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah ((RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, Dokumen DPA SKPD dan Dokumen Perubahan SKPD) UPTD KPHL Lima Puluh Kota yang disusun (4 dokumen).
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (RKA SKPD, dan perubahan RKA SKPD) UPTD KPHL Agam Raya yang disusun (2 dokumen).
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (RKA SKPD, dan perubahan RKA SKPD) UPTD KPHL Bukit Barisan yang disusun (2 dokumen).
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah ( RKA SKPD, dan perubahan RKA SKPD) UPTD KPHL Sijunjung yang disusun (2 dokumen).
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah ((RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, Dokumen DPA SKPD dan Dokumen Perubahan SKPD) UPTD KPHL Solok

yang disusun (4 dokumen).

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHL Hulu Batang Hari dengan output sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah ( RKA SKPD, dan perubahan RKA SKPD) UPTD KPHL Hulu Batang Hari yang disusun (2 dokumen).
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (RKA SKPD, dan perubahan RKA SKPD) UPTD KPHP Dharmasraya yang disusun (2 dokumen).
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah ( RKA SKPD, dan perubahan RKA SKPD) UPTD KPHP Pesisir Selatan yang disusun (2 dokumen).
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (RKA SKPD, dan perubahan RKA SKPD) UPTD KPHP Mentaai yang disusun (2 dokumen).
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output sub kegiatan dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 dokumen) dan dokumen evaluasi perangkat daerah (Lakip, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan) (4 dokumen).
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan output sub kegiatan dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 dokumen).
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 dokumen).
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 dokumen).
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 dokumen).
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHL Bukit

- Barisan, dengan output sub kegiatan dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 dokumen).
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 dokumen).
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 dokumen).
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHL Hulu Batang Hari dengan output sub kegiatan dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 dokumen).
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 dokumen).
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 dokumen).
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 dokumen).
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output sub kegiatan ini adalah gaji dan tunjangan ASN Dishut yang dibayarkan dalam 1 tahun (409 orang).
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output sub kegiatan ini adalah jasa administrasi pengelola keuangan dan jasa administrasi PTT (12 bulan).
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan output sub kegiatan ini adalah laporan keuangan akhir tahun (1 laporan).
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan dan semesteran (12 Dokumen).
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah laporan

keuangan bulanan dan semesteran (12 Dokumen).

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan dan semesteran (18 Dokumen).
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan dan semesteran (12 Dokumen).
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan dan semesteran (12 Dokumen).
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan dan semesteran (12 Dokumen).
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD UPTD KPHL Hulu Batang Hari, dengan output sub kegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan dan semesteran (12 Dokumen).
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan dan semesteran (12 Dokumen).
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan dan semesteran (12 Dokumen).
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD KPHP entawai, dengan output sub kegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan dan semesteran (12 Dokumen).

- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :



- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output sub kegiatan ini adalah gedung (2 Unit), honorarium pengelola aset dan terlaksananya pengelola serta pengendalian aset (12 bulan) dan kendaraan dinas operasional (12 unit).
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD Balai Sertifikasi dan Pebenihan Tanaman Hutan, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12 Bulan).
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1 Orang).
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1 Unit).
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1 Orang).
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12 Bulan).
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12 Bulan).
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1 Orang).
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHL Hulu Batang Hari, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1 Orang).
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Administrasi Barang Milik

- Daerah pada Perangkat Daerah (1 Orang).
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHP Pesisir Selatan , dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12 Bulan/2 Dokumen).
  - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHP Mentawai , dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (6 Orang).
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan (296 stel).
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan (64 stel).
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan (74 stel).
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah kakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan (42 stel).
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah pakaian dinas beserta perlengkapannya pang disediakan (96 stel).
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan (52 stel).
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah pakaian dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan (56 stel).
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

UPTD KPHL Hulu Batang Hari, dengan output sub kegiatan ini adalah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan (40 stel).

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini adalah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan (42 stel).
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan (42 stel).
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan (32 stel).
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output sub kegiatan ini adalah Aparatur Sipil Negara Dishut yang mengikuti bintek (450 orang).

(5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan output sub kegiatan ini adalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Yang

disediakan (12 bulan).

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Hulu Batang Hari, dengan output sub kegiatan ini adalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini adalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 bulan).

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output sub kegiatan ini adalah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Bahan Logistik Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah alat tulis kantor yang disediakan dan makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu (12 bulan).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan output sub kegiatan ini adalah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Hulu Batang Hari, dengan output sub kegiatan

ini adalah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (12 bulan).

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini adalah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (12 bulan).
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 Jenis).
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan output sub kegiatan ini adalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 jenis).
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 jenis).
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 jenis).
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (1 jenis).
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 jenis).

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 jenis).
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 jenis).
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Hulu Batang Hari, dengan output sub kegiatan ini adalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Yang Disediakan (2 jenis).
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini adalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 jenis).
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 jenis).
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 jenis).
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output sub kegiatan ini adalah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12 bulan).
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Mebel Dinas Kehutanan Provinsi dengan output sub kegiatan ini adalah pengadaan mebeleur yang diadakan (3 jenis).
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah surat yang didistribusikan (3.600 surat).
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah

- air, internet, listrik , dan telepon (12 Bulan).
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan output sub kegiatan ini adalah internet dan listrik (12 bulan).
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah air (33 m3), internet (12 bulan), listrik 2.266 kwh dan telepon (71 menit).
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah internet dan listrik (12 bulan).
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah air dan listrik (12 Bulan).
  - an Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah air, internet, listrik dan telepon (12 bulan).
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah air, internet, dan listrik (12 bulan).
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah air, internet, dan listrik (12 bulan) .
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Hulu Batang Hari, dengan output sub kegiatan ini adalah air, internet, listrik, pemeliharaan jaringan listrik dan sumur bor (12 bulan).
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini adalah air, internet, listrik (12 bulan).
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah air, internet, dan listrik (12 bulan).
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah air, internet, listrik (12 bulan).
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas



- Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah jasa kebersihan kantor, jasa pengamanan kantor dan jasa sopir kantor (13 bulan).
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan output sub kegiatan ini adalah jasa jasa sopir kantor (13 bulan).
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jasa kebersihan kantor, jasa pengamanan kantor dan jasa sopir kantor (13 bulan).
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Lima Puluh Kota, dengan output sub kegiatan ini adalah jasa kebersihan kantor, jasa pengamanan kantor dan jasa sopir kantor (13 bulan).
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah jasa kebersihan kantor, jasa pengamanan kantor dan jasa sopir kantor (13 bulan).
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah jasa kebersihan kantor, jasa pengamanan kantor dan jasa sopir kantor (13 bulan).
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah jasa kebersihan kantor, jasa pengamanan kantor dan jasa sopir kantor (13 bulan).
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah jasa kebersihan kantor, jasa pengamanan kantor dan jasa sopir kantor (13 bulan).
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Hulu Batang Hari, dengan output sub kegiatan ini adalah jasa kebersihan kantor, jasa pengamanan kantor dan jasa sopir kantor (13 bulan).
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini adalah jasa kebersihan kantor, jasa pengamanan kantor dan jasa sopir kantor (13 bulan).
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini

- adalah jasa kebersihan kantor, jasa pengamanan kantor dan jasa sopir kantor (13 bulan).
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah jasa kebersihan kantor, jasa pengamanan kantor dan jasa sopir kantor (13 bulan).
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output sub kegiatan ini adalah jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/operasional dan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (53 Unit).
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dinas Kehutanan Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah gedung kantor yang dipelihara, rumah dinas/mess yang dipelihara, dan rumah dinas/mess yang direhabilitasi (17 unit).
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan output sub kegiatan ini adalah gedung kantor yang dipelihara (1 Unit).
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Pasaman Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah gedung kantor yang dipelihara (2 Unit).
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Lima Puluh Kota dengan output sub kegiatan ini adalah gedung kantor yang dipelihara (1 Unit).
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Agam Raya, dengan output sub kegiatan ini adalah gedung kantor yang dipelihara (1 unit).
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Bukit Barisan, dengan output sub kegiatan ini adalah gedung kantor yang dipelihara (3 unit).
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya UPTD KPHL Sijunjung, dengan output sub kegiatan ini adalah gedung kantor yang dipelihara (2 unit).

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya KPHL Solok, dengan output sub kegiatan ini adalah gedung kantor yang dipelihara (1 unit).
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Hulu Batang Hari, dengan output sub kegiatan ini adalah gedung kantor yang dipelihara (1 Unit).
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHP Dharmasraya, dengan output sub kegiatan ini adalah gedung kantor yang dipelihara (1 unit).
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHP Pesisir Selatan, dengan output sub kegiatan ini adalah gedung kantor yang dipelihara (1 unit).
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHP Mentawai, dengan output sub kegiatan ini adalah gedung kantor yang dipelihara (1 unit).
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output sub kegiatan ini adalah peralatan gedung kantor yang dipelihara (287 unit) dan perlengkapan gedung Kantor yang dipelihara (12 bulan).

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				49.474.704.385	46.769.540.094	94,53
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				838.817.077	783.881.342	93,45

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi	6 Dokumen	6 Dokumen	100	240.311.469	223.413.300	92,97
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	5.000.000	1.768.000	35,36
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHL Pasaman Raya	4 Dokumen	4 Dokumen	100	10.000.000	10.000.000	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHL Lima Puluh Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100	10.000.000	9.922.300	99,22
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHL Agam Raya	2 Dokumen	2 Dokumen	100	10.000.000	9.725.000	97,25
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHL Bukit Barisan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	5.000.000	4.933.000	98,66
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHL Sijunjung	2 Dokumen	2 Dokumen	100	10.000.000	9.507.000	95,07
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHL Solok	4 Dokumen	4 Dokumen	100	10.000.000	9.676.000	96,76
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHL Hulu Batang Hari	2 Dokumen	2 Dokumen	100	10.998.900	10.393.900	94,50
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHP Dharmasraya	2 Dokumen	2 Dokumen	100	10.000.000	10.000.000	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHP Pesisir Selatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	10.000.000	9.998.250	99,98
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UPTD KPHP Mentawai	2 Dokumen	2 Dokumen	100	10.000.000	9.392.000	93,92
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi	8 Dokumen	8 Dokumen	100	364.883.208	337.343.592	92,45
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	2.500.000	1.250.000	50,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHL Pasaman Raya	4 Dokumen	4 Dokumen	100	12.000.000	11.960.000	99,67

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHL Lima Puluh Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100	12.000.000	11.942.550	99,52
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHL Agam Raya	4 Dokumen	4 Dokumen	100	12.000.000	11.710.000	97,58
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHL Bukit Barisan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	12.000.000	11.564.400	96,37
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHL Sijunjung	4 Dokumen	4 Dokumen	100	12.000.000	11.612.500	96,77
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHL Solok	4 Dokumen	4 Dokumen	100	12.000.000	11.155.250	92,96
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHL Hulu Batang Hari	4 Dokumen	4 Dokumen	100	18.123.500	18.066.500	99,69
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHP Dharmasraya	4 Dokumen	4 Dokumen	100	12.000.000	11.999.000	99,99
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHP Pesisir Selatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	12.000.000	11.960.800	99,67
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UPTD KPHP Mentawai	4 Dokumen	4 Dokumen	100	16.000.000	14.588.000	91,18
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>40.277.425.063</b>	<b>38.067.465.493</b>	<b>94,51</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kehutanan Provinsi	409 Orang	409 Orang	100	39.089.703.563	37.003.915.843	94,66
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dinas Kehutanan Provinsi	12 Bulan	12 Bulan	100	920.746.704	800.471.500	86,94
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dinas Kehutanan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100	22.346.000	22.100.250	98,90
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD Dinas Kehutanan Provinsi	12 Dokumen	12 Dokumen	100	102.642.296	100.701.250	98,11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD UPTD KPHL Pasaman Raya	12 Dokumen	12 Dokumen	100	15.000.000	14.800.000	98,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD UPTD KPHL Lima Puluh Kota	18 Dokumen	18 Dokumen	100	15.000.000	14.988.550	99,92

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD UPTD KPHL Agam Raya	12 Dokume	12 Dokumen	100	15.000.000	14.821.000	98,81
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD UPTD KPHL Sijunjung	12 Dokumen	12 Dokumen	100	15.000.000	14.988.350	99,92
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD UPTD KPHL Solok	12 Dokumen	12 Dokumen	100	15.000.000	14.999.500	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD UPTD KPHL Hulu Batang Hari	12 Dokumen	12 Dokumen	100	15.986.500	15.571.500	97,40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD UPTD KPHP Dharmasraya	12 Dokumen	12 Dokumen	100	15.000.000	15.000.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD UPTD KPHP Pesisir Selatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	15.000.000	14.997.750	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD UPTD KPHP Mentawai	12 Dokumen	12 Dokumen	100	21.000.000	20.110.000	95,76
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>559.487.320</b>	<b>480.391.474</b>	<b>85,86</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dinas Kehutanan Provinsi	14 Unit/12 Bulan	14 Unit/12 Bulan/	100	540.127.320	461.031.474	85,36
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	12 Bulan	12 Bulan	100	1.500.000	1.500.000	100,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHL Pasaman Raya	1 Orang	1 Orang	100	1.500.000	1.500.000	100,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHL Lima Puluh Kota	1 Unit	1 Unit	100	1.500.000	1.500.000	100,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHL Agam Raya	1 Orang	1 Orang	100	1.800.000	1.800.000	100,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHL Bukit Barisan	12 Bulan	12 Bulan	100	1.800.000	1.800.000	100,00

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHL Sijunjung	12 Bulan	12 Bulan	100	2.560.000	2.560.000	100,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHL Solok	1 Orang	1 Orang	100	1.500.000	1.500.000	100,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHL Hulu Batang Hari	1 Orang	1 Orang	100	1.800.000	1.800.000	100,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHP Dharmasraya	1 Orang	1 Orang	100	1.800.000	1.800.000	100,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHP Pesisir Selatan	12 Bulan/2 Dokumen	12 Bulan/2 Dokumen	100	1.500.000	1.500.000	100,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPTD KPHP Mentawai	6 Orang	6 Orang	100	1.800.000	1.800.000	100,00
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>832.495.000</b>	<b>796.589.003</b>	<b>95,69</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas Kehutanan Provinsi	296 Stel	296 Stel	100	222.000.000	196.261.821	88,41
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Pasaman Raya	64 Stel	64 Stel	100	48.000.000	45.260.000	94,29
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Lima Puluh Kota	74 Stel	74 Stel	100	49.500.000	49.500.000	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Agam Raya	42 Stel	42 Stel	100	28.500.000	28.499.972	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Bukit Barisan	96 Stel	96 Stel	100	66.000.000	65.934.000	99,90
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Sijunjung	52 Stel	52 Stel	100	39.000.000	39.000.000	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Solok	56 Stel	56 Stel	100	42.000.000	42.000.000	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHL Hulu Batang Hari	40 Stel	40 Stel	100	30.000.000	29.998.860	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHP Dharmasraya	42 Stel	42 Stel	100	31.500.000	31.500.000	100,00

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHP Pesisir Selatan	42 Stel	42 Stel	100	29.250.000	29.250.000	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD KPHP Mentawai	32 Stel	32 Stel	100	24.000.000	23.976.000	99,90
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	450 Orang	100	222.745.000	215.408.350	96,71
<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.599.014.000</b>	<b>1.555.828.284</b>	<b>97,30</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi	12 Bulan	12 Bulan	100	36.163.400	36.163.400	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	12 Bulan	12 Bulan	100	61.434.000	55.204.297	89,86.
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Pasaman Raya	12 Bulan	12 Bulan	100	10.348.600	10.348.600	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Lima Puluh Kota	12 Bulan	12 Bulan	100	10.348.600	10.348.600	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Agam Raya	12 Bulan	12 Bulan	100	10.348.600	10.348.600	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Bukit Barisan	12 Bulan	12 Bulan	100	10.348.600	10.348.600	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Sijunjung	12 Bulan	12 Bulan	100	10.348.600	10.335.600	99,87
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Solok	12 Bulan	12 Bulan	100	10.348.600	10.348.600	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Hulu Batang Hari	12 Bulan	12 Bulan	100	10.348.600	10.348.600	100,00



No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHP Dharmasraya	12 Bulan	12 Bulan	100	10.348.600	10.348.600	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHP Pesisir Selatan	12 Bulan	12 Bulan	100	10.348.600	10.348.600	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHP Mentawai	12 Bulan	12 Bulan	100	10.348.600	10.348.600	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi	12 Bulan	12 Bulan	100	723.797.500	709.585.925	98,04
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas Kehutanan Provinsi	12 Bulan	12 Bulan	100	139.943.000	136.614.250	97,62
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Kehutanan Provinsi	12 Bulan	12 Bulan	100	85.116.000	75.140.500	88,28
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	12 Bulan	12 Bulan	100	10.444.000	10.444.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Pasaman Raya	12 Bulan	12 Bulan	100	10.444.000	10.444.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Lima Puluh Kota	12 Bulan	12 Bulan	100	10.444.000	10.444.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Agam Raya	12 Bulan	12 Bulan	100	10.444.000	10.444.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Bukit Barisan	12 Bulan	12 Bulan	100	10.444.000	10.444.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Sijunjung	12 Bulan	12 Bulan	100	11.359.500	11.359.500	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Solok	12 Bulan	12 Bulan	100	10.444.000	10.444.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHL Hulu Batang Hari	12 Bulan	12 Bulan	100	10.444.000	9.881.500	94,61
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD KPHP Dharmasraya	12 Bulan	12 Bulan	100	10.444.000	10.444.000	100,00

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD KPHP Pesisir Selatan	12 Bulan	12 Bulan	100	10.444.000	10.444.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD KPHP Mentawai	12 Bulan	12 Bulan	100	10.444.000	10.444.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Dinas Kehutanan Provinsi	2 Jenis	2 Jenis	100	47.160.000	46.680.000	98,98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	2 Jenis	2 Jenis	100	3.480.000	3.480.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Pasaman Raya	2 Jenis	2 Jenis	100	3.480.000	2.880.000	82,76
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Lima Puluh Kota	2 Jenis	2 Jenis	100	3.000.600	3.000.000	99,98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan UPTD KPHL Agama Raya	2 Jenis	2 Jenis	100	3.480.000	3.480.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Bukit Barisan	2 Jenis	2 Jenis	100	3.480.000	3.480.000	91,67
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Sijunjung	2 Jenis	2 Jenis	100	3.480.000	3.480.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Solok	2 Jenis	2 Jenis	100	3.480.000	3.480.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHL Hulu Batang Hari	2 Jenis	2 Jenis	100	3.480.000	3.480.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHP Dharmasraya	2 Jenis	2 Jenis	100	3.480.000	3.480.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHP Pesisir Selatan	2 Jenis	2 Jenis	100	2.880.000	2.880.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan UPTD KPHP Mentawai	2 Jenis	2 Jenis	100	3.480.000	3.480.000	100,00

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi	12 Bulan	12 Bulan	100	300.000.000	285.410.109	95,14
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>				<b>420.000.000</b>	<b>399.912.668</b>	<b>95,22</b>
	Pengadaan Mebel Dinas Kehutanan Proinsi	3 Jenis	3 Jenis	100	420.000.000	399.912.668	95,22
<b>7</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>3.103.771.278</b>	<b>2.849.586.671</b>	<b>91,81</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kehutanan Provinsi	3.600 Surat	3.600 Surat	100	89.325.000	89.040.000	99,68
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kehutanan Provinsi	12 Bulan	12 Bulan	100	247.242.986	235.322.657	95,18
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	12 Bulan	12 Bulan	100	61.434.000	55.204.297	89,86
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Pasaman Raya	12 Bulan	12 Bulan	100	25.896.000	20.700.263	79,94
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Lima Puluh Kota	12 Bulan	12 Bulan	100	23.850.900	22.864.394	95,86
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Agam Raya	12 Bulan	12 Bulan	100	25.295.400	23.603.770	93,31
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Bukit Barisan	12 Bulan	12 Bulan	100	83.580.000	57.889.911	69,26
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Sijunjung	12 Bulan	12 Bulan	100	41.220.000	33.266.318	80,70
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Solok	12 Bulan	12 Bulan	100	32.070.000	26.723.623	83,33
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Hulu Batang Hari	12 Bulan	12 Bulan	100	18.675.264	15.948.388	85,40
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHP Dharmasraya	12 Bulan	12 Bulan	100	31.164.000	28.371.332	91,04
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHP Pesisir Selatan	12 Bulan	12 Bulan	100	19.747.501	15.367.126	77,82

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHP Mentawai	12 Bulan	12 Bulan	100	26.749.500	11.580.950	43,29
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Kehutanan Provinsi	13 Bulan	13 Bulan	100	901.751.690	814.671.503	90,34
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	13 Bulan	13 Bulan	100	40.653.600	40.637.929	99,96
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Pasaman Raya	13 Bulan	13 Bulan	100	134.362.525	126.833.844	94,40
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Lima Puluh Kota	13 Bulan	13 Bulan	100	134.082.636	134.029.364	99,96
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Agam Raya	13 Bulan	13 Bulan	100	126.656.649	126.643.564	99,99
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Bukit Barisan	13 Bulan	13 Bulan	100	258.154.925	212.512.345	82,32
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Sijunjung	13 Bulan	13 Bulan	100	133.446.857	127.729.364	95,72
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Solok	13 Bulan	13 Bulan	100	130.740.939	130.729.364	99,99
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHL Hulu Batang Hari	12 Bulan	12 Bulan	100	126.604.493	122.377.361	96,66
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHP Dharmasraya	13 Bulan	13 Bulan	100	122.341.363	122.341.363	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHP Pesisir Selatan	13 Bulan	13 Bulan	100	138.862.525	133.029.364	95,80
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD KPHP Mentawai	13 Bulan	13 Bulan	100	129.862.525	122.168.276	94,08
<b>8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.682.511.724</b>	<b>2.619.766.501</b>	<b>97,66</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Kehutanan Provinsi	53 Unit	53 Unit	100	667.220.000	654.118.751	98,04

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dinas Kehutanan Provinsi	17 Unit	17 Unit	100	.1.186.074.971	1.183.738.651	99,80
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Huta	1 Unit	1 Unit	100	173.568.754	173.266.000	99,83
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Pasaman Raya	2 Unit	2 Unit	100	45.000.000	44.912.000	99,80
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Lima Puluh Kota	1 Unit	1 Unit	100	45.000.000	45.000.000	100,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Agam Raya	1 Unit	1 Unit	100	45.000.000	45.000.000	100,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Bukit Barisan	3 Unit	3 Unit	100	45.000.000	44.888.000	99,75
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Sijunjung	2 Unit	2 Unit	100	45.000.000	45.000.000	100,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Solok	1 Unit	1 Unit	100	45.000.000	45.000.000	100,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHL Hulu Batang Hari	1 Unit	1 Unit	100	45.000.000	44.966.691	99,93
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHP Dharmasraya	1 Unit	1 Unit	100	45.000.000	45.000.000	100,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHP Pesisir Selatan	2 Unit	2 Unit	100	72.007.999	72.006.099	100,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD KPHP Mentawai	1 Unit	1 Unit	100	45.000.000	45.000.000	100,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dinas Kehutanan Provinsi	287 Unit/ 12 Bulan	287 Unit/ 12 Bulan	100	178.640.000	131.725.000	73,74
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>				<b>23.252.624.460</b>	<b>19.950.645.508</b>	<b>85,80</b>

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>				<b>300.000.000</b>	<b>297.079.060</b>	<b>99,08</b>
	Pembagian Blok /Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi	10 Km	10 Km	100	100.000.000	97.174.800	97,17
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH Dinas Kehutanan Provinsi	10 KPH	10 KPH	100	200.000.000	199.904.260	99,95
2	<b>Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>				<b>547.930.560</b>	<b>509.700.275</b>	<b>93,02</b>
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi	12 Dokumen	12 Dokume	100	105.000.000	83.537.400	79,56
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Pasaman Raya	2 Dokumen	2 Dokumen	100	45.000.000	41.740.875	92,76
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Lima Puluh Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100	42.930.000	41.886.500	97,57
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Agam Raya	2 Dokumen	2 Dokumen	100	40.000.000	36.409.150	91,02
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Bukit Barisan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	45.000.000	42.505.000	94,46
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Sijunjung	2 Dokumen	2 Dokumen	100	45.000.000	44.732.950	99,41
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Solok	2 Dokumen	2 Dokumen	100	45.000.000	44.010.750	97,80
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Hulu Batang Hari	2 Dokumen	2 Dokumen	100	40.000.000	39.463.100	98,59
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHP Dharmasraya	2 Dokumen	2 Dokumen	100	40.000.000	38.107.000	95,27

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHP Pesisir Selatan	5 Ijin Usaha/Kerjasama	5 Ijin Usaha/Kerjasama 1 Dokumen/1 Petak	100	45.000.000	44.653.550	99,23
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPHP Mentawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100	55.000.000	52.654.000	95,73
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>				<b>4.327.485.300</b>	<b>4.223.320.618</b>	<b>97,59</b>
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung Dinas Kehutanan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100	100.000.000	98.501.750	98,50
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Dinas Kehutanan Provinsi	27 Unit/10 KPH	27 Unit/10 KPH	100	100.000.000	98.669.260	98,67
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHL Pasaman Raya	3 Unit	3 Unit	100	20.000.000	18.782.300	93,91
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHL Lima Puluh Kota	5 Unit	5 Unit	100	20.000.000	19.999.400	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHL Agam Raya	1 Ijin Usaha/Kerjasama	1 Ijin Usaha/Kerjasama	100	20.000.000	19.596.600	97,98
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHL Bukit Barisan	4 Ijin Usaha/Kerjasama	4 Ijin Usaha/Kerjasama	100	20.000.000	18.308.000	91,54

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHL Sijunjung	2 Unit	2 Unit	100	20.000.000	19.506.000	97,53
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHL Solok	1 Ijin Usaha/Kerjasama	1 Ijin Usaha/Kerjasama	100	20.000.000	18.923.700	94,62
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHL Hulu Batang Hari	4 Ijin Usaha	4 Ijin Usahat	100	20.000.000	19.985.063	99,93
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHP Dharmasraya	2 Ijin Usaha/Kerjasama	2 Ijin Usaha/Kerjasama	100	19.860.000	19.860.000	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHP Pesisir Selatan	5 Ijin Usaha/Kerjasama	5 Ijin Usaha/Kerjasama	100	20.000.000	19.982.000	99,91
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHP Mentawai	1 Ijin Usaha/Kerjasama	1 Ijin Usaha/Kerjasama	100	17.390.000	17.128.000	98,49
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Dinas Kehutanan Provinsi	20 Unit/10 KPH	20 Unit/10 KPH	100	100.000.000	99.553.798	99,55
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Pasaman Raya	6 Unit	6 Unit	100	30.000.000	29.196.550	97,32



No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Lindung UPTD KPHL Lima Puluh Kota	22 Unit	22 Unit	100	18.882.300	18.680.000	98,93
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Agam Raya	1 KPH	1 KPH	100	20.000.000	19.611.600	98,06
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Bukit Barisan	4 Ijin Usaha/Kerjasama	4 Ijin Usaha/Kerjasama	100	30.000.000	29.944.250	99,81
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Sijunjung	2 Unit	2 Unit	100	20.000.000	19.172.550	95,86
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Solok	2 Ijin Usaha/Kerjasama	2 Ijin Usaha/Kerjasama	100	20.000.000	19.419.550	97,10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Hulu Batang Hari	1 KPH	1 KPH	100	20.000.000	19.800.035	99,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHP Dharmasraya	1 KPH	1 KPH	100	9.530.000	9.530.000	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHP Pesisir Selatan	1 Ijin Usaha/Kerjasama	1 Ijin Usaha/Kerjasama	100	10.000.000	9.982.000	99,82

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHP Mentawai	1 KPH	1 KPH	100	17.745.000	17.145.000	96,62
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi Dinas Kehutanan Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	100	20.000.000	17.391.000	86,96.
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung Dinas Kehutanan Provinsi	7 Dokumen	7 Dokumen	100	50.000.000	49.579.400	99,16.
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH Dinas Kehutanan Provinsi	10 Kelompok	10 Kelompok	100	200.000.000	167.661.500	83,83
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi	10 Komoditi/ Produk/10 Unit	10 Komoditi/ Produk/10 Unit	100	250.000.000	240.585.354	96,23
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHL Pasaman Raya	1 Komoditi/1 Unit	1 Komoditi/1 Unit	100	220.000.000	218.763.450	99,44
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHL Lima Puluh Kota	1 Komoditi/ 1 Paket	1 Komoditi/1 Paket	100	220.000.000	218.397.400	99,27
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHL Agam Raya	3 Unit	3 Unit	100	434.078.000	423.002.850	97,45
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHL Bukit Barisan	5 Unit	5 Unit	100	920.000.000	915.785.857	99,54
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHL Sijunjung	1 Unit/1 Komoditi	1 Unit/1 Komoditi	100	220.000.000	214.512.050	97,51

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHL Solok	5 Unit	5 Unit	100	420.000.000	398.817.213	94,96
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHL Hulu Batang Hari	2 Unit	2 Unit	100	20.000.000	19.989.938	99,95
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHP Dharmasraya	1 Unit	1 Unit	100	20.000.000	19.650.000	98,25
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHP Pesisir Selatan	4 Unit	4 Unit	100	620.000.000	618.123.200	99,70
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan UPTD KPHP Mentawai	1 Unit	1 Unit	100	20.000.000	19.784.000	98,92
<b>4</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>				<b>12.937.902.600</b>	<b>9.956.400.693</b>	<b>76,96</b>
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Dinas Kehutanan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	95.000.000	71.356.900	75,11
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Dinas Kehutanan Provinsi	300 Ha	300 Ha	100	605.250.500	567.486.591	93,76
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Pasaman Raya	225 Ha	225 Ha	100	1.765.000.000	1.687.236.450	95,59
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Lima Puluh Kota	613 Ha	42 Ha	6,85	2.716.899.600	183.189.050	6,74
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Agam Raya	280 Ha	280 Ha	100	1.432.500.000	1.390.630.907	97,08
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Bukit Barisan	305 Ha	305 Ha	100	1.828.750.000	1.774.743.075	97,05

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Sijunjung	50 Ha	50 Ha	100	460.000.000	457.474.975	99,45
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Solok	298 Ha	298 Ha	100	1.007.200.000	979.114.000	97,21
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Kawasan Hutan Negara UPTD KPHP Pesisir Selatan	75 Ha	75 Ha	100	837.302.500	724.007.000	86,47
	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	14 Unit	14 Unit	100	1.840.000.000	1.792.628.998	97,43
	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan UPTD KPHL Agam Raya	1 Unit	1 Unit	100	50.000.000	49.723.650	99,45
	Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Dinas Kehutanan Provinsi	11 Dokumen	11 Dokumen	100	300.000.000	278.809.097	92,94
<b>5</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>				<b>4.034.580.000</b>	<b>3.930.732.637</b>	<b>97,43</b>
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi	5 Kasus/160 Kali/1 Peta/450 Orang	5 Kasus/160 Kali/1 Peta/450 Orang	100	690.180.000	671.845.600	97,34
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Pasaman Raya	16 Kali/60 Orang	16 Kali/60 Orang	100	213.640.000	207.292.700	97,03
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Lima Puluh Kota	2 Kasus/17 Kal/45 Orang	2 Kasus/17 Kal/45 Orang	100	160.580.000	152.888.850	95,21
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Agam Raya	18 Kali/50 Orang	18 Kali/50 Orang	100	171.600.000	161.955.950	94,38
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Bukit Barisan	24 Kali/80 Orang	24 Kali/80 Orang	100	267.720.000	261.438.950	97,65
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Sijunjung	16 Kali/45 Orang	16 Kali/45 Orang	100	180.580.000	180.346.750	99,87

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Solok	16 Kali/45 Orang	16 Kali/45 Orang	100	181.600.000	168.597.500	92,84
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHL Hulu Batang Hari	15 Kali/30 Orang	15 Kali/30 Orang	100	137.520.000	136.679.304	99,39
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHP Dharmasraya	2 Kasus/16 Kali/1 Peta//45 Orang	2 Kasus/ 16 Kali/ Peta/45 Orang	100	170.580.000	170.394.538	99,89
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHP Pesisir Selatan	16 Kali/45 Orang	16 Kali/45 Orang	100	190.580.000	190.544.550	99,98
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan UPTD KPHP Mentawai	16 Kali	16 Kali	100	120.000.000	118.635.000	98,86
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi	20 Kali	20 Kali	100	30.000.000	28.761.200	95,87
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHL Pasaman Raya	8 Kali	8 Kali	100	20.000.000	18.794.100	93,97
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHL Lima Puluh Kota	8 Kali	8 Kali	100	15.000.000	14.403.050	96,02
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHL Agam Raya	5 Kali	5 Kali	100	15.000.000	14.458.450	96,39
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHL Bukit Barisan	2 Kali	2 Kali	100	20.000.000	19.558.000	97,79
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHL Sijunjung	2 Kali	2 Kali	100	15.000.000	14.308.650	95,39
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHL Solok	10 Kali	10 Kali	100	15.000.000	14.143.000	94,29
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHL Hulu Batang Hari	3 Kali	3 Kali	100	15.000.000	15.000.000	100,00

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHP Dharmasraya	5 Kali	5 Kali	100	15.000.000	14.898.775	99,33
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHP Pesisir Selatan	2 Kali	2 Kali	100	20.000.000	19.990.850	99,95
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan UPTD KPHP Mentawai	2 Kali	2 Kali	100	20.000.000	19.985.000	99,93
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi	150 Orang/150 Kali	150 Orang/150 Kali	100	770.000.000	756.526.375	98,25
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Pasaman Raya	15 Kali	15 Kali	100	60.000.000	59.546.700	99,24
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Lima Puluh Kota	19 Kali/100 Orang	19 Kali/100 Orang	100	60.000.000	58.364.200	97,27
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Agam Raya	12 Kali	12 Kali	100	50.000.000	41.119.850	82,24
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Bukit Barisan	20 Kali	20 Kali	100	70.000.000	64.196.350	91,71
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Sijunjung	15 Kali	15 Kali	100	60.000.000	59.846.800	99,74

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Solok	15 Kali	15 Kali	100	50.000.000	49.458.900	98,92
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHL Hulu Batang Hari	15 Kali	15 Kali	100	50.000.000	49.534.250	99,07
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHP Dharmasraya	15 Orang/15 Kali	15 Orang/15 Kali	100	70.000.000	69.550.245	99,36
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHP Pesisir Selatan	15 Kali	15 Kali	100	60.000.000	57.978.200	96,63
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan UPTD KPHP Mentawai	15 Kali	15 Kali	100	50.000.000	49.690.000	99,38
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>				<b>699.625.000</b>	<b>683.192.500</b>	<b>97,65</b>
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Dinas Kehutanan Provinsi	40 Unit	40 Unit	100	100.000.000	99.965.450	99,97
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Pasaman	5 Ha	5 Ha	100	50.000.000	48.606.750	97,21
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Lima Puluh Kota	1 KPH	1 KPH	100	50.000.000	41.028.550	82,06
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Agam Raya	5 Ha	5 Ha	100	50.000.000	47.656.100	95,31

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Bukit Barisan	5 Ha	5 Ha	100	100.000.000	97.317.000	97,32
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Sijunjung	1 Unit	1 Unit	100	100.000.000	99.247.750	99,25
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Solok	5 Ha	5 Ha	100	50.000.000	49.985.900	99,97
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHL Hulu Batang Hari	5,5 Ha	5,5 Ha	100	50.000.000	49.906.550	99,81
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHP Dharmasraya	5 Ha	5 Ha	100	49.625.000	49.625.000	100,00
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHP Pesisir Selatan	5 Ha	5 Ha	100	50.000.000	49.993.450	99,99
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya UPTD KPHP Mentawai	5 Ha	5 Ha	100	50.000.000	49.860.000	99,72
<b>7</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt; 6000 m3/Tahun</b>				<b>100.000.000</b>	<b>99.651.650</b>	<b>99,65</b>
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	40 Unit	40 Unit	100	100.000.000	99.651.650	99,65
<b>8</b>	<b>Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan</b>				<b>305.101.000</b>	<b>250.568.075</b>	<b>82,13</b>
	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	6 Unit	6 Unit	100	<u>94.420.000</u>	<u>67.826.825</u>	<u>71,84</u>
	Sertifikat Sumber Benih	2 Sertifikat	2 Sertifikat	100	<u>50.000.000</u>	<u>48.283.250</u>	<u>96,57</u>
	Sertifikat Mutu Benih	5 Sertifikat	5 Sertifikat	100	<u>47.790.000</u>	<u>31.811.650</u>	<u>66,57</u>
	Sertifikasi Mutu Bibit	10 Sertifikat	10 Sertifi-kat	100	<u>25.700.000</u>	<u>22.294.200</u>	<u>86,75</u>
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	7 Unit	7 Unit	100	87.191.000	80.352.150	92,16
<b>III</b>	<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</b>				<b>225.402.500</b>	<b>176.497.502</b>	<b>78,30</b>



No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b>				<b>225.402.500</b>	<b>176.497.502</b>	<b>78,30</b>
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Povinsi	10 Kali	10 Kali	100	60.832.500	56.792.500	93,36
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting di Luar Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi	4 Kali	4 Kali	100	164.570.000	119.705.002	72,74
IV	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>				<b>13,109.547.238</b>	<b>12.223.583.447</b>	<b>93,24</b>
1	<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>				<b>13.109.547.238</b>	<b>12.223.583.447</b>	<b>93,24</b>
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi	250 Orang/20 Unit	250 Orang/20 Unit	100	460.000.000	454.576.403	98,82
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan UPTD KPHL Pasaman Raya	1 Unit	1 Unit	100	100.000.000	99.379.400	99,38
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan UPTD KPHL Lima Puluh Kota	1 Unit	1 Unit	100	25.000.000	24.296.500	97,19
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan UPTD KPHL Bukit Barisan	1 KPH	1 KPH	100	100.000.000	92.525.200	92,53
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan UPTD KPHL Sijunjung	2 Unit	2 Unit	100	200.000.000	197.201.350	98,60

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Dinas Kehutanan Provinsi	100 Kelompok	100 Kelompok	100	350.000.000	341.885.611	97,68
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHL Pasaman Raya	11 Kelompok	11 Kelompokt	100	215.000.000	210.048.500	97,70
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan UPTD KPHL Lima Puluh Kota	3 Kelompok	3 Kelompok	100	50.000.000	49.981.700	99,96
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Bukit Barisan	100 Kelompok	100 Kelompok	100	300.000.000	283.309.000	94,44
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi	100 Orang/6 Kelompok/5 Kali/820 Stup/3 Unit	100 Orang/6 Kelompok/5 Kali/820 Stup/3 Unit	100	2.277.507.500	1.698.384.668	74,57
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Pasaman Raya	5 Kali/46 Kelompok/8 20 Stup/3 Unit	5 Kali/46 Kelompok/820 Stup/3 Unit	100	2.035.000.000	1.981.748.000	97,38
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Lima Puluh Kota	100 Orang/25 Kelompok/5 Kali/374 Stup/4 Unit	100 Orang/25 Kelompok/5 Kali/374 Stup/4 Unit	100	1.522.000.000	1.481.330.500	97,33
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Agam Raya	233 Stup/15 Kelompok/2 Unit	233 Stup/15 Kelompok/2 Unit	100	638.887.918	620.989.650	97,20
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Bukit Barisan	96 Unit/5.395 Buah/580 Stup	93 Unit/5.395 Buah/ 580 Stup	100	1.775.000.000	1.668.307.141	93,99
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Sijunjung	5 Kali/8 Kelompok/2 25 Stup/2.800 Ha	5 Kali/8 Kelompok/225 Stup/2.800 Ha	100	745.000.000	738.388.750	99,11
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Solok	13 Kelompok/2 25 Unit	13 Kelompok/225 Unit	100	478.700.000	472.624.750	98,73
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHL Hulu Batang Hari	64 Kelompok/5 Kali/160 Stup/3.650 Ha	64 Kelompok/5 Kali/160 Stup/3.650 Ha	100	524.820.000	523.164.642	.99,68
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Dharmasraya	4 Kelompok/4 Kali/165 Stup/2 Unit/3.000 Ha	4 Kelompok/4 Kali/165 Stup/2 Unit/3.000 Ha	100	636.913.820	618.730.662	97,15

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Pesisir Selatan	9 Kelompok/3 15 Unit	9 Kelompok/31 5 Unit	100	470.000.000	462.546.970	98,41
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial UPTD KPHP Mentawai	4 Kelompok/1 32 Stup	4 Kelompok/13 2 Stup	100	205.718.000	204.164.200	99,24
V	<b>Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</b>				<b>550.000.000</b>	<b>511.180.608</b>	<b>92,94</b>
1	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>550.000.000</b>	<b>511.180.608</b>	<b>92,94</b>
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Dinas Kehutanan Provinsi	1 Dokume	1 Dokumen	100	100.000.000	97.860.350	97,86
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Dinas Kehutanan Provinsi	7 Petak/10 KPH	7 Petak/10 KPH	100	250.000.000	238.830.586	95,53
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS Dinas Kehutanan Provinsi	2 Kelompok	2 Kelompok	100	100.000.000	87.087.850	87,09
	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS Dinas Kehutanan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100.000.000	87.401.822	87,40

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		
II	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>		
4	<b>Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>		
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHL Lima Puluh Kota	Pengadaan Bibit Tanaman dan Pupuk yang direncanakan dilaksanakan secara tender tidak bisa dilaksanakan disebabkan karena bibit yang dispek tidak tersedia oleh pengada (spesifikasi bibit manggis okulasi tidak tersedia di lapangan)	Sudah diupayakan melakukan tender ulang namun karena dana DAK waktunya terbatas yaitu waktu pengaploadtan dokumen ke aplikasi OMSPAN terakhir tanggal 31 April 2022 maka tender tidak bisa dilaksanakan lagi, dengan tidak bisa dilaksanakan tender kembali maka anggaran tersebut dikembalikan ke kas Negara sebagai sisa anggaran
III	<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</b>		
IV	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>		

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
V	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)		

### 3.1.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Tahun Anggaran 2022 yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.17.327.678.479,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.608.802.852,70 atau 95,85%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	29,00%	29,00%	100
II	Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	99,50%	99,98%	100
III	Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	37,50%	37,50%	100
IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai akuntabilitas	A (80,00)	BB (76,06)	98,83
V	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi		Tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi	B (76,61)	A (85,74)	111,91

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (Target Kinerja : 29,00%) (Realisasi Kinerja : 29,00%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengelolaan Energi Terbarukan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi sub kegiatan :

- Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi. dengan output Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi

Energi.

- Pengalokasi anggaran untuk program konservasi energi. dengan output Terbangunnya Infrastruktur Konservasi Energi.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Rasio Elektrifikasi (Target Kinerja : 99,50%) (Realisasi Kinerja : 99,98%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- b) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi sub kegiatan :

- Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Provinsi dengan output Tersedianya data pengendalian dan pengawasan izin operasi.

- (2) Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri, dengan sub kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan output tersedianya Data Pengendalian dan Pengawasan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

- (3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, dengan sub kegiatan :

- Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu dengan output tersedianya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu.
- Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok

Masyarakat Tidak Mampu dengan output Terbangunnya Instalasi Listrik bagi Kelompok Masyarakat tidak Mampu yang dilewati jaringan listrik.

- Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan output terbangunnya PLTS Tersebar/SHS Revit PLTMH.
- Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan output tertatanya pengelolaan pembangkit EBT Perdesaan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase Luasan Daerah Konservasi Air (Target Kinerja : 37,50%) (Realisasi Kinerja : 37,50%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah, dengan output Tersedianya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

- d. Sasaran IV : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Nilai akuntabilitas (Target Kinerja : 80,00%) (Realisasi Kinerja : 76,06%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun.
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD, dengan output Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun.
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan output Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output Jumlah dokumen evaluasi yang disusun.
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan.
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya.
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN , dengan output Jumlah ASN yang mendapatkan honor.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan output Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output Jumlah pemeliharaan kepemilikan daerah.
  - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban.
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output Jumlah dokumen laporan barang milik daerah.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan output Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.

- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan output Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi.
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Mebel, dengan output Jumlah meubel.
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output Jumlah tagihan internet, telp, air dan listrik (PLN) yang dibayarkan.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia.
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau



- Lapangan, dengan output Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab (Lift, AC).
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

- e. Sasaran V : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi (Target Kinerja : 76,61 (B)) (Realisasi Kinerja : 85,74 (A)). Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				17.327.678.479	16.608.802.851,70	95,85
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	100	11.105.032.920	10.774.962.859,97	97,03
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	354.193.570	346.395.502	97,80
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	7.342.787.436	7.083.037.390	96,46

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100	260.511.607	255.986.115	98,26
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100	88.072.000	87.395.770	99,23
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	1.029.397.642	1.022.801.959	99,36
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	252.000.000	251.480.977,37	99,79
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	1.241.811.745	1.200.964.172,60	96,71
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	536.258.920	526.900.974	98,25
II	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	55%	55%	100	145.000.000	144.508.150	99,66
9	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	100	145.000.000	144.508.150	99,66
III	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	33,30%	33,30%	100	337.360.000	267.529.805	79,30
10	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	20 Ton CO2eq	20 Ton CO2eq	100	337.360.000	267.529.805	79,30
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	99,6	99,6	100	5.740.285.559	5.421.802.037	94,45
11	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	112.640.000	110.014.200	97,67
12	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100	60.000.000	59.785.300	99,64
13	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1300 KK	1300 KK	100	5.567.645.559	5.252.002.537	94,33

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
1	<b>Pengelolaan Aspek Kegeologian</b>	Perubahan regulasi disaat kegiatan sedang berjalan	Memaksimalkan ketersediaan dana, sumber daya manusia dan kegiatan pengambilan data lapangan
2	<b>Pengelolaan Energi Terbarukan</b>	Alokasi anggaran dan kewenangan daerah	Promosi untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan EBT
3	<b>Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>	Validasi data jumlah total rumah tangga	Kolaborasi pemerintah provinsi dengan PT. PLN

##### 3.1.3.6. Perdagangan; Perindustrian

Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.34.823.521.679,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.583.356.372,00 atau 93,57%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun capaian kinerja pada masing-masing program yang dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	<b>Program Perizanan dan Pendaftaran Perusahaan</b>	Jumlah Perusahaan yang didata	5.450 jumlah usaha	8.1336 jumlah usaha	1492,40
II	Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi dan Perdagangan</b>	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	5,50%	5,50%	100,00
III	Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6%	7,05%	117,50
IV	Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	Nilai Ekspor	1420,99 juta US\$	2867,83 juta US\$	188,13
V	Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan</b>	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	72%	95,21%	132,24

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
	saing	<b>Konsumen</b>	Persentase Komoditi Potensial yang sesuai ketentuan berlaku	23%	48,84%	212,35
			Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	88%	90,63%	102,99
VI	Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	5%	5,50%	110,00
VII	Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	Jumlah Sentra Industri yang diberi kekuatan	20 sentra	75 sentra	375,00
VIII	Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah	<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	72%	60,00%	83,33
IX	Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah	<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	Jumlah Pelaku Industri	41.373 unit usaha	40.653 unit usaha	98,26

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Jumlah Perusahaan yang didata (Target Kinerja : 5.450 Usaha) (Realisasi Kinerja 8.1336 Usaha).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :

➤ Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan output Jumlah dokumen data dan informasi perizinan elektronik sebanyak 1 dokumen.

- (2) Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API), dengan Sub

kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi layanan penerbitan SKA, dengan output :
  - Jumlah aparat dan pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis SKA sebanyak 50 orang.
  - Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap layanan penerbitan SKA yang dilakukan 1 kali.

b. Sasaran II : Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi (Target Kinerja : 5,50%) (Realisasi Kinerja 5,50%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Peningkatan Sarana Distribusi dan Perdagangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas, dengan Sub kegiatan :

- Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi, dengan output Jumlah pasar yang dilakukan pembinaan pengelolaan pasar di Sumatera Barat sebanyak 20 pasar.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

c. Sasaran III : Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Target Kinerja : 6%) (Realisasi Kinerja 7,05%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, dengan Sub kegiatan :

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi

Barang Lintas Kabupaten/Kota, dengan output :

- Jumlah dokumen data hasil pemantauan harga dan distribusi gas LPG 3 kg sebanyak 1 laporan.
  - Jumlah komoditas yang tersedia data dan informasi harga serta distribusi barang di 19 kab/kota sebanyak 17 komoditas.
- Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan output Jumlah operasi pasar/pasar murah yang dilaksanakan sebanyak 9 kali.
- (2) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya, dengan Sub kegiatan :
- Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi, dengan output Jumlah laporan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kab/kota sebanyak 1 laporan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d. Sasaran IV : Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing, dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Nilai Ekspor (Target Kinerja : 1420,99 Juta) (Realisasi Kinerja 2867,83 Juta), dengan kegiatan sebagai berikut :

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengembangan Ekspor dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi, dengan Sub kegiatan :

- Pameran Dagang Internasional/Nasional, dengan output Jumlah pameran dagang internasional/nasional yang diikuti sebanyak 2 kali.
- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, dengan output :
  - Jumlah calon eksportir yang mengikuti bimtek ekspor sebanyak 30 orang.

- Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina sebanyak 1 kali.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

e. Sasaran V : Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi (Target Kinerja : 72%) (Realisasi Kinerja 95,21%).
- 2) Persentase Komoditi Potensial yang sesuai ketentuan berlaku (Target Kinerja : 23%) (Realisasi Kinerja 48,84%).
- 3) Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan (Target Kinerja : 88%) (Realisasi Kinerja 90,63%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub kegiatan :

➤ Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen, dengan output :

- Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif sebanyak 8 BPSK.
- Jumlah kegiatan pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen yang dilakukan sebanyak 8 kali.
- Jumlah masyarakat, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha dan anggota BPSK yang diberikan penguatan pemberdayaan sebanyak 208 orang.

(2) Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub kegiatan :

➤ Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen, dengan output:

- Jumlah barang beredar dipasaran yang diawasi sesuai dengan ketentuan sebanyak 15 produk.
- Jumlah barang beredar dipasaran yang diawasi sesuai dengan ketentuan sebanyak 60 merk.
- Jumlah berita acara pengawasan distribusi dan

perizinan perdagangan bagi pelaku usaha sebanyak 98 berita acara.

(3) Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub kegiatan :

- Verifikasi Mutu Produk, dengan output Jumlah komoditi potensial yang diverifikasi mutu di Kab./Kota untuk dilakukan pengujian contoh di laboratorium pengujian sebanyak 7 komoditi potensial.
- Pengembangan Layanan Pengujian, dengan output :
  - Jumlah laboratorium pengujian dapat diperpanjang akreditasinya sebanyak 1 laboratorium.
  - Jumlah pengujian mutu komoditi potensial sebanyak 7 komoditi potensial.
  - Jumlah petugas yang mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak 4 orang.
  - Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang sebanyak 1 dokumen.
- Pengembangan Layanan Kalibrasi, dengan output :
  - Jumlah laboratorium kalibrasi yang dapat diperpanjang akreditasinya sebanyak 1 laboratorium
  - Jumlah peralatan yang dikalibrasi di kab/kota sebanyak 6 kelompok besaran.
  - Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan sebanyak 1411 sertifikat.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V.

f. Sasaran VI : Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing, dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran (Target Kinerja : 5%) (Realisasi Kinerja 5,50%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri, dengan Sub kegiatan :

- Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di



Tingkat Provinsi, dengan output :

- Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi marketing digital sebanyak 500 pelaku usaha.
- Jumlah promosi produk industri kecil menengah Sumatera Barat yang diikuti dan dilaksanakan sebanyak 9 kali.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VI.

g. Sasaran VII : Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat, dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Jumlah Sentra Industri yang diberi perkuatan (Target Kinerja : 20 Sentra) (Realisasi Kinerja 75 Sentra).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan Sub kegiatan :

➤ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dengan output :

- Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek dan diversifikasi produk sebanyak 1004 IKM.
- Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi dan standardisasi produk industri (sertifikasi halal, MD, SNI, Merk) sebanyak 147 sertifikat.
- Jumlah Wirausaha baru yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis disektor agro dan non agro sebanyak 1075 IKM.

(2) Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi UPTD Logam, dengan Sub kegiatan :

➤ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dengan output :

- Jumlah IKM Logam Mesin yang mendapatkan sosialisasi prototipe teknologi tepat guna sebanyak 150 orang.
- Jumlah wira usaha baru IKM logam mesin yang

mendapatkan bimbingan teknis produksi sebanyak 35 WUB.

(3) Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri, dengan Sub kegiatan :

➤ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dengan output :

- Jumlah sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan atsiri yang tersedia sebanyak 1 unit.
- Jumlah wira usaha baru atsiri yang mendapatkan bimbingan teknis pengolahan atsiri sebanyak 50 WUB.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VII.

h. Sasaran VIII : Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah, dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI (Target Kinerja : 72%) (Realisasi Kinerja 60%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi, dengan Sub kegiatan :

➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi, dengan output :

- Jumlah Aparat dan IMB yang mendapatkan Bimtek IUI sebanyak 100 orang.
- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI sebanyak 28 kali.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VIII.

i. Sasaran IX : Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Jumlah Pelaku Industri (Target Kinerja : 41.373 usaha) (Realisasi Kinerja 40.653 usaha).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dengan Sub kegiatan :

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui SIINas, dengan output Jumlah buku yang memuat data industri dan sentra di Sumatera Barat sebanyak 30 buku.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IX.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Dalam upaya pencapaian target kinerja program didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Adapun capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai target dalam dokumen anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				<b>16.595.941.947</b>	<b>15.610.594.061</b>	<b>94</b>
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				<b>109.680.699</b>	<b>108.201.815</b>	<b>99</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	100	58.695.269	57.418.750	98
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100			
		4 dokumen	4 dokumen	100	50.985.430	50.783.065	100
		5 dokumen	5 dokumen	100			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				<b>10.853.256.113</b>	<b>10.035.786.682</b>	<b>92</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	86 orang, 12 bulan	86 orang, 12 bulan	100	10.383.894.113	9.580.971.732	92

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 orang, 12 bulan	40 orang, 12 bulan	100	423.522.000	411.227.000,00	97
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	- 13 laporan	- 13 laporan	100	45.840.000	43.587.950	95
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				<b>126.300.000</b>	<b>124.763.018</b>	<b>99</b>
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	126.300.000	124.763.018	99
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				<b>281.049.697</b>	<b>277.681.500</b>	<b>99</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105 stel	105 stel	100	72.964.500	72.882.600	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 orang	150 orang	100	208.085.197	204.798.900	98
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				<b>731.254.364</b>	<b>728.251.718</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 jenis komponen	12 jenis komponen	100	20.546.461	20.522.800	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 jenis	1 jenis	100	724.800	724.500	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis komponen	15 jenis komponen	100	7.685.000	7.685.000	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis komponen	7 jenis komponen	100	2.594.900	2.514.900	97
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51 paket	51 jenis	100	159.804.600	158.310.200	99
		15 kali	- 15 kali	100			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34 jenis	34 jenis	100	12.487.300	12.482.606	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45 jenis	45 jenis	100	10.000.000	10.000.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33 jenis	33 jenis	100	7.826.000	7.824.400	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15 kotak	15 kotak	100	49.800.000	49.336.500	99
		166 buah	166 buah	100			
		10 rim	10 rim	100			
		50 buah	50 buah	100			
		800 buah	800 buah	100			
		154,4 m2	154,4 m2	100			

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		102000 lembar	102000 lembar	100			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6000 lembar	6000 lembar	100	1.500.000	1.500.000	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 kotak	2 kotak	100	6.315.000	6.315.000	100
		1 kotak	1 kotak	100			
		2 pcs	2 pcs	100			
		7 buku	7 buku	100			
		2 rim	2 rim	100			
		1 rim	1 rim	100			
		24 buku	24 buku	100			
		100 lembar	100 lembar	100			
		10072 lembar	10072 lembar	100			
		5 kotak	5 kotak	100	1.995.000	1.995.000	100
		30 buah	30 buah	100%			
		10 buah	3 buah	100			
		20 m2	20 m2	100			
		1700 lembar	1700 lembar	100			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1152 eksemplar dan buku	1152 eksemplar	100	29.780.000	29.210.000	98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	288 eksemplar	288 eksemplar	100	1.440.000	1.440.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	288 eksemplar	288 eksemplar	100	1.440.000	1.440.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360 eksemplar dan buku	360 eksemplar dan buku	100	1.800.000	1.800.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	50 laporan	100	415.515.303	415.150.812	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<b>937.508.592</b>	<b>896.730.980</b>	<b>96</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36 unit	36 unit	100	226.710.400	225.994.600	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit	100	31.700.000	31.700.000	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket	100	679.098.192	639.036.380	94
		1 paket	1 paket	100			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<b>2.238.456.678</b>	<b>2.141.514.119</b>	<b>96</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1590 surat	1590 surat	100	12.700.000	10.598.982	83
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 surat	600 surat	100	600.000	600.000	100

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 surat	150 surat	100	1.500.000	1.500.000	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 surat	50 surat	100	1.350.000	1.350.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8 kali	8 kali	100	335.349.800	314.288.937	94
		1300 meter kubik	620,06 meter kubik	48			
		100 mbps	100 mbps	100			
		143000 kwh	93892,35 kwh	66			
		5 rekening telepon	5 rekening telepon	100			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57040 kwh	54878.34 kwh	96	108.954.000	104.969.257	96
		2 rekening	2 rekening	100			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 rekening	2 rekening	100	80.310.000	66.659.096	83
		40000 kwh	35291,27 kwh	88,2			
		100 mbps	100 mbps	100			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97330 kwh	97064.61 kwh	100	145.995.000	145.596.922	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35 orang, 12 bulan	35 orang, 12 bulan	100	1.551.697.878	1.495.950.925	96
		44 kali	44 kali	100			
		12 kali	12 kali	100			
		4 kali	3 kali	100			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				<b>1.318.435.804</b>	<b>1.297.664.230</b>	<b>98</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	12 unit	12 unit	100	284.590.000	270.419.804	95
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 unit	9 unit	100	12.405.000	12.405.000	100
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit	100	890.945.154	887.549.479	100
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	19.155.650	18.870.000	99
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120 unit	117 unit	98	95.020.000	92.335.797	97

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	9.130.000	8.894.150	97
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	7.190.000	7.190.000	100
<b>II</b>	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>				<b>11.204.907.229</b>	<b>10.667.284.175</b>	<b>95</b>
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				<b>9.351.801.729</b>	<b>8.858.424.229</b>	<b>95</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1004 IKM	1004 IKM	100	9.351.801.729	8.858.424.229	95
		147 sertifikat	147 sertifikat	100			
		1075 IKM	1075 IKM	100			
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				<b>876.005.200</b>	<b>846.795.646</b>	<b>97</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	150 IKM	150 orang	100	876.005.200	846.795.646	97
		35 WUB	35 WUB	100			
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				<b>977.100.300</b>	<b>962.064.300</b>	<b>98</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 unit	1 unit	100	977.100.300	962.064.300	98
		50 WUB	50 WUB	100			
<b>III</b>	<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>				<b>147.246.346</b>	<b>143.628.454</b>	<b>98</b>
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				<b>147.246.346</b>	<b>143.628.454</b>	<b>98</b>

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	100 orang	100 orang	100	147.246.346	143.628.454	98
		28 kali	28 kali	100			
<b>IV</b>	<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>				<b>76.651.250</b>	<b>74.513.590</b>	<b>97</b>
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				<b>76.651.250</b>	<b>74.513.590</b>	<b>97</b>
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui SIINas	30 buku	30 buku	100	76.651.250	74.513.590	97
<b>V</b>	<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>				<b>105.931.450</b>	<b>93.562.600</b>	<b>88</b>
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi				<b>41.543.250</b>	<b>35.695.000</b>	<b>86</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 dokumen	1 dokumen	100	41.543.250	35.695.000	86
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				<b>64.388.200</b>	<b>57.867.600</b>	<b>90</b>



No	Program/Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	50 orang	50 orang	100	64.388.200	57.867.600	90
		1 kali	1 kali	100			
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>				<b>310.762.000</b>	<b>307.349.288</b>	<b>99</b>
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				<b>310.762.000</b>	<b>307.349.288</b>	<b>99</b>
	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	20 pasar	20 pasar	100	310.762.000	307.349.288	99
<b>VII</b>	<b>Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>				<b>2.356.625.591</b>	<b>2.176.827.166</b>	<b>92</b>
	Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri				<b>2.356.625.591</b>	<b>2.176.827.166</b>	<b>92</b>
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	500 pelaku usaha	500 pelaku usaha	100	2.356.625.591	2.176.827.166	92
		9 kali	9 kali	100			
<b>VIII</b>	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>				<b>754.508.500</b>	<b>399.116.778</b>	<b>53</b>
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota				<b>754.508.500</b>	<b>399.116.778</b>	<b>53</b>
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	3 kali	2 kali	67	607.109.000	260.064.678	43
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	30 orang	30 orang	100	147.399.500	139.052.100	94
		1 kali	1 kali	100			
<b>IX</b>	<b>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>				<b>2.930.005.516</b>	<b>2.778.233.247</b>	<b>95</b>
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				<b>2.222.629.550</b>	<b>2.094.771.971</b>	<b>94</b>
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	8 BPSK	8 BPSK	100	2.222.629.550	2.094.771.971	94
		8 kali	8 kali	100			
		208 orang	208 orang	100			

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				206.601.016	188.225.954	91
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	15 produk	15 produk	100	206.601.016	188.225.954	91
		60 merk	60 merk	100			
		98 berita acara	98 berita acara	100			
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				500.774.950	495.235.322	99
	Verifikasi Mutu Produk	7 komoditi potensial	7 komoditi potensial	100	53.202.100	52.286.717	98
	Pengembangan Layanan Pengujian	1 laboratorium	1 laboratorium	100	274.936.220	271.707.082	99
		7 komoditi potensial	7 komoditi potensial	100			
		4 orang	4 orang	100			
		1 dokumen	1 dokumen	100			
	Pengembangan Layanan Kalibrasi	1 laboratorium	1 laboratorium	100	172.636.630	171.241.523	99
		6 kelompok besaran	6 kelompok besaran	100			
		1300 Sertifikat	1411 Sertifikat	109			
X	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>				340.941.850	332.247.013	97
	1. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan				277.677.687	271.582.850	98
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100	68.911.200	68.657.200	100
		17 komoditas	17 komoditas	100			

No	Program/Kegiatan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	9 kali	9 kali	100	208.766.487	202.925.650	97
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				63.264.163	60.664.163	96
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	1 laporan	1 laporan	100	63.264.163	60.664.163	96

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat beberapa sub kegiatan yang serapan anggarannya di bawah 90%, yaitu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan Pameran dagang Internasional/Nasional. Adapun penyebab rendahnya serapan anggaran pada kegiatan tersebut adalah karena kegiatan pameran dagang internasional/nasional yaitu Pokok Pikiran Pak Kobal yang tidak dapat terlaksanakan karena tidak mendapatkan izin.

Dalam mengembangkan sektor industri dan perdagangan di Sumatera Barat masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian program. Berikut permasalahan sekaligus upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut :

## 2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tidak ada permasalahan	
II	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pokir Buk Aida Lembah Bungsu tidak dapat terlaksana karena salah kode rekening	Pemberian bantuan bahan baku disertai dengan adanya pelatihan, jika tidak maka termasuk kedalam hibah barang

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
III	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Tidak ada permasalahan	-
IV	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tidak ada permasalahan	-
V	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Tidak ada permasalahan	-
VI	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tidak ada permasalahan	-
VII	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Tidak ada permasalahan	-
VIII	Program Pengembangan Ekspor		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota		
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Pokir Pak Kobal Pameran Internasional di Riyadh tidak dapat terealisasi karena tidak mendapatkan izin	Dari sisi waktu perlu persiapan yang lebih dalam pengurusan izin ke luar negeri lebih kurang 2 bulan, sehingga tidak terkendala nantinya dalam mendapatkan izin tersebut
IX	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Tidak ada permasalahan	-
X	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tidak ada permasalahan	-

### 3.1.3.7. Transmigrasi

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.461.845.075,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.459.973.995,00 atau 99,59%, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Berkembangnya Kawasan Transmigrasi	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP)	38,04	62,44	164,14
		Pembangunan Kawasan Transmigrasi				
		Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	68,07	70,27	103,23

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Berkembangnya Kawasan Transmigrasi, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Indeks Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP)

(Target Kinerja : 38,04) (Realisasi Kinerja : 62,44).

- 2) Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) (Target Kinerja : 68,07) (Realisasi Kinerja : 70,27).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - (1) Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
    - Identifikasi potensi kawasan transmigrasi dengan output dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain.
    - Penataan usaha pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan output usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi.
- b) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - (1) Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi.
  - (2) Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi dengan output verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi transmigran penduduk setempat.
  - (3) Pelatihan transmigrasi, dicapai dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Pelatihan transmigrasi dengan output calon transmigran yang mendapat pelatihan.
- c) Program Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dicapai dengan kegiatan sebagai berikut :
  - (1) Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka pemantapan Satuan Pemukiman dengan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penguatan SDM dalam rangka pemantapan satuan pemukiman dengan output Kepala Keluarga transmigran yang mendapatkan pembinaan.
    - Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan pemukiman dengan output Satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infratsruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan.
  - (2) Kegiatan Penguatan infrastruktur sosial ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pemantapan Satuan

Pemukiman, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan pemukiman dengan output Satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastuktur sosial, ekonomi dan kelembagaan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>	100 %	100 %	100	461.845.075	459.973.995	99,59
1	<b>Program perencanaan kawasan transmigrasi</b>	100 %	100 %	100	137.394.000	136.326.045	99,22
	Penataan persebaran penduduk yang erasal dari lintas daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	38,04 indeks	62,44 indeks	164,14	174.162.175	173.931.150	99,87
2	<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	38,04 indeks	62,44 indeks	164,14	174.162.175	173.931.150	99,87
	Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi	19 KK	19 KK	100	35.484.200	35.465.000	99,95
	Pelatihan transmigrasi	90 KK	90- KK	100	138.677.975	138.466.150	99,85
3	<b>Pengembangan Satuan permukiman pada tahap pemantapan</b>	68,07 indeks	70,27 indeks	103,23	150.288.900	149.716.800	99,62
	Penguatan SDM dalam rangka pemantapan Satuan Pemukiman	60 KK	60 KK	100	89.518.900	89.316.800	99,77
	Penguatan infrastruktur sosial ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pemantapan Satuan Pemukiman	3 klp	3 klp	100	60.770.000	60.400.000	99,39

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
1	Program Perencanaan kawasan transmigrasi	Program transmigrasi baru di Kabupaten Solok Slatan (Lubuk Ulang Aling Tengah dan Lubuk Ulang Aling Selatan tidak dapat dilanjutkan karena lokasi yang diusulkan berada dalam HGU PT Hastika Palma dan PT BRM	Telah dilakukan koordinasi ke Dinas Kehutanan Provinsi dan Kantor Pusat PT BRM di Pekanbaru, tetapi pihak PT BRM tidak bersedia menyerahkan lahannya untuk Program Transmigrasi
2	Program Pembangunan kawasan transmigrasi	Pelum terpenuhinya daya tampung di Lokasi Transmigrasi Padang Tarok SP 1 Kab Sijunjung	Minimnya alokasi anggaran mandatory dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi
3	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Kapasitas Lembaga Usaha di Kawasan Transmigrasi masih belum optimal	Perlunya Kerjasama Lintas Sektor dalam pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Usaha Yang ada di Kawasan Transmigrasi

### 3.1.4. FUNGSI PENUNJANG

#### 3.1.4.1. Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Perangkat Daerah yang menaungi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.19.067.129.634,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.920.620.969,00 atau 99,23% dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	73	76,30	104,52
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provins	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	78,25	76,68	98,01
III	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	83	93,66	112,84

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Untuk mendukung capaian target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dialokasikan dana melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.5.885.732.027,00 dengan realisasi Rp.5.830.595.765,00 atau 99,06% yang tersebar pada 2 (dua) Program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.836.496.583,00 (3 kegiatan dengan 10 sub kegiatan) dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.4.049.235.444,00 (3 kegiatan dengan 24 sub kegiatan).

a. Sasaran I : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Indikator Indeks Kualitas Perencanaan (target kinerja 73) (realisasi 73,30) capaian 104,52%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan :
    - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen Kebijakan lainnya, dengan output Jumlah dokumen hasil penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya.
    - Pelaksanaan Koonsultasi Publik, dengan output Jumlah dokumen berita acara konsultasi publik yang dilaksanakan.
    - Pelaksanaan Musrenbang Provinsi, dengan output Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan.
    - Koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, dengan output Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.
  - (2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan sub kegiatan :
    - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan output Jumlah Dokumen Analisa Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
    - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD, dengan output Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
    - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan output Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang mendukung Indikator Pembangunan Provinsi.
  - (3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi, dengan output Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi

- Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan output Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
  - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan output Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi.
- b) Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia , dengan sub kegiatan :
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan output sub kegiatan Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dengan output Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan.
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dengan output Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, dengan output Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan.
  - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan output Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan output Jumlah rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, dengan out Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, dengan output Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA.
- (2) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan :
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan output sub kegiatan Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan output sub kegiatan Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan output Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dengan output Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur.
  - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan output Jumlah Rancangan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, dengan output Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, dengan output Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dengan output Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi terhadap SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi oleh inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor 17/INSP-LHE-SAKIP/III-2022 tanggal 14 Maret 2022 memperoleh nilai 76,69 dengan kategori BB, dengan pengertian AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sangat Baik, Akuntabel, Bekinerja Baik dan memiliki sistem manajemen kerja yang andal. (Nilai ini masih dibawah target tahun 2022 sebesar 78,25.), dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Perencanaan Kinerja, dengan nilai hasil evaluasi adalah 27,05.
- 2) Pengukuran Kinerja, dengan nilai hasil evaluasi adalah 19,79.
- 3) Pelaporan Kinerja, dengan nilai hasil evaluasi adalah 12,41.
- 4) Evaluasi Internal, dengan nilai hasil evaluasi adalah 6,19.
- 5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, dengan nilai hasil evaluasi adalah 11,25.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output :
    - Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun.
  - (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan output :
    - Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun.
  - (3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan output :
    - Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun.
  - (4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan output :
    - Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun.
  - (5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan output :
    - Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun.
  - (6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output :
    - Jumlah dokumen evaluasi yang disusun.
  - (7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output :
    - Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output :
    - Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya.
  - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output :
    - Jumlah ASN yang mendapatkan honor.
  - (3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan output :
    - Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan.

- (4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan output :
  - Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun.
- (5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan output :
  - Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan.
- (6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan output :
  - Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Organisasi dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan e-Survei kepuasan layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat. E-survei ini diisi oleh setiap tamu yang datang memanfaatkan layanan Bappeda sesuai dengan tupoksi pada urusan perencanaan. Berdasarkan data e-Survei tersebut, hingga Desember 2022 mencapai 93,66 % (target pada tahun 2022 adalah 83%), Hal ini menunjukkan bahwa tamu-tamu yang datang sudah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan Kegiatan :

- a) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - (1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output :
    - Asuransi Barang Milik Daerah.
  - (2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output :
    - Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited).
  - (3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output :
    - Jumlah dokumen laporan barang milik daerah.

- b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan output :
    - Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
  - (2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan output :
    - Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan.
  - (3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan output :
    - Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti Kegiatan Capacity Building.
  - (4) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output :
    - Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti
  - (5) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output :
    - Jumlah ASN yang mengikuti bimtek.
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output :
    - Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.
  - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output :
    - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.
  - (3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan output :
    - Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.
  - (4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output :
    - Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan.
  - (5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output :
    - Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.

- (6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan output :
  - Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan.
- (7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output :
  - Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi.
- (8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan output :
  - Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan.
  - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - (1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output :
    - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan baru.
  - (2) Pengadaan Mebel, dengan output :
    - Jumlah Mebel yang diadakan.
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output :
    - Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun.
  - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output :
    - Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan.
    - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan.
    - Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan.
    - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan.
    - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan.
  - (3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output :
    - Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia.
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :



- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan output :
  - Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara.
- (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output :
  - Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara.
- (3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output :
  - Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- (4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output :
  - Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (atau sebutkan nama gedung/bangunannya yang dipelihara).
- (5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output :
  - Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	100%	100%		13.181.397.607	13.090.025.204	99,31
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100	206,860,540	205.023.464	99,11
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100	143,577,050	142.347.150	99,14
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	7,771,550	7.758.400	99,83
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1 dokumen	1 dokumen	100	7,280,350	7.272.500	99,89

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
	SKPD						
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	4,447,150	4.446.600	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	5,063,700	5.046.400	99,66
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	20,820,840	20.420.014	98,07
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	17,899,900	17.732.400	99,06
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>8,713,224,910</b>	<b>8.676.773.126</b>	<b>99,58</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85 orang	84 orang	100	8,400,814,329	8.364.627.902	99,57
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 orang	22 orang	100	264,910,550	264.910.000	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109 dokumen (24 Pengesahan SPJ, 85 SPP dan SPM)	109 dokumen (24 Pengesahan SPJ, 85 SPP dan SPM)	100	4,834,064	4.833.500	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	8,424,445	8.423.300	99,99
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 laporan	3 laporan	100	2,461,322	2.460.724	99,98
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	13 laporan	100	31,780,200	31.517.700	99,17
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>96,890,500</b>	<b>96.384.454</b>	<b>99,48</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	0	0	99,91
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11 unit	12 unit	100	73.536.000	73.030.704	99,31
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	4 dokumen	100	9,724,500	9.723.750	99,99
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	13,630,000	13.630.000	100,00
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>331,208,988</b>	<b>328,515.887</b>	<b>99,19</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	88 Stel	87 Stel	100	65,250,000	65.088.180	99,75
	Koordinasi dan Pelaksanaan	12 Kali	2 Kali	100	17,650,638	17.598.455	99,70

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
	Sistem Informasi Kepegawaian						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80 orang		100	213,554,450	211.259.500	98,93
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Kali	2 Kali	100	21,104,400	21.035.352	99,67
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	-	100	13,649,500	13.534.400	99,16
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>1,693.975.352</b>	<b>1.682.404.808</b>	<b>99,32</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24 Jenis	25 Jenis	100	14,994,000	14.994.000	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	12 jenis	100	168.795.800	1.682.054.940	99,56
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17 jenis	20 jenis	100	304.160.930	298.901.500	98,27
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 Jenis	81 Jenis	100	256.378.122	255.879.900	99,81
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 jenis	10 jenis	100	22,991,500	22.991.425	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 jenis	6 jenis	100	10,500,000	10.440.000	99,43
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	656.155.000	651.143.043	99,24
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Orang 3 Aplikasi	4 Orang	100	260,000,000	260.000.000	100,00
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>131.906.980</b>	<b>131.904.625</b>	<b>100,00</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan				33.164.625	33.164.625	
	Pengadaan Mebel	2 jenis	3 jenis	100	98.742.355	98.740.000	100,00
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1 jenis	-	100	-	-	-
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>1,319,298,809</b>	<b>1.283.707.936</b>	<b>97,30</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Surat	4800 Surat	100	7,500,000	7.500.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700 meter kubik 100 mbps 12 bulan	2550 meter kubik 100 mbps 12 bulan	100	270,970,500	254.594.337	93,96

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
		245000 KVA 8 rekening	245000 KVA 8 rekening				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25 orang	24 orang	100	1,040,828,309	1.021.613.599	98,15
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>688.031.528</b>	<b>685.310.904</b>	<b>99,60</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	100	40,863,155	40.672.873	99,53
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	10 unit	100	210.681.673	210.424.641	99,88
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67 unit	54 unit	100	32.610.000	32.071.400	98,35
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	305,731,700	304.545.760	99,61
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13 unit	42 unit	100	98,145,000	97.596.230	99,44
<b>II</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>		<b>1,836,496,583</b>	<b>1.831.300.118</b>	<b>99,72</b>
<b>1</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendaan</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>1.144.474.479</b>	<b>1.141.760.577</b>	<b>99,76</b>
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100	185.365.898	184.078.891	99,31
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	100	32,731,900	32.679.600	99,84
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	100	187,596,960	187.206.600	99,79
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	738.779.721	737.795.486	99,87

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
	Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi						
<b>2</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>4 dokumen</b>		<b>369,723,099</b>	<b>368.328.168</b>	<b>99,62</b>
	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	189.940.197	189.497.958	99,77
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	105.631.000	105.171.000	99,56
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100	74.151.902	73.659.210	99,66
<b>3</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>		<b>322.299.005</b>	<b>321.211.373</b>	<b>99,66</b>
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	100	94,279,905	93.913.273	99,61
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	-	-		-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 laporan	3 laporan	100	136.437.000	135.809.150	99,54
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	72 dokumen	72 dokumen	100	91.582.100	91.488.950	99,90
<b>III</b>	<b>Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>		<b>4.049.235.444</b>	<b>3.999.295.647</b>	<b>98,77</b>
<b>1</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>		<b>1,400,092,017</b>	<b>1.384.048.003</b>	<b>98,85</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	298.558.950	295.961.685	99,13

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)						
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 rumusan	5 rumusan	100	65,636,000	65.427.000	99,68
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100	72.927.700	72.546.500	99,48
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	100	39.301.950	38.853.730	98,86
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 dokumen	3 dokumen	100	318.509.500	314.916.697	98,87
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 rumusan	5 rumusan	100	122.356.800	122.023.800	99,73
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100	68.568.500	67.380.500	98,27
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	100	414.232.617	406.938.097	98,24
<b>2</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>		<b>1,158,887,644</b>	<b>1.151.642.954</b>	<b>99,37</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
	<b>Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>						
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	100	150,815,750	150.395.177	99,72
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 rumusan	5 rumusan	100	93,131,500	93.131.500	100,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100	77,779,750	77.772.200	99,99
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	100	339,345,444	337.527.803	99,46
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	100	145,011,200	143.616.542	99,04
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 rumusan	5 rumusan	100	69,603,200	69.572.200	99,96
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	100	72,469,300	72.208.300	99,64
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	100	210,731,500	207.419.232	98,43
<b>3</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>		<b>1.490.255.783</b>	<b>1.463.604.690</b>	<b>98,21</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	100	346,624,308	345.866.779	99,78
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 rumusan	5 rumusan	100	67,016,500	66.640.750	99,44
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100	28,485,000	27.654.500	97,08
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	100	735.988.575	712.049.747	96,75
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	100	197,691,800	197.425.805	99,87
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 rumusan	5 rumusan	100	21,471,200	<b>21.432.900</b>	<b>99,82</b>
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan.	1 Laporan	100	29,934,300	29.716.400	99,27
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	100	63,044,100	62.817.809	99,64



#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tidak ada permasalahan	
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	sulitnya integrasi dengan data-data pada aplikasi SIPD, diharapkan melalui forum SDI dapat memberikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut.	Pembina Data daerah, Walidata tingkat daerah, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Provinsi Sumatera Barat di bawah Koordinator Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
		Permasalahan daerah kabupaten/kota yang belum menetapkan Perkada penyelenggaraan SDI agar segera menetapkan Perkada tentang penyelenggaraan SDI	Pelaksanaan Forum Data secara berkala untuk mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pembangunan yang membutuhkan biaya yang besar, terutama dalam pencapaian target RPJMD dan target Program Unggulan Kepala Daerah sehingga target untuk pemenuhan kebutuhan belum tercapai.	Menyusun skala prioritas pembangunan dengan memperhatikan target RPJMD, target Progul serta Readiness Criteria
		Usulan pembangunan infrastruktur yang disampaikan belum memenuhi semua Readiness Criteria yang ditetapkan.	Mengupayakan sumber-sumber pendanaan diluar APBD
		Arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang berbasis Kawasan dari Pemerintah Pusat, belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan infrastruktur yang ada di daerah.	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi publik yang melibatkan seluruh stakeholder
		Usulan pembangunan dari stakeholder terkait, belum sepenuhnya memperhatikan kewenangan daerah	

##### 3.1.4.2. Keuangan

Fungsi penunjang keuangan dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- b. Badan Pendapatan Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022, total alokasi anggaran untuk penyelenggaraan fungsi penunjang bidang keuangan adalah sebesar Rp.1.339.571.033.090,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.313.924.689.211,00 dengan capaian 98,08%.

### 3.1.4.2.1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.249.589.477.240,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.228.480.199.670,00 dengan capaian 98,31%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Tepat Waktu Penyampaian Apbd, Pentausahaan Dan Penyampaian Lkpd	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>Pengelolaan BMD</b>	Persentase Akurasi Barang Milik Daerah	91%	100%	109,89%
		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase Penurunan Nilai Aset Yang Bermasalah	75%	75%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	75,5 % (BB)	63,14% (B)	83,62
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	80%	83,65%	104,56%

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : terwujudnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator kinerja :

- 1) Tepat Waktu Penyampaian APBD, Penatausahaan keuangan dan Penyampaian LKPD (target kinerja Tepat Waktu dengan realisasi Tepat Waktu).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, dengan keluaran kegiatan tersusunnya KUA dan PPAS Tahun 2023 berupa 2 dokumen.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan keluaran kegiatan

tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022 berupa 2 dokumen.

- Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA-SKPD, dengan keluaran kegiatan terlaksananya verifikasi RKA-SKPD sebanyak 9 Biro dan 42 SKPD.
  - Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dengan keluaran kegiatan terlaksananya verifikasi Perubahan RKA-SKPD sebanyak 9 Biro dan 42 SKPD.
  - Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi DPA-SKPD, dengan keluaran kegiatan terlaksananya verifikasi DPA-SKPD sebanyak 9 Biro dan 42 SKPD.
  - Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, dengan keluaran kegiatan terlaksananya verifikasi Perubahan DPA-SKPD sebanyak 9 Biro dan 42 SKPD.
  - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan keluaran kegiatan tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD berupa 42 SKPD, 5 Dokumen.
  - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan keluaran kegiatan tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD berupa 5 Dokumen.
  - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran, dengan keluaran kegiatan berupa 5 dokumen.
  - Pembinaan Perencanaan penganggaran Daerah Pemerintah Provins.
- (2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dengan keluaran kegiatan adalah terlaksananya Pengelolaan Kas Daerah dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga terkait berupa 2 Dokumen.

- Koordinasi Fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan dana Transfer lainnya. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan dana perimbangan dan dana Transfer lainnya berupa 2 Dokumen dan 1 Dokumen.
  - Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kasda, Laporan aliran kas dan pelaksanaan PFK. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pelaporan Rrealisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dan terlaksananya penerbitan SP2D yang tepat sasaran.
  - Rekonsiliasi data penerimaan dan Pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dg instansi terkait, Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Rekonsiliasi Belanja Pegawai dan Tunjangan dengan PT. Taspen, BPJS Kesehatan, TAPERA, dan SKPD dan terlaksananya rekonsiliasi pajak-pajak DTH dan RTH dengan SKPD dan KPP Pratama serta KPPN.
  - Penyusunan Juknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pembuatan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, terlaksananya Penerbitan SK Pengelolaan Keuangan, Rekening BOS, Rekening SKPD, Rekening Kas Daerah, SK BUD, SK BTT, dan terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur tentang Penatausahaan Keuangan Daerah.
- (3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan pelaporan keuangan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :
- Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatata, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban.
  - Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Lapkeu Pemda.
  - Koordinasi dan penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Ranper KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Provinsi. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD dengan SKPD/UPTD dan tersusunnya buku-buku Perda Kordinasi dan sinkronisasi dan penyelesaian TPTGR Penyusunan analisis Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Sistem Prosedur serta Bagian Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

(4) Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :

- Analisis perencanaan dan penyaluran BKK, dengan keluaran kegiatan tersalurkannya BKK.
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan keluaran kegiatan terlaksananya pengelolaan dana darurat mendesak (BTT) selama 1 Tahun.
- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi, dengan keluaran kegiatan terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil provinsi kepada 19 Kab/kota.

(5) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pelaksanaan sub kegiatan :

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota, dengan keluaran kegiatan Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota berupa 19 Dokumen.
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota, Keluaran kegiatan ini adalah Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota berupa 19 Dokumen.
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota, Keluaran kegiatan ini adalah Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota berupa 19 dokumen.

- Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, dengan keluaran kegiatan adalah Pelaksanaan Asistensi Terhadap Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota sebanyak 19 kabupaten/kota.
- Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah, dengan keluaran kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 2 kali.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah, dengan keluaran kegiatan terlaksananya Pelaporan Keuangan kabupaten/kota.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : terwujudnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan indikator kinerja :

- a) Persentase Akurasi Barang Milik Daerah dan Persentase Penurunan Nilai Aset yang bermasalah.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan:

- a) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :

- Penyusunan Standar Harga, dengan keluaran kegiatan adalah tersedianya buku standar harga barang dan jasa berupa 1 dokumen, 1 dokumen.
- Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan keluaran kegiatan adalah Penyusunan dan pembahasan buku RKBMD dan terlaksananya penyusunan dan pemeliharaan BMD berupa 1 dokumen, 1 dokumen.
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;

- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan keluaran kegiatan tersedianya Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa 1 Dokumen.
- Penatausahaan Barang Milik Daerah, Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya laporan BMD.
- Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan keluaran kegiatan terlaksananya inventarisasi pada kab/kota, OPD.
- Pengamanan Barang Milik Daerah , dengan keluaran kegiatan terbitnya sertifikat BMD dan terlaksananya pengamanan dan legalitas BMD.
- Penilaian Barang Milik Daerah.
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan keluaran kegiatan tersedianya nilai aset SKPD yang belum mempunyai nilai.
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan keluaran kegiatan terlaksananya pengawasan pengelolaan BMD (honor pengurus barang pengelola) selama 12 Bulan.
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan keluaran kegiatan terlaksananya koordinasi pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, penghapusan BMD dan terlaksananya koordinasi pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, penghapusan BMD.
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. dengan keluaran kegiatan tersedianya buku hasil rekonsiliasi sebanyak 1 kali, 1 kali.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

c. Sasaran III : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja :

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, dengan pelaksanaan sub kegiatan :
    - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan keluaran kegiatan adalah Jumlah dokumen renja yang disusun berupa 11 dokumen.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan keluaran kegiatan Jumlah dokumen evaluasi yang disusun berupa 1 dokumen.
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan keluaran kegiatan adalah Jumlah dokumen evaluasi yang disusun berupa 1 dokumen.
  - (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
    - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
    - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan dan Pemeriksaan.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

- d. Sasaran IV : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi, dengan indikator kinerja :

- 1) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :
    - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.



- Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- (2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau penerangan bangunan kantor.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Bahan Logistik kantor.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan.
  - Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu.
  - Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD.
  - Dukungan Pelaksanaan SPBE berbasis Elektronik.
- (4) Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan.
  - Pengadaan Mebel.
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- (5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa surat menyurat.
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- (6) Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau KD Jabatan.
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Opearsional/Lapangan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PAGU TOTAL</b>				<b>1.249.589.477.240</b>	<b>1.228.480.199.670</b>	<b>98,31</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>17.293.451.001</b>	<b>14.316.965.826</b>	<b>82,34</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>175.579.200</b>	<b>137.731.209</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100	141.500.100	108.042.809	76,36
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	1 Dokumen	1 Dokumen	100	23.164.900	18.849.200	81,37
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	10.914.200	10.839.200	99,31
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>13.020.107.464</b>	<b>11.237.651.372</b>	<b>86,31</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	12 Orang	12 Orang	100	1.321.127.250	1.100.561.000	83,30
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	1 Dokumen	1 Dokumen	100	167.683.900	106.707.560	88,95
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran Skpd	3 Dokumen	3 Dokumen	100	90.418.700	81.238.500	89,85

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	77 Orang	77 Orang	100	11.411.866.164	9.924.552.712	86,97
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>				<b>240.152.100</b>	<b>203.233.237</b>	<b>82,01</b>
	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Skpd	12 Bulan	12 Bulan	100	24.975.250	19.373.000	82,01
	Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100	137.409.000	125.905.237	91,63
	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Bmd Skpd	10 Laporan	10 Laporan	100	77.767.850	57.955.000	74,52
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>471.549.300</b>	<b>236.763.436</b>	<b>50,21</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84 Org, 2 Stell	84 Org, 2 Stell	100	127.308.300	105.640.000	82,98
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	100	151.882.500	44.357.833	29,21
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	100	192.358.500	86.765.603	45,11
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.603.116.169</b>	<b>1.168.080.086</b>	<b>72,86</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	9.176.500	8.156.550	88,89
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	143.370.000	115.295.400	80,42
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	249.454.000	160.518.500	64,35
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100	172.711.750	86.229.750	49,93
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan	12 Bulan	100	12.910.000	6.270.000	48,57
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	12 Bulan	12 Bulan	100	682.004.523	587.556.066	86,15
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	100	51.030.000	40.494.000	79,35
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>				<b>1.190.919.538</b>	<b>876.503.806</b>	<b>73,60</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Pemerintah Daerah</b>						
	Pengadaan Kendaraan Dinas	2 Unit	2 Unit	100	65.800.600	63.880.000	97,08
	Pengadaan Mebel	Meja Tambahan, Sofa Tamu,Meja Kerja, Lemari Kaca,Kursi Rapat	Meja Tambahan, Sofa Tamu,Meja Kerja, Lemari Kaca,Kursi Rapat	66,66	245.985.524	193.008.496	78,46
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	93 Unit	93 Unit	100	879.133.414	619.615.310	70,48
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>341.757.230</b>	<b>263.955.289</b>	<b>77,23</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.837 Surat	4.837 Surat	100	14.000.900	8.588.650	61,34
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	315.876.330	255.366.639	80,84
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	11.880.000	-	00
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>250.270.000</b>	<b>193.047.391</b>	<b>77,14</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	6 Unit	6 Unit	100	180.100.000	142.613.148	79,19
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan /Jabatan	1 Unit	1 Unit	100	41.190.000	23.264.243	56,48
	Pemeliharaan peralatan Dan Mesin Lainnya				28.980.000	27.170.000	93,75
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>						
<b>1</b>	<b>Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>				<b>3.957.254.127</b>	<b>3.301.813.865</b>	<b>83,44</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi Dan Penyusunan Kua Dan Ppas	2 Dokumen	2 Dokumen	100	298.620.150	273.156.149	91,47
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Kua Dan Perubahan Ppas	2 Dokumen	2 Dokumen	100	268.279.050	240.172.913	89,52
	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Rka-Skpd	9 Biro 42 Skpd	9 Biro 42 Skpd	100	27.891.500	23.230.500	83,29
	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan Rka-Skpd	9 Biro 42 Skpd	Verifikasi Rka Perubahan Skpd Tidak Dilaksanakan Karena Waktu Yang Sangat Terbatas	0	3.913.000	-	0
	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Dpa-Skpd	9 Biro 42 Skpd	9 Biro 42 Skpd	100	158.540.700	150.652.450	95,02
	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan Dpa-Skpd	9 Biro 42 Skpd	9 Biro 42 Skpd	100	83.337.500	83.031.500	99,63
	Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Apbd	9 Biro 42 Skpd	42 Skpd 5 Dokumen	100	1.807.993.727	1.606.619.337	88,86
	Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Apbd	5 Dokumen	5 Dokumen	100	431.560.600	383.014.610	88,75
	Koordinasi Dan Penyusunan Regulasi Dan Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	5 Dokumen	100	763.409.400	487.266.801	63,83
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	9 Biro 42 Skpd	9 Biro 42 Skpd	85	113.708.500	54.669.605	48,08
<b>2</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Atau Kota</b>				<b>927.187.700</b>	<b>669.539.899</b>	<b>72,21</b>
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd Kabupaten Atau Kota Dan Rancangan	19 Sk	19 Sk	100	169.414.800	121.443.900	71,68

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Apbd Kabupaten Atau Kota						
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Kabupaten Atau Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Apbd Kabupaten Atau Kota	19 Sk	19 Sk	100	171.206.450	140.618.800	82,13
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten Atau Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten Atau Kota	19 Sk	19 Sk	100	142.076.600	111.536.621	78,50
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Atau Kota	1 Tahun	1 Tahun	95	209.347.400	157.371.585	75,17
	Sosialisasi Legulasi Bidang Keuangan Daerah	2 Kali	2 Kali	100	125.953.450	70.678.650	56,11
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	3 Laporan	90	109.189.000	67.890.343	62,18
<b>3</b>	<b>Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>				<b>1.320.984.100</b>	<b>885.154.877</b>	<b>67,01</b>
	Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	222.170.000	154.195.364	69,40
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,	2 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	100	445.036.800	345.037.251	77,53

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya						
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas Dan Pelaksanaan Pemungutan Atau Pematangan Dan Penyetoran Perhitungan Fihak (Pfk)	6 Dokumen 9.668 Lembar	6 Dokumen 9.668 Lembar	100	227.551.400	163.803.348	71,99
	Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pematangan Atas Sp2d Dengan Instansi Terkait	12 Kali 2 Kali	12 Kali 2 Kali	100	258.148.000	153.225.964	59,36
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Perkada 6 Jenis 4 Kali	2 Perkada 6 Jenis 4 Kali	100	168.077.900	68.892.950	40,99
<b>4</b>	<b>Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>				<b>756.969.500</b>	<b>581.015.535</b>	<b>76,76</b>
	Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	120 Dokumen 7 Dokumen	120 Dokumen 7 Dokumen	100	448.475.650	374.623.235	83,53
	Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan	5 Kali Sidang		100	63.068.000	53.759.500	85,24

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd	1 Laporan	Tidak Dilaksanakan Karena Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Jadi Terbit Tahun 2022	100	21.038.100	-	0
	Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	122.385.650	59.173.000	48,35
	Konsolidasi Laporan Keuangan Skpd,Blud Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	51 Skpd	51 Skpd	100	94.145.600	89.489.800	95,05
	Koordinasi,Sinkronisasi Dan Penyelesaian Tptgr	6 Sidang	1 Sidang	100	7.856.500	3.970.000	50,53
<b>5</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>1.223.640.750.762</b>	<b>1.207.113.750.027</b>	<b>98,65</b>
	Analisis Perencanaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	100	84.408.390.400	83.828.390.400	99,31
	Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	1 Tahun	1 Tahun	100	16.144.188.106	197.187.371	1,22
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100	1.123.088.172.256	1.123.088.172.256	100
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>				<b>1.692.880.050</b>	<b>1.611.959.641</b>	<b>95,22</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				<b>1.692.880.050</b>	<b>1.611.959.641</b>	<b>95,22</b>
	Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100	174.400.000	174.118.080	99,84
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100	1.228.800	1.228.750	100
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	28.380.000	24.900.431	87,74
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Angkatan 3 Kab/Kota	2 Angkatan 3 Kab/Kota	100	116.938.050	108.095.242	92,44
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	5 Kab/Kota 50 Opd	5 Kab/Kota 50 Opd	100	165.378.800	162.512.098	98,27
	Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	100	163.860.000	139.496.973	85,13
	Penilaian Barang Milik Daerah	18 Objek	18 Objek	100	124.740.400	110.526.285	88,61



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen 8 Dokumen 30 Sk 50 Opd	3 Dokumen 8 Dokumen 31 Sk 50 Opd	100	542.168.000	522.576.421	96,39
	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Kali 1 Kali	1 Kali 1 Kali	100	90.760.000	88.616.355	97,64
	Penyusunan Laporan Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	50.000.000	49.437.100	98,87
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Objek	1 Objek	100	73.978.000	72.652.968	98,21

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Belum memadainya kemampuan dan keterampilan sebagian ASN untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.	<p>Perlunya peningkatan Kualitas SDM melalui partisipasi dan peran aktif dalam pelatihan-pelatihan baik pelatihan teknis maupun pelatihan peningkatan kompetensilainnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BPKAD itu sendiri.</p> <p>Perlunya kerjasama dan koordinasi yang berkesinambungan serta dibangunnya jejaring kerja yang baikantara stafdan para pimpinan serta dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan</p> <p>Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang salah satunya dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran yang mengakibatkan tidak terealisirnya anggaran yang sudah disediakan, serta penatalaksanaan yang harus sesuai dengan jadwal terutama pada kegiatan yang pelaksanaannya berkaitan dengan pihak lain</p>
	<b>Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah</b>	Belum memadainya kemampuan dan keterampilan sebagian ASN untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi. Masih Kurangnya memahami tupoksi untuk melakukan pembinaan/supervisi serta bimbingan teknis maupun administrasi di unit-unit kerja	Perlunya peningkatan Kualitas SDM melalui partisipasi dan peran aktif dalam pelatihan-pelatihan baik pelatihan teknis maupun pelatihan peningkatan kompetensilainnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BPKAD itu sendiri.
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terbatasnya sarana dan prasarana untuk dapat mendukung pelaksanaan	

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
		program baik sarana prasarana gedung maupun peralatan teknis lain	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Beberapa Pengadaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan disebabkan barang yang dibutuhkan sudah tidak tersedia di pasaran serta ada barang yang waktu indent nya melampaui Tahun Anggaran.	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		
	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pembinaan ke Kab/Kota Tidak secara optimal terlaksana karena berbenturan waktu pelaksanaannya dengan kegiatan pemprov.	Menyusun kembali rencana kerja dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan.
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	kegiatan penyusunan sisdur pengelolaan keuangan yang masih selesai pada tingkatan draft.	Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelesaian beberapa dokumen kebijakan
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah yang belum memadai dan belum bisa mengakomodir semua kebutuhan <i>stakeholder</i> terkait, hal ini berdampak kepada kecepatan dan ketepatan dalam penyusunan Laporan BMD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penerapan e-BMD dari Kemendagri-RI dan Penyempurnaan aplikasi internal penatausahaan BMD yang telah dikembangkan saat tahun 2021 (X-BMD)
		Terkendalanya proses penetapan nilai limit dan penjualan penghapusan peralatan mesin dikarenakan tidak adanya ASN yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian sesuai mekanisme yang disyaratkan oleh BPK-RI.	Akan dilaksanakan Bimtek yang akan diikuti oleh seluruh Tim Penaksir Harga Jual BMD Sumbar Tahun 2022 dengan narasumber dari KPKNL.
		Banyaknya OPD yang terlambat mengusulkan Standar Harga baik yang murni ataupun pemutakhiran	Kedepan tidak diakomodir untuk pergeseran standar harga dan disarankan pada perubahan saja.

### 3.1.4.2.2. Badan Pendapatan Daerah

Fungsi penunjang bidang keuangan aspek pendapatan daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.89.981.555.850,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.85.444.489.541,00 atau 94,96%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2%	11,61	161,25
II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 80%	B = 80%	100
III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi		Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 85%	A = 85,13%	100

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (target kinerja 7,2% dengan realisasi 11,61%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.
- Analisa dan pengembangan Pajak daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Dengan output terlaksananya rekonsiliasi rencana pendapatan daerah sebanyak 5 rekonsiliasi, tersusunnya satu buah Pergub NJKB, tersusunnya satu buah Pergub PAP, tersusunnya satu buah Pergub tentang, Penghapusan Denda PKB, tersusunnya dokumen Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah. Terlaksananya rapat/koordinasi/studi komperatif sebanyak 2 kali serta tersusunnya satu buku database potensi pajak daerah Penagihan Pajak.
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah. dengan output terlaksananya pemungutan pajak daerah selama 1 tahun serta tersusunnya dokumen rekomendasi sebanyak 4 rekomendasi.
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah. dengan output terlaksananya monev pelaksanaan pemungutan selama 1 tahun, terlaksananya rapat penerapan target selama 1 tahun, terlaksananya rekonsiliasi pendapatan selama 1 tahun serta tersusunnya dokumen rencana penerimaan daerah sebanyak 2 dokumen.

b) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan pelaksanaan :

- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah.
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja :

1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (target kinerja B=80% dengan realisasi 80%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.

b) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :

- Evaluasi Kinerja Perangkat.

(2) Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

c. Sasaran III : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja :

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (target kinerja A=85% dengan realisasi 85,13%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan :
    - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.
    - Analisa dan pengembangan Pajak daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
    - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah.
    - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
    - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
    - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
    - Penagihan Pajak Daerah.
    - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
    - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.
- b) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah.
  - (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output persentase tertib administrasi keuangan.
  - (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan output kegiatan persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah.
  - (4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan output persentase tertib administrasi pendapatan daerah.
  - (5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah.

- (6) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output persentase tertib administrasi umum perangkat daerah.
- (7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan.
- (8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- (9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output persentase barang milik daerah yang berkondisi baik.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>KEUANGAN</b>				<b>89.981.555.850</b>	<b>85.440.379.501</b>	<b>94,95</b>
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100	81.427.657.564	77.799.687.956	95,54
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100	488.941.900	415.848.670	85,05
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun = 2 dokumen	2 dokumen	100	65.930.000	56.855.285	86,24
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun = 1 dokumen	1 dokumen	100	68.035.000	55.119.500	81,02
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun = 1 dokumen	1 dokumen	100	78.875.100	62.771.600	79,58
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun = 1 dokumen	1 dokumen	100	12.572.800	12.017.300	95,58
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	100	15.890.000	12.491.500	78,61

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		yang disusun = 1 dokumen					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun = 2 dokumen (LKPJ dan LPPD)	2 dokumen	100	55.302.500	46.023.185	83,22
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun = 4 dokumen IKM	4 dokumen	100	192.336.500	170.570.300	88,68
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>58.146.614.321</b>	<b>55.659.243.825</b>	<b>95,72</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya = 180 orang - Jumlah Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya = 4 orang	- 180 orang - 4 orang	100	56.402.532.021	54.015.605.351	95,77
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertindaknya pembayaran honorarium ASN = 12 bulan	12 bulan	100	1.083.570.000	1.019.182.500	94,06
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Pengesahan SPJ yang diterbitkan = 12 dokumen - Jumlah Dokumen SPM yang diterbitkan = 65 dokumen - Jumlah Dokumen SPP yang diterbitkan = 65 dokumen	- 12 dokumen - 65 dokumen - 65 dokumen	100	138.980.300	131.255.750	94,44
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun = 2 dokumen	2 dokumen	100	16.628.000	11.489.500	69,10
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan = 4 dokumen	4 dokumen	100	17.799.000	14.172.750	79,63
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disiapkan =	- 12 laporan - 4 dokumen	100	487.105.000	467.537.974	95,98

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		12 laporan - Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disiapkan = 4 dokumen					
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	100%	100	428.217.500	376.477.866	87,92
	Pengamanan Barang Milik Daerah	- Jasa Jaminan Barang Milik Daerah berupa Gedung Kantor = 2 unit - Jasa Jaminan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional = 33 unit	- 2 unit - 33 unit	100	160.000.000	156.419.268	97,76
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Penertiban = 12 laporan	12 laporan	100	268.217.500	220.058.598	82,04
4	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah</b>	100%	100	498.586.300	484.819.918	97,24
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan retribusi kewenangan perangkat daerah = 1 dokumen	1 dokumen	100	259.544.700	252.130.789	97,14
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-Jumlah sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi = 3 kali	3 kali	100	239.041.600	232.689.129	97,34
5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	100	187.241.500	161.465.500	86,23
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pengadaan	125 stel	100	170.250.000	148.792.000	87,40



No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya = 125 stel					
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan = 5 kali	5 kali	100	16.991.500	12.673.500	74,59
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-		-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>7.015.425.753</b>	<b>6.657.304.454</b>	<b>94,90</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan = 500 buah	500 buah	100	83.465.900	82.063.650	98,32
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan = 500 buah	500 buah	100	309.084.200	302.632.710	97,91
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kegiatan Penunjang QPD	12 unit	100	324.812.300	322.971.300	99,43
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan - Jumlah Bahan Komputer yang disediakan - Jumlah Kertas dan cover yang disediakan - Jumlah makan-minum yang disediakan	- 1500 buah - 350 buah - 350 rim - 2500 kotak	100	1.576.044.000	1.419.126.500	90,04
	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan = 10000000 lembar	10000000 lembar	100	433.079.750	421.033.500	97,22
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan = 420 eksemplar	420 eksemplar	100	73.080.000	62.380.000	85,36
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi	250 laporan	100	1.702.635.603	1.639.518.355	96,29

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		dan konsultasi = 250 laporan					
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah tenaga IT yang dimanfaatkan = 4 orang - Jumlah sarana prasarana yang tersedia = 1 tahun - Jumlah aplikasi/modul yang dikembangkan = 1 unit	- 4 orang - 1 tahun - 1 unit	100	2.513.224.000	2.407.578.439	95,80
7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>1.983.101.140</b>	<b>1.921.046.960</b>	<b>96,87</b>
	Pengadaan Mebel	- Kursi kerja yang diadakan = 40 unit - Kursi pimpinan yang diadakan = 10 unit - Kursi rapat yang diadakan = 20 unit - Kursi tunggu yang diadakan = 25 unit - Meja kerjaya yang diadakan = 40 unit - Meja pimpinan yang diadakan = 10 unit - Meja rapat yang diadakan = 2 unit - Rak file yang diadakan = 25 unit	- 40 unit - 10 unit - 20 unit - 25 unit - 40 unit - 10 unit - 2 unit - 25 unit	100	212.866.900	210.674.960	98,97
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Pengadaan Genset - Pengadaan Komputer - Pengadaan Laptop - Pengadaan Lemari besi kaca - Pengadaan Pendingin Ruangan/AC - Pengadaan Printer - Pengadaan Televisi	- 2 unit - 25 unit - 15 unit - 15 unit - 20 unit - 40 unit - 10 unit	100	1.661.884.240	1.602.369.000	96,42

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor yang baru = 1 unit	1 unit	100	108.350.000	108.003.000	99,68
<b>8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>8.503.002.100</b>	<b>8.119.150.029</b>	<b>95,49</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun = 7500 surat	7500 surat	100	17.730.500	13.746.800	77,53
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kebutuhan jasa informasi dan publikasi = 5 kali - Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan = 610 meter kubik - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan = 300 mbps - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dib 1005 kwh - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan = 19 rekening telepon	- 5 kali - 610 meter kubik - 300 mbps - 710 kwh - 19 rekening telepon	100	2.217.212.700	1.897.951.603	85,60
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jasa Penceramah = 33 kali - Instruktur senam = 46 orang - Outsourcing = 15 orang - Tenaga PHL = 110 orang	- 33 Kali - 46 Kali - 15 orang - 110 Orang	100	4.977.297.980	4.846.993.470	97,38
<b>9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>4.176.527.050</b>	<b>4.004.330.734</b>	<b>95,88</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara = 2 unit	2 unit	100	630.168.00	597.956.288	94,89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah kendaraan dinas	- 28 unit roda 2 - 28 unit roda 4 - 14 unit bus	100	742.545.000	691.726.650	93,16

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	operasional atau lapangan yang dipelihara = 28 unit roda 2; 28 unit roda 4; 14 unit bus Samsat Keliling	Samsat Keliling				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara = 250 unit	250 unit	100	437.180.000	395.476.500	90,46
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab = 19 unit dipelihara dan 3 unit direhab	- 19 unit - 3 unit	100	2.071.817.500	2.053.134.096	99,10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab = 230 unit pendingin ruangan/AC	230 Unit Pendingin Ruangan/AC	100	49.298.750	31.585.500	64,07
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan pendapatan daerah</b>	<b>7.2</b>	<b>11,61</b>	<b>8.553.898.286</b>	<b>7.640.691.545</b>	<b>89,32</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Besaran target pajak daerah yang harus dicapai</b>	<b>6.175.628.018.183</b>	<b>122.357.13.404</b>	<b>8.553.898.286</b>	<b>7.640.691.545</b>	<b>89,32</b>
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia = 2 dokumen	2 Dokumen	100	194.424.600	194.224.359	99,90
	Analisa Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	- Jumlah pengembangan layanan pajak daerah yang tersedia = 1 Pergub - Jumlah regulasi terkait kebijakan pajak daerah yang tersedia = 1 inovasi	- 1 Pergub - 1 Inovasi	100	809.504.050	684.703.571	84,58
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan = 2 kali - Jenis media Penyuluhan dan Penyebarluasan	- 2 Kali - 2 jenis	100	761.800.000	685.470.450	89,98

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		an Kebijakan Pajak Daerah = 2 jenis					
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	- Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dicetak = 1.150.000 lembar - Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik yang disediakan = 2 unit	- 1.150.000 lembar - 2 unit	100	974.705.000	877.170.700	100
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	- Jumlah WP yang didata = 216 WP - Jumlah Calon WP (Objek Pajak Baru) yang akan didaftarkan = 5 WP	- 216 WP - 5 WP	100	442.024.350	396.280.692	89,65
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- Jumlah dokumen potensi pajak daerah yang dikelola = 5 dokumen dan 3 aplikasi	- 5 Dokumen - 3 aplikasi	100	768.487.350	745.693.500	97,03
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi = 12 laporan	12 laporan	100	145.104.000	118.065.182	81,37
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah pengawasan yang dilakukan = 18 kali	18 kali	100	735.684.100	685.214.029	93,14
	Pembinaan, pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah = 1 laporan - Terlaksananya money pelaksanaan pemungutan = 12 bulan - Terlaksananya rapat penetapan target = 12 bulan - Terlaksananya rekonsiasi pendapatan = 12 bulan -	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	100	688.812.600	372.560.561	53,94

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya sosialisasi/ bimtek/ FGD/ Asistensi = 10 kali - Tersusunnya rencana pendapatan daerah = 2 dokumen					

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tidak ada permasalahan	-
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tidak ada permasalahan	-

#### 3.1.4.3. Kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah merupakan perangkat daerah yang membawahi urusan Kepegawaian (Manajemen ASN). Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Kepegawaian Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.27.756.540.736,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.27.128.210.953,00 atau 97,74%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100
II	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100
III	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM Aparatur	Program Kepegawaian Daerah	Nilai penerapan sistem Merit	300	332	111

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi indikator kinerja :

- 1) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (target 100%, realisasi 100%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dicapai dengan pelaksanaan sub kegiatan :

➤ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan SKPD adalah berupa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), RKA, DPA dan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan SKPD sebesar Rp.51.371.800,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.50.669.500,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan adalah sebesar 98,63% dengan output tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran pada BKD seperti Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA dan DPPA, dengan capaian Kinerja 100%.

➤ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah berupa penyusunan laporan capaian kinerja bulanan dan triwulan, penyusunan Penetapan Kinerja (PK), penyusunan bahan LKPJ Gubernur, LPPD dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta laporan capaian kinerja lainnya. Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebesar Rp.134.093.401,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.132.978.070,00 atau dengan capaian kinerja keuangan adalah sebesar 99,17% dengan output tersedianya laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

➤ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah kegiatan rutin yang disediakan berupa monitoring aset SKPD dan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Kepegawaian Daerah. Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebesar Rp.72.953.750,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.72.463.650,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 99,33%. Dana kegiatan ini digunakan untuk honorarium pengelolaan dan pengawasan asset BKD dan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dengan output terwujudnya pengelolaan aset Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat dengan output berupa laporan aset akhir tahun, semester dan bulanan serta Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang menghasilkan capaian Kinerja 100%.

➤ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD adalah kegiatan rutin yang dilakukan BKD. Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebesar Rp.7.112.500,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.6.857.500,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 96,41%.

➤ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD adalah kegiatan rutin yang dilakukan BKD. Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebesar Rp.1.641.600,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.1.570.000,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 95,64%.

5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD adalah kegiatan rutin yang dilakukan BKD.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebesar Rp.7.112.500,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.6.830.000,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 96,03%.

6. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD



Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD adalah kegiatan rutin yang dilakukan BKD. Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebesar Rp.7.672.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.7.471.750,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 97,39%.

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dicapai dengan pelaksanaan sub kegiatan :

➤ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub Kegiatan ini mengakomodir penyediaan Belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan bagi 78 orang PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 8.030.829.968,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.776.863.089,00 atau 96,84% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

➤ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN digunakan untuk honorarium pengelola kegiatan dan keuangan (PA, KPA, Bendahara, PPK, PPTK dan Pembantu Bendahara) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.170.201.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.169.997.500,00 atau 99,88%, dengan output terwujudnya pengelolaan keuangan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan capaian Kinerja 100%.

➤ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Sub Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah kegiatan rutin yang disediakan berupa Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Badan Kepegawaian Daerah. Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan ini sebesar Rp.5.348.600,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.5.302.200,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 99,13%, dengan output terwujudnya pengelolaan keuangan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menghasilkan capaian Kinerja 100%.

➤ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

Sub Kegiatan *Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* adalah kegiatan rutin yang disediakan berupa Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi pada Badan Kepegawaian Daerah. Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan ini sebesar Rp.42.329.800,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.41.755.100,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 98,64%, dengan output terwujudnya pengelolaan keuangan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan output berupa laporan keuangan akhir tahun yang menghasilkan capaian Kinerja 100%.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah kegiatan rutin yang disediakan berupa Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Badan Kepegawaian Daerah. Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.2.117.250,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.1.973.250,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 93,20%, dengan output terwujudnya pengelolaan keuangan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan output berupa laporan keuangan akhir tahun yang menghasilkan capaian Kinerja 100%.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah kegiatan rutin yang disediakan berupa penatausahaan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah. Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.13.565.650,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.13.368.250,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 98,54%, dengan output terwujudnya pengelolaan keuangan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan output berupa laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran yang menghasilkan capaian Kinerja 100%.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi, dengan Indikator kinerja :

- 1) Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (target 100%, realisasi 100%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dicapai dengan pelaksanaan sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kedinasan.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya sebesar Rp.57.000.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.56.931.600,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 99,88%, dengan output tersedianya pakaian dinas untuk PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 76 orang, dengan capaian kinerja 100.

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui Rapat Koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.222.223.350,00 direalisasi sebesar Rp.210.362.497,00 atau capaian kinerja keuangan 94,66%, dengan output tersedia dana untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah, sedangkan untuk capaian kinerja adalah sebesar 100%.

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar

Rp.38.020.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.37.995.537,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,94%.

Kegiatan ini telah melakukan pengiriman PNS pada Badan Kepegawaian Daerah untuk mengikuti Bimtek Kepegawaian ke BKN, Kemendagri, dan pelatihan pengadaan barang dan jasa. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya profesional PNS di bidangnya, dengan capaian kinerja 100%.

(2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

➤ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah dalam rangka menunjang aktivitas perkantoran melalui penggantian komponen-komponen instalasi listrik. Alat-alat listrik tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp.31.059.500,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.30.974.800,00 atau capaian kinerja keuangan 99,73%, dengan output tersedianya alat-alat dan komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor, dengan capaian kinerja 100%.

➤ Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ini dilakukan untuk pembelian Alat Tulis Kantor, Penyediaan Makan Minum, Wirid Pengajian Bulanan dan Pelaksanaan Senam. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan melalui pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp.188.457.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.186.841.200,00 atau capaian kinerja keuangan 99,14%.

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.**

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan melalui pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.162.873.500,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.162.871.250,00 atau capaian kinerja keuangan 100%, dengan output tersedianya barang-barang cetak seperti kertas kop, map, amplop, dan lain-lain, serta tersedianya biaya penggandaan untuk pelaksanaan kegiatan BKD yang akan menunjang pelayanan administrasi perkantoran, dengan capaian kinerja 100%.
- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.**

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah. Dengan bertambah wawasan aparatur, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan lebih baik.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp.19.980.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.19.980.000,00 atau capaian kinerja keuangan 100,00% dengan output tersedianya biaya untuk langganan surat kabar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur, dengan capaian kinerja 100%.
- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait manajemen SDM Aparatur ke instansi pusat dan daerah.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.713.407.114,00 direalisasi sebesar Rp.706.983.045,00 atau capaian kinerja keuangan 99,10%. Dan capaian kinerja adalah sebesar 100%.

➤ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD adalah kegiatan yang disediakan berupa pengelolaan arsip SKPD pada Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip SKPD sebesar Rp.13.136.550,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.13.115.250,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 99,84% dengan output dana Sub Kegiatan ini digunakan untuk pengelolaan arsip BKD dan hasil dari kegiatan ini terwujudnya pengelolaan arsip kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan capaian Kinerja 100.

(3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

➤ Pengadaan Mebel

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sebesar Rp.41.820.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.37.950.000,00 atau capaian kinerja keuangan sebesar 90,75%.

Dari pelaksanaan Sub Kegiatan ini diperoleh beberapa output yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan BKD, dengan capaian kinerja 100%.

➤ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp.231.440.380,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.208.661.550,00 atau capaian kinerja keuangan sebesar 90,16%.

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan ini diperoleh 4 unit kursi kerja pegawai non struktural, 2 unit meja tamu, 2 unit sofa tamu, 5 unit printer, 1 unit TV, 2 nit AC, 2 unit laptop, 2 unit kamera, 2 unit scanner, 7 unit penghancur kertas, 7 unit dispenser, 1 unit printer, 5 unit acces point, dan 1 unit card reader yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan BKD, dengan capaian kinerja 100%.

(4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- **Penyediaan Jasa Surat Menyurat.**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi bidang kepegawaian. Sub Kegiatan ini memfasilitasi mekanisme persuratan, mulai dari surat masuk hingga surat keluar.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp.54.355.632,00 dan terealisasi sebesar Rp.49.583.256,00 atau capaian kinerja keuangan 91,22% dengan output terwujudnya pengelolaan surat menyurat kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.
- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan suatu pemenuhan dasar akan kebutuhan listrik, air, telepon dan internet melalui jasa pihak ketiga yang menyediakannya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.195.594.200,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.195.391.732,00 atau capaian kinerja keuangan 99,90%;
- **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan adalah dalam rangka penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran oleh pihak ketiga yang menyediakannya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan sebesar Rp.5.620.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.5.285.000,00 atau capaian kinerja keuangan 94,04% dengan output adalah tersedianya tabung pemadam kebakaran pada kantor Badan Kepegawaian Daerah, dengan capaian kinerja 100%.
- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah dalam rangka penyediaan jasa pengaman kantor sebanyak 7 orang, sopir kantor

sebanyak 4 orang, dan tenaga kebersihan sebanyak 4 orang.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum sebesar Rp.812.185.035,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.776.655.917,00 atau capaian kinerja keuangan 95,82% dengan output tenaga petugas jasa pengaman kantor sebanyak 7 orang, sopir kantor sebanyak 4 orang, dan tenaga kebersihan sebanyak 4 orang pada kantor Badan Kepegawaian Daerah, dengan capaian kinerja 100%.

(5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp.152.622.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.148.802.198,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,50% dengan output terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas (4 unit mobil dan 1 unit motor) selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

- Pemeliharaan Mebel.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel sebesar Rp.15.000.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.14.960.000,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 99,73% dengan output terwujudnya pemeliharaan Meubeleur selama 1 tahun, dengan capaian Kinerja 100%.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.67.370.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.66.860.000,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,24% dengan output terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.



- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp.239.000.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.237.924.036,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,55% dengan output terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Badan Kepegawaian Daerah dengan capaian kinerja 100%.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM Aparatur.

- 1) Indikator kinerja : Nilai penerapan sistem merit (target 300, realisasi 332).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Kepegawaian Daerah dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dicapai dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

Dasar pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dijelaskan bahwa untuk memilih orang yang baik dan ditempatkan pada atau melaksanakan pekerjaan yang tepat, harus disusun formasi pegawai dengan melakukan kegiatan perhitungan kebutuhan pegawai yang berdasarkan pada “Analisis Jabatan dan Beban Kerja” yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa departemen/lembaga pada tiap awal tahun anggaran harus menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) bagi tiap unit organisasi.

Maksud dari kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN adalah untuk menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) bagi tiap unit organisasi serta melakukan penyempurnaan perhitungan kebutuhan

pegawai berdasarkan beban kerja dan data persediaan pegawai dalam rangka penyusunan formasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp.67.499.050,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.66.211.600,00 atau capaian keuangan sebesar 98,09%.

Kegiatan ini direncanakan untuk penempatan PNS sesuai dengan peta jabatan dan berperan dalam penyusunan formasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang akan menyediakan informasi kebutuhan pegawai yang akurat, dengan capaian kinerja 100%.

➤ **Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK.**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rekrutmen ASN Provinsi Sumbar sebesar Rp.448.793.850,00 dan dapat direalisasikan sebanyak Rp.426.222.823,00 atau capaian kinerja keuangan adalah sebesar 94,97%.

Untuk tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan 2558 formasi ASN dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis	Formasi	Terisi	Formasi Kosong
1	PPPK Tenaga Guru	1.927	1.926	1
2	PPPK Tenaga Kesehatan	384	366	18
3	PPPK Tenaga Teknis	205	sedang proses	sedang proses
4	STPDN Angk XXXIII	42	42	-

➤ **Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebesar Rp.121.579.300,00 dan dapat direalisasikan sebanyak Rp.121.416.650,00 atau capaian kinerja keuangan adalah sebesar 99,87%.

Hasil yang dicapai dari kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil ini adalah penyampaian usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil direncanakan sebanyak 800 usul Surat Keputusan terealisasi sebanyak 1225 Surat Keputusan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 153%.

➤ **Fasilitasi Lembaga Profesi ASN.**

Fasilitasi Lembaga Profesi ASN merupakan Sub Kegiatan yang mengkoordinir pengelolaan Lembaga

Profesi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :

- a. Pengiriman Kontingen untuk mengikuti MTQ Korpri Tingkat Nasional Tahun 2022 di Padang, Sumatera Barat.
- b. Rapat kerja pengurus Korps Organisasi Profesi ASN.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp.11.956.223.356,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.752.039.117,00 atau 98,29%. Output dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terlaksananya MTQ Korpri Nasional di Sumatera Barat dan dikirimnya 35 kafilah perwakilan Sumatera Barat dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100%.

➤ **Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian**

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp.130.969.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.122.809.050,00 atau 93,77% dengan output terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian pada Pemprov Sumbar dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100%.

➤ **Pengelolaan Data Kepegawaian**

Pengelolaan Data Kepegawaian antara lain Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai berupa Karis, Karsu, KPE dan kartu identitas pegawai lainnya. Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.82.149.700,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.81.979.457,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,79% dengan output terfasilitasinya pembuatan kartu identitas pegawai sebanyak 647 PNS (dari target 400 PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan capaian kinerja 161,7%.

(2) **Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dicapai dengan pelaksanaan sub kegiatan :**

➤ **Pengelolaan Mutasi ASN.**

Kegiatan ini merupakan pengelolaan mutasi pindah dan penempatan PNS yaitu :

- a. Pindah antar kabupaten/kota.
- b. Pindah dari provinsi ke kabupaten/kota.

- c. Pindah dari kabupaten/kota ke provinsi.
- d. Pindah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
- e. Pindah dari kabupaten/kota ke provinsi lain.
- f. Pindah dari provinsi lain ke kabupaten/kota.
- g. Pindah dari Provinsi Sumatera Barat ke provinsi lain.
- h. Pindah dari provinsi lain ke Provinsi Sumatera Barat.
- i. Cuti besar PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp.131.839.100,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.131.336.998,00 atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,62% dengan output jumlah PNS yang dipindahkan dan ditempatkan direncanakan sebanyak 700 SK Pindah dapat direalisasi sebanyak 761 berkas dengan persentase fisik sebesar 109%.

➤ **Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.**

a. **Kenaikan Pangkat PNS.**

Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dilakukan secara terpadu dengan BKN Kanreg XII Pekanbaru. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat terpadu bertempat di Kota Bukittinggi dan dilakukan 2 periode (Periode April dan Oktober).

Realisasi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat pada Tahun 2022 adalah 5420 Surat Keputusan dari 4.000 Surat Keputusan yang ditargetkan sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 136%.

b. **Ujian Dinas.**

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk.I (Gol. Ruang II/d) dan Penata Tk.I (Gol. Ruang III/d) untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus lulus Ujian Dinas. Ujian Dinas dibagi dalam 2 tingkat yaitu :

- Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tk.I (Gol. Ruang II/d) menjadi Penata Muda (Gol Ruang III/a).
- Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tk.I (Gol. Ruang III/d) menjadi Pembina (Gol Ruang IV/a).

Pada Tahun 2022 ini, jumlah PNS Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti dan lulus Ujian Dinas sebanyak 211 orang dan tingkat capaian kinerja 100%.

c. Kenaikan Pangkat.

Kegiatan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara Regional XII Pekanbaru. Jumlah PNS yang mengikuti Kenaikan Pangkat tahun 2022 sebanyak 3549 orang.

➤ Pengelolaan Promosi ASN

Dalam rangka perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier serta peningkatan mutu kepemimpinan dan jabatan struktural, maka untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural maka perlu dilakukan penilaian oleh suatu tim yaitu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan guna memberikan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang mengambil keputusan.

Untuk tercapainya pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan struktural, kenaikan pangkat pejabat struktural, serta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu pejabat Pembina kepegawaian dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pada Tahun 2022, jumlah pengangkatan pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebanyak 11 orang dari target 9 orang pejabat dan untuk Jabatan. Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Promosi ASN sebanyak Rp.730.372.200,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.727.057.580,- atau 99,55%.

(3) Pengembangan Kompetensi ASN, dicapai dengan pelaksanaan sub kegiatan :

➤ Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN.

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah :

- Meningkatkan keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang akan purna tugas di bidang kewirausahaan.

- Menumbuhkan semangat berwiraswasta dan rasa percaya diri bagi PNS purna tugas sehingga mereka tetap merasa mampu dan produktif setelah memasuki masa pensiun.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp.64.624.800,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.62.470.520,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,67% dengan output meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS yang akan memasuki purna tugas sebanyak 40 orang, dengan capaian kinerja 100%.

➤ **Pengelolaan Assessment Center**

Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center dilaksanakan untuk mengetahui potensi Pegawai Negeri Sipil sehingga penempatan Pegawai Negeri Sipil pada satu bidang tugas sesuai dengan kompetensinya sehingga pencapaian target yang ditetapkan akan maksimal.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemetaan Potensi Pegawai adalah sebesar Rp.514.613.500,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.509.021.040,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,91% dengan output tersedianya informasi mengenai potensi pegawai melalui pemetaan potensi dengan target untuk 900 orang dan realisasi 890 orang, maka capaian kinerja adalah 99%.

➤ **Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN adalah sebesar Rp.140.785.600,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.136.363.493,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,86%.

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan target untuk 168 orang dan realisasi 104 orang, maka capaian kinerja adalah 62%.

➤ **Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN adalah sebesar Rp.17.468.550,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.17.388.350,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,54%. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN

dengan target untuk 2 Jenis dengan realisasi 2 jenis, maka capaian kinerja adalah 100%.

➤ **Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN adalah sebesar Rp.19.887.550,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.19.265.250,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,87%. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN dengan target untuk 4 Jenis dengan realisasi 7 jenis, maka capaian kinerja adalah 175%.

➤ **Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN**

Sub Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN dengan Dana yang tersedia sebesar Rp.80.356.950,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.80.215.750,00 atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,82%.

Pada Tahun 2022 Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN dengan target kinerja 75 orang dan terealisasi sebanyak 75 orang dengan tingkat capaian kinerja 100%.

➤ **Pembinaan Jabatan Fungsional ASN**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN bertujuan untuk mengelola jabatan fungsional PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.96.136.950,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.95.539.419,00 atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,38%.

Pada Tahun 2022 SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan sejumlah 973 SK dan 3 Usulan surat Pejabat Fungsional Jenjang Utama dengan tingkat capaian kinerja 102%.

➤ **Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.61.199.900,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.60.799.135,00 atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,35%.

Pada Tahun 2022 Jumlah jabatan fungsional yang difasilitasi sebanyak 5 jabatan fungsional dengan tingkat capaian kinerja 125%.

(4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dicapai dengan pelaksanaan sub kegiatan :

➤ Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PNS pada unit dan organisasi dan sebagai pedoman bagi setiap PNS, pejabat penilai dan pejabat lain yang berkepentingan dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja untuk kemajuan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja sebesar Rp.280.191.950,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.270.577.222,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,57%. Dengan output tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan penilaian prestasi kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat capaian kinerja 100%.

➤ Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai.

Kegiatan ini merupakan pemberian penghargaan kepada PNS yang bertujuan sebagai pendorong/memotivasi PNS untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja, sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya. Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai sebesar Rp.200.024.950,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.198.690.231,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,33%.

Dengan output Jumlah PNS yang diberikan penghargaan sebanyak 6 orang PNS sebanyak dengan capaian kinerja sebesar 100%.

➤ Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai.

Kegiatan ini merupakan pemberian penghargaan kepada PNS atas jasa-jasanya yang bertujuan sebagai pendorong/memotivasi PNS untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja, sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.



Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya sebesar Rp.53.528.350,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.52.312.287,00 atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,73%.

Dengan output Tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya merupakan penghargaan kepada PNS yang telah mengabdikan selama 10 tahun (berwarna perunggu), 20 tahun (berwarna perak) dan 30 tahun (berwarna emas). Jumlah Usul Penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada 2022 sebanyak 1222 orang usulan dari target sebanyak 800 usulan dengan capaian kinerja sebesar 153%.

➤ **Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN**

Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS dan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, bermoral mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Namun kenyataannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS tetap ada dan butuh proses untuk penanganannya sesuai aturan yang berlaku.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS sebesar Rp.238.805.750,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.230.981.006,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 96,72%. Dengan output terlaksananya Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) sebanyak 6 kali sidang dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan rincian jumlah SK yang diterbitkan adalah Pelanggaran disiplin berat sebanyak 6 SK, Pelanggaran Disiplin Sedang sebanyak 4 SK, dan Pelanggaran Disiplin Ringan sebanyak 13 SK.

➤ **Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai.**

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai sebesar Rp.29.572.700,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.28.365.400,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 95,92%. Dengan output terselesaikannya permohonan cerai PNS sebanyak 31 kasus perceraian

dari target 30 kasus dengan capaian kinerja sebesar 103%.

➤ Evaluasi Disiplin ASN

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN sebesar Rp.12.719.750,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.12.529.000,00 atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 98,50%.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>				<b>27.756.540.736</b>	<b>27.128.210.953</b>	97,74
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>				<b>11.807.514.580</b>	<b>11.456.228.727</b>	97,02
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>80</b>	<b>82,81</b>	<b>108,33</b>	<b>281.957.551</b>	<b>278.840.470</b>	98,89
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100	51.371.800	50.669.500	98,63
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7.112.500	6.857.500	96,41
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1.641.600	1.570.000	95,64
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7.112.500	6.830.000	96,03
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7.672.000	7.471.750	97,39
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Dokumen	16 Dokumen	100	134.093.401	132.978.070	99,17
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	72.953.750	72.463.650	99,33
		1 Dokumen	1 Dokumen	100			
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>8.264.392.768</b>	<b>8.009.259.389</b>	96,91
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang	90 Orang	100	8.030.829.968	7.776.863.089	96,84
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Orang	10 Orang	100	170.201.500	169.997.500	99,88

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67 Dokumen	67 Dokumen	100	5.348.600	5.302.200	99,13
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13 Laporan	13 Laporan	100	42.329.800	41.755.100	98,64
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2.117.250	1.973.250	93,20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	100	13.565.650	13.368.250	98,54
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>317.243.350</b>	<b>305.289.634</b>	96,23
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	76Stel	76Stel	100	57.000.000	56.931.600	99,88
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Kali	4 Kali	100	222.223.350	210.362.497	94,66
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Kali	100 Kali	100	38.020.000	37.995.537	99,94
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>1.128.913.664</b>	<b>1.120.765.545</b>	99,28
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	13 Jenis	13 Jenis	100	31.059.500	30.974.800	99,73
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Jenis	3 Jenis	100	188.457.000	186.841.200	99,14
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Jenis	12 Jenis	100	162.873.500	162.871.250	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Jenis	4 Jenis	100	19.980.000	19.980.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100	713.407.114	706.983.045	99,10
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100	13.136.550	13.115.250	99,84
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>273.260.380</b>	<b>246.611.550</b>	90,25
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit			0		
	Pengadaan Mebel	13 Jenis	13 Jenis	100	41.820.000	37.950.000	90,75
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23 Unit	23 Unit	100	231.440.380	208.661.550	90,16
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.067.754.867</b>	<b>1.026.915.905</b>	96,18

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14000 Surat	14000 Surat	100	54.355.632	49.583.256	91,22
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 buah	2 buah	100	195.594.200	195.391.732	99,90
		10000 m3	10000 m3	100			
		8 Kwh	8 Kwh	100			
		10 mbps	10 mbps	100			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Tabung	12 Tabung	100	5.620.000	5.285.000	94,04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 Orang	15 Orang	100	812.185.035	776.655.917	95,63
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>473.992.000</b>	<b>468.546.234</b>	<b>98,85</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	6 Unit	100	152.622.000	148.802.198	97,50
	Pemeliharaan Mebel	3 Jenis	3 Jenis	100	15.000.000	14.960.000	99,73
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73 Buah	73 Buah	100	67.370.000	66.860.000	99,24
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	100	239.000.000	237.924.036	99,55
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Jenis	0 Jenis		0		
<b>II</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>				<b>15.949.026.156</b>	<b>15.671.982.226</b>	<b>98,26</b>
<b>1</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>				<b>12.807.214.506</b>	<b>12.570.678.697</b>	<b>98,15</b>
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Buku	2 buku	100	67.499.050	66.211.600	98,09
		1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3135 Pelamar	3135 Pelamar	100	448.793.850	426.222.823	94,97
		1102 SK	1102 SK	100			
		2 Sekolah ikatan dinas	2 Sekolah ikatan dinas	100			
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	800 Usul	1225 usul	153	121.579.300	121.416.650	99,87
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	80 Orang	-	-	11.956.223.356	11.752.039.117	98,29
		20 Orang	35	117			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4 Kali	20 Kali	500			
		1 Kali	1 Kali	100			
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 sistem informasi	5 sistem informasi	100	130.969.250	122.809.050	93,77
		1 kali	1 kali	100			
		1 dokumen	1 dokumen	100			
	Pengelolaan Data Kepegawaian	23000 Bundel	26427 Bundel	115	82.149.700	81.979.457	99,79
		400 Kartu	647 Kartu	162			
		1 Laporan	1 Laporan	100			
<b>2</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>				<b>1.331.894.400</b>	<b>1.326.785.426</b>	99,62
	Pengelolaan Mutasi ASN	700 berkas	761 berkas	109	131.839.100	131.336.998	99,62
		80 surat	55 surat	69			
		150 berkas	784 berkas	523			
		60 surat	182 surat	303			
		600 SK	660 SK	110			
		100 surat	159 surat	159			
		80 surat	142 surat	178			
		400 surat	397	99			
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	200 orang	211 orang	106	469.683.100	468.390.848	99,72
		47 orang	47 orang	100			
		4000 orang	5420 orang	136			
	Pengelolaan Promosi ASN	51 OPD	50 OPD	98	730.372.200	727.057.580	99,55
		9 JPT	11 JPT	122			
<b>3</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>				<b>995.073.800</b>	<b>981.062.957</b>	98,59
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	40 orang	40 orang	100	64.624.800	62.470.520	96,67
	Pengelolaan Assessment Center	900 orang	890 orang	99	514.613.500	509.021.040	98,91
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	168 orang	104 orang	62	140.785.600	136.363.493	96,86
		5 Orang	5 orang	100			
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	2 jenis	2 Jenis	100	17.468.550	17.388.350	99,54
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	4 jenis	7 Jenis	175	19.887.550	19.265.250	96,87
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	75 orang	75 orang	100	80.356.950	80.215.750	99,82
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	950 SK	973 SK	102	96.136.950	95.539.419	99,38
		3 usulan surat	3 usulan surat	100			
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 jenis	5 jenis	125	61.199.900	60.799.135	99,35
<b>4</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>				<b>814.843.450</b>	<b>793.455.146</b>	97,38
	Pelaksanaan Penilaian dan	1 Laporan	1 laporan	100	280.191.950	270.577.222	96,57

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Kali	1 kali	100			
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	12 orang	6 orang	50	200.024.950	198.690.231	99,33
		1 laporan	1 laporan	100			
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	800 Usul	1222 orang	153	53.528.350	52.312.287	97,73
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 Kali Sidang	6 kali sidang	100	238.805.750	230.981.006	96,72
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	30 orang	31 orang	103	29.572.700	28.365.400	95,92
	Evaluasi Disiplin ASN	1 dokumen	1 dokumen	100	12.719.750	12.529.000	98,50

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Tidak ada permasalahan	-
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tidak ada permasalahan	-

#### 3.1.4.4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.20.484.173.590,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.813.313.088,00 atau 96,72%, dengan uraian sebagai berikut :

##### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71)	BB (71,82)	101,15
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86	90,9	105,69
II	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kediklatan	Program Pengembangan Sumber daya Manusia	Nilai evaluasi penyelenggaraan diklat	87	91,14	104,75
			Persentase ASN Prov. Sumatera Barat yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/Tahun	6,2	7,1	114,52
III	Meningkatnya Pengembangan	Program Pengembangan	Persentase lulusan diklat dengan predikat	86	97,9	113,84

	Kompetensi dan Kualifikasi Profesi Aparatur	Sumber daya Manusia	minimal memuaskan			
--	---	---------------------	-------------------	--	--	--

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja yaitu :

1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja (target Kinerja 71 (BB)) (realisasi 71,82 (BB)).
2. indeks kepuasan masyarakat Nilai Evaluasi Penyelenggaraan diklat (target kinerja 86(BB)) (realisasi 90,9 (BB)).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun. Dengan target 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (capaian 100%).
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun. Dengan target 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (capaian 100%).

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya. Dengan target 82 orang dan realisasi 82 orang (capaian 100%).
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output jumlah ASN yang mendapatkan honor. Dengan target 16 orang dan realisasi 16 orang (capaian 100%).
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun. Dengan target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen (capaian 100%).
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan output

- Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran yang disiapkan. Dengan target 14 dokumen dan realisasi 14 dokumen (capaian 100%).
- (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan output Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan target 153 stel dan realisasi 153 dokumen (capaian 100%).
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan dengan output Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi. Dengan target 13 orang dan realisasi 13 dokumen (capaian 100%).
- (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan. Dengan target 4 jenis komponen dan realisasi 4 jenis komponen (capaian 100%).
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target 3 jenis bahan logistik dan realisasi 3 bahan logistik (capaian 100%).
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan output Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan. Dengan target 9 jenis barang cetak dan penggandaan dan realisasi 9 jenis barang cetak dan penggandaan (capaian 100%).
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan. Dengan target 2 jenis bahan bacaan dan realisasi 2 jenis bahan bacaan (capaian 100%).
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi Dengan target 65 dokumen dan realisasi 81 dokumen (capaian 124,6%).
- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :



- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru. Dengan target 2 unit dan realisasi 2 unit (capaian 100%).
  - Pengadaan Mebel dengan output jumlah mebel. Dengan target 60 unit dan realisasi 60 unit (capaian 100%).
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output Jumlah Peralatan dan Mesin baru. Dengan target 4 unit dan realisasi 4 unit (capaian 100%).
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor. Dengan target 5 unit dan realisasi 5 unit (capaian 100%).
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun. Dengan target 1000 dokumen dan realisasi 1544 dokumen (capaian 154,4%).
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output jumlah tagihan yang dibayar. Dengan target 4 tagihan dan realisasi 4 tagihan (capaian 100%).
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia. Dengan target 47 orang dan realisasi 47 orang (capaian 100%).
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara. Dengan target 13 unit dan realisasi 13 unit (capaian 100%).
  - Pemeliharaan Mebel, dengan output Jumlah Pemeliharaan Mebel. Dengan target 85 unit dan realisasi 85 unit (capaian 100%).
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah gedung

kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab. Dengan target 2 unit dan realisasi 2 unit (capaian 100%).

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab. Dengan target 82 unit dan realisasi 82 unit (capaian 100%).

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I

b. Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kediklatan dengan indikator kinerja :

1) Nilai evaluasi penyelenggaraan diklat (target kinerja 87(BB)) Realisasi 91,14(BB) Capaian Kinerja 104,75%.

c. Sasaran III : Meningkatnya Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi Profesi Aparatur dengan indikator kinerja :

1) Persentase ASN Prov. Sumatera Barat yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/Tahun (target kinerja 6,2(BB)) (Realisasi 7,1(BB)) capaian kinerja 114,52%.

2) Persentase lulusan diklat dengan predikat minimal memuaskan (target kinerja 86 (BB)) (Realisasi 97,9 (BB)) capaian kinerja 113,84%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

a) Program Pengembangan Sumber daya Manusia dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan output Terlaksananya diklat teknis bagi ASN Provinsi Sumatera Barat Dengan target 150 orang dan realisasi 150 orang (capaian 100%).
- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan, dengan output Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan teknis. Dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (capaian 100%).

(2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan output Terlaksananya sertifikasi kompetensi ASN Dengan target 120 orang dan realisasi 120 orang (capaian 100%).
- Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga, dengan output Jumlah dokumen kelembagaan yang disusun dan diperoleh. Dengan target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen (capaian 100%).
- Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga, dengan output terlaksananya kerjasama dalam negeri/luar negeri untuk pengembangan kapasitas dan peningkatan sumber daya aparatur. Dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (capaian 100%).
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, dengan output Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Fungsional aparatur. Dengan target 651 orang dan realisasi 682 dokumen (capaian 104,7%).
- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan, dengan output Tersedianya dokumen evaluasi pengembangan kompetensi aparatur Dengan target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen (capaian 100%).

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II dan III.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>				<b>15.215.913.599</b>	<b>14.715.505.861</b>	<b>96,71</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>22.111.750</b>	<b>21.543.900</b>	<b>97,43</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	11.471.400	11.419.800	99,55
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	10.640.350	10.124.100	95,15
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>9.517.368.312</b>	<b>9.142.719.167</b>	<b>96,06</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang	80 orang	100	9.170.172.712	8.798.840.167	95,95
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 orang	16 orang	100	313.991.650	310.729.600	98,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	16.969.400	16.950.800	99,89
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 dokumen	14 dokumen	100	16.234.550	16.198.600	99,78
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>148.336.850</b>	<b>147.002.908</b>	<b>99,10</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	153 stel	153 stel	100	68.450.000	67.402.500	98,47
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	13 orang	13 orang	100	79.886.850	79.600.408	99,64
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>972.784.565</b>	<b>964.028.482</b>	<b>99,10</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	4 jenis	100	101.797.500	101.257.500	99,47
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 jenis	3 jenis	100	212.271.500	211.481.000	99,63
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9 jenis	9 jenis	100	70.699.000	70.640.050	99,92
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	100	15.000.000	14.490.000	96,60
	Penyelenggaraan	65 dokumen	81 dokumen	124,6	573.016.565	566.159.932	98,80

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
<b>5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>887.910.100</b>	<b>866.715.685</b>	<b>97,61</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	2 unit	100	64.438.000	59.483.900	92,31
	Pengadaan Mebel	60 unit	60 unit	100	177.120.500	176.490.000	99,64
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	4 jenis	100	551.351.600	537.323.285	97,46
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit	100	95.000.000	93.418.500	98,34
<b>6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>2.279.547.074</b>	<b>2.203.652.124</b>	<b>96,67</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 surat	1544 surat	154,4	20.274.400	20.092.250	99,10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.000 kwh 6.000 m3 50 Mbps 1 rekening	370.000 kwh 6.000 m3 50 Mbps 1 rekening	100	651.040.400	633.880.774	97,36
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47 orang	47 orang	100	1.608.232.274	1.549.679.100	96,36
<b>7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>1.387.854.948</b>	<b>1.369.843.595</b>	<b>98,70</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 unit	13 unit	100	247.950.000	241.886.451	97,55
	Pemeliharaan Mebel	85 unit	85 unit	100	34.920.000	34.797.000	99,65
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	100	254.060.000	244.068.444	96,07
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82 unit	82 unit	100	850.924.948	849.091.700	99,78
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				<b>5.268.259.991</b>	<b>5.097.807.227</b>	<b>96,76</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>150 orang</b>	<b>160 orang</b>	<b>106,6</b>	<b>650.835.900</b>	<b>641.767.616</b>	<b>98,61</b>
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan	150 orang	160 orang	106,6	587.269.150	579.462.086	98,67

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan	1 dokumen	1 dokumen	100	63.566.750	62.305.530	98,02
<b>2</b>	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>20 JP/Tahun</b>	<b>20 JP/Tahun</b>	<b>100</b>	<b>4.617.424.091</b>	<b>4.456.039.611</b>	<b>96,50</b>
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	120 orang	120 orang	100	123.704.200	122.194.229	98,78
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 dokumen	3 dokumen	100	374.332.071	344.825.204	92,12
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	1 dokumen	1 dokumen	100	82.551.820	79.610.167	96,44
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Fungsional = 120 orang Manajerial = 531 orang	120 orang 562 orang	100 105,8	3.885.034.500	3.762.796.711	96,85
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan	3 dokumen	3 dokumen	100	151.801.500	146.613.300	96,58

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Prajabatan						
					20.484.173.590	19.813.313.088	96,72

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>		
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana dan prasarana membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan	Dilakukan pemeliharaan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Untuk pengembangan kompetensi ASN memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar	Mengembangkan pelatihan dengan pola baru seperti blended learning dan e-learning

#### 3.1.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.13.323.943.322,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.673.357.355,82 atau 95,12%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	50	72,73	145,46
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi		Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	10	12	120
	Meningkatnya Perangkat Daerah yang inovatif		Persentase SKPD yang terinovatif	30	68,63	228,77
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	BB	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik	Baik	100

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan, dengan indikator kinerja :
  - 1) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian (Target Kinerja 50(BB)) (Realisasi Kinerja 72,73) capaian kinerja 145,46%
- b. Sasaran II : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi, dengan indikator kinerja :
  - 1) Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (Target Kinerja : 10) (Realisasi Kinerja :12) capaian kinerja 120%.
- c. Sasaran III : Meningkatnya Perangkat Daerah yang Inovatif, dengan indikator :kinerja :
  - 1) Persentase SKPD yang terinovatif (Target Kinerja : 30) (Realisasi Kinerja :68,63) capaian kinerja 228,77%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
  - (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan Output Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK, PK Perubahan); Dokumen Renstra dan Renja Balitbang yang disusun.
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan Output Tersusunnya RKA dan DPA Balitbang Prov. Sumbar.
    - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan Output Tersusunnya Pergeseran dan Perubahan RKA dan Pergeseran dan Perubahan DPA Balitbang Prov. Sumbar.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan Output Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan provinsi, kabupaten/kota dan pusat.
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Output Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan); Study Implementasi.



- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output Kegiatan Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Output Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Balitbang Prov. Sumbar.
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan Output Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi).
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan Output Laporan Aset Akhir Tahun, laporan Keuangan Akhir Tahun, Rekon Keuangan dan Rekon Aset.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan Output Laporan aset Semesteran, Laporan keuangan bulanan dan Semesteran, Rekon Keuangan Bulanan dan Rekon aset.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan Output Jasa Jaminan kendaraan dinas operasional.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan Output Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan.
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan Output ASN Balitbang yang mengikuti Bimtek.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan Output Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan Output Alat Tulis Kantor yang disediakan; Makanan dan Minuman yang di sediakan untuk pertemuan dan tamu.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan Output Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan Output Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan Output Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah.
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan Output Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang di adakan; Peralatan Gedung Kantor yang di adakan.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan Output Jumlah surat yang didistribusikan, Tersedianya benda pos.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan Output internet dan telepon.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Output Jasa Kebersihan kantor, Jasa Kesehatan Rohani (wirid mingguan, program Ramadhan), Jasa Rohaniwan, jasa sopir kantor.
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan Output jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/operasional; Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan Output Peralatan Gedung Kantor yang di pelihara, Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I, II, dan III.

- d. Sasaran IV : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja :
- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Target Kinerja : BB) (Realisasi Kinerja : BB) capaian kinerja 100%.
- e. Sasaran V : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja :
- 1) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (Target Kinerja : Baik) (Realisasi Kinerja : Baik) capaian kinerja 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dicapai dengan kegiatan :
  - (1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan sub kegiatan :
    - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan output Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi Kelitbangan dalam Pembangunan dengan output Terlaksananya perumusan arahan dan kebijakan umum kelitbangan serta pertimbangan pemanfaatan kegiatan kelitbangan oleh Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
    - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dengan output koordinasi, fasilitasi, konsultasi sinergitas program kelitbangan, Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelitbangan.
  - (2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan sub kegiatan :
    - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial, dengan output Terlaksananya Penelitian aspek-aspek sosial tentang Kesehatan.
    - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, dengan output Terlaksananya Penelitian di sektor Pendidikan dan Kebudayaan tentang SMA/ sederajat.
    - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, dengan output Terlaksananya Penelitian pengembangan pariwisata.

- (3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub kegiatan :
- Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, dengan output Terlaksananya Penelitian pengembangan pariwisata.
  - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan, dengan output Terlaksananya penelitian di sektor pertanian, perkebunan dan pangan.
  - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, dengan output Terlaksananya penelitian tentang lingkungan hidup.
  - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dengan output Terlaksananya Penelitian di sektor Perhubungan.
  - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan output Terlaksananya penelitian di sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (4) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub kegiatan :
- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, dengan Output Terlaksananya Pengembangan Teknologi di Masyarakat.
  - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, dengan output Terlaksananya penerapan inovasi dan teknologi.
  - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, dengan output terlaksananya diseminasi dan fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang sangat inovatif; terlaksananya pembinaan, koordinasi, konsultasi, fasilitasi pengukuran dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan Keuangan Daerah, Daya Saing Daerah dan Kepemimpinan Daerah.
  - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, dengan output Jumlah pelaksanaan publikasi hasil karya tulis ilmiah secara online.

(Elektronik Jurnal); Terlaksananya Diseminasi Kelitbangan IPTEK dan Inovasi.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV dan V.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	100 %	100 %	100	6.998.604.203	6.528.605.862,82	93,28
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100 %	100 %	100	293.168.750	287.746.294	98,15
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 jenis; 2 jenis	3 jenis; 2 jenis	100	73.367.500	71.680.800	97,70
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 jenis	2 jenis	100	5.400.000	5.400.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4 jenis	4 jenis	100	3.805.000	3.805.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 kali	10 kali	100	59.903.000	57.194.894	95,48
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 jenis	4 jenis	100	150.693.250	149.665.600	99,32
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100 %	100 %	100	4.609.614.719	4.192.089.601	90,94
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100	4.329.177.919	3.917.141.401	90,48
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	246.436.900	243.857.800	98,95
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan; 1 tahun; 2 kali	1 laporan; 1 tahun; 2 kali	100	14.000.000	13.272.400	94,80
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	2 laporan; 13 laporan; 2 kali	2 laporan; 13 laporan; 2 kali	100	19.999.900	17.818.000	89,09
3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	100 %	100 %	100	23.600.000	22.618.377	95,84
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 unit	4 unit	100	23.600.000	22.618.377	95,84
4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100	141.499.000	135.443.948	95,72

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31 stel	31 stel	100	23.250.000	23.250.000	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 kali	4 kali	100	118.249.000	112.193.948	94,88
<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>697.819.033</b>	<b>693.298.609</b>	<b>99,35</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	2.500.000	2.448.650	97,95
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan; 12 bulan	12 bulan; 12 bulan	100	44.993.600	44.782.400	99,53
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	19.995.000	19.802.600	99,04
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	100	4.180.000	4.070.000	97,37
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	626.150.433	622.194.959	99,37
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>226.839.150</b>	<b>226.750.400</b>	<b>99,96</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 jenis; 20 unit	9 jenis; 20 unit	100	226.839.150	226.750.400	99,96
<b>7</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>669.143.551</b>	<b>647.427.218</b>	<b>96,75</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 kali; 900 benda pos	100 kali; 900 benda pos	100	8.993.300	8.992.950	99,99
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50 Mbps; 2 rekening telepon	50 Mbps; 2 rekening telepon	100	38.605.000	36.696.582	95,06
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan; 12 bulan; 12 bulan	12 bulan; 12 bulan; 12 bulan	100	621.545.251	601.737.686	96,81
<b>8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>669.143.551</b>	<b>647.427.218</b>	<b>96,75</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit; 7 unit	4 unit; 7 unit	100	129.890.000	118.960.786	91,59
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan; 12 bulan	12 bulan; 12 bulan	100	207.030.000	204.270.629,82	98,67

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
II	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>50 %, 10, 30%</b>	<b>72,73 %, 12, 68,23%</b>	<b>145,46; 120; 228,77</b>	<b>6.325.339.119</b>	<b>6.144.751.493</b>	<b>97,15</b>
1	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>50 persen</b>	<b>50 persen</b>	<b>100</b>	<b>904.813.407</b>	<b>900.622.923</b>	<b>99,54</b>
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 tahun; 1 Rumusan Kebijakan	1 tahun; 1 Rumusan Kebijakan	100	606.600.000	604.578.470	99,67
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Tahun; 1 kali	1 Tahun; 1 kali	100	139.017.410	138.480.391	99,61
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	6 KTI; 1 tahun; 400 data; 1 Tahun	6 KTI; 1 tahun; 400 data; 1 Tahun	100	159.195.997	157.564.062	98,97
2	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>	<b>100</b>	<b>683.984.308</b>	<b>677.708.059</b>	<b>99,08</b>
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100	241.378.410	239.637.206	99,28
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100	241.854.900	240.985.453	99,64
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100	200.750.998	197.085.400	98,17
3	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>50 persen</b>	<b>50 persen</b>	<b>100</b>	<b>1.650.081.110</b>	<b>1.619.840.760</b>	<b>98,17</b>
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100	223.548.400	221.301.500	98,99
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 rekomedasi	1 rekomedasi	100	458.505.000	453.752.148	98,96
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100	539.813.910	531.142.064	98,39
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100	227.209.400	222.091.984	97,75
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100	201.004.400	191.553.064	95,30
4	<b>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>66,67 %</b>	<b>66,67 %</b>	<b>100</b>	<b>3.086.460.294</b>	<b>2.946.579.751</b>	<b>95,47</b>

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 rancang bangun	5 rancang bangun	100	1.528.473.400	1.432.159.455	93,70
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5 teknologi	5 teknologi	100	603.707.400	569.238.036	94,29
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	30 %; 2 indeks	30 %; 2 indeks	100	312.968.660	309.246.760	98,81
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Kali terbit; 3 Sosialisasi	2 Kali terbit; 3 Sosialisasi	100	641.310.834	635.935.500	99,16

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tidak ada permasalahan	-
II	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tidak ada permasalahan	-

#### 3.1.4.6. Penghubung

Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.17.381.528.782,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.203.333.836,00 atau 93,22%, dengan uraian sebagai berikut :

##### 1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	Program Pelayanan Penghubung.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	400%	400
			Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	100
II	Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di		Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan.	12 kali	14 kali	117



	perantauan.		Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.	3 kali	3 kali	100
III	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat.		Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat.	6 kali	7 kali	117
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat.	2 kali	2 kali	100
IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.	70	62,82	89,74
V	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	1.628	1.387	85,20

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

- a. Sasaran I : Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah, dengan Indikator Kinerja :
- 1) Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 400%).
  - 2) Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%).
- b. Sasaran II : Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan, dengan Indikator Kinerja:
- 1) Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan (Target Kinerja : 12 kali) (Realisasi Kinerja : 14 kali).
  - 2) Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.(Target Capaian : 3 kali) (Realisasi Kinerja : 3 kali).
- c. Sasaran III : Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat, dengan Indikator Kinerja :
- 1) Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat (Target Kinerja : 6 kali) (Realisasi Kinerja : 7 kali).
  - 2) Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat (Target Kinerja : 2 kali) (Realisasi Kinerja : 2 kali).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pelayanan Penghubung dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Pelayanan Penghubung, dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kedinasan di Badan Penghubung.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja I, II, dan III.

- d. Sasaran IV : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan Indikator Kinerja :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.(Target Kinerja : B) (Realisasi Kinerja : B) Capaian Kinerja 100%.

- e. Sasaran V : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan Indikator Kinerja :

- 1) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (Target Kinerja : Baik) (Realisasi Kinerja : Baik) Capaian Kinerja 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya perencanaan dan evaluasi kinerja Badan Penghubung.
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya administrasi keuangan di Badan Penghubung.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya administrasi Barang Milik Daerah di Badan Penghubung.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kedinasan dan SDM di Badan Penghubung.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya administrasi umum di Badan Penghubung.
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana di Badan Penghubung.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor.

- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan, sarana dan prasarana di Badan Penghubung.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV dan V.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			100	4.273.558.498	4.143.153.051	96,95
1	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	100%	100%	100	4.273.558.498	4.143.153.051	96,95
II	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			100	13.107.970.284	12.060.180.785	92,01
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	100%	100%	100	95.537.000	91.421.836	95,69
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	100%	100%	100	6.421.760.509	5.936.124.995	92,44
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	100%	100%	100	298.607.500	262.279.076	87,83
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	100%	100%	100	207.546.978	190.904.239	91,98
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	100%	100%	100	923.189.145	890.240.465	96,43
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	100%	100%	100	2.345.384.890	1.927.927.278	82,20
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	100%	100%	100	2.184.724.262	2.166.299.592	99,16
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	100%	100%	100	631.220.000	594.983.304	94,26

### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	Program Pelayanan Penghubung		
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah tenaga pelayanan pimpinan daerah ( protokol dan sopir ) yang <i>capable</i> belum memadai untuk mengimbangi padatnya jadwal pimpinan yang harus dilayani.	Menambah tenaga personil pelayanan baik protokol maupun supir yang bertugas melayani pimpinan.

No	Program/ Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
		<p>Padatnya jadwal dan kegiatan pimpinan Daerah yang harus dilayani dan difasilitasi baik yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat atau di Jakarta menambah intensitas pelayanan.</p> <p>Revitalisasi yang dilakukan pihak TMII sehingga banyak kegiatan promosi yang berlokasi di Anjungan Sumatera Barat tidak bisa dilaksanakan sesuai target.</p>	<p>Seiring dengan revitalisasi yang dilakukan oleh TMII, Anjungan Sumatera Barat juga melakukan perbaikan dan peremajaan sarana prasarana agar pada saat tempat wisata diujicobakan dibuka untuk masyarakat pada Oktober-Desember 2022, dapat menampilkan ciri khas daerah, mulai dari rumah adat, pakaian adat, ikon daerah, hingga kuliner khas daerah, sehingga Anjungan Sumatera Barat terlihat lebih menarik dan lebih terkini lagi.</p>

### 3.1.5. FUNGSI PENDUKUNG

#### 3.1.5.1. Sekretariat Daerah

Fungsi pendukung Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.176.654.560.886,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.168.216.793.565,00 atau 95,22%, dengan uraian sebagai berikut :

##### 3.1.5.1.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.4.717.478.704,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.627.596.108,00 atau 98,09%, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas LPPD.	<b>Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	80%	97,32%	103,98
2	Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi		Persentase Capaian Pemenuhan SPM Provinsi	100%	100%	100
3	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah		Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%	100
4	Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat		Persentase administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kab/kota yang difasilitasi	100%	100%	100
5	Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah		Persentase Kab/Kota yang telah tertib batas wilayahnya	80%	100%	125
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi		Persentase Kab/kota yang telah memiliki kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan	90%	100%	111
7	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (75)	BB (71,14)	94,80
			Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	85 (Baik)	87,24	

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan/Sub Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatkan kualitas LPPD, dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel (Target Kinerja : 80%) (Realisasi Kinerja : 97,23%),

- b. Sasaran II : Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi, dengan indikator kinerja yaitu :
  - i. Persentase Capaian Pemenuhan SPM Provinsi (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%).
- c. Sasaran III : Optimalisasi pelaksanaan Kerjasama daerah, dengan indikator kinerja yaitu :
  - 1) Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%).
- d. Sasaran IV : Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dengan indikator kinerja yaitu :
  - 1) Persentase administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kab/kota yang difasilitasi (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%).
- e. Sasaran V : Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah, dengan indikator kinerja yaitu :
  - 1) Persentase Kab/Kota yang telah tertib batas wilayahnya (Target Kinerja : 80%) (Realisasi Kinerja : 100%).
  - 2) Persentase Kab/kota yang telah memiliki kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan (Target Kinerja : 90%) (Realisasi Kinerja : 100%).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, dengan sub kegiatan :
    - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan, dengan output terlaksananya pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan.
    - Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum, dengan output terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum.
    - Fasilitasi Penataan Wilayah, dengan output usulan penegasan batas kabupaten/kota, terlaksananya fasilitasi penataan nagari di Provinsi Sumatera Barat.
  - (2) Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, dengan output dokumen Kepala Daerah yang difasilitasi

- Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan, dengan output laporan penerapan SPM yang tersusun, terlaksananya Hari Otonomi Daerah, terlaksananya Hari Jadi Sumatera Barat.
  - Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan output laporan LPPD yang tersusun, Kabupaten/Kota yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan kabupaten/kota yang dibina.
- (3) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, dengan sub kegiatan :
- Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah, dengan output terfasilitasinya Kerjasama Antar Pemerintah.
  - Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta, dengan output terfasilitasinya Kerjasama Badan Usaha/Swasta.
  - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, dengan output Laporan Evaluasi Kerjasama Pelaksanaan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I, II, III, IV, V.

- f. Sasaran VI : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :
- 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Target Kinerja : BB/75) (Realisasi Kinerja : BB/71,14).
- g. Sasaran VII : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :
- 1) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi (Target Kinerja : 85) (Realisasi Kinerja : 87,24).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output dokumen dokumen RKA,DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output laporan kinerja yang tersusun.
  - (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output honor pengelola keuangan yang terbayarkan.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan output laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan output kebutuhan BMD yang diusulkan.
  - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output asuransi BMD yang dibayarkan.
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output terlaksananya penatausahaan BMD.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja, dengan output terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai.
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output ASN yang melaksanakan Bimtek.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output adalah Jumlah Peralatan Kantor Yang Dibeli.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator ATK dan Makanan dan Minuman Rapat yang tersedia.
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan output adalah barang cetak dan penggandaan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan output bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output laporan perjalanan dinas yang dilaksanakan.



- (6) Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output tersedianya peralatan mesin.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output surat-surat yang didistribusikan.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output tagihan listrik dan telepon yang dibayarkan.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output honor tenaga kontrak yang dibayarkan.
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan output kendaraan dinas jabatan yang dipelihara.
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output kendaraan dinas operasional yang dipelihara.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output terlaksananya peralatan dan mesin yang dipelihara.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VI dan VII.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	100	1.760.405.946	1.306.335.599	96,78
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	47.749.090	48.284.250	96.93
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	100	33.043.700	32.243.500	97,58

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perangkat Daerah						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	100	14.705.390	14.040.750	95,48
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>177.922.300</b>	<b>77.183.000</b>	<b>93,87</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 orang	7 orang	100	69.535.000	65.625.000	94,38
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100	12.688.200	11.558.000	91,09
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>52.212.650</b>	<b>39.864.790</b>	<b>76,35</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	11.180.100	10.882.500	96,80
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	23.300,000	16.275.690	69,85
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100	17.732.550	12.766.600	72,00
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>60.485.634</b>	<b>57.069.700</b>	<b>94,35</b>
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	36 orang	40 orang	111	7.520.000	7.146.000	95,03
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	15 orang	100	52.965.634	49.932.700	94,26
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>1.134.968.941</b>	<b>1.117.836.400</b>	<b>98,49</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70 unit	115 unit	164	397.480.400	393.039.900	98,88
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	54.598.900	53.065.600	97,19
		1000 kotak	720 kotak	72			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200 buah	200 buah	100	39.368.00	37.922.000	96,33
		10.000 lembar	10.000 lembar				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 buah	7 buah	100	12.300.000	11.900.000	96,75
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 dokumen	88 dokumen	176	631.221.641	621.908.900	98,52

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	100	160.648.760	158.170.500	98,46
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	9 unit	90	160.648.760	158.170.500	98,46
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	100	85.989.671	77.805.493	90,48
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 surat	2011 surat	100,55	4.457.731	4.425.000	99,27
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 mbps	4 mbps	100	6.678.000	5.455.185	81,69
		2 rekening	2 rekening				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 orang	2 orang	100	74.853.940	67.925.300	90,74
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	100	136.128.000	129.475.716	95,11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	100	42.132.000	40.198.295	95,41
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	2 unit	100	78.336.000	73.875.421	94,31
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52 unit	22 unit	42,30	15.660.000	15.402.000	98,35
II	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	1 dokumen	1 dokumen		2,029,324,785	1,948,909,673	96.04
		100%	100%				
		100%	100%				
		80%	80%				
		1 dokumen	1 dokumen				
1	<b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>				1.052.613.022	1.047.550.631	99,52
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	100	4.904.000	4.900.600	99,93
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 laporan	1 laporan	100	384.634.247	381.655.190	99,32
	Fasilitasi Penataan Wilayah	1 dokumen	1 dokumen	100	663.074.775	660.994.841	99,69
		14 Kab/Kota	4 Kab/Kota	30			
		19 Kab/Kota	19 Kab/kota	100			
		200 orang	0	0			
		300 orang	0	0			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 segmen	0	0			
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>				<b>1.077.507.848</b>	<b>1.062.987.062</b>	<b>98,65</b>
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	20 dokumen	15 dokumen	100	244.500.500	242.320.029	99,11
		20 dokumen	15 dokumen	100			
		4 kali	3 kali	75			
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	19 Kab/kota	6 Kab/kota	100	254.386.598	253.525.397	99,66
		19 Kab/kota	19 Kab/kota	100			
		1 laporan	1 laporan	100			
		1 laporan	1 laporan	100			
		1 laporan	1 laporan	100			
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	207 org	0	0	578.620.750	567.141.636	98,02
		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100			
		1 laporan	1 laporan	100			
		1 laporan	1 laporan	100			
		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100			
		1 laporan	1 laporan				
<b>3</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>				<b>826.951.888</b>	<b>813.368.566</b>	<b>98,36</b>
	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	1 dokumen	1 dokumen	100	437.699.671	428.936.054	98,00
		1 laporan	1 laporan	100			
		1 dokumen	1 dokumen	100			
		1 kali	1 kali	100			
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	1 dokumen	1 dokumen	100	187.690.282	187.188.103	99,73
		1 laporan	1 laporan	100			
		1 rumusan	1 rumusan	100			
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 dokumen	1 dokumen	100	201.561.935	197.244.409	97,86
		1 laporan	1 laporan				

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tidak ada permasalahan	-
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Tidak ada permasalahan	-

##### 3.1.5.1.2. Biro Hukum

Urusan Penunjang dilaksanakan oleh Biro Hukum Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.023.639.142,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.450.073.356,00 atau 81,03% dengan uraian sebagai berikut :

## 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah produk Hukum Yang Ditetapkan			
			Perda	10	7	
			Pergub	60	39	
			Kepgub	750	1083	
			Draft Rancangan produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	60	136	
			Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi	20	25	
			Perda Kab/Kota yang diklarifikasi	3	-	
II	Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus Yang Ditangani	10	24	240
			Jumlah Bantuan Advokasi Hukum Yang Ditetapkan	5	5	100
			Jumlah unit kerja, kab/kota yang memenuhi indikator RANHAM	7, 19	7,19	100
III	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB 70,01	BB 70,80	BB (70.80%)

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatkan produk hukum daerah yang diselesaikan, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Jumlah produk hukum yang ditetapkan :

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Peraturan Daerah	10	7	70
2.	Peraturan Gubernur	60	39	65
3.	Keputusan Gubernur	750	1082	144.27

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota	60	136	226
2.	Ranperda kab/kota	20	25	125
3.	Perda kab/kota	3	0	0
4.	Peraturan KDH & DPRD kab/kota	5	2	40

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan dengan output kegiatan sbb: 7 Perda, 39 Peraturan Gubernur, 1059 Keputusan Gubernur.
  - (2) Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan output kegiatan ini :
    - Tersalurkannya bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin pada tahun 2022 dari target yang ditetapkan sebanyak 5 bantuan, dapat terealisasi sebanyak 5 bantuan yang berasal dari 3 kantor/organisasi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Kantor Hukum (LBH) FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTA SOLOK) dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTO BARU).
    - Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 yang merupakan RANHAM Generasi V berfokus dan berorientasi pada pemenuhan (4) empat sasaran kelompok, yaitu : Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Masyarakat Adat. Sebagai sebuah dokumen teknokratik dan amanat Presiden Indonesia, RANHAM harus dilaksanakan disemua jenjang pemerintahan daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
    - Maka untuk itu perlu dilakukan Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai sarana bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi dalam pelaksanaan kegiatan supremasi hukum dan perlindungan HAM.
    - Kegiatan Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai sarana bagi aparatur Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberikan motivasi dalam melaksanakan amanat Undang-Undang 1945 pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan bahwa Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari

kegiatan di atas, maka dilakukan Koordinasi tindak lanjut pelaksanaan RANHAM ke Ditjen Hak Asasai Manusia di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatkan akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat yaitu :
- 1) Jumlah kasus yang ditangani (Target Kinerja : 10) (Realisasi Kinerja : 24).
  - 2) Jumlah bantuan advokasi hukum yang ditetapkan (Target Kinerja : 5) (Realisasi Kinerja : 5).
  - 3) Jumlah unit kerja, kab/kota yang memenuhi indikator RANHAM (Target Kinerja : 19) (Realisasi Kinerja : 19).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan dengan output kegiatan sbb: 7 Perda, 39 Peraturan Gubernur, 1059 Keputusan Gubernur.
  - (2) Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan output kegiatan ini :
    - Tersalurkannya bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin pada tahun 2022 dari target yang ditetapkan sebanyak 5 bantuan, dapat terealisasi sebanyak 5 bantuan yang berasal dari 3 kantor/organisasi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Kantor Hukum (LBH) FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTA SOLOK) dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTO BARU).
    - Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 yang merupakan RANHAM Generasi V berfokus dan berorientasi pada pemenuhan (4) empat sasaran kelompok, yaitu : Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Masyarakat Adat. Sebagai sebuah dokumen teknokratik dan amanat Presiden

Indonesia, RANHAM harus dilaksanakan disemua jenjang pemerintahan daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

- Maka untuk itu perlu dilakukan Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai sarana bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi dalam pelaksanaan kegiatan supremasi hukum dan perlindungan HAM.
- Kegiatan Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai sarana bagi aparatur Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberikan motivasi dalam melaksanakan amanat Undang-Undang 1945 pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan bahwa Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan di atas, maka dilakukan Koordinasi tindak lanjut pelaksanaan RANHAM ke Ditjen Hak Asasai Manusia di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

c. Sasaran III : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Target Kinerja : BB = 70,01) (Realisasi Kinerja : BB = 70,80%).

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - (3) Administrasi BMD pada Perangkat Daerah.
  - (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - (6) Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



(8) Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

**3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>						
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	100%	100	39.344.940	39.130.200	99.45
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100	70.615.200	70.606.200	99.99
3.	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100	11.950.200	11.375.570	95.19
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100	79.171.000	61.794.070	78.05
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100	486.971.990	463.788.223	95.24
6.	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	195.404.480	178.417.300	91.31
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100	2.296.000	2.179.483	94.93
8.	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	93.390.000	61.608.300	65.97
II	<b>FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>						
1.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	90%	100%	95.50	1.249.005.690	1.131.429.313	90.59
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	90%	100%	100	795.489.642	429.744.697	54.02

**4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>		
II.	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		
1.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Masih adanya produk hukum daerah yang belum harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Inventarisir produk hukum daerah yang belum harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru beserta pendanaannya yang masih terbatas	Mengadakan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan lingkup provinsi, dan kab/kota

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Masih kurangnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat dan pemerintah	Mengupayakan akses dan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat dan pemerintah
		Sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang masih rendah	Mengadakan sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang masih rendah

### 3.1.5.1.3. Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat

Urusan penunjang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.34.020.072.223,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.31.155.886.877,20 atau 91,58%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatkan fasilitasi pembangunan dan pengembangan bina spiritual masyarakat	<b>Kesejahteraan Rakyat</b>	Jumlah Lembaga Bina Spritual yang aktif	7 Lembaga	9 Lembaga	128,58
			Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji	sangat puas	sangat puas	100
			Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ /MQK)	peringkat 10 Nasional	peringkat 5 Nasional	200
II	Optimalisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindak lanjuti	6	6	100
III	Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar		Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan	6	6	100
IV	Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar		Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	6	6	100
V	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B(62)	61.33	98.91
VI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	B(77)	83.40	108,40	

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

- a. Sasaran I : Meningkatkan fasilitasi pembangunan dan pengembangan bina spiritual masyarakat, dengan Indikator Kinerja :
- 1) Jumlah Lembaga Bina Spritual yang aktif (Target Kinerja : 7 Lembaga (LPTQ, MUI, BAZNAS, MES, MCI, BKPRMI, DMI)) (Realisasi Kinerja : 9 Lembaga (LPTQ, MUI, BAZNAS, MES, MCI, BKPMRI, DMI, JPRMI, Pemuda Masjid Raya)).
  - 2) Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji (Target Kinerja : Sangat Puas) ( Realisasi Kinerja : Sangat Puas).
  - 3) Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK) (Target Kinerja : peringkat 10 Nasional) (Realisasi Kinerja : peringkat 5 Nasional).

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Optimalisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar, dengan Indikator Kinerja :
- 1) Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti (Target Kinerja : 6) (Realisasi Kinerja : 6).
- c. Sasaran III : Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar, dengan Indikator Kinerja :
- 1) Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang dimplementasikan (Target Kinerja : 6) (Realisasi Kinerja : 6) Capaian Kinerja : 100%.
- d. Sasaran IV : Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar, dengan Indikator Kinerja :
- 1) Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti (Target Kinerja : 6) (Realisasi Kinerja : 6) Capaian Kinerja : 100%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

- a) Program Kesejahteraan Rakyat, dicapai dengan pelaksanaan :
- (1) Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, dengan sub kegiatan :
    - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual, dengan output terlaksananya fasilitasi pembinaan mental spiritual.

- Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual, dengan output jumlah fasilitasi yang diberikan kepada kelembagaan bina spiritual.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dengan sub kegiatan :
- Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang pendidikan, dengan output jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan.
  - Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, dengan output jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan.
  - Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, dengan output jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, dengan sub kegiatan :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dengan output jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang disusun.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dengan output jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang disusun.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan, dengan output jumlah kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II, III, IV.

- e. Sasaran V : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, dengan Indikator Kinerja
  - 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja (Target Kinerja : B(62)) (Realisasi Kinerja : 61,33).
- f. Sasaran VI : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi, dengan Indikator Kinerja :
  - 1) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi (Target Kinerja : B(77)) (Target Kinerja 83,40).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan, dicapai dengan pelaksanaan :
  - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun.
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan.
  - (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output jumlah ASN yang mendapatkan honor.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan output jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran yang disiapkan.
  - (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output jumlah bimtek yang dilaksanakan.
  - (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output jumlah alat tulis kantor yang disediakan dan jumlah makan minum rapat yang disediakan.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan, dengan output jumlah cetak amplop sekda, jumlah cetak blanko SPPD, jumlah cetak map biro, jumlah fotocopy penggandaan berkas.
  - Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah.
- (5) Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya, dengan output jumlah komputer baru yang tersedia, jumlah laptop baru yang tersedia, jumlah printer baru yang tersedia, jumlah TV baru yang tersedia.
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun.
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan output jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara.
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V dan VI.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>791.354.425</b>	<b>721.977.266</b>	<b>91.23</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>11.029.200</b>	<b>9.511.200</b>	<b>86.24</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.401.000	5.401.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.628.200	4.110.200	73.03
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>125.558.300</b>	<b>122.984.700</b>	<b>97.95</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				118.979.000	116.415.400	97.85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				6.579.300	6.569.300	99.85
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>21.560.500</b>	<b>20.996.000</b>	<b>97.38</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				21.560.500	20.996.000	97.38
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>455.345.225</b>	<b>416.945.516</b>	<b>91.57</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				54.873.000	54.787.700	99.84
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan				35.469.000	34.677.000	97.77
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				365.003.225	327.480.816	89.72
<b>5</b>	<b>Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>57.391.200</b>	<b>57.245.000</b>	<b>99.75</b>
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya				57.391.200	57.245.000	99.75
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>12.100.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>49.59</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.100.000	6.000.000	49.59
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>				<b>108.370.000</b>	<b>88.294.850</b>	<b>81.48</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				61.690.000	48.737.950	79
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34.100.000	33.614.400	98.58
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.580.000	5.942.500	47.24
<b>II</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>				<b>33.228.717.798</b>	<b>30.433.909.611</b>	<b>91.59</b>
<b>1</b>	<b>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>				<b>32.048.080.048</b>	<b>29.352.355.290</b>	<b>91.59</b>
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				1.242.576.650	1.218.552.644	98.07
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				30.805.503.398	28.133.802.646	91.33
<b>2</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>				<b>616.804.500</b>	<b>569.168.313</b>	<b>92.28</b>
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				353.030.500	342.184.752	96.93
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				106.612.000	88.537.700	83.05
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				157.162.000	138.445.861	88.09
<b>3</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>				<b>563.833.250</b>	<b>512.386.008</b>	<b>90.88</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi				173.106.000	155.508.500	89.83



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				208.907.000	193.343.550	92.55
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan				181.820.250	163.533.958	89.94

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>Program Bina Mental Spiritual</b>		
1	Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Terlambatnya pencairan dan bantuan hibah	Jemput bola kelokasi

##### 3.1.5.1.4. Biro Administrasi Pembangunan

Fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.338.444.003,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.305.264.718,00 atau 99,01%, dengan uraian sebagai berikut :

## 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Mewujudkan Pengendalian Pembangunan yang Optimal	<b>Kebijakan Administarsi Pembangunan</b>	Perentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang tertib Administrasi	91	PD : 98,26 Kab/Kota : 100	107,98 109,89
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Nilai Akuntabilita kinerja	B (61)	60,08	98,49
III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (80)	Baik (88,23)	110,28

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Mewujudkan Pengendalian Pembangunan yang Optimal, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang tertib Administrasi (Target Kinerja 91) (Realisasi PD : 98,26 Kab/Kota : 100).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a. Program Kebijakan Administarsi Pembangunan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 2) Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, dengan output Termonitornya realisasi fisik dan keuangan OPD Sumatera Barat, Pemerintah Kab/Kota dan Dana APBN yang dilaksanakan di Sumatera Barat.
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN, dengan output Termonitornya realisasi fisik dan keuangan OPD Sumatra Barat, Pemerintah Kab/Kota dan Dana APBN yang dilaksanakan di Sumatera Barat.
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, dengan output Termonitornya realisasi fisik dan keuangan OPD Sumatra Barat, Pemerintah Kab/Kota dan Dana APBN yang dilaksanakan di Sumatera Barat.

- 3) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Analisis capaian kinerja pembangunan daerah, dengan output Terlaksananya realisasi data fisik dan keuangan OPD Sumatera Barat.
  - Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan output Terlaksananya realisasi data fisik dan keuangan OPD Sumatera Barat.
  - Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah, dengan output Terlaksananya realisasi data fisik dan keuangan OPD Sumatera Barat.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja :
  - 1) Nilai Akuntabilitas kinerja (Target Kinerja : 61 (B)) (Realisasi : 60,08).
  - 2) Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Target Kinerja : 80) (Realisasi : 82).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah.
  - 2) Administrasi Keuangan Pada Perangkat Daerah :
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output Terlaksananya tertib Administrasi Barang Milik Daerah.
    - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan output Terlaksananya tertib Administrasi Barang Milik Daerah.

- 3) Administrasi BMD Pada Perangkat Daerah :
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output Terlaksananya tertib Administrasi Barang Milik Daerah.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peratran Perundang-Undangan, dengan output Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Biro Administrasi Pembangunan.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah :
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output Terlaksananya Administrasi Umum Biro Administrasi Pembangunan.
  - Penyediaan bahan logistik kantor, dengan output Terlaksananya Administrasi Umum Biro Administrasi Pembangunan.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output Terlaksananya Administrasi Umum Biro Administrasi Pembangunan.
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan output Terlaksananya Administrasi Umum Biro Administrasi Pembangunan.
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan output Terlaksananya Administrasi Umum Biro Administrasi Pembangunan.
- 6) Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Biro Administrasi Pembangunan.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
  - Penyediaan jasa surat menyurat, dengan output Terlaksananya penunjang urusan kantor.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, dengan output Terlaksananya penunjang urusan kantor.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan output Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan, dengan output Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin, dengan output Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah lainnya.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/Kegiatan	Target dalam dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	100	100		1,134,861,003	1,126,714,658	99.28
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100	100		37,988,000	37,927,500	99.84
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	11 dokumen	100	21,475,000	21,433,000	99.8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	16,513,000	16,494,500	99.89
2	<b>Administrasi Keuangan Pada Perangkat Daerah</b>	100	100		75,285,000	75,253,000	99.96
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 org	5 org	100	62,225,000	62,225,000	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15 dokumen	15 dokumen	100	13,060,000	13,028,000	99.75
3	<b>Administrasi BMD Pada Perangkat Daerah</b>	100	100		18,800,000	18,800,000	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100	18,800,000	18,800,000	100
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100	100		45,339,600	45,277,900	99.86
	Bimbingan Teknis Implementasi Peratran Perundang-Undangan	8 kali	8 kali	100	45,339,600	45,277,900	99.86
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100	100		736,531,203	734,227,384	99.69

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 unit	10 unit,3 unit,2 unit,1 unit,3 unit,3 unit,1 unit	100	128,845,910	128,000,000	99.34
	Penyediaan bahan logistik kantor	42 jenis	42 jenis	100	39,062,290	39,062,290	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 jenis, 10000lbr	5 jenis,6 jenis 10000 lbr	100	18,369,500	18,369,500	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	378 org	378 org	100	5,200,000	4,201,000	80.79
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	200 dokumen	300 dokumen	100	545,053,503	544,594,594	99.92
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>35,600,000</b>	<b>34,890,000</b>	<b>98.01</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	1 unit	100	35,600,000	34,890,000	98.01
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>75,887,850</b>	<b>72,815,366</b>	<b>95.95</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	1500 surat	1500 surat	100	74,386,350	72,815,366	97.89
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	4 media, 1 rek, 3 paket, 20 Mbps	4 media, 1 rek,1 rek 3 paket		1,501,500	-	0
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>109,429,350</b>	<b>107,523,508</b>	<b>98.26</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	100	49,190,000	47,718,800	97.01
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	4 unit	2 unit	50	47,774,350	47,339,708	99.09
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	35 unit	35 unit	100	12,465,000	12,465,000	100
<b>II</b>	<b>KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>91</b>	<b>91</b>		<b>2,203,583,000</b>	<b>2,178,550,060</b>	<b>98.86</b>
<b>1</b>	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>91</b>	<b>91</b>		<b>1,355,758,500</b>	<b>1,342,211,286</b>	<b>99</b>
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 tahun	1 tahun		329,785,000	322,658,655	97.84
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 buku, 1 tahun, 1 tahun, 2 kali	1 buku,1 tahun,2kali		319,295,500	318,537,363	99.76
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 tahun,1 9 kab/kota,19 kab/kota, 4 kali, 1 tahun	1 tahun,1 9 kab/kota,1 9 kab/kota, 11 kab/kota,		706,678,000	701,015,268	99.2

			1 kali, 2kali, 4 kali, 1 tahun				
2	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>3 rekomendasi</b>	<b>3 rekomendasi</b>		<b>847,824,500</b>	<b>836,338,774</b>	<b>98.65</b>
	Analisis capaian kinerja pembangunan daerah	1 tahun, 1 tahun, 4 dok, 1 tahun	1 tahun, 4 dok, 4 dok, 1 tahun, 1thn, 1 thn		105,820,500	104,565,827	98.81
	Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	12 bln, 2 lap, 19 kab/kota, 1 sistem	12 bln, 1 thn, 2 lap, 19 kab/kota, 2 lap, 19 kab/kota, 19 kab/kota, 4 kali, 1 sistem		482,835,000	479,966,155	99.41
	Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	4 dok, 1 thn,	1 thn, 1 thn, 1thn, 1 dok		259,169,000	251,806,792	97.16

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>		
II	<b>KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>		
1	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Masih adanya terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD/APBN sehingga terjadi padatnya pelaksanaan kegiatan diakhir tahun anggaran.	Perlu adanya perencanaan yang matang dari OPD dalam melaksanakan kegiatan, terutama OPD yang memiliki sumber dana dari APBD dan APBN agar ada time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi padatnya pelaksanaan kegiatan diakhir tahun anggaran.

##### 3.1.5.1.5. Biro Perekonomian

Urusan penunjang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.814.128.475,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.728.364.378,00 atau 96,95%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	6
I	Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan	7	7	100

II	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota		Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi	91%	100%	109,89
			Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan Pemerintah Provinsi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	91%	100%	109,89
III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	BB (71,00)	BB (70,77)	99,68
IV	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (80,00)	Baik (87,20)	109,0

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

b. Sasaran I : Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan (Target Kinerja : 7) (Realisasi Kinerja : 7).

b. Sasaran II : Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi (Target Kinerja : 91%) (Realisasi Kinerja : 100%).

2) Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan Pemerintah Provinsi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota (Target Kinerja : 91%) (Realisasi Kinerja : 100%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Perekonomian dan Pembangunan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, dengan sub kegiatan :

➤ Fasilitasi Kebijakan Ekonomi Makro dengan output Data Perekonomian, Laporan Evaluasi, Rumusan dan rekomendasi kebijakan ekonomi makro.

➤ Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro dengan output Data Perekonomian, Laporan Evaluasi,



Laporan Monitoring, Rumusan dan rekomendasi kebijakan ekonomi mikro.

- (2) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam, dengan sub kegiatan :
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan output Laporan sinkronisasi kebijakan, Rekomendasi kebijakan pengelolaan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lindungan Hidup dengan output Laporan sinkronisasi kebijakan, Rekomendasi kebijakan pengelolaan pertambangan dan lingkungan hidup.
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dengan output Laporan sinkronisasi kebijakan, Rekomendasi kebijakan pengelolaan energi dan air.
- (3) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, dengan sub kegiatan :
- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dengan output Laporan monitoring dan Evaluasi BUMD, Rumusan kebijakan evaluasi BUMD PT. ARP, Rumusan kebijakan evaluasi kinerja keuangan BUMD dan Perseroan lainnya.
  - a) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dengan output Laporan pembinaan, organisasi, manajemen dan asset BUMD Kab/kota, Rumusan kebijakan pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi.
  - b) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD dengan output Rumusan Kebijakan Pendirian BUMD, Terpilihnya Komisaris/Direksi BUMD.
  - c) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan output Laporan Evaluasi, Rumusan kebijakan pengelolaan BLUD.
  - d) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD dengan output Adanya Ranpergub

tentang BLUD, Adanya SK Gubernur tentang BLUD, Laporan Evaluasi.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I dan II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, dengan indikator kinerja :
  - 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi (Target Kinerja : 71) (Realisasi Kinerja : 70,77).
- d. Sasaran IV : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :
  - 1) Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Target Kinerja : 80) (Realisasi Kinerja : 87,20).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA yang disusun.
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja.
  - 4) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mendapatkan honor.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output Jumlah Laporan Keuangan.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan output Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran yang Disiapkan.
  - 5) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah.
- 6) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan output Jumlah Bimtek yang dilaksanakan.
- 7) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output tersedianya Rak Besi dan Alat Penghancur Kertas.
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan output Tersedianya AC Split dan Kulkas.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output Jumlah Kertas HVS dan Kertas Fax, Jumlah tinta printer, serta makanan dan minuman rapat yang disediakan.
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan output tersedianya Jumlah Barang Cetakan Amplop, Blanko SPPD, Kop surat, kuitansi, Map OPD, Penggandaan Dokumen.
  - Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi.
- 8) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output persentase ketersediaan laptop, PC Unit, Printer dan Router.
- 9) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output jumlah surat masuk dan surat keluar dalam 1 tahun.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan.
- 10) Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output jumlah asuransi kendaraan dinas operasional roda empat, jumlah kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat yang dipelihara, jumlah pajak kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya dengan output peralatan gedung kantor yang dipelihara dan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III dan IV.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				<b>712.108.071,00</b>	<b>685.347.589,00</b>	<b>96,24</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>				<b>15.301.750,00</b>	<b>14.942.900,00</b>	<b>97,65</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100	12.898.500,00	12.630.000,00	97,92
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100	2.403.250,00	2.312.900,00	96,24
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>77.713.400,00</b>	<b>70.715.500,00</b>	<b>91</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Orang	7 Orang	100	71.515.000,00	64.732.500,00	90,52
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3.839.500,00	3.651.000,00	95,09
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	100	2.358.900,00	2.332.000,00	98,86
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>2.817.700,00</b>	<b>2.737.000,00</b>	<b>97,14</b>
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	2.817.700,00	2.737.000,00	97,14
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>17.795.000,00</b>	<b>14.315.000,00</b>	<b>80,44</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Kali	12 Kali	100	17.795.000,00	14.315.000,00	80,44
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>430.097.580,00</b>	<b>425.335.366,00</b>	<b>98,89</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit	2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit	100 100 100 100 100	3.834.600,00	3.742.000,00	97,59
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Unit 1 Unit	2 Unit 1 Unit	100 100	14.677.750,00	14.541.000,00	99,07
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28 Rim 4 Unit 80 Orang 240 Orang	28 Rim 4 Unit 80 Orang 240 Orang	100 100 100 100	17.545.800,00	17.047.000,00	97,16
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18 Kotak 35 Buah 18 Rim 30 Buah 1435 Buah 3923 Lembar	18 Kotak 35 Buah 18 Rim 30 Buah 1435 Buah 3923 Lembar	100 100 100 100 100 100	17.889.750,00	17.875.000,00	99,92
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Dokumen  75 Dokumen	50 Dokumen  75 Dokumen	100  100	376.149.680,00	372.130.366,00	98,93
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100</b>	<b>6.256.301,00</b>	<b>5.841.318,00</b>	<b>93,37</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Surat	1500 Surat	100	5.311.301,00	5.208.000,00	98,06
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Rekening	1 Rekening	100	945.000	633.318,00	67,02
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100</b>	<b>63.520.000,00</b>	<b>60.360.505,00</b>	<b>95,03</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit 4 Unit 4 Unit	2 Unit 4 Unit 4 Unit	100 100 100	53.450.000,00	50.340.505,00	94,18
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Jenis 9 Unit 8 Unit 6 Unit	4 Jenis 9 Unit 8 Unit 6 Unit	100 100 100 100	10.070.000,00	10.020.000,00	99,5
<b>8</b>	<b>Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>100</b>	<b>98.606.340,00</b>	<b>91.100.000,00</b>	<b>92,39</b>
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	6 Unit 1 Unit 5 Unit 1 Unit	6 Unit 1 Unit 5 Unit 1 Unit	100 100 100 100	98.606.340,00	91.100.000,00	92,39

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>			<b>100</b>	<b>435.627.299,00</b>	<b>427.876.248,00</b>	<b>98,22</b>
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 10 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 10 Dokumen	100 100 100 100	246.165.599,00	240.520.747,00	97,71
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 10 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 10 Dokumen	100 100 100 100	189.461.700,00	187.355.501,00	98,89
<b>10</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>			<b>100</b>	<b>366.738.651,00</b>	<b>364.918.818,00</b>	<b>99,5</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen  1 Dokumen	1 Dokumen  1 Dokumen	100  100	173.829.563,00	173.682.817,00	99,92
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen  1 Dokumen	1 Dokumen  1 Dokumen	100  100	90.130.271,00	89.974.762,00	99,83
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen  1 Dokumen	1 Dokumen  1 Dokumen	100  100	102.778.817,00	101.261.239,00	98,52
<b>11</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>			<b>100</b>	<b>1.299.654.454,00</b>	<b>1.250.221.723,00</b>	<b>96,2</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 100 100	448.908.434,00	446.206.674,00	99,4
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 100 100	108.007948,00	106.3108.335,00	98,44
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen 2 BUMD	1 Dokumen 2 BUMD	100 100	389.224.697,00	362.881.805,00	93,23
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Umum Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 3 Dokumen	100 300	50.463.418,00	47.873.800,00	94,87
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 7 Dokumen 1 Dokumen	100 700 100	303.049.957,00	286.941.109,00	94,68

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tidak ada permasalahan	-

##### 3.1.5.1.6. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa

Urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.378.627.019,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.316.868.167,00 atau 98,17%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	81%	Sesuai hasil kuisisioner	
III	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik	85%	98,17%	

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Target Kinerja : B) (Realisasi Kinerja : B).

b. Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (Target Kinerja : 81%) (Realisasi Kinerja : Sesuai hasil kuisisioner).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output Penyusunan Dokumen Renja Awal, Penyusunan Dokumen Renja Perubahan, Dokumen Renstra, Rapat Koordinasi Perencanaan dengan UKPBJ Kab/Kota.
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan output Penyusunan Dokumen RKA.
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan output Penyusunan Dokumen RKA Perubahan Tahun 2022.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, dengan output Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Biro, Terlaksananya Penyusunan Laporan Fisik Pelaksanaan Sub Kegiatan Biro , Terlaksananya Laporan Keuangan Biro.
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Biro, Terlaksannaya Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Biro (Laporan Tahunan), Terlaksannaya Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Biro (LKPD,LKPJ).
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output Terlaksannya Administrasi Pengelolaan Keuangan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan.
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian-Verifikasi Keuangan SKPD, dengan output Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan output Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun.
  - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan output Terkelolanya dan Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD, dengan output



Tersedianya Laporan Keuangan  
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

- (3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output Tersusunya Dokumen Usulan Perencanaan Kebutuhan BMD, Tersusunya Dokumen Usulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output terlaksananya premi asuransi BMD OPD.
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output Tersedianya Laporan BMD (Semesteran dan Tahunan).
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD, dengan output Tersedianya Laporan BMD.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pendataan an Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan output Terdatanya dan terkelolanya Administrasi Kepegawaian.
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output ASN yang telah mengikuti Bimtek.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan output Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output Tersedianya Logistik Kantor.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah.

- Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD, dengan output Tertatanya arsip dinamas.
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Mebel, dengan output Meja dan Kursi Rapat, Sofa, Woekstation.
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, dengan output Laptop, Pc Unit, Printer, Router, Scanner.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output Terpeliharanya Ac split, Terpeliharanya Aalt Kantor lainnya, terpeliharanya AC dan Mesin Tik.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output Terpenuhinya Honorarium Non ASN.
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan output Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan.
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4.
  - Pemeliharaan Mebel, dengan output Terpeliharanya Mebel.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output Terpeliharanya Laptop, PC,Printer, Scanner.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I dan II.

- c. Sasaran III : Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, dengan indikator kinerja yaitu :
- 1) Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik (Target Kinerja : 85%) (Realisasi Kinerja : 98,17%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dicapai melalui pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan sub kegiatan :
    - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan output Pelaksanaan E-Katalog Lokal, Pelaksanaan E-Market Place lokal, Pembahasan Dokumen RUP, Pembahasan Finaliasi Dokumen RUP, Penyusunan Draf RUP, Penyusunan RUP Final.
    - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan output Pelaksanaan Proses PBJ Melalui Kelompok Kerja.
    - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan output Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PBJ Kab/Kota.
  - (2) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dengan sub kegiatan :
    - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dengan output Fasilitasi Pemanfaatan Aplikasi SPSE, Pembinaan Standarisasi SPSE, Pemeliharaan Server dan Jaringan Aplikasi SPSE, Tersedianya Colocation Server dan Jaringan Aplikasi SPSE.
    - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan output Fasilitasi Pemanfaatan Aplikasi Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa, Pengembangan Aplikasi Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa.
    - Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan output Laporan IKM terhadap pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Laporan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
  - (2) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan sub kegiatan :
    - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, dengan output Bimtek PBJ, Pelaksanaan Sidang Kode Etik, Pelatihan Kantor, Pengiriman Personil UKPBJ, Penilaian Angka Kredit, Sertifikasi Kopetensi KPA/PPK.

- Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan output Pembinaan Tingkat Kematangan UKPBJ, Rapat Koordinasi Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, dengan output Pendampingan dan Bantuan Hukum terkait PBJ, Pendampingan Paket Strategis, Penyediaan Klinik Pengadaan, Penyelesaian Sangketa Kontrak.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Sub Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			100	1,254,650,754	1,224,961,888	97.63
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			100	48,188,900	46,083,223	95.63
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100	6,048,000	5,731,423	94.77
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2.074.800	1.949.200	94.98
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	11.516.695	9.328.700	89.6
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100	15,500,000	15,236,000	98.3
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	9,863,700	9,773,700	99.09
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			100	261,980,650	256,432,795	97.88
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	100	223,503,90	219,953,900	98.41
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian-Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100	5,960,500	5,441,932	91.3
	Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	5,930,350	5,380,542	90.73

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3,167,400	2,798,600	88.36
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Tahun	1 Tahun	100	4,028,700	4,025,200	99.91
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	100	19,389,800	18,832,621	97.13
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>			<b>100</b>	<b>28,531,750</b>	<b>26,625,361</b>	<b>93.32</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	5,965,950	5,842,430	97.93
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Unit	3 Unit	100	16,500,000	15,548,425	94.23
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	4,500,00	4,132,706	91.84
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100	1,565,800	1,101,800	70.37
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>100</b>	<b>4,188,800</b>	<b>3,948,800</b>	<b>94.27</b>
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Tahun	1 Tahun	100	2,988,800	2,988,800	100
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	23 Orang	100	1,200,000	960,000	80
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>100</b>	<b>526,442,901</b>	<b>523,478,425</b>	<b>99.44</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	10 Unit	100	42,311,500	42,200,000	99.74
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21 Unit	21 Unit	100	22,044,000	21,875,000	99.23
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	29,905,100	29,831,500	99.75
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100	14,333,000	14,327,000	99.96

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100	413,441,201	410,839,025	99.37
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100	4,408,100	4,405,900	99.95
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100</b>	<b>113,039,00</b>	<b>111,591,840</b>	<b>98.72</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	83 Unit	83 Unit	100	24,339,000	24,339,000	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65 Unit	65 Unit	100	88,700,000	87,252,840	98.37
<b>7</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>153,913,753</b>	<b>144,818,944</b>	<b>94.09</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100	1,984,000	1,966,000	99.09
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	20 Unit	100	9,550,000	9,150,000	95.81
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	142,379,753	133,702,944	93.91
<b>8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>118,365,000</b>	<b>111,982,500</b>	<b>94.61</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100	42,240,000	40,240,000	95.27
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit 3 Unit	1 Unit 3 Unit	100	59,725,000	58,562,500	98.05
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	6 Unit	6 Unit	100	3,500,000	3,500,000	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47 Unit	47 Unit	100	12,900,000	9,680,000	75.04
<b>II</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>				<b>2,123,976,265</b>	<b>2,091,906,279</b>	<b>98.49</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>			<b>100</b>	<b>774,848,020</b>	<b>765,015,148</b>	<b>98.73</b>
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Strategi Barang	7 Komoditi 3 Kategori	7 Komoditi 3 Kategori	100	81,366,300	79,797,785	98.07

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
	dan Jasa	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen				
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan 550 Paket	1 Laporan 550 Paket	100	526,641,500	519,332,366	98.61
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	100	166,840,220	165,884,997	99.43
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>			<b>100</b>	<b>635,019,540</b>	<b>632,623,281</b>	<b>99.62</b>
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	19 Kab/Kota 51 OPD 5 Kab/Kota 1 Tahun 1 Unit 1 Tahun	19 Kab/Kota 51 OPD 5 Kab/Kota 1 Tahun 1 Unit 1 Tahun	100	365,940,000	365,147,405	99.78
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	19 Kab/Kota 51 OPD 1 Laporan 1 Unit 1 Aplikasi	19 Kab/Kota 51 OPD 1 Laporan 1 Unit 1 Aplikasi	100	191,602,540	191,023,769	99.7
	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 12 Dokumen	1 Dokumen 12 Dokumen	100	77,477,000	76,452,107	98.68
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>			<b>100</b>	<b>714,108,705</b>	<b>694,267,850</b>	<b>97.22</b>
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	3 Kali 1 Kali 25 Orang	3 Kali 1 Kali 25 Orang	100	135,272,540	131,320,540	97.08
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	15 Kab/Kota 2 Kali	15 Kab/Kota 2 Kali	100	202,031,350	197,936,492	97.97
	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Kali 1 Tahun 12 Paket 1 Tahun 1 Tahun	4 Kali 1 Tahun 12 Paket 1 Tahun 1 Tahun	100	376,804,815	365,010,818	96.87

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
1	<b>PROGRAM : KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b> <b>KEGIATAN : PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	Adanya perubahan regulasi dari perpres 16 tahun 2018 menjadi perpres 12 tahun 2021 Menunggu aturan turunan terkait perubahan regulasi tersebut dan juknisnya Tahun 2021 merupakan tahun pergantian kepala daerah yang mengakibatkan perubahan arah kebijakan dan rencana pembangunan.	Diskusi dan FGD terkait regulasi - regulasi PBJ yang dinamis.  Percepatan pelaksanaan kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
		Penerapan aplikasi SIPD pertama kali dimana OPD belum menguasai aplikasi tersebut Terlambatnya penginputan RUP akibat SIPD.	Strategi penugasan personil pengelola PBJ melalui pengelompokan sesuai jenis pengadaan barang dan jasa sehingga durasi pelaksanaan pemilihan dapat dioptimalkan.
II	<b>PROGRAM :</b> <b>KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b> <b>KEGIATAN :</b> <b>PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.</b>	Belum adanya aplikasi dan fitur-fitur pendukung kinerja PBJ Belum optimalnya backup server	Penambahan anggaran dalam rangka pembuatan aplikasi, fitur-fitur dan tools pendukung percepatan dan peningkatan kinerja PBJ
III	<b>PROGRAM :</b> <b>KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b> <b>KEGIATAN :</b> <b>PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	keterbatasan personil pada pembinaan dan advokasi keterbatasan anggaran untuk pembinaan SDM belum samanya persepsi antara tim pemeriksa dan APH dengan pelaku pengadaan. Belum ada forum komunikasi yang efektif antara pelaku pengadaan, tim pemeriksa dan APH	Optimalisasi SDM pada UKPBJ melalui penugasan lintas bidang Optimalisasi anggaran focus pada peningkatan kompetensi SDM PBJ. Mengaktifkan forum clearing house

### 3.1.5.1.7. Biro Umum

Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh Biro Umum, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.86,801,558,683,00 pada Anggaran Murni dan menjadi Rp.108.021.880.615,00 pada anggaran perubahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.103.782.205.225,00 atau 96,08%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kepuasan Stakeholders Dibidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH IKM Pelayanan Pimpinan IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Sangat Baik (88,50) Sangat Baik (88,50) Sangat Baik (88,50)	Sangat Baik (89,38) Sangat Baik (89,18) Sangat Baik (89,02)	100,99 100,77 100,59

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

- a. Sasaran I : Meningkatnya Kepuasan Stakeholders Dibidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda, dengan indikator kinerja yaitu :



- 1) IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH (Target Kinerja : Sangat Baik 88,50) (Realisasi Kinerja : Sangat Baik 89,38).
- 2) IKM Pelayanan Pimpinan (Target Kinerja : Sangat Baik 88,50) (Realisasi Kinerja : Sangat Baik 89,18).
- 3) IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda (Target Kinerja : Sangat Baik 88,50) (Realisasi Kinerja : 89,02).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan outputnya adalah Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah 100%.
  - (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan outputnya Persentase Tertib Administrasi Keuangan 100%.
  - (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan outputnya adalah Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 100%.
  - (4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan outputnya adalah Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah 100%.
  - (5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan outputnya adalah Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100%.
  - (6) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan outputnya adalah Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%.
  - (7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan outputnya adalah Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan 100%.
  - (8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan outputnya Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%.
  - (9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan outputnya Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik 100%.

- (10) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan outputnya Persentase Tertib Administrasi Keuangan KDH/WKDH 100%.
- (11) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan outputnya Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda 100%.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

### 3. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	100%	100%	100	108.021.880.615	103.782.205.225	96,08
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	383.709.782	376.168.284	98,03
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	44.534.819.322	41.741.591.759	93,73
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100	559.759.929	553.626.836	98,90
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	89.592.000	87.821.850	98,02
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100	673.410.000	655.435.342	97,33
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	8.208.330.399	8.165.431.451	99,48
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	3.380.770.962	3.355.616.519	99,26
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	14.645.663.553	13.873.313.781	94,73
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	9.975.229.945	9.653.978.008	96,78
10	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100	5.071.049.601	4.988.235.848	98,37
11	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%	100	20.499.545.122	20.330.985.547	98,18

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Secara umum tidak ada permasalahan terhadap pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah pada biro umum karena secara fisik dapat relaksana 100% dan secara keuangan terlaksana 96,08%	Agar pelaksanaan program lebih tertib terhadap target yang telah ditetapkan pada anggaran kas.

##### 3.1.5.1.8. Biro Organisasi

Urusan Penunjang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.810.969.830,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.703.152.397,00 atau 97,17%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	<b>Penataan Organisasi</b>	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100
			Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A	8	8	100
III	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda	12.5	12.09	96,72
IV	Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan		Hasil Penilaian Mandiri Area Manajemen Perubahan	1,78	1.97	110.67
V	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang lolos saringan kompetisi secara nasional	7	12	171.43
VI	Penataan Tatalaksana yang efektif		Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan	12	42	350
VII	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi		Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80.01)	A (80,68)	100.84
VIII	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80.00 (Baik)	80.39 (Baik)	100.49	

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

- a. Sasaran I : Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, dengan indikator Kinerja :
  - 1) Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Target Kinerja : 100) (Realisasi Kinerja : 100).
  - 2) Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran (Target Kinerja : 100) (Realisasi Kinerja : 100).
- b. Sasaran II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan indikator Kinerja :
  - 1) Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A (Target Kinerja : 8) (Realisasi Kinerja : 8).
- c. Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda, dengan indikator Kinerja :
  - 1) Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda (Target Kinerja : 12,5) (Realisasi Kinerja : 12,09).
- d. Sasaran IV : Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan dengan Indikator Kinerja :
  - 1) Hasil Penilaian Mandiri Area Manajemen Perubahan (Target Kinerja : 1,78) (Realisasi Kinerja : 1,97).
- e. Sasaran V : Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas dengan Indikator Kinerja :
  - 1) Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang lolos saringan kompetisi secara nasional (Target Kinerja : 7) (Realisasi Kinerja : 12).
- f. Sasaran VI : Penataan Tatalaksana yang efektif dengan indikator Kinerja :
  - 1) Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan (Target Kinerja : 12) (Realisasi Kinerja : 42).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Perencanaan, Penggararan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output sub

kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun sebanyak 10 Dokumen.

- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mendapatkan honor sebanyak 6 Orang.
  - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan Output sub kegiatan Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD yang disusun sebanyak 1 Dokumen.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan Output sub kegiatan Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 1 Dokumen.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan Output sub kegiatan Jumlah Bimtek yang dilaksanakan sebanyak 1 kali.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Output sub kegiatan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebanyak 1 Unit.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Output sub kegiatan Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 3 bahan komponen.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Output sub jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan sebanyak 7 cetakan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Output sub kegiatan Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi sebanyak 100 Dokumen.
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 5 unit.

- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Output sub kegiatan Jumlah surat surat masuk dan surat surat keluar dalam 1 tahun sebanyak 12 Bulan.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik dengan Output sub kegiatan Jumlah rekening tagihan telepon/fax tabf dibayarkan sebanyak 12 Bulan.
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Output sub kegiatan jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara sebanyak 1 unit.
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Output sub kegiatan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara sebanyak 3 unit.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Output sub kegiatan jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 22 unit.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I, II, III, IV, V, dan VI.

- g. Sasaran VII : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja :
- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Target Kinerja : 80,01(A)) (Realisasi Kinerja : 80,68(a)).
- h. Sasaran VIII : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, dengan Indikator Kinerja :
- 1) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (Target Kinerja : 80,00 (B)) (Realisasi Kinerja : 80,39(B)).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penataan Organisasi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi dengan Output sub kegiatan jumlah produk Hukum Daerah terkait Kelembagaan Perangkat Daerah yang disusun sebanyak 1 Ranperda/Ranpergub.
  - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota dengan Output sub kegiatan persentase jumlah rekomendasi penataan kelembagaan yang dikeluarkan sebesar 100%.
  - Penataan Analisis Jabatan dengan Output sub kegiatan persentase perangkat daerah yang telah dibina Penataan Jabatan sebesar 80% dan persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan sebesar 80%.
- (2) Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan sub kegiatan :
- Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Output sub kegiatan jumlah peserta sosialisasi Road Map RB berjumlah 104 orang dan Pergub Road Map RB Pemprov Sumbar 2022-2026 sebanyak 1 dokumen.
  - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan Output sub kegiatan jumlah dokumen analisa akuntabilitas kinerja yang disusun sebanyak 1 dokumen, jumlah dokumen perjanjian kinerja pemerintah yang disusun sebanyak 1 dokumen, jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching/asistensi Dokumen SAKIP-nya sebanyak 2 Kabupaten/Kota, jumlah monev pencapaian target perjanjian kinerja OPD yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dan jumlah peserta penganangan komitmen bersama “Pemprov Sumbar Akuntabel” sebanyak 130 orang.
  - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja dengan Output sub kegiatan jumlah peraturan gubernur tentang budaya kerja sebanyak 1 pergub, jumlah peserta launching ASN berakhlak sebanyak 102 peserta.
  - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan dengan Output sub kegiatan jumlah pembinaan dan penyusunan probis sebanyak 4 perangkat daerah, jumlah pembinaan dan penyusunan SOP sebanyak 4 perangkat daerah, dan jumlah pembinaan SOP dan probis Kabupaten/Kota sebanyak 6 Kabupaten/Kota.
  - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik dengan Output sub kegiatan jumlah inovasi layanan publik yang bina

sebanyak 20 inovasi, jumlah UKPP Provinsi yang dimonitoring Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan sebanyak 50 UKPP, jumlah UKPP yang dimonitoring Digitalisasi Pelayanan Publik sebanyak 50 UKPP, jumlah UKPP yang menerapkan SIPP sebanyak 20 UKPP, jumlah UKPP yang menerapkan standar pelayanan sebanyak 20 UKPP, dan jumlah UKPP yang mengikuti kompetisi sebanyak 20 UKPP.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VII dan VIII.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
I	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	100%	100%	100	950,529,912	899,684,421	94.65
1	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	100%	100%	100	11,976,600	11,672,700	97.46
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	100	11,976,600	11,672,700	97.46
2	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	100%	100%	100	117,140,094	112,951,316	96.42
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Orang	6 Orang	100	65,580,000	65,580,000	100.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	51,560,094	47,371,316	91.88
3	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	100%	100%	100	2,239,700	2,178,000	97.25
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2,239,700	2,178,000	97.25
4	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	100%	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kali	-	-	-	-	-
5	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	100%	100%	100	535,168,688	522,670,596	97.66



No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	1 Unit	100	20,154,400	19,828,000	98.38
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Bahan Komponen	3 Bahan Komponen	100	38,668,445	38,394,000	99.29
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Cetak	7 Cetak	100	35,024,923	34,922,500	99.71
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Dokumen	86 Dokumen	86	441,320,920	429,526,096	97.33
6	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>154,773,480</b>	<b>123,499,000</b>	<b>79.79</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	12 Unit	240	154,773,480	123,499,000	79.79
7	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>45,541,350</b>	<b>43,133,309</b>	<b>94.71</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100	45,541,350	43,133,309	94.71
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	-	-
8	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>83,690,000</b>	<b>83,579,500</b>	<b>99.87</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100	39,190,000	39,154,500	99.91
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	2 Unit	100	34,100,000	34,100,000	100.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 Unit	13 Unit	59	10,400,000	10,325,000	99.28
II	<b>PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>2,860,439,918</b>	<b>2,803,467,976</b>	<b>98.01</b>
		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>			
		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>			
1	<b>FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>1,339,460,564</b>	<b>1,300,856,546</b>	<b>97.12</b>
		100%	100%	100			

No	Program / Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	1 Ranperda/Ranpergub	5 Ranperda/Ranpergub	500	380,767,114	375,820,305	98.70
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	100%	100%	100	602,650,000	582,715,021	96.69
	Penataan Analisis Jabatan	80%	100%	125	356,043,450	342,321,220	96.15
		80%	100%	125			
<b>2</b>	<b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>						
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	104 Orang	104 Orang	100	305,755,114	299,318,940	97.90
		1 Dokumen/80 expl	1 Dokumen	100			
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100	339,276,047	337,696,328	99.53
		1 Dokumen	1 Dokumen	100			
		2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	100			
		2 Kali	2 Kali	100			
		130 Orang	130 Orang	100			
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Pergub	1 Pergub	100	119,095,650	117,600,833	98.74
		102 Peserta	102 Peserta	100			
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	4 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	950	234,138,134	230,111,986	98.28
		4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100			
		4 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	450			
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	20 Inovasi	20 Inovasi	100	522,714,523	517,883,343	99.08
		50 UKPP	59 UKPP	118			
		50 UKPP	52 UKPP	104			
		20 UKPP	20 UKPP	100			
		20 UKPP	20 UKPP	100			
		20 UKPP	27 UKPP	135			

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI</b>	Tidak ada permasalahan	-
II	<b>PENATAAN ORGANISASI</b>	Tidak ada permasalahan	-

### 3.1.5.1.9. Biro Administrasi Pimpinan

Urusan Penunjang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan, pada tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.13.529.320.875,00 dan realisasi Rp.13.147.382.339,00 (97,18%) dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan	<b>Fasilitasi Keprotokolan</b>	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	78,85 (nilai)	80,57	102,18
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian	78,85 (nilai)	80,97	102,69
3	Optimalisasi Materi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	<b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	Persentase Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	80 %	121,5%	151,875
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	<b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Nilai Evaluasi SAKIP	71 BB)	72,15 (B)	101,62

#### 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan, Sub Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan (Target Kinerja : 78,85) (Realisasi Kinerja : 80,57).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Fasilitasi Keprotokolan, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara.
  - (2) Fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah.
  - (3) Pengelolaan hubungan keprotokolan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian (Target Kinerja : 78,85) (Realisasi Kinerja : 80,97).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dicapai dengan pelaksanaan :

(1) Kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.

(2) Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

c. Sasaran III : Optimalisasi Materi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Persentase Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Target Kinerja : 80) (Realisasi Kinerja : 121,5).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, dicapai dengan pelaksanaan :

(1) Kegiatan Penyiapan materi pimpinan.

(2) Kegiatan Fasilitasi komunikasi pimpinan.

(3) Kegiatan Pengelolaan dokumentasi pimpinan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d. Sasaran IV : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Nilai Evaluasi SAKIP (Target Kinerja : 71) (Realisasi Kinerja : 72,15).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dicapai dengan pelaksanaan :

- (1) Kegiatan Penyiapan materi pimpinan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- (2) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- (3) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- (4) Kegiatan Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD.
- (5) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD.
- (6) Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relasasi kinerja SKPD.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	100%	100%	100	13,529,320,875	13,147,382,339	97,18
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (100%)	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (100%)	100	183,367,832	179,325,100	97,80
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (2 dokumen)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (2 dokumen)	100	93,605,432	90,805,300	97,01
	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun (2 dokumen)	Jumlah dokumen RKA yang disusun (2 dokumen)	100	21,373,600	20,689,000	96,80
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun (2 dokumen)	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun (2 dokumen)	100	16,169,100	15,659,100	96,85
	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun (2 dokumen)	Jumlah dokumen DPA yang disusun (2 dokumen)	100	18,538,300	18,538,000	100,00
	Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun (2 dokumen)	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun (2 dokumen)	100	17,912,500	17,864,500	99,73

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relasasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi dan kinerja yang disusun (3 dokumen) Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (3 laporan)	Jumlah dokumen evaluasi dan kinerja yang disusun (3 dokumen) Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (3 laporan)	100	15,768,900	15,768,900	100,00
<b>2</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi keuangan (100%)</b>	<b>Persentase tertib administrasi keuangan (100%)</b>	<b>100</b>	<b>121,486,550</b>	<b>119,470,550</b>	<b>98,34</b>
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor (6 orang)	Jumlah ASN yang mendapatkan honor (6 orang)	100	100,727,000	100,427,000	99,70
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran yang disusun (3 laporan)	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran yang disusun (3 laporan)	100	20,759,550	19,043,550	91,73
<b>3</b>	<b>Administrasi barang milik daerah pada tingkat daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi barang milik daerah 100%</b>	<b>Persentase tertib administrasi barang milik daerah 100%</b>	<b>100</b>	<b>26,000,000</b>	<b>25,936,640</b>	<b>99,76</b>
	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan (5 unit)	Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan (5 unit)	100	26,000,000	25,936,640	99,76
<b>4</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah (100%)</b>	<b>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah (100%)</b>	<b>100</b>	<b>225,246,157</b>	<b>215,936,856</b>	<b>95,87</b>
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah ASN Lingkup Sekretariat Daerah yang dilayani (400 ASN)	Jumlah ASN Lingkup Sekretariat Daerah yang dilayani (400 ASN)	100	204,123,057	196,423,456	96,23
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	Jumlah Bimtek yang diikuti (1 kali)	Jumlah Bimtek yang diikuti (1 kali)	100	21,123,100	19,513,400	92,38

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	undangan						
<b>5</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah (100%)</b>	<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah (100%)</b>	<b>100</b>	<b>1,498,056,144</b>	<b>1,465,295,511</b>	<b>97,81</b>
	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan (38 unit)	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan (38 unit)	100	430,708,340	425,997,450	98,91
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan (3 jenis) Jumlah Rak Piring yang disediakan (1 unit)	Jumlah logistik kantor yang disediakan (3 jenis) Jumlah Rak Piring yang disediakan (1 unit)	100	72,412,178	70,942,950	97,97
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (5 jenis)	Jumlah barang cetakan yang disediakan (5 jenis)	100	36,778,750	36,450,000	99,11
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (17 jenis) Jumlah bahan bacaan yang disediakan untuk lingkup sekretariat daerah (17 jenis)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (17 jenis) Jumlah bahan bacaan yang disediakan untuk lingkup sekretariat daerah (17 jenis)	100	238,500,000	238,500,000	100,00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi (40 laporan) Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (50 laporan)	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi (40 laporan) Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (50 laporan)	100	719,656,876	693,405,111	96,35
<b>6</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan (100%)</b>	<b>Persentase Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan (100%)</b>	<b>100</b>	<b>128,454,000</b>	<b>126,482,100</b>	<b>98,98</b>
	Pengadaan	Jumlah	Jumlah	100	32,219,000	32,219,000	100,00

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas operasional atau lapangan (1 unit)	kendaraan dinas operasional atau lapangan (1 unit)				
	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan (26 unit)	Jumlah mebel yang diadakan (26 unit)	100	96,235,000	94,263,100	97,95
<b>7</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (100%)</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (100%)</b>	<b>100</b>	<b>1,301,515,941</b>	<b>1,259,483,559</b>	<b>96,77</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar (400 surat)	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar (400 surat)	100	10,850,000	10,837,450	99,88
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (10 mbps) Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan (1 rekening telepon)	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (10 mbps) Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan (1 rekening telepon)	100	93,579,000	85,380,058	91,24
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia (35 orang)	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia (35 orang)	100	1,197,086,941	1,163,265,251	97,17
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang usaha pemerintah daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik (100%)</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik (100%)</b>	<b>100</b>	<b>320,370,000</b>	<b>313,933,000</b>	<b>97,99</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (5 unit)	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (5 unit)	100	248,650,000	245,708,000	98,82
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (3 jenis)	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (3 jenis)	100	26,720,000	26,720,000	100,00
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Tiang Baliho yang dipelihara (2 unit)	Jumlah Tiang Baliho yang dipelihara (2 unit)	100	45,000,000	41,505,000	92,23
<b>9</b>	<b>Fasilitasi materi dan komunikasi</b>	<b>Terdokumentasikan</b>	<b>Terdokumentasikan</b>	<b>100</b>	<b>2,549,794,330</b>	<b>2,523,509,263</b>	<b>98,97</b>



No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>pimpinan</b>	<b>kegiatan pimpinan (80%)</b>	<b>kegiatan pimpinan (80%)</b>				
	Penyiapan materi pimpinan	Buku himpunan pidato (150 buku) Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyiapan Materi Pimpinan Lingkup OPD Pemprov dan Kab/Kota (1 kali) Terlaksananya Kegiatan Rakor Materi Pimpinan Lingkup OPD Pemprov dan Kab/Kota (1 kali) Terlaksananya survey data monitoring issue/berita melalui intelegency media analytics (IMA) (12 bulan)	Buku himpunan pidato (150 buku) Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyiapan Materi Pimpinan Lingkup OPD Pemprov dan Kab/Kota (1 kali) Terlaksananya Kegiatan Rakor Materi Pimpinan Lingkup OPD Pemprov dan Kab/Kota (1 kali) Terlaksananya survey data monitoring issue/berita melalui intelegency media analytics (IMA) (12 bulan)	80	402,415,860	401,969,442	99.89
	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Publikasi kegiatan pimpinan melalui media cetak (38 kali) Publikasi kegiatan pimpinan media luar ruang (2 kegiatan) Publikasi kegiatan pimpinan melalui media social (40 kali) Terlaksananya workshop pengelolaan media social (1 kali)	Publikasi kegiatan pimpinan melalui media cetak (38 kali) Publikasi kegiatan pimpinan media luar ruang (2 kegiatan) Publikasi kegiatan pimpinan melalui media social (40 kali) Terlaksananya workshop pengelolaan media social (1 kali)	80	968,811,780	961,470,665	99,24
	Pengelolaan dokumentasi pimpinan	Film documenter yang dibuat (2 paket) Jumlah kegiatan pimpinan yang terdokument	Film documenter yang dibuat (2 paket) Jumlah kegiatan pimpinan yang terdokument	80	1,178,566,690	1,160,069,156	98,43

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		asikan (1500 kegiatan)	asikan (1500 kegiatan)				
10	Fasilitasi keprotokolan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan keprotokolan (78,85 nilai)	Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan keprotokolan (78,85 nilai)	100	7,175,029,921	6,918,009,760	96,42
	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	Acara hari-hari Besar Nasional yang difasilitasi (8 kali)	Acara hari-hari Besar Nasional yang difasilitasi (8 kali)	100	1,086,429,900	1,048,932,450	96,55
	Fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi (840 orang)	Jumlah Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi (840 orang)	100	5,242,861,650	5,031,364,885	95,97
	Pengelolaan hubungan keprotokolan	Kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi (12 bulan)	Kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi (12 bulan)	100	845,738,371	837,712,425	99,05

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tidak ada permasalahan	-

##### 3.1.5.2. Sekretariat DPRD

Fungsi pendukung Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.202.472.969.248,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.190.014.829.229,00 atau 93,85%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A (80)	BB (75,1)	93,875
II	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	91,05	101,17

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Indikator kinerja :

- 1) Nilai Nilai Akuntabilitas Kinerja (Target 80% (A)) (Realisasi Kinerja 75,1% (BB)) dengan capaian kinerja 93,875%.

Pencapaian target kinerja dari Indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output 1 Dokumen DPA SKPD, 2 Dokumen Perubahan DPA, 2 Dokumen Perubahan RKA, 3 Dokumen Renstra dan Renja, 1 Dokumen RKA SKPD, 1 Dokumen RKT dan 1 Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTP)-SPIP yang disusun.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output 4 Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan dan 4 Dokumen Evaluasi Perangkat Dearah (LAKIP, LPPD, LKPj, Laporan Kinerja Tahunan).

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output 87 orang ASN dan Non ASN yang telah dibayarkan gaji dan Tunjangannya, serta Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS yang dibayarkan.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output 14 orang ASN yang mendapatkan honor.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan output 1 Laporan Aset Akhir Tahun dan 1 Laporan Keuangan Akhir Tahun.

(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan output 2 Laporan Aset Semesteran dan 14 Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran.

(4) Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output 4 Dokumen RKBMD dan RKPDMMD
  - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output 2 Dokumen Pengamanan Aset (Asuransi), 6 unit Jasa Jaminan Gedung Kantor, 42 unit Jasa Jaminan Kendaraan Roda Empat dan tersedianya 12 Bulan Jasa Jaminan BMD.
  - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output 12 Dokumen Hasil Pementauan dan Penertiban.
- (5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan output 135 Stel Pakaian Dinas beserta Perlengkapan yang telah disediakan.
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan output 600 Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola.
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan output 0 kali Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti. Hal disebabkan karena ketersediaan ASN yang kurang memadai untuk membantu memfasilitasi tugas-tugas Kedewanan ditambah dengan adanya kegiatan Sosialisasi Perda yang pelaksanaannya harus difasilitasi oleh seluruh ASN Sekretariat DPRD Prov Sumbar, sehingga tidak ada ASN yang dapat ditugaskan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output 0 kali pelaksanaan / pengiriman ASN untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan ASN untuk memfasilitasi tugas-tugas Kedewanan ditambah dengan adanya kegiatan Sosialisasi Perda yang pelaksanaannya harus difasilitasi oleh seluruh ASN di Sekretariat DPRD Prov Sumbar, sehingga tidak ada ASN yang dapat ditugaskan untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan, dengan output 1 kali pengiriman peserta Bimtek. Hal ini tidak sesuai dengan target 8 kali

pengiriman kerana kurangnya ketersediaan ASN untuk memfasilitasi tugas-tugas Kedewanan ditambah dengan adanya kegiatan Sosialisasi Perda yang pelaksanaannya harus difasilitasi oleh seluruh ASN di Sekretariat DPRD Prov Sumbar, sehingga tidak ada ASN yang dapat ditugaskan untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

(6) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output 120 unit.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output 2105 meter Baliho, 1 paket CCTV, 7 unit Handy Talkie, 10 unit Lemari Besi, 65 unit Monitor Display, 50 unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor lainnya, 10 unit Projector, 2681 meter Spanduk, 3 unit Video Tron dan 5 unit Video Wall.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan output 3 unit AC Split, 13 unit Dispenser, 8 unit Televisi yang disediakan di Rumah Dinas, 6 unit Kulkas, 50 unit Peralatan Rumah Tangga, 1 unit Smart Board dan 2 unit Vacum Cleaner.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output 400 unit Bahan Logistik Kantor, 25 tabung Isi Ulang Tabung Gas, 80 tabung Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran, 1 Tahun Makan Minum Jamuan Tamu dan 150 buah Plakat Buah Sakato.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output 114.000 unit Barang Cetak dan 6.000 lembar Penggandaan.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan output Penyediaan 3 jenis Majalah/Bulan dan Penyediaan 21 jenis Surat Kabar/Bulan.
- Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan output 2.400 orang Tamu SKPD yang difasilitasi.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output 540 dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi.

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan output 12 bulan Arsip Produk dan 19 Dokumen Arsip terdokumentasi dengan baik.
- (7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output 2 unit Hiace, 5 unit Kendaraan Roda 2 dan 5 unit Kendaraan Roda 4.
  - Pengadaan Mebel, dengan output 12 unit Kursi Bar, 14 unit Kursi Kerja Ess II, 3 unit Kursi Kerja Ess III, 2 unit Kursi Kerja Ketua DPRD, 5 unit Kursi Kerja Pegawai, 6 unit Kursi Tamu, 3 unit Lemari Pakaian, 8 unit Meja Bar, 1 Ls Meja Kerja Pegawai, 4 unit Meja Makan, 30 unit Meja Rapat, 1 unit Meja Sudut, 1 paket Patung Lambang Garuda, dan 3 Buah Spring Bed.
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output 40 unit Peralatan dan Mesin Baru, 6 unit Laptop, 43 unit PC, 23 unit Printer, 3 unit Scanner dan 2 unit Televisi.
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output 1 dokumen DED Pembangunan Mess, 1 unit Pembangunan Mesjid, 1 unit Pembangunan Rumah Dinas Lanjutan.
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output yang direncanakan yaitu Pengadaan Ekskalator dan Lift. Namun kegiatan ini dibatalkan pada Anggaran Perubahan tahun 2022 karena tidak masuk dalam dokumen perencanaan Rehab Lobby. Pengadaan Ekskalator dan Lift ini direncanakan akan di anggarankan pada tahun berikutnya.
- (8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output 2.750 surat masuk dan surat keluar.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output penyediaan kapasitas internet 50mbps, 14 rekening telepon/fax yang dibayarkan, Tagihan Listrik 976,6 KVA dan 6.042 m<sup>3</sup> Tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan.

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output 700 meter pencucian Karpas dan Gorden, 60 unit Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang terpelihara, 450 bh Karang Bunga dan 122 meter Sewa Taman Bunga.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output tersedianya 100 orang Tenaga Pelayanan Umum Kantor.
- (9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan output 5 unit pemeliharaan Mobil Jabatan.
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output 61 unit Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan 21 unit Kendaraan dinas/operasional Roda 2 dan 36 unit Kendaraan Dinas/operasional Roda 4.
  - Pemeliharaan Mebel, dengan output 45 unit Kursi Tamu.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output 85 unit Pemeliharaan computer PC, 14 unit Pemeliharaan Laptop, 30 unit Pemeliharaan printer, 4 unit Pemeliharaan Scanner.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output 1 unit pemeliharaan Gedung, 1 unit Pemeliharaan Mess, 1 unit Pemeliharaan Rumah Jabatan dan 1 paket Rehab Lobby Utama Gedung Kantor.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output 3 kali Pemeliharaan Genset, 103 unit Pemeliharaan AC Caset, 2 unit Pemeliharaan AC Central Kantor dan 50 unit Pemeliharaan Jaringan Air Kantor, 15 paket Pemeliharaan Jaringan Air Rumah Dinas, 20 paket Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor, 45 paket Pemeliharaan Jaringan Listrik Rumah Dinas, 2 unit Pemeliharaan Lift Kantor, 1 paket Pemeliharaan Pagar, 27.654 meter Pemeliharaan Parkiran Rumah

Dinas, 10 paket Pemeliharaan Pompa Air, dan 3.500 meter Pemeliharaan Taman Rumah Dinas.

(10) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan sub kegiatan :

- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, dengan output 12 bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD, dan 12 bulan Tunjangan ke Tiga Belas dan Tunjangan Hari Raya.
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dengan output 65 stel Pakaian Daerah, 65 stel Pakaian Dinas Harian (PDH), 130 stel Pakaian Sipil Harian (PSH), 2 stel Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk PAW, 65 stel Pakaian Sipil Lengkap (PSL), 65 stel Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pin Lambang Daerah untuk 2 orang PAW.
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, dengan output 65 orang Pimpinan dan Anggota DPRD.

(11) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, dengan sub kegiatan :

- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD, dengan output Penyediaan Administrasi LHKPN DPRD untuk 65 orang dan Penyediaan Administrasi Keanggotaan DPRD sebanyak 65 orang.
- Fasilitasi Fraksi DPRD, dengan output sebanyak 7 Fraksi yang difasilitasi.
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dengan output pelaksanaan 40 kali Rapat Konsultasi dan 48 kali Rapat Koordinasi yang difasilitasi.
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD, dengan output Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga pada Rumah Jabatan Ketua DPRD selama 12 bulan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Indikator kinerja :

1) Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan (Target 90%) (Realisasi Kinerja 91,05%) dengan capaian kinerja 101,17%.

Pencapaian target kinerja dari Indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- a) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dicapai dengan pelaksanaan :
- (1) Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, dengan sub kegiatan :
- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dengan output 1 kali Pembahasan Propemda yang difasilitasi, 17 kali Pembahasan Ranperda di luar Propemda yang difasilitasi, 6 kali Pembahasan Ranperda usul inisiatif DPRD yang di harmonisasi.
  - Pembahasan Rancangan Perda, dengan output 40 kali Pembahasan Keputusan DPRD yang difasilitasi dan 17 kali Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi.
  - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, dengan output sebanyak 6 Kajian terhadap Usul Inisiatif DPRD.
  - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik, dengan output sebanyak 6 dokumen Naskah Akademik Ranperda yang disusun dan 6 kali Seminar Ranperda yang difasilitasi.
- (2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan sub kegiatan :
- Pembahasan KUA dan PPAS, dengan output 1 kali Pembahasan Rancangan KUA PPAS yang difasilitasi.
  - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan output 1 kali Pembahasan Perubahan KUA PPAS yang difasilitasi.
  - Pembahasan APBD, dengan output 1 kali Pembahasan Rancangan APBD yang difasilitasi.
  - Pembahasan Perubahan APBD, dengan output 1 kali Pembahasan Rancangan Perubahan APBD yang difasilitasi.
  - Pembahasan Laporan Semester, dengan output 1 kali Pembahasan Laporan Semester/ dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya yang difasilitasi.
  - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, dengan output 1 kali pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi.

(3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan sub kegiatan :

- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, dengan output 3 dokumen monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum yang disusun, dan 120 kali pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum yang difasilitasi.
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, dengan output 3 dokumen monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang infrastruktur yang disusun, dan 120 kali pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur yang difasilitasi.
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan output 3 dokumen monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat yang disusun, dan 120 kali pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi.
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, dengan output 3 dokumen monitoring dan evaluasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang disusun, dan 120 kali Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang difasilitasi.
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam, dengan output 3 dokumen monitoring dan evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang disusun, dan 120 kali pengawasan urusan pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi.
- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dengan output 2 kali pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang difasilitasi.
- Pengawasan Penggunaan Anggaran, dengan output 12 kali pengawasan penggunaan anggaran yang difasilitasi.

(4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan sub kegiatan :

- Bimbingan Teknis DPRD, dengan output 4 kali bimbingan teknis untuk pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi.
  - Publikasi dan Dokumentasi Dewan, dengan output 432 kali pelaksanaan sosialisasi Ranperda/Perda yang difasilitasi, 452 dokumen pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD yang didokumentasikan, serta 9.192 kali pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD yang dipublikasikan.
  - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, dengan output 21 orang pakar dan ahli yang disediakan untuk DPRD, dan 3 orang pakar dan ahli yang disediakan untuk kegiatan hari jadi Sumatera Barat.
  - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, dengan output 7 orang tenaga ahli yang disediakan untuk fraksi.
- (5) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan sub kegiatan :
- Kunjungan Kerja dalam Daerah, dengan output 390 kali pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah yang difasilitasi.
  - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dengan output 65 dokumen pokok-pokok pikiran yang disusun.
  - Pelaksanaan Reses, dengan output 195 kali pelaksanaan Reses yang difasilitasi.
- (6) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan sub kegiatan :
- Penyusunan Kode Etik DPRD, dengan output 2 kali pembahasan penyusunan Kode Etik DPRD yang difasilitasi.
  - Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan output 3 kali pembahasan pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi.
- (7) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, dengan sub kegiatan :
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, dengan output 48 kali Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD untuk anggota DPRD, dan 48 kali Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD untuk Komisi-Komisi.
  - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, dengan output 1 dokumen Laporan Kinerja DPRD yang disusun.

- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, dengan output 10 kali tugas Badan Musyawarah yang difasilitasi.
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, dengan output 36 kali Tugas Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) yang difasilitasi.

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>				<b>119.296.574.301</b>	<b>112.244.036.317</b>	<b>94,09</b>
1	<b>Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>519.491.500</b>	<b>517.937.500</b>	<b>99,70</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	11 dokumen	100	384.321.500	383.492.500	99,78
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	135.170.000	134.445.000	99,46
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>9.733.693.930</b>	<b>9.498.503.697</b>	<b>97,58</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87 orang	87 orang	100	8.257.922.930	8.122.517.281	98,36
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 orang	14 orang	100	358.620.000	304.060.000	84,79
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	100	604.974.000	560.486.916	92,65
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 laporan	16 laporan	100	512.177.000	511.439.500	99,86
3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>	<b>692.593.455</b>	<b>632.307.156</b>	<b>91,30</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	72.864.475	72.719.300	99,80
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen 6 unit 42 unit 12 bulan	2 dokumen 6 unit 42 unit 12 bulan	100	329.691.880	321.028.466	97,37

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 dokumen	9 dokumen	75	290.037.100	238.559.390	82,25
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>36 persen</b>	<b>36</b>	<b>204.168.000</b>	<b>137.393.000</b>	67,29
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	135 Stel	135 Stel	100	111.000.000	110.704.000	99,73
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	600 dokumen	600 dokumen	20	53.166.000	23.529.000	44,26
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Kali	0 Kali	20	14.474.000	0	0,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Kali	0 Kali	20	12.194.000	0	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Kali	1 Kali	20	13.334.000	3.160.000	23,70
<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>	<b>16.854.689.702</b>	<b>16.584.227.770</b>	93,35
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120 unit	120 unit	100	161.065.600	160.770.000	99,82
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2105 Meter 1 paket 7 unit 10 unit 65 unit 50 unit 10 unit 2681 Meter 3 unit 5 unit	2105 Meter 1 paket 7 unit 10 unit 65 unit 50 unit 10 unit 2681 Meter 3 unit 5 unit	100	7.676.278.904	7.658.521.500	99,77
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 unit 13 unit 8 unit 6 unit 50 unit 1 unit 2 unit	3 unit 13 unit 8 unit 6 unit 50 unit 1 unit 2 unit	100	1.528.938.648	1.488.931.700	97,38
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400 unit 25 Tabung 80 Tabung 1 Tahun 150 Buah	400 unit 25 Tabung 80 Tabung 1 Tahun 150 Buah	100	2.965.039.700	2.902.647.579	97,90
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	114000 unit 6000 lembar	114000 unit 6000 lembar	100	282.133.000	233.116.000	82,63
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis /bulan 21 jenis /bulan	3 jenis /bulan 21 jenis /bulan	100	768.620.000	762.385.000	99,19
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2400 orang	2400 orang	100	199.981.000	199.546.000	99,78
	Penyelenggaraan	540	540 dokumen	100	2.994.045.350	2.920.291.261	97,54

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dokumen					
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 bulan 19 dokumen	12 bulan 19 dokumen	100	278.587.500	258.018.730	92,62
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>69 persen</b>	<b>68,92</b>	<b>25.773.390.047</b>	<b>21.244.042.876</b>	<b>82,43</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit 5 unit 5 unit	2 unit 5 unit 5 unit	100	6.309.073.000	5.416.650.000	85,85
	Pengadaan Mebel	14 unit 3 unit 2 unit 5 unit 6 unit 3 unit 8 unit 1 Ls 4 unit 30 unit 30 unit 1 unit 1 paket 3 buah	14 unit 3 unit 2 unit 5 unit 6 unit 3 unit 8 unit 1 Ls 4 unit 30 unit 30 unit 1 unit 1 paket 3 buah	100	1.237.413.374	1.104.054.400	89,22
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 unit 6 unit 43 unit 23 unit 3 unit 2 unit	40 unit 6 unit 43 unit 23 unit 3 unit 2 unit	100	1.436.300.473	1.415.595.920	98,56
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 dokumen 1 unit 1 unit	1 unit	44,59	16.790.603.200	13.307.742.556	79,26
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	5.250.000	-	0,00
<b>7.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>	<b>8.727.403.916</b>	<b>8.391.337.929</b>	<b>96,15</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2750 surat	2750 surat	100	144.020.710	141.174.600	98,02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50 mbps 14 rekening 976.6 KVA 6042 m3	50 mbps 14 rekening 976.6 KVA 6042 m3	100	2.013.252.000	1.956.155.747	97,16
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700 meter 60 unit 450 Bh 122 meter	700 meter 60 unit 450 Bh 122 meter	100	1.398.580.000	1.327.165.950	94,89
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 orang	100 orang	100	5.171.551.206	4.966.841.632	96,04
<b>8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>97 persen</b>	<b>96,67</b>	<b>14.127.519.340</b>	<b>12.759.579.666</b>	<b>90,32</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	5 unit	5 unit	100	684.206.000	660.676.620	96,56

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	atau Kendaraan Dinas Jabatan						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61 unit 21 unit 36 unit	61 unit 21 unit 36 unit	100	1.679.034.500	1.639.302.329	97,63
	Pemeliharaan Mebel	45 unit 100 unit	45 unit 100 unit	100	161.400.000	138.800.000	86,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85 unit 14 unit 30 unit 4 unit	85 unit 14 unit 30 unit 4 unit	100	98.890.000	96.756.800	97,84
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit 1 unit 1 unit 1 paket	1 unit 1 unit 1 unit	80	8.277.610.100	7.207.781.029	87,08
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 kali 103 unit 2 unit 50 unit 15 paket 20 paket 45 paket 2 unit 1 paket 27654 Meter 10 Paket 3500 Meter	3 kali 103 unit 2 unit 50 unit 15 paket 20 paket 45 paket 2 unit 1 paket 27654 Meter 10 Paket 3500 Meter	100	3.226.378.740	3.016.262.888	93,49
<b>9.</b>	<b>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>100</b>	<b>42.596.570.411</b>	<b>42.424.251.723</b>	<b>99,60</b>
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100	41.225.288.652	41.223.014.755	99,99
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	65 stel 65 stel 130 stel 2 stel 65 stel 65 stel 2 orang	65 stel 65 stel 130 stel 2 stel 65 stel 65 stel 2 orang	100	1.173.031.759	1.158.536.968	98,76
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	65 orang	65 orang	100	198.250.000	42.700.000	21,54
<b>10.</b>	<b>Kegiatan Layanan Adminstrasi DPRD</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>100</b>	<b>61.804.000</b>	<b>54.455.000</b>	<b>88,11</b>
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	65 orang	65 orang	100	15.184.000	15.184.000	100,00
	Fasilitasi Fraksi DPRD	7 fraksi	7 fraksi	100	46.620.000	39.271.000	84,24
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40 kali 48 kali	40 kali 48 kali	100	286.800.000	266.168.000	92,81
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 bulan	12 bulan	100	471.833.775	447.444.920	94,83
<b>II</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>100 persen</b>	<b>99 persen</b>	<b>100</b>	<b>82.417.761.172</b>	<b>77.057.179.992</b>	<b>93,50</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>16 dokumen</b>	<b>16 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>8.643.083.550</b>	<b>8.188.280.372</b>	<b>94,74</b>
	Penyusunan dan Pembahasan	1 kali 17 kali	1 kali 17 kali	100	1.834.574.600	1.814.427.074	98,90

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 kali	6 kali				
	Pembahasan Rancangan Perda	40 kali 17 kali	40 kali 17 kali	100	6.113.993.550	5.681.088.676	92,92
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	6 kajian	6 kajian	100	332.270.600	330.835.022	99,57
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	6 dokumen 6 kali	6 dokumen 6 kali	100	362.244.800	361.929.600	99,91
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>	<b>5.457.682.150</b>	<b>5.269.227.335</b>	<b>96,55</b>
	Pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	1 kali	100	982.469.650	969.699.694	98,70
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 kali	1 kali	100	605.513.450	593.237.581	97,97
	Pembahasan APBD	1 kali	1 kali	100	1.675.720.500	1.541.559.062	91,99
	Pembahasan Perubahan APBD	1 kali	1 kali	100	1.099.114.900	1.081.822.500	98,43
	Pembahasan Laporan Semester	1 kali	1 kali	100	54.575.900	51.209.500	93,83
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 kali	1 kali	100	1.040.287.750	1.031.698.998	99,17
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>36 dokumen</b>	<b>36 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>7.511.469.250</b>	<b>7.245.824.508</b>	<b>96,46%</b>
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 dokumen 120 kali	3 dokumen 120 kali	100	1.194.040.650	1.160.518.047	97,19%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 dokumen 120 kali	3 dokumen 120 kali	100	1.204.524.650	1.149.202.700	95,41%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 dokumen 120 kali	3 dokumen 120 kali	100	1.346.673.300	1.333.440.800	99,02%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 dokumen 120 kali	3 dokumen 120 kali	100	2.036.522.400	1.912.858.500	93,93%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 dokumen 120 kali	3 dokumen 120 kali	100	692.110.800	682.834.500	98,66%
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 kali	2 kali	100	301.136.100	290.292.107	96,40%
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 kali	12 kali	100	736.461.350	716.677.854	97,31%
<b>4</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>6 kegiatan</b>	<b>6 kegiatan</b>	<b>100</b>	<b>27.176.434.150</b>	<b>25.359.635.830</b>	<b>93,31</b>



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>						
	Bimbingan Teknis DPRD	4 kali	4 kali	100	3.611.116.500	3.206.983.197	88,81
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	432 kali 452 dok 9192 kali	432 kali 452 dok 9192 kali	100	21.296.645.150	19.884.187.292	93,37
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	21 orang 3 orang	21 orang 3 orang	100	1.755.776.500	1.755.570.541	99,99
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	7 orang	7 orang	100	512.896.000	512.894.800	100,00
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>15.482.787.800</b>	<b>14.943.051.053</b>	<b>96,51</b>
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	390 kali	390 kali	100	141.337.700	137.368.500	97,19
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	65 dokumen	65 dokumen	100	284.714.500	268.050.448	94,15
	Pelaksanaan Reses	195 kali	195 kali	100	15.056.735.600	14.537.632.105	96,55
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>6 dokumen</b>	<b>6 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>219.580.100</b>	<b>207.580.100</b>	<b>94,54</b>
	Penyusunan Kode Etik DPRD	2 kali	2 kali	100	133.851.300	127.500.480	95,26
	Pengawasan Kode Etik DPRD	3 kali	3 kali	100	85.728.800	80.079.620	93,41
<b>7</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>15 dokumen</b>	<b>15 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>17.926.724.172</b>	<b>15.843.580.794</b>	<b>88,38</b>
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	48 kali 48 kali	48 kali 48 kali	100	12.554.017.672	10.808.863.715	86,10
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1 dokumen	1 dokumen	100	122.741.000	120.044.000	97,80
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 kali	10 kali	100	2.763.134.000	2.446.086.439	88,53
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 kali	36 kali	100	2.486.831.500	2.468.586.640	99,27
	Jumlah				<b>202.472.969.248</b>	<b>190.014.829.229</b>	<b>93,85</b>

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Tidak ada permasalahan	-
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tidak ada permasalahan	=

### 3.1.6. FUNGSI PENGAWAS

#### 3.1.6.1. Pengawasan

Fungsi Penunjang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.21.563.708.237,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.170.598.198,00 atau 98,18%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 4. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kapabilitas APIP Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	75	78	104
2	Meningkatnya kapabilitas APIP Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	70	75	107

#### 5. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatkan Kapabilitas APIP dan Meningkatkan kualitas pengendalian internal pemerintah, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (Target 75%) (Realisasi Kinerja 78%) dengan capaian kinerja 104%.

Pencapaian target kinerja dari Indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan output 104 Laporan Hasil Evaluasi (LHE), 2 Laporan Hasil Monitoring (LHM), 34 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan 112 Laporan Hasil Reviu (LHR).
  - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan output 204 LHR dan 100 LHP.
  - Reviu Laporan Kinerja, dengan output 1 LHR.
  - Reviu Laporan Keuangan, dengan output 52 LHR.

- Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, dengan output 4 LHP.
  - Kerjasama Pengawasan Internal, dengan output 3 LHR.
  - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan output 70% LHP yang ditindaklanjuti.
- (2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan output 1 laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah.
  - Pengawasan dengan Tujuan tertentu, dengan output 100% kasus yang ditangani.

Dari Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kapabilitas APIP dan Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah, dengan Indikator Kinerja :

- 1) Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai (Target 70%) (Realisasi Kinerja 75%) dengan capaian kinerja 107%.

Pencapaian target kinerja dari Indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan :

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, dengan output 1 PKPT.
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, dengan output 8 Peraturan.

(2) Pendampingan dan Asistensi :

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output 1 Laporan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah.
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan output 1 Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan output 1 Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan output 1 Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Dari Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

## 6. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100	100	100	15.767.287.256	15.533.766.833	98,52
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	133.688.250	131.202.450	98,14
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	11.821.612.952	11.645.538.024	98,51
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	100	100	58.354.600	58.323.600	99,95
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	857.079.400	854.586.380	99,71
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	1.081.836.433	1.056.551.097	97,65
6	Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda	100	100	100	292.060.700	289.348.650	99,07
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	100	100	100	1.086.472.671	1.069.551.097	98,44
8	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	100	100	100	436.182.250	428.829.903	98,31
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100	100	100	4.623.043.609	4.481.879.436	96,95
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	100	100	4.507.023.829	4.365.873.736	96,87
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan	100	100	100	116.019.780	116.005.700	99,99

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	dengan Tujuan Tertentu						
III	PROGRAM PERUMUSAN, KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100	100	100	1.173.377.372	1.154.951.929	98,43
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	100	100	481.643.872	479.533.300	99,56
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	100	100	100	691.733.500	675.418.629	97,64
	Jumlah				21.563.708.237	21.170.598.198	98,18

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Tidak ada permasalahan	-
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tidak ada permasalahan	-
III	PROGRAM PERUMUSAN, KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tidak ada permasalahan	-

### 3.1.7. FUNGSI PEMERINTAHAN UMUM

#### 3.1.7.1. Kesatuan Bangsa

Urusan penunjang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.16.714.699.394,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.109.547.719,00 atau 96,38%, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkat-nya akuntabili-tas kinerja organisasi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73,64	73,14	99,32
II	Meningkat-nya kualitas pelayanan organisasi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	84%	93,91%	111,79
III	Meningkat-nya keamanan, ketentra-man dan ketertiban masyarakat	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	Konflik di Sumatera Barat	3 kasus	1 kasus	166,67
		<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>				
		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>				
IV	Meningkat-nya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,01	78,51	115,44
		<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>				

## 2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Target Kinerja 73,64) (Realiasi Kinerja : 73,14) dengan capaian kinerja 99,32%.
- 2) Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Target Kinerja 84% (BB)) (Realiasi Kinerja : 93,91%) dengan capaian kinerja 111,79%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan kegiatan :

(1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi yang disusun.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan.

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output kegiatan ini adalah jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output kegiatan ini adalah jumlah ASN yang mendapatkan honor.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah unit yang dilakukan penjagaan.
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan barang milik daerah.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan output kegiatan ini adalah jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola.
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi yang dilaksanakan.
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah bimtek yang dilaksanakan.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output kegiatan ini adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan.



- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah surat kabar yang disediakan.
  - Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan output kegiatan ini adalah jumlah tamu yang dilayani.
  - Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi.
- (6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah, output kegiatan ini adalah jumlah mebel dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Mebel.
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya baru.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output kegiatan ini adalah jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah jumlah kapasitas tagihan internet, telepon, air dan listrik yang dibayarkan.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output kegiatan ini adalah jumlah tenaga pelayanan kantor yang tersedia.
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

- b. Sasaran II : Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan indikator kinerja :

- 1) Konflik di Sumatera Barat (Target Kinerja 3 Kasus) (Realisasi Kinerja : 1 kasus) dengan capaian kinerja 166,67%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

- a) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, dicapai dengan kegiatan :

- (1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan output kegiatan adalah jumlah koordinasi dan hasil koordinasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sebanyak 17 kali.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil monev terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social sebanyak 5 dokumen.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, dengan output kegiatan ini adalah jumlah koordinasi sebanyak 11 kali dan hasil koordinasi tim Forkopimda sebanyak 1 dokumen.

- b) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan :
  - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang diberikan pembekalan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pendidikan wawasan kebangsaan dan sosialisasi penguatan pembauran kebangsaan sebanyak 300 orang.
  - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah koordinasi bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa sebanyak 9 kali dan dokumen hasil koordinasi di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa sebanyak 4 dokumen.
  - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan situasi dan kondisi daerah di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa sebanyak 1 laporan.
- c) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
  - (1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan sub kegiatan :
    - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi P4GN sebanyak 640 orang.
    - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah,

dengan output kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan hasil koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sebanyak 11 kali.

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil monev bidang ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya sebanyak 4 dokumen.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. Sasaran III : Meningkatkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (Target Kinerja 68,01 (BB)) (Realiasi Kinerja : 78,51) dengan capaian kinerja 115,44.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

- a) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, dicapai dengan melaksanakan kegiatan :

- (1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah bantuan keuangan partai politik yang disalurkan sebanyak 9 paket, jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan parpol yang disusun sebanyak 9 dokumen, jumlah dokumen verifikasi berkas calon PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun sebanyak 6 dokumen, jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan politik sebanyak 2.286 orang dan jumlah pengurus parpol dan aparatur yang diberikan bimtek pengajuan bantuan keuangan parpol sebanyak 50 orang.

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah koordinasi sebanyak 11 kali dan hasil koordinasi bidang politik sebanyak 1 laporan.
- b) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
- (1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyaraka-tan, dengan sub kegiatan :
- Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah pengurus ormas yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Keormasan sebanyak 470 orang.
  - Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah koordinasi sebanyak 6 kali dan hasil koordinasi bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas sebanyak 1 laporan.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

### 3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi)	100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi)	100	6.532.810.294	6.273.872.172	96.04
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100% (Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat	100% (Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat	100	269.737.600	267.976.100	99.35

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		daerah)	daerah)				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen (Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun)	2 dokumen (Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun)	100	125.432.000	125.048.750	99.69
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 dokumen (Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun)	1 dokumen (Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun)	100	19.348.050	19.013.000	98.27
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen (Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun)	2 dokumen (Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun)	100	12.937.000	12.936.800	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi yang disusun)	4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi yang disusun)	100	43.666.000	43.098.000	98.70
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan)	4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan)	100	68.354.550	67.879.550	99.31
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan (Tertib Administrasi Keuangan)</b>	<b>12 bulan (Tertib Administrasi Keuangan)</b>	<b>100</b>	<b>4.705.607.343</b>	<b>4.474.936.027</b>	<b>95.10</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang (Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya)	38 orang (Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya)	100	4.498.829.343	4.268.440.327	94.88
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 orang (Jumlah ASN yang mendapatkan honor)	11 orang (Jumlah ASN yang mendapatkan honor)	100	152.850.000	152.850.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen (Jumlah laporan keuangan yang SKPD yang disusun)	1 dokumen (Jumlah laporan keuangan yang SKPD yang disusun)	100	17.006.000	17.000.700	99.97
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 dokumen (Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan)	18 dokumen (Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan)	100	36.922.000	36.645.000	99.25
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan (Tertib Administrasi Barang Milik Daerah)</b>	<b>12 bulan (Tertib Administrasi Barang Milik Daerah)</b>	<b>100</b>	<b>32.648.000</b>	<b>32.352.300</b>	<b>99.09</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 unit (Jumlah unit yang dilakukan penjagaan)	5 unit (Jumlah unit yang dilakukan penjagaan)	100	27.6480.00	27.417.800	99.17
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan (Jumlah dokumen laporan barang milik daerah)	3 laporan (Jumlah dokumen laporan barang milik daerah)	100	5.000.000	4.934.500	98.69
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>60% (Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)</b>	<b>60% (Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)</b>	<b>100</b>	<b>110.977.400</b>	<b>108.918.400</b>	<b>98.14</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38 stel (Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya)	38 stel (Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya)	100	22.800.000	22.800.000	100
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen (Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola)	1 dokumen (Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola)	100	10.000.000	9.997.600	99.98
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 kali (Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan)	1 kali (Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan)	100	36.377.400	36.124.000	99.30
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 kali (Jumlah Bimtek yang dilaksanakan)	1 kali (Jumlah Bimtek yang dilaksanakan)	100	41.800.000	39.996.800	95.69
<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan (Tertib Administrasi Umum)</b>	<b>12 Bulan (Tertib Administrasi Umum)</b>	<b>100</b>	<b>500.779.337</b>	<b>500.568.931</b>	<b>99.69</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis (Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan)	7 jenis (Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan)	100	9.999.800	9.999.800	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 jenis (Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan)	3 jenis (Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan)	100	16.277.000	16.277.000	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis (Jumlah barang cetakan yang disediakan)  5.092 lembar (Jumlah penggandaan yang disediakan)	7 jenis (Jumlah barang cetakan yang disediakan)  5.092 lembar (Jumlah penggandaan yang disediakan)	100	35.348.000	35.341.000	99.98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	147 eksemplar	147 eksemplar (Jumlah surat)	100	16.440.000	16.440.000	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perundang-Undangan	(Jumlah surat kabar yang disediakan)	kabar yang disediakan)				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 orang (Jumlah tamu yang dilayani)	100 orang (Jumlah tamu yang dilayani)	100	2.100.000	2.089.000	99.48
	Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen (Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi)	12 dokumen (Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi)	100	420.613.537	420.422.131	99.95
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah)</b>	<b>12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah)</b>	<b>100</b>	<b>144.901.440</b>	<b>144.185.498</b>	<b>99.51</b>
	Pengadaan Mebel	10 unit (Jumlah mebel)	10 unit (Jumlah mebel)	100	25.685.400	25.570.000	99.55
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit (Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru)	12 unit (Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru)	100	119.216.040	118.615.498	99.50
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan (Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)</b>	<b>12 bulan (Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)</b>	<b>100</b>	<b>578.843.644</b>	<b>556.810.433</b>	<b>96.19</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 surat (Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun)	100 surat (Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun)	100	10.355.000	10.348.850	99.94
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1000 KBps (JUmlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan) 4 rekening (Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan) 367 meter kubik (Jumlah tagihan air PDAM yang dibayarkan) 39939 kwh (Jumlah tagihan listrik PLN yang dibayarkan)	1000 KBps (JUmlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan) 4 rekening (Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan) 367 meter kubik (Jumlah tagihan air PDAM yang dibayarkan) 39939 kwh (Jumlah tagihan listrik PLN yang dibayarkan)	100	132.736.586	130.611.300	98.40
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 orang (Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia)	11 orang (Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia)	100	435.752.058	415.850.283	95.43
<b>8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>12 bulan (Terpeliharanya Barang</b>	<b>12 bulan (Terpeliharanya Barang Milik</b>	<b>100</b>	<b>189.316.530</b>	<b>188.079.483</b>	<b>99.35</b>



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Milik Daerah)</b>	<b>Daerah)</b>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit (Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara)	7 unit (Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara)	100	130.837.000	129.689.143	99.12
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit (Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab)	1 unit (Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab)	100	32.049.530	31.967.340	99.74
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39 unit (Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/ direhab)	39 unit (Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/ direhab)	100	26.430.000	26.423.000	99.97
<b>II</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>2.71 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi)</b>	<b>2.03 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi)</b>	<b>74,9</b>	<b>977.000.000</b>	<b>946.715.985</b>	<b>96.90</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>1 rekomendasi (Jlh. Rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan)</b>	<b>1 rekomendasi (Jlh. Rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan)</b>	<b>100</b>	<b>977.000.000</b>	<b>946.715.985</b>	<b>96.90</b>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	50 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pembekalan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila) 150 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan wawasan kebangsaan) 100 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi penguatan pembauran kebangsaan) 100 orang (Jumlah masyarakat	50 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pembekalan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila) 150 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan wawasan kebangsaan) 100 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi penguatan pembauran kebangsaan)	100	255.408.000	246.256.768	96.42

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		yang diberikan sosialisasi penguatan pembauran Kebangsaan)					
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	9 kali (Jumlah koordinasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ) 4 dokumen (Jumlah dokumen hasil koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)	9 kali (Jumlah koordinasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ) 4 dokumen (Jumlah dokumen hasil koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)	100	661.592.000	641.005.717	96.89
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	1 laporan (Jumlah laporan situasi dan kondisi daerah di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)	1 laporan (Jumlah laporan situasi dan kondisi daerah di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)	100	60.000.000	59.453.500	99.09
III	<b>Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>3,27 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik)</b>	<b>1,41 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik)</b>	<b>43,11</b>	<b>6.534.139.200</b>	<b>6.413.184.503</b>	<b>98.15</b>
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta	100	6.534.139.200	6.413.184.503	98.15

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Pemantauan Situasi Politik)</b>					
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 paket (Jumlah bantuan keuangan parpol) 9 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan partai politik yang disusun) 6 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi berkas calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun) 2286 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan politik) 50 orang (Jumlah pengurus parpol dan aparatur yang diberikan bimtek pengajuan bantuan keuangan parpol)	1 paket (Jumlah bantuan keuangan parpol) 9 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan partai politik yang disusun) 6 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi berkas calon PAW Anggota Kabupaten/Kota yang disusun) 2286 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan politik) 50 orang (Jumlah pengurus parpol dan aparatur yang diberikan bimtek pengajuan bantuan keuangan parpol)	100	6.503.512.700	6.382.720.003	98.14
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/	100	30.626.500	30.464.500	99.47

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik)  11 kali (Jumlah koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan , perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik)	pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik)  11 kali (Jumlah koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik)				
IV	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI Kemasyarakatan</b>	<b>100% (Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi)</b>	<b>100% (Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi)</b>	<b>100</b>	<b>540.000.000</b>	<b>515.579.200</b>	<b>95.48</b>
1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan)</b>	<b>1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan)</b>	<b>100</b>	<b>540.000.000</b>	<b>515.579.200</b>	<b>95.48</b>
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100% (Hibah PWRI yang terealisasi) 470 orang (Jumlah pengurus ormas yang diberikan sosialisasi peraturan tentang Keormasan)	100% (Hibah PWRI yang terealisasi) 470 orang (Jumlah pengurus ormas yang diberikan sosialisasi peraturan tentang Keormasan)	100	500.000.000	482.874.200	96.57
	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang Pemberdaya	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang Pemberdayaan	100	40.000.000	32.705.000	81.76

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	an dan Pengawasan Ormas) 6 kali (Jumlah koordinasi bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas)	dan Pengawasan Ormas) 6 kali (Jumlah koordinasi bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas)				
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA-NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>3.10 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya)</b>	<b>2.18 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya)</b>	<b>70.32</b>	<b>905.000.000</b>	<b>877.603.536</b>	<b>96.97</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	2 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	100	905.000.000	877.603.536	96.97
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	640 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi P4GN)	640 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi P4GN)	100	700.000.000	690.851.302	98.69
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) 11 kali (Jumlah koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) 11 kali (Jumlah koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	100	185.000.000	168.303.834	90.98
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	4 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya)	100	20.000.000	18.448.400	92.24

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>3.01 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan)</b>	<b>2.05 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan)</b>	68,11	1.225.749.900	1.082.637.323	88.32
!	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>5 rekomendasi (Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)</b>	<b>5 rekomendasi (Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)</b>	100	1.225.749.900	1.082.637.323	88.32
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 dokumen (Jumlah hasil koordinasi di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial) 17 kali (Jumlah koordinasi bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial)	4 dokumen (Jumlah hasil koordinasi di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial) 17 kali (Jumlah koordinasi bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial)	100	259.164.500	244.334.044	94.28
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)	5 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)	100	210.195.400	206.842.776	98.40
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 dokumen (Jumlah hasil koordinasi tim Forkopimda) 11 kali (Jumlah koordinasi tim Forkopimda yang dilaksanakan)	1 dokumen (Jumlah hasil koordinasi tim Forkopimda) 11 kali (Jumlah koordinasi tim Forkopimda yang dilaksanakan)	100	756.390.000	631.460.503	83.48

#### 4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>		
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan (tim dan forum strategis daerah) dalam melakukan deteksi dan cegah dini terhadap permasalahan strategis di daerah sehingga potensi-potensi konflik yang ada di Sumatera Barat belum dapat diselesaikan diantaranya masalah sengketa lahan terutama tanah ulayat untuk pembebasan jalan tol, perkebunan, kawasan hutan lindung, batas wilayah, dan lahan untuk dijadikan pertambangan	Penguatan peran dan fungsi kelembagaan (tim dan forum strategis daerah) melalui peningkatan intensitas pertemuan. Forum strategis daerah tersebut diantaranya Forkopimda, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, TKPD (Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah), Tim POA (Pemantauan Orang Asing) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat). Forum tersebut berfungsi sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama bagi elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan di Sumatera Barat.
II	<b>Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>		
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pada Pilkada terakhir, (Tahun 2020) tingkat partisipasi masyarakat sebesar 61,50%, sedangkan target nasional sebesar 77,50%.	Perlu dilakukan pendidikan politik secara intensif dan berkesinambungan ke seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada Pemilu yang akan datang. Melalui pendidikan politik, pemahaman masyarakat tentang pentingnya etika dan budaya politik yang demokratis dapat meningkat sehingga terpilih Pemimpin Daerah yang lebih legitimit dan berkualitas
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat	Pelaksanaan Sosialisasi P4GN khususnya bagi pelajar dan generasi muda secara berkesinambungan, pembentukan tim terpadu P4GN dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN yang melibatkan instansi terkait .
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Masih terbengkalainya pembangunan Monumen Bela Negara di Koto Tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibangun sejak tahun 2012 dan telah menghabiskan biaya sebesar lebih kurang 76 miliar (bersumber dari Kemendikbud). Pembangunan Monumen Bela Negara PDRI ini merupakan representasi dari peristiwa-peristiwa bersejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang merupakan penyelamat Republik Indonesia di mata dunia.	Penguatan peran tim fasilitasi pembangunan monumen dan tugas bela Negara Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Pusat untuk mendorong percepatan penerbitan Inpres tentang Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat. Dengan terbitnya Inpres ini diharapkan sumber pembiayaan pembangunan monumen bela negara dari beberapa Kementerian dapat dialokasikan. Pada kesepakatan awal sumber pembiayaan pembangunan monumen bela negara berasal dari APBN yang diprogramkan oleh beberapa kementerian yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten/Kota terkait dengan total anggaran yang direncanakan sebesar Rp.603.100.000.000.

### 3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Setiap pelaksanaan Pemerintahan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun minimalisasi dampak negatif dari permasalahan, meskipun dalam realitanya permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua periode saja. Selain dilihat permasalahan dari sudut sasaran pembangunan daerah sehingga menjadi permasalahan yang prioritas untuk diselesaikan, perumusan masalah juga dirunut berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Kebijakan strategis yang dibahas kali ini berpedoman dari isu strategis dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Barat Tahun 2022. Tidak sedikit masalah atau isu yang diidentifikasi dalam proses Pemerintah Daerah. Isu strategis merupakan kondisi atau isu yang perlu mendapatkan perhatian dan diprioritaskan, kriteria yang diambil dalam isu strategis merupakan permasalahan mendesak yang harus ditangani pada tahun 2022.

Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
<b>I Pendidikan</b>			
1	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
<b>II Kesehatan</b>			
1	Percepatan Eliminasi Malaria	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Percepatan Eliminasi Malaria	<p>Malaria sebagai salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, berdampak kepada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, bahkan berpengaruh terhadap ketahanan nasional;</p> <p>Penyakit malaria yang menjadi ancaman di Sumatera Barat menyebabkan perlunya dilakukan upaya percepatan pengendalian secara terpadu dalam bentuk usaha yang terintegrasi, terstruktur dan berkesinambungan dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.</p>
2	Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Integrasi Jaminan	Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Kesehatan, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 terdapat perubahan daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
<b>III PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			
1	Grand Design Pembangunan Kependudukan	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan	Sampai Dengan Saat Ini Laju Pertumbuhan Penduduk Masih Tinggi, Kualitas Penduduk Masih Rendah, Pembangunan Keluarga Belum Optimal, Persebaran Penduduk Belum Proporsional Dan Administrasi Kependudukan Belum Tertib;  Untuk Menyelesaikan Masalah Tersebut Diperlukan Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan Yang Efektif, Terukur Dan Mencapai Hasil Yang Optimal Bagi Kesejahteraan Masyarakat.
<b>IV KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>			
1	Tata Cara Pengelolaan Nama Domain Dan Sub Domain	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain Dan Sub Domain	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pemerintahan Berbasis Elektronik.
<b>V PENANAMAN MODAL</b>			
1	Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan.
<b>VI KEBUDAYAAN</b>			
1	Mars Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Mars Sumatera Barat	Penggunaan mars merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan semangat kebersamaan persatuan dan kesatuan, dan etos kerja Masyarakat Sumatera Barat.
<b>VII PERPUSTAKAAN</b>			
1	Menjamin Penyelenggaraan Dan Pengembangan Perpustakaan Di Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perpustakaan	Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk pengembangan potensi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pendidikan di Daerah;

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
			Dalam rangka mewujudkan perpustakaan sebagai wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik daerah, meningkatkan layanan perpustakaan dan mendukung transformasi perpustakaan perlu adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif.
<b>VIII PARIWISATA</b>			
1	Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah	Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
2	Penyelenggaraan Pariwisata Halal	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.
<b>IX KEHUTANAN</b>			
1	Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Luar Kawasan Hutan	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Luar Kawasan Hutan	Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi hasil hutan bukan kayu di luar kawasan hutan yang perlu dimanfaatkan, dipelihara, dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat sehingga mampu menciptakan ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat; Untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu yang berkelanjutan berbasis ekologis dan sosiologis, sehingga hutan tetap terjaga kelestariannya perlu diatur tata cara pemberian persetujuannya.
<b>X PERENCANAAN</b>			
1	Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Tingkat Provinsi	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Tingkat Provinsi	Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.
2	Badan Pengelola Geopark Ranah Minang	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Badan Pengelola Geopark Ranah Minang	Berdasarkan keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 191.K/HK.02/MEM.G/2021 tentang penetapan warisan geologi Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 tahun 2021 Tentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional.
3	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2018 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan.
4	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
5	Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021, dalam pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Triwulan II, Keuangan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Serta Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah.
6	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan Dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021, perlu melakukan penyesuaian kembali berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
<b>XI</b>	<b>KEUANGAN</b>		
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 321 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
			Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2018 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan.
4	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat TA 2023	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat TA 2023	Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan	Untuk Melaksanakan Ketentuan Bab II Huruf D Angka 5 Huruf D Angka 6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6	Pembukaan Dan Pengoperasian Rekening Penerimaan Dan Rekening Pengeluaran	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembukaan Dan Pengoperasian Rekening Penerimaan Dan Rekening Pengeluaran	Kewajiban pemindahbukuan dari rekening penerima ke rekening kas umum daerah secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari.
7	Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Pengelolaan Keuangan Daerah.
8	Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	- Penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih sangat diharapkan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan di daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;  Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih mempengaruhi ekonomi masyarakat dalam membayar PKB maupun BBNKB, sehingga diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah memberikan keringanan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PKB dan BBNKB;

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
			Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, perlu ditinjau dan disesuaikan Kembali.
9	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Tiga Belas Yang Bersumber APBD Tahun 2022	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Tiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022	Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Negara.
10	Perubahan atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Pergeseran anggaran.
11	Perubahan kedua atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Karena perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KUA.
12	Perubahan ketiga atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Keluarnya Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat Dan Dana Efisiensi, perlu melakukan penyesuaian dengan melakukan pergeseran anggaran belanja untuk mendukung penyelenggaraan ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah Masehi terkait dengan biaya perjalanan Ibadah Haji; Adanya kekurangan penganggaran belanja pegawai khususnya belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD tidak mencukupi memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun berkenaan.
13	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14	Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Untuk Jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib	Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		Pajak Daerah Untuk Jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, diwajibkan mendaftarkan diri kepada kepala daerah untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak daerah.
15	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga	Untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D, angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
16	Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023	Untuk kelancaran penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, perlu disusun standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyusunan penggunaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2023.
17	Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Berdasarkan Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur berwenang memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu.
18	Standar Harga Satuan	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Pengelolaan Keuangan Daerah.
19	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Dan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022, dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
20	Penjabaran APBD Tahun 2023	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Tahun 2023.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
<b>XII KEPEGAWAIAN</b>			
1	Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat	<p>Dalam rangka memberikan motivasi meningkatkan prestasi;</p> <p>Adanya peyederhanaan birokrasi pada Perangkat Daerah dan Penyesuaian Terhadap Pengukuran Kinerja.</p>
<b>XIII SEKRETARIAT DAERAH</b>			
1	Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022	<p>Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dan Anggaran dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.</p> <p>Adanya perubahan/penyesuaian Standar Satuan Harga Satuan Harga Tahun 2022 dan usulan dari Organisasi Perangkat Daerah.</p> <p>Dalam rangka perencanaan kegiatan satuan kerja perangkat daerah sebagai pedoman/acuan untk menilai kewajaran dalam penyusunan RKA dan DPA.</p>
2	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Dan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Dan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	<p>Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyusunan pola tata kelola Sekolah Menengah Kejuruan Negeri perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyusunan rencana strategis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyusunan standar pelayanan minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
3	Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026	<p>Dalam rangka pelaksanaan reformasi dan birokrasi perlu menyusun perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak;</p> <p>Ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah menyusun road map reformasi birokrasi di internal instansi.</p>
4	Uraian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi	<p>Terjadinya pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penjabaran uraian tugas dan fungsi Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;</p> <p>Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, telah ditetapkan Dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021.</p>
5	Mekanisme Koordinasi Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi	<p>Dalam rangka optimalisasi tercapainya efisiensi, efektifitas dan produktifitas setiap pelaksanaan program kegiatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diperlukan adanya mekanisme koordinasi kerja yang jelas antar Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;</p> <p>Mekanisme koordinasi Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan nomenklatur kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti.</p>
<b>XIV</b>	<b>INISIATIF DPRD</b>		
1	Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Badan Publik Daerah Lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;</p> <p>Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan informasi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>



### 3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

#### 3.3.1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPJ Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
	<b>ARAH PEMBANGUNAN</b>	
	<b>REKOMENDASI UMUM</b>	
	<b>Bappeda</b>	
1.	<p>Mereview Kembali Target Kinerja Masing- Masing Program Tidak Hanya Pada Tataran Output Akan Tetapi Juga Pada Tataran Outcome Sebagaimana dimaksud Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.</p>	<p>Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 terdapat Beberapa Indikator kinerja beserta target antara lain yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator Kinerja Makro, yang merupakan Ukuran kinerja Pembangunan Daerah yang Berorientasi Terhadap Dampak antara lain Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Indeks Gini dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Target kinerja pada Indikator kinerja makro Ditentukan dengan memperhatikan Capaian 5 Tahun Terakhir, adanya dampak Pandemic Covid serta target yang juga telah ditetapkan oleh nasional;</li> <li>2. Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran kinerja yang berorientasi pada manfaat yang diukur berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;</li> <li>3. Indikator Kinerja Daerah (IKD), yang merupakan ukuran kinerja yang berorientasi pada outcome yang diukur berdasarkan urusan atau fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. IKD yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 telah sepenuhnya mempedomani serta mengakomodir seluruh indikator kinerja yang tercantum dalam LPPD sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 18 Tahun 2020 serta juga telah mengakomodir Indikator Kinerja sesuai hasil pembahasan cascading yang disusun oleh Biro Organisasi;</li> <li>4. Indikator Kinerja Program, yang merupakan ukuran kinerja pada masing-masing Program sebagaimana telah diatur oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Indikator kinerja program merupakan berorientasi outcome yang merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang berada di bawahnya. Penetapan indikator kinerja program juga telah dilakukan melalui mekanisme pembahasan dengan Perangkat Daerah yang juga dalam rangkaian penyusunan RPJMD 2021-2026 dan Renstra PerangkatDaerah Tahun 2021-2026.</li> </ol> <p>Berdasarkan hal tersebut, maka merubah indikator kinerja Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Program berserta targetnya tentu hanya dapat dilakukan dengan melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, dan berdasarkan pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;</li> <li>2. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;</li> <li>3. terjadi perubahan yang mendasar antara lain mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.</li> </ol>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
2.	Konsisten dalam distribusi alokasi anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026 dengan memperhatikan program unggulan dan program prioritas daerah, capaian target kinerja tahun sebelumnya, pemerataan antar wilayah dan memperhatikan skala prioritas.	Penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun 2022 telah memperhatikan rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 mengingat penetapan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 pada tanggal 9 September 2021, dengan memperhatikan alokasi anggaran untuk Program Unggulan, capaian targetkinerja serta pemerataan antar wilayah dan skala prioritas. Konsep pemerataan antar wilayah sesuai dengan dokumen RPJMD 2021-2026 yakni pembangunan/pengembangan wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki nya sebagaimana tertuang dalam Bab VI RPJMD 2021-2026. Begitupun dalam penyusunan dokumen RKPJ juga nantinya tetap berpedoman pada RPJMD sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan awal RKPJ provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPJ.
3.	Perlu dilakukan penyesuaian antara program dan kegiatan yang bersumber dari tugas pembantuan dengan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan pada setiap tahunnya, diamanatkan untuk melakukan penyesuaian antara program prioritas nasional dan program prioritas daerah.	Dapat diinformasikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran tugas pembantuan yang berasal dari Kementerian/Lembaga (APBN) selama ini tidak pernah melibatkan Pemerintah Provinsi, dan juga tugas pembantuan bersifat top down. Selama ini, Pemerintah Provinsi mendapatkan informasi terkait dengan tugas pembantuan yang berada di Provinsi Sumatera Barat setelah adanya penetapan Peraturan Presiden tentang alokasi Dana Transfer ke Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dapat diinformasikan bahwa menu Tugas Pembantuan dari tahun ke tahun selalu berubah-ubah dan tidak sama.
<b>Bapenda</b>		
1.	Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi Kembali sumber-sumber Pendapatan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dimana terdapat potensi- potensi baru yang menjadi objek pendapatan daerah dan diminta agar setiap SKPD melakukan penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan upaya mewujudkan sumber pendapatan tersebut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Sosialisasi UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;</li> <li>2. Menyiapkan bahan untuk Penyusunan Ranperda PDRD;</li> <li>3. Meningkatkan kualitas data base objek, subjek dan potensi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah dengan melibatkan seluruh OPD Pemungut;</li> <li>4. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada OPD Pemungut Retribusi dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap setiap regulasi baru baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.</li> </ol>
2.	PT. Balairung agar memberikan kontribusi terhadap PAD Sumatera Barat	PT. Balairung tahun 2022 telah memberikan kontribusi terhadap PAD Sumatera Barat sebesar Rp.518.201.719,-
3	Perlunya inisiasi dan inovasi yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah sehingga Bapenda mampu menciptakan loncatan penerimaan PAD untuk tahun-tahun berikutnya	Melakukan inovasi dan intensifikasi kegiatan penghapusan denda dan bebas balik nama kendaraan bermotor, memperbanyak layanan Samsat Keliling, memperkuat koordinasi dengan Tim Pembina Samsat Provinsi. Berkaitan dengan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain adalah dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh stakeholder sebagai pengelola pendapatan retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
<b>BPKAD dan Biro Perekonomian</b>		
1.	Mempercepat revitalisasi dan optimalisasi asset dan BUMD milik Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Terpadu Percepatan Revitalisasi dan Optimalisasi Aset dan BUMD milik Pemerintah Daerah.	Mengefektifkan koordinasi pembinaan BUMD serta penyelesaian masalah asset BUMD yang sudah dibubarkan/likuidasi sehingga kembali bisa dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi
2.	Melakukan efisiensi belanja daerah pada setiap Perangkat Daerah dan mencegah pemborosan belanja untuk keperluan yang tidak penting dan tidak bermanfaat bagi kemajuan daerah atau kesejahteraan masyarakat.	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan
<b>Inspektorat</b>		
1.	Meningkatkan pengawasan internal dan pengawasan APIP terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD dan mengalokasikan anggaran yang mencukupi sesuai dengan ketentuan untuk pelaksanaan pendukung urusan pengawasan.	Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai aturan. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD serta

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		<p>memperbaiki kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang dan terhadap ketersediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan telah diusulkan setiap tahunnya namun besaran anggaran yang disetujui tahun 2021 belum mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021 yaitu 0,6% dari Total APBD Provinsi Sumatera Barat (Anggaran Inspektorat Tahun 2021 sebesar 0,28% sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar 0,32%)</p>
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
	<b>Inspektorat</b>	
1.	Mendorong pengawasan Internal/APIP agar bisa bekerja secara maksimal dalam menindak lanjuti temuan-temuan BPK dan memperkuat tim untuk melakukan pengawasan internal secara berkesinambungan, melakukan sidak dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan SKPD.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring percepatan tindak lanjut dengan melakukan bersama OPD terkait secara berkala dan memberikan pembahasan tindak lanjut batas waktu penyelesaian;</li> <li>2. Membuat surat peringatan kepada OPD yang tidak menyelesaikan tindak lanjut sesuai batas waktu yang disepakati;</li> <li>3. Mengundang OPD terkait konsep hasil pemeriksaan BPK untuk membahas upaya percepatan penyelesaian temuan sebelum terbitnya LHP;</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan (PKPT) Berbasis Resiko.</li> </ol>
	<b>Badan Penghubung</b>	
1.	Peningkatan dan pengoptimalkan badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagai etalase Promosi Daerah dengan dukungan anggaran untuk kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh Badan Penghubung.	<p>Badan Penghubung telah melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap fasilitas yang terdapat di Anjungan Provinsi Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah yang merupakan etalase promosi daerah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Taman pada Anjungan Sumatera Barat TMII tahun 2020;</li> <li>2. Perbaikan Atap Panggung di ASB TMII tahun 2020;</li> <li>3. Rehabilitasi dan Pembangunan WC sebagai fasilitas pendukung pengunjung pada tahun 2021;</li> <li>4. Pembuatan Ruang Pusat Promosi di ASB TMII yang akan menampilkan display Produk Unggulan dari Kabupaten Kota di Sumatera Barat;</li> <li>5. Pengadaan Alat musik tradisional seperti Talempong dan Gendang Tasa untuk ditampilkan di ruang pusat promosi ASB TMII;</li> <li>6. Pelaksanaan Festival Kesenian Gamad di Gelora Bung Karno bekerjasama dengan Organisasi Ikatan Keluarga Minang se Jabodetabek tahun 2022 sebagai pengenalan salah satu budaya dari Sumatera Barat;</li> <li>7. Paket Khusus berupa penampilan beberapa kesenian dan potensi unggulan daerah dalam hal ini direncanakan Parade Silek tahun 2022;</li> <li>8. Penyambutan Tamu Negara G-20 pada saat kedatangan di Bandara Soekarno Hatta dan di ASB TMII dengan penampilan Tari khas Minang dan Souvenir produk unggulan di Bandara.</li> </ol>
	<b>BPKAD dan Bapenda</b>	
1.	Perlu dilakukan Perencanaan dan penganggaran agar Badan Penghubung dapat memberikan kontribusi terhadap PAD melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung.	Melakukan koordinasi dan monitoring dengan Badan Penghubung untuk menginventarisasi seluruh potensi pendapatan yang akan dituangkan dalam penetapan Anggaran Pendapatannya sehingga Badan Penghubung lebih optimal berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (Bapenda)
	<b>BPKAD dan Badan Penghubung</b>	
1	Menghentikan Pembiayaan anggaran sewa kantor Penghubung berjumlah Rp.1.000.000.000,-pertahun yang dibayarkan kepada PT. Balairung karena asset Bangunan yang disewa tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan sampai dengan saat ini PT. Balairung masih belum mampu untuk memberikan kontribusi terhadap PAD Prov. Sumbar.	Sesuai instruksi pimpinan, maka pada Tahun Anggaran 2023, Badan Penghubung tidak akan menampung lagi biaya sewa kantor.

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
	<b>BPKAD dan Biro Perekonomian</b>	
1	Pemerintah Provinsi meminta secepat mungkin mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan Revitalisasi PT. Balairung sehingga dapat menjadi BUMD yang sehat dan Provitabel.	Berkoordinasi dengan Biro Perekonomian yang mempunyai Tupoksi dalam hal pembinaan BUMD untuk melaksanakan Good and Clean Governance sehingga PT. Balairung dapat menerapkan manajemen pengelolaan hotel yang baik dan dapat memberikan kontribusi deviden secara optimal (Bapenda)
	<b>Bapenda</b>	
1	Menyegerakan finalisasi pencatatan dan penguasaan semua aset milik daerah/BUMD yang belum jelas atau dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga dapat dimanfaatkan untuk usaha peningkatan PAD dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.	Berkoordinasi dengan BPKAD yang mempunyai Tupoksi pengelolaan dan pencatatan aset, sehingga bisa dilakukan inventarisasi sebagai potensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2	Perlunya inisiasi dan inovasi yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah sehingga Bapenda mampu menciptakan loncatan penerimaan PAD untuk tahun-tahun berikutnya.	Perlu inisiasi dan inovasi yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah sehingga Bapenda mampu menciptakan loncatan penerimaan PAD untuk tahun-tahun berikutnya. Tindak Lanjut : Dengan melakukan inovasi dan intensifikasi kegiatan penghapusan denda dan bebas balik nama kendaraan bermotor memperbanyak layanan Samsat keliling, memperkuat koordinasi dengan Tim Pembina Samsat Provinsi berkaitan dengan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain adalah dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh stakeholder sebagai pengelola pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain Melakukan perubahan regulasi yang berkaitan dengan penyesuaian tarif Retribusi Daerah
	<b>Biro Pemerintahan dan Otda</b>	
1	Perlunya dukungan kegiatan pada Biro Pemerintahan dalam rangka Peningkatan SDM bidang Pemerintahan sampai ke tingkat terendah (Desa/Nagari)	Akan dibuat perencanaan dan penganggaran untuk melaksanakan Bimbingan Teknis dalam rangka peningkatan kualitas SDM secara bertahap.
	<b>BKD</b>	
1	Agar dilakukan pengangkatan menjadi PNS bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sudah bertugas selama lebih 15 Tahun yang berjumlah sebanyak 71 orang, 16 orang diantaranya bertugas di sekretariat DPRD dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.	1. Telah dilakukan audiensi oleh BKD dan beberapa perangkat daerah terkait beserta komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan mengikutsertakan BKPSDM Kab/kota se-Provinsi Sumatera Barat ke Kementerian PANRB pada tanggal 14 April 2022 untuk mendapatkan kejelasan dan klarifikasi terkait keberadaan tenaga honorer pada tahun 2023 serta kebijakan/solusi yang dapat diambil oleh pemerintah daerah; 2. Ditanggapi oleh pejabat Kementerian PANRB dengan : a. Sejak diterbitkan PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPK, bahwa PPK (kepala daerah) atau pejabat lainnya di lingkungan pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai Non ASN untuk mengisi jabatan ASN; b. Pegawai Non ASN yang telah bertugas pada instansi pemerintah sebelum PP ini berlaku, masih dapat melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun; c. Peluang yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai Non ASN ini adalah dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
	<b>SETWAN</b>	
1	Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat agar dapat lebih profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan penempatan Staf dan personil yang memiliki Kapabilitas SDM, Kapasitas, etos dan tanggung jawab kerja. Agar dilakukan efisiensi belanja seperti logistik, peralatan & perlengkapan, pemeliharaan/ rehabilitasi gedung dan lain-lain.	1. Profesional dalam pelaksanaan tugas : Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 PP Nomor 18 Tahun 2016, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah bekerja secara profesional dalam bentuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Tugas-tugas tersebut telah dilaksanakan oleh 87 orang ASN yang telah memiliki spesifikasi

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		<p>sesuai dengan kebutuhan jabatan.</p> <p>Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian (Struktural Eselon III), 1 (satu) orang Kasubag Rumah Tangga (Struktural Eselon IV) dan 10 (sepuluh) orang Fungsional Tertentu, serta 89 (delapan puluh sembilan) orang staf yang terdiri dari 73 (tujuh puluh tiga) orang ASN dan 16 (enam belas) orang PTT.</p> <p>Adapun jajaran pejabat struktural terdiri dari 2 (dua) Jabatan Eselon III dengan latar belakang Pendidikan S2 dan 1 (satu) orang Pejabat Eselon III berlatar belakang Pendidikan S1 dengan pengalaman tugas yang sudah cukup lama di bidangnya masing-masing. Berdasarkan data Anjab/ABK Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan angka kebutuhan pegawai sebanyak 121 orang, maka dari 87 orang ASN yang tersedia masih terdapat kekurangan sebanyak 34 orang pegawai.</p> <p>Hal ini yang menjadi penyebab atas kurangnya profesionalitas layanan ASN yaitu beban kerja yang tidak sesuai dengan jumlah ASN yang tersedia.</p> <p>Namun dengan kondisi tersebut, hampir semua capaian target kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat yang terdapat dalam Rencana Kerja DPRD termasuk Propemperda, telah dapat diwujudkan. Dengan melihat kondisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugasnya secara profesional dalam mendukung dan memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>2. Efisien dalam penyelenggaraan belanja logistik, pemeliharaan dan perawatan gedung.</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja operasi pada Sekretariat DPRD untuk belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan perawatan, telah dianggarkan sesuai dengan Standar Biaya (SHB) yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan dikalikan dengan volume atau kebutuhan riil. Dalam pelaksanaannya, pembayaran harga satu dari belanja operasi tidak pernah dilakukan di atas SHB, demikian juga dengan volume barang yang dibeli, tetap berada di bawah yang telah dialokasikan. Dengan penjelasan tersebut, dapat pengelolaan belanja operasi pada Sekretariat DPRD telah memperhatikan prinsip efektif, efisien dan akuntabel.</p>
	<b>TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b>	
	<b>Bappeda</b>	
1	APBD yang ditetapkan pada setiap tahunnya, diamanatkan untuk melakukan penyelarasan antara program prioritas nasional dan program prioritas daerah.	<p>Dapat diinformasikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran tugas pembantuan yang berasal dari Kementerian/Lembaga (APBN) selama ini tidak pernah melibatkan Pemerintah Provinsi, dan juga tugas pembantuan bersifat top down. Selama ini, Pemerintah Provinsi mendapatkan informasi terkait dengan tugas pembantuan yang berada di Provinsi Sumatera Barat setelah adanya penetapan Peraturan Presiden tentang alokasi Dana Transfer ke Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>Dapat diinformasikan bahwa menu Tugas Pembantuandari tahun ke tahun selalu berubah-ubah dan tidak sama</p>
	<b>Pendidikan</b>	
1	Mengevaluasi kembali system dan kurikulum Pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing Pendidikan Sumatera Barat.	<p>Telah dilaksanakan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan Kemendikbud RI. Kurikulum yang berjalan saat ini menggunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum 2013 (K-13);</li> <li>2. Kurikulum Merdeka Belajar;</li> <li>3. Kurikulum ini digunakan oleh Sekolah penggerak;</li> <li>4. Kurikulum Merdeka Belajar Mandiri;</li> <li>5. Kurikulum ini digunakan oleh sekolah bukan penggerak;</li> </ol>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		6. Sementara Kurikulum darurat pandemic Covid-19 sudah tidak digunakan.
2	Mengevaluasi kembali penyelenggaraan pendidikan vokasi/SMK dan membangun kemitraan dengan dunia usaha dan industry dalam upaya mensinergikan Pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat ini penyelenggaraan pendidikan vokasi/SMK sudah menyusun kurikulum bersama dunia usaha dan dunia industry;</li> <li>2. Melaksanakan rakor kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri supaya diperoleh kesepakatan tentang lulusan SMK yang bisa di serap oleh dunia usaha dan dunia industry;</li> <li>3. Membuka kelas kelas industri melalui kerjasama dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelas Industri PLN, kerjasama dengan PLN Sumatera Barat - SMKN 1 Padang dan SMKN 1 Bukittinggi;</li> <li>b. Kelas Industri Fiber Optic Telkom, kerjasama dengan PT. Telkom Sumatera Barat - SMKN 2 Padang, SMKN 1 Sintuak Toboh Gadang, SMKN 1 Bukittinggi, SMKN 4 Payakumbuh;</li> <li>c. Kelas Industri PUPR kerjasama dengan BKJW 1 Banda Aceh - SMKN 1 Padang, SMKN1 Bukittinggi, SMKN 1 Lubuk Sikaping.</li> </ol> </li> <li>4. Kerjasama Sinergitas dengan Perguruan Tinggi - Universitas Bung Hatta, Fakultas Teknik Kimia industry;</li> <li>5. Kerjasama dengan Zuri Hotel Manajemen (ZHM) dengan SMKN 6 Padang, SMKN 9 Padang dan SMKN 2 Bukittinggi;</li> <li>6. Produksi bersama batik SMK, dengan brand Braja Batik merupakan kolaborasi bersama antar kompetensi keahlian seni lukis, disain komunikasi visual dan kria batik di SMKN 4 padang, dengan kompetensi keahlian tata busana di SMKN 6 dan SMKN 8 padang, serta pemasaran oleh SMKN 2 Padang dan SMKN 3 Padang.</li> </ol>
3	Menyusun road map penyelenggaraan Pendidikan karakter dengan sasaran dan target yang jelas dan terukur.	Saat ini sedang disusun Peraturan Gubernur terkait muatan lokal yang didalamnya akan mengatur tentang pendidikan karakter dengan sasaran dan target seluruh siswa pendidikan menengah dan khusus di Sumatera Barat. Untuk kegiatan yang sudah berjalan akan terus dievaluasi seperti program Pesantren Ramadhan dan Jalur Prestasi PPDB melalui Program Tahfidz.
4	Meningkatkan Profesionalisme pengelolaan beasiswa Minangkabau untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas SDM di Sumatera Barat dan meningkatkan realisasi penerima beasiswa di saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi saat ini, merevisi Peraturan Gubernur terkait dengan pemberian beasiswa tersebut	Beasiswa yang telah dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar adalah Beasiswa Dana Rajawali yang tertuang dalam Pergub No. 1 Tahun 2020. Untuk tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian besaran sesuai dengan Standar Harga Satuan.
5	Mengalokasikan Anggaran untuk Pembangunan ruang kelas baru pada SMA/SMK se Sumatera Barat untuk meningkatkan daya tampung siswa di sekolah Negeri	Setiap tahun Dinas Pendidikan telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan RKB Sekolah dimana juga menjadi program unggulan Gubernur Sumatera Barat dan untuk TA 2022 terdapat 47 sekolah yang akan di lakukan pembangunan RKB.
6	Mengalokasikan anggaran untuk lanjutan pembangunan SMA Negeri 3 Sumatera Barat yang berada di Kab. Pasaman yang pada saat ini pada kondisi yang memprihatinkan.	Sesuai Progul Gubernur untuk melaksanakan Program Unggulan Unit Sekolah Baru untuk meningkatkan daya tampung sekolah maka untuk tahun 2023 akan menjadi renja prioritas Dinas Pendidikan.
7	Mendorong agar Komite Sekolah SMA/SMK agar tidak menetapkan uang sumbangan Komite yang diwajibkan kepada setiap Siswa setiap bulan dengan nilai yang memberatkan, dan memberikan keringanan kepada yang kurang mampu, membebaskan keluarga miskin dari biaya apapun.	Sekolah-sekolah akan disosialisasikan kembali bahwa komite tidak boleh mewajibkan besaran setiap bulan namun bersifat sumbangan sukarela bagi orangtua siswa mampu sebagai kontribusi terhadap kemajuan pendidikan sesuai PP 48 tahun 2008 bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Khusus siswa kurang mampu pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah memberikan bantuan dalam bentuk program PIP dan PKH.
	<b>Kesehatan</b>	
1	Optimalisasi program perbaikan gizi dan imunisasi lengkap anak-anak usia 0-11 dalam upaya menyiapkan generasi yang sehat dan cerdas untuk masa yang akan datang	1. Program perbaikan gizi masyarakat terutama penurunan prevalensi balita stunting menjadi merupakan program prioritas karena dampaknya terhadap sumber daya manusia masa depan;

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		<p>2. Secara umum masalah gizi di Sumatera Barat telah mengalami perbaikan dengan menurunnya prevalensi balita stunting. Terjadi tren penurunan balita stunting untuk 5 (lima) tahun terakhir, dimana prevalensi balita stunting sebesar 30,6% tahun 2017, sebesar 29,9% tahun 2018, sebesar 27,47% tahun 2019, sebesar 26,71% tahun 2020 dan sebesar 23,3% tahun 2021;</p> <p>3. Penyebab Masalah Gizi merupakan akibat dari berbagai faktor yang saling terkait. Ada dua faktor langsung yang mempengaruhi status gizi balita, yaitu faktor konsumsi makanan dan penyakit infeksi yang keduanya saling mempengaruhi. Kualitas lingkungan hidup terutama adalah ketersediaan air bersih, sarana sanitasi dan perilaku hidup sehat seperti kebiasaan cuci tangan dengan sabun, buang air besar di jamban, tidak merokok, sirkulasi udara dalam rumah dan sebagainya. Faktor yang dapat berpengaruh pada semua faktor langsung dan tidak langsung, yaitu situasi politik, ekonomi dan sumber daya yang ada, yang meliputi sumber daya lingkungan, perubahan iklim, bencana dan sebagainya. Namun pada akhirnya kemiskinan adalah akar masalah kekurangan gizi;</p> <p>4. Upaya Perbaikan Gizi dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Ibu hamil KEK dan Balita kurus; Pemberian suplementasi obat gizi seperti : vitamin A pada bayi dan balita, Tablet Tambah darah (TTD) pada ibu hamil dan remaja puteri;</li> <li>b. Pelatihan pemberian makan bayi dan Anak (PMBA) di kab/kota dan puskesmas;</li> <li>c. Peningkatan kapasitas petugas dalam Proses Asuhan Gizi (PAG) di Puskesmas;</li> <li>d. Pelacakan dan konfirmasi masalah gizi;</li> <li>e. Pelaksanaan Surveilans gizi melalui e-PPGBM;</li> <li>f. Monitoring dan evaluasi Kegiatan program gizi ke kab/kota dan puskesmas;</li> <li>g. Gerakan 1.000 HPK (1000 Hari Pertama Kehidupan);</li> <li>h. Program Intervensi spesifik : Makanan Tambahan untuk mengatasi KEK pada ibu hamil, Tablet Tambah Darah untuk mengatasi anemia pada ibu hamil, Konsumsi Garam Beriodium, ASI Eksklusif, Imunisasi, Pemberian ASI sampai usia 2 tahun didampingi dengan Makanan Pendamping ASI (MP ASI) adekuat, Pemberian Obat Cacing, Pemberian Makanan Tambahan, Pemberian Vitamin A, Tata Laksana Gizi Buruk, Penanggulangan Malaria, Pencegahan dan Pengobatan diare;</li> <li>i. Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT);</li> <li>j. Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus dari APBD Provinsi tahun 2021 untuk untuk 9 (sembilan) Daerah Stunting lokus stunting;</li> <li>k. Pembangunan / Stimulasi Jamban Keluarga bagi KK yang mempunyai balita stunting;</li> <li>l. Advokasi Penggunaan Anggaran Dana Desa bagi Daerah Stunting;</li> <li>m. Pembinaan Teknis Program ke kab/kota, Sosialisasi Lintas Sektor, Toma, LSM, dll: DKP (Nagari Mandiri Pangan), Dinas Kelautan Dan Perikanan (Forikan), PU, PKK DII;</li> <li>n. Pemantauan Status Gizi (PSG) : Penimbangan Massal dan Penimbangan bulanan Posyandu, Pelaksanaan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) , Pemutakhiran Data Surveilans Gizi Provinsi, Kab/kota dan Tenaga Gizi Puskesmas;</li> <li>o. Penguatan Manajemen Program &amp; Kompetensi Nakes : Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan</li> </ol>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		<p>Anak (PMBA), Proses Asuhan Gizi (PAG) di Puskesmas, Pendidikan Gizi Berbasis Masyarakat (Positive Deviance), Konseling ASI bagi Nakes di daerah Prioritas Stunting;</p> <p>p. Kerjasama dengan Unand dan Poltekes Kemenkes: PKL terpadu Mahasiswa di daerah prioritas.</p> <p>5. Pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0-11 bulan maka upaya optimalisasi yang dilakukan :</p> <p>a. Menyediakan konselling dan edukasi kesehatan mengenai manfaat dan pentingnya imunisasi;</p> <p>b. Penggunaan media social (khususnya WA) untuk menambah pengetahuan orang tua tentang imunisasi dalam masa pandemic.</p>
2	Melakukan validasi dan akurasi datapenerima JKIS.	Memperkuat koordinasi dan kalaborasi antara dinas kesehatan, puskesmas, RS/Klinik Swasta utkmemastikan layanan imunisasi berkualitas. Sistim pelaporan dan pencatatan terintegrasi, dan ketersediaan vaksin dan logistik lainnya utk menghindari hilangnya peluang.
	<b>RS. Jiwa Prof. HB. Saanin</b>	
1	Mendorong semua rumah sakit dan klinik di Sumatera Barat memanfaatkan fasilitas incenerator DLH Provinsi Sumatera Barat untuk pemusnahan limbah B3.	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin dalam proses pengajuan PKS dengan DLH Provinsi Sumatera Barat untuk pemanfaatan incenerator pemusnahan limbah B3.
2	Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, baik pelayanan medin maupun non medis serta menyediakan Operator call Center 24 jam pada semua rumah sakit milik Pemerintah Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RS. Jiwa Prof. HB. Saanin telah sukses melaksanakan rekredensialing dengan BPJS Kesehatan untuk Pelayanan Jiwa Kelas A dan Non Jiwa;</li> <li>2. Menyediakan layanan pendaftaran secara online 24 jam Layanan Call Center IGD 24 Jam;</li> <li>3. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat 24 jam.</li> </ol>
	<b>Pekerjaan Umum</b>	
1	Mengalokasi anggaran untuk urusan pekerjaan umum sesuai dengan ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.	Mengusulkan anggaran untuk urusan pekerjaan umum sesuai dengan RPJMD 2021-2026, namun dalam pelaksanaannya anggaran yang dibutuhkan disesuaikan dengan APBD yang ada.
2	Memberikan prioritas penyelesaian proyek yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat serta mencari formulasi pembiayaan untuk proyek yang terbangkalai melalui skema pinjaman atau Kerjasama dengan pihak ketiga atau dari APBN terutama untuk penyelesaian main stadium dan Gedung budaya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan review design dengan penambahan fungsi hotel dan menawarkan pada pihak swasta untuk Gedung Budaya.</li> <li>2. Melakukan pembangunan dengan prioritas bangunan sudah dapat beroperasi/dapat dimanfaatkan untuk Gedung Main Stadium</li> </ol>
3	Merevisi rencana penggunaan Gedung budaya menjadi tempat yang bernilai ekonomis dan memberikan Kontribusi terhadap Pendapat Asli Daerah.	Melaksanakan review design untuk menambah fungsi sebagai hotel sehingga dapat memaksimalkan fungsidi Gedung Kebudayaan dan dapat menambah PAD
4	Pemeratan distribusi alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan infrastuktur antar wilayah dan upaya mengerakan ekonomi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan forum OPD untuk menampung usulan Kab./Kota;</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata, Dinas Perkimtan dll.</li> </ol>
5	Menyiapkan perencanaan dan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk kebutuhan ibu kota provinsi sebagai kota besar (Fasilitas pembangunan jalan toll lingkak, pengendalian banjir, Pengentasan Banjir Kawasan Perumahan Permukiman, Penyediaan Air Bersih, Penanganan Abrasi pantai, dll).	<p>Terkait Perencanaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai telah dilakukan sejak Tahun 2012 hingga 2022 baik Pemerintah Provinsi melalui Dinas SDABK Prov. Sumbar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian Banjir Bt Lurus Maransi;</li> <li>2. Pengamanan Pantai Bungus;</li> <li>3. Pengamanan Pantai Padang.</li> </ol> <p>Dinas SDABK Prov. Sumbar berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Dirjen SDA Kementerian PUPR dan Pemko Padang terkait kelanjutan Pengendalian Banjir Bt Kasang Kandis serta Drainase Primer di Kota Padang terkait Kewenangan Pusat.</p>
6	Menambah Pembangunan jalan baru untuk evakuasi tsunami pada daerah Pesisir Pantai sebagai upaya mitigasi bencana .	Melakukan survey untuk perencanaan pembangunan jalan baru untuk evakuasi tsunami pada daerah Pesisir Pantai sebagai upaya mitigasi bencana.
7	Melakukan percepatan rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi pertanian yang rusak dalam upaya meningkatkan produksi pertanian masyarakat, dengan memberikan persentase anggaran yang lebih besar	Pada tahun 2022 dan rancangan dokumen rencana kerja pada tahun 2023 anggaran untuk bidang irigasi sudah lebih besar dibandingkan dengan kegiatan penangan sungai dan pantai.



No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
	untuk kegiatan irigasi dibandingkan dengan kegiatan Persungai atau Pantai, jika diperlukan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru yang menjadi kewenangan Provinsi	
	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat</b>	
1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas serta dukungan anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparaturnya dan mengirim aparaturnya untuk mengikuti diklat;</li> <li>2. Mengajukan surat permohonan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ke TAPD.</li> </ol>
2	Membangun sinergisitas dan Kerjasama dengan Satpol PP kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi penegakan Perda-Perda Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelaraskan program kegiatan Satpol PP Provinsi dengan program kegiatan Satpol PP Kab/Kota se-Sumatera Barat;</li> <li>2. Melaksanakan operasi gabungan antara Satpol PP Provinsi Sumatera Barat dengan Satpol PP Kab/Kota se-Sumatera Barat secara berkala dalam Penegakan Peraturan Daerah;</li> <li>3. Membuat perjanjian kerjasama antara Satpol PP Provinsi Sumatera Barat dengan Satpol PP Kab/Kota se-Sumatera Barat tentang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.</li> </ol>
3	Memasyarakatkan kembali program mitigasi bencana kepada masyarakat dalam upaya menyiapkan masyarakat terhadap potensi bencana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai mana kita ketahui Provinsi Sumatera Barat memiliki ancaman Bencana yang sangat kompleks terutama Bencana Alam, hampir seluruh potensi bencana alam ada di Sumatera Barat, dan yang paling tinggi ancamannya adalah Gempa Bumi dan Tsunami. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2022;</li> <li>2. Berkenaan dengan hal diatas Provinsi Sumatera Barat sudah membudayakan Mitigasi Bencana dalam sendi kehidupan masyarakat. Pemerintah Provinsi sudah berlakukan upaya Mitigasi tanpa henti melalui semua sektor pembangunan yang berorientasi Pengurangan Risiko Bencana diantaranya adalah menyusun rencana tata ruang, penetapan standar konstruksi bangunan, meningkatkan dan pemeliharaan EWS (Sirene Tsunami);</li> <li>3. Sedangkan Mitigasi Non Struktural yang terus menerus dilakukan adalah memberikan informasi, sosialisasi kebencanaan dengan berbagai program antara lain : 1. Sosialisasi, Komunikasi Informasi, Edukasi Rawan Bencana untuk tingkat Sekolah Satuan Aman Bencana 2. Mendorong Ketangguhan Nagari/Desa/ Kelurahan dengan Program Desa Tangguh Bencana 3. Memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas Relawan, Kelompok Siaga Bencana (KSB), Forum- Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) melalui Pelatihan Mitigasi Bencana yang tetap kita laksanakan setiap tahun.</li> </ol>
4	Menyiapkan manajemen kenbencanaan daerah yang terpadu dan saling terintegrasi dengan semua stakeholder.	Dalam upaya Penanggulangan Bencana Daerah yang terpadu dan saling terintegrasi dengan semua Stakeholder, Provinsi Sumatera Barat sudah membuat beberapa Dokumen Penanggulangan Bencana antara lain : 1. Dokumen Kajian Risiko Bencana 2. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (merupakan salah satu pedoman dalam perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang berorientasi Pengurangan Risiko Bencana) 3. Dokumen Rencana Kontigensi (dokumen ini kita ujikan dalam bentuk TTX, CPX dan Simulasi yang melibatkan semua pihak dalam Penanggulangan Bencana sesuai Tupoksi masing-masing.

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
5	Menyediakan bangunan kantor yang representatif untuk Satpol PP.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan surat ke Bapak Gubernur Sumatera Barat tentang permintaan gedung / tanah untuk Kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Mengusulkan permohonan anggaran pembangunan gedung Satpol PP ke TAPD.</li> </ol>
<b>Sosial</b>		
1	Mengalokasikan anggaran untuk program penanganan bencana pada setiap tahun anggaran, oleh karena Provinsi Sumatera Barat termasuk daerah rawan bencana.	Alokasi anggaran untuk program penanganan bencana sudah dilaksanakan setiap tahun karena merupakan jenis pelayanan pada SPM yang harus dipenuhi
2	Memberikan dukungan anggaran untuk kegiatan validasi dan akurasi DTKS.	Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan validasi dan akurasi DTKS, karena selama ini Data kemiskinan telah diakomodir oleh Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI. Updating data kemiskinan dilakukan dengan melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan 2 kali dalam satu tahun (bulan April dan November), yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten dan Kota sesuai dengan Permensos No.13 tahun 2011 tentang "PEDOMAN UMUM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU"
3	Melanjutkan program bantuan sosial lainnya yang lebih memberikan manfaat kepada masyarakat.	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan program bantuan sosial kepada masyarakat dan akan terus mengalokasikan anggaran untuk dapat memberikan program bantuan sosial yang lebih bermanfaat kepada masyarakat
<b>Tenaga Kerja</b>		
1	Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dalam upaya menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki daya saing dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.	Kondisi BLK saat ini sangat perlu dan mendesak untuk dilakukan revitalisasi, karena sebagian besar workshop tidak memadai dengan peralatan yang tidak update dengan perkembangan teknologi industri. Dukungan anggaran sangat diperlukan terutama untuk perbaikan atau pembangunan workshop. Pembangunan dan perbaikan workshop di 2 BLK provinsi tidak dapat diajukan ke Kementerian Tenaga Kerja karena adanya komitmen pusat bahwa tidak dapat menganggarkan pembangunan fisik bagi BLK daerah, kecuali jika BLK tersebut berubah status menjadi BLK Pusat atau workshop BLK Pusat. Diharapkan pembangunan fisik menjadi tanggung jawab daerah. Selanjutnya jika sudah dilakukan perbaikan fisik, maka untuk pembaruan atau bantuan peralatan dapat diajukan ke Kemnaker RI. Sudah diupayakan perbaikan workshop melalui pengajuan anggaran DED perencanaan rehab workshop BLK Payakumbuh pada mekanisme perubahan anggaran APBD. Diharapkan dukungan Anggota Dewan untuk menyetujui usulan tersebut.
2	Membangun sinergitas penyelenggaraan program ketenagakerjaan dengan Pendidikan Vokasi	Sinergitas sudah mulai dibangun antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Tenaga Kerja diantaranya melalui pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK. BKK menjadi perpanjangan tangan Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan informasi lowongan dan peluang penempatan di perusahaan. Termasuk mendata alumni SMK yang terserap dalam dunia kerja. Namun sinergitas perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi BLK, baik kerjasama penggunaan workshop maupun pelatihan guru SMK di workshop BLK. Dan dapat juga dilakukan dalam bentuk sinergitas menyiapkan SMK Unggulan yang sama-sama di suport oleh industri dan BLK baik penyusunan kurikulum khusus, dukungan sarpras, bantuan program dan pemagangan siswa.
3	Memperbanyak bursa-bursa penerimaan tenaga kerja dalam upaya meningkatkan penyaluran tenaga kerja yang terdampak pandemic covid-19 pada dunia usaha dan industri.	Setuju diperbanyak, untuk memaksimalkan bertemunya demand dari industri dengan supply pencari kerja. Akan dilakukan melalui pengusulan anggaran kegiatan job fair untuk tahun 2023. Akan ditingkatkan juga komunikasi dengan perusahaan yang belum mau menggunakan situs pemerintah untuk informasi lowongan dan masih menggunakan mekanisme rekrut tersendiri agar mau terlibat dalam bursa kerja yang dilaksanakan pemerintah baik langsung maupun online.

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
4	<p>Perlunya program lanjutan terhadap pelatihan yang telah diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana serta modal kerja.</p>	<p>pelatihan lanjutan dari pelatihan berbasis kompetensi di BLK dapat dilakukan. Pertama perlu dilakukan identifikasi minat bagi lulusan pelatihan apakah ingin memasuki kerja di sektor formal atau informal. Bagi yang berminat bekerja pada sektor informal, ini merupakan calon enterpreneur yang dapat dilanjutkan pembinaannya melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan wirausaha baru produktif atau pelatihan kewirausahaan mandiri. Dan setelah dilatih akan dibina secara berkelanjutan dengan pembentukan kelompok. Setelah itu kelompok dapat mengajukan bantuan seperti peralatan dan lain lain ke OPD yang telah ditunjuk mengelola dana bantuan dalam alokasi anggaran DAK.</p> <p>Sudah dilakukan dalam bentuk pengajuan usulan kegiatan Wira Usaha Baru (WUB) untuk mendukung capaian target enterpreneur melalui pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pada perubahan APBD 2022 dan usulan tambahan renja2023.</p>
	<b>Pangan</b>	
1	<p>Memastikan terpenuhi kebutuhan cadangan pangan terutama pangan pokok masyarakat dalam upaya antisipasi bencana.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pangan Prov. Sumbar menganggarkan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui APBD Prov. Sumbar yang mana pada tahun 2022 ini telah dilaksanakan pengadaan CPP sebanyak 140 ton;</li> <li>2. Melakukan pembinaan dan koordinasi ke Kabupaten/Kota untuk selalu menganggarkan dan menyediakan Cadangan Pemerintah Daerah melalui APBD masing-masing.</li> </ol>
2	<p>Membudayakan dan memasyarakatkan polamakan pokok selain beras dalam upaya mendukung program diversifikasi produk olahan selain beras.</p>	<p>Dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal;</li> <li>2. Promosi Diversifikasi Pangan dengan pembagian bibit Sukun TMMD/N;</li> <li>3. Gerakan/Kampanye Diversifikasi Pangan;</li> <li>4. Pelatihan Pengembangan Industri Pangan Lokal;</li> <li>5. Peningkatan Promosi Pelaku Usaha Pangan Lokal.</li> </ol>
3	<p>Untuk program pemanfaatan pekarangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan agar di serahkan pengelolaan kepada OPD yang tupoksinya lebih tepat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program/kegiatan Pemanfaatan Pekarangan adalah urusan pangan yang termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan nomenklatur berada pada Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019;</li> <li>2. Program/Kegiatan pemanfaatan pekarangan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 60 tentang Pangan yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Pangan tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dalam Pasal 26 disebutkan bahwa upaya penganeekaragaman pangan salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan;</li> <li>3. Pelaksanaan pemanfaatan pekarangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pergub nomor 66 Tahun 2020 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat pasal 17 ayat 3, yaitu salah satu tugas pokok dan fungsi Seksi Konsumsi Pangan adalah melakukan penyiapan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;</li> <li>4. Program/kegiatan pemanfaatan pekarangan adalah upaya pemberdayaan wanita melalui Kelompok Wanita</li> </ol>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		<p>Tani (KWT) untuk mengoptimalkan manfaat pekarangan, tidak hanya dengan budidaya berbagai jenis tanaman, namun juga budidaya ternak maupun ikan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);</p> <p>5. Pemanfaatan pekarangan ditujukan dalam rangka mempercepat penganekaragaman pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat untuk memenuhi konsumsi pangan dan gizi keluarga, sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga;</p> <p>6. Pemanfaatan lahan pekarangan merupakan program kegiatan yang lebih menekankan aspek konsumsi dari pada produksi, karena dilakukan sebagai pekerjaan sampingan dan berperan sebagai pendukung kehidupan sosial ekonomi rumah tangga, khususnya rumah tangga petani.</p>
	<b>Lingkungan Hidup</b>	
1	Pemerintah Daerah mempercepat penyelesaian pembangunan pengolahan limbah B3 dan penyelesaian permasalahan lahan pada Kawasan TPA Regional Sampah di Payakumbuh.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pergub kelembagaan (UPTD) Limbah B3 Medis sudah berproses dan sudah selesai proses fasilitasi dari Kemendagri (dalam tahap penetapan oleh Gubernur);</li> <li>2. Aset incinerator (mesin dan bangunan) sudah menjadi aset Pemprov. Sumbar.</li> </ol>
2	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perusakan lingkungan hidup dan memberikan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran lingkungan hidup dalam upaya memberikan efek jera kepada pelaku perusak lingkungan hidup.	<p>Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan. Pelaksanaannya pengawasannya dapat dilakukan secara terkoordinasi antara Pemprov dengan Pemkab/kota dan/atau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun tindak lanjut dari pengawasan tersebut berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan/persetujuan lingkungan diterbitkan Pemprov Sumbar atas pelanggaran terhadap izin lingkungan/ persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dalam penerapan sanksi dilaksanakan berdasarkan kewenangan penerbitan izin lingkungan;</li> <li>2. Menyampaikan surat tindak lanjut kepada instansi lingkungan hidup kab/kota terkait rekomendasi pemberian sanksi administratif atas pelanggaran izin lingkungan/ persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup hasil pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup kab/kota;</li> <li>3. Menyampaikan surat tindak lanjut ke Kementerian LHK karena Izin Lingkungannya diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li> <li>4. Menyampaikan surat kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut apabila tidak ada yang kegiatan dilapangan setelah diterbitkannya Izin lingkungan atau pelanggaran yang tidak signifikan.</li> </ol> <p>Beberapa contoh kegiatan pengawasan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Pelindo II Teluk Bayur Padang Pengawasan pada Januari 2022 secara terkoordinasi antara Balai Gakkum Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru dengan DLH Provinsi Sumatera Barat dan DLH Kota Padang terkait tumpahan CPO di Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Pada tanggal 01 April 2022 pihak Pelindo telah dipanggil oleh Gakkum KLHK untuk pemberian keterangan. Kewenangan tindak lanjut dari hasil pelanggaran menjadi Kewenangan KLHK karena Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh KLHK.</li> <li>2. PT. Kencana Sawit Indonesia di Kab. Solok Selatan. Telah dilakukan verifikasi lapangan oleh DLH prov. Sumbar, DLH Kab. Dharmasraya dan Dinas PerkimLH Kab. Solok Selatan pada 2-4 Februari 2022 sebagai tindak lanjut dari jebolnya IPAL. Hasil verifikasi lapangan dan temuan ketidaktaatan telah disampaikan</li> </ol>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		<p>melalui surat ke KLHK karena dokumen lingkungan hidupnya diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. KLHK melalui Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Adminitrasi, telah menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan dan meminta DLH Prov Sumbar, DLH Kab. Dharmasraya, Dinas Perkimtan LH Kab. Solok Selatan untuk secara bersama-sama melakukan pengawasan.</p> <p>Tindaklanjuti dari hasil pengawasan masih menunggu dari KLHK sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>3. CV. Andalas Samudera Sejati (CV. AAS). Pengawasan terhadap kegiatan KJA CV. AAS pada tanggal 31 Maret 2022 dan telah melakukan tindaklanjuti dengan penyampaian hasil ketaatan dari pelaksanaan pengawasan melalui surat Nomor 660/407/P2KLPHL-2022 tanggal 27 April 2022 perihal: Tindaklanjuti Hasil Pengawasan CV Andalas Samudera Sejati.</p> <p>4. Daftar Sanksi Administrasi yang diterbitkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat :</p> <p>a. 660/46/P2KLPHL/DLH-2022 Tanggal 21 Juni 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Tidar Kerinci Agung di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan;</p> <p>b. 660/53/P2KLPHL/DLH-2022 Tanggal 26 September 2022 tentang Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot Sipora di Desa Matobe Kec. Sipora Selatan Kab. Kep. Mentawai;</p> <p>c. 660/54/P2KLPHL/DLH-2022 Tanggal 26 September tentang Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot Sipora Pengembangan Bandar Udara Rokot Sipora Di Desa Matobe Kec. Sipora Selatan Kab. Kep. Mentawai;</p> <p>d. 660/65/P2KLPHL/DLH-2022 Tanggal 22 November tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. Bukit Asam, Tbk Unit Pertambangan Ombilin Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) beserta Dermaga Loading dan Unloading di Teluk Bayur Kota Padang;</p> <p>e. 660/73/P2KLPHL/DLH-2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Carocok Tarusan Kec. Koto XI Kab. Pesisir Selatan;</p> <p>f. 660/72/P2KLPHL/DLH-2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pantai Gandorih – Pantai Sunur oleh Dinas Pekerjaan Umum Pnaatan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman;</p> <p>g. 660/74/P2KLPHL/DLH-2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT. Bukit Raya di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan.</p>
3	<p>Memberikan Peringatan keras dan sangsi kepada industri yang masih melakukan Pelanggaran Lingkungan Hidup diatas ambangbatas sesuai dengan ketentuan, seperti Pabrik Semen Padang yang masih menimbulkan Polusi Udara berupa asap dan debu yang sengaja dilakukan saat operasional pada malam hari, Pencemaran akibat Pengelolaan Limbah Pabrik Kelapa Sawit, Pelabuhan Teluk Bayur, Perhotelan, Rumah Sakit, Bengkel dan industri lainnya.</p>	<p>Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam sistem penganggaran sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berdasarkan kewenangan terkait dengan penerbitan izin lingkungan. Namun demikian apabila ada permintaan dari pemkab/kota untuk dilakukan pengawasan secara terkoordinasi atau ada pengaduan masyarakat akan tetap diakomodir untuk ditindaklanjuti.</p>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		<p>Sanksi administratif yang telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan pada Tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) meliputi 2 (dua) sanksi di sektor perkebunan dan pabrik kelapa sawit, 2 (dua) sanksi terhadap sector transportasi udara, 1 (satu) sektor transportasi laut dan 2 (dua) instansi pemerintah.</p> <p>Kegiatan rumah sakit dan hotel sebagian besar merupakan kewenangan kabupaten/kota. Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup untuk rumah sakit dan hotel yang menjadi kewenangan Pemkab/kota dilakukan melalui Program Penilaian Kerja Lingkungan Daerah (PROPERDA).</p> <p>1 objek hotel yang merupakan kewenangan kota hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi atas rekomendasi dari DLH Provinsi Sumbar sesuai dengan hasil pengawasan secara terkoordinasi.</p> <p>Kegiatan perbengkelan merupakan kewenangan kabupaten/kota sehingga pengawasan dan pemberian sanksinya dilakukan oleh kabupaten/kota.</p> <p>Untuk pelabuhan teluk bayur masih menunggu Sanksi dari KLHK sebagai tindaklanjut dari pengawasan secara terkoordinasi antara KLHK, DLH Prov Sumbar dan DLH Kota Padang sebagai tindaklanjut dari tumpahan CPO dan sudah ada pemanggilan oleh Balai Gakkum Sumatera Wilayah II Pekanbaru.</p> <p>Tumpahan CPO di Pelabuhan Teluk Bayur pada saat loading dari kapal ke PT Padang Raya Cakrawala telah diberikan sanksi administratif oleh DLH Kota Padang sebagai tindaklanjut rekomendasi dari DLH Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Terhadap kegiatan PT. Semen Padang yang dari kegiatannya menghasilkan debu. Dimana berdasarkan data swapantau yang telah dilakukannya dibuktikan dengan hasil analisa laboratorium memenuhi baku mutu baik secara manual maupun Sistem Pemantauan Emisi Berkelanjutan / Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS). Untuk kinerja lingkungannya PT. Semen Padang telah menyampaikan laporannya sesuai dengan kewajibannya. PT. Semen Padang merupakan salah satu objek PROPER dan pada Tahun 2022 berperingkat Hijau yang ditetapkan oleh melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SIMPEL) sebagai mekanisme dalam PROPER.</p>
4	Memberikan dukungan penuh terhadap Pembangunan Sarana pelengkap, Kebutuhan operasional incenerator sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas BMCKTR sudah membangun TPS Limbah B3 TA 2022;</li> <li>2. Jalan akses sudah dilakukan pembangunan TA 2022.</li> </ol>
5	Pemerintah Daerah mempercepat penyelesaian Pembangunan pengolahan limbah B3 dan penyelesaian permasalahan lahan pada Kawasan TPA Regional Sampah di Payakumbuh	Pergub kelembagaan (UPTD) Limbah B3 Medis sudah berproses dan sudah selesai proses fasilitasi dari Kemendagri (dalam tahap penetapan oleh Gubernur). Aset incenerator (mesin dan bangunan) sudah menjadi aset Pemprov. Sumbar.
<b>NO</b>	<b>REKOMENDASI DPRD DAN PANSUS</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
	<b>Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>	
1	Menjadikan desa sebagai basis dan ekonomi dan basis pengentasan kemiskinan melalui program dan optimalisasi dana desa.	Sudah, Optimalisasi Desa sebagai basis ekonomi, Sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.1/60/DPMD-2022 tanggal 7 february 2022 tentang Penggunaan Dana Desa, dimana sesuai Perpres 104/2021 bahwa Dana Desa diantaranya digunakan untuk kebutuhan Pangan dan Hewani, sehingga dalam hal ini Gubernur memerintahkan kepada Bupati/Walikota Penerima Dana Desa untuk melakukan penguatan ekonomi masyarakat desa pasca COVID 19 sesuai dengan Perpres dimaksud, dengan meningkatnya ekonomi masyarakat di Desa berimbas pada pengentasan kemiskinan di Nagari/Desa.
2	Mensinergikan program dan kegiatan yang dibiaya dari APBd provinsi/kabupaten/ Nagari dalam upaya mempercepat pembangunan dan pengembangan Nagari.	Setiap tahunnya kita Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kemudian untuk perkembangan desa/nagari juga dapat dilihat dari data IDM

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		yang diverifikasi setiap tahunnya mulai dari nagari, Kab/Kota, dan Verifikasi akhir tingkat Provinsi, untuk intervensi indikator ketertinggalan setiap tahun dilakukan Rapat Koordinasi IDM antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat.
3	Memberikan fasilitasi dan dukungan kepada daerah kabupaten/Nagari untuk menerapkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari berbasis hukum adat.	<p>1. Tahun 2018 Tahun 2018, Nagari Adat Percontohan ada 2, yaitu : Nagari Lawang, Kec. Matur, Kab. Agam, Nagari Painan, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan. Pada Tahun yang sama juga telah dibuat Buku Pedoman Umum Perda 7 tahun 2018 dan Sosialisasikan ke 19Kab/kota. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018: Sosialisasi, dengan peserta berjumlah sebanyak 240 orang yang berasal dari Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan. FGD 90 orang dari Kab. Pesisir Selatan, 90 orang dari Kab. Agam, Bimtek 100 orang dari Kab. Pessel, 100 org dari Kab. Agam, Pembinaan ke Kab. Agam dan Kab. Pessel.</p> <p>2. Tahun 2019 Pada tahun 2019, Nagari Adat Percontohan bertambah 9 nagari, yaitu : Nagari Taram, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota Nagari Andaleh Baruah Bukik, Kec. Sungayang, Kab. Tanah Datar Nagari Aie Manggih, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman KAN Pauh IX, Kec. Kuranji, Kota Padang Nagari Pakan Sinayan, Kec. Banuhampu, Kab. Agam Nagari Sungai Pua, Kec. Sungai Pua, Kab. Agam Nagari Tigo Balai, Kec. Matur, Kab. Agam Nagari Kapau, Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam Nagari Garagahan, Kec. Lubuk Basubg, Kab. Agam Kegiatan yang dilaksanakan : Bimtek 150 orang dari Kab. Pessel, 188 org dari Kab. Agam, 100 orang dari Kab. Tanah Datar, 50 org dari Kota Padang, FGD 50 orang dari Kab. Pesisir Selatan, 75 orang dari Kab. Agam, 13 orang dari Kab. Tanah Datar, 13 orang dari Kab. 50 Kota, 13 orang dari Kab. Pasaman, 11 org dari Kota Padang. Bimtek Pengelolaan Administrasi Nagari Adat Percontohan bagi Nagari Lawang, Kecamatan Matur di Kab. Agam dan Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai di Kab. Pesisir Selatan Peserta kegiatan Bimtek, FGD berasal dari unsur pemberdayaan masyarakat Kab/Kota, Camat, Wali Nagari/Lurah, Ketua dan Pengurus KAN, Bundo Kandung, Niniak Mamak, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LKAAM Kecamatan dan Kabupaten/Kota.</p> <p>3. Sedangkan pada tahun 2020 ini tidak dilaksanakan dikarenakan anggaran belanja kegiatan ini di refocusing karena COVID 19, dan untuk tahun 2021 anggaran ini juga di Refocusing. Karena Perda ini merupakan Perda Pilihan sehingga dalam pembentukan nagari/desa adat sampai saat ini masih belum terlaksana, dikarenakan belum adanya usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mentransfor masikan Nagari/desa sebagai Desa Adat.</p>
4	Melakukan Percepatan penerbitan Peraturan Gubernur terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan diminta agar peraturan gubernur tersebut tidak mengekang pelaksanaan peraturan daerah.	Saat ini Dinas PMD masih dalam Proses Pembahasan dengan Biro Hukum dan Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Sumatera Barat, terkait dengan : 1. Draft Ranpergub tentang bantuan keuangan kepada pemerintah Nagari/desa; 2. Draft Ranpergub tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
	<b>Perhubungan</b>	
1.	Melakukan Kerjasama pengelolaan Terminal Type B dengan pihak ketiga dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan Terminal dan meningkatkan kontribusi pada penerimaan daerah.	Pada tahun 2022 belum ada Kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan Terminal dan meningkatkan kontribusi pada penerimaan daerah, namun pada tahun 2022 ini dalam upaya

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		mengoptimalkan penerimaan dan meminimalisir kebocoran PAD, sudah dilakukan MoU dengan Bank Nagari Syariah untuk menggunakan aplikasi e retribusi (non tunai) dalam pemungutan retribusi terminal dan baru dilakukan di terminal Bukit Surungan Padang Panjang.
2	Mengalokasikan anggaran untuk pembuatan marka jalan dan lampu penerangan jalan provinsi, Ramburambu pada tempat-tempat rawan dan strategis serta pembuatan marka Zona Selamat Sekolah (ZOS) di jalan provinsi pada lokasi sekolah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di jalan Provinsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruas Jalan Batusangkar – Ombilin P.070;</li> <li>b) Ruas Jalan Rao – Rokan (batas Riau) P. 095;</li> <li>c) Ruas Jalan Panti – Simpang Empat P.031;</li> <li>d) Ruas Jalan Padang Aro – Lubuk Malako P.096 melalui sub kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.</li> </ol> </li> <li>2. Untuk Tahun 2022 kami telah mengalokasikan anggaran untuk pemasangan perlengkapan jalan. <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Belanja Komponen Rambu – Rambu di ruas Jalan Padang Aro – Lubuk Malako P.096 di Kab. Solok Selatan (Lanjutan);</li> <li>b) Belanja Komponen Rambu – Rambu Ruas jalan teluk bayur – nipah -purus dan Kawasan Mesjid Raya melalui kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;</li> <li>c) Pengadaan Pemasangan Rambu RPPJ Wisata di Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pariaman, dan Kab. Agam.</li> </ol> </li> <li>3. Untuk pembuatan marka jalan dan lampu penerangan jalan provinsi, Rambu – Rambu pada tempat – tempat rawan dan strategis serta pembuatan marka Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di jalan Provinsi pada lokasi Sekolah akan dialokasikan anggaran tahun 2023;</li> <li>4. Untuk Pembuatan marka Zona Selamat Sekolah di jalan Provinsi kami akan berkoordinasi dengan Dinas BMCKTR terhadap kondisi permukaan jalan.</li> </ol>
3	Merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan dermaga pada Danau yang menjadi Kewenangan Provinsi sehingga dapat dikelola menjadi sumber PAD	Secara lintasan Danau yang menjadi kewenangan provinsi hanya Danau Singkarak yg menghubungkan 2 Kabupaten yaitu Kab. Tanah Datar dan Kab. Solok. Hanya saja dari kajian yg dilakukan Ditjen Perhubungan Darat, Danau Singkarak "Potensinya Pariwisata" dan sekarang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sementara untuk angkutan orang dan barang lebih efektif dan efisien melalui akses darat (jalan lingkar) yg sudah ada di sekeliling danau.
4.	Meningkatkan koordinasi dinas Perhubungan dengan Kab/Kota terkait Pengawasan tonase kendaraan, khususnya yang menempuh ruas jalan Provinsi agar dapat menghindari kerusakan jalan yang lebih parah dan akan membuat biaya pemeliharaan yang lebih tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Koordinasi dengan Dishub Kota Padang Kab. Dharmasraya, Solok Kota, Kab. 50 Kota dan Kab. Padang Pariaman terkait Pelaksanaan pengawasan Kendaraan Angkutan Penumpang umum / Barang (Tonase) dengan pola sidang di tempat;</li> </ol> <p><b>(Rik saran morgabpolsipat )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan pengawasan Kendaraan Angkutan Penumpang umum / Barang (Tonase) dengan pola sidang di tempat (Rik saran morgabpolsipat) di Kota Padang Kab. Dharmasraya, Solok Kota, Kab. 50 Kota dan Kab. Padang Pariaman,</li> <li>3. Melakukan Koordinasi dengan Dishub Kota Bukittinggi terkait pelaksanaan pengawasan Kendaraan Angkutan Penumpang umum / Barang (Tonase) dengan pola sidang di tempat <b>(Rik saran morgabpolsipat )</b></li> <li>4. Akan Melaksanakan pengawasan Kendaraan Angkutan Penumpang umum / Barang (Tonase) dengan pola sidang di tempat <b>(Rik saran morgabpolsipat)</b> di Kota Bukittinggi</li> <li>5. Akan Melakukan Koordinasi dengan Dishub Kota Sawahlunto / Kab. Sijunjung terkait pelaksanaan pengawasan Kendaraan Angkutan Penumpang umum / Barang (Tonase) dengan pola sidang di tempat <b>(Rik saran morgabpolsipat )</b></li> <li>6. Akan Melaksanakan pengawasan Kendaraan</li> </ol>



No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		<p>Angkutan Penumpang umum / Barang (Tonase) dengan pola sidang di tempat (<b>Riksaranmorgabpolsipat</b>) di Kota Sawahlunto / Kab. Sijunjung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Telah dilakukan Koordinasi ke Dishub Kab 50 Kota dan Dishub Kab. Tanah Datar untuk pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Jalan Provinsi dengan Prioritas yang mengalami rusak berat pada ruas jalan Batas Kota Payakumbuh – Halaban – Sp. Setangkai ( P. 044 )</li> <li>8. Telah dilakukan pengambilan titik lokasi Survey pada ruas jalan tersebut.</li> <li>9. Melakukan survey pengambilan sample untuk data Inspeksi Keselamatan Jalan ( IKJ ) pada ruas Jalan P. 044.</li> <li>10. Melakukan koordinasi Tim untuk tindak lanjut IKJ bersama Tim Ahli dan Instansi Terkait lainnya.</li> <li>11. Melakukan Konsinyering dengan Tim Ahli</li> <li>12. Koordinasi Tim IKJ dan Tim Ahli untuk data dan penyusunan Dokumen IKJ</li> <li>13. Melaksanakan FGD dengan unsur – unsur terkait</li> <li>14. Ekspose Akhir Dokumen IKJ</li> <li>15. Cetak Dokumen IKJ dan Pendistribusian serta pelaksanaan untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait sesuai rekomendasi</li> <li>16. Koordinasi dengan Dishub Kab/Kota terkait rencana pengawasan setelah IKJ dan perencanaan untuk IKJ Tahun berikutnya</li> <li>17. Melakukan Koordinasi dengan Dishub Kab. 50 kota, Pesisir Selatan dan Kota Bukittingi terkait Pembuatan Draft Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( RAK – LLAJ )</li> <li>18. Melakukan Rapat koordinasi tentang pelaksanaan Pembuatan Draft Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( RAK – LLAJ )</li> <li>19. Melaksanakan proses dan tindak lanjut pembuatan Draft Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( RAK – LLAJ )</li> <li>20. Melaksanakan Rapat Koordinasi FLLAJ Prov. Sumbar tentang penyelenggaraan /pengawasan Angkutan ODOL menuju Zero ODOL 2023 dengan Dishub Kab / Kota Se – Sumbar, BPTD Wil – III Prov. Sumbar, Ditlantas Polda Sumbar dan Anggota Forum LLAJ lainnya</li> <li>21. Berkoordinasi dengan Dishub Kab. Agam, Kota Padang, BTPD Wil – III Prov. Sumbar, Ditlantas Polda Sumbar dan Instansi terkait lainnya melakukan pemotongan kendaraan ODOL berdasarkan barang bukti hasil pengawasan oleh BPTD Wil – III Prov. Sumbar di bengkel karoseri jl. By - Pass Padang</li> <li>22. Melaksanakan seminar Daerah penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan mengikutsertakan penguji Kendaraan Bermotor</li> </ol>
	<b>Komunikasi Dan Informasi, Statistik,Persandian</b>	-
1.	Mewajibkan setiap OPD dan Badan Publik yang pembiayaannya sepenuhnya atau sebagian dari APBD Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun SOP terkait keterbukaaninformasi di OPD setempat.	<p>Pada Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, telah dijelaskan terkait SOP PPID/Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut :</p> <p>Pada Bab II Pasal 10 tentang SOP PPID, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;</li> <li>2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;</li> <li>3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;</li> <li>4. SOP Penanganan Keberatan Informasi;</li> <li>5. Informasi Publik;</li> <li>6. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.</li> </ol>
2.	Mewajibkan kepada setiap OPD untuk menyampaikan informasi publik yang menjadi tugas dan tanggungjawabkan secara berkala kepada masyarakat.	<p>Pada Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, telah dijelaskan terkait kewajiban setiap OPD untuk menyampaikan informasi publik yang menjadi tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada masyarakat pada</p>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		<p>BAB III Pasal 12, 13, dan 14.</p> <p>Telah disampaikan kepada PPID Pelaksana/OPD untuk segera menyusun dan mempublis Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2022 pada web PPID Utama Prov. Sumatera Barat : <a href="https://ppid.sumbarprov.go.id">https://ppid.sumbarprov.go.id</a>, melalui Surat No. 555/513/Diskominfotik/2022 perihal Permintaan Daftar Informasi Publik.</p>
3.	Mempercepat pelaksanaan Perda SPBE dan Perda tentang Persandian untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.	<p>Terkait pengelolaan Perda SPBE, sudah ditetapkan 4 (empat) Pergub yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pergub no. 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran berbasis elektronik;</li> <li>2. Pergub no. 15 Tahun 2018 tentang Pengembangan sistem aplikasi pemerintahan provinsi sumatera barat</li> <li>3. Pergub no. 59 Tahun 2020 tentang Rencana Induk sistem pemerintahan berbasis elektronik;</li> <li>4. Pergub no. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Nama domain dan sub domain.</li> </ol> <p>Untuk penerapan Perda SPBE oleh seluruh OPD lingkup Pemprov Sumatera Barat, telah dikeluarkan edaran Gubernur terkait pemanfaatan aplikasi dan infrastruktur yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edaran Gubernur No. 555/261/ Diskominfo-2021 tgl 30 April 2021, perihal pemanfaatan aplikasi dan jaringan;</li> <li>2. Edaran Gubernur No.555/539/ Diskominfotik-2021 tgl 29 oktober 2021, perihal pemanfaatan aplikasi dan jaringan TIK satu pintu.</li> </ol> <p>Terkait tentang percepatan pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan perda dimaksud. Untuk pembentukan Pergub tersebut telah dipersiapkan draft rancangan Pergub Pelaksanaan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.</li> <li>2. Pada saat ini draft rancangan Pergub dimaksud sedang dalam proses koordinasi dan penguatan materi dengan stake holder terkait</li> </ol>
4.	Mengalokasikan anggaran pembangunan Video Tron di Kab/kota yang dapat digunakan sebagai media Informasi dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat, sarana Promosi wisata, produk UKM, dan dapat dikelola sebagai Media Promosi/Iklan yang akan memberikan Pendapatan Asli Daerah	Akan diusulkan anggaran pembangunan Videotron di Kab/Kota se-Sumatera Barat melalui APBD Prov. Sumatera Barat tahun anggaran 2023
	<b>Koperasi Dan Ukm</b>	
1.	Mempercepat digitalisasi produk UKM dan mendekatkan UKM dengan starup untuk memperluas pemasaran produk UKM.	Melaksanakan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh UPTD Balatkop, Bidang PUK dan PLUT KUKM serta OPD terkait.
2.	Memprogramkan bantuan Permodalan dan kredit bersubsidi untuk UKM agar UKM dapattumbuh dengan baik.	Melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terkait akses pembiayaan dari Perbankan maupun Non Perbankan yang dilaksanakan UPTD Balatkop, Bidang PUKdan PLUT KUKM serta OPD terkait
3.	Membangunan dan memperat kembali hubungan kemitraan UKM dengan dunia usaha dan industry serta perantau untukmeningkatkan pengembangan UKM.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan temu bisnis di luar provinsi dengan melibatkan KADIN, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat dan Organisasi Perantau Minang.;</li> <li>2. Aktif menjalin komunikasi dengan perantau melalui media social seperti WAG. Dll.</li> </ol>
4.	Mendorong pertumbuhan UKM - UKM baru sebagai penggerak ekonomi rakyat dalam peningkatan kesejahteraan, melalui program- program yang nyata, terukur dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.	<p>Ada 3 tahapan yang dilakukan dalam pengembangan UMKM yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tahapan Pencari Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun rancangan kewira usahaan di Sumatera Barat</li> <li>- Menyusun naskah akademik kewirausahaan</li> <li>- Menyusun modul pelatihan wirausaha baru</li> <li>- Pendampingan wira usaha baru</li> </ul> </li> </ol>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilot project wirau saha baru</li> <li>- Monitoring dan evaluasi terhadap wirausahabaru</li> </ul> <p>2 Tahapan Wirausaha Pemula</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi perizinan seperti NIB, PIRT, sertifikasi halal dan merk</li> <li>- Fasilitasi akses pembiayaan perbankan dan non perbankan</li> </ul> <p>3 Tahapan Wirausaha Naik Kelas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi berbagai kebutuhan UMKM melalui PLUT</li> <li>- Melakukan temu bisnis dengan pelaku usaha di Luar Provinsi</li> <li>- Mempromosikan usaha UMKM melalui berbagai medsos dan perantau di berbagai belahan dunia</li> </ul>
5.	Dinas Koperasi agar menetapkan target pertumbuhan UKM yang ada menjadi UKM -UKM yang unggul melalui Program kegiatan yang memberikan manfaat langsung.	<p>Sesuai sasaran "Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera" sebagaimana tertuang di RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, maka indikator kinerja sasaran adalah "Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil" yaitu 2,4 tahun 2022, 3,1 tahun 2023, 3,8 tahun 2024, 4,5 tahun 2025 dan 5,2 tahun 2026.</p>
	<b>Kelautan Dan Perikanan</b>	
1.	Melakukan penanganan dan penataan budi daya ikan keramba danau maninjau secara terpadu agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi dan juga perlu mengantisipasi terjadinya permasalahan yang sama di danau singkarak.	<p>Pengalihan mata pencarian dari keramba ke usaha lain (Mata Pencarian Alternatif/MPA) dan sosialisasi antara lain bantuan paket bioflok, pelatihan dan pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)</p>
2.	Mendorong Pemerintah Pusat untuk mengalihkan kewenangan ikan air tawar menjadi kewenangan Provinsi dan sambil menunggu peralihan kewenangan, perlu dilakukan kerjasama pengelolaan ikan air tawar antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.	<p>Surat Ditjen Budidaya KKP-RI tanggal 04 Oktober 2021 No. B.22151/ DJPB /X/2021 tentang kewenangan budidaya air tawar dan payau sebagai balasan atas surat Gubernur tanggal 12 Juli 2021 No. 523/984/DKP/VII/2021 tentang kewenangan budidaya air tawar. Tahun 2023 dapat dialokasikan bantuan sarana dan prasarana budidaya air tawar.</p>
3.	Mengalokasikan anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat untuk premi asuransi bagi nelayan kecil.	<p>Dilakukan penyusunan pergub sebagai peraturan pelaksanaan Perda No.4 Tahun 2021, sebagai dasar hukum untuk penganggaran premi asuransi nelayan.</p>
4.	Mengalokasikan Anggaran untuk penyediaan Sarana Teknologi dalam mendukung usaha Perikanan Tangkap Masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para Nelayan seperti dengan penyediaan Teknologi Smart Fishing	<p>Akan diusulkan melalui perubahan/ penambahan anggaran Tahun Anggaran 2023.</p>
5.	Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Pabrik Pakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Barat dan dapat dikelola untuk memberikan Pendapatan Asli Daerah.	<p>Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 64 tahun 2021 tentang penetapan Kampung Ikan. Di Kabupaten Pasaman akan dibangun 1 unit Pabrik Pakan.</p>
6.	Melakukan pengendalian, penertiban, penindakan terhadap usaha tambak udang milik perusahaan atau pribadi yang rata-rata dibangun pada daerah sepadan pantai yang sudah melanggar undang-undang tata ruang	<p>Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor : 1011/INST-2021 tentang moratorium tambak udang vaname tanggal 15 Juli 2021 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghentikan pembukaan lahan baru untuk pembangunan tambak-tambak udang vaname yang tidak mempunyai izin dan yang belum diakomodir dalam perda tentang RTRW;</li> <li>2. Mendata dan melakukan evaluasi kegiatan tambak udang yang sudah beroperasi;</li> <li>3. Bagi Kab/Kota yang sudah mengakomodir alokasi kegiatan perikanan budidaya dalam perda tentang RTRW agar segera memproses izin usaha perikanan sesuai ketentuan berlaku;</li> <li>4. Setiap usaha budidaya tambak agar melengkapi kegiatannya dengan IPAL;</li> <li>5. Menetapkan batas sepadan pantai sesuai dengan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Sepadan Pantai.</li> </ol>
	<b>Pariwisata</b>	
1.	Melakukan inovasi promosi dan pengembangan pariwisata secara digital	<p>1. Melakukan event pariwisata secara virtual (live streaming) melalui youtube channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat;</p>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		2. Melakukan promosi pariwisata secara digital digital melalui media sosial (Facebook, Instagram).
2.	Menyusun road map yang jelas terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan mengalokasi anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan program ekonomi kreatif tersebut.	Telah dilakukan penyusunan Road Map Ekonomi Kreatif 2021-2026 (disusun tahun 2021 oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat).
3.	Menyusun master plan yang jelas untuk pengembangan geopark gunung talang yang masuk kepada pariwisata berskala internasional sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.	1. Penyusunan Master Plan Pengembangan Geopark Gunung Talang (disusun tahun 2021 oleh Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat); 2. Berkoordinasi dengan OPD terkait termasuk Pemda Kabupaten Solok terkait pengembangan kawasan gunung Talang.
4.	Mengalokasikan Anggaran untuk kegiatan explorasi kawasan wisata baru dan potensi yang ada di Provinsi Sumatera Barat sehinggalanjutnya dapat dijadikan daerah wisata.	Saat ini Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat fokus pada pengembangan Destinasi Wisata Unggulan (19 DTWU) dan Destinasi Wisata Kelas Dunia (Kawasan Gunung Talang).
5.	Mengalokasikan Anggaran untuk Pembebasan Lahan di kawasan wisata Mandeh sehingga nanti dapat digunakan untuk kebutuhan Pemerintah atau usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata	Saat ini Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat fokus pada pengembangan Destinasi Wisata Unggulan (19 DTWU) dan Destinasi Wisata Kelas Dunia (1 Destinasi).
	<b>Pertanian</b>	
1.	Mengalokasikan anggaran sektor pertanian sebesar 10 % dari APBD sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui kegiatan: 1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Alsintan); 2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (Bibit/Benih Tanaman). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian melalui kegiatan : 1. Penataan Prasarana Pertanian 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (JUT) 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (JITUT)
2.	Modernisasi sektor pertanian untuk menuju industrialisasi.	Modernisasi pertanian dilihat pada penggunaan metode budidaya yang lebih baik dan efektif, penerapan alat mesin pertanian dengan teknologi tepat guna dari mulai pengolahan lahan, pemanenan dan penanganan pasca panen, penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat guna dan mencukupi, penggunaan SDM pertanian yang lebih berkualitas, serta efisiensi penggunaan sumberdaya alam terutama air irigasi.
3.	Memberdayakan BUMD untuk menampung produksi pertanian rakyat terutama pada musim panen raya.	Sesuai dengan program Gubernur Sumbar, untuk membentuk BUMD Agro, disarankan memang perlu segera dibentuk BUMD Agro, agar produksi hasil pertanian rakyat bisa ditampung , sehingga petani sudah memiliki pasar yang jelas.
4.	Mendorong terbentuknya BUMD pada sektor perkebunan	Memberikan data potensi sub sektor perkebunan berupa data luas lahan, produksi komoditi unggulan dan data Unit Pengolahan Hasil (UPH) yang ada di Sumatera Barat kepada Kepala Daerah dalam rangka mendorong pembentukan BUMD oleh Kepala Daerah
5.	Menata, memvalidasi dan melakukan akurasi kelompok sasaran penerima bantuan.	Kelompok tani sasaran penerima bantuan melalui kegiatan dinas harus terdata dalam aplikasi Simluhtan dengan tetap berkoordinasi dan sesuai rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
6.	Melakukan penyesuaian/ peningkatan Spesifikasi Jalan Usaha Tani dari Juklak yang sudah ada, agar Pembangunan yang dilaksanakan lebih optimal dan lebih bermanfaat.	Pada Juklak disebutkan bahwa jalan usaha tani terdiri dari 2 tipe yaitu :jalan usaha tani pada lahan sawah yang lebarnya dibatasi 2,5 meter untuk mencegah alih fungsi sawah ke non sawah sedangkan jalan usaha tani pada perkebunan dan hortikultura lebar jalannya di sesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani
7.	Memberikan bantuan kepada masyarakat untuk Pemanfaatan lahan tidur/tidak tergarap agar menjadi lahan - lahan produktif.	Perlu pendataan lahan yang kondisinya merupakan lahan tidur/lahan yang tidak tergarap oleh Kabupaten/Kota, dan masyarakat yang diberi bantuan harus tergabung dalam kelompok tani, dan terdaftar di Simluhtan.

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
8.	Mengalokasikan Anggaran untuk melakukan pengukuran ulang terhadap lahan-lahan perkebunan milik perusahaan, untuk memastikan kecocokan antara Jumlah lahan inti dengan Plasma sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan dan memberikan saksi yang tegas terhadap perusahaan yang melakukan manipulasi data Karena telah mengurangi yang menjadi hak masyarakat	Pengukuran terhadap lahan-lahan perkebunan milik perusahaan, bukan merupakan tupoksi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sesuai Permentan no 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, bahwa Perusahaan Perkebunan yang mengajukan izin usaha perkebunan dengan luas >250 Ha, berkewajiban untuk membangun 20% dari lahannya untuk kebun masyarakat sekitar (plasma/mitra), dan peran Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu mendorong pelaksanaan Permentan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar telah memberikan rekomendasi teknis terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada perusahaan terkait.
9.	Dalam memberikan bantuan populasi ternak kepada kelompok penerima betul-betul harus sesuai dengan spesifikasi termasuk monitoring dalam evaluasi terhadap penerima.	Pada prinsipnya kami setuju dengan pendapat dan saran dari Bapak2 anggota DPRD, sebagai tindaklanjutnya kami sudah melaksanakan tindakan : 1. Melaksanakan survey langsung ke lapangan untuk menetapkan spesifikasi ternak sesuai juklak yang telah ditetapkan 2. Telah dilaksanakan koordinasi dan FGD dengan Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait untuk penetapan spesifikasi ternak yang akan disebarakan untuk memperkecil resiko yang merugikan peternak
<b>Kehutanan</b>		
1.	Memasyarakatkan pengelolaan hutan sosial dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar Kawasan dan sekaligus perlindungan hutan.	Pengelolaan hutan bersama masyarakat melalui Perhutanan Sosial merupakan kebijakan Nasional melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Izin kelola yang diberikan Negara kepada masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan negara memanfaatkan nilai nilai kearifan lokal masyarakat setempat, dimana masyarakat diberikan pemahaman terhadap fungsi hutan dari segi ekologi, ekonomi dan sosial serta memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tanpa merusak dan menebang kayu. Izin kelola dimaksud dapat berupa kelola kawasan, kelola usaha dan kelola kelembagaan. Pasca izin dari Menteri LHK, masyarakat diberikan pendampingan dan penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial yang berisikan potensi potensi hutan yang ada di hutan mereka. Diharapkan dengan adanya peluang masyarakat untuk memanfaatkan HHBK dan Jasa Lingkungan, dapat meningkatkan pendapatan petani hutan serta mensejahterakan mereka tanpa merusak dan menebang pohon.
2.	Memastikan kаланjutan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Hutan.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hutan yang telah disusun akan dirubah menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan lahirnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 serta PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial. Dinas Kehutanan bersama Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan beberapa diskusi dan pertemuan terkait dengan revisi Ranperda sebelumnya. Ditargetkan pada tahun 2022, Ranperda sudah rampung dan diundangkan.
3.	Memastikan kedudukan hutan adat diakui dalam system kehutanan nasional.	Hutan Adat merupakan salah satu bentuk skema Perhutanan Sosial menurut Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021. Adapun tentang usulan Hutan Adat melalui beberapa syarat yaitu adanya produk hukum daerah tentang pengakuan dan pengukuhan Masyarakat Hukum Adat pada daerah pengusul.
4.	Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap illegal logging yang terjadi di Kabupaten se Sumatera Barat yang akan menimbulkan bencana dan membahayakan masyarakat, memperketat Penerbitan Rekomendasi untuk perijinan IPK.	Pengawasan terhadap illegal logging telah di laksanakan oleh Dinas Kehutanan melalui sub kegiatan pencegahan dan pengendalian kerusakan Kawasan hutan. Saat ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026, telah ditargetkan Patroli Pengamanan Hutan sebanyak 100 kali dan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		<p>sebanyak 100 kali pada Tahun 2022.</p> <p>Terkait Penerbitan Izin IPK dapat disampaikan bahwa Pemanfaatan kayu dari luar kawasan hutan yang sebelumnya dikenal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) saat ini sesuai ketentuan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dinamakan Pemanfaatan Kayu dari Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK). Dalam implementasinya persetujuan PKKNK diberikan setelah pemohon memperoleh Perizinan di bidangnya (seperti kebun, tambang, pengembangan wilayah, dsb) dan memperoleh keterangan bebas konflik dari pemerintah dan lembaga kemasyarakatan setempat. Penerbitan PKKNK adalah implikasi dari perizinan dibidang non kehutanan, sehingga dalam pengawasan dan pengendalian selain oleh instansi kehutanan juga yang tak kalah penting adalah dari instansi lainnya.</p> <p>Kedepan hal yang akan dilakukan dalam penerbitan PKKNK adalah memastikan kegiatan non kehutanan sesuai dengan yang disampaikan dalam permohonan serta memastikan tidak ada konflik dimasyarakat.</p> <p>Selain PKKNK yang saat ini marak di Sumatera Barat adalah pemanfaatan kayu dari pemegang hak atas tanah (PHAT). Secara kewenangannya hak ases untuk penatausahaan hasil hutan terhadap pemanfaatan kayu dari PHAT diberikan oleh UPT Kementerian LHK (Balai Pengelolaan Hutan Produksi/ BPHP) dengan melampirkan dokumen lingkungan dan rekomendasi dari kepala daerah Kabupaten/Kota. Saat ini sedang dimintakan penjelasan melalui Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kepada BPHP Wilayah III Pekanbaru untuk meminta penjelasan mengenai kriteria, mekanisme dan NSPK terhadap pemberian hak ases penatausahaan hasil hutan sebagai masukan terhadap instrumen pengendalian yang akan dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.</p>
5.	Mengalokasikan Anggaran untuk kegiatan Reboisasi pada daerah hutan yang sudah rusak akibat penebangan liar khususnya pada daerah resapan air di hulu sungai	<p>Pada Tahun 2022 terdapat sub kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara berupa Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan target 600 Ha. Disamping itu, juga diupayakan penyediaan benih/bibit bermutu pada sektor kehutanan pada Tahun 2022 mencapai 600.000 batang untuk di tanam di lahan kritis.</p>
6.	Melakukan penghentian alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan.	<p>Alih fungsi hutan menjadi perkebunan secara ketentuan dimungkinkan pada fungsi kawasan hutan tertentu (kawasan hutan produksi/HP khususnya Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi/HPK) melalui pelepasan kawasan hutan baik secara parsial maupun secara provinsi/Revisi RTRW, melalui penyediaan kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria/TORA.</p> <p>Perubahan kawasan hutan menjadi perkebunan sesuai ketentuan yang ada dilakukan oleh Tim Lintas sektoral (Tim Terpadu) dan dilakukan kajian yang mendalam sehingga pemberian persetujuan pelepasan kawasan hutan cukup ketat dan selektif untuk diberikan.</p> <p>Yang marak terjadi di Sumatera Barat adalah alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan yang tidak sesuai ketentuan atau tidak direncanakan yakni melalui perambahan kawasan hutan. Peran bidang pengamanan dan perlindungan hutan, tenaga pengamanan hutan berbasis nagari, masyarakat setempat serta peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di daerah menjadi penting saat ini dan akan selalu ditingkatkan terus menerus.</p>
	<b>PENDAPAT AKHIR FRAKSI</b>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa kriteria Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan oleh menteri di bidang sosial setelah dilakukan verifikasi dan validasi sehingga menjadi data terpadu yang akan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mendaftarkan data</p>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		<p>terpadu kepada BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan. Di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dinas Sosial akan bertanggung jawab terhadap penduduk yang termasuk dalam kriteria Penerima Bantuan Luran Jaminan Kesehatan melalui verifikasi dan validasi data dan akan didaftarkan oleh Dinas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sehingga terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan. Adapun data yang didaftarkan harus memiliki NIK yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas DUKCAPIL akan berkoordinasi dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota sehingga diperoleh data Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan yang akurat dan tepat sasaran.</p>
	<b>FRAKSI PARTAI GERINDRA</b>	
1.	<p>Laju Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 menjadi yang terendah dalam beberapa dekade ini, yakni pada angka 2.91 %, berada dibawah target yang ditetapkan, yaitu sebesar 3.0 % - 3.8 % dan juga berada dibawah rata-rata nasional yang mencapai 3.51 %. Bagi Fraksi Partai Gerindra, alasan rendahnya capaian PE ini akibat pandemi Covid-19, tak sepenuhnya bisa diterima, karena kita di Sumatera Barat punya kekuatan di bidang pertanian yang tidak terdampak besar akibat pandemi covid-19. Bagi Fraksi Partai Gerindra, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidaklah serius menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung atau prioritas utama</p>	<p>Melambatnya pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat pada Tahun 2021 bukan berarti Pemerintah daerah tidak serius menangani permasalahan ini, akan tetapi perlambatan ekonomi terjadi secara nasional dan pastinya bukan hanya di Sumatera Barat yang di sebabkan adanya pembatasan aktivitas yang dilakukan akibat kebijakan PPKM level 4 pada triwulan III 2021.</p> <p>Untuk tahun 2022, optimis pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2022 berkisar 4%-5% diasumsikan seiring dengan peningkatan realisasi vaksinasi dan masyarakat kembali melakukan aktivitas usahanya, target produksi pertanian mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan penyediaan bibit unggul kepada petani, bantuan teknologi, peningkatan pupuk organik, peningkatan ekspor karet, peningkatan produktivitas CPO yang didukung oleh masih tingginya harga CPO global, disamping sektor pariwisata yang menjadi andalan Sumatera Barat.</p> <p>Sektor Pariwisata menjadi andalan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat dan untuk mendukung itu telah dicanangkan bahwa tahun 2023 merupakan tahun kunjungan wisata Sumatera Barat (<i>Visit Beautiful west Sumatera 2023</i>).</p>
2.	<p>Pemprov harus banyak melakukan inovasi, karena salah satu pain sukses kepala daerah adalah jika berhasil meningkatkan PAD. Beberapa Langkah yang bisa dilakukan menurut hemat Fraksi Gerindra adalah dengan melakukan Relaksasi pajak kendaraan bermotor.</p>	<p>Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor sudah dilakukan pada Tahun 2022 ini yaitu dengan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya pada Tahun 2022 ini juga dilaksanakan program keringanan pajak kendaraan bermotor serta pembayaran pajak kendaraan bermotor juga dapat melalui kanal pembayaran non tunai seperti melalui QRIS, EDC, Internet/mobile Banking, ATM dan Lainnya.</p>
3.	<p>Banyak asset daerah, baik yang bergerak atau tidak bergerak yang sesungguhnya menurut hemat Fraksi Gerindra bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pemasukan bagi daerah, misalnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau dijual, dari pada hanya dikuasai pihak ketiga. Menurut Fraksi Partai Gerindra, tidak akan ada artinya jika asset tersebut dikelola pihak ketiga, namun tak memberikan pemasukan bagi daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akan dilakukan kembali identifikasi dan inventarisasi terhadap aset bergerak dan tidak bergerak yang sudah dan belum dikerjasamakan kepada pihak ketiga.</li> <li>2. Untuk aset yang dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah akan diambil alih untuk bisa dioptimalkan pemanfaatannya.</li> <li>3. Untuk aset yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga, setelah habis masa perjanjian kontraknya akan dilakukan penilaian ulang kembali untuk mendapatkan nilai optimal untuk dikerjasamakan kepada pihak ketiga</li> </ol>
4	<p>Alokasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan yang belum dilakukan secara proporsional. Dalam hemat Fraksi Partai Gerindra, hal ini terjadi, karena ketidak konsistenan dan ketidaksesuaian dalam perumusan program, kegiatan dan alokasi anggaran dengan perencanaan pembangunandaerah yang telah ditetapkan.</p>	<p>Akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan.</p>
5.	<p>Berkaitan dengan urusan Pendidikan, sesuai laporan Pansus, capaian kinerja di bidang ini belum optimal, karena hampir separuh dari target indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, tidak tercapai. Fraksi Partai Gerindra melihat kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena maju dan berdiri tegaknya</p>	<p>Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021, dari 15 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021 terdapat 5 indikator yang capaiannya masih di bawah 100 %, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sekolah menengah yang terakreditasi minimal B dengan capaian 98,43 %.</li> </ol> <p>Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya</p>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
	<p>bangsa ini tidak lain adalah investasi di bidang Pendidikan. Fraksi Partai Gerindra meminta agar Gubernur fokus membenahi ini, apalagi jika dikaitkan dengan rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat sesuai dengan data BPS tahun 2021 adalah 9,07 Tahun.</p>	<p>pemerataan kebutuhan guru, tenaga kependidikan dan sarana pendukung pada sekolah menengah sesuai standar BAN-SP (Badan Akreditasi Nasional – Satuan Pendidikan).</p> <p>2. Jumlah sekolah Luar Biasa yang terakreditasi minimal B dengan capaian 50,32 %. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya pemerataan kebutuhan guru, tenaga kependidikan dan sarana pendukung pada sekolah Luar Biasa sesuai standar BAN-SP (Badan Akreditasi Nasional – Satuan Pendidikan).</p> <p>3. Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PTN dengan capaian 90.01 % Hal ini disebabkan masih kurang terjalinya Kerjasama dengan PTN dan pendataan untuk siswa yang telah lulus ini belum terdata secara maksimal karena rentang kendali yang cukup jauh dan terbatasnya sarana komunikasi.</p> <p>4. Jumlah lulusan SMK yang diterima di DUDI dengan capaian 77,59% Hal ini disebabkan masih kurang terjalinya Kerjasama dengan DUDI</p> <p>5. Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program/ kegiatan dengan capaian 97,28%. Hal ini dipengaruhi sisa dana DAK fisik dan Non Fisik pada tahun berjalan</p>
6.	<p>viralnya kasus pengadaan sapi memberi indikasi tidak profesionalnya dinas terkait dalam proses pengadaan sapi tersebut. Pemprov harusnya memanfaatkan sapi lokal, bukan lagi sapi bali atau sapi Si mental. Ini sekaligus memberdayakan Peternakan masyarakat. Fraksi Partai Gerindra meminta gubernur bisa mengevaluasi kepala dinas terkait dan Fraksi Partai Gerindra merekomendasikan adanya Pansus Ternak.</p>	<p>1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pengadaan ternak dari luar provinsi sejalan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019, Kegiatan yang tercantum yaitu Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain</p> <p>2. Melaksanakan program peningkatan populasi ternak yang menjadi Bagian dari visi misi Provinsi Sumatera Barat</p> <p>3. Untuk monitoring dan pembinaan diharapkan dilakukan bersama-sama, karena kelompok penerima juga merupakan aspirasi dari kita bersama</p>
7.	<p>Fraksi Partai Gerindra kita ingin adanya inventarisasi HGU-HGU perkerbunan sawit. Fraksi Partai Gerindra melihat jumlah dan luasnya HGU tidak sesuai dengan kondisi rildilapangan. Harus ada langka penertiban, terkait dengan kelangkaan minyak goreng kemarin.</p>	<p>Telah dilakukan koordinasi dengan Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumbar dalam rangka memperoleh data HGU yang aktual.</p>
8.	<p>Fraksi Partai Gerindra meminta persoalan yang dialami oleh transmigran akibat PLTUKoto Panjang, bisa segera diselesaikan. Lokasi tempat tinggal para transmigran sekarang adalah Kawasan hutan lindung.</p>	<p>Terhadap lokasi transmigran dengan bukti sertifikatnya perlu di cek kembali terhadap peta kawasan hutan terakhir serta kronologis kawasan hutan di daerah tersebut, kemungkinan tidak semua lokasi transmigran tersebut yang berada di kawasan hutan.</p> <p>Alternatif pemecahan masalah terhadap lokasi transmigrasi/sertifikat yang berada di dalam kawasan hutan dapat dilakukan dengan mekanisme penataan hutan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.</p>
9.	<p>Fraksi Partai Gerindra merekomendasikan perlunya peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Tambahan penghasilan pegawai (TPP) adalah pemberian imbalan jasa terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikaitkan dengan penilaian kinerja mereka Artinya, tambahan penghasilan pegawai diberikan jika seorang ASN memiliki kinerja yang bagus dalam suatu bidang kerja.</p>	<p>Saat ini telah disusun draft pergub TPP di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat yang sesuai dengan Kepmendagri 900-4700 tahun 2020 tentang cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Standar biaya, komponen TPP dan mekanisme pemberian TPP sudah menyesuaikan dengan aturan yang telah ada dimaksud. Saat ini dalam proses penyempurnaan draft pergub. Selanjutnya akan disampaikan ke Biro Hukum untuk koreksi legal drafting</p>



No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		dan fasilitasi oleh Kemendagri.
10.	Fraksi Partai Gerindra sekali lagi mengusulkan dan meminta agar DPRD bisa membentuk Pansus Infrastruktur guna mendalami persoalan sesungguhnya banyaknya proyek mangkrak. Tujuannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada tahun tahun selanjutnya Proyek proyek mangkrak ini menjadi preseden buruk. Kami meminta gubernur bertegas-tegas untuk tidak menetapkan pemenang lelang dengan penawaran lebih rendah dari 80 persen pagu dana, Karena kalau sudah dibawah itu akan berpengaruh pada hasil dan volume pekerjaan.	Diminta OPD untuk berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) bahwa untuk perlu pertimbangan yang matang dalam penetapan pemenang lelang dengan penawaran di bawah 80%, dengan memperhatikan kewajaran harga yang ditawarkan oleh penyedia barang dan jasa.
11.	Fraksi Partai Gerindra meminta persoalan BUMD, terutama berkaitan dengan penyelesaian persoalan PT.ATS, benar-benar bisa segera diselesaikan. Tidak ada upaya upaya serius yang dilakukan. Kami minta ini dijadikan sebagai lembaran dan poin pertama yang harus disebut Pemprov. Tahun tahun ini kalau bisa harus segera selesai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Proses Likuidasi PT.Andalas Tuah Sakato dan PT. Dinamika sudah dilakukan kajian oleh Balitbang Provinsi Sumatera Barat dan dari hasil Kajian Balitbang dimaksud sudah dilakukan rapat dengan Tim Likuidator dan OPD teknis terkait;</li> <li>2. Sebagai tindak lanjut dari hasil kajian dimaksud, Tim Likuidator sudah menyampaikan surat ke Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 27 Mei 2022 perihal penyerahan Proses perpanjangan SHGB terhadap AsetPT ATS dan PT Dinamika yang telah habis masa berlakunya. Disamping itu Tim likuidator juga sudah menemui pengelola Hotel Ranah Bundo yang sudah putusan Inkras agar diserahkan secara sukarela. Sedangkan untuk asset tanah SPBU Kota Padang akan dilakukan penyerahannya ke Kota Padang dengan Pengajuan untuk pemutihan segala kewajiban terhadap Pajak;</li> <li>3. Yang bertanggungjawab dalam proses likuidasi adalah Tim Likuidator., namun demikian pemerintah Provinsi Sumatera melalui Biro perekonomian akan terus melakukan Evaluasi Progres penyelesaian likuidasi melalui tim likuidator dengan mempedomani kajian yang telah ada secara kontinyu dan berkelanjutan.</li> </ol>
12.	Fraksi Partai Gerindra Fraksi Gerindra mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk lebih ketat lagi dalam mengawasi program yang dikerjakan masing-masing OPD. Rencana kerja harus mengacu pada anggaran yang sudah ada dan tepat sasaran. Penyerapan anggaran juga harus bisa maksimal, sehingga SILPA tidak lagi besar	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja agar tetap tepat sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan.</p> <p>Beberapa upaya yang selama ini dilakukan yakni pengendalian pelaksanaan program kegiatan secara bulanan, triwulanan serta semesteran dan tahunan, yang dikordinir oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan memanfaatkan aplikasi Simbangda untuk melihat progress pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan yang secara lebih teknis dikordinir oleh masing-masing Asisten Sekretaris Daerah.</p> <p>Selanjutnya yakni monitoring dan evaluasi RKPd semester I dan II yang dilakukan oleh Bappeda untuk melihat pencapaian target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.</p> <p>Dan selain itu, di internal SKPD juga dilaksanakan Sistem Internal Pengendalian Pemerintah (SIPP) yang juga menjadi wadah diinternal SKPD untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas, program dan kegiatan.</p>
	<b>FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	
1.	Pengelolaan keuangan daerah seperti rendahnya kemampuan dan pemahaman PA, KPA, PPT/Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan Terkait dengan tugas dan kewenangannya yang berdampak terhadap kelebihan pembayaran, Gagal bayar kegiatan yang telah selesai. Selain itu rendahnya kemampuan dan pemahaman Pejabat Pengelola Kegiatan/Proyek terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan, yang berdampak: terhadap pelaksanaan, pengawasan dan penilaian terhadap basil kegiatan yang menyebabkan	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan.

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
	pemilihan konsultan pengawas dan perencanaan tidak kompeten dalam pelaksanaan tugasnya, yang berdampak terhadap kualitas pelaksanaan pekerjaan (kurang volume, tidak: sesuai spesifikasi sehingga banyak kegiatan yang putus kontrak	
2.	Fraksi PKS secara umum sepakat untuk memberikan punishment terhadap aktor yang dianggap lambat sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal yang kami sampaikan dalam point 1. Punishment bisa diberikan kepada ASN penanggungjawab, dan pihak swasta yang lalai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sanksi ini harus tegas dan keras dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kejadian yang sama tidak akan terulang dimasa yang akan datang	Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan kepada APIP melalui Telaahan Staf kepada Sekretaris Daerah perihal usulan pemeriksaan terhadap ASN penanggung jawab dan pihak swasta yang lalai dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai rekomendasi DPRD.
3.	Fraksi PKS mendorong Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian yang berimbang terhadap Sekolah Luar biasa (SLB) yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Barat baik dari sarana prasarana, SDM guru dan pegawai, sehingga sekolah-sekolah tersebut dapat melahirkan lulusan yang sesuai dengan kemampuannya. Disamping itu kami Fraksi PKS juga meminta agar Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang lebih serius kepada para penyandang Disabilitas Sehingga hak-hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi di Provinsi Sumatera Barat.	Dinas pendidikan setiap tahun telah melakukan perhatian yang berimbang dalam peningkatan sarana dan prasarana sekolah dimana: 1. Setiap tahun adanya bantuan dari dana DAK maupun APBD fisik berupa bantuan gedung sekolah baik itu Ruang Kelas Baru, Ruang keterampilan, seni dll; 2. Bantuan DAK dan APBD peralatan dan media pendidikan seperti Peralatan Memasak, Menjahit, Perbengkelan, Listrik, Tata Rias, Kriya Kayu Desain Grafis (komputer dan Laptop), dan Seni musik dan tari yang berguna untuk meningkatkan keterampilan siswa berkebutuhan khusus; 3. Perlu adanya pelatihan dan bimbingan kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan Keterampilan karena tidak semua guru SLB yang tamatan vokasi seperti Menjahit, seni, tari, desain grafis, kriya kayu, memasak/boga, perbengkelan, listrik, dll. Dari Uji Kemampuan non Akademis, Peserta Didik disabilitas selalu ikut dalam berbagai Lomba Peserta Didik berkebutuhan khusus diantaranya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Lomba Karya Siswa Nasional (LKSAN), karena inilah ajang Siswa menunjukkan talentanya diberbagai bidang sebagai bekal kemandiriannya setelah menyelesaikan pendidikannya di SLB nantinya.
4.	Fraksi PKS meminta agar kesiapsiagaan Pemerintah Daerah terhadap bencana betul-betul ditingkatkan. Karena kita menyadari bahwa Sumatera Barat adalah daerah yang potensi bencana nya cukup besar. Salah satunya yang harus dilakukan adalah dengan membentuk relawan siaga bencana atau menumbuhkan kelompok siaga bencana (KSB), baik di nagari atau kelurahan, sehingga relawan dan KSB inilah yang pertama kali melakukan tindakan darurat apabila terjadi bencana	Upaya kesiapsiagaan bencana merupakan Program Unggulan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat hal ini tertuang dalam RPJM Provinsi diantaranya adalah: Program Penumbuhan Desa Tangguh Bencana, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat seperti KSB, Forum PRB baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota dalam Penanggulangan Bencana baik pada Pra Bencana, saat bencana dan Pasca Bencana.
5.	Berkaitan dengan masih belum dikeluarkannya beberapa Peraturan Gubernur yang diamanahkan oleh Peraturan Daerah. Fraksi PKS meminta agar OPD terkait segera menyelesaikannya Sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat segera diaplikasikan di lapangan	Biro Hukum akan segera melakukan koordinasi dengan OPD pemrakarsa untuk menindaklanjuti amanat untuk membentuk peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah
6.	Terakhir kami meminta semua rekomendasi LKPJ Kepala Daerah tahun 2021 yang telah dikeluarkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk masa yang akan datang.	Semua rekomendasi LKPJ tahun 2021 yang dikeluarkan oleh DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang. Dapat diinformasikan bahwa Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ, LPPD, LAKIP, Hasil Temuan BPK dan Inspektorat serta menjadi salah satu acuan dalam proses verifikasi Rancangan dan rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.
	<b>FRAKSI PARTAI DEMOKRAT</b>	

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
1.	Pengalokasian belanja daerah pada masing masing urusan harus dialokasikan secara proporsional, agar realisasi anggaran terserap dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan.
2.	Karena banyaknya sisa anggaran yang telah disediakan terhadap dinas terkait tidak terealisasi maka kami dari fraksi Demokrat meminta Evaluasi langsung terhadap Dinas tersebut dan kita dari fraksi Demokrat akan langsung mengawasi dan mengevaluasi dinas dan OPD Terkait .	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan
<b>FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL</b>		
1	Terhadap LKPJ yang menjadi temuan BPK RI, pemerintah prov. Sumbar harus fokus untuk menindak lanjuti temuan tersebut, salah satu contoh adalah Gedung Kebudayaan yang hari ini telah di tingkatkan statusnya dari Penyelidikan ke Penyidikan oleh KEJARI.	Menyiapkan bukti-bukti bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Budaya telah melalui prosedur sebagaimana seharusnya.
2.	Terhadap pembangunan Mainstadium, pembangunan ini adalah di bagun untuk kegiatan Pekan olahraga Nasional yang di biaya oleh APED sumatera barat yang memerlukan biaya yang sangat besar, di akibatkan pembatalan Pekan Olahraga Nasional dan pasca COVID 19 kegiatan pembangunan di hentikan, sedangkan BPK RI merekomendasikan bangunan tersebut akan tidak mangrak (dilandjutkan). Oleh karena pemerintahan ketiadaan anggaran yang dibutuhkan yang sangat besar pemerintah provinsi sumatera barat harus bisa mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dari Pemerintah pusat, diminta kepada pemerintah provinsi segera membuat rekomendasi kebutuhan kelanjutan pembangunan tersebut. Di karenakan pembangunan gedung Main stadium adalah kebutuhan Nasional pada waktu awal pembangunan.	<p>Sesuai dengan Perda Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 , dalam arah kebijakan dan menjadikannya sebagai salah satu program unggulan yaitu menjadikan Stadion Utama Sumatera Barat di Sikabu sebagai Pusat Olahraga dan Pembinaan Olahraga Prestasi , oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya mengajukan proposal kepada Pemerintah Pusat untuk dapat membantu kelanjutan pembangunannya melalui alokasi dana APBN ataupun Sumber Sah Lainnya. Adapun Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan lanjutan Mainstadium tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebutuhan Total Pendanaan Pekerjaan Fisik Pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 661.440.902.550,-;</li> <li>2. Kebutuhan pendanaan pekerjaan fisik Pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat untuk bisa beroperasi sementara / dimanfaatkan adalah sebesar Rp. 275.982.668.850,-.</li> </ol> <p>(Sumber Data : Dinas BMCKTR)</p>
3.	Lemahnya pengawasan terhadap kendaraan - kendaraan yang overtonase yang melewati jalan-jalan Provinsi akibatnya jalan - jalan Provinsi tersebut mengalami kerusakan berat. Untuk kedepannya diharapkan pada dinas terkait supaya menertibkan kendaraan kendaraan yang bertonase berat tersebut atau Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, meningkatkan spek jalan tersebut dan disamakan dengan jalan nasional .	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait (Dinas Perhubungan) dan Mitra terkait (Dirlantas)
<b>FRAKSI PARTAI GOLKAR</b>		
1.	pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sebesar 2,91 % dari target 3,0 % - 3,8 %, artinya tidak mencapai target . Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat ini juga dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional. Melihat laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2021, diminta kiranya Gubernur Sumatera Barat segera hendaknya mengambil kebijakan strategis yang mendukung .untuk mengungkit percepatan laju peretumbuhanekonomi, seperti mempercepat serapan anggran dalam APBD, membuat kebijakan untuk mernakai produk lokal Sumatera Barat terutama yang dihasilkan oleh UMKM, meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian dengan menerapkan teknologi pertanian yang pada akhirnya dapat menekan harga pokok produksi, dan juga akan berdampak terhadap Nilai Tukar Petani (NTP).	<p>Nilai Tukar Petani (NTP) pada Tahun 2021 adalah 107,6 dibandingkan dengan tahun 2022 (NTP = 100,58) terjadi <b>kenaikan sebesar 6,97</b>.</p> <p>Berdasarkan defenisi BPS, Nilai NTP &gt; 100 mengindikasikan petani mengalami surplus. harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi sehingga pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya</p> <p>Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produktivitas terus dilakukan usaha diantaranya pemakaian benih berkualitas (unggul, bersertifikat), penyediaan sarana &amp; prasarana seperti penggunaan pupuk sesuai anjuran, penggunaan teknologi pertanian (mekanisasi, Good Agriculture Practices/GAP, Good Handling Practices/GHP), penyuluhan secara dinamis, pengendalian OPT secara terpadu, dll serta menerapkan sistem yang mengarah ke pertanian organik.</p>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
2.	<p>Lemahnya pengawasan yang Dilakukan oleh kepala OPD dalam mengawas capaian target kinerja dalam urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Sebetulnya masing-masing kepala OPD telah punya tool atau alat untuk menilai kinerja bawahannya yaitu melalui Perjanjian Kinerja yang ditandatangani setiap awal tahun oleh bawahannya, tetapi sayangnya Perjanjian Kinerja tersebut belum ada dampaknya terhadap percepatan capaian target kinerja di OPD nya. Ini perlu menjadi perhatian serius bagi Saudara Gubernur, agar Perjanjian Kinerja yang dibuat oleh masing-masing kepala OPD tersebut tidak menjadi dokumen yang hanya untuk mematuhi aturan yang berlaku, tetapi hendaknya jauh lebih dari itu , dimana hendaknya terjadi percepatan capaian terhadap target</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat benar telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja sampai level individu. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini telah berdasarkan pada konsep <i>logical framework</i> (jika-maka) yang tertuang pada pohon kinerja. Penggunaan <i>logical framework</i> tersebut akan mengawal Perjanjian Kinerja antara pimpinan dan pejabat di bawahnya mempunyai keterkaitan dan saling mendukung dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerahnya (Ka. OPDnya). Selain itu Perjanjian Kinerja yang sudah dibuat setiap tahunnya juga bisa mengawal aktivitas yang dilakukan memang mendukung pencapaian kinerja Ka. OPD;</li> <li>2. Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan penilaian kinerja terhadap Kepala OPD berdasarkan komponen: deviasi target dan realisasi Fisik, deviasi target dan realisasi Keuangan, Capaian Indikator Kinerja Progul dan Capaian Indikator Kinerja Daerah, dimana Kepala OPD memperoleh Rapor Kinerja dari Gubernur Sumatera Barat;</li> <li>3. Pengawasan Kepala OPD terhadap kinerja pejabat struktural dan fungsional dapat dilakukan melalui pencapaian target indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja masing-masing individu. Untuk Pejabat struktural dokumen perencanaan kinerja yang disusun adalah dokumen Perjanjian Kinerja. Sedangkan untuk fungsional dan pelaksana menyusun dokumen perencanaan kinerja dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sesuai dengan Sesuai dengan PermenPAN No 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;</li> <li>4. Pengawasan rutin dilakukan oleh Kepala OPD dan pejabat struktural secara berjenjang melalui validasi SKP yang dilakukan setiap bulan sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada <a href="https://ekinerja.sumbangprov.go.id/">system ekinerja (https://ekinerja.sumbangprov.go.id/)</a>. Untuk kedepannya pengawasan terhadap pencapaian Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai <b>akan lebih dioptimalkan</b> lagi pelaksanaannya disamping pengawasan terhadap realisasi kegiatan yang dianggarkan dalam DPA Perangkat Daerah.</li> </ol>
	<b>FRAKSI PPP – NasDem</b>	
1.	<p>Penyajian LKPJ TA 2021 yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat masih dalam bentuk narasi, dan hanya sebagian dari beberapa informasi yang sangat dibutuhkan dalam analisa dan penilaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga pembaca laporan mengalami kesulitan dalam menelaah LKPJ tersebut, agar disempurnakan dan d.isajikan secara lengkap dan utuh berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007</p>	<p>Penyusunan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>Merujuk Ketentuan Penutup Pasal 40 PP Nomor 13 Tahun 2019, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p>
	<b>FRAKSI PDIP DAN PKB</b>	
1.	<p>Atas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 ini Fraksi kami memberikan catatan terhadap adanya kenyataan yang terbalik setelah kita melihat asumsi-asumsi makro ekonomi dari yang ditargetkan dibandingkan dengan faktualnya/rillnya bahwa, untuk itu sudah saatnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk lebih mencari terobos-terobosan terhadap mandeknya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tercapainya asumsi-asumsi makro ekonomi Sumatera Barat pada Tahun 2021 karena terjadinya perlambatan ekonomi secara nasional yang di sebabkan adanya pembatasan aktivitas sosial dari kebijakan PPKM dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19;</li> </ol>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
	<p>pembangunan serta mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Untuk tahun 2022, optimis pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2022 berkisar 4%-5% diasumsikan seiring dengan peningkatan realisasi vaksinasi dan masyarakat kembali melakukan aktivitas ekonomi, target produksi pertanian mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan penyediaan bibit unggul kepada petani, bantuan teknologi, peningkatan pupuk organik, peningkatan ekspor karet, peningkatan produktivitas CPO yang didukung oleh masih tingginya harga CPO global, disamping sektor pariwisata yang menjadi andalan Sumatera Barat;</li> <li>3. Sektor Pariwisata menjadi andalan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat dan ntuk mendukung itu telah dicanangkan bahwa tahun 2023 merupakan tahun kunjungan wisata Sumatera Barat (<i>Visit Beautiful west Sumatera 2023</i>);</li> <li>4. Terobosan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam sektor permodalan yaitu melalui program SIMAMAK berupa penugasan kepada Bank Nagari untuk menyalurkan dana subsidi bungan terhadap UMKM yang terdampak Covid-19 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penugasan Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dalam Menyalurkan Pinjaman dengan Pola Subsidi Bunga/margin/bagi hasil dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Kepada Usaha Mikro yang terkena Dampak Ekonomi Akibat Covid-19;</li> <li>5. Program Percepatan Akses Keuangan Nasional yang merupakan kebijakan pusat yang telah ditindaklanjuti di daerah dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada Tahun 2021;</li> <li>6. produksi pertanian mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan penyediaan bibit unggul kepada petani, bantuan teknologi, peningkatan pupuk organik, peningkatan ekspor karet, peningkatan produktivitas CPO yang didukung oleh masih tingginya harga CPO global, disamping sektor pariwisata yang menjadi andalan Sumatera Barat;</li> <li>7. Sektor Pariwisata menjadi andalan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat dan ntuk mendukung itu telah dicanangkan bahwa tahun 2023 merupakan tahun kunjungan wisata Sumatera Barat (<i>Visit Beautiful west Sumatera 2023</i>);</li> <li>8. Terobosan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam sektor permodalan yaitu melalui program SIMAMAK berupa penugasan kepada Bank Nagari untuk menyalurkan dana subsidi bungan terhadap UMKM yang terdampak Covid-19 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penugasan Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dalam Menyalurkan Pinjaman dengan Pola Subsidi Bunga/margin/bagi hasil dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Kepada Usaha Mikro yang terkena Dampak Ekonomi Azkibat Covid-19;</li> <li>9. Program Percepatan Akses Keuangan Nasional yang merupakan kebijakan pusat yang telah ditindaklanjuti di daerah dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada Tahun 2021;</li> </ol>
2.	<p>kritikan yang sangat tajam terhadap ketidakmerataan pembangunan karena di dalam rekomendasi DPRD Prov. Sumatera Barat masih juga bersifat umum, kenapa ini Fraksi kami sampaikan, bahwa salah satu kabupaten di Sumatera Barat ini yaitu Kab. Kep. Mentawai sangat perlu perhatian dan tindakan konkrit dari Pernerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat karena masih berlabelnya Kab. Kep. Mentawai sebagai daerah tertinggal, termiskin dan terbelakang.</p>	<p>Terhadap Kab. Kepulauan Mentawai telah telah diupayakan intervensi program/ kegiatan penurunan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem dengan OPD terkait melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat;</li> <li>2. Meningkatkan pendapatan masyarakat;</li> <li>3. Meminimalkan kantong wilayah kemiskinan.</li> </ol> <p>Perencanaan dan penanganan pembangunan infrastruktur dilaksanakan untuk 19 Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi, urgensi, kebutuhan dan kewenangan provinsi, termasuk di Kabupaten Mentawai. Langkah-langkah tindakan lanjut yang akan dilakukan adalah</p>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melanjutkan rakorenbangda antara Gubernur dengan bupati dan walikota terkait pengusulan program prioritaskabupaten/kota yang akan dibantu provinsi;</li> <li>2. Memberikan prioritas usulan kepada daerah yang masih tertinggal untuk pembangunan infrastruktur yang akan membuka akses dan meningkatkan konektivitas antar wilayah;</li> <li>3. Mendukung komitmen DPRD untuk pembangunan infrastruktur sanitasi, drainase dan jalan lingkungan melalui dana aspirasi untuk masing-masing daerah pemilihan;</li> <li>4. Mengupayakan pembiayaan pembangunan tidak hanya dari APBD provinsi tapi juga pembiayaan yang bersumber dari luar APBD provinsi seperti APBN, DAK, SBSN, CSR, ZISWAF, KPBU;</li> <li>5. Koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur di daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.</li> </ol>
3.	Terhadap catatan-catatan di masing-masing sector, Fraksi kami mengusulkan adanya catan-catan khusus terhadap ketimpangan dari pemerataan pembangunan yang kami sampaikan di atas.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memprioritaskan penanganan ketimpangan dan pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur sesuai dengan catatan khusus terhadap ketimpangan dan pemerataan pembangunan.
4.	Seperti yang kita ketahui bahwa Sdr. Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru di lantik pada tahun 2021 dan dimana tahun 2021 itu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berjuang menghadapi Pandemic Covid-19, segala upaya dilakukan baik itu merefocusing anggaran, mengesahkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dengan Nomor 6 Tahun 2020, tetapi kemudian kita melihat implementasi dilapangan itu sangat-sangat mengecewakan sekali, seperti yang kita sama-sama ketahui kalau tidak ada unsur TNI dan POLRI maka kita tidak tahu bagaimana Daerah Sumatera Barat menghadapi dampak pandemi Covid-19 ini.	<p>Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan covid-19, tugas Dinas kesehatan khususnya pada saat imunisasi Covid-19 adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan proses kegiatan vaksinasi Covid-19;</li> <li>2. Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya vaksinasi Covid-19;</li> <li>3. Memberikan pelayanan imunisasi Covid-19;</li> <li>4. Menyediakan vaksinasi Covid-19;</li> <li>5. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19.</li> </ol> <p>Tindak lanjutnya tetap berkolaborasi dengan TNI/Polri dalam pelaksanaan vaksinasi secara maksimal.</p>
5.	Adanya kewenangan Pemerintah Provinsi di dalam memberikan rekomendasi perizinan Fraksi kami berharap betul pejabat-pejabat yang memberikan rekomendasi tersebut harus tahu betul dan turun kelapangan sehingga rekomendasi tidak menjadi sumber permasalahan di daerah tersebut, seperti wilayah Kab. Kep. Mentawai jika penebangan hutan dibiarkan maka Mentawai akan tenggelam atau kejadian yang terjadi di Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat beberapa waktu yang laju.	<p>Rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan kawasan di bidang kehutanan pada umumnya diberikan oleh Kepada DPM&amp;PTSP atas nama Gubernur dengan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan. Untuk Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK), persetujuan diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan.</p> <p>Kedapan pemberian pertimbangan teknis dan persetujuan PKKNK akan di lakukan dengan cermat, hati- hati dan tahu betul kondisi lapangan (<b>Kehutanan</b>)</p> <p>Terima kasih sampaikan atas masukan dan saran dari Fraksi PDIP dan PKB dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat.</p> <p>Sesuai dengan kewenangan di sektor kehutanan, untuk kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, provinsi memberikan Pertimbangan Teknis Gubernur kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berdasarkan PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021 yang proses pelaksanaan melalui <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>. Kami DPMP&amp;PTSP dengan dinas teknis dalam hal ini Dinas Kehutanan akan semaksimal mungkin memberikan pertimbangan teknis tersebut selektif mungkin berdasarkan SOP dan SP yang sudah ditetapkan bersama sehingga harapannya perizinan berusaha yang direkomendasikan ke pemerintah pusat tersebut tidak menimbulkan sumber permasalahan baru. Dalam pelaksanaannya proses pertimbangan teknis diberikan setelah dilakukan</p>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
		<p>peninjauan lapangan yang dilaksanakan secara terpadu antara Dinas Kehutanan, DPMPTSP termasuk Dinas Lingkungan Hidup yang melibatkan juga pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa di Kabupaten Mentawai. Dalam peninjauan lapangan kalau seandainya ada masukan dari masyarakat, pokmas dan lainnya akan menjadi pertimbangan selanjutnya dari kami untuk memberikan Pertimbangan Teknis Gubernur kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (DPMPTSP).</p>
6.	<p>Melihat belum adanya inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan terhadap program-program di OPD-OPD dimana setiap tahunnya kita masih merasakan hasilnya sama saja pada tahun yang lalu seperti pada posko pendapatan/ belanja/ realisasi/ penyerapan, persoalan pertumbuhan ekonomi dibawah target, tingkat pengangguran yang dibawah target, seakan akan OPD-OPD tersebut masih melakukan copy paste tanpa melakukan inovasi-inovasi atau terobosan- terobosan. APBD seakan akan menjadi sebuah kue yang dibagi-bagi saja. kedepan menurut pendapat Fraksi kami hal ini tidak boleh terjadi lagi karena itu Fraksi kami berharap agar Pemerintah Daerah Sumatera Barat sangat serius dalam perbaikan ekonomi ini dengan membuat stimulus- stimulus untuk percepatan perekonomian secara makro di Sumatera Barat dan terkhusus dalam sektor tenaga kerja Fraksi kami meminta Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk bisa serius dalam upaya penyerapan lulusan baru di dunia kerja dengan menjalin kerjasama pada perusahaan dalam dan luar negeri guna penyerapan maksimal, sehingga dengan berkurangnya angka pengangguran akan memberikan dampak pada angka kemiskinan.</p>	<p>Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 hingga 2026 telah mengacu sepenuhnya pada dokumen RPJMD 2021-2026.</p> <p>Pada tahun 2021, tema pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2021 dan mengacu kepada tema nasional yakni Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, yang difokuskan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi</li> <li>2. Reformasi sistem kesehatan nasional</li> <li>3. Reformasi sistem perlindungan sosial</li> <li>4. Reformasi sistem ketahanan bencana</li> </ol> <p>Pencapaian pembangunan tahun 2021 yang pada beberapa indikator kinerja belum tercapai sesuai dengan target dan masih dibawah capaian nasional antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,29% jika dibandingkan dengan nasional sebesar 3,69% hal ini lebih didasarkan pada struktur PDRB Sumatera Barat yang lebih dari 20% bergerak pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yang mana sektor ini hanya memberikan laju pertumbuhan sebesar 2,19%. Untuk itu maka dalam RPJMD terdapat salah satu program unggulan yakni mengalokasikan anggaran untuk sektor pertanian sebesar 10% dari total APBD yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani.</p> <p>Sesuai dengan data BPS bahwa kemiskinan di Sumatera Barat lebih banyak berada pada daerah perdesaan dengan mayoritas bekerja pada sektor pertanian. Sehingga kebijakan anggaran 10% ini juga dapat secara langsung mengintervensi tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.</p> <p>Capaian tingkat pengangguran tahun 2021 sebesar 6,52% menurun jika dibandingkan capaian di tahun 2020 sebesar 6,88% dan dibawah nasional pada tahun 2021 sebesar 6,49%. Hal ini diakibatkan adanya dampak pandemic yang membuat beberapa perusahaan/ tempat kerja tutup sementara/permanet atau mengurangi jumlah tenaga kerja.</p> <p>Terkait dengan hal ini maka di tahun 2022 terdapat salah satu program unggulan yakni Penumbuhan Milenial Entrepreneur dan Women Entrepreneur yang melibatkan 15 Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pencapaiannya. Sasaran dari program ini adalah penduduk berusia produktif, termasuk juga para lulusan-lulusan. baru Perguruan Tinggi dan SMA/SMK.</p> <p>Untuk itu penyusunan APBD Tahun 2022 sd 2026 akan difokuskan terlebih dahulu pada pencapaian target- target Program Unggulan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor : 050 – 47 – 2021 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026</p>
7.	<p>Masih banyak asset daerah yang belum dimanfaatkan untuk penerimaan daerah dan Pansus juga merekomendasikan bahwa sehubungan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi kembali sumber-sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dimana terdapat potensi-potensi baru yang menjadi objek pendapatan daerah dan diminta agar setiap SK.PD</p>	<p>Hal – hal yang telah dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi Aset Idle;</li> <li>2. Menyurati SKPD terkait inventarisasi Rumah Dinas surat nomor : 030/475/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Inventarisasi Rumah Dinas;</li> <li>3. Appraisal untuk mendapatkan nilai tertinggi untuk dikerjasamakan pada pihak ketiga;</li> <li>4. Rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terkait pemanfaatan BMD di sekolah untuk kantin, Koperasi, Swalayan, Hotel;</li> <li>5. Inventarisasi aset pada OPD dan sekolah yang</li> </ol>

No	Rekomendasi Dprd Terhadap LKPj Ta 2021	Tindak Lanjut
1	2	3
	<p>melakukan penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan upaya mewujudkan sumber pendapatan tersebut, Fraksi kami sependapat unruk dapat dilaksanakan dengan baik dan Fraksi kami juga meminta kepada Pernerintah Daerah Sumatera Barat agar alokasi belanja untuk unsur pengawasan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sehingga unsur pengawasan dapat bekerja dengan optimal pengawasan dan pengendalianprogram serta kegiatan OPD.</p>	<p>memiliki potensi pendapatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Melakukan kajian analisis terhadap mekanisme pemanfaatan yang tepat untuk aset yang memiliki potensi pendapatan (sewa, KSP, BGS/BSG, KSPI);</li> <li>7. Melakukan perjanjian sewa atau MoU (untuk KSP, BGS/BSG, KSPI).</li> </ol>



### 3.4 PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat Dan Tanggal Penerima Penghargaan	OPD Teknis
1	2	3	4	5	6
1	Terbaik 2 Daerah Yang Mengoptimalkan Penggunaan EBT	Dewan Energi Nasional (Den)	Gubernur Sumatera Barat	Jakarta, 21 Oktober 2022	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Terbaik 2 Daerah Yang Mengoptimalkan Penggunaan EBT	Dewan Energi Nasional (Den)	Gubernur Sumatera Barat	Jakarta, 21 Oktober 2022	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	Nirwasita Tantra	Klhk	Gubernur Sumatera Barat	Jakarta/ 20 Juli 2022	Dinas Lingkungan Hidup
4	Apresiasi Pembinaan Proklim	Klhk	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jakarta /28 Oktober 2022	Dinas Lingkungan Hidup
5	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Sumbang	Dinas Lingkungan Hidup	Padang / 12 Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup
6	Opini WTP 10x Berturut-Turut 2012 – 2021	Kementerian Keuangan	Provinsi Sumatera Barat	Jakarta, Kamis 22 September 2022	BPKAD
7	Taspen Award	PT. Taspen	Provinsi Sumatera Barat	Jakarta, Kamis 2 Juni 2022	BPKAD
8	Pengelolaan Dak Fisik Terbaik Pertama Di Wilayah KPPN Padang	Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu	Kepala BPKAD	Padang, Kamis 18 Agustus 2022	BPKAD
9	Piagam Penghargaan Sebagai Dinas Kesehatan Provinsi dengan Ketepatan Waktu Pelaporan Program Kesmas sejak tahun 2020-2022 Terbaik	Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat	Provinsi Sumatera Barat	02 November 2022	Dinas Kesehatan
12	Meraih Kembali Izin Rumah Sakit Khusus Jiwa Kelas A	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang	Jakarta, 7 April 2022	RSJ. Prof. HB. SAANIN
13	Penilaian Hasil Akreditasi Paripurna	Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna	RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang	Jakarta, 15 Oktober 2022	RSJ. Prof. HB. SAANIN
14	Piagam Penghargaan Dari Bpjs Kesehatan Yang Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Paling Berkomitmen Dalam Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Peserta Jkn-Kis Kategori Rs Kelas A Tingkat Kedeputan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat Dan Jambi	Bpjs Kesehatan	RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang	Padang, 26 Oktober 2022	RSJ. Prof. HB. SAANIN
15	Badan Publik Informatif Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang	Padang, 12 Desember 2022	RSJ. Prof. HB. SAANIN
16	Meraih Peringkat Ke-1 Dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Blud/Bumd/Bumnag	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang	Padang, 12 Desember 2022	RSJ. Prof. HB. SAANIN
17	Meraih Achievement Motivation Person Direktur Rs. Jiwa Prof. Hb. Saanin Padang, Dr. Aklima, Mph Pada Tahun 2022	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang	Padang, 12 Desember 2022	RSJ. Prof. HB. SAANIN
18	Piagam Penghargaan Baznas Award I Tahun 2022 Sebagai	Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	Padang, 28 Desember 2022	RSJ. Prof. HB. SAANIN

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat Dan Tanggal Penerima Penghargaan	OPD Teknis
1	2	3	4	5	6
	Upz Skpd/Opd Pengumpul Zakat Terbaik	Provinsi Sumatera Barat			
19	Piagam Penghargaan Atas Organisasi Kph Yang Efektif Dalam Mendukung Masyarakat Mandiri Dan Hutan Lestari Dengan Kategori Efektif (Nilai = 83,95)	Kementeri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	27 Desember 2022	Dinas Kehutanan
20	Piagam Penghargaan Atas Organisasi Kph Yang Efektif Dalam Mendukung Masyarakat Mandiri Dan Hutan Lestari Dengan Kategori Efektif (Nilai = 82,53)	Kementeri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	27 Desember 2022	Dinas Kehutanan
21	Innovative Government Award (Iga) 2022	Kemenerian Dalam Negeri	Provinsi Sumatera Barat	Jakarta Pusat, 23 Desember 2022	Balitbang
22	Bkn Award (Kategori Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Bkn)	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat	Istana Bung Hatta, 22 Agustus 2022	Badan Kepegawaian Daerah
23	Bkn Award (Kategori Perencanaan Kebutuhan Dan Mutasi Kepegawaian Peringkat	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat	Istana Bung Hatta, 22 Agustus 2022	Badan Kepegawaian Daerah
24	Anugrah Meritokrasi Terkait Penerapan Sistem Merit Bagi Asn	Komisi Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat	Jakarta, Desember 2022	Badan Kepegawaian Daerah
25	Peringkat VIII Capaian Kinerja Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2021	Dirjen Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri	Provinsi Sumatera Barat	Jakarta/ 24 Maret 2022	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Barat
26	Piagam Apresiasi	Direktorat Jenderal Kekayaan Inetelektual	Provinsi Sumatera Barat	2022	Disperindag
27	Peringkat II Te Award 2022	Direktur Ditjen PKH	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	Bogor, 24 November 2022	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
28	Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Indonesia	Kemendikbud Ristek Ri	Gubernur Sumatera Barat	Jakarta, 9 Desember 2022	Dinas Kebudayaan
29	Pemenang Lomba Lapak Pada Peer Learning Meeting Nasional	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	Surabaya, 6 Desember 2022	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
30	Tim Sinergi Provinsi Terbaik Dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	Surabaya, 6 Desember 2022	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
31	Penghargaan Peringkat 3 Pmt/Ttic Dengan Penjualan Beras Segar Tertinggi	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Ri	PMT/TTIC Provinsi Sumatera Barat	Jakarta, 3 Januari 2022	Dinas Pangan
32	Penghargaan Peringkat 1 Pmt/Ttic Dengan Pmt/Ttic Dengan Omzet Tertinggi	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Ri	PMT/TTIC Provinsi Sumatera Barat	Jakarta, 3 Januari 2022	Dinas Pangan
33	Mitra Pengendalian Inflasi Terkolaboratif Wilayah Sumatera Barat Tahun 2022	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Provinsi Sumatera Barat	Padang, 30 November 2022	Dinas Pangan
34	Penghargaan Peringkat 3 Pmt/Ttic Dengan Penjualan Beras Segar Tertinggi	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Ri	PMT/TTIC Provinsi Sumatera Barat	Jakarta, 3 Januari 2022	Dinas Pangan

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat Dan Tanggal Penerima Penghargaan	OPD Teknis
1	2	3	4	5	6
35	Lencana Satya Abdi Inovasi	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	AMASRUL, SH. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Dsea Provinsi Sumatera Barat	Jakarta, 02 Desember 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
36	Lencana Satya Abdi Inovasi Desa	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	ASMARDETI, Ketua Posyantek Nagari Raflesia Jaya Bersama Kabupaten Agam	Jakarta, 02 Desember 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
37	Juara Pertama Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2022	Menteri Dalam Negri	Kelurahan Ubang Tengah, Kecamatan lembah Segar, Kota Sawahlunto	Jakarta, November 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
38	Juara Ketiga Dalamlomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Regional I Tahun 2022	Menteri Dalam Negri	Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin, Kota Bukittinggi	Jakarta, November 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
39	Tokoh Penggerak Koperasi Utama Kepada Gubernur Prov. Sumbar	Dekopin Indonesia	Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumbar	Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, 22 Juli 2022	Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumbar
40	Plut Kukm Terhebat No. 2 Se-Indonesia	Kementerian Koperasi Dan Ukm Ri	Kepala Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumbar	Jakarta, 12 Desember 2022	Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumbar
41	Juara Favorit Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional	Menteri Kelautan Dan Perikanan	Ketua Forikan Provinsi Sumatera Barat	Sulawesi Tengah, 20-21 November 2022	Dinas Kelautan Perikanan
42	Apresiasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Jakarta, 13 September 2022	Dinas Pariwisata
43	Mitra Strategis Terkolaboratif Dalam Mendukung Pemulihan/Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Sumatera Barat Tahun 2022	Bank Indonesia	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Padang, 30 November 2022	Dinas Pariwisata
44					
45	Juara 2 Untuk Pelayanan Teknis (Upt) Dan Unit Pelayanan Teknis Daerah ( Uptd ) Dengan Teknis Terbaik Subsektor Hortikultura Indonesia	Kementerian Pertanian	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jakarta, 9 November 2022	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
46	Juara 2 Pengawas Benih Tanaman Teladan Tingkat Provinsi Subsektor Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian	Fiadeki Saputri, SP (Staf PBT UPTD Balai Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih	Jakarta, 17 Agustus 2022	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
47	Penghargaan Apresiasi Kementerian Hukum Dan Ham (Tingkat Nasional) Kreativitas Dan Inovasi Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	Kementerian Hukum dan HAM	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jakarta/ 13 April 2022	Biro Hukum
48	Adinata Award Kategori Keuangan Mikro Syariah	Info Bank	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Gubernur)	Jakarta, 14 April 2022	Biro Perekonomian
49	Tp2dd Terbaik 2 Wilayah Sumatera	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Provinsi Sumatera Barat	Jakarta, 21 November 2022	Biro Perekonomian
50	Penilaian Final Itkp Klpd Tahun 2022 (Predikat Baik Dengan Capaian Nilai 73,7)	Lkpp Ri	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	22 November 2022	Biro PBJ

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat Dan Tanggal Penerima Penghargaan	OPD Teknis
1	2	3	4	5	6
51	Tingkat Pencapaian Level Kematangan Ukpbj 8/9. (Peningkatan Level Kematangan Dari 3/9 Menjadi 8/9)	Lkpp Ri	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Desember 2022	Biro PBJ

## BAB IV PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan melalui APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.408.899.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.89.466.324.665,00 atau 86,52%.

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan melalui APBN ini diberikan oleh 4 (empat) Kementerian yaitu :

1. Kementerian Pertanian.
2. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penugasan Urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 terbagi pada program/kegiatan pada 6 (enam) perangkat daerah, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1.  
Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan  
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

NO	SKPD PENERIMA	KEMENTERIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				Rp.	%
1.	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	Kementerian Pertanian	41.347.138.000	40.913.208.607	98,95
2.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kementerian Pertanian	29.336.464.000	17.179.725.020	58,56
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	743.530.000	733.651.451	98,67
4.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.342.204.000	10.207.312.163	98,70
5.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.727.549.000	20.040.759.888	96,69
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	912.014.000	391.667.536	42,95
<b>TOTAL</b>			<b>103.408.899.000</b>	<b>89.466.324.665</b>	<b>86,52</b>

Dengan rincian sebagai berikut :

#### 4.1. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.347.138.000,00 dengan realisasi Rp.40.913.208.607,00 (98,95%), Alokasi serta realisasi anggaran Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan**  
**Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tahun 2022**  
**Berdasarkan Esselon I Kementerian Pertanian**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2.531.588.000	2.480.881.203	98,00	Ditjen Tanaman Pangan
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7.033.550.000	6.983.904.500	99,29	Ditjen Tanaman Pangan
	Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	983.747.000	979.602.192	99,58	Ditjen Tanaman Pangan
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2.562.624.000	2.544.659.958	99,30	Ditjen Hortikultura
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3.558.600.000	3.526.345.440	99,09	Ditjen Hortikultura
	Program Dukungan Manajemen	250.000.000	248.005.635	99,20	Ditjen Hortikultura
3	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2.175.377.000	2.053.649.967	94,40	Ditjen Perkebunan
	Program Dukungan Manajemen	191.157.000	189.073.000	98,91	Ditjen Perkebunan
4	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	21.011.015.000	20.894.337.012	99,44	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
	Program Dukungan Manajemen	1.049.480.000	1.014.249.700	96,64	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
<b>TOTAL</b>		<b>41.347.138.000</b>	<b>40.913.208.607</b>	<b>98,95</b>	

Capaian Kinerja Dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Perkebunan Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat sangat baik dimana semua anggaran yang diterima dapat di realisasikan sesuai dengan target kinerja yang ditentukan oleh masing-masing eselon I dengan capaian pelaksanaannya sebagai berikut :

##### 1. Target Program/Kegiatan

###### Ditjen Tanaman Pangan

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan target Program/ kegiatan :
  - 1) Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (daerah) pada Kegiatan.
  - 2) Terlaksananya Data dan Informasi Publik terkait pemasaran hasil Tanaman Pangan pada 10 Kabupaten/kota.
  - 3) Terlaksananya Sertifikasi produk sebanyak 3 produk.
  - 4) Tersedianya sarana Pascapanen, pengolahan hasil tanaman pangan sejumlah 39 unit.

- b. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan target Program/ kegiatan :
  - 1) Terlaksananya Sarana Pengembangan Kawasan Padi Kaya Gizi (biofortifikasi) seluas 1.250 ha.
  - 2) Terlaksananya Koordinasi terkait pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan (daerah) seluruh kabupaten/kota.
  - 3) Terlaksananya Areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat seluas 15.000 Ha.
  - 4) Terlaksananya Areal yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat seluas 1.000 Ha.
- c. Program Dukungan Manajemen dengan target Program/ kegiatan :
  - 1) Terlaksananya layanan manajemen keuangan, layanan perencanaan dan penganggaran dan layanan pemantauan dan evaluasi sejumlah 3 layanan.

### **Ditjen Hortikultura**

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan target program / kegiatan :
  - 1) Tersedianya Sarana Pemasaran Hortikultura sebanyak 2 unit di Kabupaten/kota.
  - 2) Tersedianya Prasarana Pemasaran Hortikultura sebanyak 1 unit di Kabupaten/kota.
  - 3) Tersediannya Sarana Pascapanen Hortikultura sebanyak 5 unit di Provinsi/Kabupaten/kota.
  - 4) Tersediannya Prasarana Pascapanen Hortikultura sebanyak 5 unit di Provinsi/Kabupaten/kota.
- b. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan target program / kegiatan :
  - 1) Terlaksananya kawasan cabai seluas 50 Ha.
  - 2) Terlaksananya kawasan Bawang Merah seluas 10 Ha.
  - 3) Terlaksananya Kawasan Tanaman Obat seluas 15 Ha.
  - 4) Terlaksananya Kawasan Jahe seluas 30 Ha.
  - 5) Terlaksananya kawasan Pisang seluas 40 Ha.
  - 6) Terlaksananya kawasan Jeruk seluas 20 Ha.
  - 7) Terlaksananya kawasan Florikultura seluas 800 M2.
  - 8) Terlaksananya kawasan Durian seluas 80 Ha.
  - 9) Terlaksananya kawasan Alpukat seluas 50 Ha.
  - 10) Terlaksananya kawasan Manggis seluas 70 Ha.
- c. Program Dukungan Manajemen dengan target Program/ kegiatan :

- 1) Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal sejumlah 1 layanan.

### **Ditjen Perkebunan**

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan target Program/ kegiatan :
  - 1) Terlaksananya Pembinaan dan Sertifikasi desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan sebanyak 1 Desa.
  - 2) Terlaksananya Pengawasan Pendampingan Kegiatan.
  - 3) Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Penetapan Harga TBS sebanyak 1 kegiatan.
  - 4) Terlaksananya Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditi Perkebunan sebanyak 1 Kegiatan.
  - 5) Tersedianya Surat Daftar Budidaya (STDB) Kelapa Sawit seluas 1000 Ha.
  - 6) Tersalurnya Sarana Pascapanen Komoditi Perkebunan sebanyak 4 unit.
  - 7) Tersalurnya Prasarana Pascapanen Komoditi Perkebunan sebanyak 4 unit.
  - 8) Tersediannya Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Perkebunan sebanyak 8 rekomendasi.
  - 9) Tersediannya Rekomendasi Penilaian Varietas Perkebunan sebanyak 1 rekomendasi.
  - 10) Tersedianya kebun sumber bahan tanam komoditi perkebunan seluas 6 Ha.
  - 11) Tersedianya kebun sumber Benih unggul lokal seluas 15 Ha.
  - 12) Tersedianya kebun sumber Benih unggul seluas 3 Ha.
  - 13) Tersedianya Pengawasan dan Pendampingan kegiatan sebanyak 1 kegiatan.
- b. Program Layanan Dukungan Manajemen dengan target Program/ kegiatan :
  - 1) Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal.

### **Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian**

- a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan target Program/ kegiatan :
  - 1) Terlaksananya Embung Pertanian yang dibangun sejumlah 10 unit.
  - 2) Terlaksananya Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat sejumlah 4 unit.
  - 3) Terlaksananya Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat sejumlah 2 unit.
  - 4) Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier seluas 159 unit.



- 5) Terlaksananya Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan (Rekomendasi) Peraturan Daerah Lahan Pertanian Berkelanjutan sebanyak 2 rekomendasi.
  - 6) Tersedianya Prasarana Pengembangan Kawasan (Optimasi Lahan) seluas 5 KM<sup>2</sup>.
  - 7) Terlaksananya Koordinasi terkait Alat dan Mesin Pertanian di seluruh kabupaten/kota.
  - 8) Terlaksananya Verifikasi Pupuk bersubsidi di 19 Kab/kota.
  - 9) Tersusunnya e-RDKK mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani di 19 lokasi (226.327 org).
  - 10) Terlaksananya Bimtek, Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian di 6 unit.
- b. Program Layanan Dukungan Manajemen dengan target Program/ kegiatan :
- 1) Layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 1 layanan.

## **2. Realisasi Program/Kegiatan**

### **Ditjen Tanaman Pangan**

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan realisasi Program/ kegiatan :
- 1) Terlaksananya Sertifikasi Produk (daerah) pada 2 lokasi.
  - 2) Terlaksananya Koordinasi terkait Pemasaran, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (daerah) di seluruh kabupaten/kota.
  - 3) Terlaksananya Data dan Informasi Publik terkait Pemasaran Hasil Tanaman Pangan pada 10 Kabupaten/kota.
  - 4) Tersedianya sarana Pascapanen, Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sejumlah 39 unit.
- b. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan realisasi Program/ kegiatan :
- 1) Terlaksananya Koordinasi terkait Pengelolaan Tanaman Sereal (daerah) di Provinsi/kabupaten/kota.
  - 2) Terlaksananya Sarana Pengembangan Kawasan Padi Kaya Gizi (biofortifikasi) seluas 1.250 Ha.
  - 3) Terlaksananya Areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat seluas 15.000 Ha.
  - 4) Terlaksananya Areal yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat seluas 1.000 Ha.

- c. Program Dukungan Manajemen dengan realisasi Program/ kegiatan :
- 1) Terlaksananya layanan dukungan manajemen eselon I sejumlah 3 layanan dan laporan.

**Ditjen Hortikultura**

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan realisasi Program/ kegiatan :
- 1) Tersedianya Sarana Pemasaran Hortikultura sebanyak 2 unit di Kabupaten/kota.
  - 2) Tersediannya Prasarana Pemasaran Hortikultura sebanyak 1 unit di Kabupaten/kota.
  - 3) Tersedianya Sarana Pascapanen Hortikultura sebanyak 5 unit di Provinsi/Kabupaten/kota.
  - 4) Tersediannya Sarana Pengolahan Hortikultura 5 unit di Provinsi/Kabupaten/kota.
  - 5) Tersediannya Sarana Pascapanen Hortikultura sebanyak 5 unit di Provinsi/Kabupaten/kota.
  - 6) Tersediannya Prasarana Pengolahan Hortikultura sebanyak 5 unit di Provinsi/Kabupaten/kota.
- b. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan realisasi Program/ kegiatan :
- 1) Terlaksananya kawasan Cabai seluas 50 Ha.
  - 2) Terlaksananya kawasan Bawang Merah seluas 10 Ha.
  - 3) Terlaksananya kawasan Tanaman Obat seluas 15 Ha.
  - 4) Terlaksananya kawasan Jahe seluas 30 Ha.
  - 5) Terlaksananya kawasan Pisang seluas 40 Ha.
  - 6) Terlaksananya kawasan Jeruk seluas 20 Ha.
  - 7) Terlaksananya kawasan Florikultura seluas 800 M2.
  - 8) Terlaksananya kawasan Durian seluas 80 Ha.
  - 9) Terlaksananya kawasan Alpukat seluas 50 Ha.
  - 10) Terlaksananya kawasan Manggis seluas 70 Ha.
- c. Program Dukungan Manajemen dengan realisasi Program/ kegiatan :
- 1) Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal sejumlah 1 layanan

**Ditjen Perkebunan**

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan realisasi Program/ kegiatan :

- 1) Terlaksananya Pembinaan dan Sertifikasi desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan sebanyak 1 Desa.
  - 2) Terlaksananya Pengawasan Pendampingan Kegiatan.
  - 3) Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Penetapan Harga TBS sebanyak 1 kegiatan.
  - 4) Terlaksananya Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditi Perkebunan sebanyak 1 Kegiatan.
  - 5) Tersedianya Surat Daftar Budidaya (STDB) Kelapa Sawit seluas 1000 Ha.
  - 6) Tersalurnya Sarana Pascapanen Komoditi Perkebunan sebanyak 4 unit.
  - 7) Tersalurnya Prasarana Pascapanen Komoditi Perkebunan sebanyak 4 unit.
  - 8) Tersediannya Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Perkebunan sebanyak 8 rekomendasi.
  - 9) Tersediannya Rekomendasi Penilaian Varietas Perkebunan sebanyak 1 rekomendasi.
  - 10) Tersedianya kebun sumber bahan tanam komoditi perkebunan seluas 6 Ha.
  - 11) Tersedianya kebun sumber Benih unggul lokal seluas 15 Ha.
  - 12) Tersedianya kebun sumber Benih unggul seluas 3 Ha.
  - 13) Tersedianya Pengawasan dan Pendampingan kegiatan sebanyak 1 kegiatan.
- b. Program Layanan Dukungan Manajemen dengan realisasi Program/ kegiatan :
- 1) Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal.

**Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian**

- a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan realisasi Program/ kegiatan :
  - 1) Terlaksananya Embung pertanian yang dibangun sejumlah 10 unit.
  - 2) Terlaksananya Irigasi perpompaan Besar Wilayah Barat sejumlah 4 unit.
  - 3) Terlaksananya Irigasi perpompaan Menengah Wilayah Barat sejumlah 2 unit.
  - 4) Terlaksananya Rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 159 unit.

- 5) Terlaksananya Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan (Rekomendasi) Peraturan daerah Lahan Pertanian Berkelanjutan sebanyak 2 rekomendasi.
  - 6) Tersedianya Prasarana Pengembangan Kawasan (optimasi Lahan) seluas 5 Km<sup>2</sup>.
  - 7) Terlaksananya koordinasi terkait Alat dan Mesin pertanian di seluruh kabupaten/kota.
  - 8) Terlaksananya Verifikasi pupuk bersubsidi di 19 Kab/kota.
  - 9) Tersusunnya e-RDKK mendukung penyaluran pupuk bersubsidi berbasis penerapan kartu tani di 19 lokasi (226.327 org).
  - 10) Terlaksananya bimtek, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian di 6 unit.
- b. Program Dukungan Manajemen dengan realisasi Program/ kegiatan :
- 1) Layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 1 layanan.

### **3. Permasalahan**

- a. Terlambatnya dalam menetapkan SK CP/CL kegiatan serta sering terjadi pertukaran petugas di Kabupaten/ Kota sehingga kemampuan dalam penyiapan administrasi Bapem sering dikembalikan untuk perbaikan.
- b. Terjadinya proses refocusing dan revisi DIPA/POK yang berakibat pemotongan anggaran menyebabkan tertundanya/terlambatnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran.

### **4. Upaya Penyelesaian**

- a. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
- b. Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota agar meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan seperti menyiapkan CP/CL dari awal sehingga kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu dan efisien.
- c. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dan intens dengan pemerintah pusat, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya revisi anggaran dengan baik.
- d. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sehingga dapat meminimalisir kemungkinan kekurangan bibit maupun pupuk.

## 4.2. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.336.464.000,00 dengan realisasi Rp.17.272.407.777,00 (58,88%), alokasi serta realisasi anggaran Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 4.3. sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan**  
**Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	743.000.000	689.750.878	92,83	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	27.220.114.000	15.300.703.636	56,21	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	568.200.000	486.181.937	85,57	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	435.000.000	796.044.326	98,87	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
5	Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	370.150.000	364.497.326	98,50	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
<b>TOTAL</b>		<b>29.336.464.000</b>	<b>17.272.680.777</b>	<b>58,88</b>	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat , 2022

Capaian Kinerja Dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sangat baik dimana semua anggaran yang diterima dapat di realisasikan sesuai dengan target kinerja yang ditentukan oleh masing-masing eselon I dengan capaian pelaksanaannya sebagai berikut:

### 1. Target

#### **Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

a. Program Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan target Program/ kegiatan :

1) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

Tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang ditargetkan sebanyak 3 unit dan terealisasi sebanyak 3 unit yaitu :

a) Pengolahan Kompos pada Kelompok Mutiara di Kab. Dharmasraya

b) Fasilitasi bangunan dan peralatan pengolahan dan pemasaran susu kambing pada kelompok Lagan Kab. Pesisir Selatan

- c) Fasilitasi bangunan biosecurity dan peralatan pada Pasar ternak di Payakumbuh
- b. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan target Program/ kegiatan :
  - 1) Peningkatan produksi pakan ternak
 

Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan dengan melakukan pengujian sampel pakan di laboratorium di targetkan 80 produk/ sampel pakan dan teralisasi 100% sesuai dengan target.
  - 2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan
 

Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit hewan diantaranya Rabies, AI, Jembrana dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang ditargetkan sebanyak 424.046 layanan dan terealisasi sebanyak 182.340 layanan.
  - 3) Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak
 

Terlaksananya kegiatan optimalisasi reproduksi melalui kegiatan Sikomandan dengan target 70.000 ekor akseptor dan terealisasi sebanyak 75.790 ekor akseptor.
  - 4) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 

Terlaksananya pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH dengan meningkatkan jumlah unit usaha peternakan yang mendapatkan sertifikat NKV ditargetkan sebanyak 4 unit usaha dan terealisasi 100% sesuai dengan yang ditargetkan.
- c. Program Dukungan Manajemen, dengan target Program/ kegiatan :
  - 1) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan
 

Terlaksananya layanan perbendaharaan, perencanaan dan evaluasi sebanyak 3 layanan selama 12 bulan dan terealisasi 100% sesuai dengan yang ditargetkan.

**Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

- a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan target Program/ kegiatan :
  - 1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
    - a) Terlaksananya Irigasi Perpipaian yang ditargetkan pada 2 kelompok dan terlaksana 100% sesuai target yaitu kelompok alam lestari di Kab. Agam dan kelompok sungai pauah sepakat di Kab. Solok Selatan

- b) Terlaksananya Irigasi Perpompaan yang ditargetkan pada 2 kelompok dan terlaksana 100% sesuai target yaitu kelompok jaso di Kab. Pessel dan kelompok durian sejahtera di Kab. Pasaman Barat.
- b. Program Dukungan Manajemen, dengan target Program/ kegiatan :
  - 1) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan  
Terlaksananya layanan perbendaharaan, perencanaan dan evaluasi sebanyak 1 layanan selama 12 bulan dan terealisasi 100% sesuai dengan yang ditargetkan.

## 2. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2022 dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keempatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

Pelaksanaan kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2022 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ ditanggulangi. Hambatan yang dijumpai antara lain:

- a. Revisi anggaran yang disebabkan adanya kebijakan penghematan sehingga proses pelaksanaan kegiatan terlambat;
- b. Proses pelelangan umum untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui pelayanan satu atap, bila terjadi gagal lelang akan memerlukan waktu yang cukup panjang;
- c. Rendahnya tingkat pelaporan petugas terkait pelaksanaan kegiatan IB, PKB dan kelahiran.
- d. Banyak peternak yang tidak mengizinkan ternaknya untuk dilakukan pemeriksaan kebuntingan karena takut keguguran.

- e. Masih adanya wilayah yang sulit dijangkau petugas untuk melakukan Inseminasi Buatan.
- f. Adanya petugas IB mandiri yang tidak melaporkan kegiatan IB ke Dinas.
- g. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas IB, PKB, Kelahiran Rekorder, vaksin dan penandataan ternak di beberapa daerah.
- h. Biaya operasional pelaksanaan IB, PKB dan kelahiran yang terbatas.

### **3. Upaya Penyelesaian**

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
- b. Meningkatkan fasilitasi pembiayaan yang memadai untuk menjamin dan meningkatkan skala usaha bagi peternak kecil;
- c. Peningkatan skala usaha dan kepemilikan ternak melalui penguatan kelembagaan;
- d. Pencegahan dan penanganan penyakit reproduksi melalui vaksinasi dan biosekuriti;
- e. Pencegahan dan penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) melalui vaksinasi dan biosekuriti;
- f. Proses pelelangan agar dipercepat pada tahun berikutnya;
- g. Meningkatkan koordinasi antara petugas teknis Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan.



### 4.3. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.923.379.000,00 dengan capaian realisasi Rp.4.791.771.610,- (97,33%).

Alokasi serta realisasi anggaran Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 4.4. sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan**  
**Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1.	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	657.416.000	644.352.626	98,01%	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
2.	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	86.114.000	85.543.400	99,33%	
	<b>Total</b>	<b>743.530.000</b>	<b>733.651.451</b>	<b>98,67%</b>	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat , 2022

#### 1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

#### 2. Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/ Lembaga pemberi penugasan

#### 4.4. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Pada tahun 2022, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (Satker Dinas Prasarana Jalan) Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.342.204.000,00 dengan realisasi Rp.10.207.312.000,00. Alokasi serta realisasi anggaran Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 4.5. sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan**  
**Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Infrastruktur Konektivitas	9.942.204.000	9.813.033.000	98,70	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Program Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	400.000	394.279.000	98,57	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	<b>Total</b>	<b>10.342.204.000</b>	<b>10.207.312.000</b>	<b>98,70</b>	

Adapun target dan realisasi program dan kegiatan Dana Tugas Pembantuan yang diterima beserta capaian pelaksanaannya sebagai berikut :

##### 1. Target

- a. Program Infrastruktur Konektivitas dengan target Program/ kegiatan:
  - 1) Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) sepanjang 33,21 Km.
  - 2) Terlaksananya Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan sepanjang 4,89 Km.
  - 3) Terlaksananya Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan sepanjang 0,0001 Km.
  - 4) Terlaksananya Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) sepanjang 1.257,10 m.
  - 5) Terlaksananya Preservasi Jembatan 54,6 m.
- b. Program Dukungan Manajemen dengan target Program/ kegiatan:
  - 1) Terlaksananya Layanan Umum sebanyak 1 layanan.

##### 2. Realisasi

- a. Program Infrastruktur Konektivitas dengan realisasi Program/ kegiatan:
  - 1) Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) sepanjang 33,21 Km.
  - 2) Terlaksananya Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan sepanjang 4,89 Km.
  - 3) Terlaksananya Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan sepanjang 0,0001 Km.

- 4) Terlaksananya Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) sepanjang 1.257,10 m.
  - 5) Terlaksananya Preservasi Jembatan 54,6 m.
- b. Program Dukungan Manajemen dengan realisasi Program/ kegiatan:
- 1) Terlaksananya Layanan Umum sebanyak 1 layanan.

### **3. Permasalahan**

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada tahun 2022 dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Pada pelaksanaan tugas pembantuan ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti program/kegiatan (DIPA) yang mengalami beberapa kali revisi/perbaikan. Kemudian juga pada Program Infrastruktur Konektivitas terdapat permasalahan pada pelaksana proyek yang tak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu ditetapkan, sehingga ditetapkan untuk dilakukan pemutusan kontak. Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan sama sekali.

### **4. Upaya Penyelesaian**

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Untuk Program Infrastruktur Konektivitas yang mengalami putus kontak, sisa pagu terkontrak digunakan untuk pekerjaan aspal dengan sistim pengadaan ecatalog dengan lama pelaksanaan 40 hari.

#### 4.5. Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.727.549.000,00 dengan realisasi Rp.20.040.759.888,00 (96,69%) dengan sasaran utama yaitu meningkatnya kinerja layanan irigasi dengan indikator kinerja terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi.

Ruang lingkup pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi meliputi:

- a. Penyusunan pola dan rencana kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan.
- b. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- c. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana.
- d. Pelaksanaan pengaturan, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi penggunaan air irigasi.
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang operasi dan pemeliharaan.
- f. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

#### 1. Target

Target Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah :

**Tabel 4.6.**  
**Target Kinerja Tugas Pembantuan**  
**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2022			
			Output		Outcome	
			Volume	Satuan	Volume	Satuan
1	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi	585,14	Km	65.429	Ha

#### 2. Realisasi

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat yang Dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 4.7.**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan**  
**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Tahun 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Ketahanan Sumber Daya Air (Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana)	19.532.010.000	19.090.472.808	97,74	Ditjen Sumber Daya Air
2	Program Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	1.195.539.000	950.287.080	79,49	Ditjen Sumber Daya Air
<b>TOTAL</b>		<b>20.727.549.000</b>	<b>20.040.759.888</b>	<b>96,69</b>	

### 3. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi pada tahun 2022 dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Ke depan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.
- b. Terlambatnya mulai pelaksanaan pekerjaan akibat lambatnya proses revisi DIPA anggaran, serta kegiatan kontraktual yang terlambat dilelang serta kegiatan Swakelola;
- c. Kegiatan pemeliharaan berkala kontraktual sebagian terkendala kinerja penyedia jasa;
- d. Sarana dan prasarana penunjang untuk operasional dan pemeliharaan pada setiap daerah irigasi masih sangat minim;
- e. Masih belum optimalnya proses monitoring dan evaluasi kegiatan mulai dari tahap awal perencanaan, pelaksanaan maupun sampai kepada serah terima pekerjaan;
- f. Kompetensi petugas OP yang masih perlu ditingkatkan. Upaya Penyelesaian.

#### **4. Upaya Penyelesaian**

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
- b. Perlu penyesuaian anggaran terhadap AKNOP dengan persentase 60% lebih;
- c. Perlu kegiatan Pelatihan dan OJT untuk semua personil OP agar kompetensinya dapat lebih ditingkatkan;
- d. Sangat diperlukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang OP seperti peralatan kantor, pengadaan mobil pick up, alat berat dan lain-lain sebagainya;
- e. Meningkatkan koordinasi dan implementasi antar stakeholder terkait pengelolaan daerah irigasi;
- f. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat petani melalui penyuluhan penyuluhan serta pelatihan-pelatihan.

#### 4.6. Dinas Kelautan Dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 mendapatkan dana alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp.912.014.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.391.667.536,00 (42,95%) dan realisasi fisik sebesar (50%).

**Tabel 4.8**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan**  
**Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	894.314.000	373.967.536	41,82	Ditjen Perikanan Tangkap
2	Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	17.700.000	17.700.000	100	Ditjen Perikanan Tangkap
<b>TOTAL</b>		<b>912.014.000</b>	<b>391.667.536</b>	<b>42,95</b>	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2022

Adapun Capaian Kinerja Dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat cukup baik dimana anggaran yang diterima dapat di realisasikan kurang dari 50% dari target kinerja yang ditentukan oleh eselon I.

#### 1. Target

Tugas Pembantuan (03) Ditjen Perikanan Tangkap

a. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

- 1) Terlaksananya Penyediaan prasarana / fasilitas PNBP pasca produksi di PP Air Bangih.
- 2) Terlaksananya Penyediaan prasarana / fasilitas PNBP pasca produksi di PP Carocok.
- 3) Terlaksananya Penyediaan prasarana / fasilitas PNBP pasca produksi di PP Muara Anai.
- 4) Terlaksananya Penyediaan prasarana / fasilitas PNBP pasca produksi di PP Sikakap.
- 5) Terlaksananya Penyediaan prasarana / fasilitas PNBP pasca produksi di PP Tiku.

b. Program Dukungan Manajemen Target program / kegiatan :

- 1) Terlaksananya layanan operasional dan pemeliharaan kantor sebanyak 1 layanan.

#### 2. Realisasi

Tugas Pembantuan (03) Ditjen Perikanan Tangkap

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Realisasi Program/kegiatan :

- 1) Terlaksananya Penyediaan prasarana/fasilitas PNBP pasca produksi di PP Air Bangih berupa belanja modal peralatan dan mesin yaitu CCTV sebanyak 2 set, Troli sebanyak 10 unit, keranjang

sebanyak 200 unit dan pagar pembatas sepanjang 74 meter.

- 2) Terlaksananya Penyediaan prasarana/fasilitas PNBP pasca produksi di PP Carocok berupa belanja bahan ATK dan komputer sebanyak 1 paket serta belanja modal peralatan dan mesin yaitu CCTV sebanyak 2 set, Troli sebanyak 5 unit, keranjang sebanyak 200 unit dan pagar pembatas sepanjang 54 meter.
  - 3) Terlaksananya Penyediaan prasarana/fasilitas PNBP pasca produksi di PP Muara Anai berupa belanja langganan telepon serta belanja modal peralatan dan mesin Troli sebanyak 5 unit.
  - 4) Tidak terlaksananya Penyediaan prasarana/fasilitas PNBP pasca produksi di PP Sikakap.
  - 5) Tidak terlaksananya Penyediaan prasarana/fasilitas PNBP pasca produksi di PP Tiku.
- b. Program Dukungan Manajemen Realisasi program/kegiatan :
- 1) Terlaksananya layanan dukungan manajemen sebanyak 1 layanan.

### **3. Permasalahan**

Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan tahun 2022 secara umum dapat berjalan baik, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan masih ditemui adanya kendala teknis maupun non teknis, antara lain yaitu :

- a. Tidak terlaksananya Penyediaan prasarana/fasilitas PNBP pasca produksi di PP Muara Anai, Sikakap dan PP Tiku karena ketiga pelabuhan tersebut tidak memenuhi persyaratan di Juknis, selain itu aktivitas bongkar muat kapal perikanan di Pelabuhan juga tidak ada.

### **4. Upaya Penyelesaian**

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat agar meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan seperti menyiapkan CP/CL dari awal sehingga kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu dan efisien.
- b. Melakukan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi yang baik dengan Kabupaten/Kota dalam setiap pelaksanaan kegiatan, sehingga bila ditemukan masalah dan kendala pada kegiatan dapat diselesaikan dengan segera dan tidak sampai mempengaruhi target awal yang telah ditetapkan
- c. Percepatan pelaksanaan kegiatan serta meminimalisir revisi POK, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dan intens dengan pemerintah pusat, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya revisi anggaran dengan baik.
- e. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sehingga dapat



meminimalisir kemungkinan keterlambatan pekerjaan.

- f. Mengusulkan pengkajian untuk pembangunan dermaga di PP Tiku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua stakeholders pembangunan mulai dari Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), para pegiat ekonomi dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil-hasil capaian program yang dilaksanakan pada Tahun 2022 merupakan realisasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Barat beserta Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan RKPD Tahun 2022. LKPJ disusun sebagai implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu pada kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan utama belanja daerah pada APBD Tahun 2022 antara lain refocusing dan realokasi anggaran yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan beberapa keadaan kondisi yang mengharuskan dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan serta antar kelompok maupun jenis belanja. Beberapa kondisi tersebut adalah :

1. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk menurunkan laju penularan Covid-19 serta mengutamakan keselamatan masyarakat yang rentan meninggal, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900/7120/SJ dan juga memperhatikan Diktum kesebelas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2022.
2. Terdapatnya dana transfer dari Pemerintah Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan surat Bupati Sijunjung, Bupati Pasaman, Walikota Pariaman dan Walikota Bukittinggi. Pemerintah Kabupaten dan Kota memberikan Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022 untuk keberlangsungan dan penguatan program pendidikan pada tingkat SMA, SMK dan SLB yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi.
3. Pemenuhan kewajiban pembayaran utang bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2021.
4. Terdapatnya paket pekerjaan tahun anggaran 2021 yang proses pekerjaan telah selesai dilaksanakan, namun belum dilakukan pembayaran.

5. Pasca gempa bumi di Nagari Kajai Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat dan Nagari Malampah Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman tanggal 25 Februari 2022, menyebabkan daerah aliran sungai di selingkar Gunung Talamau berpotensi terjadinya aliran debris/galodo yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan yang lebih besar, maka sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk keperluan penyediaan anggaran mendesak dan penanganan darurat dilakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga.
6. Dalam rangka upaya menertibkan administrasi pengelolaan keuangan daerah, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan penyesuaian penempatan belanja subsidi dan alokasi anggaran, sebelumnya dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat namun menurut kodefikasi dan nomenklatur keuangan daerah serta kewenangannya, agar penempatan belanja tersebut dipindahkan penganggarannya pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.
7. Penyesuaian penempatan alokasi Dana Transfer sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.

Pada Tahun 2022 sudah banyak keberhasilan yang kita capai dan dirasakan oleh masyarakat hal ini dibuktikan melalui :

1. Percepatan dan efektifitas pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19 melalui program kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sekaligus memecahkan rekor 10 kali secara berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2021.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih Anugerah DEN Tahun 2022 dari Dewan Energi Nasional (DEN) untuk kategori Daerah Terbaik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2019-2050. Sekarang pemerintah provinsi juga tengah berupaya mengembangkan *green enery* di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk optimalisasi dan peningkatan kapasitas dan keberhasilan pemerintahan daerah diperlukan dukungan dalam penyempurnaan strategi penanganan dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sehingga dapat mewujudkan target kedua dari RPJMD Tahun 2021-2026. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang

ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan pada tahun selanjutnya.

Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 pada hakekatnya merupakan hasil sinergi antara Gubernur dan Wakil Gubernur serta tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing khususnya DPRD Provinsi Sumatera Barat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Orsospol, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat lainnya.

Semoga LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 ini dapat menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan rekomendasi serta catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Provinsi Sumatera Barat guna **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"**.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat. Amiin Ya Robbal 'Alamin. Terima Kasih.

Padang, 21 Maret 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT

